Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

LAPORAN KEUANGAN

BA
22
04

per 31 Desember 2024

AUDITED

151

Jl. Medan Merdeka Barat

www.dephub.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah Eselon I dari Kementerian Perhubungan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, andal dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance).

Jakarta, 14 Mei 2025

Direktur Jenderal Perhubungan Laut,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Muhammad Masyhud

NIP 19700622 199803 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi
Pernyataan Tanggung Jawab
Ringkasan Laporan
I Laporan Realisasi Anggaran
II Neraca
III Laporan Operasional
IV Laporan Perubahan Ekuitas
V Catatan Atas Laporan Keuangan
A. Penjelasan Umum
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
F. Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas

VI. Lampiran dan Daftar

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tingkat Eselon I selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I (UAPPA/B-E1) yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan 31 Desember 2025 Audited sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Jakarta, 19 Mei 2025

Direktur Jenderal Perhubungan Laut,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Muhammad Masyhud

NIP 19700622 199803 1 001

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.135.548.964.289 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp6.135.548.964.289 atau mencapai 114,87 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp5.341.168.720.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp14.025.760.546.412 atau mencapai 95,81 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp14.638.480.234.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2024 . Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp103.768.396.790.654 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp383.696.642.770; Aset Tetap (neto) sebesar Rp101.798.081.972.151; Properti Investasi (neto) sebesar Rp110.142.084.561; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp8.266.013.675 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp1.468.210.077.497.

Nilai Kewajiban sebesar Rp38.682.069.788.949 dan Nilai Ekuitas sebesar Rp65.086.327.001.705. Nilai Kewajiban dan Ekuitas seluruhnya sebesar Rp103.768.396.790.654.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.983.705.884.555 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp10.986.349.271.783 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp5.002.643.387.228, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp941.479.432.110 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp4.061.163.955.118.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 sebesar Rp61.107.756.550.568, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp4.061.163.955.118 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar 134.354.900.223 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 7.905.379.506.032 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp65.086.327.001.705

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan perdasarkan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

U R A I A N	Catatan	TA 2024		% thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	**B.1**				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	5.341.168.720.000	6.135.548.964.289	114,87	4.965.294.740.352
JUMLAH PENDAPATAN		**5.341.168.720.000**	**6.135.548.964.289**	**114,87**	**4.965.294.740.352**
BELANJA	**B.2**				
Belanja Pegawai	B.2.1	1.963.838.533.000	1.916.280.438.810	97,58	1.747.851.998.408
Belanja Barang	B.2.2	5.528.150.745.000	5.199.338.252.423	94,05	4.808.797.080.718
Belanja Modal	B.2.3	7.146.490.956.000	6.910.141.855.179	96,69	3.858.329.883.002
JUMLAH BELANJA		**14.638.480.234.000**	**14.025.760.546.412**	**95,81**	**10.414.978.962.128**

NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

U R A I A N	Catatan	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	343.335.765	10.435.154
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	3.833.028.968	2.955.684.302
Kas pada Badan Layanan Umum	C.3	87.735.768.529	22.407.069.426
Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan	C.4	10.155.656.455	6.331.209.536
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.5	-	115.500.000
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.6	139.202.493.060	89.947.100.660
Piutang Bukan Pajak	C.7	29.918.846.663	49.214.873.797
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.8	(27.341.686.425)	(25.820.490.782)
Piutang dari kegiatan Operasional BLU	C.9	171.555.000	4.940.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Dari Kegiatan Operasional BLU	C.10	(857.775)	(24.700)
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	C.11	-	24.000.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	C.12	-	(120.000)
Persediaan	C.13	139.678.502.530	123.412.178.462
Jumlah Aset Lancar		**383.696.642.770**	**268.602.355.855**
ASET TETAP			
Tanah	C.14	16.093.082.085.423	15.755.955.881.676
Peralatan dan Mesin	C.15	21.772.891.096.986	21.124.399.247.879
Gedung dan Bangunan	C.16	9.575.503.884.509	8.926.744.878.447
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.17	32.747.431.446.936	31.318.003.442.402
Aset Tetap Lainnya	C.18	39.226.232.009	36.469.633.954
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.19	7.993.981.354.706	4.310.457.963.524
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(25.740.472.275.581)	(22.917.950.649.871)
Aset Konsesi Jasa	C.21	42.619.859.818.278	38.494.595.371.765
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	C.22	(3.303.421.671.115)	(2.522.369.026.826)
Jumlah Aset Tetap		**101.798.081.972.151**	**94.526.306.742.950**
Properti Investasi			
Properti Investasi	C.23	116.515.789.056	116.515.789.056
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.24	(6.373.704.495)	(5.564.176.173)
Jumlah Properti Investasi		**110.142.084.561**	**110.951.612.883**
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.25	1.147.076.137	1.170.216.137
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C26	-	-
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.26	7.160.475.295	16.739.075.295
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.27	(41.537.757)	(89.546.457)
Jumlah Piutang Jangka Panjang		**8.266.013.675**	**17.819.744.975**
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.28	910.030.295.941	796.591.502.167
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.29	573.381.006.355	585.934.449.348
Aset Lain-lain	C.30	454.851.391.891	495.161.147.759
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.31	(470.052.616.690)	(518.257.789.114)
Jumlah Aset Lainnya		**1.468.210.077.497**	**1.359.429.310.160**
JUMLAH ASET		**103.768.396.790.654**	**96.283.109.766.823**

KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.32	494.507.162.770	524.376.794.596
Pendapatan Diterima Dimuka	C.33	2.120.171.663	873.204.991
Uang Muka dari KPPN	C.34	343.335.765	10.435.154
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.35	34.368.910	2.747.700
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**497.005.039.108**	**525.263.182.441**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Kewajiban Konsesi Jasa	C.36	38.185.064.749.841	34.650.090.033.814
JUMLAH KEWAJIBAN		**38.682.069.788.949**	**35.175.353.216.255**
EKUITAS			
Ekuitas	C.37	65.086.327.001.705	61.107.756.550.568
JUMLAH EKUTAS		**65.086.327.001.705**	**61.107.756.550.568**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**103.768.396.790.654**	**96.283.109.766.823**

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	5.983.705.884.555	4.926.183.075.468
Jumlah Pendapatan		**5.983.705.884.555**	**4.926.183.075.468**
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	1.916.226.131.582	1.746.799.638.749
Beban Persediaan	D.3	153.205.814.547	169.580.940.433
Beban Barang dan Jasa	D.4	3.407.498.194.573	3.182.584.237.747
Beban Pemeliharaan	D.5	1.029.087.750.974	878.031.617.388
Beban Perjalanan Dinas	D.6	607.258.804.956	561.089.535.990
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	78.900.402.303
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	3.871.521.020.159	3.555.966.902.717
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	1.551.554.992	560.422.395
Jumlah Beban		**10.986.349.271.783**	**10.173.513.697.722**
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		**(5.002.643.387.228)**	**(5.247.330.622.254)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.10	(238.616.223.457)	(175.915.098.038)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya	D.11	1.180.095.655.567	716.554.131.273
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		**941.479.432.110**	**540.639.033.235**
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		**(4.061.163.955.118)**	**(4.706.691.589.019)**
-		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		**(4.061.163.955.118)**	**(4.706.691.589.019)**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	**61.107.756.550.568**	**60.366.472.401.255**
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	**(4.061.163.955.118)**	**(4.706.691.589.019)**
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	**134.354.900.223**	**(211.707.435.754)**
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	4.682.594.395	2.574.916.930
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.2	7.731.394.095	8.144.660.395
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.3	234.546.916.768	(451.570.684.780)
Koreksi Lain-Lain	E.3.4	(112.606.005.035)	229.143.671.701
Jumlah		**134.354.900.223**	**(211.707.435.754)**
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	7.905.379.506.032	5.659.683.174.086
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		3.978.570.451.137	741.284.149.313
EKUITAS AKHIR	E.5	**65.086.327.001.705**	**61.107.756.550.568**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

Dasar hukum Entitas dan Rencana Strategis

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan merupakan Unit Eselon I di Kementerian Perhubungan yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No 8 Jakarta Pusat, mempunyai tugas dan fungsi dalam Menyelenggarakan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pelayaran.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merupakan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) dibawah Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPPA) Kementerian Perhubungan diharapkan dapat menyelenggarakan Proses Tata Kelola Keuangan yang disajikan secara akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk tujuan diatas, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berkomitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, transparan dan akuntabel melalui Sistem Akuntansi Pemerintah menuju Laporan Keuangan yang berkualitas dengan mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- Melaksanakan pembinaan berkelanjutan terhadap terhadap Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang tingkat Wilayah;
- Mengembangkan sistem pendukung yang profesional dan terpercaya;
- Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur Perhubungan.

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu Sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.

SAKTI terdiri dari Modul Administrasi, Modul Persediaan, Modul Bendahara, Modul Aset Tetap, Modul Anggaran, Modul Pembayaran, Modul Komitmen, Modul GLP dan Piutang. SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Jumlah entitas akuntansi di lingkup Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Pembinaan Akuntansi Instansi adalah 302

No	Kode	Uraian Wilayah	KP	KD	JUMLAH
1	0100	DKI Jakarta		9	9
2	0199	Kantor Pusat	6	0	6
3	0200	Jawa Barat		5	5
4	0300	Jawa Tengah		10	10
5	0500	Jawa Timur		15	15
6	0600	Aceh		11	11
7	0700	Sumatera Utara		17	17
8	0800	Sumatera Barat		5	5
9	0900	Riau		14	14
10	1000	Jambi		5	5
11	1100	Sumatera Selatan		3	3
12	1200	Lampung		6	6
13	1300	Kalimantan Barat		8	8
14	1400	Kalimantan Tengah		7	7
15	1500	Kalimantan Selatan		5	5
16	1600	Kalimantan Timur		10	10
17	1700	Sulawesi Utara		11	11
18	1800	Sulawesi Tengah		13	13
19	1900	Sulawesi Selatan		15	15
20	2000	Sulawesi Tenggara		9	9
21	2100	Maluku		16	16
22	2200	Bali		6	6
23	2300	NTB		8	8
24	2400	NTT		17	17
25	2500	Papua		13	13
26	2600	Bengkulu		3	3

27	2800	Maluku Utara		12	12
28	2900	Banten		3	3
29	3000	Bangka Belitung		5	5
30	3100	Gorontalo		4	4
31	3200	Kepulauan Riau		10	10
32	3300	Papua Barat		11	11
33	3400	Sulawesi Barat		4	4
34	3500	Kalimantan Utara		6	6
JUMLAH			**6**	**296**	**302**

Selain itu, terdapat 2 (dua) Satker yang telah ditetapkan menjadi Satuan Kerja BLU di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas serta praktek bisnis yang sehat, yaitu :

1. Satker BKKP sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.05/2021 Tanggal 15 Februari 2021
2. Disnav Tanjung Priok sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 73/KMK.05/2023 Tanggal 28 Februari 2023

Basis Akuntansi

A.3 BASIS AKUNTANSI

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarhal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemeirntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan yang merupakan entitas pelaporan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi bersadarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung sengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan	
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%

Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

  * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah;
  b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

  Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Aset Konsesi Jasa

d. Aset Konsesi Jasa

Menunjuk pada PMK 84/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa - Pemberi Kerja, Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang disediakan oleh mitra, yang dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain, merupakan aset yang dimiliki oleh mitra dan/atau aset yang disediakan oleh pemberi konsesi, yang merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi atau merupakan peningkatan aset pemberi konsesi. Aset konsesi jasa dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1) Aset Partisipasi Pemerintah, yaitu aset yang dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah, tetapi dioperasikan oleh pihak swasta atau badan usaha tertentu yang mendapatkan hak konsesi tersebut.
2) Aset Partisipasi Mitra, yaitu aset yang dimiliki bersama antara pemerintah dan mitra kerja yang melakukan pengerjaan atau pengoperasian proyek atau infrastruktur yang diberikan hak konsesi.

Kedua jenis aset konsesi jasa ini dicatat dan dilaporkan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku pada PSAP 16. Aset Partisipasi Pemerintah harus dicatat sebagai aset tetap dan disusutkan sesuai dengan umur ekonomisnya, sedangkan Aset Partisipasi Mitra harus dicatat sebagai Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra dan diamortisasi sesuai dengan masa perjanjian yang ditetapkan.

Selain itu, ada juga jenis aset konsesi jasa yang masih dalam pengerjaan atau konstruksi, yang disebut Aset Konsesi Jasa Pertisipasi Mitra dalam Pengerjaan dimana aset tersebut dicatat dengan akun terpisah dalam laporan keuangan pemerintah tanpa dilakukan penyusutan, dan harus diakui sebagai aset tetap setelah selesai dan siap digunakan. Komponen aset konsesi jasa disusutkan atau diamortisasi secara sistematis selama umur ekonomi teknis aset dimaksud, dan tidak dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa

Properti Investasi

e. Properti Investasi

Properti Investasi merupakan properti atau aset untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap

Piutang Jangka Panjang

f. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

g. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesai nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Dana yang dibatasi penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Berdasarkan PMK 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran. Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) digunakan untuk menampung pendanaan atas pekerjaan yang belum diserahterimakan pada akhir tahun anggaran. Pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang direncanakan untuk diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada KPPN sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan penyelesaiannya dilanjutkan melewati batas akhir tahun anggaran
- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  a. Kewajiban Jangka Pendek
     Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
     Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  b. Kewajiban Jangka Panjang
     Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesai nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	Pagu Awal 2024	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	5.341.168.720.000	5.341.168.720.000
Jumlah Pendapatan	**5.341.168.720.000**	**5.341.168.720.000**
Belanja		
Belanja Pegawai	1.801.662.258.000	1.963.838.533.000
Belanja Barang	4.791.843.831.000	5.528.150.745.000
Belanja Modal	2.956.520.355.000	7.146.490.956.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	**9.550.026.444.000**	**14.638.480.234.000**

Realisasi Pendapatan Rp6.135.548.964.289

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.135.548.964.289 atau mencapai 126,92 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp4.834.257.294.000. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	5.341.168.720.000	6.135.548.964.289	114,87
Jumlah	**5.341.168.720.000**	**6.135.548.964.289**	**114,87**

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 23,57 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	6.135.548.964.289	4.965.294.740.352	23,57
Jumlah	**6.135.548.964.289**	**4.965.294.740.352**	**23,57**

(Rincian dan Penjelasan Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Hal 44)

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp6.135.548.964.289

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing- masing sebesar Rp6.135.548.964.289 dan Rp4.965.294.740.352. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 23,57 dari TA 2023 . Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	6.135.548.964.289	4.965.294.740.352	23,57
Jumlah	**6.135.548.964.289**	**4.965.294.740.352**	**23,57**

Sedangkan Rincian PNBP Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNBP Lainnya Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	2.644.701.758	2.348.754.720	12,60

Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan dan Kenavigasian (BLU)	94.788.108.999	67.928.224.876	39,54
Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	155	-	-
Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	11.448.065.983	7.756.731.500	47,59
Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah	1.149.700.000	1.087.900.000	5,68
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	2.626.104.879	499.626.118	425,61
Pendapatan Lain-lain BLU	250.486.500	5.052.000	4.858,17
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	37.140.000	52.000.000	(28,58)
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	-	7.246.000	-
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	28.291.000	124.248.000	(77,23)
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	517.948.000	212.280.000	143,99
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	744.312.200	526.181.719	41,46
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	8.170.778.278	5.947.782.542	37,38
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	2.075.763.664	3.274.893.427	(36,62)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	25.834.288.065	21.789.445.574	18,56
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	2.253.503.600	1.695.869.310	32,88
Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan	279.132.000	500.000	55.726,40
Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	10.785.127.425	10.166.096.488	6,09
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	20.142.000	28.843.000	(30,17)
Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	-	96.391.075	(100,00)
Pendapatan Jasa Kepelabuhanan	3.557.374.914.907	2.926.078.027.206	21,57
Pendapatan Jasa Navigasi Pelayaran	724.507.251.791	738.842.057.707	(1,94)
Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	287.338.983.258	303.744.323.369	(5,40)
Pendapatan Jasa Navigasi Penerbangan	117.633.773.872	27.797.735.552	323,18
Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi	885.950.297.542	697.584.167.357	27,00
Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	200.174.588.759	112.271.268.970	78,30
Pendapatan Jasa Lainnya	29.540.000	288.000.000	(89,74)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	39.421.310	11.426.492	245,00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	30.000.000	43.000.000	(30,23)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	9.983.229.000	7.910.000.000	26,21
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	8.831.928.460	4.982.118.079	77,27

Pendapatan Denda Lainnya	15.790.604	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	148.385.500	463.132.970	(67,96)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	161.596.369.022	15.878.514.209	917,70
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	18.227.054.511	5.622.061.341	224,21
Pendapatan Anggaran Lain-lain	13.841.247	230.840.751	(94,00)
Jumlah	**6.135.548.964.289**	**4.965.294.740.352**	**23,57**

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 23,54% dibandingkan TA 2023. Kenaikan signifikan pada Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan yang mengalami kenaikan sebesar 55.726% senilai Rp.279.132.000,- dari Total Nilai TA. 2023 sebesar Rp.500.000,- nilai tersebut terdapat pada Satker UPP Calang berupa sewa Dermaga dan Tanah Bangunan Kantor Pemerintah sesuai BAST Objek Sewa Nomor AL.302/1/2/UPP.CLG/2024 tanggal 11 September 2024

Realisasi Belanja Rp14.025.760.546.412

B.2 Belanja

Realisasi Belanja pada TA 2024 adalah sebesar Rp14.025.760.546.412 atau 95,81 % dari anggaran belanja sebesar Rp.14.638.480.234.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2024

U R A I A N	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	1.963.838.533.000	1.916.280.438.810	97,58
Belanja Barang	5.528.150.745.000	5.199.338.252.423	94,05
Belanja Modal	7.146.490.956.000	6.910.141.855.179	96,69
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	**14.638.480.234.000**	**14.025.760.546.412**	**95,81**

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

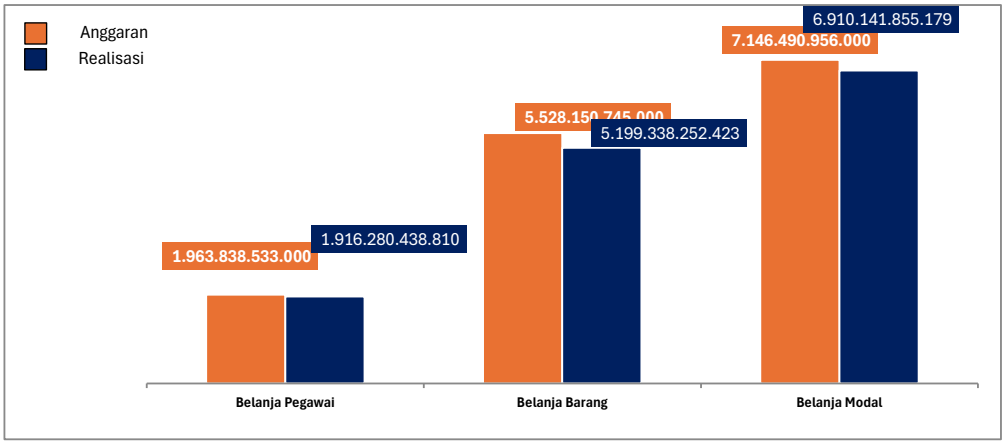

Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 34,67% . Berikut rincian realisasi belanja TA 2024 dan TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Pegawai	1.916.280.438.810	1.747.851.998.408	9,64
Belanja Barang	5.199.338.252.423	4.808.797.080.718	8,12
Belanja Modal	6.910.141.855.179	3.858.329.883.002	79,10
Jumlah	**14.025.760.546.412**	**10.414.978.962.128**	**34,67**

Perbandingan realisasi belanja antara posisi 31 Desember 2024 dengan 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.609.364.142.811 atau 34,66% Jika dirinci sesuai masing-masing belanja maka dapat disampaikan bahwa untuk realisasi belanja pegawai mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 168.428.440.402 atau 9,64%, Belanja Barang mengalami kenaikan sebesar Rp.390.533.067.705 atau sekitar 8,12% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun 2023, sedangkan untuk realisasi belanja modal mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp.3.051.811.972.117 atau sekitar 79,10%

Realisasi Belanja Pegawai Rp1.916.280.438.810

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.916.280.438.810 dan Rp1.747.851.998.408. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 9,64 % dari TA 2023.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Gaji Pokok PNS	673.712.292.374	618.090.527.701	9,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.983.189	9.481.358	58,03
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	51.150.458.277	48.391.786.680	5,70
Belanja Tunj. Anak PNS	16.211.889.322	15.434.100.230	5,04
Belanja Tunj. Struktural PNS	8.547.975.089	8.606.185.000	(0,68)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	823.157.000	790.310.000	4,16
Belanja Tunj. PPh PNS	4.397.730.996	711.869.087	517,77
Belanja Tunj. Beras PNS	40.003.896.730	40.896.159.100	(2,18)
Belanja Uang Makan PNS	107.239.715.400	108.405.614.050	(1,08)
Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	9.227.682.891	11.208.008.580	(17,67)
Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	465.625.000	474.324.380	(1,83)
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	3.976.950.000	3.956.670.000	0,51
Belanja Tunjangan Umum PNS	32.411.052.500	32.070.360.000	1,06
Belanja Gaji Pokok PPPK	11.601.639.800	641.299.844	1.709,08
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	208.232	7.021	2.865,85
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	556.228.570	25.603.510	2.072,47
Belanja Tunjangan Anak PPPK	99.018.322	4.606.704	2.049,44
Belanja Tunjangan Struktural PPPK	3.510.400	-	-
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	140.983.000	49.563.148	184,45
Belanja Tunjangan Beras PPPK	566.646.280	31.502.700	1.698,72
Belanja Uang Makan PPPK	2.295.616.400	133.304.000	1.622,09
Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PPPK	126.571.289	1.188.000	10.554,15
Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK	1.000.000	-	-
Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	45.300.000	4.250.000	965,88
Belanja Tunjangan Umum PPPK	730.000	-	-
Belanja Uang Lembur	96.950.736.800	88.297.784.400	9,80
Belanja Uang Lembur PPPK	1.054.012.950	30.101.000	3.401,59
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	841.853.512.427	769.262.507.242	9,44
BelanjaPegawaiTunjanganKhusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	13.046.540.457	608.662.550	2.043,48
Jumlah Belanja kotor	**1.916.525.663.695**	**1.748.135.776.285**	**9,63**
Pengembalian Belanja Pegawai	245.224.885	283.777.877	(13,59)
Jumlah Belanja	**1.916.280.438.810**	**1.747.851.998.408**	**9,64**

Kenaikan signifikan rata - rata terjadi pada komponen Gaji dan Tunjangan PPPK yang disebabkan karena penambahan jumlah PPPK Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2024. selain itu, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang mewajibkan instansi pemerintah untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN per Desember 2024.

Realisasi Belanja Barang Rp5.199.338.252.423

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.199.338.252.423 dan Rp4.808.797.080.718. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 8,12% dari Realisasi TA 2023.

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Barang Operasional	433.872.684.958	535.332.665.573	(18,95)
Belanja Barang Non Operasional	2.407.080.445.110	2.272.408.506.027	5,93
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	537.903.933	503.852.272	6,76
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	70.350.276.166	99.985.297.532	(29,64)
Belanja Jasa	576.116.613.642	390.371.698.347	47,58
Belanja Pemeliharaan	1.089.391.270.309	930.057.852.782	17,13
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	588.611.948.943	539.448.764.082	9,11
Belanja Perjalanan Luar Negeri	17.347.452.146	19.507.355.791	(11,07)
Belanja Barang BLU	16.619.527.394	24.151.917.350	(31,19)
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**5.199.928.122.601**	**4.811.767.909.756**	**8,07**
Pengembalian Belanja	589.870.178	2.970.829.038	(80,14)
Jumlah Belanja	**5.199.338.252.423**	**4.808.797.080.718**	**8,12**

Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 8,12% dari Realisasi TA 2023. Kenaikan belanja barang yang memiliki nilai siginifikan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Jasa mengalami kenaikan senilai Rp185.734.853.173 atau senilai 47,58% jika dibandingkan realisasi belanja jasa Tahun 2023, hal ini dikarenakan adanya percepatan pelaksanaan atas kontrak jasa lainnya pada TA. 2024

2. Realisasi Belanja Pemeliharaan mengalami kenaikan senilai Rp.159.333.417.527 atau senilai 17,13% jika dibandingkan realisasi belanja pemeliharaan Tahun 2023. Kenaikan ini merupakan kebutuhan atas Docking kapal negara beserta Bahan Bakar Minyak yang dilaksanakan pada TA. 2024

Realisasi Belanja Modal Rp6.910.141.855.179

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6.910.141.855.179 dan Rp3.858.329.883.002. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 79,10% dibandingkan TA 2023. Jika dilihat dari tabel dibawah ini, dapat diketahui bahwa Belanja Modal Tanah mengalami kenaikan senilai 23.661.992.614 (1.121%), Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan senilai 441.856.171.281 (113,95%), Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan senilai 291.883.762.701 (94,37%) kemudian diikuti kenaikan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai 2.364.876.151.625 atau sebesar 81,91% dibandingkan realisasi belanja modal tahun sebelumnya. Namun sebaliknya untuk realisasi belanja modal lainnya dan belanja modal BLU Tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 64.695.238.092 (27,08%) dan 5.745.202.580 (17,17%)

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Tanah	25.718.186.280	2.106.193.666	1.121,07
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	829.624.448.863	387.768.277.582	113,95
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	601.180.112.159	309.296.349.458	94,37
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.251.985.591.051	2.887.109.439.426	81,91
Belanja Modal Lainnya	174.252.405.383	238.947.643.475	(27,08)
Belanja Modal BLU	27.717.873.858	33.463.076.438	(17,17)
Jumlah Belanja Kotor	**6.910.478.617.594**	**3.858.690.980.045**	**79,09**
Pengembalian Belanja	336.762.415	361.097.043	(6,74)
Jumlah Belanja	**6.910.141.855.179**	**3.858.329.883.002**	**79,10**

Realisasi Belanja Modal Tanah Rp25.718.186.280

B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp25.718.186.280 dan Rp2.106.193.666. Realisasi tersebut pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 1.121,07% dibandingkan TA 2023.

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Tanah	25.509.540.280	1.100.025.000	2.219,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	208.646.000	6.000.000	3.377,43
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	-	24.700.000	(100,00)
Belanja Modal Tanah atas Pengadaan Tanah PSN yang dilakukan oleh LMAN	-	975.468.666	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	**25.718.186.280**	**2.106.193.666**	**1.121,07**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**25.718.186.280**	**2.106.193.666**	**1.121,07**

Realisasi Belanja Modal Tanah pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 24.409.515.280 atau 2.219% dibandingkan TA 2023. kenaikan tersebut terdapat pada satker KSOP Tanjung Emas yang merealisasikan belanja modal tanah sebesar Rp. 23.776.460.000 untuk pembelian tanah seluas 4.708 m2 yang berlokasi di Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang sesuai Akta Pelunasan No. 06 tanggal 04 Desember 2024 dengan sertifikat hak pakai No. 11.01.000021971.0

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp829.624.448.863

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp829.624.448.863 dan Rp387.768.277.582, mengalami kenaikan sebesar 113,95 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	767.620.826.563	379.220.606.334	102,42
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	37.282.000	4.001.000	831,82
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	789.965.500	245.226.190	222,14
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	371.437.650	167.740.550	121,44
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	60.804.937.150	8.130.703.508	647,84
Jumlah Belanja Kotor	**829.624.448.863**	**387.768.277.582**	**113,95**
Pengembalian	90.000	-	-
Jumlah Belanja	**829.624.358.863**	**387.768.277.582**	**113,95**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp601.180.112.159

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp601.180.112.159 dan Rp309.296.349.458 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 94,30% dibandingkan Realisasi TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	553.099.762.860	308.755.648.096	79,14
Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	41.735.184.000	-	-
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor	-	103.868.510	(100,00)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung	786.786.870	74.619.700	954,40
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	196.216.100	362.213.152	(45,83)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	5.362.162.329	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**601.180.112.159**	**309.296.349.458**	**94,37**
Pengembalian Belanja	219.338.330	-	-
Jumlah Belanja	**600.960.773.829**	**309.296.349.458**	**94,30**

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp5.251.985.591.051

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.251.985.591.051 dan Rp2.887.109.439.426, mengalami kenaikan sebesar 81,88% dibandingkan Realisasi TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	5.251.985.591.051	2.886.010.649.353	81,98
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan	-	4.560.000	(100,00)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	-	891.050.247	(100,00)
Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan	-	101.829.826	(100,00)
Belanja Modal Jaringan	-	101.350.000	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	**5.251.985.591.051**	**2.887.109.439.426**	**81,91**
Pengembalian Belanja	1.534.775.558	361.097.043	325,03
Jumlah Belanja	**5.250.450.815.493**	**2.886.748.342.383**	**81,88**

Realisasi Belanja Modal Lainnya Rp174.252.405.383

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp174.252.405.383 dan Rp238.947.643.475, mengalami penurunan sebesar 27,08 % dibandingkan Realisasi TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Lainnya	174.252.405.383	238.947.643.475	(27,08)
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**174.252.405.383**	**238.947.643.475**	**(27,08)**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**174.252.405.383**	**238.947.643.475**	**(27,08)**

Realisasi Belanja Modal BLU Rp27.717.873.858

B.2.3.6 Belanja Modal BLU

Realisasi Belanja Modal BLU per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp27.717.873.858 dan Rp33.463.076.438. Realisasi tersebut pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar 17,17% dibandingkan TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal BLU Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	26.561.227.170	32.810.908.738	(19,05)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	862.193.888	492.327.700	75,13
Belanja Modal Lainnya - BLU	294.452.800	159.840.000	84,22
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**27.717.873.858**	**33.463.076.438**	**(17,17)**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**27.717.873.858**	**33.463.076.438**	**(17,17)**

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp343.335.765

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.343.335.765 dan Rp.10.435.154. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
UPP Bintuni	46.685.800	-
UPP Soa Sio	20.831.000	-
UPP Jailolo	12.866.000	-
UPP Raja Ampat	257.562.940	-
KSOP Kepulauan Seribu	5.390.024	-
UPP Weda	1	-
UPP Belang - Belang	-	1.847.754
UPP Waren	-	4.712.500
KSOP Kotabaru - Batulicin	-	3.874.900
-	-	-
Jumlah	**343.335.765**	**10.435.154**

Kas di Bendahara Pengeluaran terdapat pada Satuan Kerja sebagai berikut:
1. UPP Bintuni, disetor pada tanggal 08-1-2025 sesuai NTPN Nomor A89837NAS3MQFLU8
2. UPP Soa Sio, disetor pada tanggal 07-1-2025 sesuai NTPN Nomor 4DF171GCD9LQ3
3. UPP Jailolo, disetor pada tanggal 16-1-2025 sesuai NTPN Nomor C3B4D45KSPFL5LAB
4. UPP Raja Ampat, disetor pada tanggal 10-1-2025 sesuai NTPN Nomor 9312D6QTC94NJV87
5. UPP Weda, disetor pada tanggal 07-1-2025 sesuai NTPN Nomor 5E9B76QTC944HBSU
6. KSOP Kepulauan Seribu, disetor pada tanggal 02-1-2025 sesuai NTPN Nomor F9EAE7NAS3L184F4 dan DC8476QTC96GREJ6 tanggal 15-01-2025

(Rincian dan Penjelasan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Hal 85)

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp3.833.028.968

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3.833.028.968 dan Rp2.955.684.302. Kas Lainnya dan Setara Kas yakni Kas Lainnya merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	3.763.629.263	2.779.090.402
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	35.647.610	176.593.900
Kas Lainnya di BLU	33.752.095	-
Jumlah	**3.833.028.968**	**2.955.684.302**

1. Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah terdapat pada Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Kenavigasian berupa nilai saldo pada rekening Hibah senilai USD. 232.869,09 dengan nilai kurs tengah BI saat pelaporan senilai Rp 16.162,00 sehingga diperoleh nilai saldo Kas Lainnya di K/L dari Hibah sebesar 3.763.629.263.

2. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran terdapat pada KSOP Utama Makassar sebesar Rp. 1.278.700,- berupa Belanja Akun 51 yang terkena retur oleh pihak Bank sehingga dibayarkan pada bulan januari 2025. selain itu, terdapat Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada UPP Namrole sebesar Rp. 34.368.910,- berupa Utang Pajak Belum di Setor yang telah disetorkan pada TA. 2025

3. Kas Lainnya di Badan Layanan Umum (BLU) terdapat pada Distrik Navigasi Tanjung Priok sebesar Rp. 33.752.095,- berupa Jaminan Bahan Bakar Minyak Solar Industri KM. Edam dan KM. Enggano sebesar Rp. 33.734.800,- dan Bunga Bank yang belum di sahkan dari Rekening Dana Kelola sebesar Rp. 17.295,-

Kas pada Badan Layanan Umum Rp87.735.768.529

C.3 Kas pada Badan Layanan Umum

Saldo Kas pada Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp87.735.768.529 dan Rp22.407.069.426. Rincian Kas pada Badan Layanan Umum disajikan sebagai berikut

Rincian Kas pada Badan Layanan Umum Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Satker BKKP	3.914.247.613	3.824.446.919,00
Disnav Tanjung Priok	27.321.520.916	18.582.622.507,00
-	-	-
Setara Kas Lainnya BLU	-	-
Disnav Tanjung Priok	56.500.000.000	-
-	-	-
Jumlah	**87.735.768.529**	**22.407.069.426**

Setara Kas Lainnya BLU pada Disnav Tanjung Priok sebesar Rp. 56.500.000.000 berupa Deposito Berjangka selama satu bulan dengan suku bunga 6,5% per tahun

Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan Rp26.655.656.455

C.4 Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan

Saldo Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp26.655.656.455 dan Rp6.331.209.536. Rincian Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan disajikan sebagai berikut

Rincian Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Disnav Tanjung Priok	16.500.000.000	6.331.209.536
Satker BKKP	10.155.656.455	-
Jumlah	**26.655.656.455**	**6.331.209.536**

Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan berupa Investasi jangka pendek/ deposito BLU pada :
1. Satker BKKP sebesar Rp.6.331.209.536,- pada Bank BRI dengan Jangka Waktu 12 Bulan dan Rp.3.824.446.919,- dengan Jangka Waktu 6 Bulan dan Bunga 5% per Tahun
2. Disnav Tanjung Priok Rp.16.500.000.000,- pada Bank BRI dengan Jangka waktu 3 Bulan dan Bunga 5,5% per Tahun

(Rincian dan Penjelasan Kas di Bendahara pada Hal 84)

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Rp0

C.5 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp115.500.000. Uang Muka Belanja (prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) adalah sebagai berikut :

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	-	115.500.000
Jumlah	**-**	**115.500.000**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp139.202.493.060

C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Nilai Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp139.202.493.060 dan Rp89.947.100.660. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

Uraian	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Bali	599.816.831	640.174.936
Bangka Belitung	231.871.582	198.013.906
Banten	4.796.786.629	4.501.641.352
Bengkulu	46.311.275	716.475.781
DKI Jakarta	41.355.641.735	22.467.037.496
Gorontalo	201.733.398	168.067.704
Jambi	244.684.284	201.564.340
Jawa Barat	1.183.101.059	941.817.351
Jawa Tengah	5.039.554.049	4.348.663.965
Jawa Timur	19.960.470.369	5.589.385.087
Kalimantan Barat	1.457.039.304	1.141.422.029
Kalimantan Selatan	8.598.717.255	8.643.766.462
Kalimantan Tengah	495.151.915	616.986.321
Kalimantan Timur	24.364.050.925	15.497.014.492
Kalimantan Utara	989.939.743	661.181.496
Kepulauan Riau	1.823.658.911	1.837.494.851
Lampung	1.718.171.388	2.497.910.475
Maluku	25.716.236	429.153.958
Maluku Utara	1.187.947.885	664.971.316
Nanggroe Aceh Darussalam	1.301.746.435	555.262.310
Nusa Tenggara Barat	405.895.202	381.436.888
Nusa Tenggara Timur	394.938.967	298.557.358
Papua	870.048.003	501.256.274
Papua Barat	1.207.638.492	348.677.563
Riau	4.081.823.307	3.412.370.515
Sulawesi Barat	17.784.308	40.250.133
Sulawesi Selatan	2.018.096.864	580.734.084
Sulawesi Tengah	3.186.428.712	2.073.831.427
Sulawesi Tenggara	524.528.747	677.355.198
Sulawesi Utara	1.010.886.546	714.903.483
Sumatera Barat	802.810.172	763.242.466
Sumatera Selatan	3.088.488.248	2.445.581.409
Sumatera Utara	5.971.014.284	5.390.898.234
Jumlah	**139.202.493.060**	**89.947.100.660**

(Rincian dan Penjelasan Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada Hal 48)

Piutang Bukan Pajak Rp29.918.846.663

C.7 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp29.918.846.663 dan Rp49.214.873.797. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2024

URAIAN	TAHUN 2024	KLASIFIKASI
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
KSOP Teluk Bayur	931.395.833	Lancar
KSOP Utama Makassar	200.945.325	Lancar
UPP Namlea	93.750.000	Lancar
UPP Satui	40.850.000	Lancar
UPP Kolonedale	121.062.300	Lancar
UPP Dabo Singkep	54.230.400	Lancar
KSOP Utama Makassar	393.142.568	Kurang Lancar
KSOP Kuala Cinaku	7.672.500	Kurang Lancar

KSOP Tanjung Balai Karimun	470.309.010	Kurang Lancar
UPP Kolaka	188.989.200	Kurang Lancar
KSOP Kepulauan Seribu	185.725.000	Kurang Lancar
UPP Dabo Singkep	41.766.200	Diragukan
UPP Raja Ampat	41.305.209	Macet
KSOP Manado	7.200.000	Macet
Kantor Pusar Ditjen Hubla	5.456.966.013	Macet
KSOP Tegal	4.120.800	Macet
KSOP Kuala Langsa	533.247.720	Macet
KSOP Tanjung Pinang	33.763.000	Macet
UPP Tarempa	15.507.665.493	Macet
UPP Kintap	391.104.000	Macet
KSOP Utama Tanjung Perak	3.255.390.576	Macet
UPP Amahai	87.500.000	Macet
KSOP Banten	23.750.000	Macet
UPP Labuhan Maringgai	38.400.000	Macet
UPP Pomako I / Pomako II	180.754.100	Macet
KSOP Bakauheni	4.000.000	Macet
KSOP Teluk Bayur	1.024.535.416	Macet
Jumlah	**29.918.846.663**	**-**

(Rincian dan Penjelasan Piutang PNBP pada Hal 51)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Rp-27.341.686.425

C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak (TPA) per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp-27.341.686.425 dan Rp-25.820.490.782. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang bukan pajak, Nilai penyisihan piutang tak tertagih ditentukan oleh kualitas piutang, tarif atau presentase penyisihan, adanya agunan atau barang jaminan, serta penerbitan surat tagihan. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	1.442.233.858	0,5%	7.211.169
Kurang Lancar	1.245.838.278	10%	124.583.828
Diragukan	41.766.200	50%	20.883.100
Macet	27.189.008.327	100%	27.189.008.327
Jumlah	**29.918.846.663**		**27.341.686.425**

Piutang dari kegiatan Operasional BLU Rp-171.555.000

C.9 Piutang dari kegiatan Operasional BLU

Piutang dari kegiatan Operasional BLU per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp171.555.000 dan Rp4.940.000. Piutang dari kegiatan Operasional BLU merupakan jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLU dan/atau hak BLU yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat per janjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Dari Kegiatan Operasional BLU Rp857.775

C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Dari Kegiatan Operasional BLU

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Dari Kegiatan Operasional BLU per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp-857.775 dan Rp-24.700. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Dari Kegiatan Operasional BLU merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang BLU, Nilai penyisihan piutang tak tertagih ditentukan oleh kualitas piutang, tarif atau presentase penyisihan, adanya agunan atau barang jaminan, serta penerbitan surat tagihan.

Rincian Piutang BLU Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Kegiatan Operasional			
Lancar	171.555.000	0,5%	857.775
Jumlah	**171.555.000**		**857.775**

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU Rp0

C.11 Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp24.000.000.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU Rp0

C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp-120.000.

Persediaan Rp139.678.502.530

C.13 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp139.678.502.530 dan Rp123.412.178.462. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

Jenis	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Barang Konsumsi	61.929.060.243	56.331.139.138
Amunisi	490.777.348	176.447.308
Bahan untuk Pemeliharaan	1.872.342.650	1.585.417.134
Suku Cadang	31.377.589.946	18.761.938.117
Bahan Baku	680.339.581	17.850.027.494
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	73.774.800	101.131.600
Persediaan Lainnya	43.254.617.962	28.606.077.671
Jumlah	**139.678.502.530**	**123.412.178.462**

Tanah Rp16.093.082.085.423

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp16.093.082.085.423 dan Rp15.755.955.881.676. Mutasi nilai Tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	**15.755.955.881.676**
Mutasi tambah :	
	-
Saldo Awal	302.214.410.021
Pembelian	32.784.720.038
Transfer Masuk	111.121.321.596
Hibah (Masuk)	13.305.632.030
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1.587.518.018
Reklasifikasi Masuk	3.654.244.000
Perolehan Lainnya	119.068.213.764
Penyelesaian Pembangunan Langsung	25.000.000
Pengembangan Nilai Aset	23.825.416.000
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	50.078.784.038
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	669.413.000
Mutasi kurang :	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(161.179.895.900)
Penghapusan	(22.442.378.000)
Transfer Keluar	(87.721.858.420)
Hibah (Keluar)	(39.727.000)
Reklasifikasi Keluar	(24.170.878.664)
Koreksi Pencatatan	(11.637.773.091)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(14.015.957.683)
Saldo per 31 Desember 2024	**16.093.082.085.423**

1) Mutasi tambah Tanah yang bernilai signifikan berasal dari transaksi Saldo awal yaitu berupa tanah bangunan terminal laut Pada UPP Tobelo sesuai dengan Surat Keterangan Nomor PL.002/1/4/UPP.TBL-2025 dengan nilai Rp147.029.926.238,-

2) Mutasi kurang Tanah yang bernilai signifikan berasal dari transaksi koreksi pencatatan nilai berkurang berupa bangunan dermaga pada UPP Tobelo sesuai dengan Surat Keterangan Nomor PL.002/1/4/UPP.TBL-2025 dengan nilai Rp147.029.926.238,-

(Rincian dan Penjelasan Tanah pada Hal 93)

Peralatan dan Mesin Rp21.772.891.096.986

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp21.772.891.096.986 dan Rp21.124.399.247.879. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	**21.124.399.247.879**
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	108.987.987.065
Pembelian	345.629.670.569
Transfer Masuk	355.471.666.087
Hibah (Masuk)	690.131.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	271.119.621.439
Pembatalan Penghapusan	30.605.705.118
Reklasifikasi Masuk	20.035.197.120
Perolehan Lainnya	94.419.441.063
Penyelesaian Pembangunan Langsung	839.900.000
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	557.891.820
Batal Transfer Keluar	2.959.277.170
Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/ Sebaliknya	507.000
Pengembangan Nilai Aset	62.225.299.837
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	40.809.680.021
Pengembangan Melalui KDP	149.524.430.546
Koreksi Susulan	775.516.000
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	1.739.452.870
	-
Mutasi Kurang:	
Transaksi Normalisasi BMN	(252.845.200)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(40.916.228.325)
Penghapusan	(221.377.327)
Transfer Keluar	(358.012.918.483)
Hibah (Keluar)	(1.611.108.000)
Reklasifikasi Keluar	(98.116.914.997)
Koreksi Pencatatan	(105.011.119.440)
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(13.526.019.257)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(220.230.994.589)
Saldo per 31 Desember 2024	**21.772.891.096.986**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(15.901.306.992.810)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	**5.871.584.104.176**

1) Mutasi tambah Peralatan dan Mesin yang bernilai signifikan berasal dari transaksi penyelesaian pembangunan dengan KDP Pada Satker Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai berupa Rigid Inflatable Boat (RIB) Kelas II senilai Rp45.640.045.900,-

2) Mutasi kurang Peralatan dan Mesin yang bernilai signifikan berasal dari transaksi transfer keluar berupa Kapal RHAB (Rigid Hull Alumunium Boat) Pada Satker Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai kepada 20 Satker Ditjen Hubla senilai Rp120.460.686.992,-

Gedung dan Bangunan Rp9.575.503.884.509

C.16 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp9.575.503.884.509 dan Rp8.926.744.878.447. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	**8.926.744.878.447**
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	154.222.151.307
Pembelian	50.587.786.270
Transfer Masuk	145.206.007.366
Hibah (Masuk)	7.108.915.700
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	246.291.441.518
Pembatalan Penghapusan	2.087.000
Reklasifikasi Masuk	211.549.907.839
Perolehan Lainnya	257.203.920.637
Penyelesaian Pembangunan Langsung	4.697.740.553
Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/ Sebaliknya	2
Pengembangan Nilai Aset	10.531.297.153
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	63.453.718.713
Pengembangan Melalui KDP	76.745.459.531
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	8.626.321.604
	-
Mutasi Kurang:	
Transaksi Normalisasi BMN	-
Koreksi Susulan	194.305.730
Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi	-
Koreksi BMN ditemukan Kembali	-
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(72.424.963.174)
Penghapusan Tindak Lanjut Normalisasi	-
Penghapusan	(4.212.105.000)
Transfer Keluar	(143.009.838.116)
Hibah (Keluar)	(194.719.000)
Reklasifikasi Keluar	(145.017.920.534)
Koreksi Pencatatan	(172.950.865.212)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(49.851.643.825)
Saldo per 31 Desember 2024	**9.575.503.884.509**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(2.156.157.776.380)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	**7.419.346.108.129**

1) Transaksi Saldo Awal kesalahan pencatatan dermaga NUP 3 menjadi Bangunan Terbuka Lainnya sesuai Surat Keterangan Reklasifikasi Barang Milik Negara Nomor PL.303/6/18/KSOP.KDI/2024 Tanggal 6 Mei 2024

2) Mutasi kurang Gedung dan Bangunan yang bernilai signifikan berasal dari transaksi koreksi pencatatan dalam rangka pendetailan pada UPP Sinjai sesuai dengan Surat Keterangan Nomor PL.301/1/20/UPP.SJ/2024 Tanggal 7 Juni 2024 senilai Rp69.997.604.200,-

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp32.747.431.446.936

C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.32.747.431.446.936 dan Rp.31.318.003.442.402. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	**31.318.003.442.402**
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	156.285.555.492
Pembelian	77.461.756.950
Transfer Masuk	613.996.656.317
Hibah (Masuk)	3.080.712.269
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1.144.599.815.401
Reklasifikasi Masuk	408.467.731.697
Penyelesaian Pembangunan Langsung	1.055.169.405
Perolehan Lainnya	275.795.521.643
Pengembangan Nilai Aset	9.803.294.800
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	499.606.689.208
Pengembangan Melalui KDP	998.119.880.304

Koreksi BMN ditemukan Kembali	-
	-
Mutasi Kurang:	
Koreksi Susulan	128.720.871.041
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(754.653.555.916)
Penghapusan	(1.115.190.190)
Transfer Keluar	(738.908.826.277)
Hibah (Keluar)	(30.601.877.000)
Reklasifikasi Keluar	(376.713.463.358)
Koreksi Pencatatan	(746.415.300.454)
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(1.049.474.450)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(238.107.962.348)
Saldo per 31 Desember 2024	**32.747.431.446.936**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(7.682.910.630.266)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	**25.064.520.816.670**

1) Mutasi tambah jalan yang bernilai signifikan berasal dari transaksi penyelesaian pembangunan dengan KDP yaitu berupa dermaga sesuai Surat Keterangan KPB Peningkatan Fungsi Kepelabuhanan No. 013/PFKP/SK/2024 tgl 17 Mei 2024 011/PFKP/SK/2024 tgl 17 Mei 2024 dan 012/PFKP/SK/2024 tgl 17 Mei 2024 senilai Rp722.288.696.502-

2) Mutasi kurang jalan yang bernilai signifikan berasal dari transaksi transfer keluar yaitu berupa dermaga dari Satker Kepelabuhanan Pusat kepada KSOP Teluk Palu sesuai dengan BASTA No. 001/PFKP/BASTA/ 2024 tgl 21 Mei 2024 BASTA No. 001/PFKP/BASTA/ 2024 tgl 21 Mei 2024 dan BASTA No. 001/PFKP/BASTA/ 2024 tgl 21 Mei 2024 Rp399.183.489.745-

3) Transfer masuk dari Satker UPP Kolonedale sesuai BAST Nomor PL.301/302/10/UPP.KDL.2024 Hal Serah Terima Aset Pelabuhan Bungku yang terdampak Peraturan PM 17 Tahun 2023

4) Mutasi kurang irigasi yang bernilai signifikan berasal dari transaksi reklasifikasi keluar berupa bangunan dermaga pada UPP Tobelo sesuai dengan Surat Keterangan Nomor PL.002/1/8/UPP.TBL-2024 dengan nilai Rp119.138.634.380,-

5) Transfer masuk dari Satker Fungsi Peningkatan Kepelabuhanan Pusat atas pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pelabuhan Donggala dan Wani sesuai dengan BAST Nomor 003/PFKP/BASTA/2024 dan 002/PFKP/BASTA/2024

6) Mutasi kurang jaringan yang bernilai signifikan berasal dari transaksi transfer keluar berupa jaringan listrik lainnya dari Satker Peningkatan Fungsi Kepelabuhanan Pusat kepada KSOP Teluk Palu sesuai dengan BASTA No. 001/PFKP/BASTA/ 2024 tgl 21 Mei 2024 BASTA No. 001/PFKP/BASTA/ 2024 tgl 21 Mei 2024 dan BASTA No. 001/PFKP/BASTA/ 2024 tgl 21 Mei 2024 senilai Rp12.002.597.656-

Aset Tetap Lainnya Rp39.226.232.009

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.39.226.232.009 dan Rp.36.469.633.954. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	**36.469.633.954**
Mutasi tambah:	
Pembelian	45.254.700
Transfer Masuk	1.932.437.620
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	915.650.715
Reklasifikasi Masuk	2.997.000
Perolehan Lainnya	2.170.869.823
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	150.000.000
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	32.420.000
Mutasi Kurang:	
Transfer Keluar	(1.932.437.620)
Reklasifikasi Keluar	(345.200.183)
Koreksi Pencatatan	(152.997.000)
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(53.573.000)

Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(8.824.000)
Saldo per 31 Desember 2024	**39.226.232.009**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(96.876.125)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	**39.129.355.884**

1) Transfer masuk dari Satker Fungsi Peningkatan Kepelabuhanan Pusat atas pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pelabuhan Donggala dan Wani sesuai dengan BAST Nomor 003/PFKP/BASTA/2024 dan 002/PFKP/BASTA/2024

2) Mutasi kurang Aset Tetap Lainnya yang bernilai signifikan berasal dari transaksi transfer keluar yaitu berupa Jalan Irigasi dan jaringan Dalam Renovasi dari Satker Peningkatan Fungsi Kepelabuhanan Pusat kepada KSOP Teluk Palu sesuai dengan BASTA No. BASTA No. 001/PFKP/BASTA/ 2024 tgl 21 Mei 2024 dan BASTA No. 001/PFKP/BASTA/ 2024 tgl 21 Mei 2024 senilai Rp1.932.437.620-

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp7.993.981.354.706

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.7.993.981.354.706 dan Rp.4.310.457.963.524. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	**4.310.457.963.524**
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP	590.913.016.778
Pengembangan KDP	5.917.253.118.343
Koreksi Nilai KDP	325.346.809.894
Transfer Masuk KDP	31.648.701.437
Perolehan Lainnya KDP	48.695.294.616
Reklasifikasi Masuk KDP	253.006.184.269
	-
Mutasi Kurang:	
Penghapusan/ Penghentian KDP	(31.912.866.209)
Transfer Keluar KDP	(31.648.701.437)
Reklasifikasi Keluar KDP	(254.324.652.801)
Koreksi Pencatatan KDP	(201.989.713.351)
Koreksi Nilai KDP Berkurang	(74.534.795.680)
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	(2.888.929.004.677)
	-
Saldo per 31 Desember 2024	**7.993.981.354.706**

1) Mutasi tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan yang bernilai signifikan berasal dari transaksi Pengembangan KDP yaitu berupa Penambahan Progress Total Studi TA 2024 Jalan Dalam Pengerjaan Pada KSOP Patimban senilai Rp634.925.822.589,-

2) Transaksi koreksi jenis KDP sebelum pendefinitifan aset menjadi Dermaga sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap 1 Nomor PL.301/01/31/UPP.CLI/2023 atas Pekerjaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Calabai Tahun Anggaran 2023

(Rincian dan Penjelasan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Hal 200)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp25.740.472.275.581

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp25.740.472.275.581 dan Rp22.917.950.649.871. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Audited) Tahun 2024

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	21.772.891.096.986	(15.901.306.992.810)	5.871.584.104.176
2	Gedung dan Bangunan	9.575.503.884.509	(2.156.157.776.380)	7.419.346.108.129

3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	32.747.431.446.936	(7.682.910.630.266)	25.064.520.816.670
4	Aset Tetap Lainnya	39.226.232.009	(96.876.125)	39.129.355.884
Akumulasi Penyusutan		**64.135.052.660.440**	**(25.740.472.275.581)**	**38.394.580.384.859**

Aset Konsesi Jasa Rp42.619.859.818.278

C.21 Aset Konsesi Jasa

Saldo Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.42.619.859.818.278 dan Rp.38.494.595.371.765. Aset Konsesi Jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:

1) disediakan oleh mitra, yang dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau

2) disediakan oleh pemberi konsesi, yang merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

Rincian Aset Konsesi Jasa Tahunan (Audited) Tahun 2024

No	SATKER	MITRA	MASA	Jumlah
Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra				
1	KSOP Kelas I Banjarmasin	PT. Indonesia Multi Purpose Terminal (IMPT)	49	24.542.000.000
2	KSOP Kelas I Banjarmasin	PT. Ambang Barito Nusapersada (Ambapers)	20	7.362.583.235
3	KSOP Kelas II Kotabaru-Batulicin	PT. Pelabuhan Swangi Indah (SI)	21	43.433.726.770
4	KSOP Kelas I Samarinda	PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara (PTB)	25	9.995.854.208
5	KSOP Kelas I Samarinda	PT. Sarana Abadi Lestari (SAL)	37	150.529.543.667
6	KSOP Kelas I Balikpapan	PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka (PBT)	35	187.906.334.674
7	KSOP Kelas I Balikpapan	PT. Lestari Samudra SAKTI (LSS)	54	214.227.424.919
8	KSOP Kelas I Balikpapan	PT. Indika Logistic & Support Services (ILSS)	31	804.842.268.012
9	KSOP Kelas II Kendari	PT. Pelindo - Kendari Newport	67	821.213.850.082
10	KSOP Kelas IV Bima	PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)	30	700.000.000
11	KSOP Kelas IV Badas	PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)	30	796.525.380
12	KSOP Kelas IV Waingapu	PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)	30	3.165.405.000
13	KSOP Kelas II Gresik	PT. Siam Maspion (SM)	43	455.984.600.000
14	KSOP Kelas II Gresik	PT. Berlian Manyar Sejahtera (BMS)	76	1.881.903.436.407
15	KSOP Kelas IV Probolinggo	PT. Delta Artha Bahari Nusantara (DABN)	64	268.073.283.000
16	KSOP Kelas IV Probolinggo	PT. Delta Artha Bahari Nusantara (DABN)	30	3.026.818.182
17	KSOP Kelas III Kuala Tanjung	PT. Pelindo I - Terminal Curah Cair Kuala Tanjung	69	3.527.583.259.475
18	KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun	PT. Asinusa Putra Sekawan (APS)	24	4.366.021.165
20	KSOP Kelas I Pontianak	PT. Indo Container Sarana (ICS)	61	220.150.584.663
21	KSOP Kelas I Pontianak	PT. Pelindo II - Terminal Kijing	69	3.279.818.813.226
22	KSOP Kelas IV Sintete	PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)	15	1.121.229.857
23	KSOP Utama Belawan	PT. Pelindo I - Terminal Petikemas Belawan Fase II	70	3.041.739.078.034
24	KSOP Utama Tanjung Priok	PT. Pelindo II - Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok	70	8.763.847.980.397
25	KSOP Utama Tanjung Perak	PT. Pelindo III - Terminal Multi Purpose Teluk Lamong	72	4.924.264.339.681
26	KSOP Utama Tanjung Perak	PT. Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS)	25	961.504.383.377
27	KSOP Utama Makassar	PT. Pelindo IV - Terminal Makassar New Port	70	5.033.955.543.094
28	KSOP Kelas I Banten	PT. Bandar Bakau Jaya (BBJ)	73	358.064.703.645
29	KSOP Kelas I Banten	PT. Krakatau Bandar Samudera (KBS)	75	1.252.094.705.000
30	KSOP Kelas I Banten	PT. Batu Alam Makmur (BAM)	16	88.777.210.287
31	KSOP Kelas III Tanjung Pakis	PT. Lamongan Intergrated Shorebase (LIS)	72	1.394.625.091.489
32	KSOP Kelas IV Garongkong	PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)	50	14.972.238.764

35	KSOP Kelas III Rangga Ilung	PT. Bangun Nusantara Jaya Makmur Perkasa (BNJMP)	15	75.253.624.917
36	KSOP Kelas III Satui	PT. Bina Indo Raya (BIR)	25	252.133.041.577
37	KSOP Kelas III Labuhan Bajo	PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)	50	185.189.616.274
38	KSOP Kelas II Marunda	PT. Karya Citra Nusantara (KCN)	70	1.924.982.134.652
39	KSOP Kelas II Marunda	PT. Pelabuhan Tegar Indonesia (PTI)	65	859.560.212.572
40	KSOP Kelas IV Anggrek	PT. Anggrek Gorontalo Internasional Terminal (AGIT)	30	17.573.650.000
41	KSOP Kelas I Dumai	PT. Pelabuhan Mundam Sejahtera (PMS)	35	64.228.858.644
42	KSOP Kelas II Kotabaru-Batulicin	PT. Dua Samudera Perkasa (DSP)	26	-
19	KSOP Kelas III Talang Dukuh	PT. Wahyusamudera Indah (WI)	66	70.140.000.000
43	UPP Kelas II Tanjung Redep	PT. Mitra Samudera Kreasi (SMK)	36	-
33	UPP Kelas II Weda	PT. Pelabuhan Samudera Nusantara (PSN)	38	198.323.450.000
34	UPP Kelas II Weda	PT. Weda Bay Port (WBP)	40	-
Total Aset Konjas Partisipasi Mitra				**41.391.973.424.326**
Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah				-
1	KSOP Garongkong	PT. Pelindo (Persero)	50 Tahun	220.749.497.528
2	KSOP Probolinggo	PT. Delta Artha Bahari Nusantara	30 Tahun	392.060.676.000
3	KSOP Badas	PT. Pelindo (Persero)	30 Tahun	62.500.133.000
4	KSOP Bima	PT. Pelindo (Persero)	30 Tahun	95.295.585.001
5	KSOP Labuhan Bajo	PT. Pelindo (Persero)	50 Tahun	176.766.708.497
6	KSOP Waingapu	PT. Pelindo (Persero)	30 Tahun	99.583.090.600
7	KSOP Anggrek	PT. Anggrek Gorontalo Internasional Terminal	30 Tahun	174.505.161.325
8	KSOP Sintete	PT. Pelindo (Persero)	15 Tahun	6.425.542.000
Total Aset Konjas Partisipasi Pemerintah				**1.227.886.393.951**
Saldo per 31 Desember 2024				**42.619.859.818.277**
Akumulasi Penyusutan Aset Konjas s.d. 31 Desember 2024				(3.303.421.671.115)
Nilai Buku per 31 Desember 2024				**39.316.438.147.162**

(Rincian dan Penjelasan Aset Konsesi Jasa pada Hal 104)

Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa Rp-3.303.421.671.115

C.22 Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa per per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp-3.303.421.671.115 dan Rp-2.522.369.026.826.

Properti Investasi Rp116.515.789.056

C.23 Properti Investasi

Saldo Properti Investasi per per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp116.515.789.056 dan Rp116.515.789.056. Properti Investasi Merupakan Properti untuk Menghasilkan Pendapatan Berupa Sewa atau Meningkatkan Nilai Aset atau Kedua-duanya. Properti Investasi pada 2024 . Adapun rincian Properti Investasi

Rincian Properti Investasi Tahunan (Audited) Tahun 2024

No	U r a i a n	Jumlah
1	KSOP KELAS II CIREBON	65.372.211.000
2	DISNAV KELAS I PALEMBANG	16.581.036.000
3	KANPUS HUBLA	16.327.648.052
4	UPP KELAS I T O B E L O	3.801.911.400
5	KSOP KELAS II B E N O A	2.972.963.000
6	UPP KELAS II P A L O P O	2.215.502.083
7	KSOP KELAS I PALEMBANG	1.628.498.000
8	UPP KELAS III JUWANA	1.219.468.021
9	DISNAV KELAS I SAMARINDA	797.940.000
10	KSOP KELAS III KUALA TANJUNG	748.388.000
11	KSOP KELAS IV GARONGKONG	699.830.116
12	UPP KELAS III P O S O	690.424.000
13	DISNAV KELAS II BANJARMASIN	656.927.000
14	UPP KELAS III P A R I G I	650.179.000
15	DISNAV KELAS II S A B A NG	592.461.584

16	DISNAV KELAS I TANJUNG PINANG	435.105.000
17	DISNAV KEALS I D U M A I	354.409.000
18	DISNAV KELAS I TANJUNG PRIOK	258.148.000
19	KSOP UTAMA TANJUNG PERAK	199.977.800
20	UPP KELAS III JAILOLO	191.248.000
21	KSOP KELAS II TELUK BAYUR	85.936.000
22	UPP KELAS III MANGGAR	35.578.000
Jumlah		**116.515.789.056**

(Rincian dan Penjelasan Properti Investasi pada Hal 160)

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Rp-6.373.704.495

C.24 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp-6.373.704.495 dan Rp-5.564.176.173.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp1.147.076.137

C.25 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1.147.076.137 dan Rp1.170.216.137. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

Debitur	TAHUN 2024	TAHUN 2023
UPP Lapuko	1.140.216.137	1.170.216.137
UPP Tilamuta	6.860.000	-
Jumlah	**1.147.076.137**	**1.170.216.137**

Pencatatan Piutang TGR pada
1. UPP Lapuko berdasarkan SKTJM a.n. Abdul Rahman atas kerugian/kekurangan yang disebabkan tidak disetorkannya uang PNBP pada Kantor UPP Lapuko Bulan Juli 2013 s.d. April 2014
2. UPP Tilamuta berdasarkan SK Nomor PS.304/5/7/ITJEN/2024 tanggal 23 September 2024 a.n ABD Muis Puti atas Kehilangan BMN berupa Sepeda Motor sebesar Rp.9.800.000 yang telah di angsur sebanyak 3 (tiga) kali sebesar masing-masing Rp. 980.000

Piutang Jangka Panjang lainnya Rp7.160.475.295

C.26 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp7.160.475.295 dan Rp16.739.075.295. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 31 Desember 2024 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

U R A I A N	TAHUN 2024	TAHUN 2023
KSOP Palembang	7.160.475.295	7.260.475.295
Satker LALA	-	9.478.600.000
Jumlah	**7.160.475.295**	**16.739.075.295**

Piutang Jangka Panjang lainnya pada KSOP Palembang merupakan Reklasifikasi dari Piutang TP/TGR yang dilakukan settlement piutang pada Modul Piutang SAKTI dengan akun 155111

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Rp41.537.757

C.27 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp41.537.757 dan Rp89.546.457. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2024 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
TP/TGR			
Lancar	1.147.076.137	0,5%	5.735.381
JANGKA PANJANG LAINNYA			
Lancar	7.160.475.295	0,5%	35.802.376
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	**8.307.551.432**		**41.537.757**

Aset Tak Berwujud Rp910.030.295.941

C.28 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp910.030.295.941 dan Rp796.591.502.167. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berupa .

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2024	**796.591.502.167**
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	30.355.000
Pembelian	5.087.953.912
Transfer Masuk	4.035.848.070
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	107.552.741.402
Reklasifikasi Masuk	693.285.462
Perolehan Lainnya	425.540.662
Penyelesaian Pembangunan Langsung	183.463.500
Pengembangan Nilai Aset	1.482.680.775
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	650.348.707
Pengembangan Melalui KDP	1.322.422.235
Koreksi Susulan	480.000
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(156.145.000)
Penghapusan	(1.411.107.000)
Transfer Keluar	(4.035.848.070)
Koreksi Pencatatan	(2.340.837.690)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(82.388.191)
Saldo Nilai per 31 Desember 2024	**910.030.295.941**
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	(145.980.213.611)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	**764.050.082.330**

1) Mutasi tambah Aset Tak Berwujud yang bernilai signifikan berasal dari transaksi reklasifikasi KDP menjadi barang jadi Pada Satker Peningkatan Fungsi Kepelabuhanan Pusat sesuai dengan tindak lanjut atas Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2024 senilai Rp93.069.012.056,-

2) Transaksi Transfer Keluar berupa :
a. Studi DED Pelabuhan Semut Mangga Dua Ternate ke KSOP Ternate
b. Studi Rencana Induk Pelabuhan Marabombang ke KSOP Kelas III Pare-Pare
c. Studi DED Pelabuhan Palopo ke UPP Kelas II Palopo
d. Studi Lingkungan Pelabuhan Lapuko ke UPP Kelas III Lapuko.

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Rp573.381.006.355

C.29 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.573.381.006.355 dan Rp.585.934.449.348. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Mutasi transaksi pada Dana Yang Dibatasi Penggunaannya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

PROVINSI	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Bengkulu	1.029.000.000	-

DKI Jakarta-Daerah	7.387.013.668	9.939.826.492
DKI Jakarta-Pusat	325.614.708.765	411.467.060.563
Gorontalo	4.583.213.638	3.223.717.036
Jawa Barat	17.185.401.659	6.996.948.202
Jawa Tengah	1.965.038.656	5.116.720.434
Jawa Timur	1.252.398.238	-
Kalimantan Barat	2.597.116.761	1.172.645.417
Kalimantan Selatan	2.279.882.699	364.509.640
Kalimantan Tengah	1.218.122.863	10.107.598.738
Kalimantan Timur	171.326.910	12.525.619.918
Kalimantan Utara	542.420.804	684.082.003
Kepulauan Riau	39.124.286.658	941.775.273
Lampung	43.506.000	-
Maluku	57.095.740.888	38.127.071.338
Maluku Utara	33.856.126.225	7.492.483.351
Nanggroe Aceh Darussalam	3.625.862.323	1.062.477.630
Nusa Tenggara Barat	4.543.910.341	9.718.216.208
Nusa Tenggara Timur	8.502.098.168	14.264.500.160
Papua	13.164.664.901	9.125.737.517
Papua Barat	5.839.218.569	6.977.683.107
Riau	-	260.618.065
Sulawesi Barat	4.946.940.842	491.197.832
Sulawesi Selatan	5.586.613.064	-
Sulawesi Tengah	15.244.012.606	21.648.009.547
Sulawesi Tenggara	2.790.502.462	8.248.491.295
Sulawesi Utara	6.306.740.289	4.467.360.721
Sumatera Barat	724.786.180	615.466.961
Sumatera Utara	6.160.352.178	894.631.900
Jumlah	**573.381.006.355**	**585.934.449.348**

(Rincian dan Penjelasan Dana yang dibatasi penggunaannya pada Hal 205)

Aset Lain-lain Rp454.851.391.891

C.30 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp454.851.391.891 dan Rp495.161.147.759. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2024	**495.161.147.759**
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	522.297.770.636
Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	2.999.549.062
	-
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(11.067.607.474)
Penghapusan	(116.637.897.814)
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(437.901.570.278)
	-
Saldo per 31 Desember 2024	**454.851.391.891**
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	(324.072.403.079)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	**130.778.988.812**

1) Reklasifikasi Aset Tetap Ke Aset Lainnya dalam rangka penghapusan sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP-PHB 480 TAHUN 2024 Hal Penghapusan Barang Milik Negara Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tarempa

2) Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan dalam rangka penghapusan sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP-PHB 480 TAHUN 2024 Hal Penghapusan Barang Milik Negara Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tarempa

(Rincian dan Penjelasan Aset Lain - lain pada Hal 208)

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
470.052.616.690

C.31 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp470.052.616.690 dan Rp518.257.789.114. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapsitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	910.030.295.941	(145.980.213.611)	764.050.082.330
Aset Lain-lain	454.851.391.891	(324.072.403.079)	130.778.988.812
-	-	-	-
Total	**1.364.881.687.832**	**(470.052.616.690)**	**894.829.071.142**

Utang kepada Pihak Ketiga
494.507.162.770

C.32 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp494.507.162.770 dan Rp524.376.794.596. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	445.066.490	470.587.718
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	889.437.829	112.657.456
Beban Modal yang Masih Harus Dibayar	21.048.029.853	-
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	468.392.483.511	520.095.139.135
Dana Pihak Ketiga	3.698.410.287	3.698.410.287
Dana Pihak Ketiga Lainnya - BLU	33.734.800	-
Total	**494.507.162.770**	**524.376.794.596**

(Rincian Penjelasan terkait Utang Kepada Pihak Ketika pada Hal 210)

Pendapatan Diterima Dimuka
Rp2.120.171.663

C.33 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.120.171.663 dan Rp873.204.991. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	2.036.171.657	758.204.989
Pendapatan Diterima Dimuka BLU	84.000.006	115.000.002
	-	-
Total	**2.120.171.663**	**873.204.991**

(Rincian dan Penjelasan Pendapatan diterima dimuka pada Hal 216)

Uang Muka dari KPPN
Rp343.335.765

C.34 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp343.335.765 dan Rp10.435.154.Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Tambahan Uang Persediaan	343.335.765
Total	**343.335.765**

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp34.368.910

C.35 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp34.368.910 dan Rp2.747.700. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	34.368.910	2.747.700
Total	**34.368.910**	**2.747.700**

(Rincian dan Penjelasan Utang Jangka Pendek Lainnya pada Hal 218)

Kewajiban Konsesi Jasa Rp38.185.064.749.841

C.36 Kewajiban Konsesi Jasa

Saldo Kewajiban Konsesi Jasa per per dan adalah Rp38.185.064.749.841 dan Rp34.650.090.033.814 Kewajiban Konsesi Jasa Diakui pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa, pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pengakuan kewajiban pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa, kemudian disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra kepada pemberi konsesi. Adapun rincian Kewajiban Konsesi Jasa adalah sebagai berikut:

Rincian Kewajiban Konsesi Jasa Tahunan (Audited) Tahun 2024

KODE			NILAI
413670	KSOP KELAS I BANTEN	Banten	(1.544.312.582.179)
652517	KSOP KELAS II MARUNDA	DKI Jakarta-Daerah	(2.577.905.703.376)
413422	KSOP UTAMA TANJUNG PRIOK	DKI Jakarta-Daerah	(8.015.979.955.459)
652563	KSOP KELAS IV ANGGREK	Gorontalo	(16.933.659.491)
413240	KSOP KELAS III TALANG DUKUH	Jambi	(70.140.000.000)
412905	KSOP KELAS II GRESIK	Jawa Timur	(2.173.167.713.513)
521395	KSOP KELAS III TANJUNG PAKIS	Jawa Timur	(1.372.990.292.493)
412920	KSOP KELAS IV PROBOLINGGO	Jawa Timur	(244.714.786.938)
413428	KSOP UTAMA TANJUNG PERAK	Jawa Timur	(5.031.356.625.452)
413313	KSOP KELAS I PONTIANAK	Kalimantan Barat	(3.353.310.723.720)
413322	KSOP KELAS IV SINTETE	Kalimantan Barat	(600.658.853)
287171	KSOP KELAS I BANJARMASIN	Kalimantan Selatan	(29.616.298.987)
287185	KSOP KELAS II KOTABARU-BATULICIN	Kalimantan Selatan	(35.841.654.116)
559292	KSOP KELAS III SATUI	Kalimantan Selatan	(232.649.879.952)
559285	KSOP KELAS III RANGGA ILUNG	Kalimantan Tengah	(64.205.404.858)
287228	KSOP KELAS I BALIKPAPAN	Kalimantan Timur	(1.138.572.413.506)
287211	KSOP KELAS I SAMARINDA	Kalimantan Timur	(143.352.559.140)
413180	KSOP KELAS I TANJUNG BALAI KARIMUN	Kepulauan Riau	(4.100.802.931)
287651	KSOP KELAS IV BADAS	Nusa Tenggara Barat	(718.178.622)
287647	KSOP KELAS IV BIMA	Nusa Tenggara Barat	(663.793.102)
559552	KSOP KELAS III LABUHAN BAJO	Nusa Tenggara Timur	(172.267.318.491)
287715	KSOP KELAS IV WAINGAPU	Nusa Tenggara Timur	(3.108.879.911)
413092	KSOP KELAS I DUMAI	Riau	(63.311.303.521)
521836	KSOP KELAS IV GARONGKONG	Sulawesi Selatan	(14.552.015.797)
413439	KSOP UTAMA MAKASAR	Sulawesi Selatan	(4.816.524.340.108)
287502	KSOP KELAS II KENDARI	Sulawesi Tenggara	(791.022.164.417)
413080	KSOP KELAS III KUALA TANJUNG	Sumatera Utara	(3.254.127.192.847)
413417	KSOP UTAMA BELAWAN	Sumatera Utara	(2.823.303.917.140)
521899	UPP KELAS II WEDA	Maluku Utara	(195.713.930.921)
Saldo per 31 Desember 2024			**(38.185.064.749.841)**

(Rincian dan Penjelasan Kewajiban Aset Konsesi Jasa pada lampiran 128)

Ekuitas Rp65.086.327.001.705

C.37 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp65.086.327.001.705. dan Rp61.107.756.550.568. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Negara Bukan Pajak Rp5.983.705.884.555

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp5.983.705.884.555 dan Rp4.926.183.075.468. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 21,47. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	%
Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	2.644.701.758	2.347.104.720	12,68
Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan dan	94.788.108.999	67.928.224.876	39,54
Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa	155	-	100,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	11.503.480.983	7.761.671.500	48,21
Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari	1.260.900.000	1.087.900.000	15,90
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	2.626.122.174	499.626.118	425,62
Pendapatan Lain-lain BLU	217.486.500	5.052.000	4.204,96
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	37.140.000	61.000.000	(39,11)
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	-	7.246.000	(100,00)
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	68.290.996	24.247.998	181,64
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	517.948.000	212.280.000	143,99
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	26.586.764.313	22.245.475.489	19,52
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	2.253.503.600	1.695.869.310	32,88
Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan	279.132.000	500.000	55.726,40
Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	10.785.127.425	10.163.299.874	6,12
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	20.142.000	28.843.000	(30,17)
Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	-	96.391.075	(100,00)
Pendapatan Jasa Kepelabuhanan	3.562.353.695.971	2.936.353.579.453	21,32
Pendapatan Jasa Navigasi Pelayaran	724.473.715.791	738.823.000.332	(1,94)
Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	287.294.477.258	303.697.697.032	(5,40)
Pendapatan Jasa Navigasi Penerbangan	117.633.773.872	27.797.735.552	323,18
Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi	929.424.217.740	687.603.585.759	35,17
Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	200.174.588.759	112.271.268.970	78,30
Pendapatan Jasa Lainnya	29.540.000	288.000.000	(89,74)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan	8.716.414.410	5.103.216.801	70,80
Pendapatan Denda Lainnya	15.790.604	-	100,00
Pendapatan Anggaran Lain-lain	821.247	80.259.609	(98,98)
Jumlah	**5.983.705.884.555**	**4.926.183.075.468**	**21,47**

Beban Pegawai Rp1.916.226.131.582

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.916.226.131.582 dan Rp1.746.799.638.749.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar 9,70 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 . Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	%
Beban Gaji Pokok PNS	673.629.363.613	618.059.675.651	8,99
Beban Pembulatan Gaji PNS	14.691.664	9.374.339	56,72
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	51.134.508.247	48.362.839.935	5,73
Beban Tunj. Anak PNS	16.209.885.650	15.433.559.629	5,03
Beban Tunj. Struktural PNS	8.539.404.739	8.592.770.000	(0,62)
Beban Tunj. Fungsional PNS	823.157.000	786.129.700	4,71
Beban Tunj. PPh PNS	4.397.533.945	711.869.087	517,74

Beban Tunj. Beras PNS	40.000.927.510	40.889.532.670	(2,17)
Beban Uang Makan PNS	107.364.561.550	108.134.638.901	(0,71)
Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS	9.227.381.049	11.207.376.862	(17,67)
Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	465.375.000	474.324.380	(1,89)
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	3.975.625.000	3.955.845.000	0,50
Beban Tunjangan Umum PNS	32.406.797.250	32.065.992.350	1,06
Belanja Gaji Pokok PPPK	11.601.639.800	641.299.844	1.709,08
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	207.682	7.021	2.858,01
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	556.228.570	25.603.510	2.072,47
Belanja Tunjangan Anak PPPK	99.018.322	4.606.704	2.049,44
Belanja Tunjangan Struktural PPPK	3.510.400	-	100,00
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	140.983.000	21.028.000	570,45
Belanja Tunjangan Beras PPPK	566.646.280	31.502.700	1.698,72
Belanja Uang Makan PPPK	2.307.591.400	133.304.000	1.631,07
Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PPPK	126.571.289	1.188.000	10.554,15
Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PI	1.000.000	-	100,00
Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	45.300.000	4.250.000	965,88
Belanja Tunjangan Umum PPPK	730.000	-	100,00
Beban Uang Lembur	96.934.452.800	88.279.767.400	9,80
Belanja Uang Lembur PPPK	1.054.012.950	30.101.000	3.401,59
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	841.547.840.115	768.321.852.516	9,53
BelanjaPegawaiTunjanganKhusus/Kegiatan/Kinerja PPP	13.051.186.757	621.199.550	2.000,97
Jumlah	**1.916.226.131.582**	**1.746.799.638.749**	**9,70**

Beban Persediaan Rp153.205.814.547

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp153.205.814.547 dan Rp169.580.940.433

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat komsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 9,66 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 . Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	%
Beban Persediaan konsumsi	126.491.138.750	128.706.572.281	(1,72)
Beban Persediaan amunisi	34.487.460	31.941.495	7,97
Beban Persediaan bahan baku	3.705.685.221	27.861.073.713	(86,70)
Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	18.519.400	161.145.000	(88,51)
Beban Persediaan Lainnya	22.955.983.716	12.820.207.944	79,06
	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	**153.205.814.547**	**169.580.940.433**	**(9,66)**

Beban Barang dan Jasa Rp3.407.498.194.573

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.407.498.194.573 dan Rp3.182.584.237.747.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 7,07 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 . Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	%
Beban Keperluan Perkantoran	309.991.587.562	425.668.628.290	(27,18)
Beban Pengadaan Bahan Makanan	55.297.147.086	38.853.136.400	42,32
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	1.404.901.214	1.931.132.451	(27,25)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.148.857.783	2.043.166.091	54,12
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	37.021.070.668	61.187.318.600	(39,50)
Beban Barang Operasional Lainnya	26.726.886.738	3.863.830.775	591,72

Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	1.219.327.840	(100,00)
Beban Bahan	52.645.761.725	52.044.083.487	1,16
Beban Honor Output Kegiatan	1.616.680.934	7.389.038.032	(78,12)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	2.329.254.596.764	2.190.308.665.464	6,34
Beban Barang Non Operasional kepada BLU dalam satu Kementerian Negara/Lembaga	7.144.944.000	4.605.480.000	55,14
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	129.999.000	(100,00)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	608.391.725	201.771.080	201,53
Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	80.030.751	-	100,00
Beban Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund	536.222.635	503.989.136	6,40
Beban Langganan Listrik	65.601.657.429	59.607.359.337	10,06
Beban Langganan Telepon	4.541.978.663	4.130.341.290	9,97
Beban Langganan Air	7.192.335.016	6.575.537.927	9,38
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	47.248.773.605	30.491.683.135	54,96
Beban Jasa Pos dan Giro	1.188.771.783	2.306.636.602	(48,46)
Beban Jasa Konsultan	77.208.831.181	101.429.617.831	(23,88)
Beban Sewa	17.090.266.829	18.701.520.974	(8,62)
Beban Jasa Profesi	4.193.058.070	5.426.483.240	(22,73)
Beban Jasa Lainnya	352.243.149.088	155.043.955.340	127,19
Beban Jasa Lainnya	-	150.380.000	(100,00)
Beban Barang	1.531.043.928	3.159.896.113	(51,55)
Beban Jasa	3.728.294.086	5.113.059.397	(27,08)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	232.955.310	475.822.315	(51,04)
Beban Aset Ekstrakomtabel Jalan, Irigasi dan Jaringan	20.000.000	-	100,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan - BLU	-	22.377.600	(100,00)
Jumlah	**3.407.498.194.573**	**3.182.584.237.747**	**7,07**

Beban Pemeliharaan Rp1.029.087.750.974

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.029.087.750.974 dan Rp878.031.617.388.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 17,20 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	184.289.270.356	123.875.536.793	48,77
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	106.549.000	60.550.000	75,97
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	663.689.023.392	652.609.957.254	1,70
Beban Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor	-	68.970.130	(100,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.619.595.570	-	100,00
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	83.999.283.306	34.077.898.267	(0,08)
Beban Pemeliharaan Irigasi	-	12.955.000	(100,00)
Beban Pemeliharaan Jaringan	5.987.264.847	3.382.830.874	(0,80)
Beban Pemeliharaan	1.547.100.948	8.314.828.870	(81,39)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	7.282.114.540	5.583.655.793	30,42
Beban Persediaan suku cadang	64.406.541.210	49.983.467.523	28,86
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	161.007.805	60.966.884	164,09
Jumlah	**1.029.087.750.974**	**878.031.617.388**	**17,20**

Beban Perjalanan Dinas Rp607.258.804.956

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp607.258.804.956 dan Rp561.089.535.990

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 8,23 persen . Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	%
Beban Perjalanan Biasa	421.412.125.965	372.473.013.384	13,14
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.714.912.359	96.638.360.682	4,22
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	35.734.594.559	31.689.483.429	12,76
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	30.664.043.944	38.387.928.401	(20,12)
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	17.336.936.146	19.459.638.068	(10,91)
Beban Perjalanan	1.396.191.983	2.441.112.026	(42,81)
Jumlah	**607.258.804.956**	**561.089.535.990**	**8,23**

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp0

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp78.900.402.303

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 100,00 dibandingkan dengan Tahun 2023. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	%
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	-	78.900.402.303	(100,00)
Jumlah	**-**	**78.900.402.303**	**(100,00)**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp3.871.521.020.159

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.871.521.020.159 dan Rp3.555.966.902.717.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.587.187.045.137	1.565.850.820.125	1,36
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	304.619.327.402	291.852.501.598	4,37
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	676.907.034.016	649.421.405.446	4,23
Beban Penyusutan Irigasi	556.283.591.800	531.292.528.857	4,70
Beban Penyusutan Jaringan	6.353.415.425	5.608.320.487	13,29
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	4.625.139	19.219.033	(75,93)
Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa	22.421.985.613	11.299.102.578	98,44
Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa	707.618.768.131	475.329.480.505	48,87
Beban Penyusutan Properti Investasi	809.528.322	50.542.217	1.501,69
Beban Amortisasi Software	3.598.304.171	4.831.303.002	(25,52)
Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	11.318.042.382	(100,00)
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	5.717.395.003	9.093.636.487	(37,13)
Jumlah	**3.871.521.020.159**	**3.555.966.902.717**	**8,87**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp1.551.554.992

D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.551.554.992 dan Rp560.422.395

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	%
Beban Penyisihan Piutang PNBP	1.550.687.617	412.216.572	276
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	100.668.123	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	34.300	-	100,00
Beban Penyisihan Piutang BLU Pelayanan Kesehatan	833.075	24.700	3.272,77
Beban Penyisihan Piutang Sewa Tanah BLU	-	120.000	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	-	47.393.000	(100,00)
Jumlah	**1.551.554.992,00**	**560.422.395**	**177**

Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Rp-238.616.223.457

D.10 Surplus (Defisit) Pelepasan Aset

Jumlah Surplus (Defisit) Pelepasan Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp-238.616.223.457 dan Rp-175.915.098.038

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	%
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	744.312.200	526.181.719	41,46
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	8.170.778.278	5.947.782.542	37,38
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	2.075.763.664	3.274.893.427	(36,62)
Beban Kerugian Pelepasan Aset	(249.607.077.599)	(185.663.955.726)	34,44
	-	-	-
Jumlah	**(238.616.223.457)**	**(175.915.098.038)**	**35,64**

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya Rp1.180.095.655.567

D.11 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.180.095.655.567 dan Rp716.554.131.273.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	%
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	46.281.310	-	100,00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	404.629.000	17.298.600.000,00	(98)
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	148.385.500	463.132.970,00	(68)
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	145.219.399.518	31.165.581.023,00	366
Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	11.957.399.613	10.468.619.050,00	14
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	341.779.551.713	45.744.099.171,00	647
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	466.200	1.237.760.340,00	(100)
Pendapatan Penyesuaian Aset Konsesi Jasa	681.830.647.420	625.620.983.487,00	9
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	(36)	(1.251.147.760,00)	(100)
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	(1.161.895.189)	(11.846.543.893,00)	(90)
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	(129.209.482)	(2.346.953.115,00)	(94)
Jumlah	**1.180.095.655.567**	**716.554.131.273**	**64,69**

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp61.107.756.550.568

E. 1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.61.107.756.550.568 dan Rp.60.366.472.401.255

Defisit LO Rp.-4.061.163.955.118

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.-4.061.163.955.118 dan Rp.-4.706.691.589.019. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.134.354.900.223 dan Rp.-211.707.435.754 yaitu sebagai berikut .

Koreksi Nilai Persediaan Rp4.682.594.395

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.4.682.594.395 dan Rp.2.574.916.930. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	4.682.594.395
Jumlah	**4.682.594.395**

Koreksi Atas Reklasifikasi Rp7.731.394.095

E.3.2 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.7.731.394.095 dan Rp.8.144.660.395. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	7.731.394.095
Jumlah	**7.731.394.095**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp234.546.916.768

E.3.3 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.234.546.916.768 dan Rp.-451.570.684.780. Koreksi ini .

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2024

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	235.947.047.783
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	(1.400.131.015)
Jumlah	**234.546.916.768**

Koreksi Lain-Lain Rp-112.606.005.035

E.3.4 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.-112.606.005.035 dan Rp.229.143.671.701. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2024

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	(112.606.005.035)
Jumlah	**(112.606.005.035)**

Transaksi Antar Entitas
Rp7.905.379.506.032

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.7.905.379.506.032 dan Rp.5.659.683.174.086. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2024

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	13.965.633.314.623
Diterima dari Entitas Lain	(6.022.058.417.015)
Transfer Keluar	(1.201.527.093.111)
Transfer Masuk	1.122.435.824.607
Pengesahan Hibah Langsung	37.685.122.078
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	3.210.754.850
	-
Jumlah	**7.905.379.506.032**

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DKEL sebesar Rp 13.965.633.314.623, sedangkan DDEL sebesar Rp 6.022.058.417.015

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp-1.201.527.093.111

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.122.435.824.607 dengan Rincian

TRANSFER KELUAR-MASUK NERACA		
E.4.2.1	TRANSFER KELUAR	1.201.527.093.111
E.4.2.2	TRANSFER MASUK	1.122.435.824.607
SELISIH		**79.091.268.504**
E.4.2.1	**TRANSFER KELUAR KE BA NON 022.04**	
1	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Tanjung Pinang	126.764.943.865
2	Perwakilan Kementerian Perhubungan di Kuala Lumpur	28.527.000
3	Perwakilan Kementerian Perhubungan di Singpura	28.527.000
0	-	-
	JUMLAH	**126.821.997.865**
E.4.2.2	**TRANSFER MASUK DARI BA NON 022.04**	-
1	Kantor Pengawas dan Pelayanan BC Morowali	301.833.681
2	Kantor Pengawas dan Pelayanan BC Samarinda	611.241.706
3	Kantor Pusat Sekjen Kemenhub	-
4	Stasiun Meteorologi Maritim Poetere - Makassar	698.580.798
5	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	46.064.975.000
6	BMN Setama c.q Balai Garut Lapan	54.098.176
	JUMLAH	**47.730.729.361**
JUMLAH TK-TM NON 022.04		**79.091.268.504**
SELISIH AKHIR		**-**

(Rincian dan Penjelasan Transfer Masuk-Keluar pada Hal 000)

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar 37.685.122.078 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2024

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
UPP Luwuk	Tanah	2.338.859.000
UPP Tanjung Redep	Peralatan dan Mesin	172.629.000
KSOP Selat Panjang	Tanah	5.500.018.180
KSOP Tg Balai Karimun	Bangunan dan Peralatan/Mesin	6.394.914.869
KSOP Panjang	Gedung dan Bangunan	236.675.000
UPP Mamuju	Tanah	5.733.315.100
Pengembangan Kenavigasian Pusat	Uang	16.901.010.929
UPP Weda	Peralatan dan Mesin	407.700.000
-	-	-
Total Pengesahan		**37.685.122.078**

E.4.4 Pengesahan Hibah Langsung TAYL

Pengesahan Hibah Langsung TAYL merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung TAYL KL dalam bentuk kas barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar 3.210.754.850 yang akan diterima sepanjang tahun

Rincian Pengesahan Hibah Langsung TAYL adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
UPP Kolaka	Tanah	2.375.754.850
UPP Kolonedale	Tanah	515.000.000
UPP Tanjung Uban	Tanah	320.000.000
Total Pengesahan		**3.210.754.850,00**

(Rincian dan Penjelasan Hibah pada Hal 000)

Ekuitas Akhir Rp65.086.327.001.705

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.65.086.327.001.705 dan Rp.61.107.756.550.568.

INFORMASI LAINNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUNAN *(AUDITED)*
TAHUN ANGGARAN 2024

A. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

1. Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

a. Target PNBP Tahun Anggaran 2024 **Rp5.341.168.720.000,-**

b. Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2024 **Rp6.135.548.594.289,- (114,87%)**

2. Jumlah Realisasi Penyetoran PNBP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut T.A. 2024 sebesar Rp6.135.548.594.289,- dengan rincian sebagai berikut:

a.	**PNBP Non Fungsional**	: **Rp 249.078.606.886,-**
b.	**PNBP Fungsional**	: **Rp5.772.979.440.129,-**
1)	Jasa Kepelabuhanan	: Rp3.557.374.914.907,-
2)	Jasa Navigasi Pelayaran	: Rp 724.507.256.791,-
3)	Jasa Perkapalan dan Kepelautan	: Rp 287.338.983.258,-
4)	Jasa Telekomunikasi Pelayaran	: Rp 117.633.398.872,-
5)	Jasa Konsesi	: Rp 885.950.297.542,-
6)	Jasa Transportasi Lainnya	: Rp 200.174.588.759,-
c.	**PNBP BLU**	: **Rp 113.490.547.274,-**
1)	Pendapatan Jasa Layanan Umum	: Rp 97.432.810.912,-
2)	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	: Rp 11.448.065.983,-
3)	Pendapatan Dari Alokasi APBN	: Rp 1.149.700.000,-
4)	Pendapatan BLU Lainnya	: Rp 3.459.970.379,-

3. Penggunaan Perairan

a. Dasar Hukum:

1) PP Nomor 15 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;

2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

3) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/4/16/DJPL-18 tentang tata cara penerimaan, penyetoran, penggunaan dan pelaporan penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

b. Mekanisme pemungutan PNBP Penggunaan Perairan:
   1) Penggunaan perairan termasuk dalam PNBP Jasa Kepelabuhanan Lainnya;
   2) Untuk pelayanan penggunaan perairan dilaksanakan dengan perjanjian penggunan perairan dalam batas waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
   3) Tarif untuk penggunaan perairan Rp2.500,- per m^2;
   4) Termin untuk pembayaran penggunaan perairan dilaksanakan setiap tahun sesuai periode tahun takwin dan pembayarannya dilakukan setiap awal termin sesui periode perjanjian;
   5) Dalam hal perjanjian penggunaan perairan tidak dilakukan dalam 1 (satu) takwim maka perhitungan termin pertama dimulai dari awal perjanjian sampai dengan akhir Desember tahun tersebut dan untuk termin berikutnya perhitungan pungutan sesuai dengan tahun takwim;
   6) Pengguna jasa yang tidak melakukan pembayaran setelah jatuh tempo nota tagihan dikeluarkan dikenakan denda sebesar 2% dari jumlah yang tertuang dalam nota tagihan;
   7) Penerbitan nota tagihan penggunaan perairan dilakukan sebagai berikut:
      a) Untuk termin pertama yang dimulai sejak ditanda tangani perjanjian sampai dengan akhir Desember tahun berjalan, nota tagihan diterbitkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak perjanjian ditandatangani;
      b) Untuk termin berikutnya nota tagihan diterbitkan selambat-lambatnya akhir April tahun berjalan;
   8) Jatuh tempo pembayaran 30 (tiga puluh) hari sejak nota tagihan dikeluarkan;
      Untuk pelayanan jasa yang menggunakan perjanjian seperti penggunaan perairan, penentuan jatuh tempo pembayaran sesuai dengan isi perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak.

c. Rekapitulasi Penggunaan Perairan Kepelabuhanan Tahun Anggaran 2024 atas jenis Tersus, TUKS, dan Bangunan dengan nilai total sebesar Rp395.163.630.998,- di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan rincian sebagai berikut:
   1) Tersus
      Terdapat 1.218 Terminal Khusus (Tersus) yang memiliki kerja sama operasional pada beberapa satker dan telah dilakukan pembayaran PNBP dengan total nilai Rp297.713.134.615,-
   2) TUKS
      Terdapat 977 Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang memiliki kerja sama operasional pada beberapa satker dan telah dilakukan pembayaran PNBP

dengan total nilai Rp95.417.902.308,-

3) Bangunan

Terdapat 135 Bangunan yang memiliki kerja sama operasional pada beberapa satker dan telah dilakukan pembayaran PNBP dengan total nilai Rp2.032.594.075,-

4. Jasa Telekomunikasi Pelayaran (Telkompel)

a. Jasa telekomunikasi pelayaran merupakan bagian dari PNBP Jasa Kenavigasian.

b. Jasa Telkompel terdiri dari:

1) *Vessel Traffic Services* (VTS);

2) Jasa Telegram/telepon radio/*radio telex/radio maritime latter*.

c. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/34/18/DJPL-16 tanggal 21 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Penerapan PNBP Jasa Kenavigasian Pelayanan *Vessel Traffic Services* (VTS), Pelayanan Jasa Telegram/Telepon Radio/*Radio Telex/Radio Maritime Letter* dan Penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut disebutkan bahwa apabila telah dilakukan penarikan PNBP Jasa Kenavigasian VTS pada pelabuhan dan/atau di dalam DLKr/DLKp pelabuhan, maka penarikan PNBP Jasa Telegram/Telepon Radio berupa *Mastercable* tidak perlu dilakukan lagi mengingat berita yang disampaikan ke VTS sudah mencakup berita dalam *Mastercable*.

d. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KU.102/5/19/DJPL/2023 tanggal 05 Oktober 2023, terdapat pemutakhiran Akun PNBP pada Kementerian Perhubungan salah satunya pada Pendapatan Jasa Kenavigasian atas Jasa Telekomunikasi Pelayaran yang sebelumnya dikategorikan sebagai Akun 425514 (Pendapatan Jasa Navigasi Pelayaran) menjadi akun 425517 (Pendapatan Jasa Navigasi Penerbangan dan Telekomunikasi Pelayaran).

e. Daftar stasiun SROP / VTS:

No.	Stasiun SROP / VTS	Jasa Telkompel		Keterangan
		VTS	Master Cable	
1	Disnav Belawan – VTS Belawan			
	1. Syahbandar Belawan	√	-	
	2. KSOP Kuala Tanjung	-	√	
2	Disnav Dumai – VTS Dumai	√	-	
	1. KSOP Dumai	√	-	
3	Disnav Tg. Pinang	-	√	
	1. Kanpel Batam VTS Center Batam	√	-	
	2. KSOP Tg. Balai Karimun	√	-	
	3. UPP Tanjung Uban	√	-	

No.	Stasiun SROP / VTS	Jasa Telkompel		Keterangan
		VTS	Master Cable	
	4. KSOP Kijang	-	√	
	5. KSOP Tanjung Pinang	-	√	
	6. UPP Dabo Singkep	-	√	
	7. UPP Senayang	-	√	
	8. UPP Tarempa	-	√	
4	Disnav Teluk Bayur – VTS Teluk Bayur	√	-	
	1. KSOP Teluk Bayur	√	-	
5	Disnav Palembang – VTS Palembang	√	-	
	1. KSOP Palembang	√	-	
	2. KSOP Muntok	√	-	
	3. KSOP Pangkal Balam	-	√	
	4. KSOP Tanjung Pandan	-	√	
	5. KSOP Muara Sabak	-	√	
	6. KSOP Jambi	-	√	
	7. KSOP Kuala Tungkal	-	√	
6	Disnav Tanjung Priok – VTS Jakarta	√	-	
	1. Syahbandar Tanjung Priok	√	-	
	2. KSOP Sunda Kelapa	√	-	
	3. KSOP Marunda	√	-	
	4. KSOP Muara Baru	√	-	
	5. KSOP Kalibaru	√	-	
7	VTS Merak – Master Cable	√	-	
	1. KSOP Banten	√	-	
	2. UPP Karangantu	√	-	
	3. UPP Labuhan		-	
	4. KSOP Pulau Baai Bengkulu	-	√	
8	VTS – Panjang	√	-	
9	Disnav Semarang – VTS Semarang	√	-	
	1. KSOP Semarang	√	-	
10	Disnav Surabaya – VTS Surabaya	√	-	
	1. Syahbandar Surabaya	√	-	
	2. KSOP Gresik	√	-	
11	Disnav Benoa – VTS Benoa	√	-	
12	VTS Lembar	√	-	
13	Disnav Pontianak – VTS Pontianak	√	-	
	1. KSOP Pontianak	√	-	
14	Disnav Banjarmasin – VTS Banjarmasin	√	-	
	1. KSOP Banjarmasin	√	-	

No.	Stasiun SROP / VTS	Jasa Telkompel		Keterangan
		VTS	Master Cable	
15	VTS Batulicin	√	-	
16	Disnav Samarinda – VTS Samarinda	√	-	
	1. KSOP Samarinda	√	-	
17	VTS Balikpapan	√	-	
18	Disnav Makassar – VTS Makassar	√	-	
19	Disnav Bitung – VTS Bitung	√	-	
	1) KSOP Gorontalo	-	√	
	2) UPP Pantoloan	-	√	
20	Disnav Sorong – VTS Sorong	√	-	
	1. UPP Bintuni	√	-	

5. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut T.A. 2024 sebesar Rp139.202.493.060,-. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan kontribusi atas jasa pemanduan dan penundaan kapal dan pendapatan jasa konsesi yang telah diberikan pada Desember 2024 dan akan dibayarkan pada Januari 2025. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Direktorat Jenderal Perhubungan Laut T.A. 2024 antara lain:

No	Kode Satker	Nama Satker	Pandu Tunda	Konsesi	Total
1	287579	KSOP Benoa	229.606.783	257.305.485	**486.912.268**
2	287626	KSOP Celukan Bawang	48.518.577	15.847.107	**64.365.684**
3	287590	KSOP Padang Bai	48.538.879	-	**48.538.879**
4	412860	KSOP Cilacap	143.016.773	118.807.881	**261.824.654**
5	412823	KSOP Tanjung Emas	643.812.503	3.569.772.345	**4.213.584.848**
6	412832	KSOP Tegal	-	6.971.044	**6.971.044**
7	559154	UPP Batang	85.211.212	-	**85.211.212**
8	412848	UPP Jepara	393.776.938	-	**393.776.938**
9	559140	UPP Rembang	78.185.353	-	**78.185.353**
10	289796	KSOP Kumai	49.314.343	199.144.619	**248.458.962**
11	287143	KSOP Pulang Pisau	-	4.017.427	**4.017.427**
12	287139	KSOP Sampit	84.566.769	158.108.757	**242.675.526**
13	287541	KSOP Ternate	39.939.773	181.271.546	**221.211.319**
14	413658	UPP Babang	1.646.428	-	**1.646.428**
15	559442	UPP Laiwui	359.564.394	-	**359.564.394**
16	521899	UPP Weda	605.525.744	-	**605.525.744**
17	412982	KSOP Lhokseumawe	777.071.776	26.227.436	**803.299.212**

No	Kode Satker	Nama Satker	Pandu Tunda	Konsesi	Total
18	412973	KSOP Kuala Langsa	-	14.850	**14.850**
19	413746	KSOP Malahayati	35.805.820	33.732.608	**69.538.428**
20	412998	KSOP Meulaboh	428.893.945	-	**428.893.945**
21	287811	KSOP Fak-Fak	2.397.500	57.863.694	**60.261.194**
22	287799	KSOP Manokwari	31.671.227	34.150.583	**65.821.810**
23	287804	KSOP Sorong	57.375.440	242.638.856	**300.014.296**
24	517911	UPP Bintuni	775.507.442	-	**775.507.442**
25	559594	UPP Raja Ampat	6.033.750	-	**6.033.750**
26	559374	UPP Belang-Belang	17.784.308	-	**17.784.308**
27	287317	KSOP Manado	-	24.741.545	**24.741.545**
28	413783	KSOP Bitung	245.348.632	653.967.145	**899.315.777**
29	521730	UPP Amurang	55.857.441	-	**55.857.441**
30	521751	UPP Labuhan Uki/ Inebonto	30.971.783	-	**30.971.783**
31	413070	KSOP Teluk Bayur	249.000.476	553.809.696	**802.810.172**
32	413271	KSOP Muntok	33.183.653	20.000	**33.203.653**
33	413262	KSOP Pangkal Balam	47.327.864	120.759.348	**168.087.212**
34	413287	KSOP Tanjung Pandan	2.278.715	25.739.384	**28.018.099**
35	413381	UPP Manggar	2.562.618	-	**2.562.618**
36	413670	KSOP Banten	2.705.487.240	2.091.299.389	**4.796.786.629**
37	412817	KSOP Cirebon	63.445.638	148.032.660	**211.478.298**
38	021140	KSOP Patimban	363.917.098	379.618.818	**743.535.916**
39	521307	UPP Indramayu	228.086.845	-	**228.086.845**
40	287171	KSOP Banjarmasin	386.528.984	5.903.117.438	**6.289.646.422**
41	287185	KSOP Kotabaru-Batulicin	1.323.732.081	590.325.226	**1.914.057.307**
42	559292	KSOP Satui	275.026.501	119.987.025	**395.013.526**
43	287249	KSOP Nunukan	160.457.717	81.063.124	**241.520.841**
44	287232	KSOP Tarakan	126.468.847	226.717.302	**353.186.149**
45	417707	UPP Pulau Bunyu	17.665.356	-	**17.665.356**
46	417693	UPP Tanjung Selor	377.567.397	-	**377.567.397**
47	652542	KSOP Banda Naira	-	2.703.658	**2.703.658**
48	413520	UPP Tual	23.012.578	-	**23.012.578**
49	521836	KSOP Garongkong	61.801.661	-	**61.801.661**
50	289864	KSOP Pare-Pare	32.540.657	67.332.055	**99.872.712**
51	413439	KSOP Utama Makasar	246.972.159	1.478.720.932	**1.725.693.091**
52	413709	UPP Maccini Baji	121.229.400	-	**121.229.400**
53	413488	UPP Malili	9.500.000	-	**9.500.000**
54	413049	KSOP Gunung Sitoli	-	34.877.867	**34.877.867**
55	413080	KSOP Kuala Tanjung	164.081.139	170.961.279	**335.042.418**
56	289470	KSOP Pangkalan Susu	48.300.527	-	**48.300.527**
57	413024	KSOP Sibolga	10.813.658	31.073.965	**41.887.623**
58	413417	KSOP Utama Belawan	643.678.295	4.867.227.554	**5.510.905.849**
59	288021	KSOP Pulau Baai	46.311.275	-	**46.311.275**

No	Kode Satker	Nama Satker	Pandu Tunda	Konsesi	Total
60	652538	KSOP Muara Sabak	33.349.074	3.738.977	**37.088.051**
61	622042	KSOP Kuala Tungkal	-	84.056	**84.056**
62	413240	KSOP Talang Dukuh	18.757.506	188.754.671	**207.512.177**
63	412905	KSOP Gresik	506.426.892	1.424.839.747	**1.931.266.639**
64	412942	KSOP Kalianget	-	2.744.784	**2.744.784**
65	412920	KSOP Probolinggo	141.387.000	181.818.757	**323.205.757**
66	521395	KSOP Tanjung Pakis	501.549.277	-	**501.549.277**
67	413730	KSOP Tanjung Wangi	158.463.430	126.420.702	**284.884.132**
68	413428	KSOP Utama Tanjung Perak	1.499.774.113	15.400.723.740	**16.900.497.853**
69	521349	UPP Branta	11.306.216	-	**11.306.216**
70	413761	UPP Telaga Biru	5.015.711	-	**5.015.711**
71	287228	KSOP Balikpapan	2.526.782.837	1.279.413.797	**3.806.196.634**
72	517882	KSOP Bontang	750.928.800	-	**750.928.800**
73	287211	KSOP Samarinda	2.753.452.176	13.782.961.127	**16.536.413.303**
74	413426	UPP Kuala Semboja	123.254.784	-	**123.254.784**
75	289839	UPP Sangatta	1.354.618.822	-	**1.354.618.822**
76	289822	UPP Sangkulirang	817.151.079	-	**817.151.079**
77	289850	UPP Tana Paser	340.043.100	-	**340.043.100**
78	289843	UPP Tanjung Redep	531.574.155	-	**531.574.155**
79	287253	UPP Tanjung Santan	103.870.248	-	**103.870.248**
80	287651	KSOP Badas	-	26.390.483	**26.390.483**
81	413792	KSOP Lembar	213.502.395	166.002.324	**379.504.719**
82	522578	KSOP Kalabahi	-	7.804.035	**7.804.035**
83	522582	KSOP Kupang	-	204.712.953	**204.712.953**
84	287715	KSOP Waingapu	128.271.328	54.150.651	**182.421.979**
85	413112	KSOP Bengkalis	-	230.195	**230.195**
86	413092	KSOP Dumai	2.148.397.629	808.026.765	**2.956.424.394**
87	413106	KSOP Pekanbaru	172.013.513	277.971.240	**449.984.753**
88	289534	KSOP Tanjung Buton	674.221.091	-	**674.221.091**
89	559250	UPP Sungai Guntung	962.874	-	**962.874**
90	287370	KSOP Teluk Palu	48.213.391	309.320.579	**357.533.970**
91	413432	KSOP Toli-Toli	19.540.389	59.429.883	**78.970.272**
92	413591	UPP Kolonedale	2.606.221.995	-	**2.606.221.995**
93	287391	UPP Luwuk	138.012.475	-	**138.012.475**
94	287384	UPP Poso	5.690.000	-	**5.690.000**
95	652474	KSOP Kepulauan Seribu	903.581.500	-	**903.581.500**
96	652517	KSOP Marunda	172.381.700	774.834.200	**947.215.900**
97	413422	KSOP Utama Tanjung Priok	2.603.058.585	36.901.785.750	**39.504.844.335**
98	652563	KSOP Anggrek	-	84.939.893	**84.939.893**
99	287321	KSOP Gorontalo	9.385.918	107.407.587	**116.793.505**
100	413545	KSOP Ketapang	-	11.111.024	**11.111.024**
101	413313	KSOP Pontianak	223.388.316	1.222.539.964	**1.445.928.280**
102	521527	KSOP Kelas Khusus Batam	657.618.153	-	**657.618.153**

No	Kode Satker	Nama Satker	Pandu Tunda	Konsesi	Total
103	521594	KSOP Kijang	84.229.228	51.747.685	**135.976.913**
104	413180	KSOP Tanjung Balai Karimun	593.743.165	189.814.981	**783.558.146**
105	413168	KSOP Tanjung Pinang	-	25.789.483	**25.789.483**
106	413199	UPP Tanjung Uban	134.571.534	-	**134.571.534**
107	413200	UPP Tarempa	86.144.682	-	**86.144.682**
108	413307	KSOP Panjang	735.505.104	886.284.338	**1.621.789.442**
109	289712	UPP Kota Agung	96.381.946	-	**96.381.946**
110	287782	KSOP Biak	8.871.764	117.825.238	**126.697.002**
111	287778	KSOP Jayapura	32.236.767	267.620.178	**299.856.945**
112	287825	KSOP Merauke	15.587.516	275.422.125	**291.009.641**
113	521967	UPP Pomako	152.484.415	-	**152.484.415**
114	413494	KSOP Bau-Bau	143.612.071	-	**143.612.071**
115	287502	KSOP Kendari	20.103.311	216.390.284	**236.493.595**
116	287141	UPP Molawe	144.423.081	-	**144.423.081**
117	413256	KSOP Palembang	2.538.686.416	401.391.672	**2.940.078.088**
118	521620	UPP Sungai Lumpur	148.410.160	-	**148.410.160**
	TOTAL		**40.884.079.544**	**98.318.413.516**	**139.202.493.060**

6. Piutang PNBP

Total Piutang PNBP Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp29.918.846.663,- dengan kategori sebagai berikut:

a) Lancar Rp 1.442.233.858,-
b) Kurang lancar Rp 1.245.838.278,-
c) Diragukan Rp 41.766.200,-
d) Macet Rp27.189.008.327,-

a. Piutang dengan kategori lancar sebesar Rp1.442.233.858,- merupakan piutang atas pendapatan jasa kepelabuhanan dan pendapatan jasa konsesi yang tercatat pada:
   1) KSOP Teluk Bayur – PT. Gamindra Mitra Kesuma sebesar Rp931.395.833,-
   2) KSOPU Makassar – PT. Industri Kapal Indonesia sebesar Rp200.945.325,-
   3) UPP Namlea – PT. Wainibe Wood Industries sebesar Rp 93.750.000,-
   4) UPP Satui – PT. Putra Parahyangan Mandiri, PT. Rizqi Utama Indobara, Rp 40.850.000,-
   5) UPP Kolonedale – PT Celebes Diverssebesar Rp121.062.300,-
   6) UPP Dabo Singkep – PT. Telaga Bintan Jaya Rp 54.230.400,-

b. Piutang dengan kategori kurang lancar sebesar Rp1.245.838.278,- terdapat pada:
   1) KSOP Utama Makassar – PT. Industri Kapal Indonesia Rp393.142.568,-
   2) KSOP Kuala Cinaku – PT. Samantaka Batubara Rp 7.672.500,-

3) KSOP Tg. Balai Karimun – PT. Bias Delta Pratama Rp470.309.010,-
4) UPP Kolaka – PT. Alam Mitra Indah Nugraha,
PT. Lawaki Tiar Raya Rp188.989.200,-
5) KSOP Kepulauan Seribu – Temuan BPK terkait PNBP Rp185.725.000,-

c. Piutang dengan kategori Diragukan sebesar Rp41.766.200,- terdapat pada UPP Dabo Singkep atas jasa kepelabuhanan yang diberikan ke PT. Telaga Bintan Jaya.

d. Piutang dengan kategori Macet sebesar Rp27.189.008.327,- terdiri dari:

1) KSOP Kuala Langsa

Piutang pada Kantor KSOP Kuala Langsa dikategorikan macet sebesar Rp533.247.720,- merupakan piutang dari debitur PT. Blue Sky Langsa LTD. Piutang tersebut merupakan piutang atas penggunaan sewa perairan, namun perusahaan tersebut sudah tidak beroperasi sejak tahun 2017;

2) UPP Tarempa

a) Piutang macet pada Kantor UPP Tarempa sebesar Rp15.507.665.493,- untuk jasa kepelabuhanan (penggunaan perairan) dengan debitur PT. Pertalahan Arnebatara Natuna

b) Berdasarkan Perjanjian Penggunaan Tersus Migas Udang Marine Terminal Nomor KU.404/I/06/UPP-TPA-2016 Tanggal 17 Februari 2016

c) Pada tanggal 25 Oktober 2016 Kantor UPP Tarempa menyurati PT. Pertalahan Arnebatara Natuna mengenai Pembayaran Tagihan PNBP Penggunaan Perairan Tersus Udang dengan rincian sebagai berikut :

- periode tahun 2011 s.d. 2014 Rp 109.968.338,42
- periode tahun 2015 Rp1.761.052.794,33
- periode tahun 2016 Rp3.923.812.500,00

d) Pada tanggal 9 Desember 2016 PT. Pertalahan Arnebatara Natuna hanya melakukan pembayaran berdasarkan tarif sewa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 dengan tagihan PNBP periode tahun 2011 s.d. 2014 sebesar Rp109.968.338,42

e) Pada tanggal 14 Februari 2017 Kantor UPP Tarempa menerima surat tembusan dari Dirjen Hubla mengenai Pengenaan Tarif Atas Penggunaan Perairan TAC PEP – PT. Pertalahan Arnebatara Natuna yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan dengan nomor surat UM.002/5/18/DJPL-17 Tanggal 13 Januari 2017. Yang dimana pada lampiran-lampiran surat tersebut dapat diketahui ketidaksanggupan PT. Pertalahan Arnebatara Natuna untuk pembayaran PNBP penggunaan perairan tersebut dikarenakan perubahan tarif sewa pada

Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2015

f) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menindaklanjuti surat dari PT. Pertalahan Arnebatara Natuna mengenai peninjauan kembali tarif penggunaan perairan dengan nomor surat Pp.002/6/12/DJPL-17 tanggal 5 Juli 2017

g) Pada tanggal 14 Juli 2017 Presdir PT. Pertalahan Arnebatara Natuna menerbitkan Surat Pernyataan yang ditujukan kepada Kantor UPP Tarempa untuk melaksanakan lifting dan berkomitmen menjalankan operasi sesuai aturan yang berlaku, serta siap untuk tidak diberikan pelayanan apabila tidak memenuhi kewajiban yang tercantum pada surat pernyataan tersebut

h) Pada tanggal 5 November 2017 Kepala Kantor UPP Tarempa menyampaikan surat kepada PT. Pertalahan Arnebatara Natuna mengenai tindak lanjut dalam rangka penertiban administrasi terminal khusus udang marine terminal. Dikarenakan PT. Pertalahan Arnebatara Natuna tidak memenuhi kewajibannya. Sampai dengan saat ini PT. Pertalahan Arnebatara Natuna belum melakukan pembayaran tagihan PNBP yang dinyatakan sebagai piutang macet dengan rincian sebagai berikut:

-	Periode Tahun 2015	Rp 1.761.052.794,-
-	Periode Tahun 2016	Rp 3.923.812.500,-
-	Periode Tahun 2017	Rp 3.923.812.500,-
-	Periode Semester I 2018	Rp 1.212.254.036,-
-	Denda PT. PAN	Rp 4.686.733.663,-
	Total	Rp15.507.665.493,-

i) Pada tanggal 13 Juni 2019 sudah diadakan rapat kembali terkait pembahasan penggunaan perairan dengan PT. PAN yang dipimpin oleh Sesditjen Hubla

j) Pada Tanggal 18 Juni 2019 rapat ulang pembahasan luasan penggunaan perairan PT. PAN yang dipimpin oleh UPP Tarempa di Kantor Pusat dari hasil keputusan rapat tersebut belum ada hasil dan sudah bersurat ke Direktorat Kepelabuhanan tanggal 19 Juni 2019 perhitungan ulang

k) Pada tanggal 18 Juli 2019 peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Terpadu Ditjen Hubla untuk perhitungan luasan penggunaan perairan. Hasil peninjauan lapangan dengan luas perairan 1.536.992 m2 dengan jumlah penggunaan perairan tahun 2015 Rp6.045.741.679,-

l) Kantor UPP Tarempa pada tanggal 27 September 2019 telah berkirim surat kepada PT. PAN perihal Tindak lanjut hasil peninjauan lapangan dalam rangka perhitungan luas penggunaan perairan di Tersus Udang Natuna

m) Pada tanggal 20 April 2021 UPP Tarempa telah mengirim surat kepada KPKNL Batam terkait penyerahan pengurusan piutang negara atas PT. PAN;
n) Pada tanggal 23 Juni 2021 Kantor KPKNL Batam mengirimkan tanggapan kepada UPP Tarempa perihal Permintaan Kelengkapan Dokumen Penyerahan, sesuai Surat Kepala Kantor KPKNL Batam nomor S-861/Wkn.03/KNL.04/2021;
o) Pada tanggal 9 Agustus 2021, UPP Tarempa telah mengirim resume penyerahan pengurusan piutang negara atas PT. PAN (Surat No UM.001/2/19/UPP.TPA 2022)
p) Pada tanggal 21 Maret 2022 KPKNL Batam menanggapi permohonan pelimpahan pengurusan piutang PNBP dan menyatakan bahwa pihak KPKNL Batam belum dapat menerima pengurusan piutang PT. PAN (Surat No: S-138/KNL.0304/2022)
q) Tanggal 11 April 2022 UPP Tarempa mengirimkan penagihan kepada PT. PAN (Surat No: KU.102/1/8/UPP.TPA/2022). Penambahan nominal piutang menjadi Rp15.507.665.493,- sesuai dengan arahan dan hasil audit Inspektorat Jenderal.
r) Pada Tanggal 29 Juni 2022 PT. PAN menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut terkait permohonan Keringanan Piutang PNBP Penggunaan Perairan Tersus Udang Natuna terhadap perhitungan luas penggunaan perairan dan tariff baru (Surat No.013/PAN-HUBLA/VI/2022);
s) Tanggal 11 Juli 2022 UPP Tarempa menyampaikan progress tindak lanjut piutang PNBP PT. PAN kepada Inspektur Jenderal (Surat No.UM.002/5/12/UPP.TPA/2022);
t) Tanggal 14 November 2022 Inspektur Jenderal memberikan evaluasi atas tindak lanut piutang PNBP PT. PAN kepada UPP Tarempa dengan menyarankan UPP Tarempa melakukan koordinasi dengan Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan/atau Pengurus PKPU terkait (Surat No. PS.304/5/12/ITJEN/2022);
u) Tanggal 15 November 2022 UPP Tarempa menyampaikan koordinasi terkait tindak lanjut piutang PNBP PT. PAN kepada Kepala Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Surat No.:UM.002/8/4/UPP.TPA/2022);
v) Tanggal 12 Juli 2023 terdapat Surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1 A Khusus Nomor W10.U1.3847.Ht.03.VII.2023.03. perihal Tindak Lanjut Piutang PNBP PT. PAN (Pertalahan Arnebatara Natuna), bahwa Perkara Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. telah memiliki keputusan hukum,

yaitu menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Pemohon PT. Daya Nusa Gading terhadap Termohon PT. PAN.

w) Tanggal 27 Juli 2023 Kepala Kantor UPP Tarempa mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam dengan Nomor Surat UM.002/3/20/UPP.TPA/2023 tanggal 27 Juli 2023 bahwa UPT telah mengirimkan dokumen pendukung terkait penyerahan pengurusan piutang PT. Pertalahan Arnebatara Natuna

x) 26 Februari 2024 telah dilakukan pemanggilan terhadap PT. PAN oleh KPKNL Batam (Surat No. S-245/KNL.0304/2024)

y) 27 Mei 2024 dilakukan kembali peringatan pemanggilan terakhir dikarenakan PT. PAN tidak memenuhi ketentuan pada surat panggilan sebelumnya (Surat No. 716/KNL.0304/2024)

z) 08 Agustus 2024 KPKNL Batam telah menerbitkan Surat Paksa/ Pembentukan Panitia Urusan Piutang Negara Nomor SP-23/PUPNC.31.00/2024 Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Kepulauan Riau

3) Kantor Pusat Ditjen Hubla

Piutang Kantor Pusat termasuk katagori piutang macet atas Jasa Transportasi Laut kepada PT. PELNI (Persero) dari Tahun 2017. Nilai Piutang PNBP Kantor Pusat T.A. 2024 sebesar Rp5.456.966.013,- terdiri dari nilai piutang dengan mata uang rupiah sebesar Rp5.396.520.253,- dan mata uang USD3.741,15. Kantor pusat akan berkoordinasi dengan Insepktorat Jenderal untuk penelusuran lebih lanjut terkait Piutang PT. Pelni yang telah tercatat.

4) KSOP Utama Tanjung Perak

Piutang macet pada KSOP Utama Tanjung Perak sebesar Rp3.255.390.576,- untuk jasa kepelabuhanan (penggunaan perairan) dengan debitur PT. DOK dan Perkapalan Surabaya (DPS), dengan kronologis sebagai berikut:

a) Tanggal 23 Desember 2015
penandatanganan perjanjian kerjasama KSOPU Tg. Perak dengan PT. DPS

b) Tanggal 19 januari 2016
KSOPU Tg. Perak menerbitkan surat kepada PT. DPS untuk segera melaksanakan pembayaran penggunaan perairan periode I T.A. 2015

c) Tanggal 18 Februari 2016
KSOPU Tg. Perak menerbitkan surat tagihan penggunaan perairan kepada PT. DPS periode I 26 Maret s.d. 31 Desember 2015)

d) Tanggal 29 Februari 2016

Surat peringatan untuk PT. DPS segera melaksanakan pelunasan pembayaran penggunaan perairan periode I T.A. 2015

e) Tanggal 29 Maret 2016

KSOPU Tg. Perak menerbitkan surat tagihan penggunaan perairan kepada PT. DPS periode II (01 Januari s.d. 31 Desember 2016)

f) Tanggal 30 maret 2016

Surat pemberitahuan pengenaan denda kepada PT. DPS atas penangguhan pembayaran penggunaan perairan tahun 2015 dengan denda sebesar 2% sesuai pp nomor 29 tahun 2009

g) Tanggal 3 Mei 2016

Surat tagihan penggunaan perairan periode I (T.A. 2015) kepada PT. DPS sebesar Rp246.697.538,- dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 29 Mei 2016

h) Tanggal 10 juni 2016

Surat tagihan penggunaan perairan periode I (T.A. 2015) kepada PT. DPS sebesar Rp251.631.489,- dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 28 Juni 2016

i) Tangal 10 juni 2016

Surat tagihan penggunaan perairan periode II (T.A. 2016) sebesar Rp314.160.224,- dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 27 Juni 2016

j) Tanggal 30 Juni 2016

Surat tagihan penggunaan perairan periode I (T.A. 2015) kepada PT. DPS sebesar Rp256.664.119,- dan jatuh tempo pemabayaran tanggal 28 Juli 2016;

k) Tanggal 30 Juni 2016

Surat tagihan penggunaan perairan periode II (T.A. 2016) kepada PT. DPS sebesar Rp320.443.429,- dan jatuh tempo pemabayarn tanggal 27 juli 2016

l) Tanggal 21 Juli 2016

PT. DPS baru mengirimkan surat balasan/tanggapan terhadap surat-surat yang telah KSOPU kirimkan dengan mengajukan permohonan skema pembayaran pelunasan penggunaan perairan dan penghapusan denda keterlambatan pembayaran penggunaan perairan periode I (T.A. 2015) dan periode II (T.A. 2016) dengan alasan mengalami kesulitan likuiditas;

m) Tanggal 2 Agustus 2016

Surat tagihan penggunaan perairan periode I (T.A. 2015) kepada PT. DPS sebesar Rp261.797.401,- dan tanggal jatuh tempo 27 agustus 2016;

n) Tanggal 2 Agustus 2016

Surat tagihan penggunaan perairan periode II (T.A. 2016) kepada PT. DPS sebesar Rp326.852.298,- dan tanggal jatuh tempo 26 Agustus 2016

o) Tanggal 25 Agustus 2016

KSOPU Tg. Perak membuat surat balasan atas surat dari PT. DPS tanggal 21 Juli 2016 yang pada dasarnya satkerm tetap mengharuskan PT. DPS melaksankan pembayaran sesuai perjanjian penggunaan perairan dan untuk penghapusan denda keterlambatan menunggu arahan dari kantor pusat DJPL;

p) Tanggal 29 Nopember 2016

KSOPU Tg. Perak kembali mengirinkan surat kepada PT. DPS bahwa denda keterlambatan tidak bisa dihapuskan dan segera melaksanakan pembayaran tagihan periode 2015 dan 2016;

q) Tanggal 6 Januari 2017

Surat tagihan penggunaan perairan PT. DPS periode I dan II sebesar Rp649.916.832,- jatuh tempo pembayaran periode I tanggal 24 Januari 2017 dan periode II tanggal 23 Januari 2017;

r) Tanggal 20 Januari 2017

Surat tagihan penggunaan perairan PT. DPS periode III (01 Januari s.d. 31 Desember 2017);

s) Tanggal 30 Januari 2017

Surat tagihan penggunaan perairan PT. DPS periode I dan II sebesar Rp662.915.169,- jatuh tempo pembayaran periode I tanggal 23 Februari 2017 dan periode II tanggal 22 Februari 2017;

t) Tanggal 7 Februari 2017

Manajemen PT. DPS di undang ke KSOPU Tg. Perak untuk membahas pembayaran penggunaan perairan periode I dan II;

u) Tanggal 16 Februari 2017

Surat dari PT. DPS mengenai permohonan skema pelunasan pembayaran penggunaan perairan TA. 2015 s.d. 2017 dan dilampirkan laporan keuangan PT. DPS tahun 2013-2015;

v) Tanggal 14 Maret 2017

KSOPU Tg. Perak mengirimkan surat ke kantor pusat DJPL perihal arahan pembayaran penggunaan perairan PT. DPS tahun 2015, 2016 dan 2017;

w) Tanggal 6 April 2017

KSOPU Tg. Perak mengirikan surat kepada PT. DPS perihal penyerahan audit Laporan Keuangan oleh auditor independen untuk rencana pembayaran

penggunaan perairan PT. DPS;

x) Tanggal 19 April 2017

PT. DPS menyampaikan surat laporan hasil audit dan permohonan jangka waktu pembayaran kepada KSOPU Tg. Perak;

y) Tanggal 2 Mei 2017

KSOPU Tg. Perak menghadiri undangan dari kantor pusat Kemenhub tentang pembahasan permasalahan pembayaran PNBP penggunaan perairan PT. DPS dan PT. dumas dengan hasil risalah rapat bahwa KSOPU Tg. Perak harus melakukan koordinasi dengan KPPN setempat;

z) Tanggal 15 mei 2017

KSOPU Tg. Perak mengirimkan surat ke kantor pusat DJPL perihal hasil koordinasi mengenai pembayaran penggunaan perairan PT. DPS antara kantor KSOPU Tg. Perak dengan Kanwil Perbendaharaan Jawa Timur;

aa) Tanggal 31 Oktober 2017

Berita Acara rekonsiliasi piutang PNBP penggunaan perairan PT. DPS per 31 Oktober 2017;

bb) Tanggal 27 Nopember 2017

Surat tagihan pembayaran pengggunaan perairan:

(1) periode tahun 2015 sebesar Rp359.391.730 jatuh tempo tanggal 22 Desember 2017
(2) periode tahun 2016 sebesar Rp448.698.162 jatuh tempo tanggal 21 Desember 2017
(3) periode tahun 2017 sebesar Rp368.088.774 jatuh tempo tanggal 19 Desember 2017;

cc) Tanggal 27 Desember 2017

Surat tagihan pembayaran pengggunaan perairan :

(1) periode tahun 2015 sebesar Rp366.579.564 jatuh tempo tanggal 21 Januari 2018
(2) periode tahun 2016 sebesar Rp457.672.125 jatuh tempo tanggal 20 Januari 2018
(3) periode tahun 2017 sebesar Rp375.450.550 jatuh tempo tanggal 19 Januari 2018

dd) Sesuai hasil rapat di Biro Keuangan dan Perlengkapan pada tanggal 4 September 2017 bahwa tindak lanjut ke Kementerian Keuangan tentang permohonan keringanan pembayaran penggunaan perairan akan dilakukan

setelah ada ijin operasional PT. DPS dan untuk tagihan tahun 2017 harus tetap dibayar sambil mengurus surat ijin tersebut; Sampai saat ini belum ada realisasi pembayaran untuk tagihan TA. 2017 oleh PT. DPS;

ee) Pada tanggal 6 November 2018 telah dilaksanakan rapat lanjutan dengan hasil piutang akan tetap dihitung ditambah denda dan menunggu audit dari BPKP;

ff) Piutang Macet PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)/PT. DPS. DPS Posisi s.d. 31 Desember 2019 sebesar Rp2.120.832.253 (periode 2015-2019)

gg) Tindak Lanjut terhadap piutang PT. DPS tersebut yaitu:

(1) Rapat koordinasi antara KSOPU Tanjung Perak dengan PT. DPS menghadirkan BPKP Provinsi Jawa Timur, KPKNL dan Biro Keuangan Kemenhub pada tanggal 28 Oktober 2019;

(2) KSOPU Tanjung Perak terkait penghapusan piutang PT. DPS harus ada audit BPKP dan dari Inspektorat Jenderal Kemenhub;

(3) PT. DPS menyampaikan bahwa telah mengalami kerugian selama 9 tahun terakhir dan sedang dalam proses restrukturisasi;

(4) Atas permohonan penghapusan piutang PT. DPS dari BPKP menyampaikan bahwa PT. DPS harus mengajukan ke instansi terkait yang kemudian akan dimintakan audit ke BPKP;

(5) Biro Keuangan menyampaikan bahwa terkait piutang PT. DPS sesuai PP Nomor 14 tahun 1985 harus melalui BPKP, Inspektorat, KPKNL dan Kemenhub;

(6) KPKNL menyatakan terkait piutang PT. DPS dapat diselesaikan antara KSOPU Tanjung Perak dengan PT. DPS;

(7) KSOPU Tanjung Perak telah melaporkan hasil rapat terakhir pembahasan piutang penggunaan peraira PT. DOK dan Perkapalan Surabaya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Surat Kepala KSOPU Tanjung Perak Nomor KU.102/08/12/OP.TPr-19 tanggal 7 November 2019 perihal Laporan Hasil Rapat Pembahasan Piutang PNBP PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) periode 2015-2019, dari surat tersebut belum ada arahan lebih lanjut;

(8) KSOPU Tanjung Perak telah mengajukan permohonan kepada BPKP Provinsi Jawa Timur agar dapat dilakukan audit secara menyeluruh terkait Laporan Keuangan PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero). Dan atas segala biaya yang timbul dari audit tersebut dibebankan kepada PT. DPS melalui Surat Kepala KSOPU Tanjung Perak Nomor KU. 501/01/09/OP.TPr-

2020 tanggal 15 September 2020 perihal Permohonan Audit

(9) Pembayaran piutang sebesar Rp25.000.000,- dengan nomor NTPN 0313C3CIF17S0B67 tanggal 28 Februari 2022;

(10) Pembayaran piutang Tanggal 14 Febrauari 2022 nomor NTPN AEBF77QLU667DGDA sebesar Rp25.000.000,-;

(11) Pembayaran piutang sebesar Rp25.000.000,- tanggal 27 April 2022 NTPN AACD13CIF1GONO59

5) KSOP Manado

Piutang macet penggunaan perairan pada Kantor KSOP Manado sebesar Rp7.200.000,- atas Jasa yang diberikan kepada PT. Manado Tua Indah.

6) UPP Satui

Piutang macet pada UPP Satui sebesar Rp599.306.000,- merupakan piutang atas sewa penggunaan perairan dengan beberapa BUP.

7) KSOP Tanjung Pinang

Piutang pada Kantor KSOP Tanjung Pinang dikategorikan macet sebesar Rp33.763.000,- merupakan piutang dengan debitur PT. Alima Usaha Samudera

8) UPP Labuhan Maringgai

Piutang kategori macet sebesar Rp38.400.000,- atas jasa yang diberikan kepada PT. Jaya Pasific Propertindo terkait piutang penggunaan perairan.

9) UPP Amahai

Piutang kategori macet sebesar Rp112.500.000,- berupa Temuan Inspektorat Jenderal atas kelebihan volume pada pembangunan faspel laut Tehoru T.A. 2017 dan T.A. 2018. Nilai piutang disajikan sesuai dengan Surat UPP Amahai nomor KU.504/28/19/UPP.AMH-21 tanggal 23 September 2021.

Pada tanggal 15 November 2024 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp25.000.000,- sesuai NTPN 621A155DF9U2H416, sehingga Saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp87.500.000,-

10) KSOP Bakauheni

Piutang kategori macet sebesar Rp4.000.000,- berupa piutang atas jasa yang diberikan kepada PT. BDAP (Batu Dewata Alam Persada)

11) UPP Pomako

Piutang kategori macet sebesar Rp180.754.100,- berupa Temuan Inspektorat Jenderal atas pegawai kantor tersebut

12) KSOP Tegal

Piutang kategori macet sebesar Rp4.120.800,- atas jasa yang diberikan kepada

PT. Bintang Makmur Swadaya dan PT. Samudera Dockindo Prima

13) **KSOP Banten**

Piutang kategori macet sebesar Rp23.750.000,- atas jasa yang diberikan kepada PT. Berlian Portindo

14) **KSOP Teluk Bayur**

Piutang kategori macet sebesar Rp1.024.535.416,- atas jasa yang diberikan kepada PT. Gamindra Mitra Kesuma.

15) **UPP Kintap**

Piutang kategori macet sebesar Rp391.104.000,- atas jasa yang diberikan kepada PT. Indonesian Minerals & Coal Mining.

16) **UPP Raja Ampat**

Piutang kategori macet atas Temuan Itjen terkait Faspel – PT. Nurham Rp41.305.209,-.

7. Piutang BLU

Piutang BLU di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp171.555.000,- berupa Piutang BLU Pelayanan Kesehatan (Operasional) yang tercatat pada satker BKKP dengan klasifikasi lancar atas jasa yang diberikan kepada Akademi Maritim Pembangunan Jakart, penerima jasa lainnya.

8. Piutang Tuntutan Perbendaharan dan Tuntutan Ganti Kerugian

Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.147.076.137,- yang tercatat pada UPP Lapuko sebesar Rp1.140.216.137,- dan UPP Tilamuta sebesar Rp6.860.000,-. Pencatatan Piutang TGR pada UPP Lapuko berdasarkan SKTJM a.n. Abdul Rahman atas kerugian/kekurangan yang disebabkan tidak disetorkannya uang PNBP pada Kantor UPP Lapuko Bulan Juli 2013 s.d. April 2014. Pelunasan atas piutang tersebut dilakukan oleh ybs. dengan melakukan pemotongan atas Gaji, Tunjangan Kinerja, dll. sebesar Rp2.500.000,- setiap bulannya. Selain itu, Piutang TP TGR pada UPP Tilamuta disajikan berdasarkan SK Nomor PS.304/5/7/ITJEN/2024 tanggal 23 September 2024 a.n. ABD Muis Puti atas Kehilangan BMN berupa Sepeda Motor sebesar Rp9.800.000,- yang telah di angsur sebanyak 3 (tiga) kali sebesar masing-masing Rp980.000,-

9. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut T.A. 2024 sebesar Rp7.160.475.295,- yang terdapat pada KSOP Palembang. Piutang tersebut merupakan Piutang TP-TGR Pihak Ketiga (PT. Mekarjaya Abadipratama) terhadap Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Palembang

Tahun Anggaran 2015. Pencatatan Piutang TP/TGR dilakukan berdasarkan SKTJM tanggal 08 Maret 2018 dengan Nilai Kerugian Negara sebesar Rp7.660.475.294. Berdasarkan SKTJM tanggal 12 Juli 2019, Pihak Ketiga telah melakukan pembayaran sebesar Rp150.000.000,-, sehingga kekurangannya sebesar Rp7.510.475.294. Sesuai dengan Surat Kepala Kantor KSOP Palembang Nomor UM.003/23/14/KSOP.PLG-2021 tanggal 01 Oktober 2021 perihal Penyampaian Progres Tindak Lanjut Kerugian Negara, bahwa berdasarkan surat Direktur PT. Mekarjaya Abadipratama Nomor 01/MJAP/IX/22021 tanggal 30 September 2021, PT. Mekarjaya Abadipratama berkomitmen untuk mengangsur sebesar Rp10.000.000,- per bulan yang dimulai sejak September 2021.

10. Konsesi

a. Dasar Hukum Konsesi:
   1) PP Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
   2) PP Nomor 15 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;
   3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
   4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 tahun 2021 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan;
   5) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/4/16/DJPL-18 tentang tata cara penerimaan, penyetoran, penggunaan dan pelaporan penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
   6) Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 718 Tahun 2022 tentang Rekonsiliasi dan Pembayaran PNBP Hasil Konsesi dan Kerjasama Lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

b. Pengertian Konsesi

   Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 tahun 2021 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan, disebutkan bahwa:
   1) Konsesi adalah pemberian hak oleh Penyelenggara Pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.

2) Pendapatan Konsesi adalah pendapatan yang diterima oleh Penyelenggara Pelabuhan akibat pemberian hak yang diberikan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu.

c. Mekanisme Konsesi

1) Konsesi adalah pemberian hak oleh Penyelenggara Pelabuhan kepada BUP untuk melakukan Kegiatan Pengusahaan dalam jangka waktu tertentu dan dengan Pendapatan Konsesi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Konsesi;
2) Penyelenggara Pelabuhan adalah Kantor KSOPU dan KSOP tertentu sebagaimana tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.104/138/20/DJPL-15 Tanggal 9 November 2015.
3) Kegiatan Pengusahaan adalah Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang meliputi penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang serta jasa terkait dengan kepelabuhanan.
4) Area Konsesi adalah wilayah di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) daratan yang eksisting dikuasai oleh BUP yang dibuktikan dengan sertifikat, atau telah tercatat sebagai aset BUP, dan bagian perairan yang digunakan untuk bangunan di atas air dan/atau bawah air sebagai fasilitas Kegiatan Pengusahaan pada masing-masing pelabuhan;
5) Pendapatan Konsesi adalah Pendapatan yang diterima oleh Penyelenggara Pelabuhan akibat pemberian konsesi kepada BUP;
6) Ruang Lingkup perjanjian konsesi adalah Pemberian Hak kepada BUP untuk melakukan Kegiatan Pengusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran di Area Konsesi pada pelabuhan yang diusahakan BUP dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.104/138/20/DJPL-15 Tanggal 9 November 2015;
7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 tahun 2021 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan, bahwa *consession fee* sekurang-kurangnya sebesar 2,5% dari pendapatan bruto (Pasal 39).
8) Jenis-jenis jasa kepelabuhanan yang dikonsesikan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 tahun 2021 sebagai berikut:
   a) Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Dermaga untuk bertambat

b) Penyediaan dan/atau Pelayanan Pengisian Bahan Bakar dan Pelayanan Air Bersih
c) Penyediaan dan/atau Pelayanan Fasilitas Naik Turun Penumpang dan/ atau Kendaraan
d) Penyediaan dan/ atau Pelayanan Jasa Dermaga untuk Pelayanan Bongkar Muat Barang dan Petikemas
e) Penyediaan dan/ atau Pelayanan Jasa Gudang dan Tempat Penimbunan Barang, Alat Bongkar Muat dan Peralatan Pelabuhan
f) Penyediaan dan/ atau Pelayanan Jasa Terninal Peti Kemas, Curah Air, Curah Kering, dan Roro
g) Penyediaan dan/ atau Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang
h) Penyediaan dan/ atau Pelayanan Pusat Distribusi dan Konsolidasi Barang
i) Penyediaan dan/ atau Pelayanan Jasa Penundaan Kapal

9) Kepala KSOPU melakukan koordinasi terhadap–pelaksanaan konsesi antara Kepala KSOP dengan General Manager Cabang PT. Pelindo masing-masing serta berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan konsesi tersebut;
10) Rekonsiliasi PNBP hasil konsesi antara Penyelenggara Pelabuhan dengan BUP PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) dilakukan tiap bulan di tempat masing-masing kantor penyelenggara pelabuhan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya dan dituangkan dalam berita acara dan ditembuskan kepada Direktorat Kepelabuhanan dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut c.q. Bagian Hukum dan KSLN; Apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur maka dimajukan pada hari kerja sebelumnya;
11) Rekonsiliasi terhadap konsesi fasilitas pelabuhan eksisting antara Penyelenggara Pelabuhan dengan BUP PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) sebagai dasar pelaksanaan pembayaran termin konsesi untuk periode triwulan di tempat masing-masing Kantor Otoritas Pelabuhan Utama dilakukan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya pada tiap periode triwulannya (bulan pertama pada triwulan selanjutnya) yang dikoordinasikan oleh Kantor KSOPU dengan melibatkan Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Laut yang dituangkan dalam berita acara dan ditembuskan kepada Direktorat Kepelabuhanan dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut c.q. Bagian Keuangan dan Bagian Hukum dan KSLN;
12) Objek kegiatan jasa kepelabuhanan yang dikonsesikan dan dikerjasamakan yang belum tercantum atau terjadi perubahan dalam perjanjian, maka wajib

dilaksanakan perubahan perjanjian (addendum) yang disepakati/ditandatangani bersama antara masing-masing Kepala KSOPU dengan Direktur Utama BUP;

13) Jangka waktu perhitungan pendapatan PNBP hasil konsesi adalah 1 (satu) tahun takwim anggaran;
14) Apabila perjanjian ditandatangani tidak dalam 1 (satu) tahun takwim, maka perhitungan pendapatan hasil konsesi dan kerjasama lainnya dimulai dari awal perjanjian sampai dengan akhir Desember tahun tersebut. Periode triwulan selanjutnya sesuai bulan takwim anggaran yaitu Triwulan I yaitu 1 Januari s.d. 31 Maret, Triwulan II yaitu 1 April s.d. 30 Juni, Triwulan III yaitu 1 Juli s.d. 30 September dan Triwulan IV yaitu 1 Oktober s.d. 31 Desember. Perubahan periode Ini akan dilaksanakan perubahan perjanjian (addendum) Perjanjian Konsesi yang disepakati/ditandatangani bersama antara masing-masing Kepala KSOPU dengan Direktur Utama BUP;
15) Pembayaran PNBP hasil Konsesi dilaksanakan dalam 4 (empat) periode dalam 1 (satu) tahun yaitu setiap 3 (tiga) bulan paling lambat pada tanggal 25 bulan berikutnya;
16) Perhitungan PNBP hasil konsesi selama 1 (satu) tahun berdasarkan pendapatan bruto yang tercantum dalam Laporan Keuangan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang diserahkan paling lambat tanggal 14 April tahun berikutnya;
17) Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pembayaran dari hasil audit oleh Akuntan Publik maka akan diperhitungkan kembali pada triwulan berikutnya;
18) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menerbitkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 738 Tahun 2023 tentang Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Konsesi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai Tindak Lanjut Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengaturan dasar perhitungan pendapatan PNBP Konsesi yang menggunakan pendapatan bruto. Pengaturan Perhitungan Pendapatan Bruto sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2021 sesuai pasal 39 ayat (1) yaitu Pendapatan konsesi dihitung berdasarkan formula hubungan antara proyeksi trafik pelabuhan, skema tarif pelabuhan, besaran investasi, besaran konsesi minimal 2,5 % dari pendapatan bruto, dan jangka waktu konsesi, sedangkan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/4/16/DJPL-18 Tahun 2018 pasal 20 ayat (11) terdapat Komponen yang

dikecualikan dari perhitungan pendapatan konsesi yaitu biaya Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan jasa pemanduan kapal.

19) Konsesi di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri atas konsesi Existing dan Konsesi Non-Existing dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Satker	Nama BUP	Nomor Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu (Tahun)
KONSESI EXISTING					
1	KSOP UTAMA BELAWAN	Pelindo Reg I	HK.107/l/2/OP.BLW-20	9 November 2015	30
2	KSOP UTAMA TANJUNG PRIOK	Pelindo Reg II	HK.107/1/7/OP.TPK-15	11 Nopember 2015	50
3	KSOP UTAMA TANJUNG PERAK	Pelindo Reg lll	HK.107/01/12/OP.TP-15	9 November 2015	30
4	KSOP UTAMA MAKASSAR	Pelindo Reg IV	HK.107/07/01/OP.MKS-15	9 November 2015	30
KONSESI NON-EXISTING					
1	KSOP KUALA TANJUNG	Pelindo I - Terminal Curah Cair KualaTanjung	HK.107/1/1/KSOP.KTG-15	23.Januari 2015	69
2	KSOP UTAMA TANJUNG PRIOK	Pelindo II - Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok	PP.001/1/1/OP.TPK-12	31 Agustus 2012	70
3	KSOP UTAMA TANJUNG PERAK	Pelindo lll - Terminal MultiPurpose Teluk Lamong-TTL	HK.107/01/06/0P.TPR-15	19 Mei 2015	72
4	KSOP UTAMA TANJUNG PERAK	Pelindo lll - Alur Pelayaran Barat Surabaya - APBS	HK.107/0l/05/0P.TPR-14	8 Mei 2014	25
5	KSOP UTAMA MAKASSAR	Pelindo IV - Terminal Makassar NewPort	HK.107/02/01/OP.MKS-15	19 Mei 2015	70
6	KSOP MARUNDA	PT. Karya Citra Nusantara (KCN)	HK.107/1/9/KSOP.Mrd-16	29 November 2016	70
7	KSOP MARUNDA	PT. Pelabuhan Tegar Indonesia (PTI)	HK.107/1/2/KSOP.Mrd-17	24 Mei 2017	65
8	KSOP PONTIANAK	PT. Indo Container Sarana (ICS)	PP.008/1/6/KSOP.PTK/18	14 Maret 2018	61
9	KSOP PONTIANAK	PT. Pelindo - Terminal Kijing	PP.008/1/3/KSOP.PTK.2018	12 Juli 2018	69
10	KSOP BANTEN	PT. Krakatau Bandar Samudera (KBS)	HK.107/2/2/KSOP.Btn-16	14 November 2016	75
11	KSOP BANTEN	PT. Bandar Bakau Jaya (BBJ)	HK.107/2/6/KSOP.BTN-2020	23 Juli 2020	73
12	KSOP BANTEN	PT. Batu Alam Makmur	003/BAM-KSOP/PK/IV/2022	21 April 2022	16
13	UPP BRONDONG	PT. Lamongan Intergrated Shorbase (US)	HK.201/1/14/UPP.BRG-2020	25 Juli 2020	72
14	KSOP BANJARMASIN	PT. Indonesia MultiPurpose Terminal (IMPT)	PP.008/01/01/KSOP.BJM.18	15 September 2015	49
15	KSOP BANJARMASIN	PT. Ambang Barito Nusapersada	HK.201/01/02/KSOP.BJM-2022	20 September 2022	20
16	KSOP SAMARINDA	PT. Sarana Abadi Lestari (SAL)	Al.302/3/5/KSOP.SMD-2020	17 Juni 2020	37
17	KSOP SAMARINDA	PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara (PT. PTB)	Al.301/6/11/KSOP.SMD-2020	4 December 2020	25
18	KSOP GRESIK	PT. Berlian Manyar Sejahtera (RMS)	HK.107/01/10/Ksop.Gsk-2017	15 December 2017	76
19	KSOP GRESIK	PT. Siam Maspion (SM)	Al.301/02/19/Ksop.Gsk-2020	8 Agustus 2020	43
20	KSOP KOTABARU-BATU LICIN	PT. Swangi lndah (SI)	KL003/0l/14KSOP.KRRL-19	4 October 2019	21
21	KSOP TALANG DUKUH	PT. Wahyu Samudera lndah (WSI)	PP.001/1/16/KSOP.TLD.2016	27 October 2016	66
22	KSOP UTAMA BELAWAN	Tenninal Petikemas Belawan Fase11350m	PR.801/l/9/OP.BLW-14 Addendum UM.0022/3/8/OP.BLW-2016	04 April 2014 9 February 2016	70
23	UPP SATUI	PT. Bina lndo Raya (PT. BIR)	HK.201/1/1/UPP.Satui-2022	12 April 2022	25
24	KSOP BALIKPAPAN	PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka	HK.201/1/3/KSOP.BPN-2022	13 Juli 2022	35
25	KSOP BALIKPAPAN	PT. Lestari Samudra Sakti	HK.201/1/5/KSOP.BPN-2022	30 Agustus 2022	55
26	KSOP PROBOLINGGO	PT. Delta Artha Bahari Nusantara (DABN)	PP.002/1/17/KSOP-Pbl-17	21 Februari 2017	64
27	KSOP TANJUNG BALAI KARIMUN	PT Asinusa Putra Sekawan	HK.201/1/2/KSOP.TBK-2022	07 Juni 2022	24
28	UPP RANGGA ILUNG	PT Bangun Nusantara Jaya Makmur Perkasa	HK.701/86/VII/UPP.RI-2022	13 Juli 2022	15
29	KSOP KENDARI	PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)	HK.201/14/135/KSOP.KDI-2022	25 November 2022	67
30	KSOP BALIKPAPAN	PT. Indika Logistic & Support Service (ILSS)	UM.002/17/13/KSOP.BPN-2023	27 Maret 2023	31
31	KSOP ANGGREK	PT. Anggrek Gorontalo Intemasional Termninal (AGIT)	HK.201/2/13/DJPL/2021	30 Juli 2022	30
32	KSOP PATIMBAN	PT. Pelabuhan Patimban Internasional	HK.201/1/16/DJPL/2021	17 Maret 2021	40

B. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

1. Kronologis Pagu Anggaran

a.	**DIPA Ditjen Perhubungan Laut TA.2024** **Nomor: DIPA-022.04-0/2024 tanggal**	Rp9.550.026.444.000,-
b.	**Luncuran Pagu PHLN** **Penambahan pagu anggaran sumber dana PLN JICA Proyek Pembangunan Pelabuhan Patimban, sebesar Rp1.351.505.155.000,- sesuai surat Kementerian Keuangan Nomor S-131/AG/AG.3/2024 tanggal 31 Januari 2024**	Rp10.901.531.599.000,-
c.	**Luncuran Pagu SBSN TA. 2022** **Lanjutan pelaksanaan kegiatan/proyek SBSN/luncuran sisa anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (TA 2023) yang dilanjutkan ke TA 2024 sebesar Rp47.724.400.000,- sesuai surat Kementerian Keuangan Nomor S-183/AG/AG.3/2024 tanggal 20 Februari 2023**	Rp10.949.255.999.000,-
d.	**Luncuran Pagu PHLN** **Pencantuman alokasi tambahan anggaran PHLN ADB dalam rangka percepatan pekerjaan Rehabilitation and Reconstruction of Port Facilities in Pantoloan, Donggala and Wani (Loan No.3792-INO:EARR) TA. 2024 sebesar Rp 206.488.109.000,-**	Rp11.155.744.108.000,-
e.	**Realokasi Ke Sesjen Kemenhub** **Pergeseran/realokasi anggaran antar antar eselon I dalam program yang sama, yakni dari Ditjen Hubla ke Setjen Kemenhub sebesar Rp 3.132.256.000,-**	Rp11.152.611.852.000,-
f.	**Penambahan Pagu PNBP (Tahap I)** **Penambahan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp868.976.096.000,-**	Rp12.021.587.948.000,-
g.	**Penambahan Pagu PNBP (Tahap II)** **Penambahan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp54.773.342.000,-**	Rp12.076.361.290.000,-
h.	**Realokasi belanja pegawai ke Sesjen** **Pergeseran/realokasi anggaran antar antar eselon I dalam program yang sama, yakni dari Ditjen Hubla ke Setjen Kemenhub Rp1.500.000.000,-**	Rp12.074.861.290.000,-
i.	**Penambahan PHLN KSOP Patimban** **Percepatan penarikan PLN JICA Proyek Pembangunan Pelabuhan Patimban Phase (I2) sebesar Rp800.000.000.000,-;**	Rp12.874.186.290.000,-
j.	**Penambahan Pagu PNBP (Tahap III)** **Penambahan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp268.950.417.000,-**	Rp13.143.136.707.000,-
k.	**Luncuran Pagu PHLN** **Penambahan pagu penggunaan PHLN sebesar Rp1.217.261.163.000,-**	Rp14.360.397.870.000,-
l.	**Penambahan Pagu PNBP (Tahap IV)** **Penambahan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp120.139.691.000,-**	Rp14.480.537.561.000,-
m.	**Penambahan Pagu BLU** **Penambahan pagu BLU sebesar Rp31.520.993.000,-**	Rp14.512.058.554.000,-
n.	**Penambahan Pagu PNBP dan PHLN ATON** **Penambahan pagu PNBP dan PHLN ATON sebesar Rp116.940.511.000,-**	Rp14.628.999.065.000,-

o.	**Pengurangan Pagu PHLN** **Pengurangan pagu PHLN Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Donggala dan Pelabuhan Wan sebesar Rp2.939.401.000,-**	Rp14.626.059.664.000,-
p.	**Penambahan Pagu HLN sebesar Rp15.790.732.000,-**	Rp14.638.480.234.000,-

2. Kronologis Revisi Anggaran

a. Revisi 1 sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan S-54/AG/AG.3/2024 tanggal 25 Januari 2024, Revisi anggaran berupa pemblokiran anggaran (*automatic adjustment*) sebesar Rp477.010.075.000,- pada DIPA Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;

b. Revisi 2 sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor Surat pengesahan S-131/AG/AG.3/2024 tanggal 31 Januari 2024

1) Penambahan anggaran/percepatan penarikan PLN JICA kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Patimban sebesar Rp1.351.505,155.000,- terdiri dari Phase I-1 (Loan Agreement IP-577) sebesar Rp314.575.599.000,- dan Phase I-2 (Loan Agreement IP-583) sebesar Rp1.036.929.556.000,-
2) Pergeseran/realokasi anggaran antar satker sumber Rupiah Murni (RM) guna penyelenggaraan angkutan laut perintis sebesar Rp41.568.313.000,-, dan
3) Penghapusan Catatan Halaman IV.A DIPA (buka blokir) kegiatan dibidang dukungan keperintisan angkutan laut sebesar Rp2.000.000.000,-

c. Revisi 3 sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-183/AG/AG.3/2024 tanggal 20 Februari 2024, Revisi anggaran dalam rangka:

1) Pergeseran/realokasi anggaran antar satker dalam rangka reorganisasi di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut sumber dana SBSN sebesar Rp60.000.000.000,-
2) Lanjutan/luncuran pelaksanaan kegiatan/proyek SBSN Tahun Anggaran sebelumnya (T.A. 2023) yang dilanjutkan ke T.A. 2024 sebesar Rp47.724.400.000,-
3) Penambahan anggaran/percepatan penarikan PLN ADB Loan No.3792-INO:EARR pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pelabuhan Teluk Palu, sebesar Rp206.488.109.000,-
4) Revisi administratif, berupa ralat kode nomor register SBSN kegiatan Pembangunan Menara Suar Karang Singa, semula S0220423 menjadi M0220423, dan
5) Penghapusan Catatan Halaman IV.A DIPA (buka blokir) pada satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat sebesar Rp28.181.289.000,-.

d. Revisi 4 sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-224/AG/AG.3/2024 tanggal 16 Maret 2024, Revisi

anggaran berupa Usulan revisi anggaran berupa pergeseran anggaran antar unit Eselon I dari Ditjen Perhubungan Laut ke Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan untuk memenuhi anggaran fasilitas sewa rumah perwakilan Kementerian Perhubungan di luar negeri sebesar Rp3.132.256.000,-.

e. Revisi 5 sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-245/AG/AG.3/2024 tanggal 23 Maret 2024, Usulan revisi anggaran berupa revisi:
   1) Penghapusan catatan halaman IV A DIPA (buka blokir) kegiatan Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Dawelor sebesar Rp6.620.000.000,-;
   2) Penambahan pagu penggunaan PNBP Ditjen Perhubungan Laut guna pemenuhan kebutuhan kegiatan prioritas Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp868.976.096.000,-
   3) Realokasi/pergeseran anggaran antar satker dalam rangka pengalokasian anggaran UPT baru dan pemenuhan kebutuhan kegiatan prioritas Ditjen Hubla sebesar Rp56.415.267.000,-, terdiri dari sumber dana Rupiah Murni (RM) sebesar Rp9.808.059.000,- dan sumber dana PNBP sebesar Rp46.607.208.000,-.
f. Revisi 6 sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-366/AG/AG.3/2024 tanggal 7 Juni 2024, Usulan revisi anggaran berupa revisi:
   1) Penghapusan catatan halaman IV B DIPA satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat sebesar Rp9.800.000.000,-;
   2) Realokasi/pergeseran anggaran atar unit eselon I dalam satu program yang sama dari Ditjen Hubla ke Itjen Kemenhub sebesar Rp1.500.000.000,-;
   3) Penambahan pagu penggunaan PNBP guna pemenuhan kebutuhan kegiatan prioritas Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp54.073.342.000,-, dan
   4) Realokasi/pergeseran anggaran antar satker dalam rangka pemenuhan kebutuhan kegiatan prioritas Ditjen Hubla sebesar Rp185.909.507.000,-, terdiri dari sumber dana Rupiah Murni (RM) sebesar Rp31.654.546.000,- dan sumber dana PNBP sebesar Rp154.254.961.000,-.
g. Revisi 7 sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-390/AG/AG.3/2024 tanggal 24 Juni 2024, Usulan revisi anggaran berupa revisi:
   1) Penambahan anggaran/percepatan penarikan PLN JICA Loan Agreement IP-577 dan Loan Agreement IP-583, kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Patimban sebesar Rp800.000.000.000,-,

2) Realokasi/pergeseran anggaran dalam satu satker yang sama bersumber dana PNBP pada satker Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemenang, sebesar Rp705.037.000,-, dan
3) Realokasi / pergeseran anggaran antar satker bersumber dana PNBP dalam rangka pemenuhan kebutuhan kegiatan prioritas Ditjen Hubla sebesar Rp16.956.663.000,-.

h. Revisi 8,9,10 sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ke-9 Nomor S-366/AG/AG.3/2024 tanggal 22 Agustus 2024, Usulan revisi anggaran berupa revisi:
1) Relaksasi (buka blokir) *Automatic Adjustment* (AA) dalam rangka pemenuhan belanja pegawai dan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang di Laut Mekanisme Penugasan sebesar Rp217.941.383.000,-
2) Penambahan pagu penggunaan PNBP Fungsional T.A. 2024 dalam rangka kegiatan Penyelenggaraan angkutan laut keperintisan dan prioritas lainnya sebesar Rp250.983.463.000,-
3) Penambahan pagu penggunaan PNBP atas pengelolaan BMN dalam rangka peningkatan kualitas layanan melalui pengembangan aplikasi inaportnet sebesar Rp17.966.954.000,-
4) Pergeseran/realokasi anggaran antar satker dalam Program yang sama dalam rangka memenuhi kekurangan Belanja Pegawai Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp4.469.402.000,-
5) Pergeseran/realokasi anggaran antar satker, terdiri dari sumber dana RM dan PNBP dalam rangka pemenuhan kegiatan prioritas Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp47.240.417.000,-, dan
6) Pergeseran/realokasi angaran dalam satu satker yang sama dalam rangka pemanfaatan sisa anggaran kontraktual/swakelola guna membiayai kegiatan prioritas Ditjen Perhubungan Laut tersebar di 6 satker sebesar Rp7.383.868.000,-

i. Revisi 11 sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ke-10 Nomor S-572/AG/AG.3/2024 tanggal 13 September 2024, Usulan revisi anggaran berupa revisi penambahan anggaran/percepatan pelaksanaan kegiatan pinjaman/PLN JICA Loan Agreement IP-577 Proyek Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Patimban sebesar Rp1.217.261.163.000,-

j. Revisi 12 sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ke-11 Nomor S-601/AG/AG.3/2024 tanggal 25 September 2024, Usulan revisi anggaran berupa revisi:

1) Penambahan pagu penggunaan PNBP Fungsional dalam rangka membiayai kegiatan prioritas Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp119.289.966.000,-
2) Penambahan pagu penggunaan PNBP Pengelolaan BMN dalam rangka membiayai kegiatan peningkatan kualitas layanan melalui pengembangan aplikasi inaportnet sebesar Rp849.725.000,-
3) Pergeseran/realokasi anggaran antar satker, terdiri dari sumber dana RM dan PNBP dalam rangka pemenuhan kegiatan prioritas Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp32.161.953.000,-
4) Pergeseran/realokasi anggaran dalam satu satker yang sama, terdiri dari sumber dana RM dan PNBP dalam rangka pemenuhan kegiatan prioritas sebesar Rp1.428.273.000,-
5) Pergeseran/realokasi anggaran Belanja Pegawai antar unit eselon I dari Ditjen Perhubungan Darat ke Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp929.838.000,-

k. Revisi 13 sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ke-12 Nomor S-731/AG/AG.3/2024 tanggal 3 November 2024, Usulan revisi anggaran berupa revisi:
1) Pergeseran/realokasi anggaran antar unit eselon I dalam program yang sama, guna membiayai kegiatan prioritas Itjen sebesar Rp1.300.000.000,- dan Setjen Kemenhub sebesar Rp3.000.000.000,- yang anggarannya diperoleh dari Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp4.300.000.000,-
2) Penambahan pagu penggunaan PNBP Fungsional dalam rangka membiayai kegiatan prioritas Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp103.538.825.000,-
3) Pergeseran/realokasi anggaran antar satker, terdiri dari sumber dana RM dan PNBP dalam rangka pemenuhan kegiatan prioritas Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp77.919.355.000,-
4) Pergeseran/realokasi anggaran antar satker dalam rangka pemenuhan belanja pegawai sebesar Rp11.710.420.000,-
5) Pergeseran/realokasi anggaran antar satker dalam rangka optimalisasi sisa anggaran sumber dana SBSN sebesar Rp27.000.000.000,-
6) Revisi administratif berupa penghapusan catatan halaman IV.B DIPA sebesar Rp36.562.357.000,-

l. Revisi 14 sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ke-13 Nomor S-793/AG/AG.3/2024 tanggal 29 November 2024, Usulan revisi anggaran berupa revisi:

1) Pengurangan alokasi anggaran sumber dana PLN kegiatan/proyek Rehabilitation and Reconstruction Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Donggala dan Pelabuhan Wani sebesar Rp2.939.401.000,-
2) Pergeseran/realokasi anggaran antar satker, sumber dana PNBP dalam rangka pemenuhan kegiatan prioritas Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp22.410.664.000,-
3) Pergeseran/realokasi anggaran antar satker dalam rangka pemenuhan belanja pegawai sebesar Rp7.807.463.000,-

m. Revisi 15 sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ke-14 Nomor S-825/AG/AG.3/2024 tanggal 17 Desember 2024, Usulan revisi anggaran berupa revisi revisi Usulan revisi anggaran berupa revisi: Realokasi/pergeseran anggaran antar satker dalam rangka pemenuhan kekurangan belanja pegawai sebesar Rp2.998.355.000,-

n. Anggaran setelah Revisi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp14.638.480.234.000,- dengan rincian sebagai berikut:
1) Rupiah Murni sebesar Rp5.870.128.668.000,-
2) Pinjaman Luar Negeri Rp4.273.391.712.000,-
3) PNBP Rp3.427.456.885.000,-
4) BLU Rp44.945.273.000,-
5) Hibah Luar Negeri Rp15.790.732.000,-
6) SBSN sebesar Rp1.006.766.964.000,-

3. Blokir Anggaran

a. Posisi Blokir T.A. 2024

Pagu Blokir : Rp529.828.364.000,-
Telah dIbuka blokir : Rp 47.799.640.000,-
Sisa Blokir Anggaran : Rp482.028.724.000,-

b. Rincian Blokir T.A. 2024:

NO	UNIT / SATUAN KERJA	SUMBER DANA	CATATAN HALAMAN DIPA IV-A	TELAH DIBUKA BLOKIR/ REALOKASI	SISA BLOKIR SETELAH USUL BUKA BLOKIR
	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT		**529.828.364.000**	**52.618.289.000**	**482.028.724.000**
1	**Blokir Automatic Adjustment**	RM	**477.010.075.000**	**-**	**477.010.075.000**
2	**Blokir Reguler**		**52.818.289.000**	**52.618.289.000**	**200.000.000**
	KSOP PATIMBAN				
	Patimban Port Development Project I-3 (III) (PLN)	PHLN	100.000.000		**100.000.000**

NO	UNIT / SATUAN KERJA	SUMBER DANA	CATATAN HALAMAN DIPA IV-A	TELAH DIBUKA BLOKIR/ REALOKASI	SISA BLOKIR SETELAH USUL BUKA BLOKIR
	UPP SAUMLAKI				**-**
	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Dawelor Rehabilitasi Causway	PNBP	6.620.000.000	6.620.000.000	-
	DIT. KPLP				**-**
	Construction/ Procurement of Class I Patrol Vessel (Denmark)	PHLN	100.000.000		100.000.000
	DIT. LALA				**-**
	Docking Tahunan Kapal Tol Laut	RM	18.912.014.000	18.912.014.000	-
	Study 18 Paket	RM	13.419.275.000	13.419.275.000	
	Jasa Konsultan	RM	300.000.000	300.000.000	
	KSOP LABUHAN BAJO				
	Pekerjaan Pembangunan Dermaga RORO Kapal-Kapal Negara dan Kapal Perla Wae Kelambu N317	PNBP	10.000.000.000	10.000.000.000	
	KSOP KELAS II PALEMBANG				
	Pembangunan Gedung Kantor	RM	3.367.000.000	3.367.000.000	-

4. Data Rincian Realisasi Belanja Barang atas Kegiatan Tol Laut Tahun 2024

Kegiatan Tol Laut pada Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Lalu Lintas dan Angkutan Laut dengan anggaran sebesar Rp647.032.765.000,- dan realisasi sebesar Rp647.032.764.970,- atau 99,99%. Rincian atas total anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

OPERATOR	NOMOR KONTRAK	URAIAN KONTRAK	NILAI KONTRAK	NILAI REALISASI
PT DJAKARTA LLOYD (PERSERO)	KTRK/TL-DLXII/2023	Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Tahun Anggaran 2024	117.284.742.705	117.284.742.705
PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)	KTRK/TL-ASDP/XII/2023	Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Tahun Anggaran 2024	1.054.658.450	1.054.658.450
PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA	KTRK/TL-PELNI/XII/2023	Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Tahun Anggaran 2024	214.300.772.066	214.300.772.066
PT. CITRABARU ADINUSANTARA	KTRK/TL-T1/XII/2023	Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Trayek T-1 Tanjung Priok Tahun Anggaran 2024	22.239.804.000	22.239.804.000
PT. LUAS LINE	KTRK/TL-T23/XII/2023	Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Trayek T -23 Tahun Anggaran 2024	25.666.246.750	25.666.246.750
PT. SUBSEA LINTAS GLOBALINDO	KTRK/TL-T24/I/2024	Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Trayek T-24 Tahun Anggaran 2024	22.742.714.902	22.742.714.902
PT PELAYARAN PELANGI TUNGGAL IKA	KTRK/TL-S3/I/2024	Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Trayek S-3 Tahun Anggaran 2024	23.611.209.074	23.611.209.074

OPERATOR	NOMOR KONTRAK	URAIAN KONTRAK	NILAI KONTRAK	NILAI REALISASI
PT. CITRABARU ADINUSANTARA	KTRK/TL-T3/XII/2023	Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Trayek T-3 Makassar Tahun Anggaran 2024	18.000.000.000	18.000.000.000
PT. MERATUS LINE	KTRK/TL-H3/XII/2023	Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Trayek H-3 Tahun Anggaran 2024	718.771.575	718.771.575
PT. MERATUS LINE	KTRK/TL-T25/XII/2023	Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Trayek T-25 Tahun Anggaran 2024	2.993.966.960	2.993.966.960
PT. MERATUS LINE	KTRK/TL-T13/I/2024	Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Trayek T-13 Tahun Anggaran 2024	7.690.287.757	7.690.287.757
PT. MERATUS LINE	KTRK/TL-H5/I/2024	Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Trayek H-5 Tahun Anggaran 2024	2.991.939.735	2.991.939.705
PT. TEMAS, TBK	KTRK/TL-H4/I/2024	Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Trayek H-4 Tahun Anggaran 2024	17.762.442.753	17.762.442.753
PT. TEMAS, TBK	KTRK/TL-T7/I/2024	Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Trayek T-7 Tahun Anggaran 2024	27.546.622.562	27.546.622.562
PT. TEMAS, TBK	KTRK/TL-T12/I/2024	Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Trayek T-12 Tahun Anggaran 2024	30.480.905.185	30.480.905.185
PT. TEMAS, TBK	KTRK/TL-T5/I/2024	Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Trayek T-5 Tahun Anggaran 2024	11.883.017.224	11.883.017.224
PT. TEMAS, TBK	KTRK/TL-T11/I/2024	Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Trayek T-11 Tahun Anggaran 2024	41.162.938.652	41.162.938.652
PT. TEMAS, TBK	KTRK/TL-T14/I/2024	Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Trayek T-14 Tahun Anggaran 2024	28.157.046.504	28.157.046.504
PT. TEMAS, TBK	KTRK/TL-T27/I/2024	Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Trayek T-27 Tahun Anggaran 2024	28.144.409.082	28.144.409.082
PT. MERATUS LINE	02/KTRK/TL-H5/VIII/2024	Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Trayek H-5 Tahap 2 Tahun Anggaran 2024	2.600.269.064	2.600.269.064
TOTAL			**647.032.765.000**	**647.032.764.970**

5. Rincian Kontrak Tahun Jamak (MYC) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

No	UPT/ Satker/ Kegiatan	Kategori	ALOKASI PAGU					
			2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH PAGU
			Pagu	Pagu	Pagu	Pagu	Pagu	
A	**RUPIAH MURNI**							
1	**Satker Lala** Pembangunan 2 (Dua) Unit Kapal Wisata Bottom Glass Catamaran	**Rekomposisi**	9.075.695.580	24.464.918.520	5.918.931.900			39.459.546.000
	Pembangunan 2 (Dua) Unit Kapal Wisata Bottom Glass Trimaran	**Rekomposisi**	9.133.104.960	24.619.674.240	5.956.372.800			39.709.152.000
2	**Satker Kepelabuhanan**							-
	Kegiatan konsultan Project Manajemen Unit dalam rangka Rehabilitasi dan Rekontruksi Teluk Palu	**Persetujuan awal**		2.030.644.000	3.757.314.000	3.002.197.000		8.790.155.000

No	UPT/ Satker/ Kegiatan	Kategori	ALOKASI PAGU					
			2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH PAGU
			Pagu	Pagu	Pagu	Pagu	Pagu	
3	**KSOP BENOA** PEMBANGUNAN PELABUHAN SANUR	**Rekomposisi**	19.000.000.000	100.401.988.400	150.000.000.000	129.429.011.600		- 398.831.000.000
4	**Satker KPLP** Pembangunan 5 unit Kapal Patroli Kelas IV Alumunium termasuk supervisi	**Rekomposisi**			14.130.000.000	18.870.000.000		- 33.000.000.000
5	**UPP Ogoamas**							-
	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Ogoamas	**Persetujuan awal**		9.988.079.000	23.305.516.000			33.293.595.000
6	**UPP Likupang**							-
	Pengembangan Faspel Laut Likupang	**Persetujuan awal**		15.000.000.000	25.000.000.000			40.000.000.000
7	**UPP Tual**							-
	Pengembangan Faspel Laut Tual	**Persetujuan awal**		19.579.316.000	45.685.069.000			65.264.385.000
8	**UPP Sangkulirang**							-
	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Laut Sangkulirang	**Rekomposisi**	20.988.669.000	24.280.411.000	14.384.514.000			59.653.594.000
9	**UPP Babang**							-
	Pekerjaan Replecment Kantor Pelabuhan UPP Babang	**Persetujuan awal**			2.778.700.000	3.500.000.000		6.278.700.000
10	**UPP Tana Paser**							-
	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Tana Paser	**Persetujuan awal**			14.500.000.000	74.149.878.400		88.649.878.400
11	**UPP Malakoni-Enggano**							-
	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Malakoni Enggano	**Persetujuan awal**			12.915.000.000	20.943.400.000		33.858.400.000
12	**UPP Lapuko**							-
	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Munse	**Persetujuan awal**			10.500.000.000	43.031.386.000		53.531.386.000
13	**UPP Jampea**							
	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Laut Bonarate	**Persetujuan awal**				4.000.000.000	30.000.000.000	34.000.000.000
B	**SBSN**							-
1	**DISTRIK NAVIGASI BENOA**							-
	Pembangunan Dermaga Kenavigasian	**Persetujuan awal**			29.455.287.000	35.405.397.000		64.860.684.000
2	**UPP SINJAI**							-
	Pembangunan Faspel Laut Kambuno	**Rekomposisi**	24.357.149.000	30.568.465.280	15.074.385.720			70.000.000.000
3	**UPP MAMUJU**							-
	Pembangunan Faspel Laut Salingsingan	**Persetujuan awal**	31.245.485.000	35.809.404.000	22.945.111.000			90.000.000.000
4	**KSOP MUNTOK** Pembangunan Fasilitas Dermaga Pelabuhan Tanjung Ular	**Persetujuan awal**	14.510.434.000	63.502.566.000	30.000.000.000			- 108.013.000.000
5	**Satker KPLP** Pembangunan 2 unit Kapal Patroli kelas III Alumunium termasuk supervisi	**Persetujuan awal**			56.440.000.000	11.560.000.000		- 68.000.000.000
6	**Distrik Navigasi Tanjung Pinang**							
	Pembangunan Menara Suar Karang Singa	**Persetujuan awal**				30.708.135.516	42.856.682.484	73.564.818.000

No	UPT/ Satker/ Kegiatan	Kategori	ALOKASI PAGU					
			2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH PAGU
			Pagu	Pagu	Pagu	Pagu	Pagu	
C	**PNBP**							-
1	**KSOP KOTABARU - BATULICIN** Lanjutan Pembangunan Faspel Marabatuan	**Persetujuan awal**		5.086.113.000	9.847.416.000			- 14.933.529.000
	Lanjutan Pembangunan Faspel Matasiri	**Persetujuan awal**		5.093.784.000	11.735.496.000			16.829.280.000
2	**KSOP TANJUNG PANDAN** Rehabilitasi Faspel Tanjung Batu	**Persetujuan awal**		11.319.439.000	26.758.941.000			- 38.078.380.000
3	**Kantor Pelabuhan Batam**							-
	Pembangunan gedung kantor	**Persetujuan awal**		6.000.000.000	14.000.000.000			20.000.000.000
4	**UPP Kuala Semboja**							-
	Pekerjaan Rehabilitasi Talud dan Lapangan Penumpukan Pelabuhan Ambarawang	**Persetujuan awal**		8.034.620.000	33.987.880.000			42.022.500.000
5	**PENINGKATAN FUNGSI KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI** Pembangunan Kapal Patroli Kelas IV	**Persetujuan awal**		16.896.000.000	27.104.000.000			- 44.000.000.000
	Pembangunan Kapal Patroli Kelas V	**Rekomposisi**		14.400.000.000	30.600.000.000			45.000.000.000
6	**KSOP Probolinggo**							-
	Pembangunan Kapal Patroli Kelas IV	**Persetujuan awal**		6.468.000.000	4.532.000.000			11.000.000.000
7	**UPP Seba**							-
	Faspel Raijua	**Persetujuan awal**		8.000.000.000	30.799.350.000			38.799.350.000
8	**UPP Serui**							-
	Pekerjaan Fasilitas Darat Pelabuhan Serui	**Persetujuan awal**		4.416.268.000	8.340.462.000			12.756.730.000
9	**UPP T U A L**							-
	Pelebaran Dermaga dan Trestle pelabuhan tual	**Persetujuan awal**		6.504.764.000	15.177.782.000			21.682.546.000
10	**UPP Saumlaki**							-
	Pembangunan Faspel Laut Saumlaki	**Persetujuan awal**		6.000.000.000	45.852.945.000			51.852.945.000
11	**KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PULANG PISAU**							
	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Bahaur	**Persetujuan awal**			9.935.000.000	75.719.676.000		85.654.676.000
12	**UPP Bulu Kumba**							
	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kajang	**Persetujuan awal**			9.783.856.000	13.141.562.000		22.925.418.000
13	**KSOP Teluk Bayur**							
	Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Carocok Painan	**Persetujuan awal**				15.000.000.000	42.000.000.000	57.000.000.000
14	**UPP Sofifi**							
	Replacement Fasilitas Pelabuhan Laut Sofifi	**Persetujuan awal**				14.971.450.000	60.000.000.000	74.971.450.000
	Jumlah		**128.310.537.540**	**448.464.454.440**	**761.201.329.420**	**493.432.093.516**	**174.856.682.484**	**2.006.265.097.400**

6. Sumber Dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

a. Kebijakan Pemanfaatan Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Untuk Pembiayaan Pembangunan

1) Pemanfaatan SBSN untuk pembiayaan proyek sesuai dengan kerangka makro RPJMN 2019-2024, antara lain :
   a) Untuk menjaga rasio utang pemerintah terhadap PDB di bawah 30%; dan
   b) Mempertahankan keberlanjutan fiskal.
2) Mendukung pencapaian prioritas nasional dalam RPJMN 2019-2024, yaitu:
   a) Pembangunan sektor unggulan (kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman, serta pariwisata dan industri);
   b) Dimensi pembangunan manusia (pendidikan, kesehatan dan perumahan); dan
   c) Mengurangi kesenjangan antar wilayah (barat dan timur).
3) Fokus pemanfaatan SBSN adalah untuk membiayai proyek Infrastruktur dan proyek Pelayanan Umum.
4) Pelaksanaan proyek SBSN, diutamakan instansi yang sudah pernah melaksanakan proyek SBSN.
   a) Kementerian Perhubungan, misalnya proyek pembangunan jalur kereta api dan
   b) fasilitas perekeretaapian (seperti sinyal dan elektrifikasi)
   c) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, misalnya pembangunan jalan dan jembatan, fly over dan underpass, dan pembangunan jalan bebas hambatan.
   d) Kementerian Agama, misalnya pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tinggi Islam, revitalisasi asrama haji, dan pembangunan balain nikah/KUA

b. Koridor Pembiayaan Proyek SBSN
1) Memastikan alokasi untuk proyek SBSN yang telah ditetapkan *multiyears*-nya.
2) Memiliki tingkat kesiapan proyek yang tinggi dan dapat dijalankan pada awal tahun anggaran, meliputi antara lain:
   a) Ketersediaan lahan/tanah tidak bermasalah (termasuk penghapusan gedung/bangunan yang ada pada lokasi proyek)
   b) Ketersediaan dokumen perencanaan proyek, misalnya *detail engineering design*/DED
3) Dapat dikerjakan dengan teknologi dalam negeri.
4) Kementerian/Lembaga memiliki kemampuan untuk melaksanakan (terutama untuk proyek yang memiliki ketersebaran luas dan nilai yang besar).
5) Realisasi SBSN Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

NO	KODE SATKER	UPT/ SATKER	KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA PAGU (Rp)
1	413002	Disnav Sabang	Peningkatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Pada Distrik Navigasi Kelas II Sabang, Aceh	10.277.238.000	10.277.234.000	100,00%	4.000

NO	KODE SATKER	UPT/ SATKER	KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA PAGU (Rp)
2	413061	Disnav Sibolga	Peningkatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Pada Distrik Navigasi Kelas II Sibolga, Sumatera Utara	12.882.450.000	12.827.438.570	99,57%	55.011.430
3	413225	Disnav Dumai	Peningkatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Pada Distrik Navigasi Kelas I Dumai, Riau	9.204.590.000	9.185.492.220	99,79%	19.097.780
4	413231	Disnav Tanjung Pinang	Peningkatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Telekomunikasi Pelayaran Pada Distrik Navigasi Tg. Pinang, Kepulauan Riau	47.122.050.000	19.857.473.300	42,14%	27.264.576.700
5	413231	Disnav Tanjung Pinang	Pembangunan Menara Suar Karang Singa	42.877.841.000	40.423.912.690	94,28%	2.453.928.310
6	412801	Disnav Tanjung Priok	Peningkatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Telekomunikasi Pelayaran Pada Distrik Navigasi Kelas I Tg. Priok, Jakarta	10.339.440.000	9.273.084.967	89,69%	1.066.355.033
7	412951	Disnav Tanjung Perak	Peningkatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Pada Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Perak, Jawa Timur	25.141.619.000	25.002.353.514	99,45%	139.265.486
8	412879	Disnav Tanjung Emas	Peningkatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Pada Distrik Navigasi Kelas II Tanjung Emas, Jawa Tengah	17.674.977.000	17.635.336.155	99,78%	39.640.845
9	287101	Disnav Pontianak	Peningkatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak, Kalimantan Barat	9.273.008.000	9.260.000.000	99,86%	13.008.000
10	287260	Disnav Samarinda	Peningkatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Pada Distrik Navigasi Kelas I Samarinda, Kalimantan Timur	13.312.057.000	13.300.000.000	99,91%	12.057.000
11	561712	Disnav Tarakan	Peningkatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Pada Distrik Navigasi Kelas III Tarakan, Kalimantan Utara	14.500.000.000	14.500.000.000	100,00%	-
12	652570	Disnav Tual	Peningkatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Pada Distrik Navigasi Kelas III Tual, Maluku	20.611.193.000	20.599.430.990	99,94%	11.762.010
13	287736	Disnav KUPANG	Peningkatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Pada Distrik Navigasi Kelas II Kupang, NTT	25.631.662.000	25.551.865.825	99,69%	79.796.175
14	287736	Disnav KUPANG	Pembangunan Rambu Pelabuhan Pulau Padar dan Pulau Rinca, NTT	618.137.000	618.136.470	100,00%	530
15	287956	Disnav Merauke	Peningkatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Pada Distrik Navigasi Kelas III Merauke, Papua	31.095.230.000	31.075.698.000	99,94%	19.532.000
16	559311	UPP Sungai Nyamuk	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Sungai NyamukNunukan, Kalimantan Utara	68.954.590.000	68.858.040.400	99,86%	96.549.600
17	690778	Kantor UPP Saketa	Replacement Dermaga Akibat Gempa Pelabuhan PasipaleleHalmahera Selatan, Maluku Utar	87.000.000.000	86.189.840.275	99,07%	810.159.725

NO	KODE SATKER	UPT/ SATKER	KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA PAGU (Rp)
18	289981	UPP KAIMANA	Replacement Fasilitas Pelabuhan Kaimana-Kaimana, Papua Bara	50.000.000.000	49.976.663.300	99,95%	23.336.700
19	413441	UPP SELAYAR	Replacement Fasilitas Pelabuhan Selayar-Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan	32.946.890.000	32.946.886.960	100,00%	3.040
20	690777	UPP Wini	Pembangunan Lapangan Penumpukan Pelabuhan Wini-Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur	15.411.760.000	15.393.515.400	99,88%	18.244.600
21	559421	UPP Jailolo	Pengembangan Fasilitas Sisi Darat Pelabuhan MatuiHalmahera Barat, Maluku Utar	59.735.670.000	59.735.670.000	100,00%	-
22	287147	Kantor UPP Lewoleba	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Lewoleba-Lambata, Nusa Tenggara Timur	53.796.040.000	53.791.038.500	99,99%	5.001.500
23	289960	UPP Reo	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Reo-Manggarai, Nusa Tenggara Timur	47.000.000.000	46.999.999.160	99,99%	840
24	287145	Kantor UPP Wanci	Replacement Fasilitas Pelabuhan Kaledupa-Wakatobi, Sulawesi Tenggara	40.000.000.000	39.999.972.114	99,99%	27.886
25	559463	UPP Wonreli	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Lerokis-Maluku Barat Daya, Maluku	44.811.350.000	44.810.638.265	99,99%	711.735
26	559463	UPP Wonreli	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Ilwaki-Maluku Barat Daya, Maluku	19.668.840.000	19.668.494.500	99,99%	345.500
27	287391	UPP LUWUK	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Luwuk-Banggai, Sulawesi Tengah	54.200.000.000	54.104.874.772	99,82%	95.125.228
28	559250	UPP Sungai Guntung	Replacement Fasilitas Pelabuhan Sungai Guntung-Indragiri Hilir, Riau	20.451.910.000	13.972.718.016	68,32%	6.479.191.984
29	413812	UPP NAMLEA	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Namlea-Buru, Maluku	45.000.000.000	44.886.841.400	99,75%	113.158.600
30	287338	UPP Tahuna	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Tahuna-Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara	44.000.000.000	43.006.266.949	97,74%	993.733.051
31	21140	KSOP Patimban	Pembangunan Jalan lingkungan Pelabuhan PatimbanSubang, Jawa Barat	29.000.000.000	26.476.770.023	91,30%	2.523.229.977
32	413591	UPP Kolonedale	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Kolonedale, Sulawesi Tengah	2.909.011.000	2.909.010.439	99,99%	561
33	413591	UPP Kolonedale	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Bungku, Sulawesi Tengah	1.319.411.000	1.319.410.800	99,99%	200
		JUMLAH		**1.006.766.964.000**	**964.434.107.974**	**95,80%**	**42.332.856.026**

7. Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan

Terdapat To Do List dalam Monitoring SAKTI terkait Ketidaksesuaian Akun Belanja terhadap Kode Barang Persediaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut T.A. 2024 pada 13 Satker dengan Total Nilai Rp1.020.598.955,-. Terhadap seluruh permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti dengan mengambil langkah sebagai berikut:

a. Transaksi reklasifikasi yang didasari dengan Surat Keterangan KPB atas kesalahan pemilihan kode barang persediaan saat penginputan BAST pada modul Komitmen;
b. Membuat keterangan bahwa Persediaan telah dicatat sesuai dengan jenis fisiknya.

8. Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Milik Negara

Terdapat To Do List dalam Monitoring SAKTI terkait Ketidaksesuaian Akun Belanja terhadap Kode BMN di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut T.A. 2024 pada 60 Satker dengan Total Nilai Rp128.248.131.470,-. Terhadap seluruh permasalahan tersebut, diantaranya merupakan aset ekstrakomptable, serta terhadap kesalahan pembebanan belanja modal telah ditindaklanjuti dengan mengambil langkah sebagai berikut:

a. Transaksi reklasifikasi yang didasari dengan Surat Keterangan KPB atas kesalahan pemilihan kode barang saat penginputan BAST pada modul Komitmen;
b. Terhadap aset dibawah nilai kapitalisasi bahwa aset telah dicatat sesuai dengan jenis fisiknya
c. Membuat keterangan bahwa Aset telah dicatat sesuai dengan jenis fisiknya.

9. Penjelasan Realisasi Belanja Modal yang Menambah Nilai Aset Tetap

Realiasi Belanja Modal T.A. 2024 sebesar Rp6.910.141.855.179,-. Realisasi BM tersebut yang menambah nilai Aset Tetap di lingkungan Ditjen Hubla T.A. 2024 telah dilakukan pencatatan atau transaksi pendetilan berupa Pembelian, Pengembangan Nilai Aset, Pengembangan Langsung, Perolehan KDP, dan Pengembangan KDP pada masing-masing Satuan Kerja.

C. Satker Badan Layanan Umum (BLU) Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut

1. Penetapan Satker BLU

Penetapan Satker BLU di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas serta praktek bisnis yang sehat, pada tahun anggaran 2021 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mendapat persetujuan untuk mengelola 2 (dua) menjadi satker BLU, yaitu Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP) dan Distrik Navigasi Tanjung Priok.

No	Satker BLU	Keputusan Menteri Keuangan
1	Balai Kesehatan Kerja Pelayaran	Nomor 57/KMK.05/2021 Tanggal 15 Februari 2021
2	Distrik Navigasi Tanjung Priok	Nomor 73/KMK.05/2023 Tanggal 28 Februari 2023

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan mulai Tahun Anggaran 2021 satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU menggunakan PSAP Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU.

2. Pedoman Sistem Akuntansi BLU di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut

a. Satuan Kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP) ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU penuh melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 57/KMK.05/2021 Tanggal 15 Februari 2021. Satker BKKP telah menerapkan Pedoman Sistem Akuntansi sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 145 Tahun 2023 Tanggal 8 Desember 2023 tentang Sistem Akuntansi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran

b. Satuan Kerja Distrik Navigasi Tanjung Priok ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU penuh melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 73/KMK.05/2023 Tanggal 28 Februari 2023 Tanggal 28 Februari 2023. Satker Disnav Tanjung Priok telah menerapkan Pedoman Sistem Akuntansi sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 161 Tahun 2024 Tanggal 10 Desember 2024 tentang Sistem Akuntansi Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok

3. Rekening Bendahara Satker BLU :

a. BKKP

Terdapat beberapa rekening yang digunakan oleh Satker BKKP dalam mengelola dan mendukung kegiatan operasional BLU. Rekening yang digunakan antara lain:

1) BNI (Nomor Rekening: 1178763188) Saldo Rp562.917.802,-
2) BNI (Nomor Rekening: 1179012867) Saldo Rp0,-
3) BRI (Nomor Rekening: 0186-01-001697-30-7) Saldo Rp3.351.329.811,-
4) Deposito BRI (No. Rek: 0186-01-015556-40-4) Saldo Rp6.331.209.536,-
5) Deposito BRI (No. Rek: 0186-01-015862-40-7) Saldo Rp3.824.446.919,-

Pada Tahun Anggaran 2024, Saldo Kas dan Bank – BLU satker BKKP sebesar Rp3.914.247.613.- dan Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan sebesar Rp6.331.209.536,-. Investasi jangka pendek/ deposito BLU BKKP Pada Bank BRI dengan Jangka waktu 12 Bulan dan Bunga 5% per Tahun. Deposito tersebut telah dilakukan perpanjangan jangka waktu deposito selama 1 tahun sampai dengan tanggal 19 Desember 2025 sesuai Surat Kepala BKKP Nomor KU.105/1/1/BKKP-2024 tanggal 19 Desember 2024. Selain itu, terdapat penambahan Deposito dengan Nomor Rekening 0186-01-015862-40-7 pada

Bank BRI sebesar Rp3.824.446.919,- dengan jangka waktu 6 Bulan dan Bunga 5% per Tahun.

b. Disnav Tanjung Priok

Terdapat beberapa rekening yang digunakan oleh Satker Disnav Tanjung Priok dalam mengelola dan mendukung kegiatan operasional BLU. Rekening yang digunakan antara lain:

1) Mandiri (Nomor Rekening : 1200000400049) Saldo Rp27.200.379.594,-
2) Mandiri (Nomor Rekening : 1200000400098) Saldo Rp7.005,-
3) Mandiri (Nomor Rekening : 1200000400080) Saldo Rp154.677.144,-
4) BNI (Nomor Rekening : 9890274128011000) Saldo Rp0,-
5) Deposito BTN (No. Rek: 00211-01-40-029191-7) Saldo Rp40.000.000.000,-
6) Deposito BRI (No. Rek: 0186-01-015595-40-8) Saldo Rp16.500.000.000,-
7) Mandiri – RPATA (No. Rek: 120-00-1442525-5) Saldo Rp2.537.279.748,-

Pada Tahun Anggaran 2024 Saldo Kas dan Bank – BLU satker Disnav Tanjung Priok sebesar Rp27.321.520.916,-. Setara Kas Lainnya – BLU pada Disnav Tanjung Priok berupa Deposito Berjangka selama satu bulan senilai Rp40.000.000.000,- dengan nomor 00211-01-40-029191-7 a.n. RPL 133 BLU DNGTPK UTK PKD dengan suku bunga 6,5% per tahun. Selain itu, Setara Kas Lainnya – BLU pada Disnav Tanjung Priok sebesar Rp16.500.000.000,- pada Bank BRI merupakan Deposito dengan Jangka waktu 3 Bulan dan Bunga 5,5% per Tahun.

Apabila terdapat Kas dan Bank BLU belum disahkan, maka proses pengajuan pengesahan dilakukan setiap bulan sekali sebelum tanggal 10 pada bulan berikutnya. Proses pengesahan dilakukan dengan cara:

a. Pertama, dilakukan rekonsiliasi kas antara rekening bank dan catatan aplikasi layanan.
b. Kedua, klasifikasi pendapatan pada akun masing-masing.
c. Ketiga, pembuatan SP3B BLU.
d. Keempat, pengajuan SP3B BLU ke KPPN.
e. Kelima, penerbitan SP2B BLU dari KPPN.
f. Proses pengesahan pendapatan dilakukan bersamaan dengan pengesahan belanja BLU

4. Pendapatan BLU

Realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut T.A. 2024 terkait dengan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) meliput MAK Pendapatan sebagai berikut.

a. Pendapatan Jasa Layanan Umum (4241)

1) Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (424111)
2) Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan dan Kenavigasian (424115)
3) Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya (424119)

b. Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU (4243)
1) Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha (424312)

c. Pendapatan Dari Alokasi APBN
1) Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah (424421)

d. Pendapatan BLU Lainnya (4249)
1) Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU (424911)
2) Pendapatan Lain-Lain BLU (424919)
3) Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah (424921)
4) Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung (424922)
5) Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan (424923)
6) Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin (424924)

5. Belanja BLU

Pada DIPA Direktorat Jenderal Perhubungan Laut T.A. 2024, terdapat akun Belanja khusus terkait dengan BLU atas Belanja Barang dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Barang BLU (5251)
1) Belanja Barang (525112)
2) Belanja Jasa (525113)
3) Belanja Pemeliharaan (525114)
4) Belanja Perjalanan (525115)
5) Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi – BLU (525121)
6) Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptable BLU (525162)

b. Belanja Modal BLU (5371)
1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin – BLU (537112)
2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan – BLU (537113)
3) Belanja Modal Lainnya – BLU (537115)

6. Ikhtisar Laporan Keuangan BLU

Terdapat 2 Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang telah ditetapkan menjadi BLU. Ikhtisar Laporan Keuangan BLU berupa Aset, Kewajiban, Pendapatan-LRA, dan Belanja-LRA T.A. 2024 sebagai berikut:

No	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah Aset	Jumlah Kewajiban	Pendapatan-LRA	Belanja-LRA
1	412801	Disnav Tanjung Priok	649.446.263.998	102.068.150	100.473.513.845	118.491.559.444
2	606301	BKKP	61.167.569.440	573.163.550	15.964.585.309	36.868.468.245
JUMLAH			**710.613.833.438**	**675.231.700**	**116.438.099.154**	**155.360.027.689**

D. Kas Bendahara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

1. Prosedur Penggunaan VA/CMS di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut
   a. Sesuai PMK.183/PMK.05/2019 tentang pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Negara/Lembaga maka Ditjen Perhubungan Laut pada tahap awal melakukan pembukaan rekening induk Giro yang terdiri dari 4 Bank yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank Syariah Indonesia (dengan pengajuan persetujuan pembukaan melalui KPPN yang dirinci sebagai berikut:
      1) BNI: Surat Kepala KPPN Tipe A1 Jakarta IV Nomor S-1813 /WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 29 April 2020;
      2) BRI: Surat Kepala KPPN Tipe A1 Jakarta IV Nomor S-1748 /WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020;
      3) MANDIRI: Surat Kepala KPPN Tipe A1 Jakarta IV Nomor S-1749/ WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020;
      4) BSI: Persetujuan pembukaan rekening pada Bank BSI mengacu pada Persetujuan Pembukaan Rekening dari Bank Mandiri Syariah dan Bank BRI Syariah yang di kemudian hari berubah menjadi BSI, dengan rincian berikut:
         a) BRI Syariah: Surat Kepala KPPN Tipe A1 Jakarta IV Nomor S-6774/ WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 22 Desember 2020;
         b) BSM: Surat Kepala KPPN Tipe A1 Jakarta IV Nomor S- 9/WPB.12/KP.04/2021 Tanggal 4 Januari 2021.
   b. Selanjutnya, Ditjen Perhubungan Laut mengajukan pembukaan Rekening VA per masing-masing satker kepada KPPN Jakarta IV
   c. Setelah Rekening VA Satker dibuka, dilakukan perpindahan saldo dari rekening giro ke rekening virtual dengan rincian cut off sebagai berikut:
      1) BNI: Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-909/PB.3/2020 Tanggal 22 Desember 2020 dan Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-435/PB.3/2021 Tanggal 17 Maret 2021;
      2) BRI: Surat Direktur Surat Pengelolaan Kas Negara Nomor S- 910/PB.3/2020 Tanggal 23 Desember 2020 dan Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-323/PB.3/2021 Tanggal 26 Februari 2021;

3) MANDIRI: Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S- 304/PB.3/2021 Tanggal 24 Februari 2021 dan Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-558/PB.3/2021 Tanggal 26 Maret 2021;
4) BSM: Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-558/PB.3/2021 Tanggal 26 Maret 2021;
5) BRI Syariah: Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S- 304/PB.3/2021 Tanggal 24 Februari 2021.

d. Pihak Bank melalui Kantor Cabang Rekening Induk Giro memberikan kepada masing-masing satker berupa CMS dan Kartu ATM yang selanjutnya digunakan sebagai alat transaksi transfer ataupun penarikan tunai atas dana yang tersedia pada rekening VA.

2. Saldo Kas di Bendahara pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

a. Kas di Bendahara Pengeluaran TUP

No	Kode Satker	Nama Satker	NTPN	Tanggal Setor	Saldo Kas Bendahara	Keterangan
1	559421	UPP Jailolo	C3B4D45KSPFL5LAB	16-01-2025	12.866.000	Sudah Disetor Ke Kas Negara
2	559400	UPP Soa-Siu	4DF171GCD9LQ3ECP	07-01-2025	20.831.000	Sudah Disetor Ke Kas Negara
3	521899	UPP Weda	5E9B76QTC944HBSU	07-01-2025	1	Sudah Disetor Ke Kas Negara
4	517911	UPP Bintuni	A89837NAS3MQFLU8	08-01-2025	46.685.800	Sudah Disetor Ke Kas Negara
5	559594	UPP Raja Ampat	9312D6QTC94NJV87 dan 803412CPT48PIV83	10-01-2025	257.562.940	Sudah Disetor Ke Kas Negara
6	652474	KSOP Kep. Seribu	F9EAE7NAS3L184F4 dan DC8476QTC96GREJ6	02-01-2025 dan 15-01-2025	5.390.024	Sudah Disetor Ke Kas Negara
TOTAL					**343.335.765**	

b. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

No	Kode Satker	Nama Satker	NTPN	Tanggal Setor	Saldo Kas Bendahara	Keterangan
1	413439	KSOP Utama Makassar	2024123123596579533	01 Januari 2025	1.278.700	Sudah Disetor Ke Kas Negara dan merupakan Pembayaran ulang Belanja Pegawai berupa uang lembur dikarenakan terdapat retur
2	559459	UPP Namrole	9AC8167P9G5HQGAK, 169751PLQB9JF49N, 7DE4167P9G5GSGCP, 28A221PLQB9IJNCF, 81F7E1PLQB9HONV0, B34111PLQB9M1D19, 79FC81PLQBAEB5N0, 1B3955BBPLJTRAR7, A07B900QQM5KKHN3,	02 Januari 2025, 20 Januari 2025, 12 Februari 2025	34.368.910	Sudah Disetor Ke Kas Negara berupa Setoran Pajak T.A. 2024

No	Kode Satker	Nama Satker	NTPN	Tanggal Setor	Saldo Kas Bendahara	Keterangan
			91B234EU9R1I9A42, DB021PLQBABE18Q, 2E7860011M5HEM04, 261890T8AGNPCRMM, 188FA3IGQ0F28A53, 9131767P9G65QLMA, AF93367P9G65GQ8R, 3F850746PAOHHILN, A86315BBPLJOC5AM, 28V702M3A5SICQ1O, 261890T8AGNPCRMM, 3779B00QQM596KM5, CC6941PLQBA1RTAQ, 450DC3IGQEQ64GL, F082267P9G5V3NLV, 7508E2M3A5SD40O4, A6EB667P9G5UJI4F, BD0954EU9R13KH7L, 5CAF267P9G5RS3A8, B311B0T8AGN94BEG, CD9EA4EU9R1K8BKV, 8993D00QQM5LM007, 7654667P9G6BA5TB, 032E20T8AFO26R5H, 02A342M3A5SP94Q3, CADF21PMO819TBOB, 8E07D746V7FLD3UH, E45872M3G2JMQU3V, D33F34EUFNOFA2ED, FAADC4EUFNOFG8L1			
TOTAL					**35.647.610**	

c. Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah

No	Nama Satker	Provinsi	Saldo Kas Bendahara	Keterangan
1	SATKER KENAVIGASIAN	DKI Jakarta-Pusat	3.763.629.263	Saldo USD232.869,03 dengan Kurs Tengah BI 31 Desember 2024 Rp16.162. Penyajian berdasarkan Kurs Tengah BI dengan menunjuk Surat Kepala KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah Nomor S-600/KPN.1208/2024 tanggal 31 Desember 2024 hal Mekanisme Pembukaan Hibah Langsung Bentuk Uang Dalam Mata Uang Asing Sebagai Bentuk Implementasi Per-9/PB/2022 dan Surat KPA Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat Nomor 01/U/PKP/I-25 tanggal 02 Januari 2025

E. Dana Lainnya atas Rekening Penampungan Dana Ganti Kerugian Tanah

Rekening Penampungan Dana Ganti Kerugian Tanah (KSOP Patimban) berdasarkan Surat

KSOP Patimban Nomor UM.006/9/111/KSOP-PMB/2021 perihal Laporan Pembukaan Rekening Pemerintah Lainnya Atas Nama RPL 021 PS KSOP PATIMBAN UNTUK GANTI RUGI tanggal 04 Maret 2021. Rekening tersebut telah dibuka pada tanggal 19 Februari 2021 pada Bank Rakyat Indonesia KC BRI Pamanukan. Saldo rekening tersebut T.A. 2024 sebesar Rp3.698.410.287,-. Saldo atas Rekening tersebut disajikan sebagai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya – Dana Lainnya (163119) pada Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

1) Rekening tersebut tidak dicatat di LMAN;
2) Pembayaran dapat dilakukan oleh PPK dan Bendahara Pengeluaran KSOP Patimban;
3) Rekening bersifat sementara (selama proses ganti rugi/pembayaran telah dilakukan).

Kronologis Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Pada KSOP Patimban Dalam Rangka Penitipan Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pelabuhan Patimban adalah sebagai berikut.

No.	Tanggal	Kegiatan/ Surat Menyurat	Keterangan
1	23 Mei 2018	KJPP Anas Karim Rivai telah melakukan penilaian terhadap bidang-bidang berkarakteristik khusus berupa Tanah Kas Desa Patimban berdasarkan Surat KJPP AKR Nomor 0182305018 Tanggal 23 Mei 2018 Perihal Laporan Akhir Hasil Pekerjaan Layanan Jasa Penilai Publik Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Akses dan Sarana Penunjang (Lokasi Back Up Area)	Telah dilakukan penilian untuk bidang – bidang tanah kas desa patimban peruntukkan makam dengan rincian sebagai berikut: 1. NIS 00065A Blok 15 Desa Patimban berjumlah Rp3.060.000.000,- 2. NIS 00028A Blok 20 Desa Patimban berjumlah Rp443.500.000,- 3. NIS 00051A Blok 20 Desa Patimban berjumlah Rp194.500.000,-
2	29 September 2020	Surat KJPP Anas Karim Rivai Nomor 00794/2.0030-00/PI/11/0067/1/IX/2020 Tanggal 29 September 2020 Perihal Laporan Akhir Revisi	Merubah nama pihak yang berhak semula Pemerintah Desa Patimban menjadi Pemerintah Desa Patimban/Ahli Waris Makam, berdasarkan Berita Acara Keberatan Hasil Inventarisasi dan identifikasi tanggal 30 Juni 2020
3	22 Januari 2021	Surat PPK Pengadaan Tanah Nomor KU.504/4/I/KSOP-PMB/2021 Tanggal 22 Januari 2021 Perihal Surat Permintaan Pembayaran Langsung Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Tahap XXIII	
4	04 Februari 2021	Surat Direktur Utama LMAN Nomor S-240/LMAN/2021 Tanggal 04 Februari2021 Perihal Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah PSN Berupa Pembangunan Pelabuhan Patimban Tahap I Tahun 2021	Telah disetujui usulan pembayaran ganti kerugian 2 (dua) bidang Tanah Kas Desa Gempol seluas 4.481 m2 berjumlah Rp1.468.001.457,-
5	05 Februari 2021	Surat Kepala Kantor KSOP Kelas II Patimban kepada Kepala Kantor KPPN Purwakarta Nomor UM.006/32/II/KSOP-PTB/2021 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening	
6	17 Februari 2021	Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwakarta Nomor 000014 Tanggal 17 Februari 2021 Hal Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya Atas Nama Pembangunan Pelabuhan Patimban	KPPN Purwakarta telah menyetujui pembukaan rekening lainnya pada Bank BRI untuk keperluan menampung dana dari LMAN yang akan diberi nama **RPL 021 PS KSOP PATIMBAN UNTUK GANTI RUGI**
7	23 Februari 2021	Kegiatan Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pelabuhan Tanah Kas Desa Gempol, Berdasarkan Berita Acara Penitipan Uang Ganti Kerugian Pelabuhan Patimban Tahap 1 Tahun 2021 Nomor BAUGK-01/BA.999.03- TK/LMAN/2021 Tanggal 23 Februari 2021	Telah dilakukan penitipan uang ganti kerugian pengadaan tanah dalam bentuk relokasi untuk proyek Pelabuhan Patimban Tahap 1 Tahun 2021 ke Rekening K/L RPL 035501001463303 a.n. RPL 021 PS KSOP PATIMBAN UNTUK GANTI RUGI berjumlah Rp.1.468.001.457,-

No.	Tanggal	Kegiatan/ Surat Menyurat	Keterangan
8	26 Februari 2021	Kegiatan Pembayaran Ganti Rugi untuk Tanah Pengganti TKD Gempol berdasarkan Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor Ba.04/II/PTNH-PTB/2021 Tanggal 26 Februari 2021	Telah dilakukan pemberian uang ganti kerugian kepada pihak yang berhak pemilik tanah pengganti dan sisa uang ganti kerugian diberikan kepada Pemerintah Desa Gempol untuk dibelikan tanah pengganti kembali dengan rincian: 1. H Ito Sugito luas tanah 6.939 m2 berjumlah Rp1.022.222.948,- 2. Cayim luas tanah 4.729 m2 berjumlah Rp359.691.052,- 3. Pemdes Gempol berjumlah Rp86.087.457,-
9	08 November 021	Surat Pernyataan Penguasan Fisik Bangunan/Tanaman atau Benda Lain yang berkaitan dengan tanah atas nama Darpani Taufik qq Pemerintah Desa Patimban untuk pendataan makam diatas tanah kas desa	Telah dilakukan pendataan melalui data sporadik untuk bangunan di atas tanah kas desa berupa makam yang diwakilkan oleh Pemerintah Desa Patimban selaku pengelola tanah makam dimaksud
10	10 Januari 2022	Surat Kantor Pertanahan Subang Nomor PT.02.01/32-32.13/I/2022 Tanggal 10 Januari 2022 Perihal Konfirmasi Bangunan Makam di Atas Tanah Kas Desa Patimban Pengadaan Tanah Pelabuhan Patimban	Kantor Pertanahan Subang menjelaskan bahwa dalam penilaian tanah kas desa (TKD) Patimban peruntukkan makam merupakan fasilitas umum yang dikelola oleh Pemerintah Desa namun dalam daftar nominatif terdaftar sebagai Pemerintah Desa Patimban dan pada prinsipnya pemilik bangunan merupakan ahli waris dari makam tersebut.
11	01 April 2022	Surat Kepala Kantor Pertanahan Subang Nomor Pt.02.02/371-32.13/V/2022 Tanggal 01 April 2022 Perihal Revisi Validasi Nomor 216/12-32.13/II/2021	Bahwa Kantor Pertanahan Subang telah meneribitkan validasi sebagai pengesahan data bidang tanah Tanah Kas Desa Peruntukaan Makam berjumlah 3 (tiga) bidang a.n Pemerintah Desa Patimban
12.	18 Oktober 2022	Bupati Subang telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Subang Nomor LH.01/KEP.498-DLH/2022 Tentang Tim Pelaksana Pemindahan Makam Tanah Kas Desa Patimban yang Terkena Pengadaan Tanah Pelabuhan Patimban	SK Bupati terkait pembentukan tim pelaksana pemindahan makam sebagai dasar pelaksanaan pembayaran kepada pihak yang berhak yaitu ahli waris sehingga dapat dipertanggung jawabkan
13.	22 November 2022	Surat PPK Pengadaan Tanah Nomor KU.504/1/2/KSOP-PMB/2022 Tanggal 22 Novermber 2022 Perihal Surat Permohonan Pembayaran Langsung Via Rekening K/L Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan Pelabuhan Patimban Tahap XXXIV, Surat Pernyataan Tanggung Jawa Mutlak Nomor KP.004/7/12/KSOP-PMB/2022, Surat Pernyataan Pengesahan Dokumen Pendukung Permohonan Pembayaran Pengganti Legalisasi oleh PPK Pengadaan Tanah Nomor KP.004/7/13/KSOP-PMB/2022	**Telah diajukan permohonan pembayaran uang ganti rugi berjumlah Rp3.698.000.000 melalui rekening RPL 035501001463303 a.n. RPL 021 PS KSOP PATIMBAN UNTUK GANTI RUGI untuk ganti kerugian 3 (tiga) bidang tanah Pemerintah Desa Patimban**
14.	28 November 2022	Surat Direktur Kepelabuhanan Nomor KU.504/9/17/DJPL/2022 Tanggal 28 November 2022 Perihal Pembayaran Langsung Via Rekening K/L Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan Pelabuhan Patimban XXXIV	Telah disampaikan kepada LMAN pengajuan pembayaran uang ganti kerugian berjumlah 3 (tiga) objek pengadaan tanah yang terdiri dari 3 (tiga) non bidang tanah senilai Rp3.698.000.000
15.	29 November 2022	Surat Pernyataan Kesesuaian Dokumen Nomor KP.004/7/21/KSOP-PMB/2021 Tanggal 29 November 2022 Perihal Pernyataan Kesesuaian Dokumen	PPK Pengadaan Tanah telah menyatakan bahwa dokumen yang diajukan kepada LMAN telah sesuai dengan aslinya dan dapat dibuktikan
16.	12 Desember 2022	Surat Direktur Utama LMAN Nomor 1800/LMAN/2022 Tanggal 12 Desember 2022 Perihal Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Pelabuhan Patimban Tahap 4 tahun 2022 melalui penitipan uang ganti kerugian ke rekening K/L	Usulan PPK Pengadaan Tanah terhadap pembayaran ganti kerugian 3 (tiga) bidang non tanah Pemerintah Desa Patimban berupa makam berjumlah Rp3.698.000.000 melalui rekening **RPL 035501001463303 a.n. RPL 021 PS KSOP PATIMBAN UNTUK GANTI RUGI**
17.	21 Desember 2022	Surat PPK Pengadaan Tanah Pelabuhan Patimban Nomor UM.006/17/17/KSOP- PMB/2022 tanggal 21 Desember 2022	Telah dilakukan pelepasan hak 3 (tiga) bidang non tanah Pemerintah Desa Patimban berupa makam karakteristik khusus berupa tanah kas Desa Patimban
18.	22 Desember 2022	Kegiatan Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pelabuhan Patimban yang masuk ke Rekening RPL berdasarkan Berita Acara Penitipan Uang Ganti Kerugian Pelabuhan Patimban Tahap 4 Tahun 2022 Nomor BA	Uang Ganti kerugian pengadaan tanah atas karakteristik khusus untuk proyek Pelabuhan Patimban berjumlah Rp3.698.000.000 melalui rekening **RPL 035501001463303 a.n. RPL 021 PS KSOP PATIMBAN**

No.	Tanggal	Kegiatan/ Surat Menyurat	Keterangan
		UGK- 36/BA.999.03-TK/LMAN/2022 Tanggal 22 Desember 2022 dan Surat Direktur Utama LMAN Nomor S-2096/LMAN/LMAN.1/2022 Tanggal 22 Desember 2022	**UNTUK GANTI RUGI** untuk ganti kerugian 3 (tiga) bidang non tanah Pemerintah Desa Patimban berupa makam
19.	10 Februari 2024	Saat ini belum dilakukan transaksi untuk pembayaran bidang non tanah berupa makam	Pemerintah Desa Patimban sedang dalam proses pengajuan perubahan SK Panitia Pemindahan Makam. Saldo a.n. RPL 021 PS KSOP PATIMBAN UNTUK GANTI RUGI per tanggal 14 Agustus 2024 sebesar Rp3.698.410.287,-
20.	18 Maret 2025	Surat KSOP Patimban Nomor UM.207/2/4/KSOP.Pmb/2025 tanggal 18 Maret 2025	Setelah diterbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pemindahan Makam Patimban, KSOP Kelas II Patimban akan mengundang Pemerintah Desa Patimban beserta jajarannya, panitia pemindahan makam dan ahli waris makam untuk melaksanakan musyawarah terkait pemindahan makam. Selain itu, Kepala Desa Patimban akan mengajukan permohonan penetapan lokasi peruntukkan Makam Desa Patimban berlokasi di Tanah Pengganti Tanah Kas Desa Patimban.

F. Data Tuntutan Hukum Yang Memiliki Keputusan Hukum Tetap (Inkracht)

Data Tuntutan Hukum yang bersifat Inkracht di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut T.A. 2024, yaitu sebagai berikut:

No	Nomor Perkara	Penggugat	Status Perkara	Keterangan	Gugatan/ Petitum		Potensi Pengeluaran Negara	Amar Putusan
	Deskripsi Perkara	Tergugat	Status		Materiil	Imateriil	Rupiah	
1	93/Pdt.G/ 2023/ PN.Son	Dominggus M. Kalagison (Penggugat)	Pertama	Persidangan di PN Sorong Sorong Kelas IB	10.740.000.000	400.000.000	10.740.000.000	1. Menolak Eksepsi dari Tergugat; 2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
	Pokok Gugatan: Perbuatan Melawan Hukum	Menteri Perhubungan cq. Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Sorong (Tergugat)						

G. Investasi Jangka Pendek – Badan Layanan Umum

Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut T.A. 2024 sebesar Rp10.155.656.455,- yang terdapat pada BLU BKKP dan BLU Disnav Tanjung Priok. Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan pada BLU BKKP sebesar Rp6.331.209.536,-. Investasi jangka pendek/ deposito BLU BKKP Pada Bank BRI dengan Jangka waktu 12 Bulan dan Bunga 5% per Tahun. Deposito tersebut telah dilakukan perpanjangan jangka waktu deposito selama 1 tahun sampai dengan tanggal 19 Desember 2025 sesuai Surat Kepala BKKP Nomor KU.105/1/1/BKKP-2024 tanggal 19

Desember 2024. Selain itu, terdapat penambahan Deposito pada BLU BKKP dengan Nomor Rekening 0186-01-015862-40-7 pada Bank BRI sebesar Rp3.824.446.919,- dengan jangka waktu 6 Bulan dan Bunga 5% per Tahun.

H. Penjelasan Aids to Navigation Fund (ANF)

1. Dalam rangka kerjasama 3 Negara Pantai (Indonesia, Malaysia dan Singapura) maka dengan dukungan *International Maritime Organization (IMO)* dalam wadah *Tripartite Technical Expert Group (TTEG*), telah dibentuk forum kerjasama ***Cooperative Mechanism*** yang didasarkan pada kesepakatan ***Ministerial Meeting*** **di Batam tahun 2005**, **Jakarta Statement '2005 (Senior Officer Meeting), Kuala Lumpur Statement '2006 ,** serta **Singapore Statement '2007,** untuk mengaplikasikan ***article 43 UNCLOS 1982*** yang mendorong peran serta *User States* dan *Stakeholders* dalam peningkatan keselamatan & perlindungan lingkungan di Selat Malaka dan Selat Singapura.
2. *Cooperative Mechanism* (CM) memiliki 3 komponen, yaitu:
   a. ***Cooperation Forum (CF)***
      Komponen CM yang bertujuan untuk meningkatkan dialog dan diskusi mengenai issue-issue yang berkaitan dengan kepentingan di Selat Malaka & Singapura, serta untuk mengidentifikasi dan menyusun prioritas proyek dalam rangka peningkatan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan di Selat Malaka & Singapura.
   b. ***Project Coordination Committee (PCC)***
      Komponen CM yang bertujuan untuk mengkoordinasikan implementasi berbagai kegiatan proyek yang dilaksanakan dalam kerangka CM
   c. ***Aids to Navigation Fund (ANF)***
      Komponen CM yang bertujuan untuk menghimpun kontribusi dari *user states* dan *stakeholders* dalam mengelola dan memelihara Sarana Bantu Navigasi di selat Malaka & Singapura.
3. *Aids to Navigation Fund* (ANF) merupakan salah satu Komponen *Cooperative Mechanism* yang didirikan oleh tiga negara pantai (Indonesia, Malaysia dan Singapura) dengan tujuan untuk menghimpun kontribusi dari *User States* dan *Stakeholders* dalam mengelola dan memelihara Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di selat Malaka & Singapura. ANF sendiri dioperasikan dengan *Rules of Procedure* serta *Rules and Regulation* yang diatur dan disetujui oleh Komite ANF sebagai badan tertinggi yang terdiri dari wakil-wakil tiga negara pantai, *User States* and *Stakeholder* yang berkontribusi serta IMO sebagai pengamat. ANF bersidang setiap 6 bulan di negara sekretariat untuk menerima laporan,

membahas serta memutuskan kebijakan mengenai issue-issue yang berkembang dalam pengelolaan ANF.

4. Mengingat pendanaan ANF yang bersifat sukarela, sehingga dana ANF menjadi sangat terbatas dan bersifat suplemen bagi 3 Negara Pantai. Adapun berdasarkan *User States and Stakeholder*, dana ANF hanya dapat digunakan untuk:
    a. Biaya yang terkait dengan pembangunan SBNP di Selat Malaka dan Singapura yang sebelumnya telah disetujui oleh 3 Negara Pantai pada pertemuan *Tripartite Technical Expert Group (TTEG);*
    b. Biaya yang terkait dengan perbaikan, perawatan terhadap SBNP di Selat Malaka dan Singapura seperti biaya pelatihan personil yang terlibat langsung dalam kegiatan perawatan SBNP, biaya pembelian suku cadang SBNP dan biaya operasional kegiatan perawatan SBNP.
    c. Dana ANF tidak dapat digunakan untuk membiayai perjalanan dinas, akomodasi, ataupun biaya untuk menghadiri pertemuan baik yang terkait dengan ANF maupun yang tidak terkait dengan ANF.
5. Dalam pengoperasiannya, ketiga negara pantai mempunyai beberapa kewajiban yang harus disampaikan kepada komite ANF, antara lain:
    a. Menyusun *Plan Maintenance Programme (PMP)* yang terkait dengan perawatan dan pemeliharaan SBNP maupun replacement SBNP dalam kurun waktu 10 tahun kedepan secara mandiri oleh masing-masing negara pantai. Forum TTEG akan membahas kajian PMP tersebut yang selanjutnya akan diajukan kepada komite ANF untuk mendapatkan persetujuan;
    b. Melaksanakan kegiatan *Joint Inspection Round Work* setiap 6 bulan sekali bersama dengan *Performance Auditor* yang ditunjuk oleh komite ANF. Hasil dari *Joint Inspection Round Work* harus disampaikan pada kepada komite ANF untuk dievaluasi;
    c. Menyusun laporan kegiatan perawatan dan pemeliharaan SBNP di Selat Malaka dan Singapura serta menyampaikannya pada pertemuan ANF *Committee Meeting*;
    d. Menyampaikan laporan keuangan beserta bukti pembayaran kepada Sekretariat ANF. Selanjutnya Sekretariat ANF dan *Independent Auditor* yang ditunjuk oleh komite ANF akan mengevaluasi laporan keuangan beserta bukti pembayaran yang disampaikan oleh 3 negara pantai dan melaporkannya kepada komite ANF;
    e. Menyusun program kerja untuk tahun berikutnya berdasarkan PMP yang telah disetujui oleh komite ANF dan menyampaikannya pada pertemuan ANF *Committee Meeting*.

6. Saldo Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada Satker Kenavigasian Pusat T.A. 2024 sebesar Rp3.763.629.263,-. Saldo tersebut disajikan berdasarkan USD232.869,03 dengan Kurs Tengah BI 31 Desember 2024 Rp16.162. Penyajian berdasarkan Kurs Tengah BI dengan menunjuk Surat Kepala KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah Nomor S-600/KPN.1208/2024 tanggal 31 Desember 2024 hal Mekanisme Pembukaan Hibah Langsung Bentuk Uang Dalam Mata Uang Asing Sebagai Bentuk Implementasi Per-9/PB/2022 dan Surat KPA Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat Nomor 01/U/PKP/I-25 tanggal 02 Januari 2025.
7. Berdasarkan Surat KPA Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat Nomor 112/U/PKP/VII-24 tanggal 1 Juli 2024, terdapat dana masuk atas pemindahan dari Rekening Sekretariat ANF sebesar USD1.054.994,44 dengan Surat Pengesahan Hibah Langsung Nomor 241400503710001 tanggal 13 Desember 2024 untuk Pembayaran Belanja Barang dan Barang dengan Nomor Register 70878801 *Aid to Navigation Fund* (ANF).

I. Persediaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut

Persediaan yang tercatat di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut T.A. 2024 sebesar Rp133.735.709.053,-. Adapun persediaan dalam kondisi Rusak sebesar Rp294.923.324,- dan Usang sebesar Rp1.575.983.894,- di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut T.A. 2024 dengan rincian sebagai berikut.

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	PROVINSI	Persediaan Rusak	Persediaan Usang	Keterangan
1	287338	UPP TAHUNA	Sulawesi Utara	3.850.000	-	Persediaan berupa Kantong Mayat yang sudah tidak layak digunakan
2	561712	DISNAV TARAKAN	Kalimantan Utara	-	177.528.074	Surat Sekretaris Jenderal Nomor PL.405/7/23/PHB-2023 tanggal 20 September 2023 Hal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Barang Persediaan Pada Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Tarakan
3	535841	PPLP SURABAYA	Jawa Timur	-	850.300	Persediaan Usang berupa Lem yang sudah usang atau tidak bisa digunakan karena kondisi “kering”
4	520454	PPLP TANJUNG PRIOK	DKI Jakarta	-	656.043.370	Persediaan dalam Kondisi Usang atas Pengadaan Tahun 2023 yang telah dilakukan tindak lanjut sesuai CHR Inspektorat Jenderal terkait Reviu atas Pengelolaan BMN dengan Koreksi Pencatatan dari Aset Tetap menjadi Aset Lancar pada PPLP Tg. Priok Tahun Anggaran 2023 dan Surat Keterangan KPB Nomor PL.405/1/13/PLP.TPK/2023 tanggal 25 Mei 2023

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	PROVINSI	Persediaan Rusak	Persediaan Usang	Keterangan
5	606301	SATKER BKKP	DKI Jakarta	-	741.562.150	Berupa Obat Padat, Obat Cair, dan Attachment lainnya yang sudah kadaluarsa. Persediaan usang dengan nilai terbesar berupa Doa 5 Drugs Panel Test
6	521967	UPP POMAKO I/POMAKO II	Papua	225.635.324	-	Persediaan Sisa Tiang Pancang sesuai Surat Kepala Kantor UPP Pomako Nomor SKET-01/02/25/UPP.PMK-25
7	289974	UPP S A R M I	Papua	65.438.000	-	Surat Kepala Kantor UPP Sarmi Nomor HK.701/1/1/UPP.SMI-2025 tanggal 17 Januari 2025 Hal Permohonan Persetujuan Penjualan Hasil Sisa Potongan Tiang Pancang
			TOTAL	**294.923.324**	**1.575.983.894**	

J. Tanah yang Tercatat di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut

Tanah di yang tersaji di Laporan Keuangan Ditjen Perhubungan Laut T.A. 2024 senilai Rp16.518.087.964.624,- dengan luas 21.821.139m2 dan jumlah tanah sebanyak 2.447 bidang Tanah. Atas jumlah tanah tersebut, tanah yang telah bersertifikat a.n. Kementerian Perhubungan sebanyak 1.805, tanah a.n. Pihak Ketiga sebanyak 40, dan tanah yang belum bersertifikat a.n. Kementerian Perhubungan sebanyak 602 (dikuasai oleh Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut). Rincian Tanah yang tersaji tersebut terdiri dari:

No	Uraian Tanah	Kuantitas	Nilai
1	Intrakomptable	21.226.367	16.093.082.085.423
2	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	412.649	332.283.875.488
3	Properti Investasi	121.870	91.059.804.000
4	Aset Tetap YTDOP	60.253	1.662.199.713
Total		**21.821.139**	**16.518.087.964.624**

Berkaitan dengan tanah yang tercatat pada Laporan Keuangan Ditjen Perhubungan Laut, terdapat pengadaan Tanah melalui LMAN pada KSOP Patimban. Tanah pada Pelabuhan Patimban hasil dari proses pembebasan tanah sebagai *Backup Area* Pelabuhan Patimban yang tercatat pada aplikasi SAKTI modul Aset Tetap KSOP Kelas II Patimban sampai dengan Tahun Anggaran 2024 Tanah Bangunan Terminal Laut (20101022008) seluas 3.024.728 dengan nilai sebesar Rp800.345.305.396,-. Selain itu, terdapat perubahan kuantitas pada periode Koreksi Audited T.A. 2024 di UPP Tanjung Redeb dengan merubah luas sebesar 248m2 atas Tanah Bangunan Kantor Pemerintah sesuai dengan Nota Kesepakatan Nomor NK-1/KBC.1605/2024 dan HK.201/4/5/UPP.Trb/2024 tanggal 21 Agustus 2024 antara KPPBC Tipe Madya Pabean B Tarakan dan Kantor UPP Kelas II Tanjung Redeb tentang Hak dan Kepemilikan atas Barang Milik Negara Berupa Tanah dan Bangunan pada Area Pelabuhan Tanjung Redeb.

Pada Kantor Pangkalan PLP Tanjung Uban, terdapat tanah yang telah tercatat dan dikuasai satker seluas 46.844m2 yang menjadi temuan pemeriksaan BPK RI dikarenakan tanah tersebut telah disertifikatkan oleh TNI AL dengan Nomor 05.06.09.04.4.00008 tanggal 16 Agustus 1994 a.n. Departemen Pertahanan dan Keamanan RI. Tindak Lanjut yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan menyampaikan surat kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor PL.301/2/9/DJPL/2023 tanggal 02 Mei 2023 hal Proses Tindak Lanjut Penyelesaian Aset Tanah dan Bangunan Negara pada Unit Pelaksana Teknis di Pelabuhan Tanjung Uban.

Pada Kantor KSOP Banten, terdapat tanah hasil reklamasi seluas 5.961m2 yang dalam penguasaanya belum tercatat pada Laporan Keuangan T.A. 2024 dikarenakan pada periode pelaporan satker belum mendapat dokumen pendukung terkait nilai perolehan tanah. Tanah tersebut telah bersertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Perhubungan Nomor 00040 tanggal 27 Desember 2023 dan telah dinilai sebesar Rp18.187.527.000,- sesuai Laporan Penilaian KPKNL nomor Lap-0001/1/PRO-05/KNL.0601/05.00.00/2025 tanggal 10 Januari 2025. Oleh karena itu, tanah tersebut akan dicatat pada periode Semester I T.A. 2025 sesuai Surat Keterangan Kepala Kantor KSOP Banten Nomor UM.006/7/2/KSOP.Btn-2025 tanggal 30 April 2025 perihal Pencatatan Saldo Awal Perolehan BMN berupa Tanah Bangunan Kantor Permanen pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten.

K. KPBU Pelabuhan Patimban

1. Latar Belakang

Penyediaan infrastruktur diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan tersedianya pelayanan publik yang lebih baik. Keterlibatan pihak swasta sebagai inovasi dalam pembangunan infrastruktur akan menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Terkait hal tersebut, Pemerintah Indonesia memperkenalkan skema **Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)** dalam penyediaan infrastruktur untuk memberikan ruang bagi pemerintah untuk bekerja sama dengan swasta berdasarkan prinsip alokasi risiko yang proporsional. Implementasi skema ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Definisi KPBU adalah kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian

risiko di antara para pihak. Penyediaan Infrastruktur melalui skema KPBU dimulai dari tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi, konstruksi, operasi, hingga penyerahan asset di akhir masa konsesi. Kementerian Keuangan sejak tahun 2015 berperan sebagai Lembaga yang memberikan dukungan langsung dalam penyediaan infrastruktur dengan skema KPBU melalui penyediaan fasilitas berupa Fasilitas Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi (*Project Development Facility*).

Salah satu dari sekian banyak kerjasama Pemerintah dengan swasta di Indonesia melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) adalah Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. Pelabuhan Patimban merupakan salah satu proyek yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020.

2. Dasar Hukum

Dasar Hukum/Pelaksanaan Skema KPBU Pelabuhan Patimban adalah:

a. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infratruktur;
b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Insfrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah
c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 174 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan usaha (KPBU) Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
d. Perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat Antara Kementerian Perhubungan Sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dengan PT Pelabuhan Patimban Internasional sebagai Badan Usaha Pelabuhan Nomor HK.201/1/16/DJPL/2021 dan Nomor 001/PKS/PPI-MOT/III/2021 tanggal 17 Maret 2021
e. Akta Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Negara Melalui Kerjasama Penyedia Infrastruktur Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat antara Kementerian Perhubungan dengan PT Pelabuhan Patimban Internasional Nomor 4 Tanggal 16 Desember 2021

f. Berita Acara Serah Terima Aset Berupa Tanah dan/atau Bangunan Pada Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat Yang Diserahkan Dalam Rangka Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) Dengan Skema Kerjasama Penyedia Infrastruktur (KSPI) Kepada PT Pelabuhan Patimban Internasional Nomor HK.201/1/XII/KSOP-PMB/2021, Nomor 004/PKS/PPI-MOT/XII/2021 Tanggal 16 Desember 2021

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerjasama KPBU Pelabuhan Patimban adalah:

a. Pengoperasian dan pemeliharaan area kerjasama dan infrastruktur area kerjasama, termasuk seluruh aset PJPK dan Fasilitas suprastruktur;
b. Pengadaan fasilitas suprastruktur Tahap I-1, Pengadaan Fasilitas suprastruktur Tahap1-2-1, Pengadaan Fasilitas suprastruktur Tahap1-2-2 dan setiap pengadaan fasilitas suprastruktur selanjutnya;
c. Pengoperasian dan pemeliharaan terminal peti kemas:
    1) Tahap I-1 sejak target tanggal operasi Tahap 1-1 (peti kemas) sampai dengan akhir periode kerjasama;
    2) Tahap I-2-1 sejak target tangga operasi Tahap I-2-1 sampai dengan akhir periode kerjasama, dengan ketentuan BUP hanya akan memulai pengoperasian dan pemeliharaan terminal peti kemas setelah PJPK memenuhi *minimum dra*ft-14 (minus empat belas) LWS dan *minimum quay* 840 (delapan ratus empat puluh) meter;
    3) Tahap I-2-2 sejak target tanggal operasi Tahap I-2-2 sampai dengan akhir periode kerjasama;
d. Pengoperasian dan pemeliharaa terminal kendaraan:
    1) Tahap I-1 sejak target tanggal operasi Tahap 1-1 (kendaraan) sampai dengan akhir periode kerjasama;
    2) Tahap I-2-1 sejak target tanggal operasi Tahap I-2-1 sampai dengan akhir periode kerjasama.
e. Penyedia pelayanan jasa kepelabuhanan;
f. Pemeliharaan kolam putar (turning basin) dan kolam pelabuhan (maintenance dredging);
g. Pengadaan layanan pendukung kepada pengguna pelayanan jasa kepelabuhanan;
h. Perolehan pembiyaan yang diperlukan termasuk menyediakan ekuitas minimal 30% (tigapuluh persen) dari nilai proyek;
i. Pengalihan perolehan atau penguasaan atas aset proyek berupa seluruh bagian dari aset PJPK dan fasilitas suprastruktur kepada PJPK pada akhir periode kerjasama

berdasarkan ketentuan penyerahan kembali area kerjasama dan infrastruktur area kerjasama.

4. Jangka Waktu KPBU

Jangka waktu periode kerjasama sebagai berikut:

a. Konsesi diberikan untuk jangka waktu 40 (empat puluh) tahun terhitung sejak tanggal efektif (periode kerjasama) dimana BUP diberikan hak dan kewenangan serta kewajiban untuk melaksanakan proyek sesuai dengan ketentuan perjanjian;
b. Periode kerjaama dapat diperpanjang apabila terjadi suatu peristiwa perpanjangan periode kerjasama yang diatur berdasarkan ketentuan perjanjian. Dalam waktu selamabat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah PJPK memperoleh persetujuan Menteri Keuangan atas pemanfaatan Barang Milik Negara, para pihak akan menandatangani suatu addendum atas perjanjian ini untuk menyatakan perpanjangan yang dimaksud.
c. Dalam hal konsensi diperpanjang oleh PJPK melampaui jangka waktu yang diberikan dalam ketentuan diatas, periode kerjasama harus mencakup jangka waktu perpanjangan konsesi tersebut; dan
d. Dalam hal terjadi pengakhiran lebih awal perjanjian oleh salah satu pihak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini, periode kerjasama berarti dan terbatas pada jangka waktu yang dimulai dari tanggal efektif dan berakhir pada tanggal pengakhiran lebih awal tersebut

5. Area Kerjasama dan Aset PJPK

Area Kerjasama dan Aset PJPK dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Penyerahan area kerjasama tahap I-1 dan aset PJPK tahap I-1 berupa fasilitas infrastruktur untuk terminal petikemas dengan kapasitas 250.000 TEUs dan terminal kendaraan dengan kapasitas mencapai 218.000 CBU dilakukan pada target tanggal penyerahan aset PJPK tahap I-1;
b. Penyerahan area kerjasama tahap I-2-1 dan aset PJPK tahap I-2-1 berupa fasilitas infrastruktur untuk terminal peti kemas dengan kapasitas 1.575.000 TEUs dan terminal kendaraan dengan kapasitas mencapai 600.000 CBU serta penyelesaian pekerjaan *minimum draft* -14 LWS dan *minimum quay* 840m, paling lambat dilakukan pada target tanggal penyerahan aset PJPK tahap I-2-1; dan
c. Penyerahan area kerjasama tahap I-2-2 dan aset PJPK tahap I-2-2 berupa fasilitas infrastruktur untuk terminal peti kemas dengan kapasitas minimum 3.750.000 TEUs paling lambat dilakukan pada target tanggal penyerahan aset PJPK tahap I-2-2.

6. Tahapan Penyelesaian Proyek dan Progres Pembangunan

Tahapan Penyelesaian proyek dan progres pembangunan sebagai berikut:

a. Tahap Penyelesaian Proyek

Tahapan Proyek	Tanggal Pemenuhan
Tanggal Penandatanganan	Tanggal Perjanjian
Target Tanggal Efektif	Tanggal yang jatuh 6 (enam) bulan setelah Tanggal Penandatanganan (sebagaimana diperpanjang sesuai ketentuan Perjanjian ini)
Tahap I-1	
Target Tanggal Penyerahan Aset PJPK Tahap I-1	Tanggal yang sama dengan Tanggal Efektif
Target Tanggal Operasi Tahap I-1 (Kendaraan)	Tanggal yang jatuh 90 (Sembilan puluh) Hari setelah Tanggal Efektif dan Tanggal Penyerahan Aset PJPK Tahap I-1
Target Tanggal Penyelesaian Pengadaan Fasilitas Suprastruktur Tahap I-1 (Kendaraan)	Tanggal yang jatuh tidak lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Efektif/Tanggal Penyerahan Aset PJPK Tahap I-1
Target Tanggal Operasi Tahap I-1 (Peti Kemas)	2024
Target Tanggal Penyelesaian Pengadaan Fasilitas Suprastruktur Tahap I-1 (Peti Kemas)	2024
Tahap I-2-1	
Target Tanggal Penyerahan Aset PJPK Tahap I-2-1	Hari pertama di kuartal ke-empat tahun 2024 (yaitu pada 01 Oktober 2024)
Target Tanggal Penyelesaian Pengadaan Fasilitas Suprastruktur Tahap I-2-1	Tanggal yang jatuh tidak lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Penyerahan Aset PJPK Tahap I-2-1
Target Tanggal Operasi Tahap I-2-1	Tanggal yang sama dengan Tanggal Penyelesaian Pengadaan Fasilitas Suprastruktur Tahap I-2-1
Tahap I-2-2	
Target Tanggal Penyerahan Aset PJPK Tahap I-2-2	Hari pertama di kuartal ke-dua tahun 2027 (yaitu pada 1 April 2027)
Target Tanggal Penyelesaian Pengadaan Fasilitas Suprastruktur Tahap I-2-2	Tanggal yang jatuh tidak lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Penyerahan Aset PJPK Tahap I-2-2
Target Tanggal Operasi Tahap I-2-2	Tanggal yang sama dengan Tanggal Penyelesaian Pengadaan Fasilitas Suprastruktur Tahap I-2-2

b. Tahap Progres Pembangunan

Uraian	Jangka Pendek		
	Tahap I-1	Tahap I-2-1	Tahap I-2-2
	(2017-2020)	(2021-2024)	(2021-2027)
Terminal Kontainer			
Dermaga No. 1			840m x 34m
Dermaga No. 2	420m x 34m	420m x 34m	
Dermaga No. 3			480m x 34m
Lapangan Penumpukan Peti Kemas No. 1			34,36 Ha
Lapangan Penumpukan Peti Kemas No. 2	10,74 Ha	27,53 Ha	
Lapangan Penumpukan Peti Kemas No. 3			1,56 Ha
Kapasitas Lapangan Peti Kemas (TEUs)	250.000	1.575.000	3.750.000

Uraian	Jangka Pendek		
	Tahap I-1 (2017-2020)	Tahap I-2-1 (2021-2024)	Tahap I-2-2 (2021-2027)
Terminal Kendaraan			
Dermaga Kendaraan	300m x 33m	390m x 33m	
Lapangan Penumpukan Kendaraan	8,67 Ha	13,65 Ha	
Lapangan Penumpukan Kendaraan Sementara	13,71 Ha		
Kapasitas Lapangan Penumpukan Kendaraan (CBU)	218.000	600.000	
Fasilitas Lainnya			
Area Tunggu Truk	11,43 Ha		
Area Pengelolaan Limbah			2 Ha
Area Inspeksi	2,08 Ha		

c. Progres Tahap I-1

d. Sarana dan Prasarana Terminal Kendaraan dan Terminal Kontainer

Hand over sarana dan prasarana terminal kendaraan dan kontainer Pelabuhan Patimban kepada PT Pelabuhan Patimban Internasional sebagai berikut:

1) Terminal Kendaraan

NO	URAIAN	LUAS
1	Dermaga Kendaraan	300 m X 33 m (domestik dan internasional vessel)
2	Lapangan Penumpukan Kendaraan	8,67 ha
3	Lapangan Penumpukan Kendaraan Sementara	13,71 ha
4	Area Inspeksi	2,08 ha

2) Terminal Kontainer:

NO	URAIAN	LUAS
1	**Dermaga Kontainer**	420 m x 34 m
2	**Lapangan Penumpukan Peti Kemas**	10,74 Ha
3	**Area Tunggu Truck**	11,43 Ha

7. Nilai Konsesi atas KPBU

Nilai konsesi berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat Antara Kementerian Perhubungan Sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dengan PT Pelabuhan Patimban Internasional sebagai Badan Usaha Pelabuhan Nomor HK.201/1/16/DJPL/2021 dan Nomor 001/PKS/PPI-MOT/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang tertuang dalam perjanjian tersebut ada dua konsesi yaitu:

a. Konsesi tetap sebesar Rp121.000.000.000,- /tahun pada area kerja sama tahap I-1;
b. Konsesi variabel sebesar 2,5% dari pendapatan kotor setiap bulan dengan mekanisme pembayaran per triwulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah dilakukan pencocokan dan penelitian terhadap jasa kepelabuhanan;
c. Pembayaran Pendapatan Konsesi Tetap untuk periode sejak Tanggal Efektif sampai dengan Tanggal Operasi Tahap I-1 (Peti Kemas) ditangguhkan dan akan mulai dibayarkan oleh BUP pada saat posisi arus kas BUP positif selama sisa Periode Kerjasama.
d. Selama terdapat Pendapatan Konsesi Tetap yang Ditangguhkan yang masih belum dibayar maka BUP wajib membayar bunga sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun atas jumlah yang masih belum dibayar tersebut terhitung sejak tanggal dimulainya periode penangguhan sampai dengan dilunasinya seluruh Pendapatan Konsesi Tetap yang Ditangguhkan

8. Rincian Aset Barang Milik Negara Objek KPBU

Aset Barang Milik Negara yang menjadi Objek KPBU pada KSOP Patimban dengan total nilai Rp5.451.092.043.853,- terdiri dari Aset sebagai berikut:

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	KODE BARANG	URAIAN BARANG	NUP	KUANTITAS	NILAI	KONDISI BARANG	KETERANGAN
1	21140	KSOP Patimban	2010202003	Tanah Hasil Reklamasi	1	507.823 m2	2.773.084.621.794	Baik	Tanah Reklamasi Area KPBU
2	21140	KSOP Patimban	4010125999	Bangunan Terbuka Lainnya	1	65.667 m2	104.896.378.392	Baik	Perkerasan Beton Container Terminal
3	21140	KSOP Patimban	4010125999	Bangunan Terbuka Lainnya	2	24.508 m2	21.519.615.203	Baik	Perkerasan Aspal Container Terminal
4	21140	KSOP Patimban	4010125999	Bangunan Terbuka Lainnya	3	82.331 m2	62.019.599.948	Baik	Perkerasan Aspal Car Terminal
5	21140	KSOP Patimban	4010125999	Bangunan Terbuka Lainnya	4	29.097 m2	36.448.035.611	Baik	Perkerasan Aspal Inspection Area

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	KODE BARANG	URAIAN BARANG	NUP	KUANTITAS	NILAI	KONDISI BARANG	KETERANGAN
6	21140	KSOP Patimban	4010125999	Bangunan Terbuka Lainnya	5	132649 m2	99.923.940.114	Baik	Perkerasan Aspal Temporery Car Terminal
7	21140	KSOP Patimban	4010125999	Bangunan Terbuka Lainnya	6	111.562 m2	139.746.906.850	Baik	Perkerasan Aspal Truck Waiting Area
8	21140	KSOP Patimban	4010132003	Bangunan Penerangan Jalan	59	1 Unit	1.224.265.685	Baik	Lampu Penerangan area KPBU Type 1.1
9	21140	KSOP Patimban	4010132003	Bangunan Penerangan Jalan	60	1 Unit	1.236.222.342	Baik	Lampu Penerangan area KPBU Type 1.2
10	21140	KSOP Patimban	4010132003	Bangunan Penerangan Jalan	61	1 Unit	1.424.488.947	Baik	Lampu Penerangan area KPBU Type 2.1
11	21140	KSOP Patimban	4010132003	Bangunan Penerangan Jalan	62	1 Unit	1.469.829.768	Baik	Lampu Penerangan area KPBU Type 2.2
12	21140	KSOP Patimban	4010132003	Bangunan Penerangan Jalan	63	1 Unit	1.469.829.768	Baik	Lampu Penerangan area KPBU Type 2.3
13	21140	KSOP Patimban	4010132003	Bangunan Penerangan Jalan	64	1 Unit	1.580.706.321	Baik	Lampu Penerangan area KPBU Type 3.1
14	21140	KSOP Patimban	4010132003	Bangunan Penerangan Jalan	65	1 Unit	1.670.052.873	Baik	Lampu Penerangan area KPBU Type 3.2
15	21140	KSOP Patimban	4010132003	Bangunan Penerangan Jalan	66	1 Unit	2.181.375.635	Baik	Lampu Penerangan area KPBU Type 4.1
16	21140	KSOP Patimban	4010132003	Bangunan Penerangan Jalan	67	1 Unit	2.237.337.865	Baik	Lampu Penerangan area KPBU Type 4.2
17	21140	KSOP Patimban	4010132003	Bangunan Penerangan Jalan	68	1 Unit	3.258.707.647	Baik	Lampu Penerangan area KPBU Type 5.1
18	21140	KSOP Patimban	4010132003	Bangunan Penerangan Jalan	69	1 Unit	3.258.707.647	Baik	Lampu Penerangan area KPBU Type 5.2
19	21140	KSOP Patimban	4010132003	Bangunan Penerangan Jalan	70	1 Unit	3.258.707.647	Baik	Lampu Penerangan area KPBU Type 5.3
20	21140	KSOP Patimban	4010132003	Bangunan Penerangan Jalan	71	1 Unit	3.258.707.647	Baik	Lampu Penerangan area KPBU Type 5.4
21	21140	KSOP Patimban	4040104002	Pagar Semi Permanen	1	2.623 m	2.127.595.201	Baik	Barrier/Pagar Semi Permanen
22	21140	KSOP Patimban	5020404002	Saluran Drainage	1	11.154 m	32.463.223.401	Baik	Drainase Area KPBU
23	21140	KSOP Patimban	5010211001	Dermaga	3	15.331 m2	1.328.903.796.792	Baik	Container Berth
24	21140	KSOP Patimban	5010211001	Dermaga	4	11.571 m2	701.149.135.570	Baik	Car Berth
25	21140	KSOP Patimban	5040202001	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 kVA	1	1 unit	65.103.438.079	Baik	Sistem Distribusi Listrik > 20 KV
26	21140	KSOP Patimban	5040202002	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S.D. 20 KVA	1	1 unit	23.258.712.798	Baik	Sistem Distribusi Listrik < 20 KV
27	21140	KSOP Patimban	5030901001	Instalasi Penangkal Petir Manual	1	1 unit	79.594.924	Baik	Lightning Protection
28	21140	KSOP Patimban	5030901001	Instalasi Penangkal Petir Manual	2	1 unit	79.594.924	Baik	Lightning Protection
29	21140	KSOP Patimban	5030901001	Instalasi Penangkal Petir Manual	3	1 unit	79.594.924	Baik	Lightning Protection
30	21140	KSOP Patimban	5030701004	Instalasi Komunikasi Elektronik (Komlek)	1	1 unit	11.036.323.584	Baik	Sistem IT dan Telekomunikasi
31	21140	KSOP Patimban	5030105999	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	1	1 unit	9.434.475.789	Baik	Water Supply System
32	21140	KSOP Patimban	5030201003	Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Besar	1	1 unit	3.462.007.772	Baik	Sewage System
33	21140	KSOP Patimban	4040101009	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	1	1 unit	2.340.376.931	Baik	Tugu Tanda Batas/Main Gate
34	21140	KSOP Patimban	4010113002	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	1	3 m	2.263.183.838	Baik	Gedung Pos Jaga pada Inspection Area
35	21140	KSOP Patimban	4010113002	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	2	30 m	401.786.334	Baik	Temporary Security Post
36	21140	KSOP Patimban	4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	1	36 m	551.487.252	Baik	Guard House
37	21140	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	1	1 Unit	111.454.696	Baik	CCTV Pelabuhan Patimban
38	21140	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	2	1 Unit	111.454.696	Baik	CCTV Pelabuhan Patimban
39	21140	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	3	1 Unit	111.454.696	Baik	CCTV Pelabuhan Patimban
40	21140	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	4	1 Unit	111.454.696	Baik	CCTV Pelabuhan Patimban
41	21140	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	5	1 Unit	111.454.696	Baik	CCTV Pelabuhan Patimban
42	21140	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	6	1 Unit	111.454.696	Baik	CCTV Pelabuhan Patimban
43	21140	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	7	1 Unit	111.454.696	Baik	CCTV Pelabuhan Patimban
44	21140	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	8	1 Unit	111.454.696	Baik	CCTV Pelabuhan Patimban
45	21140	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	9	1 Unit	111.454.696	Baik	CCTV Pelabuhan Patimban
46	21140	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	10	1 Unit	111.454.696	Baik	CCTV Pelabuhan Patimban

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	KODE BARANG	URAIAN BARANG	NUP	KUANTITAS	NILAI	KONDISI BARANG	KETERANGAN
47	21140	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	11	1 Unit	111.454.696	Baik	CCTV Pelabuhan Patimban
48	21140	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	12	1 Unit	111.454.696	Baik	CCTV Pelabuhan Patimban
49	21140	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	13	1 Unit	111.454.696	Baik	CCTV Pelabuhan Patimban
50	21140	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	14	1 Unit	111.454.696	Baik	CCTV Pelabuhan Patimban
51	21140	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	15	1 Unit	111.454.696	Baik	CCTV Pelabuhan Patimban
52	21140	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	16	1 Unit	111.454.696	Baik	CCTV Pelabuhan Patimban
53	21140	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	17	1 Unit	111.454.696	Baik	CCTV Pelabuhan Patimban
54	21140	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	18	1 Unit	111.454.696	Baik	CCTV Pelabuhan Patimban
55	21140	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	19	1 Unit	111.454.696	Baik	CCTV Pelabuhan Patimban
56	21140	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	20	1 Unit	111.454.696	Baik	CCTV Pelabuhan Patimban
57	21140	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	21	1 Unit	111.454.696	Baik	CCTV Pelabuhan Patimban
58	21140	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	22	1 Unit	111.454.696	Baik	CCTV Pelabuhan Patimban
59	21140	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	23	1 Unit	111.454.696	Baik	CCTV Pelabuhan Patimban
60	21140	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	24	1 Unit	111.454.696	Baik	CCTV Pelabuhan Patimban
61	21140	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	25	1 Unit	111.454.696	Baik	CCTV Pelabuhan Patimban
62	21140	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	26	1 Unit	111.454.696	Baik	CCTV Pelabuhan Patimban
63	21140	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	27	1 Unit	111.454.696	Baik	CCTV Pelabuhan Patimban
64	21140	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	28	1 Unit	111.454.696	Baik	CCTV Pelabuhan Patimban
65	21140	KSOP Patimban	3050206002	Televisi	4	1 Unit	68.946.548	Baik	Monitor CCTV TV 55"
TOTAL							**5.451.092.043.853**		

9. Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah – KSOP Patimban

Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah Pada Perjanjian KPBU KSOP Patimban dengan PT Pelabuhan Patimban International (PPI) Tahun 2024 belum dilakukan reklasifikasi BMN ke Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah dikarenakan pada perjanjian KPBU tersebut belum terdapat *Financial Close*. Saat ini telah dilakukan addendum perjanjian yang Kelima terkait Perjanjian Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat antara Kementerian Perhubungan dengan PT Pelabuhan Patimban Internasional No.HK.201/10/19/DJPL/2024 dan Nomor 008/PKS/PPI-MOT/X/2024 Tanggal 18 Oktober 2024. Laporan Kemajuan Proyek KPBU Pelabuhan Patimban adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	Tindak Lanjut	PIC	Rencana Tindak Lanjut
1	**Financial Close**			
	Surat Dirut PPI Nomor: 017/DIRUT/PPI/I/2025 tanggal 20 Februari 2025, dibutuhkan konfirmasi dari PJPK atas jumlah CAPEX PT. PPI yang belum	Angka tersebut telah sesuai dengan perhitungan financial model, dan dapat disetujui oleh PJPK.	PJPK	2025

No.	Uraian	Tindak Lanjut	PIC	Rencana Tindak Lanjut
	terealisasikan untuk Tahap I-1 yaitu sebesar Rp1.584.563.357.820,-			
	Surat Dirut PPI Nomor: 018/DIRUT/PPI/I/2025, PPI mengajukan permohonan untuk perubahan jangka waktu pembayaran klaim Bank Garansi menjadi 14 (empat belas) hari kerja setelah Bank Garansi jatuh tempo.	Dalam Perjanjian KPBU telah diatur pada Pasal 8 (e) vi. bahwa jaminan pelaksanaan berlaku sejak tanggal diterbitkan s.d. 18 bulan ditambah dengan 6 (bulan) masa klaim.	PJPK dan PPI	2025
		Perlu dipertimbangkan perpendekan waktu menjadi 14 hari apakah dinilai cukup dalam proses administrasi pengajuan klaim apabila terjadi wanprestasi.		
		Apabila dapat disetujui, maka dibutuhkan addendum perjanjian		
	Surat Direktur PPI tanggal 17 Maret 2025 terkait Penyampaian Dokumen Pemenuhan Pembiayaan (Financial Close).	Telah dilaksanakan rapat pembahasan terkait Financial Close dengan Biro Hukum dan Bagian Hukum, terhadap dokumen yang disampaikan masih memerlukan dokumen tambahan dari PT PPI pada tanggal 18 Maret 2025	PJPK dan PPI, Itjen	2025
		Telah disampaikan surat DJPL kepada PT PPI nomor AL.301/7/16/DJPL/2025 tanggal 18 Maret 2025 hal Permintaan Penyampaian dokumen pendukung pemenuhan pembiayaan (Financial Close) Pelabuhan Patimban		
		Financial close menjadi perhatian khusus oleh BPK dalam setiap periode pemeriksaan		
2	**Rencana Pengadaan Akhir**			
	Surat PT PPI tanggal 28 Februari 2025 perihal penyampaian Rencana Pengadaan Akhir Fasilitas Suprastruktur Terminal Petikemas Tahap I-1	Telah disampaikan Surat DJPL kepada PPI tanggal 26 Maret 2025 bahwa PJPK masih membutuhkan waktu untuk evaluasi dokumen dan PPI diminta untuk meyampaikan Salinan Perjanjian Kemitraan dengan PGT dan Usulan Adendum	PJPK, KSOP	2025

No.	Uraian	Tindak Lanjut	PIC	Rencana Tindak Lanjut
3	**Pemenuhan Kewajiban oleh BUP**			
	Target Tanggal Operasi Tahap I-1 (Peti Kemas) pada Tahun 2024 tidak tercapai	Dibutuhkan penyesuaian jadwal dan addendum perjanjian	PPI	2025
	Target Tanggal Penyelesaian Pengadaan Fasilitas Suprastruktur Tahap I-1 (Peti Kemas) Tahun 2024 tidak tercapai	Dibutuhkan penyesuaian jadwal dan addendum perjanjian	PPI	2025
4	**Pemenuhan Kewajiban oleh PJPK**			
	Target Tanggal Penyerahan Aset PJPK Tahap I-2-1 pada Tahun 2024 tidak tercapai	Dibutuhkan penyesuaian jadwal dan addendum perjanjian	PJPK	2025
	Paket 5 ditargetkan selesai pada Oktober 2025			
	Paket 6 ditargetkan selesai pada November 2025 (apabila tidak terdampak efisiensi)			
5	**Ruang lingkup Kerjasama**			
	Terdapat Objek Kerjasama yang telah terbangun dengan dana Loan seperti Gedung Operasional dan Gate	Optimalisasi pemanfaatan dengan skema KSP/Sewa	KSOP, PPI	2025
		Apabila fasilitas tersebut dibutuhkan pada jangka panjang, maka harus ditentukan penempatan lokasi pembangunan.		
		Penyesuaian ruang lingkup berpotensi addendum Perjanjian KPBU		
		Merupakan ruang lingkup audit		

L. Penerapan PSAP 16 Aset Konsesi Jasa

1. Gambaran Umum

a. Sesuai PSAP Nomor 16, aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:
   1) disediakan oleh mitra, yang dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
   2) disediakan oleh pemberi konsesi, yang merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

b. Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:
   1) Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan

2) Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.

c. Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah pusat/pemerintah daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.

d. Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.

e. Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra di mana:

1) mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan

2) mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.

2. Dasar Hukum

a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

c. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (PSAP 16) tentang Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi.

d. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi.

f. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-53/PB/PB.6/2022 Tanggal 9 Desember 2022 Hal Penyampaian Petunjuk Teknis Akuntansi 03: Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi.

g. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-12/PB/PB.6/2023 Tanggal 21 Februari 2023 Hal Petunjuk Teknis Akuntansi 03: Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi (Revisi Kesatu, Februari 2023).

h. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-16/PB.6/2013 Tanggal 22 Februari 2023 Hal Masukan atas Hasil Identifikasi PSAP 16 tentang Konsesi Jasa pada Kementerian Perhubungan Tahun 2022.

3. Ketentuan Pencatatan Aset Konsesi Jasa

a. Perjanjian Konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra di

mana:

1) Mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu, dan
2) Mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.

b. Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang :
   1) Disediakan oleh mitra, yang:
      a) Dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain, atau
      b) Merupakan aset yang dimiliki oleh mitra, atau
   2) Disediakan oleh pemberi konsesi, yang :
      a) Merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi, atau
      b) Merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.
c. Identifikasi fitur utama pada kontrak yang memenuhi karakteristik perjanjian konsesi jasa yang memenuhi PSAP 16 :
   1) Pihak pemerintah bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK).
   2) Swasta/ Badan Usaha/ Mitra bertanggung jawab untuk setidaknya beberapa pengelolaan aset konsesi jasa dan penyediaan jasa pelayanan publik terkait dan tidak hanya bertindak sebagai agen atas nama pemberi konsesi.
   3) Pemerintah mengendalikan atau meregulasi jasa pelayanan publik yang harus diberikan oleh mitra dengan menggunakan aset konsesi jasa, kepada siapa jasa harus diberikan dan tarifnya.
   4) Mitra wajib menyerahkan aset konsesi jasa menjadi barang milik negara kepada PJPK dalam kondisi tertentu dengan perjanjian pada akhir periode perjanjian, baik dengan disertai sedikit atau tanpa pembayaran imbalan tambahan, terlepas dari pihak mana yang awalnya membiayainya.
   5) Ada peraturan mengikat yang menetapkan standar kinerja, mekanisme penyesuaian tarif, dan pengaturan untuk menangani perselisihan.
d. Skema kompensasi dalam perjanjian mengikat atas penyediaan jasa pelayanan public selama masa perjanjian konsesi jasa :
   1) Skema kewajiban keuangan *(Government pay)*
   2) Skema kompensasi pemberian konsesi *(User pay).*
   3) Kombinasi skema kewajiban keuangan *(Government pay)* dan kompensasi pemberian konsesi *(User pay).*

e. Kebijakan teknis perekaman dan penatausahaan awal perolehan aset konsesi jasa yang disediakan oleh pemberi konsesi :
   1) Jika terdapat BMN yang dipartisipasikan sesuai perjanjian konsesi jasa, maka dilakukan reklasifikasi penyajian BMN masing-masing karakteristik/definisi Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan, atau Aset Tak Berwujud dalam pos aset tetap menjadi jenis kelas aset tetap baru berupa aset konsesi jasa di Neraca.
   2) Pelaksanaan Reklasifikasi BMN sebagaimana dimaksud angka 1 tidak mengubah kodefikasi BMN yang digunakan dalam sistem penatausahaan BMN (modul aset tetap di Aplikasi SAKTI) sesuai perolehan awalnya. BMN yang dipartisipasikan dalam perjanjian konsesi jasa tersebut tetap ditatausahakan sebagai masing-masing karakteristik/definisi Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan, atau Aset Tak Berwujud sesuai dengan kodefikasi BMN yang sudah ada dan sesuai perolehan awal BMN-nya.
f. Kebijakan teknis perekaman dan penatausahaan awal perolehan aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra :
   1) Dalam rangka nilai awal perolehan aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra dapat disajikan di Neraca dalam pos Aset Tetap pada klasifikasi Aset Konsesi Jasa, maka teknik penatausahaannya diberikan kodefikasi aset yang terpisah dari kodefikasi BMN. Kodefikasi aset yang terpisah ini sehubungan aset tersebut statusnya belum menjadi BMN dan mempunyai kebijakan masa manfaat aset yang berbeda dengan BMN.
   2) Kebijakan teknis kodefikasi aset yang terpisah untuk penatausahaan dan penyajian aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra sebagaimana angka 1 dicantumkan dalam lampiran KMK Nomor 216/KM.6/2021 tentang Perubahan Kesebelas atas Lampiran PMK Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara, yaitu penetapan kodefikasi ke dalam golongan, bidang, kelompok, sub kelompok, sub sub-kelompok untuk aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra sebagai berikut:
      a) Golongan Aset Lain-Lain (Kode Golongan 9);
      b) Bidang Aset Konsesi Jasa (Kode Bidang 01);
      c) Bidang Aset Konsesi Jasa terdiri dari 2 kelompok yaitu : Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra (Kode Kelompok 01); dan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra Dalam Pengerjaan (Kode Kelompok 02);
      d) Masing-masing kelompok terdiri dari 6 sub kelompok yaitu:

i. rumpun Jalan dan Transportasi (kode sub kelompok 01);
ii. rumpun Telekomunikasi dan Informatika (kode sub kelompok 02);
iii. rumpun Sumber Daya Air, Energi dan Konservasi (kode sub kelompok 03);
iv. rumpun Pengelolaan dan Pengolahan Limbah (kode sub kelompok 04);
v. rumpun Pendidikan, Olah Raga, Seni, Pariwisata dan Kesehatan (kode sub kelompok 05); dan
vi. rumpun Fasilitas Perkotaan, Perumahan, dan Kawasan (kode sub kelompok 06).

4. Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah (KSP dan KPBU)

Berdasarkan Surat Kepala Biro Keuangan Nomor UM.006/31/25 Phb. 2023 Tanggal 11 Oktober 2023 Hal Tindak Lanjut Hasil Rapat Kerja Nasional Akuntansi Tentang Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 16 – Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi, diketahui sebagai berikut:

1) Jika suatu perjanjian memenuhi karakteristik umum perjanjian konsesi jasa sesuai prinsip akuntansi yang diatur dalam PSAP 16 meskipun secara keterbandingan transaksi pihak mitra tidak menerapkan ISAK 16, maka Satker pemberi konsesi memperlakukan transaksi dan akuntansinya dengan berpedoman pada PSAP 16;
2) Apabila perjanjian-perjanjian yang sudah diidentifikasi memenuhi karakteristik perjanjian konsesi jasa, baik perjanjian KPBU maupun perjanjian dalam rangka optimaliasi BMN, agar dilakukan pencatatan pada Laporan Keuangan baik aset hasil investasi mitra maupun aset partisipasian BMN-nya (reklasifikasi) tanpa melihat apakah mitra menerapkan ISAK 16 atau tidak.
3) Kerja Sama Pemanfaatan BMN di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Tahun 2023 dilakukan Reklasifikasi menjadi Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah berdasarkan dengan PSAP 16 – Aset Konsesi Jasa yang memenuhi kriteria dan/atau persyaratan untuk dilakukan pencatatan sebagai Aset Konsesi Jasa.

Nilai Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah Tahun 2024 sebesar Rp1.227.886.393.951,- tercatat pada 8 satker, antara lain:

a. KSOP Probolinggo

Dasar persetujuan kerjasama pemanfaatan BMN pada **KSOP Probolinggo** dari Kementerian Keuangan adalah Surat Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-215/MK.6/2017 tanggal 16 Agustus 2017 perihal Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara Berupa Tanah dan Dermaga pada Kementerian Perhubungan

1) Obyek KSP BMN berupa tanah hasil reklamasi seluas 89.000 m2 dan dermaga seluas 24.161,5 m2 yang terletak di Pelabuhan Tembaga Baru, Jalan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo, Mayangan, Jawa Timur dengan nilai wajar sebesar Rp446.583.876.000,- (empat ratus empat puluh enam miliar lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
2) Mitra KSP adalah PT Delta Artha Bahari Nusantara sebagaimana ditetapkan Pengguna Barang yang merupakan operator Pelabuhan Laut Tanjung Tembaga sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
3) Jangka waktu KSP Barang Milik Negara selama 30 (tiga puluh) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian, dan dapat diperpanjang.
4) Kontribusi kepada negara berupa:
    a) Kontribusi tetap per tahun sebesar 0,50% dari nilai wajar BMN yang menjadi objek KSP dengan kenaikan sebesar 4,55% pertahun dari kontribusi tetap tahun sebelumnya; dan Kontribusi Tetap untuk tahun ketujuh adalah sebesar Rp2.916.199.734,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) sebagai berikut :
        (1) Kontribusi Tetap dari KSP Tahun ke 7 sebesar Rp2.916.199.734,- NTPN: 6776A7QLUG23E6PK Tanggal 10 Agustus 2023.
        (2) Sharing Profit dari Pendapatan Bruto KSP PT. DABN Tahun 2022 sebesar Rp1.847.495.487,- NTPN: ECF6961QUQHLFKBS Tanggal 18 April 2023.
5) Pembayaran kontribusi tetap tahun pertama harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian KSP. Pembayaran kontribusi tetap tahun berikutnya harus dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.
6) Pembayaran pembagian keuntungan hasil pelaksanaan KSP harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya setelah masa operasi, dan dilakukan setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.
7) Dalam hal mitra KSP terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas kontribusi tetap dan/atau pembagian keuntungan KSP pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, mitra KSP wajib membayar denda paling sedikit 3% (tiga persen) per bulan dari jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh Mitra KSP.

8) Nilai Tanah Hasil Reklamasi NUP 1 pada Neraca berbeda dengan Nilai Aset pada Surat Perjanjian KSP. Perbedaan tersebut merupakan akibat dari hasil revaluasi atau penilaian kembali yang dilakukan pada tahun 2019 sesuai BA Reval No. BAR-030/REV/WKN.10/KNL.04/2019. Nilai Aset Tanah Hasil Reklamasi setelah Reval merupakan nilai wajar akhir dengan nilai sebesar Rp101.104.000.000,-. Nilai pada Neraca sebesar Rp101.127.714.000,- merupakan nilai wajar akhir ditambah dengan pengembangan melalui KDP berupa pensertifikatan tanah senilai Rp23.714.000,-.

9) Nilai Dermaga NUP 2 pada Neraca berbeda dengan Nilai Aset pada Surat Perjanjian KSP. Perbedaan tersebut merupakan akibat dari hasil revaluasi atau penilaian kembali yang dilakukan pada tahun 2019 sesuai BA Reval No. BAR-030/REV/WKN.10/KNL.04/2019. Nilai Aset Dermaga setelah Reval merupakan nilai wajar akhir dengan nilai sebesar Rp290.932.962.000,-.

b. KSOP Sintete

Dasar persetujuan kerjasama pemanfaatan BMN pada **KSOP Sintete** dari Kementerian Keuangan adalah Surat Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-06/MK.6/WKN.11/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara Berupa Bangunan Dermaga Pada Kementerian Perhubungan RI c.q. Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Sintete;

a) Obyek KSP BMN berupa bangunan dermaga seluas 280 m^2 terletak di Jl. Pelabuhan No.1 Ds. Sintete, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas, Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai wajar sebesar Rp8.115.306.000,00 (Delapan miliar seratus lima belas juta tiga ratus enam ribu rupiah).

b) Mitra KSP adalah PT. Pelindo II Cabang Pontianak.

c) Jangka waktu KSP Barang Milik Negara selama 15 (lima belas) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang.

d) Kontribusi kepada negara berupa:

a) Kontribusi Kontribusi tetap per tahun sebesar 0,7% dari nilai wajar BMN yang menjadi objek KSP dengan kenaikan sebesar 4,81% per tahun dari kontribusi tetap tahun pertama dan Kontribusi Tetap periode ketujuh adalah sebesar Rp78.100.826,- (Tujuh puluh delapan juta seratus ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pembayaran KSP Tetap tahun 2023 sebesar Rp75.304.212,- NTPN 37C6155DEVMM2GJ7 Tanggal 01 Febuari 2023 .

(2) Denda Sharing Profit Tahun 2022 sebesar Rp2.796.614,- NTPN 5A83D7QLUFJ0VQ3Q

e) Pembagian keuntungan KSP sebesar 43,94% untuk pemerintah dan 56,06% untuk mitra KSP dari net cash flow dari kegiatan operasi dan investasi per tahun dengan asumsi nilai investasi mitra KSP sebesar Rp1.120.020.000 (Satu milyar seratus dua puluh juta dua puluh ribu rupiah). Net cash flow dari kegiatan operasi dan investasi tersebut didasarkan pada Laporan Keuangan yang telah di audit.

f) Pembayaran kontribusi tetap tahun pertama harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian KSP. Pembayaran kontribusi tetap tahun berikutnya harus dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.

g) Pembayaran pembagian keuntungan hasil pelaksanaan KSP harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya setelah masa operasi, dan dilakukan setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.

h) Dalam hal mitra KSP terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas kontribusi tetap dan/atau pembagian keuntungan KSP pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, mitra KSP wajib membayar denda paling sedikit 3% (tiga persen) per bulan dari jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh Mitra KSP.

i) Pada Tahun 2018 Nilai Dermaga NUP 1 di Neraca sudah sesuai dengan Nilai Aset pada Surat Perjanjian KSP yang merupakan hasil koreksi nilai tim penertiban aset sebesar Rp175.374.000,- dan koreksi semu hasil penilaian kembali sebesar (Rp785.268.000,-) sehingga nilai aset pada tahun tersebut sebesar Rp8.115.306.000,-. Namun, pada tahun 2019 terdapat koreksi hasil reval yang mengurangi Nilai Aset pada Neraca sebesar Rp1.689.764.000,- sehingga nilai wajar akhir berkurang menjadi Rp6.425.542.000,- (sesuai dengan Neraca). Dengan demikian, nilai wajar akhir tersebut berbeda dengan Nilai Aset pada Perjanjian KSP.

c. KSOP Labuan Bajo

Dasar persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan BMN Pada **KSOP Labuan Bajo** dari Kementerian Keuangan adalah Surat Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-427/MK.6/2021 Tanggal 30 September 2021 Hal Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur pada

Kementerian Perhubungan c.q. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Labuan Bajo.

1) Objek KSP BMN berupa Aset Pelabuhan Labuan Bajo yang dibiayai APBN dengan nilai wajar sebesar Rp190.624.744.000,- yang terdiri dari:
   a) Dermaga berukuran (120x20) m2;
   b) *Trestle* berukuran (60x12) m2;
   c) *Causeway* berukuran (690x20) m2;
   d) Tanah Hasil Reklamasi atau Tanah Lapangan Penimbunan *(Container Yard)* seluas (100x300) m2.
2) Mitra KSP Adalah PT. Pelabuhan Indonesia
3) Jangka waktu KSP Barang Milik Negara dalam perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 50 (lima puluh) tahun terhitung sejak penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan secara tertulis oleh PT. Pelabuhan Indonesia Kepada UPP Labuan Bajo paling lambat 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian KSP.
4) Kontribusi Kepada Negara berupa :
   a) Kontribusi tetap tahun kedua sebesar Rp181.237.813,- (seratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah) dengan kenaikan sebesar 2,95% per tahun dengan rincian sebagai berikut:
      (1) Kontribusi Tetap dari KSP dengan PT. Pelindo III Cabang Labuan bajo sebesar Rp181.237.813,- NTPN. BF8F22G4VGNC5RTT Tanggal 04 Oktober 2023;
      (2) Pembagian keuntungan KSP minimal sebesar 16,81% berdasarkan Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi dan Kegiatan Investasi dengan margin IRR sebesar 1,50%. Pembagian keuntungan tersebut dilakukan apabila pemanfaatan BMN menghasilkan keuntungan berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
5) Pembayaran Kontribusi Tetap Khusus Tahun Pertama dilakukan paling lambat 2 (dua) hari setelah perjanjian ditandatangani. Pembayaran Kontribusi Tetap tahun berikutnya, dilakukan paling lambat Tanggal 8 November Pada Tahun Berikutnya sampai dengan berakhirnya Perjanjian ini.
6) Pembayaran Pembagian Keuntungan Bagi Hasil dilakukan paling lambat Tanggal 30 April setiap tahunnya sampai dengan berakhirnya perjanjian ini.
7) Dalam hal mitra KSP terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas kontribusi tetap dan/atau

pembagian keuntungan hasil perjanjian pada waktu yang telah ditentukan dalam Waktu Perjanjian maka Mitra KSP wajib membayar denda paling sedikit 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kewajiban yang masih harus dibayar oleh Mitra KSP.

8) Nilai yang tercatat sebagai Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah senilai Rp176.766.708.497,-, yang terdiri dari Dermaga NUP 15 dengan Luas 16.920 dan Nilai Rp139.485.321.038,- dan Tanah Hasil Reklamasi NUP 2 dengan Luas 30.000 dan Nilai Rp37.281.387.459,-.

d. KSOP Badas

Dasar persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan BMN Pada **KSOP Badas** dari Kementerian Keuangan adalah Surat Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-201/MK.6/KN.5/2021 Tanggal 5 Oktober 2021 Hal Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Pada Kementerian Perhubungan c.q. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Badas.

1) Objek KSP BMN berupa Aset KSOP Badas yang dibiayai APBN dengan nilai wajar sebesar Rp91.639.050.000,- yang terdiri dari:
   a) Tanah Hasil Reklamasi seluas 11.750 m2;
   b) Bangunan Gudang Tertutup Permanen seluas 800 m2;
   c) Dermaga seluas 880 m2;
   d) Dermaga seluas 1.400 m2;
   e) Dermaga seluas 185 m2
2) Mitra KSP Adalah PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)
3) Jangka waktu KSP BMN selama 30 (tiga puluh) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang.
4) Kontribusi Kepada Negara berupa:
   a) Kontribusi tetap tahun Kedua sebesar Rp942.782.546,- dengan kenaikan sebesar 2,88% per tahun dengan rincian sebagai berikut :
      (1) Kontribusi Tetap dari KSP dengan PT. Pelindo III Cabang Badas sebesar Rp942.782.546,- NTPN. 13EA11JNFLLG1BBF Tanggal 13 April 2023;
   b) Pembagian keuntungan KSP sebesar 46,55% dari Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi dan Kegiatan Investasi (AKB KOKI) dengan total investasi paling sedikit Rp34.134.106.305,- (Tiga puluh empat miliar seratus tiga puluh empat juta seratus enam ribu tiga ratus lima rupiah). Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi dan Kegiatan Investasi (AKB KOKI) tersebut didasarkan pada Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

5) Pembayaran kontribusi tetap tahun pertama harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian KSP. Pembayaran kontribusi tetap tahun berikutnya harus dilakukan paling lambat sesuai tanggal dan bulan ditandatanganinya perjanjian KSP, yang dimulai pada tahun berikutnya sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.
6) Pembayaran pembagian keuntungan hasil pelaksanaan KSP harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara paling lambat tanggal 30 April Tahun berikutnya setelah masa operasi, dan dilakukan setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.
7) Dalam hal mitra KSP terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas kontribusi tetap dan/atau pembagian keuntungan KSP pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, mitra KSP wajib membayar denda paling sedikit 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh Mitra KSP.
8) Nilai yang tercatat sebagai Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah senilai Rp62.500.133.000,-, yang terdiri dari Tanah Hasil Reklamasi Nup 1, Bangunan Gudang Tertutup Permanen Nup 1, dan Dermaga NUP 1, 2, dan 3.

e. KSOP Bima

Dasar persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan BMN Pada **KSOP Bima** dari Kementerian Keuangan adalah Surat Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-488/MK.6/2021 Tanggal 25 November 2021 Hal Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Pada Kementerian Perhubungan c.q. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bima.

1) Objek KSP BMN berupa Aset KSOP Badas yang dibiayai APBN dengan nilai wajar sebesar Rp116.920.312.000,- yang terdiri dari :
   a) Tanah Lapangan Penimbunan Barang Lainnya seluas 27.539 m2;
   b) Bangunan Terbuka Lainnya seluas 19.316 m2;
   c) Pagar Semi Permanen seluas 1.798 m2;
   d) Jalan Khusus Komplek seluas 4.050 m2;
   e) Jalan Lainnya seluas 800 m2;
   f) Dermaga seluas 2.350 m2;
   g) Dermaga seluas 1.100 m2;
   h) Gedung Pos Jaga Permanen sebanyak 3 NUP ;
   i) Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lainnya sebanyak 1 NUP;
   j) Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya sebanyak 46 NUP.

2) Mitra KSP Adalah PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)
3) Jangka waktu KSP BMN selama 30 (tiga puluh) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang.
4) Kontribusi Kepada Negara berupa :
   a) Kontribusi tetap tahun kedua sebesar Rp776.105.681,- dengan kenaikan sebesar 2,12% per tahun, dengan Kontribusi Tetap dari KSP dengan PT. Pelindo III sebesar Rp776.105.681,- NTPN 5601048VV5REFMCI Tanggal 11 september 2023;
   b) Pembagian keuntungan Bagi Hasil perjanjian ini sebesar 28,81% (dua puluh delapan koma delapan satu Persen) dari pendapatan dengan asumsi nilai investasi Pihak Kedua sebesar Rp26.791.673.692,- Pendapatan tersebut didasarkan pada laporan yang telah diaudit oleh audit independen.
5) Pembayaran kontribusi tetap tahun pertama harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian KSP. Pembayaran kontribusi tetap tahun berikutnya harus dilakukan paling lambat sesuai tanggal dan bulan ditandatanganinya perjanjian KSP, yang dimulai pada tahun berikutnya sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.
6) Pembayaran pembagian keuntungan hasil pelaksanaan KSP harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara paling lambat tanggal 30 April Tahun berikutnya setelah masa operasi, dan dilakukan setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.
7) Dalam hal mitra KSP terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas kontribusi tetap dan/atau pembagian keuntungan KSP pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, mitra KSP wajib membayar denda paling sedikit 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh Mitra KSP.
8) Nilai yang tercatat sebagai Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah senilai Rp95.295.585.001,-.

f. KSOP Waingapu

Dasar persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan BMN Pada **KSOP Waingapu** dari Kementerian Keuangan adalah Surat Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-220/MK.6/KN.5/2021 Tanggal 28 Oktober 2021 Hal Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Pada Kementerian Perhubungan c.q. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Waingapu.

1) Objek KSP BMN berupa Aset KSOP Badas yang dibiayai APBN dengan nilai wajar sebesar Rp228.820.426.000,- yang terdiri dari :
   a) Tanah Hasil Reklamasi seluas 23.510 m2;
   b) Tanah Hasil Reklamasi seluas 10.000 m2;
   c) Bangunan Gudang Tertutup Permanen seluas 540 m2;
   d) Dermaga seluas 2.768 m2;
   e) Dermaga seluas 782 m2;
2) Mitra KSP Adalah PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)
3) Jangka waktu KSP BMN selama 30 (tiga puluh) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang.
4) Kontribusi Kepada Negara berupa:
   a) Kontribusi tetap tahun kedua sebesar Rp583.067.765 dengan kenaikan nilai sebesar 1,93% per tahun dengan Kontribusi Tetap dari KSP dengan PT. Pelindo III Cabang waingapu sebesar Rp583.067.765,- NTPN 06BA58N3EA8LCHRB Tanggal 14 April 2023;
   b) Pembagian keuntungan KSP minimal sebesar 44,29% berdasarkan Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi dan Kegiatan Investasi. Pembagian keuntungan tersebut dilakukan apabila pemanfaatan BMN menghasilkan keuntungan berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
5) Pembayaran kontribusi tetap tahun pertama harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian KSP. Pembayaran kontribusi tetap tahun berikutnya harus dilakukan paling lambat sesuai tanggal dan bulan ditandatanganinya perjanjian KSP, yang dimulai pada tahun berikutnya sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.
6) Pembayaran pembagian keuntungan hasil pelaksanaan KSP harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara paling lambat tanggal 30 April Tahun berikutnya setelah masa operasi, dan dilakukan setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.
7) Dalam hal mitra KSP terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas kontribusi tetap dan/atau pembagian keuntungan KSP pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, mitra KSP wajib membayar denda paling sedikit 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh Mitra KSP.
8) Nilai yang tercatat sebagai Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah senilai Rp99.583.090.600,-.

g. UPP Garongkong

Dasar persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan BMN Pada **UPP Garongkong** dari Kementerian Keuangan adalah Surat Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-588/MK.6/2021 Tanggal 23 Desember 2021 Hal Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Garongkong Kementerian Perhubungan.

1) Objek KSP BMN berupa Aset UPP Garongkong yang dibiayai APBN dengan nilai wajar sebesar Rp313.172.831.000,- yang terdiri dari :
   a) Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 6.335 m2;
   b) Tanah Lapangan Penimbunan Barang Konstruksi Beton seluas 13.840 m2;
   c) Tanah Lapangan Penimbunan Barang Konstruksi Beton seluas 16.180 m2;
   d) Dermaga seluas 7.600 m2;
   e) Bangunan Bengkel/ Hanggar Permanen seluas 450 m2;
   f) Bangunan Gudang Tertutup Permanen seluas 600 m2;
   g) Bangunan Menara/ Bak Penampung/ Reservoir Air Minum seluas 45 m2;
   h) Gedung Pos Jaga Permanen seluas 4 m2;
   i) Gedung Pos Jaga Permanen seluas 16 m2;
   j) Tugu/ Tanda Batas Damija (Daerah Milik Jalan) / Gapura seluas 66 m2;
   k) Pagar Semi Permanen seluas 1.349 m
   l) Bangunan Pembawa Pengaman Pantai seluas 387 m2;
   m) Bangunan Jembatan (Bangunan Pelengkap Pasang Surut) seluas 833 m2;
   n) Truck air sebanyak 1 unit;
   o) Excavator lainnya sebanyak 1 unit;
   p) Forklift sebanyak 1 unit;
   q) Wheel Loader + Attachment sebanyak 1 unit;
   r) Truck Crane sebanyak 1 unit;
   s) Pintu Elektrik (yang memakai akses) sebanyak 1 unit;
   t) Solar Cell sebanyak 82 unit;
2) Mitra KSP Adalah PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)
3) Jangka waktu KSP BMN selama 50 (lima puluh) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang.
4) Kontribusi Kepada Negara berupa :
   a) Kontribusi tetap tahun kedua sebesar Rp2.795.067.517 dengan kenaikan sebesar 5% (lima persen) per tahun, denganKontribusi Tetap dari KSP dengan

PT. Pelindo IV sebesar Rp2.795.067.517,- NTPN 40C8D2G4VG8BQBJ4 Tanggal 28 April 2023;

b) Pembagian keuntungan Bagi Hasil perjanjian ini sebesar 5,25% dari pendapatan dengan asumsi nilai investasi Pihak Kedua sebesar Rp739.837.476.531,- Pendapatan tersebut didasarkan pada laporan yang telah diaudit oleh audit independen.

5) Pembayaran kontribusi tetap tahun pertama harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian KSP. Pembayaran kontribusi tetap tahun berikutnya harus dilakukan paling lambat sesuai tanggal dan bulan ditandatanganinya perjanjian KSP, yang dimulai pada tahun berikutnya sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.
6) Pembayaran pembagian keuntungan hasil pelaksanaan KSP harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara paling lambat tanggal 30 April Tahun berikutnya setelah masa operasi, dan dilakukan setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.
7) Dalam hal mitra KSP terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas kontribusi tetap dan/atau pembagian keuntungan KSP pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, mitra KSP wajib membayar denda paling sedikit 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh Mitra KSP.
8) Nilai yang tercatat sebagai Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 di UPP Garongkong yaitu senilai Rp220.749.497.528,-.

h. KSOP Anggrek

Dasar persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan BMN Pada **KSOP Anggrek** dari Kementerian Keuangan adalah Surat Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-107/MK.6/2021 Tanggal 04 Maret 2021 Hal Persetujuan Kerja Sama Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan c.q. KUPP Kelas II Anggrek.

1) Mitra KSP adalah PT. Anggrek Gorontalo Internasional Terminal (AGIT).
2) Jangka waktu KSP Barang Milik Negara ini diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) Tahun terhitung sejak Tanggal Efektif (“Periode Kerja Sama”) di mana BUP diberi wewenang dan berkewajiban untuk melaksanakan Penyelenggaraan Proyek sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini.
3) Kontribusi Kepada Negara berupa:

a) Bagian Pemerintah atas pembagian kelebihan keuntungan (clawback) sebesar 50% disetorkan oleh Mitra KSPI ke Rekening Kas Umum Negara paling lambat setiap Tanggal 30 April tahun berikutnya.
b) Bagian Pemerintah atas pembagian kelebihan keuntungan (clawback) yang terjadi pada tahun terakhir dalam jangka waktu perjanjian KSPI disetorkan oleh mitra KSPI ke rekening Kas Umum Negara paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian KSPI.

4) Mitra KSPI yang terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan yang telah ditentukan dalam perjanjian wajib membayar denda paling sedikit 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh Mitra KSPI yang bersangkutan.
5) Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PL.404/02/06/KSOP.AGR/2023 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Anggrek Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan bahwa terdapat penghapusan Bangunan Gudang Tertutup Permanen senilai Rp1.350.459.000,-
6) Berdasarkan Surat Kepala KSOP Anggrek Nomor PL.301/03/13/KSOP.AGR/2023 hal Penyampaian Data Aset BMN Objek KPBU Pelabuhan Anggrek Provinsi Gorontalo tanggal 27 September 2023, bahwa Pencatatan atas Kemitraan Dengan Pihak Ketiga telah dilakukan Reklasifikasi menjadi Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah dengan Mitra PT Anggrek Gorontalo International Terminal (AGIT) senilai Rp174.505.161.325.

Rincian Kerja Sama Pemanfaatan yang telah direklasifikasi dan dicatat menjadi Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut T.A. 2024 sebesar Rp1.227.886.393.951,- adalah sebagai berikut:

NO	NAMA SATKER	KODE BARANG	URAIAN BARANG	NUP	KUANTITAS	NILAI
1	KSOP Probolinggo	2010202003	Tanah Hasil Reklamasi	1	89.000	101.127.714.000
2	KSOP Probolinggo	5010211001	Dermaga	2	24.161	290.932.962.000
3	KSOP Sintete	5010211001	Dermaga	1	336	6.425.542.000
4	KSOP Labuhan Bajo	5010211001	Dermaga	15	16.920	139.485.321.038
5	KSOP Labuhan Bajo	2010202003	Tanah Hasil Reklamasi	2	30.000	37.281.387.459
6	KSOP Badas	2010202003	Tanah Hasil Reklamasi	1	11.750	24.606.026.000
7	KSOP Badas	4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	800	1.634.208.000
8	KSOP Badas	5010211001	Dermaga	1	880	12.856.266.000
9	KSOP Badas	5010211001	Dermaga	2	1.400	20.453.150.000
10	KSOP Badas	5010211001	Dermaga	3	185	2.950.483.000
11	KSOP Bima	2010303006	Tanah Lapangan Penimbunan Barang Lainnya	1	36.940	25.581.280.029
12	KSOP Bima	4010125999	Bangunan Terbuka Lainnya	1	21.640	18.090.245.272

NO	NAMA SATKER	KODE BARANG	URAIAN BARANG	NUP	KUANTITAS	NILAI
13	KSOP Bima	4040104002	Pagar Semi Permanen	1	1.798	724.444.000
14	KSOP Bima	5010109002	Jalan Khusus Komplek	1	4.050	706.019.000
15	KSOP Bima	5010199999	Jalan Lainnya	1	800	137.743.000
16	KSOP Bima	5010211001	Dermaga	10	2.350	15.520.707.000
17	KSOP Bima	5010211001	Dermaga	11	1.148	32.658.292.700
18	KSOP Bima	4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	2	7	11.439.000
19	KSOP Bima	4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	3	7	11.439.000
20	KSOP Bima	4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	4	12	19.610.000
21	KSOP Bima	4010113999	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lainnya	2	28	132.366.000
22	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	1	1	37.000.000
23	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	2	1	37.000.000
24	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	3	1	37.000.000
25	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	4	1	37.000.000
26	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	5	1	37.000.000
27	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	6	1	37.000.000
28	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	7	1	37.000.000
29	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	8	1	37.000.000
30	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	9	1	37.000.000
31	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	10	1	37.000.000
32	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	11	1	37.000.000
33	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	12	1	37.000.000
34	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	13	1	37.000.000
35	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	14	1	37.000.000
36	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	15	1	37.000.000
37	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	16	1	37.000.000
38	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	17	1	37.000.000
39	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	18	1	37.000.000
40	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	19	1	37.000.000
41	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	20	1	37.000.000
42	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	21	1	37.000.000
43	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	22	1	37.000.000
44	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	23	1	37.000.000
45	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	24	1	37.000.000

NO	NAMA SATKER	KODE BARANG	URAIAN BARANG	NUP	KUANTITAS	NILAI
46	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	25	1	37.000.000
47	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	26	1	37.000.000
48	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	27	1	37.000.000
49	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	28	1	37.000.000
50	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	29	1	37.000.000
51	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	30	1	37.000.000
52	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	31	1	37.000.000
53	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	32	1	37.000.000
54	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	33	1	37.000.000
55	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	34	1	37.000.000
56	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	35	1	37.000.000
57	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	36	1	37.000.000
58	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	37	1	37.000.000
59	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	38	1	37.000.000
60	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	39	1	37.000.000
61	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	40	1	37.000.000
62	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	41	1	37.000.000
63	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	42	1	37.000.000
64	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	43	1	37.000.000
65	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	44	1	37.000.000
66	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	45	1	37.000.000
67	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	46	1	37.000.000
68	UPP Waingapu	2010202003	Tanah Hasil Reklamasi	1	23.510	25.758.423.000
69	UPP Waingapu	2010202003	Tanah Hasil Reklamasi	2	10.000	11.269.104.000
70	UPP Waingapu	4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	540	1.177.485.000
71	UPP Waingapu	5010211001	Dermaga	5	2.768	50.447.066.600
72	UPP Waingapu	5010211001	Dermaga	6	782	10.931.012.000
73	UPP Garongkong	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	6.335 m2	15.875.510.000
74	UPP Garongkong	2010303007	Tanah Lapangan Penimbunan Barang Konstruksi Beton	1	13.840 m2	34.881.010.000
75	UPP Garongkong	2010303007	Tanah Lapangan Penimbunan Barang Konstruksi Beton	2	16.180 m2	40.935.400.000
76	UPP Garongkong	5010211001	Dermaga	4	7.600 m2	102.416.489.000
77	UPP Garongkong	5010211001	Dermaga	8	0 m2	-

NO	NAMA SATKER	KODE BARANG	URAIAN BARANG	NUP	KUANTITAS	NILAI
78	UPP Garongkong	4010103001	Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen	1	450 m2	2.347.280.000
79	UPP Garongkong	4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	2	600 m2	2.939.835.993
80	UPP Garongkong	5020605008	Bangunan Menara/Bak Penampung/ Reservoir Air Minum	6	45 m2	453.536.169
81	UPP Garongkong	4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	4	4 m2	7.574.000
82	UPP Garongkong	4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	6	16 m2	208.927.226
83	UPP Garongkong	4040101010	Tugu/Tanda Batas Damija (Daerah Milik Jalan) /Gapura	1	66 m2	120.506.000
84	UPP Garongkong	4010104002	Pagar Semi Permanen	1	1.349 m	979.953.000
85	UPP Garongkong	5020403002	Bangunan Pembawa Pengaman Pantai	3	387 m2	194.917.000
86	UPP Garongkong	5020403002	Bangunan Jembatan (Bangunan Pelengkap Pasang Surut)	1	833 m2	237.474.000
87	UPP Garongkong	3020301006	Truck Air	2	1 Unit	644.050.000
88	UPP Garongkong	3010103999	Excavator Lainnya	1	1 Unit	2.138.429.700
89	UPP Garongkong	3010110005	Forklift	1	1 Unit	952.640.920
90	UPP Garongkong	3010109002	Wheel Loader + Attachment	1	1 Unit	2.301.971.540
91	UPP Garongkong	3010109002	Truck Crane	1	1 Unit	9.528.948.880
92	UPP Garongkong	3050105057	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	1	1 Unit	63.800.000
93	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	1	1 Unit	37.879.600
94	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	2	1 Unit	37.879.600
95	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	3	1 Unit	37.879.600
96	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	4	1 Unit	37.879.600
97	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	5	1 Unit	37.879.600
98	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	6	1 Unit	37.879.600
99	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	7	1 Unit	37.879.600
100	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	8	1 Unit	37.879.600
101	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	9	1 Unit	37.879.600
102	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	10	1 Unit	37.879.600
103	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	11	1 Unit	38.500.000
104	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	12	1 Unit	38.500.000
105	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	13	1 Unit	38.500.000
106	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	14	1 Unit	38.500.000
107	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	15	1 Unit	38.500.000
108	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	16	1 Unit	44.042.350
109	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	17	1 Unit	44.042.350
110	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	18	1 Unit	44.042.350
111	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	19	1 Unit	44.042.350
112	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	20	1 Unit	44.042.350
113	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	21	1 Unit	44.042.350
114	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	22	1 Unit	44.042.350
115	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	23	1 Unit	44.042.350
116	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	24	1 Unit	44.042.350
117	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	25	1 Unit	44.042.350
118	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	26	1 Unit	44.042.350
119	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	27	1 Unit	44.042.350
120	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	28	1 Unit	44.042.350
121	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	29	1 Unit	44.042.350
122	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	30	1 Unit	44.042.350
123	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	31	1 Unit	44.042.350
124	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	32	1 Unit	44.042.350
125	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	33	1 Unit	44.042.350
126	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	34	1 Unit	44.042.350

NO	NAMA SATKER	KODE BARANG	URAIAN BARANG	NUP	KUANTITAS	NILAI
127	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	35	1 Unit	44.042.350
128	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	36	1 Unit	44.042.350
129	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	37	1 Unit	44.042.350
130	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	38	1 Unit	44.042.350
131	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	39	1 Unit	44.042.350
132	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	40	1 Unit	44.042.350
133	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	41	1 Unit	44.042.350
134	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	42	1 Unit	44.042.350
135	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	43	1 Unit	44.042.350
136	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	44	1 Unit	44.042.350
137	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	45	1 Unit	44.042.350
138	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	46	1 Unit	44.042.350
139	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	47	1 Unit	44.042.350
140	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	48	1 Unit	44.042.350
141	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	49	1 Unit	44.042.350
142	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	50	1 Unit	44.042.350
143	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	51	1 Unit	44.042.350
144	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	52	1 Unit	44.042.350
145	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	53	1 Unit	44.042.350
146	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	54	1 Unit	44.042.350
147	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	55	1 Unit	44.042.350
148	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	56	1 Unit	44.042.350
149	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	57	1 Unit	44.042.350
150	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	58	1 Unit	44.042.350
151	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	59	1 Unit	44.042.350
152	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	60	1 Unit	44.042.350
153	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	61	1 Unit	44.042.350
154	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	103	1 Unit	44.000.000
155	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	104	1 Unit	44.000.000
156	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	105	1 Unit	44.000.000
157	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	106	1 Unit	44.000.000
158	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	107	1 Unit	44.000.000
159	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	108	1 Unit	44.000.000
160	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	109	1 Unit	44.000.000
161	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	110	1 Unit	44.000.000
162	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	111	1 Unit	44.000.000
163	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	112	1 Unit	44.000.000
164	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	113	1 Unit	44.000.000
165	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	114	1 Unit	44.000.000
166	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	115	1 Unit	44.000.000
167	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	116	1 Unit	44.000.000
168	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	117	1 Unit	44.000.000
169	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	118	1 Unit	44.000.000
170	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	119	1 Unit	44.000.000
171	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	120	1 Unit	44.000.000
172	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	121	1 Unit	44.000.000
173	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	122	1 Unit	44.000.000
174	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	123	1 Unit	44.000.000
175	KSOP Anggrek	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	184.392	14.968.021.000
176	KSOP Anggrek	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	160	267.412.000
177	KSOP Anggrek	4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	1	9	13.566.000
178	KSOP Anggrek	4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	2	25	187.986.553
179	KSOP Anggrek	4010118001	Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/Bandara Permanen	1	480	802.237.000

NO	NAMA SATKER	KODE BARANG	URAIAN BARANG	NUP	KUANTITAS	NILAI
180	KSOP Anggrek	4010130999	Bangunan Lainnya	1	45	68.586.000
181	KSOP Anggrek	4010133001	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1	16.912	33.872.597.908
182	KSOP Anggrek	4010133999	Bangunan Parkir Lainnya	1	3.052	2.324.358.000
183	KSOP Anggrek	4010133999	Bangunan Parkir Lainnya	2	4.072	559.649.000
184	KSOP Anggrek	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	1	75	94.684.000
185	KSOP Anggrek	4040104001	Pagar Permanen	1	1	80.630.000
186	KSOP Anggrek	5010211001	Dermaga	1	8.563	120.282.586.864
187	KSOP Anggrek	5020405005	Chekdam/Penahan Sedimen	1	12	481.583.000
188	KSOP Anggrek	5020405005	Chekdam/Penahan Sedimen	2	358	441.424.000
189	KSOP Anggrek	5020605008	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum	1	21	45.488.000
190	KSOP Anggrek	5020703001	Saluran Pembuang Air Buangan Air Hujan	1	132	14.352.000
TOTAL						**1.227.886.393.951**

5. Identifikasi Perjanjian Ditjen Perhubungan Laut – Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra

a. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berdasarkan Surat Undangan Nomor KU.204/1/20/DJPL/2023 Tanggal 27 Maret 2023 Hal Undangan dan Surat Undangan Nomor KU.204/1/21/DJPL 2023 Tanggal 27 Maret 2023 Hal Undangan telah melaksanakan kegiatan penandatanganan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa yang dihadiri oleh:

1) Biro Keuangan Kementerian Perhubungan;
2) Biro LPPBMN Kementerian Perhubungan;
3) Direktorat Kepelabuhanan;
4) Bagian Keuangan Setditjen Perhubungan Laut;
5) PT. Pelabuhan Indonesia (Persero);
6) PT. Delta Artha Bahari Nusantara;
7) PT. Berlian Manyar Sejahtera (anak perusahaan Pelindo);
8) PT. Pelabuhan Tegar Indonesia;
9) KSOPU Belawan;
10) KSOPU Tanjung Priok;
11) KSOPU Makassar;
12) KSOPU Tanjung Perak;
13) KSOP Kelas III Kuala Tanjung;
14) KSOP Kelas II Pontianak;
15) KSOP Kelas II Gresik;
16) KSOP Kelas II Kendari;
17) KSOP Kelas IV Probolinggo;
18) KSOP Kelas IV Marunda;

Pihak pertama Satuan Kerja dan Pihak Kedua Mitra telah menyetujui dan diketahui oleh pihak-pihak lainnya terkait nilai realisasi investasi oleh Mitra Per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No	Satker	Mitra	Nilai Investasi s.d. 31 Desember 2022	Kategori Realisasi Investasi		
				Aset Tanah	Aset Non Tanah	Realisasi Non Aset
1	2	3	4	5	6	7
1	KSOPU Belawan	PT Pelindo Reg I - Terminal Petikemas Belawan Fase II	3.013.270.399.818	613.157.129.577	2.294.985.866.594	105.127.403.647
2	KSOP Kuala Tanjung	PT Pelindo Reg I - Terminal Curah Cair Kuala Tanjung	3.527.583.259.485	-	3.527.583.259.485	-
3	KSOPU Tanjung Priok	PT Pelindo Reg II - Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok	8.190.159.988.185	1.614.186.026.341	5.592.210.060.678	983.763.901.166
4	KSOP Pontianak	PT Pelindo Reg II - Terminal Kijing	3.275.788.931.913	-	3.275.788.931.913	-
5	KSOPU Tanjung Perak	PT PelindoReg III - Terminal Multi Purpose Teluk Lamong	4.682.286.098.287	182.961.972.044	4.277.550.651.976	221.773.474.267
6	KSOPU Tanjung Perak	PT Pelindo Reg III - Alur Pelayaran Barat Surabaya – APBS	961.504.383.377	-	8.909.600.000	952.594.783.377
7	KSOP Gresik	PT Berlian Manyar Sejahtera - Terminal Manyar Gresik	1.157.923.852.821	427.158.683.000	730.765.169.821	-
8	KSOPU Makassar	PT Pelindo Reg IV - Terminal Makassar Newport	2.560.771.881.005	760.416.879.585	1.800.355.001.420	-
9	KSOP Kendari	PT Pelindo - Kendari Newport	821.213.850.082	64.638.320.953	756.575.529.129	-
10	KSOP Probolinggo	PT. Delta Artha Bahari Nusantara	266.653.283.000	200.025.400.000	66.627.883.000	-
11	KSOP Marunda	PT. Pelabuhan Tegar Indonesia	858.863.212.572	79.527.630.000	757.997.202.940	21.338.379.632
			29.316.019.140.545	**3.942.072.041.500**	**23.089.349.156.956**	**2.284.597.942.089**

b. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, sesuai Undangan Nomor KU.204/3/16 Phb 2023 Tanggal 14 April 2023 telah menghadiri kegiatan Pembahasan asersi final angka Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2022 *(audited)* dan bersama-sama dengan Biro Keuangan Kementerian Perhubungan, Direktorat APK Kementerian Keuangan dan BPK Pemeriksa Kementerian Perhubungan telah menyetujui pencatatan Aset Konsesi Jasa sesuai dengan total realisasi investasi yang dilaporkan oleh mitra senilai Rp29.316.019.140.545,- pada Neraca Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per 31 Desember 2022 (*audited)*.

c. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Surat Nomor KU.204/2/3/DJPL/2023 Tanggal 4 Mei 2023 Hal Permintaan Laporan Keuangan dan Laporan Realisasi Investasi atas 17 Perjanjian Konsesi telah meminta kepada satuan kerja untuk meminta data kepada mitra yang memenuhi karakteristik perjanjian konsesi jasa namun pihak mitra belum menerapkan ISAK 16 sehingga Direktorat Jenderal Perhubungan Laut belum dapat menyajikan aset konsesi jasa atas 17 perjanjian konsesi tersebut.

d. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-446/MK.6/2023 Tanggal Juli 2023 Hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 bahwa terdapat 17 perjanjian konsesi jasa yang belum didukung dengan nilai yang dapat dijadikan dasar penyajian Aset Konsesi Jasa. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menindaklanjuti temuan tersebut dengan hasil sebagai berikut:

No	Kode Satker	Nama Satker	Nama Mitra	BA Rekonsiliasi Per 30 Juni 2023	Rincian Aset Konsesi Jasa		
					Tanah	Non Tanah	Dalam Pengerjaan
1	287228	KSOP Kelas I Balikpapan	PT Pelabuhan Penajam Banua Taka	187.906.334.674	35.327.615.439	152.578.719.235	-
2	287228	KSOP Kelas I Balikpapan	PT Lestari Samudra SAKTI	214.227.424.919	168.264.000.000	45.963.424.919	-
3	287171	KSOP Kelas I Banjarmasin	PT Indonesia Multi Purpose Terminal (IMPT)	24.542.000.000	-	24.542.000.000	-
4	287171	KSOP Kelas I Banjarmasin	PT Ambang Barito Nusapersada	135.000.000	135.000.000	-	-
5	413670	KSOP Kelas I Banten	PT Bandar Bakau Jaya	358.064.703.645	57.314.590.233	300.750.113.412	-
6	413670	KSOP Kelas I Banten	PT Krakatau Bandar Samudera	1.252.094.705.000	249.287.461.000	1.002.807.244.000	-
7	413670	KSOP Kelas I Banten	PT Batu Alam Makmur	88.777.210.287	53.003.107.500	35.774.102.787	-
8	412905	KSOP Kelas II Gresik	Terminal Siam Maspion	455.984.600.000	31.836.000.000	424.148.600.000	-
9	287185	Kantor KSOP Kelas III Kotabaru-Batulicin	PT Pelabuhan Swangi Indah	31.205.786.666	468.370.000	30.737.416.666	-
10	652517	KSOP Kelas IV Marunda	PT. Karya Citra Nusantara (KCN)	1.922.750.442.152	1.487.320.000.000	435.430.442.152	-
11	413313	KSOP Kelas II Pontianak	PT. Indo Container Sarana (ICS)	215.342.651.860	68.067.700.000	147.274.951.860	-
12	287211	KSOP Kelas II Samarinda	PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara (PT. PTB)	6.800.854.208	200.000.000	6.600.854.208	-
13	287211	KSOP Kelas II Samarinda	PT. Sarana Abadi Lestari (SAL)	150.529.543.668	97.897.260.000	52.632.283.667	-
14	413180	KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun	PT Asinusa Putra Sekawan	3.075.195.737	-	2.290.196.326	784.999.411
15	559285	UPP Kelas II Rangga Ilung	PT Bangun Nusantara Jaya Makmur Perkasa	55.312.416.432	17.244.990.000	38.067.426.432	-
16	521395	UPP Kelas III Brondong (Tanjung Pakis)	PT. Lamongan Intergrated Shorebase (LIS)	329.008.525.787	11.944.372.875	278.963.349.509	38.100.803.403

No	Kode Satker	Nama Satker	Nama Mitra	BA Rekonsiliasi Per 30 Juni 2023	Rincian Aset Konsesi Jasa		
					Tanah	Non Tanah	Dalam Pengerjaan
17	559292	UPP Kelas III Satui	PT. Bina Indo Raya (PT. BIR)	233.280.754.150	1.894.414.000	231.386.340.150	-
				5.529.038.149.185	**2.280.204.881.047**	**3.209.947.465.323**	**38.885.802.814**

e. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, sesuai Surat Nomor KU.204/3/10/DJPL/2023 Tanggal 29 September 2023 Hal Undangan telah melaksanakan kegiatan Tindak Lanjut Pencatatan dan Reklasifikasi Aset Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mencatat Aset Konsesi Jasa pada 17 perjanjian konsesi non eksisting sesuai dengan temuan LKPP dan melakukan update terhadap penambahan realisasi investasi atas aset konsesi jasa yang sudah tercatat.

f. Berdasarkan Surat Kepala Biro Keuangan Nomor UM.006/31/25 Phb 2023 Tanggal 11 Oktober 2023 tentang Tindak Lanjut Hasil Rapat Kerja Nasional Akuntansi Tentang Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 16 – Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi dapat diinformasikan bahwa jika suatu perjanjian memenuhi karakteristik umum perjanjian konsesi jasa sesuai prinsip akuntansi yang diatur dalam PSAP 16, meskipun secara keterbandingan transaksi pihak mitra tidak menerapkan ISAK 16, maka Satker pemberi konsesi memperlakukan transaksi dan akuntansinya dengan berpedoman kepada PSAP 16.

g. Berdasarkan Surat Kepala Biro Keuangan Nomor KU.204/9/17 Phb 2023 Tanggal 28 Desember 2023 tentang Tindak Lanjut Hasil Diskusi Implementasi Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 16 di Lingkungan Kementerian Perhubungan menginstruksikan bahwa baik perjanjian KPBU maupun perjanjian dalam rangka optimalisasi BMN agar dilakukan pencatatan pada Laporan Keuangan baik aset hasil investasi mitra maupun aset partisipasian BMN-nya (reklasifikasi) tanpa melihat apakah mitra menerapkan ISAK 16 atau tidak. Dasar pencatatan nilai progres investasi mitra dapat berupa laporan keuangan Mitra yang didukung juga dengan berita acara yang disepakati para pihak terkait. Atas Dasar ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melakukan pencatatan aset konsesi jasa partisipasi mitra dan aset konsesi jasa partisipasi pemerintah pada perjanjian KSP di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

h. Nilai Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra dan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra Dalam Pengerjaan Ditjen Perhubungan Laut T.A. 2024 masing-masing sebesar Rp40.380.959.689.831,- dan Rp792.859.812.882,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Satker	Nama Satker	Nilai Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	Nilai Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra Dalam Pengerjaan	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	Kewajiban Konsesi Jasa Skema Pemberian Hak Usaha Kepada Mitra	Pendapatan Penyesuaian Konsesi Jasa
1	559285	KSOP RANGGA ILUNG	75.253.624.917	-	(8.174.055.059)	(64.205.404.858)	(5.114.424.235)
2	521899	UPP WEDA	198.323.450.000	-	(2.520.939.079)	(195.713.930.921)	(2.609.519.079)
3	413670	KSOP BANTEN	1.698.936.618.932	-	(121.897.394.956)	(1.544.312.582.179)	(27.497.399.992)
4	287171	KSOP BANJARMASIN	31.595.157.960	309.425.275	(2.271.409.249)	(29.616.298.987)	(784.979.200)
5	287185	KSOP KOTABARU-BATULICIN	43.433.726.770	-	(7.485.126.904)	(35.841.654.116)	(2.302.740.985)
6	559292	KSOP SATUI	247.647.158.527	4.485.883.050	(27.226.732.988)	(232.649.879.952)	(9.946.918.920)
7	521836	KSOP GARONGKONG	14.972.238.764	-	(420.222.968)	(14.552.015.797)	(281.815.143)
8	413439	KSOP UTAMA MAKASAR	5.033.955.543.094	-	(164.786.957.477)	(4.816.524.340.108)	(79.611.972.564)
9	413080	KSOP KUALA TANJUNG	3.527.583.259.475	-	(323.137.397.816)	(3.254.127.192.847)	(54.691.213.326)
10	413417	KSOP UTAMA BELAWAN	3.041.739.078.034	-	(192.284.836.149)	(2.823.303.917.140)	(46.679.280.186)
11	413240	KSOP TALANG DUKUH	70.140.000.000	-	-	(70.140.000.000)	-
12	412905	KSOP GRESIK	2.337.888.036.407	-	(129.770.172.922)	(2.173.167.713.513)	(36.255.465.626)
13	412920	KSOP PROBOLINGGO	271.100.101.182	-	(8.337.092.935)	(244.714.786.938)	(4.460.229.912)
14	521395	KSOP TANJUNG PAKIS	606.560.586.932	788.064.504.557	(259.007.792.775)	(1.372.990.292.493)	(6.737.064.876)
15	413428	KSOP UTAMA TANJUNG PERAK	5.885.768.723.058	-	(854.858.091.577)	(5.031.356.625.452)	(112.600.710.887)
16	287228	KSOP BALIKPAPAN	1.206.976.027.605	-	(59.939.812.460)	(1.138.572.413.506)	(33.892.283.351)
17	287211	KSOP SAMARINDA	160.525.397.876	-	(8.213.296.239)	(143.352.559.140)	(4.502.630.723)
18	287651	KSOP BADAS	796.525.380	-	(78.813.108)	(718.178.622)	(26.115.586)
19	287647	KSOP BIMA	700.000.000	-	(36.206.898)	(663.793.102)	(24.137.932)
20	559552	KSOP LABUHAN BAJO	185.189.616.274	-	(7.328.881.370)	(172.267.318.491)	(3.704.673.516)
21	287715	KSOP WAINGAPU	3.165.405.000	-	(113.050.178)	(3.108.879.911)	(56.525.089)
22	413092	KSOP DUMAI	64.228.858.644	-	-	(63.311.303.521)	(917.555.123)
23	652517	KSOP MARUNDA	2.784.542.347.224	-	(150.055.665.772)	(2.577.905.703.376)	(42.821.926.220)
24	413422	KSOP UTAMA TANJUNG PRIOK	8.763.847.980.397	-	(631.034.430.385)	(8.015.979.955.459)	(139.408.347.051)
25	652563	KSOP ANGGREK	17.573.650.000	-	(947.875.227)	(16.933.659.491)	(479.746.759)
26	413313	KSOP PONTIANAK	3.499.969.397.889	-	(164.118.126.811)	(3.353.310.723.720)	(54.110.016.650)
27	413322	KSOP SINTETE	1.121.229.857	-	(525.576.496)	(600.658.853)	(80.087.846)
28	413180	KSOP TANJUNG BALAI KARIMUN	4.366.021.165	-	(291.779.882)	(4.100.802.931)	(156.192.377)
29	287502	KSOP KENDARI	821.213.850.082	-	(27.815.276.805)	(791.022.164.417)	(12.076.674.266)
TOTAL			**40.599.113.611.445**	**792.859.812.882**	**(3.152.677.014.485)**	**(38.185.064.749.841)**	**(681.830.647.420)**

6. Ringkasan Perjanjian Konsesi Non Eksisting di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

a. Konsesi Non Eksisting

1) Kantor KSOP Utama Tanjung Priok

a) Perjanjian Konsesi KSOP Utama Tanjung Priok dengan Mitra Pelindo Reg II Nomor Perjanjian HK.566/15/11/PI.11-12 Tanggal 31 Agustus 2012 tentang Perjanjian Konsesi antara Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero). Jangka waktu konsesi selama 70 Tahun dimulai dari Tahun

2012 hingga 2072. Aset yang dikonsesikan berupa Area Terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh Pelindo Reg II. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 2,75%. Total nilai rencana investasi Pada perjanjian senilai Rp14.885.600.000.000,- (Nilai total investasi berdasarkan lampiran financial (USD 1.618 juta x 9.200 - kurs saat itu)).

- Laporan Realisasi Investasi:
  (1) Kantor KSOPU Tanjung Priok telah bersurat Kepada Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) sesuai surat Nomor UM.006/49/2/OP.TPK-22 tanggal 16 Desember 2022 perihal Permintaan Data Investasi.
  (2) PT. Pelindo melalui Surat Nomor KU.02.08/6/3/1/ASTP/KUMR/PLND-23 Tanggal 6 Maret 2023 Perihal Rincian Realisasi Investasi atas Perjanjian Konsesi PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) melaporkan hasil realisasi investasi senilai Rp8.508.141.059.876,-.
  (3) Berdasarkan BA Kesepakatan No. BA-DJPL 212 Tahun 2023 antara KSOPU Tanjung Priok dan PT. Pelindo Persero disepakati bahwa nilai realisasi investasi oleh PT. Pelindo per 31 Desember 2022 senilai Rp8.190.159.988.185,-.
  (4) Aset konsesi jasa partisipasi pemerintah dari OP Utama Tanjung Priok telah dilikuidasi ke Satker KSOP Utama Tanjung Priok Sesuai BA Serah Terima Aset Nomor BA.OPTPK 94 Tahun 2023 dengan total nilai Rp8.700.079.634.938,-.
  (5) PT. Pelindo melalui Surat Nomor KU.02.08/19/1/1/ASTP/KUMR/PLND-24 Tanggal 19 Januari 2024 Perihal Realisasi Investasi PT Pelabuhan Indonesia di Terminal Kalibaru periode 31 Desember 2023 PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) melaporkan hasil realisasi investasi senilai Rp8.724.822.782.406,-.
  (6) Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Aset Konsesi Jasa atas Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kalibaru di Pelabuhan Tanjung Priok oleh PT. Pelindo (Persero) Nomor BA.KSOP.TPK 53 Tahun 2024 tanggal 06 Agustus 2024 disepakati bahwa nilai realisasi investasi sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp8.763.847.980.397,-.

2) Kantor KSOP Utama Tanjung Perak

a) Perjanjian Konsesi KSOPU Tanjung Perak dengan Mitra Pelindo III Nomor Perjanjian HK.107/01/06/OP.Tpr-15 Tanggal 19 Mei 2015 tentang Perjanjian Konsesi antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan PT. Pelabuhan Indonesia

Reg III (Persero) tentang Pengusahaan Terminal Multipurpose Teluk Lamong di Surabaya. Jangka waktu konsesi selama 72 Tahun dimulai dari tahun 2015 hingga 2087. Aset yang dikonsikan berupa Area Terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh Pelindo III. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 2,50%. Total nilai rencana investasi Pada perjanjian senilai Rp23.368.361.000.000,-.

- Laporan Realisasi Investasi:
  (1) PT. Pelindo melalui Surat Nomor KU.02.08/6/3/1/ASTP/KUMR/PLND-23 Tanggal 6 Maret 2023 Perihal Rincian Realisasi Investasi atas Perjanjian Konsesi PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) melaporkan hasil realisasi investasi senilai Rp4.682.286.098.287,-.
  (2) Berdasarkan BA Kesepakatan No. BA-DJPL 214 Tahun 2023 antara KSOPU Tanjung Perak dan PT. Pelindo Persero disepakati bahwa nilai realisasi investasi oleh PT. Pelindo per 31 Desember 2022 senilai Rp4.682.286.098.287,-.
  (3) Aset konsesi jasa partisipasi pemerintah dari OP Utama Tanjung Perak telah dilikuidasi ke Satker KSOP Utama Tanjung Priok Sesuai BA Likuidasi Nomor. BA-KSOPU.TPr 53 Tahun 2023 dengan total nilai Rp5.643.790.481.664,-.
  (4) PT. Pelindo melalui Surat Nomor KU.02.08/15/1/1/ASTP/KUMR/PLND-24 Tanggal 15 Januari 2024 Perihal Laporan Realisasi Investasi Aset Konsesi Jasa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk Posisi s.d. 31 Desember 2023 PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) melaporkan hasil realisasi investasi senilai Rp4.892.180.233.182,-.
  (5) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa atas Penggunaan Terminal Multipurpose Teluk Lamong di Surabaya oleh PT. Pelindo (Persero) Nomor BA-KSOPU.TPr 206 Tahun 2024 tanggal 01 Juli 2024 antara KSOP Utama Tanjung Perak dan PT. Pelindo (Persero) disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp4.924.264.339.681,-.
  (6) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi atas Realisasi Investasi Dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa Nomor BA-KSOPU.Tpr 26 Tahun 2025 Tanggal 15 Januari 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp4.924.264.339.681,-.

b) Perjanjian Konsesi KSOPU Tanjung Perak dengan Mitra Pelindo III Nomor Perjanjian HK.107/01/05/OP.Tpr-14 Tanggal 8 Mei 2014 tentang Perjanjian Konsesi Antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan PT. Pelabuhan Indonesia Reg III (Persero) tentang Penyediaan dan Pelayanan Jasa Penggunaan APBS. Jangka waktu konsesi selama 25 Tahun dimulai dari Tahun 2014 hingga 2039. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh Pelindo III. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 3,50%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp1.926.071.503.612,-

- Laporan Realisasi Investasi:
  (1) PT. Pelindo melalui Surat Nomor KU.02.08/6/3/1/ASTP/KUMR/PLND-23 Tanggal 6 Maret 2023 Perihal Rincian Realisasi Investasi atas Perjanjian Konsesi PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) melaporkan hasil realisasi investasi senilai Rp1.012.862.309.953,-.
  (2) Berdasarkan BA Kesepakatan No. BA-DJPL 215 Tahun 2023 antara KSOPU Tanjung Perak dan PT. Pelindo Persero disepakati bahwa nilai realisasi investasi oleh PT. Pelindo per 31 Desember 2022 senilai Rp961.504.383.377.
  (3) Aset konsesi jasa partisipasi pemerintah dari OP Utama Tanjung Perak telah dilikuidasi ke Satker KSOP Utama Tanjung Priok Sesuai BA Likuidasi Nomor. BA-KSOPU.TPr 53 Tahun 2023 dengan total nilai Rp5.643.790.481.664,-.
  (4) PT. Pelindo melalui Surat Nomor KU.02.08/15/1/1/ASTP/KUMR/PLND-24 Tanggal 15 Januari 2024 Perihal Laporan Realisasi Investasi Aset Konsesi Jasa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk Posisi s.d. 31 Desember 2023. PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) melaporkan hasil realisasi investasi senilai Rp961.504.383.377,-
  (5) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa atas Penyediaan dan Pelayanan Jasa Penggunaan APBS oleh PT. Pelindo (Persero) Nomor BA-KSOPU.TPr 207 Tahun 2024 tanggal 01 Juli 2024 antara KSOP Utama Tanjung Perak dan PT. Pelindo (Persero) disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp961.504.383.377,-.
- Addendum Perjanjian:
  (1) Terdapat addendum perjanjian sesuai dengan Addendum Nomor HK.201/3/8/OP.TPr/2021 Pada Tanggal 8 Maret 2021. Isi perjanjian mengubah tentang:

(a) Pasal 1 angka 3, angka 11, angka 12, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, dan angka 19 tentang dasar hukum;
(b) Pasal 2 angka 9 tentang Definisi;
(c) Pasal 5 tentang Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama;
(d) Pasal 12 tentang Pengembalian Aset;
(e) Pasal 18 tentang Tarif Jasa Penggunaan APBS;
(f) Pasal 19 tentang Penyesuaian Tarif Jasa Penggunaan APBS;
(g) Pasal 20 tentang Hasil Konsesi dan dan Tata Cara Pembayaran;
(h) Pasal 23 Ayat (2) tentang Pelaporan.

(2) Tidak terdapat perubahan (Penambahan/ Pengurangan) jangka waktu pelaksanaan perjanjian pada addendum.

3) Kantor KSOP Utama Makassar

a) Perjanjian Konsesi KSOPU Makassar dengan Mitra Pelindo Reg IV Nomor Perjanjian HK.107/02/01/OP.Mks-15 Tanggal 19 Mei 2015 tentang Perjanjian Konsesi Antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) tentang Pengusahaan Terminal Petikemas *Makassar New Port* Tahap I di Pelabuhan Makassar. Jangka waktu konsesi selama 70 Tahun dimulai dari Tahun 2015 hingga 2085. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh Pelindo Reg IV. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 2,50%.

- Laporan Realisasi Investasi:

1) PT. Pelindo melalui Surat Nomor KU.02.08/6/3/1/ASTP/KUMR/PLND-23 Tanggal 6 Maret 2023 Perihal Rincian Realisasi Investasi atas Perjanjian Konsesi PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) melaporkan hasil realisasi investasi senilai Rp2.560.771.881.005,-.
2) Berdasarkan BA Kesepakatan No. BA-DJPL 217 Tahun 2023 antara OP Utama Makassar dan PT. Pelindo Persero disepakati bahwa nilai realisasi investasi oleh PT. Pelindo per 31 Desember 2022 senilai Rp2.560.771.881.005,-.
3) Aset konsesi jasa partisipasi pemerintah dari OP Utama Makassar telah dilikuidasi ke Satker KSOP Utama Makassar Sesuai BA Likuidasi Nomor PL.30{/25/05/OP.MKS-23 dengan total nilai Rp2.560.771.881.005,-
4) PT. Pelindo melalui Surat Nomor KU.02.08/15/1/1/ASTP/KUMR/PLND-24 Tanggal 15 Januari 2024 Perihal Laporan Realisasi Investasi Aset Konsesi

Jasa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk Posisi s.d. 31 Desember 2023 PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) melaporkan hasil realisasi investasi senilai Rp2.560.771.881.005,-.

5) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa atas Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan yang Diusahakan oleh PT. Pelindo (Persero) di Terminal Makassar New Port Nomor BA-KSOPU.MKS 85 Tahun 2024 tanggal 01 Juli 2024 antara KSOP Utama Makassar dan PT. Pelindo (Persero) disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp5.033.955.543.094,-.

- Addendum Perjanjian:

  Terdapat addendum perjanjian sesuai dengan Addendum Nomor HK.107/02/01/OP.MKS.15 Pada Tanggal 29 Januari 2024. Isi perjanjian mengubah objek konsesi sehingga terdapat penambahan objek konsesi sebagai berikut:

  1) Objek perjanjian konsesi meliputi:
     (a) Area Konsesi;
     (b) Aset yang terdapat dalam Area Konsesi terdiri dari Aset Bergerak dan Aset Tidak Bergerak
  2) Area konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Adendum II perjanjian Konsesi in idengan peta layout yang dilengkapi dengan titik koordinat sebagaimana tercantum pada Lampiran I Addendum II Perjanjian konsesi.
  3) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adendum II perjanjian konsesi ini selanjutnya secara rinci dituangkan pada Lampiran II Adendum II Perjanjian Konsesi ini.

4) Kantor KSOP Utama Belawan

a) Perjanjian Konsesi KSOPU Belawan dengan Mitra Pelindo I Nomor Perjanjian PR.801/1/9/OP.BLW-14 Tanggal 04 April 2014 tentang Perjanjian Konsesi Pengusahaan Terminal Petikemas Belawan Fase 2 Pelabuhan Utama Belawan Antara Kantor KSOPU Belawan dan PT Pelabuhan Indonesia Reg I (Persero). Jangka waktu konsesi selama 70 Tahun dimulai dari Tahun 2014 hingga 2084. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh Pelindo I. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 0,50%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp2.293.536.399.165,-

- Laporan Realisasi Investasi:
  (1) PT. Pelindo melalui Surat Nomor KU.02.08/6/3/1/ASTP/KUMR/PLND-23 Tanggal 6 Maret 2023 Perihal Rincian Realisasi Investasi atas Perjanjian Konsesi PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) melaporkan hasil realisasi investasi senilai Rp3.013.270.399.818,-.
  (2) Berdasarkan BA Kesepakatan No. BA-DJPL 210 Tahun 2023 antara OP Utama Belawan dan PT. Pelindo disepakati bahwa nilai realisasi investasi oleh PT. Pelindo per 31 Desember 2022 senilai Rp3.013.270.399.818,-.
  (3) Aset konsesi jasa partisipasi pemerintah dari OP Utama Belawan telah dilikuidasi ke Satker KSOP Utama Belawan Sesuai BA Likuidasi Nomor BA-OP.Blw 73 Tahun 2023 dengan total nilai Rp3.013.270.399.818,-.
  (4) PT. Pelindo melalui Surat Nomor KP.08.01/10/1/2/PGPR/RH1/REG-24 Tanggal 10 Januari 2024 Perihal Realisasi Investasi oleh BUP PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) melaporkan hasil realisasi investasi senilai Rp3.023.864.090.340,-
  (5) Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi/ Konfirmasi atas Realisasi Investasi Mitra Konsesi Fase 2 Semester I Tahun 2024 oleh PT. Pelindo (Persero) Nomor BA-KSOP.Blw 44 Tahun 2024 tanggal 09 Juli 2024 antara KSOP Utama Belawan dan PT. Pelindo (Persero) disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp3.023.864.090.340,-.
  (6) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Atas Realisasi Investasi Dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian yang memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa Nomor BA-KSOP.BLW 05 Tahun 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp3.041.739.078.034,-.
- Addendum Perjanjian:
  (1) Terdapat addendum perjanjian sesuai dengan Addendum Nomor UM.002/3/8/OP.BLW-2016 Pada Tanggal 9 Februari 2016. Isi perjanjian mengubah tentang:
    (a) Ketentuan Pasal 9 ayat (3) , (4) dan (5) tentang Hak Atas Tanah Serta Kepemilikan dan Pengusahaan Aset;
    (b) Ketentuan Pasal 14 Ayat (3) tentang Hak dan Kewajiban Para Pihak;
  (2) Tidak terdapat perubahan (Penambahan/ Pengurangan) jangka waktu pelaksanaan perjanjian pada addendum.

5) Kantor KSOP Kelas I Balikpapan

a) Perjanjian Konsesi KSOP Kelas I Balikpapan dengan Mitra PT. Pelabuhan Penajam

Banua Taka Nomor Perjanjian HK.201/1/3/KSOP BPN 2022 Tanggal 13 Juli 2022 tentang Perjanjian Konsesi Antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Badan Usaha Pelabuhan PT Pelabuhan Penajam Banua Taka Tentang Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka di Pelabuhan Balikpapan. Jangka waktu konsesi selama 35 Tahun dimulai dari Tahun 2022 hingga 2057. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 2,75%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp187.906.334.674,-.

- Laporan Realisasi Investasi:
  (1) PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka melalui Surat Nomor 09/MKT/PPBT/01/2024 Tanggal 14 Januari 2024 Perihal Realisasi Investasi oleh BUP PT Pelabuhan Penajam Banua Taka melaporkan hasil realisasi investasi senilai Rp187.906.334.674,-.
  (2) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa atas Pengusahaan Terminal Umum PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka oleh PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka Nomor UM.002/39/16/KSOP.BPN-2024 tanggal 05 Juli 2024 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp187.906.334.674,-.
  (3) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa atas Pengusahaan Terminal Umum PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka oleh PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka Nomor UM.002/7/6/KSOP.BPN 2025 Tanggal 15 Januari 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp187.906.334.674,-.

b) Perjanjian Konsesi KSOP Kelas I Balikpapan dengan Mitra PT. Lestari Samudera Sakti Nomor Perjanjian HK.021/1/5/KSOP.BPN 2022 Tanggal 30 Agustus 2022 tentang Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan dengan PT. Lestari Samudra Sakti tentang Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Lestari Samudra Sakti. Jangka waktu konsesi selama 54 Tahun dimulai dari Tahun 2022 hingga 2076. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh PT.

Lestari Samudra Sakti. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 5%.

- Laporan Realisasi Investasi:
  (1) PT. Lestari Samudera Sakti melalui Surat Nomor 002/LSS-BPN/1/2024 Tanggal 02 Januari 2024 Perihal Realisasi Investasi oleh BUP PT Lestari Samudera Sakti melaporkan hasil realisasi investasi senilai Rp214.227.424.919,-.
  (2) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa atas Pengusahaan Terminal Umum PT. Lestari Samudra Sakti oleh PT. Lestari Samudra Sakti Nomor UM.002/39/17/KSOP.BPN-2024 tanggal 05 Juli 2024 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp214.227.424.919,-.
  (3) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa atas Pengusahaan Terminal Umum PT. Lestari Samudra Sakti oleh PT. Lestari Samudera Sakti Nomor UM.002/7/5/KSOP.BPN 2025 Tanggal 15 Januari 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp214.227.424.919,-.

c) Perjanjian Konsesi KSOP Kelas I Balikpapan dengan Mitra PT. Indika Logistic & Support Services Nomor Perjanjian UM.002/17/13/KSOP BPN 2023 Tanggal 27 Maret 2023 tentang Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Indika Logistic & Support Services di Pelabuhan Balikpapan. Jangka waktu konsesi selama 31 Tahun dimulai dari Tahun 2023 hingga 2054. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh PT. Indika Logistic & Support Services. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 3%.

- Laporan Realisasi Investasi:
  (1) PT. Indika Logistic & Support Services melalui Surat Nomor 004/ILSS/BOD/LET/I/2024 Tanggal 10 Januari 2024 Perihal Realisasi Investasi oleh BUP PT. Indika Logistic & Support Services melaporkan hasil realisasi investasi senilai Rp722.969.875.711,-.
  (2) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa atas Pengusahaan Terminal Umum PT. Indika Logistic & Support Service oleh Indika Logistic & Support Service Nomor UM.002/39/15/KSOP.BPN-2024 tanggal 05 Juli 2024 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni

2024 sebesar Rp722.969.875.711,-.

(3) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa atas Pengusahaan Terminal Umum PT. Indika Logistic & Support Services oleh PT. Indika Logistic & Support Services Nomor UM.002/7/4/KSOP.BPN 2025 Tanggal 15 Januari 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp804.842.268,-.

6) Kantor KSOP Kelas I Banjarmasin

a) Perjanjian Konsesi KSOP Kelas I Banjarmasin dengan Mitra PT. Indonesia Multi Purpose Terminal Nomor Perjanjian PP.008/01/01/KSOP.BJM.18 Tanggal 15 September 2018 tentang Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Badan Usaha Pelabuhan PT. Indonesia Multi Purpose Terminal tentang Pengusahaan Pelabuhan ada Area Alih Muat Kapal di Terminal Terapung PT. Indonesia Multi Purpose Terminal di Perairan Taboneo, Pelabuhan Banjarmasin Kalimantan Selatan. Jangka waktu konsesi selama 49 Tahun dimulai dari Tahun 2018 hingga 2067. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh PT. Indonesia Multi Purpose Terminal. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 4,50%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp599.859.000.000,-.

- Laporan Realisasi Investasi:

  (1) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa atas Pengusahaan Pelabuhan pada Area Alih Muat Kapal di Terminal Terapung di Perairan Taboneo, Pelabuhan Banjarmasin, Kalimantan Selatan oleh PT. Indonesia Multi Purpose Terminal Nomor BA-TU 134 Tahun 2024 tanggal 15 Juli 2024 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp24.542.000.000,-.

  (2) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Atas Realisasi Investasi Dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa sesuai Nomor BA-TU 8 Tahun 2025 Tanggal 16 Januari 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp24.542.000.000,-.

b) Perjanjian Konsesi KSOP Kelas I Banjarmasin dengan Mitra PT. Ambang Barito Nusapersada Nomor Perjanjian HK.201/01/02/KSOP.BJM-2022 Tanggal 20 September 2022 tentang Perjanjian Konsesi Antara Kantor Kesyahbandaran dan

Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Badan Usaha Pelabuhan PT Ambang Barito Nusapersada tentang Pengusahaan dan Pengelolaan Alur-Pelayaran Ambang Sungai Barito Kalimantan Selatan. Jangka waktu konsesi selama 20 Tahun dimulai dari Tahun 2022 hingga 2042. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh PT. Ambang Barito Nusapersada. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 8%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp1.112.806.836.126,-.

- Laporan Realisasi Investasi:
  (1) PT. Ambang Barito Nusa Persada sesuai Surat Nomor KU.04.01/10/1/1/KSMU/DIRA/ABNP-24 Tanggal 10 Januari 2024 perihal Penyampaian Laporan Keuangan Periode Triwulan III dan Realisasi Pelaksanaan Investasi Tahun 2023 melaporkan hasil realisasi investasi senilai Rp2.342.500.000,-.
  (2) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi atas Pengusahaan dan Pengelolaan Alur Pelayaran Ambang Sungai Barito Kalimantan Selatan oleh PT. Ambang Barito Nusapersada Nomor BA-TU 133 Tahun 2024 tanggal 15 Juli 2024 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp2.342.500.000,-.
  (3) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi atas Realisasi Investasi dalam rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa sesuai Nomor BA TU 9 Tahun 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp7.362.583.235,-.

7) Kantor KSOP Kelas I Banten

a) Perjanjian Konsesi KSOP Kelas I Banten dengan Mitra PT. Bandar Bakau Jaya Nomor Perjanjian HK.107/2/6/KSOP.Btn-2020 Tanggal 23 Juli 2020 tentang Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan PT Bandar Bakau Jaya tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Bandar Bakau Jaya di Pelabuhan Banten. Jangka waktu konsesi selama 73 Tahun dimulai dari Tahun 2020 hingga 2093. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh PT. Bandar Bakau Jaya. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge

dengan tarif 3,50%.

- Laporan Realisasi Investasi:
  (1) Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi atas Realisasi Investasi pada Perjanjian Konsesi Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Bandar Bakau Jaya di Pelabuhan Banten oleh PT. Bandar Bakau Jaya Nomor BA.KSOP.Btn 127 Tahun 2024 tanggal 16 Juli 2024 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp358.064.703.645,-.
  (2) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi atas Realisasi Investasi dalam rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa Nomor BA-KSOP.Btn 20 Tahun 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp358.064.703.645,-.

b) Perjanjian Konsesi KSOP Kelas I Banten dengan Mitra PT. Krakatau Bandar Samudera Nomor Perjanjian HK.107/2/2/KSOP.Bln-16 Tanggal 14 November 2016 tentang Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Badan Usaha Pelabuhan PT Krakatau Bandar Samudera tentang Kegiatan Pengusahaan di Bidang Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Cigading. Jangka waktu konsesi selama 75 Tahun dimulai dari Tahun 2016 hingga 2091. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh PT. Krakatau Bandar Samudera. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 3%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp1.468.316.715.000,-

- Laporan Realisasi Investasi:
  (1) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa atas Kegiatan Pengusahaan di Bidang Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Umum di Pelabuhan Banten oleh PT. Krakatau Bandar Samudera Nomor BA.KSOP.Btn 125 Tahun 2024 tanggal 09 Juli 2024 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp1.468.316.715.000,-.

c) Perjanjian Konsesi KSOP Kelas I Banten dengan Mitra PT. Batu Alam Makmur Nomor Perjanjian 107/1/5/KSOP-BTN-2022 Tanggal 21 April 2022 tentang Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten dengan PT. Batu Alam Makmur tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Batu Alam Makmur. Jangka waktu konsesi selama 16 Tahun dimulai

dari Tahun 2022 hingga 2038. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh PT. Batu Alam Makmur. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 4%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp88.777.210.287,-.

- Laporan Realisasi Investasi:
  (1) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa atas Kegiatan Pengusahaan di Bidang Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Umum di Pelabuhan Banten oleh PT. Batu Alam Makmur Nomor BA.KSOP.Btn 126 Tahun 2024 tanggal 11 Juli 2024 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp88.777.210.287,-.
  (2) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi atas Realisasi Investasi dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Umum di Pelabuhan Banten oleh PT Batu Alam Makmur Nomor BA-KSOP.Btn 14 Tahun 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp88.777.210.287,-.

8) Kantor KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun

a) Perjanjian Konsesi KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun dengan Mitra PT. Asinusa Putra Sekawan Nomor Perjanjian HK.201/1/2/KSOP.TBK-2022 Tanggal 6 Juli 2022 tentang Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Balai Karimun dengan PT. Asinusa Putra Sekawan tentang Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Pada Area Kegiatan Berlabuh Jangkar (Anchorage Area) dan Alih Muat Barang dari Kapal ke Kapal (Ship to Ship Transfer) di Wilayah Perairan Pulau Nipa. Jangka waktu konsesi selama 24 Tahun dimulai dari Tahun 2022 hingga 2046. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh PT. Asinusa Putra Sekawan. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 7%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp1.078.692.599.729,-.

- Laporan Realisasi Investasi:
  (1) Berdasarkan BA Kesepakatan Nomor BA-KSOPTBK 55 TAHUN 2023 tanggal 14 Juli 2023 antara KSOP Tanjung Balai Karimun dan PT. Asinusa Putra Sekawan disepakati nilai Realisasi Investasi (Realisasi Aset Non Tanah) s.d. 30 Juni 2023 yaitu sebesar Rp3.075.195.737,- yang terdiri dari

Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra sebesar Rp2.290.196.326,- dan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra Dalam Pengerjaan sebesar Rp784.999.411,-.

(2) PT. Asinusa Putra Sekawan sesuai Surat Nomor 040A/SK-ASN/JKT-FA/III/2024 Tanggal 13 Maret 2024 perihal Realisasi Investasi oleh BUP PT Asinusa Putra Sekawan dan Berita Acara Realisasi Investasi Nomor BA-KSOPTBK 8 TAHUN 2024, melaporkan hasil realisasi investasi senilai Rp3.346.590.111,- yang terdiri dari Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra sebesar Rp2.311.922.379,- dan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.034.667.732,-.

(3) Berdasarkan Berita Acara Realisasi Investasi atas Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada Area Kegiatan Berlabuh Jangkar (Anchorage Area) dan Alih Muat Barang dari Kapal ke Kapal (Ship to Ship Transfer) di Wilayah Perairan Pulau Nipa oleh PT. Asinusa Putra Sekawan Nomor BA-KSOPTBK 239 Tahun 2024 tanggal 17 Juli 2024 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp3.905.812.611,- dengan rincian Total Asset sebesar Rp2.846.144.879,- dan Asset Under Construction (AUC) sebesar Rp1.059.667.732,-.

(4) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi atas Realisasi Investasi Dalam rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa Nomor BA-KSOPTBK 34 Tahun 2025 Tanggal 7 Januari 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp4.366.021.165,-.

9) Kantor KSOP Kelas I Gresik

a) Perjanjian Konsesi KSOP Kelas I Gresik dengan Mitra PT. Berlian Manyar Sejahtera Nomor Perjanjian HK.107/01/10/Ksop-Gsk-2017 Tanggal 15 Desember 2017 tentang Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan Badan Usaha Pelabuhan PT Berlian Manyar Sejahtera tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Terminal Manyar di Pelabuhan Gresik. Jangka waktu konsesi selama 76 Tahun dimulai dari Tahun 2017 hingga 2093. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh PT. Berlian Manyar Sejahtera. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 2,75%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp32.460.259.000.000,-.

- Laporan Realisasi Investasi :

(1) PT. Pelindo melalui Surat Nomor KU.02.08/6/3/1/ASTP/KUMR/PLND-23 Tanggal 6 Maret 2023 Perihal Rincian Realisasi Investasi atas Perjanjian Konsesi PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) melaporkan hasil realisasi investasi senilai Rp1.157.923.852.821,-.

(2) Berdasarkan BA Kesepakatan No. BA-DJPL 216 Tahun 2023 antara KSOP Kelas I Gresik dan PT. Pelindo Persero disepakati bahwa nilai realisasi investasi oleh PT. Pelindo per 31 Desember 2022 senilai Rp1.157.923.852.821,-.

(3) PT. Pelindo melalui Surat Nomor KU.02.08/15/1/1/ASTP/KUMR/PLND-24 Tanggal 15 Januari 2024 Perihal Laporan Realisasi Investasi Aset Konsesi Jasa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Untuk Posisi s.d. 31 Desember 2023 PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) yang merupakan induk dari PT Berlian Manyar sejahtera melaporkan hasil realisasi investasi senilai Rp1.864.210.965.776,-.

(4) Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi / Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa atas Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Terminal Manyar di Pelabuhan Gresik oleh PT. Berlian Manyar Sejahtera Nomor BA-KSOP.Gsk 99 Tahun 2024 tanggal 03 Juli 2024 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp1.877.552.961.102,-.

(5) Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi/ Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa atas Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Terminal Manyar di Pelabuhan Gresik oleh PT Berlian Manyar Sejahtera Tanggal 7 Januari 2025 disepakati bahwa nilai realisasi ivnestasi s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp1.881.903.436.407,-

b) Perjanjian Konsesi KSOP Kelas II Gresik dengan Mitra PT. Siam Maspion Nomor Perjanjian AL.301/02/19/Ksop.Gsk-2020 Tanggal 8 Agustus 2020 tentang Perjanjian Konsesi Antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan PT Siam Maspion Terminal tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Siam Maspion di Pelabuhan Gresik. Jangka waktu konsesi selama 43 Tahun dimulai dari Tahun 2020 hingga 2063. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh PT. Siam Maspion. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 2,50%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai

Rp465.524.800.000,-.

- Laporan Realisasi Investasi:
  (1) Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi / Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa atas Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan oleh PT. Siam Maspion Terminal Nomor BA-KSOP.Gsk 100 Tahun 2024 tanggal 03 Juli 2024 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp455.984.600.000,-.
  (2) Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi/ Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa atas Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan oleh PT Siam Maspion Terminal Nomor BA-KSOP.Gsk 8 Tahun 2025 Tanggal 10 Januari 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp455.984.600.000,-.

10) Kantor KSOP Kelas II Pontianak

a) Perjanjian Konsesi KSOP Kelas II Pontianak dengan Mitra PT. Indo Container Sarana Nomor Perjanjian PP.008/1/6/KSOP.PTK-18 Tanggal 14 Maret 2018 tentang Perjanjian Konsesi Antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan Badan Usaha Pelabuhan PT. Indo Kontainer Sarana tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Multipurpose PT. Indo Kontainer Sarana di Pelabuhan Pontianak. Jangka waktu konsesi selama 61 Tahun dimulai dari Tahun 2018 hingga 2079. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh PT. Indo Container Sarana. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 5,50%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp770.309.731.389,-.

- Laporan Realisasi Investasi:
  (1) PT. Indo Container Sarana melalui Surat Nomor 048/IKS-OPS/B/I/2024 Tanggal 12 Januari 2024 Perihal Penyampaian Realisasi Investasi oleh BUP Indo Kontainer Sarana melaporkan hasil realisasi investasi senilai Rp200.057.991.860,-.
  (2) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa atas Pembangunan dan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Multipurpose PT. Indo Kontainer Sarana Nomor BA.KSOP.PTK 120 Tahun 2024 tanggal 01 Agustus 2024 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp218.864.778.167,-.

(3) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi atas Realisasi Investasi dalam rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa Pada Terminal Multipurpose PT. Indo Kontainer Sarana Nomor BA-KSOP.PTK 14 Tahun 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp220.150.584.663,-.

b) Perjanjian Konsesi KSOP Kelas II Pontianak dengan Mitra PT. Pelindo II Nomor Perjanjian PP.008/1/3/KSOP.PTK-18 Tanggal 14 Maret 2018 tentang Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tentang Pembangunan dan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Jangka waktu konsesi selama 69 Tahun dimulai dari Tahun 2018 hingga 2087. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh PT. Pelindo II (Persero). Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 2,50%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp14.450.675.225.523,-.

- Laporan Realisasi Investasi :

(1) PT. Pelindo melalui Surat Nomor KU.02.08/6/3/1/ASTP/KUMR/PLND-23 Tanggal 6 Maret 2023 Perihal Rincian Realisasi Investasi atas Perjanjian Konsesi PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) melaporkan hasil realisasi investasi senilai Rp3.275.788.931.913,-.

(2) Berdasarkan BA Kesepakatan No. BA-DJPL 213 Tahun 2023 antara KSOP Kelas II Pontianak dan PT. Pelindo Persero disepakati bahwa nilai realisasi investasi oleh PT. Pelindo per 31 Desember 2022 senilai Rp3.275.788.931.913,-.

(3) PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) melalui Surat Nomor KU.02.08/15/1/1/ASTP/KUMR/PLND-24 Tanggal 15 Januari 2024 Perihal Laporan Realisasi Investasi Aset Konsesi Jasa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk Posisi s.d. 31 Desember 2023 melaporkan hasil realisasi investasi senilai Rp3.275.788.931.913,-.

(4) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa atas Pembangunan dan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak oleh PT. Pelindo (Persero) Nomor BA.KSOP.PTK 119 Tahun 2024 tanggal 01 Agustus 2024 disepakati bahwa nilai realisasi

investasi s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp3.279.818.813.226,-.

(5) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi atas Realisasi Investasi dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa pada Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor BA-KSOP.PTK 19 Tahun 2025 Tanggal 17 Januari 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi sebesar Rp3.279.818.813.226,-.

11) Kantor KSOP Kelas II Samarinda

a) Perjanjian Konsesi KSOP Kelas II Samarinda dengan Mitra PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara Nomor Perjanjian AL.302/6/11/KSOP.SMD-2020 Tanggal 4 Desember 2020 tentang Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan PT Pelabuhan Tiga Bersaudara tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Alih Muat Barang (Ship to Ship Transfer) Muara Berau di Pelabuhan Samarinda. Jangka waktu konsesi selama 25 Tahun dimulai dari Tahun 2020 hingga 2045. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 5%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp575.760.647.447,-.

- Laporan Realisasi Investasi :

  (1) Berdasarkan Berita Acara Pencatatan Aset Konsesi Jasa Mitra atas Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Alih Muat Barang Muara Berau oleh PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara Nomor BA/1/8/KSOP.SMD/2024 tanggal 07 Agustus 2024 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp6.800.854.208,-.

b) Perjanjian Konsesi KSOP Kelas II Samarinda dengan Mitra PT. Sarana Abadi Lestari Nomor Perjanjian AL.302/3/5/KSOP.SMD-2020 Tanggal 17 Juni 2020 tentang Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan PT Sarana Abadi Lestari tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Umum PT. Sarana Abadi Lestari di Pelabuhan Samarinda. Jangka waktu konsesi selama 37 Tahun dimulai dari Tahun 2020 hingga 2057. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh PT. Sarana Abadi Lestari. Jenis skema kompensasi yang digunakan

adalah User Charge dengan tarif 5%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp155.465.130.000,-.

- Laporan Realisasi Investasi:
  (1) Berdasarkan Berita Acara Pencatatan Aset Konsesi Jasa Mitra atas Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Umum oleh PT. Sarana Abadi Lestari Nomor BA/1/7/KSOP.SMD/2024 tanggal 29 Juli 2024 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp155.342.459.667,-

12) Kantor UPP Kelas II Rangga Ilung

a) Perjanjian Konsesi Kantor UPP Kelas II Rangga Ilung dengan Mitra PT. Bangun Nusantara Jaya Makmur Perkasa Nomor Perjanjian HK.701/86/VII/UPP.RI-2022 Tanggal 13 Juli 2022 tentang Perjanjian Konsesi antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Rangga Ilung dengan PT Bangun Nusantara Jaya Makmur Perkasa tentang Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Bangun Nusantara Jaya Makmur Perkasa. Jangka waktu konsesi selama 15 Tahun dimulai dari Tahun 2022 hingga 2037. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh PT. Bangun Nusantara Jaya Makmur Perkasa. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 3,5%.

- Laporan Realisasi Investasi:
  (1) Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Atas Realisasi Investasi Perjanjian Konsesi atas Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan oleh Terminal Umum PT. Bangun Nusantara Jaya Makmur Perkasa Nomor AL.203/33/6/KSOP.RI-2024 tanggal 22 Juli 2024 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp74.681.412.917,-.
  (2) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi atas Realisasi Investasi dalam rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa Nomor AL.203/06/18/KSOP.RI-2025 Tanggal 31 Januari 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp75.253.624.917,-.

13) Kantor KSOP Kelas III Kotabaru-Batulicin

a) Perjanjian Konsesi KSOP Kelas III Kotabaru-Batulicin dengan Mitra PT. Swangi Indah Nomor Perjanjian KL.003/01/14KSOP.KBBL-19 Tanggal 4 Oktober 2019 tentang Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kotabaru-Batulicin Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan PT. Pelabuhan Swangi Indah tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Umum PT. Pelabuhan Swangi Indah di Pelabuhan

Kotabaru-Batulicin. Jangka waktu konsesi selama 21 Tahun dimulai dari Tahun 2019 hingga 2040. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh PT. Swangi Indah. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 5%.

- Laporan Realisasi Investasi:
  (1) PT. Swangi Indah melalui Surat Nomor 0013/PSI-Adm/I/2024 Tanggal 12 Januari 2024 Perihal Realisasi Investasi oleh BUP PT. Pelabuhan Swangi Indah melaporkan hasil realisasi investasi Per 31 Desember 2023 senilai Rp43.125.765.270,-.
  (2) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi atas Penggunaan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Umum PT. Pelabuhan Swangi Indah di Pelabuhan Kotabaru-Batulicin oleh PT. Pelabuhan Swangi Indah Nomor AL.203/200/16/KSOP.KBBL-2024 tanggal 06 Agustus 2024 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp43.125.765.270,-.

b) Perjanjian Konsesi KSOP Kelas II Kotabaru - Batulicin dengan Mitra PT. Dua Samudera Perkasa dengan Nomor Perjanjian HK.201/1/07/KSOP.KBBL/2024 dan 034/DSP-KSOP/VII/2024/STS.TJP Tanggal 26 Juli 2024 tentang Pengusahaan pada Wilayah Tertentu di Perairan yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan di Perairan Tanjung Pemancingan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Jangka waktu konsesi selama 26 Tahun dimulai dari Tahun 2024 hingga 2050. Aset yang dikonsesikan berupa Area kegiatan pengusahaan WTDP di Tanjung Pemancingan, Fasilitas Pelabuhan, berupa aset bergerak dan aset tidak bergerak (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran). Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 5%.

14) Kantor KSOP Kelas III Kuala Tanjung

a) Perjanjian Konsesi KSOP Kelas III Kuala Tanjung dengan Mitra PT. Pelindo I Nomor Perjanjian HK.107/1/1/KSOP.KTG-15 Tanggal 23 Januari 2015 tentang Perjanjian Kerjasama Antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) tentang Pengusahaan Dermaga Pada Terminal Curah Air di Pelabuhan Kuala Tanjung. Jangka waktu konsesi selama 69 Tahun dimulai dari Tahun 2015 hingga 2084. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh PT. Pelindo I. Jenis skema kompensasi yang

digunakan adalah User Charge dengan tarif 2,5%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp3.874.041.661.450,-.

- Laporan Realisasi Investasi:
  (1) Sesuai Laporan Realisasi Investasi Konsesi PT. Prima Multi Terminal (anak perusahaan PT Pelindo) Posisi s.d. 31 Desember 2022 diinformasikan bahwa total realisasi investasi Per 31 Desember 2022 melalui Surat Nomor KU.02.08/6/3/1/ASTP/KUMR/PLND-23 Tanggal 6 Maret 2023 Perihal Rincian Realisasi Investasi atas Perjanjian Konsesi PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) senilai Rp3.527.583.259.475,-.
  (2) PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) melalui Surat Nomor HK.02/15/1/1/GM/GM/KTG-24 Tanggal 15 Januari 2024 Perihal Realisasi Investasi oleh BUP PT. Pelabuhan Indonesia melaporkan hasil realisasi investasi Per 31 Desember 2023 senilai Rp3.527.583.259.475,-.
  (3) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa atas Pengusahaan Dermaga pada Terminal Curah Cair di Pelabuhan Kuala Tanjung oleh PT. Pelindo (Persero) Cab. Kuala Tanjung Nomor UM.002/5/7/KSOP.KTJ.2024 tanggal 10 Juli 2024 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp3.527.583.259.475,-.
  (4) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa atas Pengusahaan Dermaga Pada Terminal Curah Cair di Pelabuhan Kuala Tanjung Oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cab. Kuala Tanjung Nomor UM.002/1/9/KSOP.KTJ-2025 Tanggal 15 Januari 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp3.527.583.259.475,-.

15) Kantor KSOP Kelas IV Marunda

a) Perjanjian Konsesi KSOP Kelas IV Marunda dengan Mitra PT. Karya Citra Nusantara Nomor Perjanjian HK.107/1/9/KSOP.Mrd-16 Tanggal 29 November 2016 tentang Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Marunda Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan PT Karya Citra Nusantara tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Umum PT Karya Citra Nusantara di Pelabuhan Marunda. Jangka waktu konsesi selama 70 Tahun dimulai dari Tahun 2016 hingga 2086. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh PT. Karya Citra Nusantara. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 5%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai

Rp1.033.805.000.000,-.

- Laporan Realisasi Investasi:
  (1) PT. Karya Citra Nusantara melalui Surat Nomor 001/S-DIRUT/KCN-KSOP/I/2024 Tanggal 13 Januari 2024 Perihal Realisasi Investasi oleh BUP PT. Karya Citra Nusantara melaporkan hasil realisasi investasi senilai Rp1.924.982.134.652,-.
  (2) Berdasarkan BA Kesepakatan No. BA-KSOP.Mrd 22 Tahun 2024 antara KSOP Kelas II Marunda dan PT. Karya Citra Nusantara disepakati bahwa nilai realisasi investasi oleh PT. Karya Citra Nusantara per 31 Desember 2023 senilai Rp1.924.982.134.652,-.

b) Perjanjian Konsesi KSOP Kelas IV Marunda dengan Mitra PT. Pelabuhan Tegar Indonesia Nomor Perjanjian HK.107/1/2/KSOP.Mrd-17 Tanggal 24 Mei 2017 tentang Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Marunda Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan Badan Usaha Pelabuhan PT Pelabuhan Tegar Indonesia tentang Kegiatan Pengusahaan di Bidang Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Umum di Terminal Marunda Center, Pelabuhan Marunda. Jangka waktu konsesi selama 65 Tahun dimulai dari Tahun 2017 hingga 2082. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh PT. Pelabuhan Tegar Indonesia. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 2,75%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp2.030.161.309.228,-.

- Laporan Realisasi Investasi:
  (1) Sesuai Surat Direktur Utama PT. Pelabuhan Tegar Indonesia Nomor 016/PTI-DIR/KSOP/I/2023 Tanggal 17 Januari 2023 Perihal Realisasi Investasi Oleh BUP PT. Pelabuhan Tegar Indonesia diinformasikan bahwa total realisasi investasi Per 31 Desember 2022 senilai Rp858.863.212.572,-.
  (2) Sesuai Surat Direktur Utama PT. Pelabuhan Tegar Indonesia Nomor 024/PTI-DIR/KSOP/I/2024 Perihal Realisasi Investasi Oleh BUP PT. Pelabuhan Tegar Indonesia diinformasikan bahwa total realisasi investasi Per 31 Desember 2023 senilai Rp859.560.212.572,-.
  (3) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa atas Kegiatan Usaha di Bidang Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Umum di Terminal Marunda Center,

Pelabuhan Marunda oleh PT. Pelabuhan Tegar Indonesia Nomor BA-KSOP Tahun 2024 tanggal 19 Agustus 2024 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp859.560.212.572,-.

(4) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi atas Realisasi Investasi dalam rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa Kegiatan Usaha di Bidang Penyediaan dan/ Atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Umum di Terminal Umum Marunda Center, Pelabuhan Marunda oleh PT. Pelabuhan Tegar Indonesia sesuai Nomor BA-KSOP.Mrd 3 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp859.560.212.572,-.

- Addendum Perjanjian:

(1) Terdapat addendum perjanjian sesuai dengan Addendum Nomor HK.201/1/14/KSOP.Mrd/2019 Pada Tanggal 13 Desember 2019. Isi perjanjian mengubah tentang:

(a) Pasal 1 tentang Dasar Hukum;

(b) Pasal 10 ayat (2) huruf g dan ayat (4) huruf f tentang Hak dan Kewajiban Para Pihak;

(c) Pasal 32 tentang Ketentuan Lain-Lain

(2) Tidak terdapat perubahan (Penambahan/Pengurangan) jangka waktu pelaksanaan perjanjian pada addendum.

16) Kantor KSOP Kelas IV Probolinggo

a) Perjanjian Konsesi KSOP Kelas IV Probolinggo dengan Mitra PT. Delta Artha Bahari Nusantara Nomor Perjanjian PP.002.1/17/KSOP-Pbl-17 Tanggal 21 Februari 2017 tentang Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Probolinggo Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan Badan Usaha Pelabuhan PT Delta Artha Bahari Nusantara tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Umum PT Delta Artha Bahari Nusantara di Pelabuhan Probolinggo. Jangka waktu konsesi selama 64 Tahun dimulai dari Tahun 2017 hingga 2081. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh PT. Delta Artha Bahari Nusantara. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 2,75%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp928.881.690.923,-.

- Laporan Realisasi Investasi:

(1) Sesuai Surat Direktur Utama PT. Delta Artha Bahari Nusantara Nomor

DIR228/DABN/UM/XII/2022 Tanggal 19 Desember 2022 Perihal Pelaporan Nilai Investasi oleh BUP PT. DABN diinformasikan bahwa total realisasi investasi Per 31 Desember 2022 senilai Rp387.254.809.834,-

(2) Berdasarkan BA Kesepakatan No. BA-DJPL 219 Tahun 2023 antara KSOP Kelas IV Probolinggo dan PT. Delta Artha Bahari Nusantara disepakati bahwa nilai realisasi investasi oleh PT. Delta Artha Bahari Nusantara per 31 Desember 2022 senilai Rp266.653.283.000,-.

(3) Sesuai Surat Direktur Utama PT. Delta Artha Bahari Nusantara Nomor DIR006/DABN/UM/I/2024 Tanggal 12 Januari 2024 Perihal Pelaporan Nilai Investasi oleh BUP PT. DABN diinformasikan bahwa total realisasi investasi Per 31 Desember 2023 senilai Rp268.073.283.000,-

(4) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa atas Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Umum PT. Delta Artha Bahari Nusantara di Pelabuhan Probolinggo oleh PT. Delta Artha Bahari Nusantara Nomor BA-KSOP.Pbl 97 Tahun 2024 tanggal 03 Juli 2024 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp268.073.283.000,-.

(5) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi atas Realisasi Investasi Dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa Nomor BA-KSOP.Pbl 2 Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp268.073.283.000,-.

b) Pemanfaatan BMN KSOP Kelas IV Probolinggo dengan Mitra PT. Delta Artha Bahari Nusantara Nomor Perjanjian PP.002/1/13/KSOP.Pbl-17 Tanggal 20 Agustus 2017 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa Tanah Hasil Reklamasi dan Bangunan Dermaga Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Probolinggo. Jangka waktu KSP selama 30 Tahun dimulai dari Tahun 2017 hingga 2047. Aset yang dikerjasamakan oleh KSOP Probolinggo berupa area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat). Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah kontribusi tetap 0,50% (kenaikan 4,55% tiap tahun) dan bagi hasil 25,16%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp42.300.000.000,- sebagai berikut:

- Laporan Realisasi Investasi:

(1) Sesuai Surat Direktur Utama PT. Delta Artha Bahari Nusantara (DABN) Nomor DIR 006/DABN/UM/I/2024 Tanggal 12 Januari 2024 Perihal Realisasi Investasi oleh BUP PT Delta Artha Bahari Nusantara diinformasikan bahwa

total realisasi investasi Per 31 Desember 2023 senilai Rp2.655.588.182,-.

(2) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Realisasi Investasi atas Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara (KSP-BMN) Berupa Tanah Hasil Reklamasi dan Bangunan Dermaga pada Kantor KSOP Kelas IV Probolinggo oleh PT. Delta Artha Bahari Nusantara Nomor BA-KSOP.Pbl 96 Tahun 2024 tanggal 03 Juli 2024 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp3.026.818.182,-.

(3) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Realisasi Investasi atas realisasi Investasi dalam rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik KSP-BMN Nomor BA-KSOP.Pbl 1 Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp3.026.818.182,-.

17) Kantor KSOP Kelas III Tanjung Pakis

a) Perjanjian Konsesi UPP Kelas III Brondong dengan Mitra PT. Lamongan Integrated Shorbase Nomor Perjanjian HK.201/1/14/UPP.BRG-2020 Tanggal 25 Juli 2020 tentang Perjanjian Konsesi antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelasi III Brondong Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan Badan Usaha Pelabuhan PT Lamongan Integrated Shorebase tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Umum Tanjung Pakis di Pelabuhan Brondong. Jangka waktu konsesi selama 72 Tahun dimulai dari Tahun 2020 hingga 2092. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh PT. Lamongan Integrated Shorebase. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 2,75%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp1.509.788.000.000,-.

- Laporan Realisasi Investasi:

(1) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa atas Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Terminal Umum Tanjung Pakis Lamongan oleh PT. Lamongan Integrated Shorebase Nomor KU.207/36/5/KSOP.TJP/2024 tanggal 17 Juli 2024 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp366.677.221.574,-.

18) Kantor UPP Kelas III Satui

a) Perjanjian Konsesi UPP Kelas III Satui dengan Mitra PT. Bina Indo Raya Nomor Perjanjian HK.201/1/1/UPP.Satui-2022 Tanggal 12 April 2022 tentang Perjanjian Konsesi antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui dengan PT.

Bina Indo Raya tentang Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Bina Indo Raya. Jangka waktu konsesi selama 25 Tahun dimulai dari Tahun 2022 hingga 2047. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh PT. Bina Indo Raya. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 5%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp962.721.000.000,-.

- Laporan Realisasi Investasi:
  (1) Sesuai Surat Direktur Utama PT. Bina Indo Raya Nomor 002/BIR-PST/I/2024 Tanggal 15 Januari 2024 Perihal Realisasi Investasi oleh BUP PT Bina Indo Raya Per 31 Desember 2023 diinformasikan bahwa total realisasi investasi Per 31 Desember 2023 senilai Rp233.980.559.150,-.
  (2) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa atas Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Satui dengan PT. Bina Indo Raya Tentang Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Binda Indo Raya Nomor AL.308/2/11/KSOP.Satui-2024 tanggal 08 Agustus 2024 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp238.736.812.973,-.
  (3) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa atas Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Satui dengan PT Bina Indo Raya tentang Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Bina Indo Raya Nomor AL.308/1/6/KSOP.Satui-2024 Tanggal 17 Januari 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp252.133.041.577,-.

19) Kantor KSOP Kelas II Kendari

a) Perjanjian Konsesi KSOP Kendari dengan Mitra PT. Pelindo Nomor Perjanjian HK.201/14/135/KSOP.KDI-2022 Tanggal 25 November 2022 tentang Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pengusahaan Terminal Petikemas Kendari New Port di Pelabuhan Kendari/ Bungutoko. Jangka waktu konsesi selama 67 Tahun dimulai dari Tahun 2022 hingga 2089. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh PT. Pelindo (Persero). Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 2,5%.

- Laporan Realisasi Investasi:
  (1) PT. Pelindo melalui Surat Nomor KU.02.08/6/3/1/ASTP/KUMR/PLND-23 Tanggal 6 Maret 2023 Perihal Rincian Realisasi Investasi atas Perjanjian Konsesi PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) melaporkan hasil realisasi investasi senilai Rp821.213.850.082,-.
  (2) Berdasarkan BA Kesepakatan No. BA-DJPL 218 Tahun 2023 antara KSOP Kelas II Kendari dan PT. Pelindo Persero disepakati bahwa nilai realisasi investasi oleh PT. Pelindo per 31 Desember 2022 senilai Rp821.213.850.082,-.
  (3) Sesuai Surat General Manager PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor KU.02.04/19/1/1/B1/GM/KDI-24 Tanggal 19 Januari 2024 Perihal Konfirmasi Realisasi Investasi Terminal Petikemas Kendari New Port Semester II Tahun 2023 diinformasikan bahwa total realisasi investasi Per 31 Desember 2023 senilai Rp821.213.850.082,-.
  (4) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa atas Pengusahaan Terminal Petikemas Kendari Newport di Pelabuhan Kendari/Bungkutoko oleh PT. Pelindo (Persero) Nomor PL.303/10/8/KSOP.Kdi/2024 tanggal 31 Juli 2024 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp821.213.850.082,-.
  (5) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa atas Pengusahaan Terminal Petikemas Kendari *New Port* di Pelabuhan Kendari/ Bungkutoko oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor BA-KSOP.Kdi 2 Tahun 2025 Tanggal 13 Januari 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp821.213.850.082,-.

20) Kantor KSOP Anggrek

Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha KSOP Kelas IV Anggrek dengan Mitra PT. Anggrek Gorontalo Internasional Terminal Nomor Perjanjian HK.201/2/13/DJPL/2021 Tanggal 30 Juli 2021 tentang Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan Anggrek Provinsi Gorontalo. Jangka waktu KPBU selama 30 Tahun dimulai dari Tahun 2017 hingga 2047. Aset yang dikerjasamakan oleh KSOP Anggrek berupa area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat). Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge.

- Laporan Realisasi Investasi:
  (1) PT. Anggrek Gorontalo Internasional Terminal (AGIT) mengirimkan Surat kepada

Kepala KSOP Anggrek dengan Nomor 20-SK/AGIT-GTLO/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 perihal Revisi Realisasi Investasi Tahun 2023 oleh BUP PT AGIT, bahwa nilai total realisasi investasi s.d. 31 Desember 2023 sebesar Rp8.973.650.000,-.

(2) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Atas Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan Anggrek Provinsi Gorontalo Antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (PJPK) dengan PT. Anggrek Gorontalo Internasional Terminal Nomor BA-KSOP.AGR 43 Tahun 2024 tanggal 01 Juli 2024, bahwa nilai total realisasi investasi s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp8.973.650.000,-.

(3) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi atas Realisasi Investasi dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa Nomor BA-KSOP.AGR 10 Tahun 2025 Tanggal 31 Januari 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp17.573.650.000,-.

21) Kantor KSOP Kelas III Labuan Bajo

Perjanjian Pemanfaatan BMN KSOP III Labuan Bajo dengan Mitra PT. Pelabuhan Indonesia Persero Nomor Perjanjian HK.201/4/9/DJPL/2021 Tanggal 8 November 2021 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Labuan Bajo. Jangka waktu KSP selama 50 Tahun dimulai dari Tahun 2021 hingga 2071. Aset yang dikerjasamakan oleh KSOP Labuan Bajo berupa area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat). Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah kontribusi tetap sebesar Rp171.000.000,- (kenaikan 2,95% tiap tahun) dan bagi hasil 16,81%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp318.640.679.333,-.

- Laporan Realisasi Investasi:

(1) Sesuai Surat Direktur Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor 20-KU.02.08/15/1/1/ASTP/KUMR/PLND-24 Tanggal 15 Januari 2024 Perihal Laporan Realisasi Investasi Aset Konsesi Jasa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk posisi s.d. 31 Desember 2023 diinformasikan bahwa total realisasi investasi per 31 Desember 2023 senilai Rp170.431.866.416,-.

(2) Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi/Konfirmasi atas Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Labuan Bajo oleh PT. Pelindo (Persero) Nomor KU.102/2/1/KSOP.LBJ/2024 dan KS.02/19/7/1/GM/LBJO-24 tanggal 18 Juli

2024 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp179.105.445.274,-.

(3) Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi/Konfirmasi atas Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Labuan Bajo oleh PT. Pelindo (Persero) Nomor KU.105/1/1/KSOP.LBJ/2025 tanggal 18 Februari 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp185.189.616.274,-.

22) KSOP Badas

Perjanjian Pemanfaatan BMN KSOP Kelas IV Badas dengan Mitra PT. Pelabuhan Indonesia Persero Nomor Perjanjian HK.201/8/19/DJPL/2022 Tanggal 7 April 2022 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Badas. Jangka waktu KSP selama 30 Tahun dimulai dari Tahun 2022 hingga 2051. Aset yang dikerjasamakan oleh KSOP Badas berupa area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat). Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah kontribusi tetap sebesar Rp916.390.500,- (kenaikan 2,88% tiap tahun) dan bagi hasil 46,55%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp34.134.106.305,-.

- Laporan Realisasi Investasi:

(1) Sesuai Surat Direktur Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor 20-KU.02.08/15/1/1/ASTP/KUMR/PLND-24Tanggal 15 Januari 2024 Perihal Laporan Realisasi Investasi Aset Konsesi Jasa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk posisi s.d. 31 Desember 2023 diinformasikan bahwa total realisasi investasi per 31 Desember 2023 senilai Rp796.525.380,-

(2) Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi/Konfirmasi atas Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Badas oleh PT. Pelindo (Persero) Nomor KU.102/6/8/KSOP.BDS-2024 tanggal 18 Juli 2024 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp796.525.380,-.

23) KSOP Bima

Perjanjian Pemanfaatan BMN KSOP Kelas IV Bima dengan Mitra PT. Pelabuhan Indonesia Persero Nomor Perjanjian HK.201/12/20/DJPL/2022 Tanggal 7 September 2022 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bima. Jangka waktu KSP selama 30 Tahun dimulai dari Tahun 2022 hingga 2051. Aset yang dikerjasamakan oleh KSOP Badas berupa area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan

fasilitas peralatan Bongkar muat). Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah kontribusi tetap sebesar Rp759.982.028,- (kenaikan 2,12% tiap tahun) dan bagi hasil 28,81%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp26.791.673.692,-

- Laporan Realisasi Investasi:
  (1) Sesuai Surat General Manager Cabang Bima PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor KS.02/10/1/1/GM/GM/BIMA-24 Tanggal 10 Januari 2024 Perihal Realisasi Investasi oleh BUP PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Bima diinformasikan bahwa total realisasi investasi Per 31 Desember 2023 senilai Rp700.000.000,-.
  (2) Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi/Konfirmasi atas Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bima oleh PT. Pelindo (Persero) Nomor KU.102/2/2/KSOP.BMA/2024 tanggal 15 Agustus 2024 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp700.000.000,-.
  (3) Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi/ Konfirmasi atas Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bima oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor KU.102/1/2/KSOP.BMA/2025 Tanggal 2 Januari 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp700.000.000,-.

24) KSOP Garongkong

Perjanjian Pemanfaatan BMN KSOP Kelas II Garongkong dengan Mitra PT. Pelabuhan Indonesia Persero sesuai Nomor Perjanjian HK.201/9/15/DJPL/2022 Tanggal 14 Juni 2022 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Bersifat Khusus Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Garongkong. Jangka waktu KSP selama 50 Tahun dimulai dari Tahun 2022 hingga 2072. Aset yang dikerjasamakan oleh KSOP Garongkong berupa area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat). Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah kontribusi tetap sebesar Rp2.661.969.064,- (kenaikan 5% tiap tahun) dan bagi hasil 5,25%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp739.837.476.531.-

- Laporan Realisasi Investasi:
  (1) Sesuai Surat Direktur Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor KU.02.08/15/1/1/ASTP/KUMR/PLND-24Tanggal 15 Januari 2024 Perihal Laporan Realisasi Investasi Aset Konsesi Jasa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk posisi s.d. 31 Desember 2023 diinformasikan bahwa total

realisasi investasi senilai Rp1.134.609.764,-.

(2) Berdasarkan Surat Direktur Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor KU.02.08/16/7/1/ASTP/KEUG/PLND-24 Tanggal 16 Juli 2024 Perihal Laporan Realisasi Investasi Aset Konsesi Jasa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk posisi s.d. 30 Juni 2024 diinformasikan bahwa total realisasi investasi senilai Rp1.225.938.150,-.

(3) Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Pencatatan Investasi Semester II Tahun 2024 atas Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara (KSP-BMN) Bersifat Khusus Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur pada Pelabuhan Garongkong oleh PT. Pelindo (Persero) Nomor KU.105/1/14/KSOP.GRK/2025 tanggal 17 Maret 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp14.972.238.764,-.

25) KSOP Waingapu

Perjanjian Pemanfaatan BMN KSOP Kelas IV Waingapu dengan Mitra PT. Pelabuhan Indonesia Persero sesuai dengan Nomor Perjanjian HK.201/8/20/DJPL/2022 Tanggal 7 April 2022 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Waingapu. Jangka waktu KSP selama 30 Tahun dimulai dari Tahun 2022 hingga 2052. Aset yang dikerjasamakan oleh KSOP Waingapu berupa area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat). Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah kontribusi tetap sebesar Rp572.051.065,- (kenaikan 1,93% tiap tahun) dan bagi hasil 44.29%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp15.056.350.000.-. Posisi sampai dengan 30 Juni 2024 belum ada realisasi investasi oleh BUP PT. Pelabuhan Indonesia (Persero).

- Laporan Realisasi Investasi:

(1) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi atas Realisasi Investasi dalam rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara Nomor KU.207/01/06/KSOP.WPU-2025 Tanggal 15 Januari 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp3.165.405.000,-.

26) KSOP Kelas III Talang Duku

Perjanjian Konsesi KSOP Kelas III Talang Duku dengan Mitra PT. Wahyusamudera Indah sesuai dengan Nomor Perjanjian WSI-2024.9.98 dan AL.001/1/1/KSOP.TLD-2024 Tanggal 05 September 2024 tentang Kegiatan Pengusahaan Kepelabuhanan pada Terminal Peti Kemas Muaro Jambi di Pelabuhan Talang Duku. Jangka waktu

konsesi selama 66 Tahun dimulai dari Tahun 2024 hingga 2090. Aset yang dikonsesikan berupa Area kegiatan pengusahaan Jasa Kepelabuhanan yang meliputi lahan Terminal Peti Kemas Muaro Jambi di Pelabuhan Talang Duku, Fasilitas Pelabuhan, serta fasilitas penunjang dengan luas sebesar 11,69 Ha. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 5%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp4.855.343.998.272,-.

- Laporan Realisasi Investasi:
  (1) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi atas Realisasi Investasi Dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa Nomor BA-KSOP.TLD 48 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 disepakati bahwa nilai realisasi s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp70.140.000.000,-.

27) KSOP Dumai

Perjanjian Konsesi KSOP Kelas I Dumai dengan Mitra PT. Pelabuhan Mundam Sejahtera dengan Nomor Perjanjian HK.201/1/5/KSOP.Dmi/2024 dan 138/PMS-DMI/SK-IX/2024 Tanggal 27 September 2024 tentang Penyediaan Dan/Atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Pelabuhan Mundam Sejahtera pada Pelabuhan Dumai. Jangka waktu konsesi selama 35 Tahun dimulai dari Tahun 2024 hingga 2059. Aset yang dikonsesikan berupa Area kegiatan pengusahaan Jasa Kepelabuhanan yang meliputi lahan Terminal, Fasilitas Pelabuhan, serta fasilitas penunjang dengan luas sebesar 50.000 m2 atau 5 Ha. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 5%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp276.184.491.404,-.

- Laporan Realisasi Investasi:
  (1) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi atas Realisasi Investasi dalam rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa Nomor KU.207/1/2/KSOP.DMI/2025 Tanggal 20 Januari 2025 disepakati bahwa nilai realisasi s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp64.228.858.644,-

28) UPP Tanjung Redeb

Perjanjian Konsesi Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Redeb dengan Mitra PT. Mitra Samudera Kreasi dengan Nomor Perjanjian HK.201/4/2/UPP.Trb/2024 dan PKS-001/MSK/08/2024 Tanggal 29 Agustus 2024 tentang Pengusahaan pada Wilayah Tertentu di Perairan yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan di Perairan Muara Pantai Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Jangka waktu konsesi selama 36 Tahun dimulai dari Tahun 2024 hingga 2060. Aset yang dikonsesikan berupa Area kegiatan pengusahaan WTDP di muara pantai, Aset Bergerak, Aset Tidak Bergerak,

dan Fasilitas Pelabuhan. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 5%.

29) UPP Weda

Perjanjian Konsesi Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Weda dengan Mitra PT. Pelabuhan Samudera Nusantara dengan Nomor Perjanjian AL.308/2/9/UPP.WED-24 dan 001/PKS/PSN-KUPPIIWEDA/X/2024 Tanggal 14 Oktober 2024 tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Pelabuhan Samudera Nusantara di Pelabuhan Weda. Jangka waktu konsesi selama 38 Tahun dimulai dari Tahun 2024 hingga 2062. Aset yang dikonsesikan berupa Area kegiatan pengusahaan Jasa Kepelabuhanan yang meliputi lahan Terminal Pelabuhan Samudera Nusantara, Fasilitas Pelabuhan, serta Fasilitas Penunjang dengan luas sebesar 35.432 m2. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 5%. Perjanjian Konsesi Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Weda dengan Mitra PT. Weda Bay Port dengan Nomor Perjanjian AL.308/1/22/UPP.WED-24 dan WBP-24222 Tanggal 06 Agustus 2024 tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan Lelilef. Jangka waktu konsesi selama 40 Tahun dimulai dari Tahun 2024 hingga 2064. Aset yang dikonsesikan berupa Area kegiatan pengusahaan Jasa Kepelabuhanan yang meliputi Pelabuhan Lelilef, Fasilitas Pelabuhan, serta Fasilitas Penunjang dengan luas sebesar 42.000 m2.

- Laporan Realisasi Investasi:
  (1) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi atas Realisasi Investasi Dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa Nomor KU.204/1/3/UPP.WED-2025 Tanggal 17 Januari 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp198.323.450.000,00,-.

M. Penerapan PSAP 17 Properti Investasi

1. Gambaran Umum

a. Berdasarkan PMK No. 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi, bahwa Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/ atau dtserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b. Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk

memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap). Berikut adalah contoh properti investasi:

1) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
2) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
3) Bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
4) Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/ atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
5) Properti dalam proses pernbangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi;

2. Penerapan PSAP 17 pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

a. Berdasarkan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-46/PB/PB.6/2022 tanggal 13 November 2022 tentang Identifikasi dan Penyajian Properti Investasi pada Laporan Keuangan Tahun 2022 dan Surat Kepala Biro LPPBMN PL.405/19/ PHB 2022 tanggal 7 Desember 2022 perihal Identifikasi dan Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 (PSAP 17) di lingkungan Kementerian Perhubungan, serta Surat Sekretariat Jenderal Nomor PL.101/1/1.PHB-2023 tanggal 03 Januari 2023 hal Penyajian Barang Milik Negara yang Memenuhi Kriteria Properti Investasi Dalam Laporan Keuangan Tahun 2022.
b. Berdasarkan Surat Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN Nomor PL. 102/1/20/STJ/2024 tanggal 20 Februari 2024 hal Penyajian Barang Milik Negara yang Memenuhi Kriteria Properti Investasi Dalam Laporan Keuangan Tahun 2023, bahwa penyajian Properti Investasi dalam Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut T.A. 2023 Unaudited tidak terdapat penambahan maupun pengurangan.

c. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah melakukan reklasifikasi aset tetap menjadi aset properti investasi pada 7 Satuan Kerja dengan total 10 NUP BMN. Rincian properti investasi adalah sebagai berikut:

No	Kode Satker	Nama Satker	Nilai	Keterangan
1	413002	DISNAV SABANG	592.461.584	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahat Permanen NUP 3
2	413070	KSOP TELUK BAYUR	85.936.000	Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 9
3	412817	KSOP CIREBON	65.372.211.000	Tanah Hasil Reklamasi: NUP 1 senilai Rp12.740.767.000,-; NUP 2 senilai Rp31.276.722.000,-; dan NUP 3 senilai Rp21.354.722.000,-. Nilai pada Berita Acara atas Tanah Hasil Reklamasi NUP 1 sebesar Rp1.024.628.000,-, Namun berdasarkan history BMN dan daftar aset yang tercatat pada KSOP Cirebon sebesar Rp12.740.767.000,-
4	413080	KSOP KUALA TANJUNG	748.388.000	Bangunan Gudang Tertutup Permanen NUP 1 senilai Rp388.706.000,- dan Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan Permanen NUP 1 senilai Rp359.682.000,-
5	521836	UPP GARONGKONG	699.830.116	Bangunan Kantin NUP 1
6	413428	KSOP UTAMA TANJUNG PERAK	199.977.800	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen NUP 1
7	413293	DISNAV PALEMBANG	16.581.036.000	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukan NUP 14
Total			**84.279.840.500**	

d. Berdasarkan Surat Direktur DJPB Nomor S-2/PB/PB.6/2024 tanggal 11 Januari 2024 hal Petunjuk Teknis Akuntansi 09: Akuntansi Barang Milik Negara yang Memenuhi Karakteristik Properti Investasi pada Kementerian/Lembaga (Revisi Kedua, Januari 2024), telah dilakukan identifikasi kembali BMN yang memenuhi kriteria Properti Investasi.

e. Penambahan BMN dalam Koreksi Audited yang disajikan pada Laporan Keuangan Audited T.A. 2023 sebagai Properti Investasi dalam dan sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor PL.102/8/5/DJPL/2024 tanggal 07 Maret 2024 hal Penyajian Barang Milik Negara yang Memenuhi Kriteria Properti Investasi Dalam Laporan Keuangan Tahun 2023, antara lain:

No	Kode Satker	Nama Satker	Nilai (Rp)	Keterangan
1	413642	UPP Tobelo	3.801.911.400	Bangunan Gudang Tertutup Permanen NUP 3
2	559421	UPP Jailolo	191.248.000	Bangunan Gudang Tertutup Permanen NUP 1
3	412854	UPP Juwana	1.219.468.021	Bangunan Gedung Kantor Lainnya NUP 18-26
4	413381	UPP Manggar	35.578.000	Gedung Pos Jaga Permanen NUP 1
5	287406	UPP Parigi	650.179.000	Bangunan Gudang Tertutup Permanen NUP 2 dan Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 3
6	287384	UPP Poso	690.424.000	Bangunan Gudang Tertutup Permanen NUP 1
7	413256	KSOP Palembang	1.628.498.000	Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 5
8	413225	Disnav Dumai	354.409.000	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen NUP 1
9	413231	Disnav Tanjung Pinang	435.105.000	Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen NUP 1
10	287192	Disnav Banjarmasin	656.927.000	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen NUP 1
11	287579	KSOP Benoa	2.972.963.000	Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 1 dan NUP 3
12	287260	Disnav Samarinda	797.940.000	Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 2 dan Bangunan Menara Radio NUP 9
13	413472	UPP Palopo	2.215.502.083	Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/ Bandara Permanen NUP 2
14	412801	Disnav Tanjung Priok	258.148.000	Bangunan Lainnya NUP 133 dan NUP 135
15	412772	Kanpus Hubla	16.327.648.052	Tanah Bangunan Mess/ Wisma/ Asrama NUP 1 dan Mess/ Wisma/ Bungalow/ Tempat Peristirahatan Permanen NUP 1-15
Total			**32.235.948.556**	

f. Penambahan pengakuan atas BMN yang memenuhi persyaratan sebagai Properti Investasi meningkatkan nilai PI tersebut, sehingga nilai Properti Investasi Ditjen Perhubungan Laut T.A. 2024 sebesar Rp116.515.789.056,-.

N. Daftar Kapal Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Laut

Terdapat jumlah kapal sebanyak 151 unit pada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut dengan rincian sebagai berikut:

1. Kapal Dalam Kondisi Baik : 144 Unit
2. Kapal Dalam Kondisi Rusak Berat : 7 Unit

Kapal dengan Kondisi Rusak Berat yaitu Ferry sebanyak 7 Unit dengan Total Nilai Rp109.869.631.200,- yang saat ini telah dilakukan usulan penghapusan. Rincian Kapal dengan kondisi Rusak Berat antara lain:

No.	NAMA KAPAL	TERCATAT	NUP	NILAI
1	KM. Manusela	Ferry	1	18.606.086.900
2	KM. Nanggalala	Ferry	5	14.356.251.000
3	KM. Papua Satu	Ferry	9	10.770.700.000
4	KM. Papua Empat	Ferry	10	8.939.875.000
5	KM. Papua Lima	Ferry	13	17.253.536.000
6	KM. Papua Tiga	Ferry	22	19.515.000.000
7	KM. Papua Dua	Ferry	25	20.428.182.300
TOTAL				**109.869.631.200**

Penghapusan atas Kapal Passanger KM. Sabuk Nusantara 46 saat ini masih dalam proses dengan berkoordinasi bersama KPKNL Mitra. Berdasarkan surat Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Nomor AL.016/13/13/DA-2023 tanggal 20 November 2023 kepada Direktur Utama PT. PELNI perihal Cicilan Ke-1 Atas Ganti Rugi Tenggelamnya KM. Sabuk Nusantara 46, bahwa Nilai Tuntutan Ganti Rugi kepada Negara sesuai dengan Niilai Buku sebesar Rp17.298.600.000,-. Selain itu, berdasarkan surat tersebut juga, PT. PELNI berencana akan melakukan pelunasan dengan Kas PT. PELNI senilai Rp1.658.600.000,. Pada tanggal 14 Desember 2023, telah dilakukan pengembalian pembayaran tahap pertama atas ganti rugi tenggelamnya KM. Sabuk Nusantara 46 oleh PT. PELNI dengan Kode Billing 820231208468421 atau NTPN 0E89F1JNFMD9DVU5 sebesar Rp7.820.000.000,-, sehingga saldo per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp9.478.600.000,-.Pada tanggal 26 Januari 2024, telah dilakukan pengembalian pembayaran tahap kedua atas ganti rugi tenggelamnya KM. Sabuk Nusantara 46 oleh PT. PELNI dengan Kode Billing 820240122898917 atau NTPN 50D826U8EU59AQF5 sebesar Rp7.820.000.000,-, dan akan dilakukan penyesuaian pada Laporan Keuangan Semester I T.A. 2024. Kemudian, pada tanggal 14 Mei 2024 telah dilakukan pelunasan Pembayaran Tahap Tiga Atas Ganti Rugi Tenggelamnya KM. Sabuk Nusantara 46 sesuai dengan NTPN 9F6E961QV3UD3V2V senilai Rp1.658.600.000,-. Dengan demikian, piutang Satker Lala pada Semester I T.A. 2024 telah lunas dan selanjutnya akan dilakukan proses penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Nota Dinas Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor 62/LALA/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 hal Usulan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) berupa 1 (satu) Unit Kapal Penumpang KM Sabuk Nusantara 46 pada Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat, sehingga pencatatan atas

Kapal Penumpang NUP 10 senilai Rp17.298.600.000,- telah dilakukan reklasifikasi dan masuk ke dalam daftar barang rusak berat yang diusulkan penghapusannya. Selain itu, terdapat Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KP-PHB 306 Tahun 2025 tanggal 24 April 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Karena Sebab-Sebab Lain Berupa 1 (Satu) Unit Kapal Penumpang KM. Sabuk Nusantara 46 Pada Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat.

Pada Tahun Anggaran 2024, terdapat Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesi Nomor SK-LALA 33 Tahun 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa 3 (Tiga) Unit Kapal Pada Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Barang Milik Negara Melalui Mekanisme Penjualan Secara Lelang tanggal 22 Juli 2024. Berdasarkan surat tersebut, telah dilakukan transaksi Penghapusan pada aplikasi SAKTI atas Aset Ferry NUP 6 (KM. Nemberala) senilai Rp13.052.340.000,-, NUP 14 (KM. Tanjung Tungkor) senilai Rp21.373.248.100,-, dan NUP 15 (KM. Kie Raha I) senilai Rp17.795.072.000,-.

O. Subsidi Pengoperasian Kapal Perintis dan Kapal Angkutan Khusus Ternak

1. Subsidi Pengoperasian Kapal Perintis

a. Dasar Aturan

1) Perpres 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara
2) PM 48 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis
3) PM 55 Tahun 2019 Tentang Komponen Biaya Dan Pendapatan Yang Diperhitungkan Dalam Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis
4) PM 86 Tahun 2006 Tentang Tarif Penumpang Dan Uang Tambang Barang Angkutan Laut Perintis

b. Kegiatan Pelayaran

Kegiatan Pelayaran Perintis dilakukan untuk:

1) Menghubungkan daerah yang masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil yang belum berkembang dengan daerah yang sudah berkembang atau maju;
2) Menghubungkan daerah yang moda transportasi lainnya belum memadai; dan

3) Menghubungkan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani oleh pelaksana kegiatan angkutan laut, angkutan sungai dan danau, atau angkutan penyeberangan.

c. Peran Pemda Dalam Mendukung Penyelenggaraan Perintis
   1) Pengusulan Jaringan Trayek Angkutan Perintis
   2) Perancangan dan Pengesahan SK Dirjen (Penetapan sesuai Usulan Pemda dan Rakornas)
   3) Pelaksanaan dan Pengawasan Kegiatan Perintis
   4) Evaluasi (Sinergi Kemenhub, Pemda, dan KSOP/UPP)

d. Manfaat Angkutan Laut Perintis Bagi Daerah
   1) Penghubung Wilayah
   2) Mendukung UMKM setempat
   3) Lapangan Kerja Padat Karya
   4) Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat
   5) Memajukan Peradaban

e. Jaringan Trayek Angkutan Laut Kapal Perintis T.A. 2024
   1) Jumlah trayek sebanyak 107 trayek
   2) Pelabuhan Pangkal sebanyak 43 Pelabuhan
   3) Pelabuhan Singgah sebanyak 496 Pelabuhan
   4) Pelayaran 1 Round Voyage Menyinggah I Pelabuhan sebanyak 1.836 titik Pelabuhan
   5) Jarak Pelayaran 1 Round Voyage yaitu 108.503,25Nm
   6) Target Voyage sebanyak 3.544 Round Trip
   7) Jumlah Kapal yang Melayani Trayek sebanyak 107 Unit dengan tipe, antara lain:
      a) Type 2000 GT = 29 Unit
      b) Type 1200 GT = 39 Unit
      c) Type 750 DWT = 20 Unit
      d) Type 500 DWT = 14 Unit
      e) Type 350 DWT = 1 Unit
      f) Type 200 DWT = 4 Unit

f. Kapasitas Angkut Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis
   1) Penumpang sebanyak 38.604 orang
   2) Barang sebanyak 16.753 Ton

g. Penyelenggaraan Perintis Penugasan atau Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara Tahun Anggaran 2024 yang dilakukan oleh PT. PELNI (Persero) telah terealisasi sebesar Rp439.208.848.000,- atau 100% dari nilai kontrak.

h. Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Perairan Pelabuhan Dengan Menggunakan Kapal Milik Negara (Kapal Rede) Tahun Anggaran 2024 yang dilakukan oleh PT. PELNI (Persero) telah terealisasi sebesar Rp52.410.233.000,- atau 100% dari nilai kontrak.

i. Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Swasta telah terealisasi sebesar Rp1.033.688.855.786,- atau 99,85% dari nilai kontrak dengan rincian sebagai berikut.

No	Supplier	Kode Trayek	Uraian Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Realisasi (Rp)
1	PT. Aksar Saputra Lines	61	Pekerjaan Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Ternate Kode Trayek R-61 Tahun Anggaran 2024	11.069.900.000	11.069.900.000
2	PT. Bahtera Logistik Nusantara	27	Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Kupang Kode Trayek R-27	13.368.035.000	13.368.035.000
3	PT. Bahtera Logistik Nusantara	72	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis R-72	9.769.544.000	9.769.544.000
4	PT. Bahtera Logistik Nusantara	72	Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Ambon Kode Trayek R-72 Lanjutan Tahun Anggaran 2024	2.352.347.377	2.352.347.377
5	PT. Bahtera Logistik Nusantara	103	Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Laut Perintis Kode Trayek R-103 Pangkalan Merauke Tahun 2024	8.008.018.000	8.008.018.000
6	PT. Bahtera Logistik Nusantara	106	Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Laut Perintis Kode Trayek R-106 Pangkalan Merauke Tahun 2024	8.015.609.879	8.015.609.879
7	PT. Bahtera Logistik Nusantara	107	Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Laut Perintis Kode Trayek R-107 Pangkalan Merauke Tahun 2024	7.042.827.000	7.042.827.000
8	PT. Bayu Bahari Nusantara Lines	93	Pekerjaan Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Jayapura Kode Trayek R-93 Ta. 2024	6.987.922.000	6.987.922.000
9	PT. Bayu Bahari Nusantara Lines	95	Pekerjaan Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Jayapura Kode Trayek R-95 Ta. 2024	10.008.455.000	10.008.455.000
10	PT. Bhakti Lautan Persada	49	Penyelenggaraan Pelayaran Perintis R-49	13.087.928.483	13.087.928.483
11	PT. Citra Makmur	21	Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis R-21	12.579.562.000	12.579.562.000
12	PT. Citra Makmur	66	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis R-66 Pangkalan Babang Tahun Anggaran 2024	13.576.352.999	13.576.352.999
13	PT. Citrabaru Adinusantara	9	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis R-9 Sintete Ta 2024	10.152.685.000	10.152.685.000
14	PT. Citrabaru Adinusantara	12	Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Kotabaru Kode Trayek R-12 Ta 2024	14.385.275.000	14.385.275.000
15	PT. Citrabaru Adinusantara	12	Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Kotabaru Kode Trayek R-12 Ta 2024	979.685.891	979.685.891
16	PT. Citrabaru Adinusantara	31	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis R-31	12.570.786.736	12.570.786.736

No	Supplier	Kode Trayek	Uraian Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Realisasi (Rp)
17	PT. Citrabaru Adinusantara	55	Pekerjaan Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Kendari Kode Trayek R-55	17.416.703.000	17.416.703.000
18	PT. Citrabaru Adinusantara	56	Pekerjaan Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Kendari Kode Trayek R-56	17.574.000.000	17.574.000.000
19	PT. Citrabaru Adinusantara	70	Penyelenggaran Angkutan Laut Perintis R-70	16.597.672.799	16.597.672.799
20	PT. Citrabaru Adinusantara	77	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis R77 (Lanjutan)	4.490.454.589	4.490.454.589
21	PT. Citrabaru Adinusantara	115	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis R-115	9.404.717.000	9.404.717.000
22	PT. Inti Samudera Timur	73	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis R-73	11.458.283.000	11.458.283.000
23	PT. Inti Samudera Timur	73	Pekerjaan Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis Trayek R-73 Lanjutan	10.657.946.000	10.657.946.000
24	PT. Inti Samudera Timur	91	Pekerjaan Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis R-91 Ta. 2024	10.999.355.000	10.999.355.000
25	PT. Inti Samudera Timur	91	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis R-91 Ta. 2024 (Lanjutan)	2.975.000.000	2.975.000.000
26	PT. Inti Samudera Timur	78	Pekerjaan Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis R-78 Sesuai Kontrak Nomor : Hk.201/2/3/K.Upp.Tl-2023 Tanggal 29 Desember 2023	10.132.077.000	10.132.077.000
27	PT. Inti Samudera Timur	82	Pekerjaan Penyelenggara Angkutan Laut Perintis R-82 Sesuai Kontrak Nomor : Hk.201.2/6/K.Upp.Tl-2023 Tanggal 29 Desember 2023	10.623.619.000	10.623.619.000
28	PT. Inti Samudra Abdi Nusantara	77	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis R-77	3.786.996.998	3.786.996.998
29	PT. Inti Samudra Abdi Nusantara	109	Pekerjaan Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis Trayek R-109 Pangkalan Manokwari Tahun 2024	4.934.040.915	3.720.185.915
30	PT. Java Shipping Lines	30	Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Reo Kode Trayek R-30 Tahun Anggaran 2024	10.648.235.994	10.648.235.994
31	PT. Java Shipping Lines	36	Kontrak Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis R-36 Pangkalan Bitung Tahun Anggaran 2024	13.200.000.000	13.200.000.000
32	PT. Karunia Utama Asia Timur	19	Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis R-19	23.406.384.000	23.406.384.000
33	PT. Karunia Utama Asia Timur	20	Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis R-20	16.392.109.000	16.392.109.000
34	PT. Karunia Utama Asia Timur	65	Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Babang Kode Trayek R-65 Tahun 2024	13.111.986.000	13.111.986.000
35	PT. Kawan Bersama Logistik	76	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis R-76	8.289.730.000	8.289.730.000
36	PT. Kawan Bersama Logistik	76	Pekerjaan Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis Lanjutan Trayek R-76	6.954.142.000	6.954.142.000
37	PT. Kawan Bersama Logistik	79	Pekerjaan Penyelenggara Angkutan Laut Perintis R-79 Sesuai Kontrak Nomor : Hk.201.2/4/K.Upp.Tl-2023 Tanggal 29 Desember 2023	12.888.626.000	12.888.621.500
38	PT. Kawan Bersama Logistik	81	Pekerjaan Penyelenggara Angkutan Laut Perintis R-81 Sesuai Kontrak Nomor : Hk.201.2/5/K.Upp.Tl-2023 Tanggal 29 Desember 2023	10.919.684.000	10.919.684.000

No	Supplier	Kode Trayek	Uraian Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Realisasi (Rp)
39	PT. Kawan Bersama Logistik	84	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Publik Kapal Perintis R-84 Pangkalan Dobo Tahun 2024 Sesuai Kontrak Nomor : Pl.101/1/1/Upp.Dob-2023 Tanggal 30 Desember 2023	12.497.615.000	12.497.615.000
40	PT. Kawan Bersama Logistik	89	Pekerjaan Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis R-89 Ta. 2024	11.567.862.000	11.567.862.000
41	PT. Kawan Bersama Logistik	89	Pekerjaan Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Saumlaki R-89 (Lanjutan)	5.232.410.000	5.232.410.000
42	PT. Lintas Samudera Globalindo	8	Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara Pada Trayek R-8 Tahun Anggaran 2024	9.895.687.637	9.722.641.128
43	PT. Lintas Samudera Globalindo	8	Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara Pada Trayek R-8 Tahap Ii Tahun Anggaran 2024	3.688.357.525	3.688.357.525
44	PT. Lintas Samudera Globalindo	53	Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Laut Perintis Kodetrayek R-53 Pangkalan Ampana	14.197.266.502	14.197.266.502
45	PT. Lintas Samudera Globalindo	58	Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis R-58 Pangkalan Makassar Ta.2024	14.913.582.100	14.913.582.100
46	PT. Luas Line	6	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis Trayek R-6 Pangkalan Gorontalo	27.101.610.000	27.101.610.000
47	PT. Luas Line	41	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis Trayek R-41 Pangkalan Gorontalo	25.110.215.000	25.110.215.000
48	PT. Pelayaran Karya Berkat Makmur	85	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis R-85 Ta. 2024	14.845.100.000	14.845.100.000
49	PT. Pelayaran Karya Berkat Makmur	85	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis R-85 Ta. 2024 (Lanjutan)	4.135.076.854	4.135.076.854
50	PT. Pelayaran Karya Berkat Makmur	88	Pekerjaan Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis R-88 Ta. 2024	12.221.389.000	12.221.389.000
51	PT. Pelayaran Karya Berkat Makmur	3	Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Trayek R-3 Pangkalan Teluk Bayur Ta 2024	12.544.271.000	12.544.271.000
52	PT. Pelayaran Karya Berkat Makmur	10	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional R-10 Pangkalan Pontianak Ta. 2024	15.725.416.000	15.725.416.000
53	PT. Pelayaran Karya Berkat Makmur	13	Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Tarakan Kode Trayek R-13 Tahun Anggaran 2024	11.936.751.160	11.936.751.160
54	PT. Pelayaran Karya Berkat Makmur	42	Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Tilamuta Kode Trayek R-42 Tahun Anggaran 2024	13.640.074.205	13.640.074.205
55	PT. Pelayaran Mandala Sejahtera Abadi	34	Pekerjaan Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Laut Perintis Trayek R-34 Pangkalan Waingapu Ta. 2024	22.605.000.000	22.605.000.000
56	PT. Pelayaran Mandala Sejahtera Abadi	113	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis R-113 Ta 2024	9.287.040.740	9.268.054.055
57	PT. Pelayaran Mandala Sejahtera Abadi	67	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis R-67 Sanana Ta. 2024	18.849.314.206	18.849.314.206
58	PT. Pelayaran Mandala Sejahtera Abadi	68	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapalperintis R-68 Sanana Ta. 2024	10.468.568.251	10.468.568.251
59	PT. Pelayaran Mandala Sejahtera Abadi	38	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis R-38 Tahuna Ta.2024	12.578.000.000	12.578.000.000
60	PT. Pelayaran Mandala Sejahtera Abadi	38	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis R-38 Tahuna Ta.2024	6.011.805.000	6.011.805.000

No	Supplier	Kode Trayek	Uraian Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Realisasi (Rp)
61	PT. Pelayaran Mandala Sejahtera Abadi	39	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis R-39 Tahuna Ta.2024	12.740.000.000	12.740.000.000
62	PT. Pelayaran Mandala Sejahtera Abadi	99	Jasa Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Biak Kode Trayek R-99	10.205.925.895	10.205.925.895
63	PT. Pelayaran Wirayuda Maritim	28	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Perintis R-28	12.526.683.544	12.526.683.544
64	PT. Segara Lintas Bahari	5	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis R-5 Tanun 2024	10.469.000.000	10.469.000.000
65	PT. Selvi Trans Indo	18	Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Kalianget Kode Trayek R 18 Tahun Anggaran 2024	16.153.277.394	16.153.277.394
66	PT. Selvi Trans Indo	26	Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Kupang Kode Trayek R-26	12.512.586.000	12.512.586.000
67	PT. Selvi Trans Indo	54	Pekerjaan Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Kendari Kode Trayek R-54	17.602.740.800	17.602.740.800
68	PT. Selvi Trans Indo	114	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis R-114 Ta 2024	5.103.430.808	5.103.430.808
69	PT. Selvi Trans Indo	114	Penyelenggara Angkutan Laut Perintis R-114 Ta 2024	5.028.323.000	5.028.304.976
70	PT. Sinar Saritama Mandiri	32	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis R-32	10.888.130.166	10.888.130.166
71	PT. Sinar Saritama Mandiri	22	Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis R-22	12.495.717.000	12.495.717.000
72	PT. Sinar Saritama Mandiri	33	Pekerjaan Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Laut Perintis Trayek R-33 Pangkalan Waingapu Ta. 2024.	20.512.191.851	20.512.191.851
73	PT. Sinar Saritama Mandiri	40	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis Trayek R-40 Pangkalan Gorontalo	14.297.719.507	14.297.719.507
74	PT. Sinar Saritama Mandiri	44	Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Mamuju Kode Trayek R-44 Tahun Anggaran 2024	10.415.000.000	10.415.000.000
75	PT. Sinar Saritama Mandiri	46	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis R-46 Swasta Pangkalan Poso Tahun Anggaran 2024	12.401.722.778	12.298.208.543
76	PT. Sinar Saritama Mandiri	71	Pekerjaan Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis R-71	11.136.657.593	11.136.657.592
77	PT. Subsea Lintas Globalindo	16	Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis R-16 Pangkalan Kalianget Tahun Anggaran 2024	11.752.694.621	11.752.694.621
78	PT. Subsea Lintas Globalindo	47	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis R-47	18.646.411.000	18.646.411.000
79	PT. Subsea Lintas Globalindo	50	Pekerjaan Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis Trayek R-50 Pangkalan Tobelo Tahun Anggaran 2024	13.280.854.000	13.280.854.000
80	PT. Subsea Lintas Globalindo	51	Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Kode Trayek R-51 Pangkalan Kolonedale Tahun Anggaran 2024	10.655.584.000	10.655.584.000
81	PT. Subsea Lintas Globalindo	51	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis Pangakalan Kolonedale R-51(Pnbp)	6.855.964.154	6.855.964.154
82	PT. Subsea Lintas Globalindo	52	Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Kode Trayek R-52 Pangkalan Parigi Tahun Anggaran 2024	12.717.250.000	12.717.250.000
83	PT. Subsea Lintas Globalindo	2	Jasa Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Laut Perintis Kode Trayek R-2 Pangkalan Calang Tahun 2024	12.102.276.330	12.102.276.330

No	Supplier	Kode Trayek	Uraian Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Realisasi (Rp)
84	PT. Surya Bahtera Maritim	62	Pekerjaan Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintispangkalan Ternate Trayek R-62 Tahun Anggaran 2024	11.400.000.000	11.400.000.000
85	PT. Surya Bahtera Maritim	62	Pekerjaan Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Ternate Trayek R-62 Tahun Anggaran 2024	5.955.873.685	5.955.873.685
86	PT. Surya Bahtera Maritim	117	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis R-117	9.954.380.000	9.945.979.774
87	PT. Surya Bahtera Maritim	118	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis R-118	14.610.500.000	14.610.500.000
88	PT. Yusika Marine Indonesia	100	Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Laut Perintis Kode Trayek R-100 Pangkalan Merauke Tahun 2024	7.900.500.000	7.900.500.000
89	PT. Yusika Marine Indonesia	101	Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Laut Perintis Kode Trayek R-101 Pangkalan Merauke Tahun 2024	6.422.167.000	6.422.167.000
90	PT. Yusika Marine Indonesia	105	Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Laut Perintis Kode Trayek R-105 Pangkalan Merauke Tahun 2024	8.594.011.000	8.594.011.000
	TOTAL			**1.035.206.680.966**	**1.033.688.855.786**

2. Subsidi Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Ternak

a. Dasar Aturan
   1) PM 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut;
   2) PM 22 Tahun 2018 Tentang Komponen Penghasilan dan Biaya yang Diperhitungkan dalam Kegiatan Subsidi Penyelenggaraan Angkutan Barang di Laut.

b. Kegiatan Pelayanan
   1) Pengangkutan hewan ternak dari daerah produsen ke konsumen;
   2) Pendistribusian swasembada daging.

c. Peran Pemda Dalam Mendukung Penyelenggaraan Angkutan Khusus Ternak
   1) Pengusulan Jaringan Trayek Angkutan Khusus Ternak;
   2) Pelaksanaan dan Pengawasan Kegiatan Angkutan Khusus Ternak;
   3) Evaluasi (Sinergi Kemenhub, Pemda, dan KSOP/UPP).

d. Tujuan dan Sasaran
   1) Tujuan
      a) Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Nasional Swasembada Daging Sapi dan Kerbau;
      b) Menjamin Kelangsungan Distribusi Daging Sapi/Kerbau Melalui Angkutan Laut;
      c) *Animal Welfare*.
   2) Sasaran
      a) Terselenggaranya pengangkutan ternak dengan jadwal tetap dan teratur untuk membantu peternak sapi dalam hal kepastian waktu sehingga dapat

mempersiapkan dan mengirimkan ternak hasil produksinya ke daerah konsumen;

b) Terpeliharanya kondisi kesehatan, kesejahteraan dan bobot hidup ternak sampai ke pelabuhan tujuan dengan melakukan kegiatan pemeliharaan ternak selama pelayaran dan memastikan lingkungan kandang, sirkulasi udara, sistem pembuangan kotoran dalam kondisi baik.

e. Jumlah Trayek dan Muatan Subsidi Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Ternak sebanyak 6 trayek yaitu 2 Penugasan dan 4 Pelelangan, 7 Pelabuhan Muat, 5 Pelabuhan Bongkar.

f. Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Swasta telah terealisasi sebesar Rp80.200.733.423,- atau 100% dari nilai kontrak dengan rincian sebagai berikut.

No	Supplier	Uraian Kontrak	Nilai Kontrak	Nilai Realisasi
1	PT. PELAYARAN WIRAYUDA MARITIM	Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Ternak Trayek RT-5	14.248.954.700	14.248.954.700
2	PT. SUBSEA LINTAS GLOBALINDO	Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Ternak Trayek RT-4	14.316.543.100	14.316.543.100
3	PT. SUBSEA LINTAS GLOBALINDO	Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Ternak Trayek RT-3	14.280.598.600	14.280.598.600
4	PT. PELAYARAN WIRAYUDA MARITIM	Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Ternak Trayek RT-2	14.217.696.700	14.217.696.700
5	PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PT. PELNI)	Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Ternak Trayek RT-1	11.638.395.002	11.638.395.002
6	PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)	Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Ternak Trayek RT-6	11.498.545.321	11.498.545.321
	TOTAL		**80.200.733.423**	**80.200.733.423**

P. Capaian Output atas Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Periode Tahun 2024

1. Realisasi Belanja Output

Realisasi Belanja Output atas Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Periode Tahun 2024 di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah sebagai berikut.

Kode	Kegiatan	Belanja			Output			
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%
WA	**Program Dukungan Manajemen**							
4631	**Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Laut**							
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	4.519.607.000	4.191.269.700	92,74%	1	1	Layanan	100,00%
	Layanan Manajemen SDM	24.599.672.000	20.550.938.596	83,54%	2.338	2.338	Orang	100,00%

Kode	Kegiatan	Belanja			Output			
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%
4632	**Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Laut**							
	Layanan BMN	19.411.170.000	12.313.037.074	63,43%	1	1	Layanan	100,00%
	Layanan Umum	6.049.449.000	4.036.288.730	66,72%	1	1	Layanan	100,00%
	Layanan Perkantoran	3.396.553.999.000	3.183.862.413.628	93,74%	183	281	Layanan	153,55%
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	54.201.026.000	48.276.620.710	89,07%	180	271	Dokumen	150,56%
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	16.176.546.000	14.149.867.654	87,47%	1	1	Dokumen	100,00%
4633	**Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Laut**							
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	26.238.962.000	19.109.065.412	72,83%	2	2	Layanan	100,00%
	Layanan Data dan Informasi	1.269.000.000	1.248.807.000	98,41%	1	1	Layanan	100,00%
4634	**Legislasi dan Litigasi Transportasi Laut**							
	Layanan Hukum	9.939.170.000	7.488.243.640	75,34%	1	1	Layanan	100,00%
GA	**Program Dukungan Manajemen**							
4658	**Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut**							
	Kapal Laut	309.022.853.000	301.113.179.815	97,44%	53	55	Unit	103,77%
	Peralatan Pendukung Operasional	28.238.956.000	28.125.825.329	99,60%	6	50	Unit	833,33%
	Fasilitas Pendukung	3.338.260.000	3.328.969.210	99,72%	2	4	unit	200,00%
	Bangunan Operasional	24.550.094.000	24.472.527.857	99,68%	5	10	unit	200,00%
	OM Kapal Laut	551.901.309.000	537.757.762.439	97,44%	252	474	Unit	188,10%
	OM Peralatan Pendukung Operasional	12.994.017.000	12.412.210.163	95,52%	51	104	Unit	203,92%
	OM Fasilitas Pendukung	1.689.423.000	1.671.069.368	98,91%	17	23	unit	135,29%
	OM Bangunan Operasional	9.135.156.000	8.523.760.958	93,31%	17	68	unit	400,00%
4659	**Pelayanan Transportasi Laut**							
	Layanan Angkutan Rede	52.410.233.000	52.410.233.000	100,00%	16	16	layanan	100,00%
	Layanan Angkutan Laut Lainnya	43.206.217.000	43.104.396.871	99,76%	6	6	layanan	100,00%
	Peralatan Pendukung Operasional	3.800.000.000	3.797.145.151	99,92%	1	1	Unit	100,00%
	Hardware	4.500.000.000	-	0,00%	-	-	Unit	0,00%
	Docking Tahunan Kapal Laut	27.612.014.000	27.611.720.183	100,00%	5	7	Unit	140,00%
	OM Software	7.576.585.000	7.568.944.435	99,90%	6	6	Unit	100,00%
	OM Hardware	1.884.749.000	1.884.040.007	99,96%	6	6	Unit	100,00%
	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN)	1.501.075.114.000	1.435.197.136.869	95,61%	110	120	layanan	109,09%
	Layanan Angkutan Tol Laut Prioritas Nasional	754.677.465.000	647.299.290.200	85,77%	39	37	layanan	94,87%
	Layanan Angkutan Ternak Prioritas Nasional	80.940.124.000	80.338.866.523	99,26%	6	9	layanan	150,00%
4661	**Penunjang Teknis Transportasi Laut**							
	Studi	50.907.828.000	36.542.090.613	71,78%	104	107	NSPK	102,88%
	Kebijakan	7.502.995.000	5.948.421.815	79,28%	26	27	Standar	103,85%

Kode	Kegiatan	Belanja			Output			
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%
	Software	730.201.000	515.000.000	70,53%	3	3	Unit	100,00%
	Hardware	16.988.755.000	16.946.000.000	99,75%	1	1	Unit	100,00%
	OM Software	9.858.634.000	8.330.655.500	84,50%	3	4	Unit	133,33%
	OM Hardware	400.000.000	198.600.000	49,65%	1	1	Unit	100,00%
	Layanan Hukum	68.395.000	67.440.000	98,60%	1	2	Layanan	200,00%
	Layanan Umum	18.988.976.000	15.632.296.839	82,32%	15	25	Layanan	166,67%
	Layanan Sarana Internal	180.063.667.000	175.680.176.713	97,57%	1.359	5.279	Unit	388,45%
	Layanan Forum Kerja	221.554.696.000	195.796.935.004	88,37%	196	484	Dokumen	246,94%
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	55.951.775.000	50.520.094.028	90,29%	146	304	Dokumen	208,22%
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	148.275.760.000	128.558.498.261	86,70%	140	342	Dokumen	244,29%
	Subtotal	**7.688.802.852.000**	**7.166.579.839.295**	**93,21%**				
	Penyesuaian							
	Total	**7.688.802.852.000**	**7.166.579.839.295**	**93,21%**				

Terhadap kegiatan Pelayanan Transportasi Laut terkait Hardware, kegiatan tidak dapat terlaksana karena terdapat blokir pada kegiatan Pengadaan Penguatan Infrastuktur Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Laut.

2. Realisasi Program Prioritas Nasional

Realisasi Program Prioritas Nasional di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut.

Program / Kegiatan Prioritas	Satker	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
PN 01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan lang Berkualitas dan Berkeadilan								
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Pusat	SATKER LALA	439.208.848.000	439.208.848.000	100,00%	Layanan	30	30	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Aceh Jaya	UPP KELAS III CALANG	12.103.246.000	12.103.246.000	100,00%	Layanan	1	1	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kota Padang	KSOP KELAS II TELUK BAYUR	12.621.271.000	12.544.271.000	99,39%	Layanan	1	1	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kota Bengkulu	KSOP KELAS III BENGKULU / PULAU BAAI	10.557.134.000	10.469.000.000	99,17%	Layanan	1	1	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Bintan	KSOP KELAS III KIJANG	14.092.351.000	13.961.376.000	99,07%	Layanan	1	1	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Sumenep	KSOP KELAS IV KALIANGET	28.728.593.000	27.905.972.015	97,14%	Layanan	2	2	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kota Bima	KSOP KELAS IV BIMA	64.873.772.000	64.873.772.000	100,00%	Layanan	4	4	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Sumba Timur	KSOP KELAS IV WAINGAPU	45.772.932.159	45.772.932.159	100,00%	Layanan	2	2	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Sikka	KSOP KELAS IV MAUMERE / LAURENTIUS SAY	35.753.496.399	35.753.496.399	100,00%	Layanan	3	3	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Manggarai	UPP KELAS II REO	11.169.717.000	11.169.717.000	100,00%	Layanan	1	1	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kota Kupang	KSOP KELAS III KUPANG	25.980.621.000	25.980.621.000	100,00%	Layanan	2	2	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Sambas	KSOP KELAS IV SINTETE	10.272.492.000	10.152.685.000	98,83%	Layanan	1	1	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kota Pontianak	KSOP KELAS II PONTIANAK	15.725.416.000	15.725.416.000	100,00%	Layanan	1	1	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Kotabaru	KSOP KELAS III KOTABARU - BATULICIN	15.484.895.000	14.385.275.000	92,90%	Layanan	1	1	100,00%

Program / Kegiatan Prioritas	Satker	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
PN 01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan lang Berkualitas dan Berkeadilan								
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kota Tarakan	KSOP KELAS III TARAKAN	12.657.970.000	12.587.767.000	99,45%	Layanan	1	1	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kota Bitung	KSOP KELAS II BITUNG	13.200.000.000	13.200.000.000	100,00%	Layanan	1	1	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Banggai	UPP KELAS III PAGIMANA	13.087.928.483	13.087.928.483	100,00%	Layanan	1	1	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Poso	UPP KELAS III POSO	12.486.976.000	12.298.208.543	98,49%	Layanan	1	1	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Parigi Moutong	UPP KELAS III PARIGI	12.938.207.000	12.975.000.000	100,28%	Layanan	1	1	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Tojo Una Una	UPP KELAS III AMPANA	14.529.527.000	14.529.527.000	100,00%	Layanan	1	1	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Morowali Utara	UPP KELAS III KOLONEDALE	17.511.966.000	17.511.548.000	100,00%	Layanan	1	1	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kota Palu	KSOP KELAS II TELUK PALU	18.662.011.000	18.646.411.000	99,92%	Layanan	1	1	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kota Makassar	SYAHBANDAR UTAMA MAKASSAR	15.089.181.100	15.089.181.100	100,00%	Layanan	1	1	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kota Kendari	KSOP KELAS II KENDARI	56.940.402.000	54.082.943.800	94,98%	Layanan	3	3	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Boalemo	UPP KELAS III TILAMUTA	13.640.074.205	13.640.074.205	100,00%	Layanan	1	1	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kota Gorontalo	KSOP KELAS III GORONTALO	66.849.545.000	66.509.544.507	99,49%	Layanan	3	3	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Mamuju	UPP KELAS I MAMUJU	10.610.445.000	10.415.000.000	98,16%	Layanan	1	1	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Kepulauan Tanimbar	UPP KELAS II SAUMLAKI	64.029.081.000	61.976.193.000	96,79%	Layanan	4	4	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Maluku Tenggara	UPP KELAS II TUAL	44.085.177.000	43.675.029.000	99,07%	Layanan	4	4	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Kepulauan Aru	UPP KELAS III DOBO	13.012.374.000	13.012.374.000	100,00%	Layanan	1	1	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kota Ambon	KSOP KELAS I AMBON	87.627.953.000	85.610.834.593	97,70%	Layanan	6	6	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Kepulauan Sula	UPP KELAS III SANANA	29.551.631.000	29.551.631.000	100,00%	Layanan	2	2	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Halmahera Selatan	UPP KELAS II BABANG	26.841.753.000	26.793.086.000	99,82%	Layanan	2	2	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kota Ternate	KSOP KELAS II TERNATE	28.425.859.000	28.425.774.000	100,00%	Layanan	2	2	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Manokwari	KSOP KELAS IV MANOKWARI	4.934.041.000	3.720.185.915	75,40%	Layanan	1	1	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kota Sorong	KSOP KELAS I SORONG	53.440.383.000	54.269.620.774	101,55%	Layanan	5	5	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Merauke	KSOP KELAS IV MERAUKE	46.277.358.879	43.884.408.879	94,83%	Layanan	6	6	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Biak Numfor	KSOP KELAS III BIAK	10.329.926.000	10.205.925.895	98,80%	Layanan	1	1	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kota Jayapura	KSOP KELAS II JAYAPURA	17.586.452.000	16.996.377.000	96,64%	Layanan	2	2	100,00%
Layanan Angkutan Tol Laut Prioritas Nasional - Pusat	SATKER LALA	726.111.706.000	657.746.806.853	90,58%	Layanan	39	37	94,87%
Pembangunan Dermaga Roro Kapal Negara dan Kapal Pelra Wae Kelambu - Kab. Manggarai Barat	KSOP KELAS III LABUHAN BAJO	-	-		Unit	1	0	0,00%

Program / Kegiatan Prioritas	Satker	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
PN 02-Mengembangkan Wilalah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan								
Peningkatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Pada Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Merauke - Kab. Merauke	DISNAV KELAS III MERAUKE	31.113.390.000	31.070.818.000	99,86%	Unit	2	2	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Sumba Timur	KSOP KELAS IV WAINGAPU	45.772.932.159	45.772.932.159	100,00%	Layanan	2	2	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Sambas	KSOP KELAS IV SINTETE	10.272.492.000	10.152.685.000	98,83%	Layanan	1	1	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Tojo Una Una	UPP KELAS III AMPANA	14.529.527.000	14.529.527.000	100,00%	Layanan	1	1	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Kepulauan Tanimbar	UPP KELAS II SAUMLAKI	64.029.081.000	61.976.193.000	96,79%	Layanan	4	4	100,00%

Program / Kegiatan Prioritas	Satker	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
PN 02-Mengembangkan Wilalah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan								
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Kepulauan Aru	UPP KELAS III DOBO	13.012.374.000	13.012.374.000	100,00%	Layanan	1	1	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Kepulauan Sula	UPP KELAS III SANANA	29.551.631.000	29.551.631.000	100,00%	Layanan	2	2	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Merauke	KSOP KELAS IV MERAUKE	46.277.358.879	43.884.408.879	94,83%	Layanan	6	6	100,00%
Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Sungai Nyamuk - Kab. Nunukan	UPP KELAS III SUNGAI NYAMUK	68.954.590.000	68.858.040.400	99,86%	Unit	1	1	100,00%
Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Lewoleba - Kab. Lembata	UPP KELAS III LEWOLEBA	53.796.040.000	53.781.198.500	99,97%	Unit	1	1	100,00%
Replacement Fasilitas Pelabuhan Laut Sofifi - Kota Tidore Kepulauan	UPP KELAS III SOFIFI	60.000.000.000	59.952.000.000	99,92%	Unit	1	1	100,00%
Pembangunan Lapangan Penumpukan Pelabuhan Wini - Kab. Timor Tengah Utara	UPP WINI	15.411.760.000	15.393.515.400	99,88%	Unit	1	1	100,00%
Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Lerokis - Kab. Maluku Barat Daya	UPP KELAS III WONRELI	44.811.350.000	44.677.788.265	99,70%	Unit	1	1	100,00%
Pembangunan Fasilitas Pokok Pelabuhan Laut Ilwaki - Kab. Maluku Barat Daya	UPP KELAS III WONRELI	19.668.840.000	19.557.373.500	99,43%	Unit	1	1	100,00%
Pembangunan Fasilitas Sisi Darat Pelabuhan Gorom - Kab. Seram Bagian Timur	UPP KELAS III GESER	2.472.000.000	2.263.842.000	91,58%	Unit	1	1	100,00%

Program / Kegiatan Prioritas	Satker	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
PN 05 -Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelalanan Dasar								
Development and Improvement of Indonesia Aids to Navigation - Pusat	SATKER KENAVIGASIAN	26.751.686.000	26.751.685.989	100,00%	Unit	1	1	100,00%
Construction/ Procurement of Class I Patrol Vessel - Kota Administrasi Jakarta Pusat	SATKER KPLP	100.000.000	-	0,00%	Unit	10	0	0,00%
Peningkatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Pada Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Dumai - Kota Dumai	DISNAV KELAS I DUMAI	9.204.590.000	9.185.492.220	99,79%	Unit	13	13	100,00%
Peningkatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Pada Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjung Pinang - Kota Tanjung Pinang	DISNAV KELAS I TANJUNG PINANG	47.122.050.000	19.857.473.300	42,14%	Unit	31	31	100,00%
Peningkatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Pada Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok - Kota Administrasi Jakarta Utara	DISNAV KELAS I TANJUNG PRIOK	10.339.440.000	9.273.084.967	89,69%	Unit	1	1	100,00%
Peningkatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Pada Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjung Perak - Kota Surabaya	DISNAV KELAS I TANJUNG PERAK	25.141.619.000	25.002.353.514	99,45%	Unit	4	4	100,00%
Peningkatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Pada Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Samarinda - Kota Samarinda	DISNAV KELAS I SAMARINDA	13.312.057.000	13.300.000.000	99,91%	Unit	1	1	100,00%
Peningkatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Pada Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Sabang - Kota Sabang	DISNAV KELAS II SABANG	10.277.238.000	10.277.234.000	100,00%	Unit	12	12	100,00%
Peningkatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Pada Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Tanjung Emas - Kota Semarang	DISNAV KELAS II TANJUNG EMAS	17.674.977.000	17.627.368.575	99,73%	Unit	2	2	100,00%
Peningkatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Pada Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Kupang - Kota Kupang	DISNAV KELAS II KUPANG	25.631.662.000	25.457.056.225	99,32%	Unit	1	1	100,00%
Peningkatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Pada Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Sibolga - Kota Sibolga	DISNAV KELAS III SIBOLGA	12.882.450.000	12.827.438.570	99,57%	Unit	1	1	100,00%
Peningkatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Pada Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Pontianak - Kota Pontianak	DISNAV KELAS III PONTIANAK	9.273.008.000	9.260.000.000	99,86%	Unit	14	14	100,00%
Peningkatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Pada Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Tarakan - Kota Tarakan	DISNAV KELAS III TARAKAN	14.500.000.000	14.500.000.000	100,00%	Unit	20	20	100,00%
Peningkatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Pada Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Tual - Kota Tual	DISNAV KELAS III TUAL	20.621.883.000	20.009.740.000	97,03%	Unit	3	3	100,00%

Program / Kegiatan Prioritas	Satker	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
PN 05 -Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelalanan Dasar								
Peningkatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Pada Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Merauke - Kab. Merauke	DISNAV KELAS III MERAUKE	31.113.390.000	31.070.818.000	99,86%	Unit	2	2	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Pusat	SATKER LALA	439.208.848.000	439.208.848.000	100,00%	Layanan	30	30	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Aceh Jaya	UPP KELAS III CALANG	12.103.246.000	12.103.246.000	100,00%	Layanan	1	1	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kota Padang	KSOP KELAS II TELUK BAYUR	12.621.271.000	12.544.271.000	99,39%	Layanan	1	1	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kota Bengkulu	KSOP KELAS III BENGKULU / PULAU BAAI	10.557.134.000	10.469.000.000	99,17%	Layanan	1	1	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Bintan	KSOP KELAS III KIJANG	14.092.351.000	13.961.376.000	99,07%	Layanan	1	1	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Sumenep	KSOP KELAS IV KALIANGET	28.728.593.000	27.905.972.015	97,14%	Layanan	2	2	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kota Bima	KSOP KELAS IV BIMA	64.873.772.000	64.873.772.000	100,00%	Layanan	4	4	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Sumba Timur	KSOP KELAS IV WAINGAPU	45.772.932.159	45.772.932.159	100,00%	Layanan	2	2	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Sikka	KSOP KELAS IV MAUMERE / LAURENTIUS SAY	35.753.496.399	35.753.496.399	100,00%	Layanan	3	3	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Manggarai	UPP KELAS II REO	11.169.717.000	11.169.717.000	100,00%	Layanan	1	1	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kota Kupang	KSOP KELAS III KUPANG	25.980.621.000	25.980.621.000	100,00%	Layanan	2	2	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Sambas	KSOP KELAS IV SINTETE	10.272.492.000	10.152.685.000	98,83%	Layanan	1	1	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kota Pontianak	KSOP KELAS II PONTIANAK	15.725.416.000	15.725.416.000	100,00%	Layanan	1	1	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Kotabaru	KSOP KELAS III KOTABARU - BATULICIN	15.484.895.000	14.385.275.000	92,90%	Layanan	1	1	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kota Tarakan	KSOP KELAS III TARAKAN	12.657.970.000	12.587.767.000	99,45%	Layanan	1	1	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kota Bitung	KSOP KELAS II BITUNG	13.200.000.000	13.200.000.000	100,00%	Layanan	1	1	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Banggai	UPP KELAS III PAGIMANA	13.087.928.483	13.087.928.483	100,00%	Layanan	1	1	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Poso	UPP KELAS III POSO	12.486.976.000	12.298.208.543	98,49%	Layanan	1	1	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Parigi Moutong	UPP KELAS III PARIGI	12.938.207.000	12.975.000.000	100,28%	Layanan	1	1	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Tojo Una Una	UPP KELAS III AMPANA	14.529.527.000	14.529.527.000	100,00%	Layanan	1	1	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Morowali Utara	UPP KELAS III KOLONEDALE	17.511.966.000	17.511.548.000	100,00%	Layanan	1	1	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kota Palu	KSOP KELAS II TELUK PALU	18.662.011.000	18.646.411.000	99,92%	Layanan	1	1	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kota Makassar	SYAHBANDAR UTAMA MAKASSAR	15.089.181.100	15.089.181.100	100,00%	Layanan	1	1	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kota Kendari	KSOP KELAS II KENDARI	56.940.402.000	54.082.943.800	94,98%	Layanan	3	3	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Boalemo	UPP KELAS III TILAMUTA	13.640.074.205	13.640.074.205	100,00%	Layanan	1	1	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kota Gorontalo	KSOP KELAS III GORONTALO	66.849.545.000	66.509.544.507	99,49%	Layanan	3	3	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Mamuju	UPP KELAS I MAMUJU	10.610.445.000	10.415.000.000	98,16%	Layanan	1	1	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Kepulauan Tanimbar	UPP KELAS II SAUMLAKI	64.029.081.000	61.976.193.000	96,79%	Layanan	4	4	100,00%

Program / Kegiatan Prioritas	Satker	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
PN 05 -Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelalanan Dasar								
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Maluku Tenggara	UPP KELAS II TUAL	44.085.177.000	43.675.029.000	99,07%	Layanan	4	4	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Kepulauan Aru	UPP KELAS III DOBO	13.012.374.000	13.012.374.000	100,00%	Layanan	1	1	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kota Ambon	KSOP KELAS I AMBON	87.627.953.000	85.610.834.593	97,70%	Layanan	6	6	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Kepulauan Sula	UPP KELAS III SANANA	29.551.631.000	29.551.631.000	100,00%	Layanan	2	2	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Halmahera Selatan	UPP KELAS II BABANG	26.841.753.000	26.793.086.000	99,82%	Layanan	2	2	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kota Ternate	KSOP KELAS II TERNATE	28.425.859.000	28.425.774.000	100,00%	Layanan	2	2	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Manokwari	KSOP KELAS IV MANOKWARI	4.934.041.000	3.720.185.915	75,40%	Layanan	1	1	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kota Sorong	KSOP KELAS I SORONG	53.440.383.000	54.269.620.774	101,55%	Layanan	5	5	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Merauke	KSOP KELAS IV MERAUKE	46.277.358.879	43.884.408.879	94,83%	Layanan	6	6	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Biak Numfor	KSOP KELAS III BIAK	10.329.926.000	10.205.925.895	98,80%	Layanan	1	1	100,00%
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kota Jayapura	KSOP KELAS II JAYAPURA	17.586.452.000	16.996.377.000	96,64%	Layanan	2	2	100,00%
Layanan Angkutan Tol Laut Prioritas Nasional - Pusat	SATKER LALA	726.111.706.000	657.746.806.853	90,58%	Layanan	39	39	100,00%
Layanan Angkutan Ternak Prioritas Nasional - Pusat	SATKER LALA	72.091.632.000	69.009.001.480	95,72%	Layanan	6	6	100,00%
Pembangunan Pelabuhan Patimban (I) - Kab. Subang	KSOP KELAS II PATIMBAN	1.607.636.762.000	1.607.636.762.000	100,00%	Unit	1	1	100,00%
Patimban Port Development Project Phase I-2 (II) - Kab. Subang	KSOP KELAS II PATIMBAN	2.435.229.556.000	2.435.229.556.000	100,00%	Unit	1	1	100,00%
Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Namlea - Kab. Buru	UPP KELAS II NAMLEA	45.000.000.000	44.868.841.400	99,71%	Unit	1	1	100,00%
Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Sungai Nyamuk - Kab. Nunukan	UPP KELAS III SUNGAI NYAMUK	68.954.590.000	68.858.040.400	99,86%	Unit	1	1	100,00%
Pengembangan Fasilitas Sisi Darat Pelabuhan Matui - Kab. Halmahera Barat	UPP KELAS III JAILOLO	59.735.670.000	59.676.158.000	99,90%	Unit	1	1	100,00%
Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Lewoleba - Kab. Lembata	UPP KELAS III LEWOLEBA	53.796.040.000	53.781.198.500	99,97%	Unit	1	1	100,00%
Pengembangan Pelabuhan Pelabuhanratu - Kab. Sukabumi	KANTOR UPP KELAS III PELABUHAN RATU	-	-		Unit	1	0	0,00%
Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Kolonedale - Kab. Morowali Utara	UPP KELAS III KOLONEDALE	19.300.000.000	19.300.000.000	100,00%	Unit	1	1	100,00%
Pendampingan KPBU Lokasi Pelabuhan Patimban - Kota Administrasi Jakarta Pusat	KSOP KELAS II PATIMBAN	-	-		Unit	1	0	0,00%
Pendampingan KPBU Lokasi Pelabuhan Bau-Bau - Kota Administrasi Jakarta Pusat	SATKER KEPELABUHANAN	1.500.000.000	1.456.621.920	97,11%	Unit	1	1	100,00%
Patimban Port Development Project I-3 (III) - Kab. Subang	KSOP KELAS II PATIMBAN	100.000.000	-	0,00%	Unit	1	1	100,00%
Replacement Fasilitas Pelabuhan Laut Sofifi - Kota Tidore Kepulauan	UPP KELAS III SOFIFI	60.000.000.000	59.952.000.000	99,92%	Unit	1	1	100,00%
Pembangunan Jalan Lingkungan Pelabuhan Patimban - Kota Administrasi Jakarta Pusat	KSOP KELAS II PATIMBAN	29.000.000.000	26.476.770.023	91,30%	Unit	1	1	100,00%
Recovery / Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Pasipalele - Kab. Halmahera Selatan	UPP KELAS III SAKETA	87.000.000.000	86.152.190.000	99,03%	Unit	1	1	100,00%
Replacement Fasilitas Pelabuhan Kaimana - Kab. Kaimana	UPP KELAS III KAIMANA	50.000.000.000	49.976.663.000	99,95%	Unit	1	1	100,00%
Replacement Fasilitas Pelabuhan Benteng - Kab. Kepulauan Selayar	UPP KELAS III SELAYAR	32.946.890.000	32.785.887.000	99,51%	Unit	1	1	100,00%
Pembangunan Lapangan Penumpukan Pelabuhan Wini - Kab. Timor Tengah Utara	UPP WINI	15.411.760.000	15.393.515.400	99,88%	Unit	1	1	100,00%

Program / Kegiatan Prioritas	Satker	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
PN 05 -Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelalanan Dasar								
Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Reo - Kab. Manggarai	UPP KELAS II REO	47.000.000.000	46.999.999.160	100,00%	Unit	1	1	100,00%
Perkuatan Dermaga Pelabuhan Laut Kaledupa - Kab. Wakatobi	UPP KELAS III WANCI	40.000.000.000	39.914.477.114	99,79%	Unit	1	1	100,00%
Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Lerokis - Kab. Maluku Barat Daya	UPP KELAS III WONRELI	44.811.350.000	44.677.788.265	99,70%	Unit	1	1	100,00%
Pembangunan Fasilitas Pokok Pelabuhan Laut Ilwaki - Kab. Maluku Barat Daya	UPP KELAS III WONRELI	19.668.840.000	19.557.373.500	99,43%	Unit	1	1	100,00%
Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Luwuk - Kab. Banggai	UPP KELAS II LUWUK	54.200.000.000	54.049.074.772	99,72%	Unit	1	1	100,00%
Replacement Fasilitas Pelabuhan Sungai Guntung - Kab. Indragiri Hilir	UPP KELAS III SUNGAI GUNTUNG	20.451.910.000	13.972.718.016	68,32%	Unit	1	1	100,00%
Pendampingan KPBU Lokasi Pelabuhan Anggrek - Kota Administrasi Jakarta Pusat	KSOP KELAS IV ANGGREK	1.500.000.000	1.452.294.070	96,82%	Unit	1	1	100,00%
Pembangunan Dermaga Roro Kapal Negara dan Kapal Pelra Wae Kelambu - Kab. Manggarai Barat	KSOP KELAS III LABUHAN BAJO	-	-		Unit	1	0	0,00%
Pembangunan Fasilitas Sisi Darat Pelabuhan Gorom - Kab. Seram Bagian Timur	UPP KELAS III GESER	2.472.000.000	2.263.842.000	91,58%	Unit	1	1	100,00%
Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kilo - Kab. Dompu	UPP KELAS III CALABAI	4.539.000.000	4.538.088.000	99,98%	Unit	1	1	100,00%
Pengembangan Fasilitas Sisi Darat Pelabuhan Belang- Belang - Kab. Mamuju	UPP KELAS III BELANG - BELANG	6.353.997.000	6.223.828.000	97,95%	Unit	1	1	100,00%
Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Tobelo - Kab. Halmahera Utara	UPP KELAS I TOBELO	2.172.000.000	2.165.980.000	99,72%	Unit	1	1	100,00%
Pembangunan Dermaga Pariwisata Pendukung IKN - Kota Balikpapan	KSOP KELAS I BALIKPAPAN	-	-		Unit	1	0	0,00%
Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Tahuna - Kab. Kepulauan Sangihe	UPP KELAS II TAHUNA	44.000.000.000	42.995.276.949	97,72%	Unit	1	1	100,00%
Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Daruba - Kab. Pulau Morotai	UPP KELAS III DARUBA	6.717.344.000	6.672.343.335	99,33%	Unit	1	1	100,00%

3. Realisasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional

Realisasi Program Strategis Nasional di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut.

No.	Nama Pelabuhan	Target Selesai	Kewenangan	Keterangan
1	Pelabuhan Sorong	2024	BUMN	Progress selesai 100%. Nilai proyek Pengembangan Pelabuhan Sorong sebesar Rp 121,9 Miliar, dengan lingkup kegiatan:
2	Pelabuhan Benoa (Bali Maritime Tourism Hub)	2025	BUMN	Nilai proyek BMTH keseluruhan adalah sebesar Rp 6,06 Triliuan; Progres fisik Proyek per Akhir Desember 2024: Pengembangan Gate dan Perluasan Terminal Penumpang Internasional: 100% Pekerjaan Infrastruktur Dasar & Fas. Umum Penunjang Pariwisata: 100% Pekerjaan Revetment & Retaining Wall Dumping I: 100 % Dermaga Cruise Timur 160 m: 100% Pekerjaan Revetment & Retaining Wall Dumping II: 100% Pembangunan Taman Segara Kerthi: 100% Pembangunan Infrastruktur Dasar Dumping 1: 100% Pengerukan Alur & Kolam Paket A: 89,92% Pengerukan Alur & Kolam Paket B: 100%

No.	Nama Pelabuhan	Target Selesai	Kewenangan	Keterangan
3	Pelabuhan Patimban	2025	Kemenhub	**ANGGARAN**: - Rp. 8,979 Triliun (JICA LOAN IP-577) Jumlah Anggaran untuk pekerjaan Phase I-1 (Paket 1,2,3,8) - Rp. 9,210 Triliun (JICA LOAN IP-577 dan IP-588) Jumlah Anggaran untuk Paket 5 dan 6 **Progress Fisik** (per Desember 2024): **Tahap I (Selesai 100%)** Paket 1: progres 100 % (24 Juni 2021) Paket 2: progres 100 % (27 Nov 2021) Paket 3: progres 100% (13 Juli 2022) Paket 4: Progres 100% (30 Oktober 2020) **Tahap II (Selesai TA.2025)** Paket 5: Progres 70,14 % (Deviasi +1,46 %) 2.Paket 6: Progres 70,96% (Deviasi -1,72 %) 3.Paket 7A: Menunggu persetujuan tender 4.Paket 7B: Menunggu persetujuan tender 5.Paket 8: Progres 80,71% (Deviasi +1,31 %)

4. Realisasi Kegiatan Padat Karya

Realisasi Kegiatan Padat Karya di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut.

UNIT KERJA	LOKASI		ANGGARAN			TENAGA KERJA						UPAH		
	PROV	KAB / KOTA	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	TARGET (ORG)	REALISASI	%	TARGET (OH)	REALISASI	%	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
DJPL	32	189	1.586.240.191.000	1.524.790.557.219	96,1	11.193	10.474	93,58	73.753	73.717	99,95	54.699.019.543	80.427.436.169	147,04

Q. Realisasi Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Ikhtisar Laporan Keuangan Pinjaman Luar Negeri Direktorat Jenderal Perhubungan Laut T.A. 2024 terdapat pada Satker Kenavigasian Pusat, KSOP Patimban dan Satker Kepelabuhanan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Satker Kenavigasian Pusat	KSOP Patimban	KSOP Patimban	Satker Kepelabuhanan
1	Nama Pinjaman Luar Negeri	Development and Improvement of Indonesian Aids to Navigation Project	Loan IP-577: Japan International Cooperation Agency (JICA)	Loan IP-583: Japan International Cooperation Agency (JICA)	Loan 3792 - INO : Emergency Assistance for Rehabilitation and Reconstruction (EARR)
2	Pemberi Pinjaman	EDCF Korea	ODA Loan JICA No. IP-577	ODA Loan JICA No. IP-583	Asian Development Bank (ADB)
3	Nama Proyek	Development and Improvement of Indonesian Aids to Navigation (ATON) Project	Patimban Port Development Project (I)	Patimban Port Development Project (II)	Emergency Assistance for Rehabilitation and Reconstruction (EARR) Teluk Palu
4	*Loan ID*	NO. INA.24	IP-577	IP-583	L3792-INO
5	No. Register	12VL64MA	1AVH2LAA	1YSFCJAA	156H3E5A
6	*Date Sign*	27 April 2021	15 November 2017	20 Mei 2022	30 September 2019

No	Uraian	Satker Kenavigasian Pusat	KSOP Patimban	KSOP Patimban	Satker Kepelabuhanan
7	*Date Effective*	27 April 2021	13 Maret 2018	11 Oktober 2022	04 November 2019
8	*Closing Date*	25 Juni 2025	13 Maret 2026	11 Oktober 2030	31 Maret 2024
9	*Loan Amount*	USD 67.255.000	JPY 118.906.000.000	JPY 70.195.000.000	USD 109.750.000
10	*Disbursement* s.d. 2023	IDR 29.811.072.802	IDR 10.635.539.176.835	IDR 4.028.030.218.693	IDR 1.093.337.091.602
11	***Disbursement pada tahun 2024:***	IDR 26.751.685.989	IDR 1.457.732.185.575	IDR 2.429.869.645.406	IDR203.573.707.479
12	Belanja Tahun 2024 (Rupiah)				
	a. Belanja Pegawai				
	b. Belanja Barang				
	c. Belanja Modal	IDR 26.751.685.989	IDR 1.457.732.185.575	IDR 2.429.869.645.406	IDR203.573.707.479
	d. Belanja Bansos				
13	Neraca (Rupiah)				
	a. Aset Lancar				
	b. Aset Tetap	IDR 56.562.758.791	IDR 12.093.271.362.410	IDR 6.457.899.864.099	IDR 1.318.872.924.019
	c. Aset Lainnya				
	d. Kewajiban:				
14	*Executing Agency*	Directorate General of Sea Transportation (DGST)	Directorate General of Sea Transportation (DGST)	Directorate General of Sea Transportation (DGST)	Directorate General of Sea Transportation (DGST)
15	Pemeriksa	BPK	BPK dan BPKP	BPK dan BPKP	BPK

Sedangkan Ikhtisar Laporan Keuangan Hibah Luar Negeri Direktorat Jenderal Perhubungan Laut T.A. 2024 terdapat pada Satker Kenavigasian Pusat dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Satker Kenavigasian Pusat
1	Nama Hibah Luar Negeri	Project-5 Maintenance and Replacement of Aids to Navigation in the Straits of Malacca and Singapore
2	Pemberi Hibah	Aids to Navigation Fund / ANF
3	Nama Proyek	Maintenance and Replacement of Aids to Navigation in the Straits of Malacca and Singapore
4	*Grant ID*	GA.29.10.2008
5	No. Register	70878801
6	*Date Sign*	29 Oktober 2008
7	*Date Effective*	2009
8	*Closing Date*	31 Desember 2028
9	*Grant Amount*	USD 32.038.213
10	*Disbursement* s.d. 2023	IDR 128.496.125.221

No	Uraian	Satker Kenavigasian Pusat
11	***Disbursement pada tahun 2024:***	IDR 15.789.830.537
12	Belanja Tahun 2024 (Rupiah)	
	a. Belanja Pegawai	
	b. Belanja Barang	IDR 13.568.098.037
	c. Belanja Modal	IDR 2.221.732.500
	d. Belanja Bansos	
13	Neraca (Rupiah)	
	a. Aset Lancar	IDR 5.511.026.094
	b. Aset Tetap	IDR 2.221.732.500
	c. Aset Lainnya	
	d. Kewajiban:	
14	*Executing Agency*	Directorate General of Sea Transportation (DGST)
15	Pemeriksa	BPK

1. PHLN KSOP Patimban

Terdapat Ikhtisar Laporan Keuangan Pinjaman Luar Negeri pada KSOP Patimban Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

a. Patimban Port Development Project merupakan proyek pinjaman luar negeri kerjasama bilateral antara Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Jepang yang diwakili oleh Japan International Cooperation Agency (JICA). Proyek pembangunan pelabuhan Patimban dilakukan atas dasar Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penetapan Proyek Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat sebagai Proyek Strategis Nasional. Proyek pembangunan pelabuhan Patimban meliputi pembangunan pelabuhan dengan terminal kontainer yang diperkirakan berkapasitas sebesar 7,5 juta TEUs. Perkiraan kapasitas tersebut mempertimbangkan potensi pertumbuhan demand di wilayah timur Jawa Barat. Pembangunan pelabuhan ini merupakan strategi Pemerintah untuk mengurangi kelebihan kapasitas di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembangunan pelabuhan Patimban ini diharapkan juga dapat menjadi stimulator pengembangan wilayah di sekitar Subang. Skema pendanaan untuk proyek ini terdiri dari APBN dengan pinjaman luar negeri, APBD dan swasta. Secara khusus, proyek pembangunan pelabuhan Patimban bertujuan untuk mengurangi biaya logistik dengan mendekatkan pusat produksi dengan pelabuhan, mengurangi tingkat kepadatan lalu lintas di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dengan pembagian arus lalu lintas kendaraan, dan menjamin keselamatan pelayaran termasuk area eksplorasi migas.

b. Proyek pembangunan pelabuhan Patimban terdiri dari 8 paket pekerjaan yang terbagi dalam 2 fase, yaitu fase pertama terdiri dari Paket 1, 2, 3 dan 8 yang dikerjakan oleh

Kemenhub, sedangkan Paket 4 dilaksanakan oleh Kemen PUPR berupa pembangunan akses jalan. Fase kedua terdiri dari Paket 5, 6, dan 7 yang dikerjakan oleh Kemenhub. Tahap awal fase pertama, pelabuhan Patimban akan memiliki terminal kendaraan dengan dermaga sepanjang 300 meter, serta terminal peti kemas 420 x 35 m, total panjang dermaga keseluruhan adalah 4.320 mdengan kedalaman perairan -10 m LWS. Sedangkan lapangan peti kemas memiliki luas 35b hektar dengan kapasitas 250.000 TEUs dari total kapasitas tahap 1 sebesar 3,75 juta TEUs. Selanjutnya di tahap pertama fase kedua nantinya terminal kendaraan menjadi 690 meter, sedangkan terminal peti lemas diperpanjang dan diperluas menjadi 1.740 x 35 m dengan kedalaman -14 m LWS. Lapangan peti kemas juga ditambah seluas 66 hektar dengan kapasitas 3,5 juta TEUs.

c. Paket 1 (Dermaga dan Reklamasi). Pekerjaan dalam Paket 1 meliputi pembangunan fasilitas terminal peti kemas, area tunggu truk, terminal peti kemas, terminal mobil, akses jalan, penambahan kedalaman alur dan kolam, bangunan serta fasilitas mekanis dan kelistrikan. Paket ini dikerjakan oleh konsorsium yang beranggotakan 5 perusahaan konstruksi dari Jepang dan Indonesia yaitu: Penta Ocean Construction, Toa Corporation, Rinkai Nissan Construction, PT. PP (Persero) Tbk, dan PT Wijaya Karya Tbk. Progress Fisik Pekerjaan Paket 1 telah selesai 100%.
d. Paket 2 (Breakwater dan Seawall). Paket ini dikerjakan oleh konsorsium yang beranggotakan 3 perusahaan konstruksi dari Jepang dan Indonesia yaitu: Toyo Construction, Wakachiku Construction, dan PT. Adhi Karya (Persero). Progress Fisik Pekerjaan Paket 1 telah selesai 100%.
e. Paket 3 (Jembatan Akses). Paket ini dikerjakan oleh konsorsium yang beranggotakan 2 Perusahaan Konstruksi dari Indonesia yaitu: PT. Wijaya Karya (WIKA) dan PT. Pembangunan Perumahan (PP). Progress Fisik Pekerjaan Paket 3 sebesar 96,4%.
f. Paket 8 (Konsultan). Konsultan dalam Paket 8 ini dikerjakan oleh konsorsium yang beranggotakan 6 perusahaan yaitu: Oriental Consultan Global Co Ltd, Ides Inc, Nippon Koei Co Ltd, PT. Raya Konsult, PT. Rayasurverindo Tirtasarana, dan PT Indra Karya (Persero).
g. Anggaran Pinjaman Luar Negeri Tahun 2021 pada KSOP Patimban sebesar Rp1.729.813.739.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.591.269.793.607 atau 91,99%. Realisasi tersebut menambah nilai KDP Gedung dan Bangunan NUP 1.
h. Nilai KDP sebesar Rp6.101.082.236.570,- (enam triliun seratus satu milyar delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) bersumber dari dana PHLN merupakan Pekerjaan Kontruksi Paket 1 Phase I-1 bagian dari

pekerjaan pembangunan Konstruksi Terminal sesuai dengan kontrak addendum ke-4 nomor : PL.102/01/VII/KTRPLN-PTB/2018 tanggal : 8 Desember 2021 dengan target penyelesaian 760 hari (25 Bulan) serta terdapat Extension of Time (EoT) 210 hari (7 bulan). Pekerjaan Pembangunan Kontruksi Terminal sudah selesai pada tanggal 24 Juni 2021 akan tetapi masih ada proses administrasi kontraktual untuk penyesuaian harga, klaim dan retensi pekerjaan kontruksi yang akan dibayarkan pada TA. 2022 sesuai dengan DIPA Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban TA. 2022 Nomor: SP DIPA- 022.04.2.021140/2022 tanggal 17 November 2021;

i. Nilai KDP sebesar Rp1.689.063.003.452,- bersumber dari dana PHLN merupakan Pekerjaan Kontruksi Paket 2 Phase I-1 bagian dari pekerjaan pembangunan Breakwater, Seawall, and Channel Dredging Works sesuai dengan kontrak addendum ke-5 nomor : PL.102/03/XI/KTRPLN-PTB/2018 tanggal : 26 November 2021 dan sudah selesai pada tanggal 27 November 2021 akan tetapi masih ada proses administrasi kontraktual untuk penyesuaian harga, klaim dan retensi pekerjaan kontruksi yang akan dibayarkan pada TA. 2022 sesuai dengan DIPA Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban TA. 2022 Nomor: SP DIPA- 022.04.2.021140/2022 tanggal 17 November 2021;
j. Nilai KDP sebesar Rp415.474.823.695,- bersumber dari dana PHLN merupakan Pekerjaan Kontruksi Paket 3 Phase I-1 bagian dari pekerjaan pembangunan Jembatan Penghubung sesuai dengan kontrak addendum ke-2 nomor: PL.107/2/II/KSOP-PMB/2020 tanggal; 09 Desember 2021 dengan target penyelesain pada tanggal 23 Mei 2022.
k. Nilai KDP sebesar Rp320.674.875.180,- bersumber dari dana PHLN merupakan Pekerjaan Supervisi dari Paket Pekerjaan Kontruksi Paket 1, 2 dan 3 Pembangunan Pelabuhan Patimban Phase I-1, serta dilanjutkan dengan Supervisi Kontruksi Pembangunan Pelabuhan Patimban Phase I-2 pada Pekerjaan Paket 5 dan 6.
l. Terdapat pendefinitifan KDP menjadi Aset Tetap selama Tahun 2023 sebesar Rp7.540.316.972.133,-. Dengan demikian, Nilai KDP KSOP Patimban Tahun 2023 sebesar Rp2.090.955.159.844,-.
m. Kegiatan Pembangunan Patimban Port Development Project (I) atas Belanja Modal senilai Rp1.757.821.364.192,- atau sebesar 62,21% pada Semester I T.A. 2024 atas beberapa paket pekerjaan, antara lain:
    1) Paket 2: Breakwater, Seawall, dan Channel Dredging senilai Rp41.256.161.850,-
    2) Paket 5: Konstruksi Terminal Kendaraan (IP-577) senilai Rp185.613.898.789,-

3) Paket 8: Konsultan Desain dan Supervisi senilai Rp25.561.873.721,-
4) Paket 5: Konstruksi Terminal Kendaraan (IP-583) senilai Rp618.196.807.299,-
5) Paket 6: Konstruksi Terminal Kontainer No. 2 senilai Rp887.192.622.533,-

n. Progres fisik dan keuangan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Patimban sumber dana PHLN dengan rincian sebagai berikut:
1) Pekerjaan fisik Paket 1 telah selesai 100% pada 24 Juni 2021 dengan progres keuangan saat ini sebesar 100% dimana telah dilaksanakan Final Hand Over (FHO) dan final payment;
2) Pekerjaan fisik Paket 2 telah selesai 100% pada tanggal 27 November 2021 dengan progres keuangan sebesar 100% dimana telah dilaksanakan Final Hand Over (FHO) dan final payment;
3) Pekerjaan fisik Paket 3 telah selesai 100% pada tanggal 13 Juli 2022 dengan progres keuangan sebesar 100% dimana telah dilaksanakan Final Hand Over (FHO) dan final payment;
4) Pekerjaan Paket 5 saat ini sedang berjalan dengan progres pekerjaan fisik sebesar 72,551% dengan deviasi sebesar +0,867% dari target rencana 71,684% dan progres keuangan sebesar 61,50% dengan deviasi sebesar +0,00% dari target rencana 61,50%;
5) Pekerjaan Paket 6 saat ini sedang berjalan dengan progres pekerjaan fisik sebesar 71,80% dengan deviasi sebesar -2,3% dari target rencana 74,00% dan progres keuangan sebesar 65,59% dengan deviasi sebesar +0,00% dari target rencana 65,59%;
6) Pekerjaan Paket 8 saat ini sedang berjalan dengan progres pekerjaan fisik sebesar 80,89% dengan deviasi sebesar +0,18% dari target rencana 80,71% dan progres keuangan sebesar 79,77% dengan deviasi sebesar -1,02% dari target rencana 80,79%;
7) Sesuai surat Direktur Kepelabuhanan Nomor AL.316/4/9/DP-24 tanggal 4 November 2024 perihal Rekomendasi Teknis Dokumen Studi Reviu Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Pelabuhan Patimban Fase I-2 dan Draf Bidding Documents Paket 7a dan 7b, bahwa Laporan Reviu DED Proyek Pembangunan Pelabuhan Patimban Fase I-2 dan Bidding Documents Paket 7a dan Paket 7b telah diselesaikan dan telah mendapatkan rekomendasi teknis dari Direktorat Kepelabuhanan dan saat ini masih menunggu arahan pelaksanaan tender Pekerjaan Konstruksi Paket 7a dan Paket 7b Proyek Pembangunan Pelabuhan Patimban Fase I-2 dari Pak Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

o. Terdapat selisih nilai kurs untuk pengajuan pembayaran yang bersumber dari dana PHLN yang menyebabkan perbedaan nilai realisasi antara nilai pengajuan dari satker berupa Surat Permintaan Penerbitan Pengajuan Aplikasi Penarikan Dana PLN (SPDPL) sampai terbitnya Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) dan baru tercatat sebagai realisasi penyerapan anggaran. Nilai kurs yang digunakan dalam pengajuan pembayaran ke KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah adalah nilai kurs kontrak pada masing-masing paket pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:

1) Paket 2: 1JPY = 120,7729 IDR
2) Paket 3: Tidak ada, karena hanya porsi IDR
3) Paket 5: 1JPY = 125,786 IDR
4) Paket 6: 1JPY = 124,533 IDR
5) Paket 8: 1JPY = 129,9128 IDR

Sedangkan untuk nilai kurs yang digunakan dalam Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) adalah nilai kurs pada saat SP3 tersebut terbit.

2. PHLN ANF-Satker Kenavigasian Pusat

Terdapat Ikhtisar Laporan Keuangan Pinjaman/Hibah Luar Negeri pada Satker Kenavigasian Pusat Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

a. *Aids to Navigation Fund* (ANF) merupakan salah satu komponen *Cooperative Mechanism* yang didirikan oleh tiga negara pantai (Indonesia, Malaysia, dan Singapura) dengan tujuan untuk menghimpun kontribusi dari *User States* dan *Stakeholders* dalam mengelola dan memelihara Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di Selat Malaka dan Singapura. ANF sendiri dioperasikan dengan *Rules of Procedure* serta *Rules and Regulation* yang diatur dan disetujui oleh Komite ANF sebagai badan tertinggi yang terdiri dari wakil-wakil tiga negara pantai, *User States and Stakeholder* yang berkontribusi serta IMO sebagai pengamat. ANF bersidang setiap 6 bulan di negara sekretariat untuk menerima laporan, membahas serta memutuskan kebijakan mengenai isu-isu yang berkembang dalam pengelolaan ANF.

b. Belanja dengan Sumber Dana Hibah Luar Negeri s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp15.789.830.537,-. Belanja tersebut merupakan Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219) senilai Rp3.339.921.943,-. Belanja Jasa Konsultan (522131) senilai Rp4.717.150.000,- dan Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523123) senilai Rp5.511.026.094,-. serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan (533111) senilai Rp2.221.732.500,-.

c. Belanja dengan Sumber Dana Pinjaman Luar Negeri s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp26.751.685.989,- yang merupakan Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

d. Terdapat Saldo Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada Satker Kenavigasian Pusat T.A. 2024 sebesar Rp3.763.629.263,-. Saldo Kas atas Hibah Luar Negeri berupa USD232.869,03 dengan Kurs Tengah BI 31 Desember 2024 Rp16.162. Penyajian berdasarkan Kurs Tengah BI dengan menunjuk Surat Kepala KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah Nomor S-600/KPN.1208/2024 tanggal 31 Desember 2024 hal Mekanisme Pembukaan Hibah Langsung Bentuk Uang Dalam Mata Uang Asing Sebagai Bentuk Implementasi Per-9/PB/2022 dan Surat KPA Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat Nomor 01/U/PKP/I-25 tanggal 02 Januari 2025.

3. PHLN EARR-Direktorat Kepelabuhanan

Terdapat Ikhtisar Laporan Keuangan Pinjaman/Hibah Luar Negeri pada Direktorat Kepelabuhanan Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

a. Direktorat Kepelabuhanan c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ditunjuk sebagai Central Project Management Unit (CPMU) atau sebagai Koordinator di Kementerian Perhubungan dalam menyajikan Laporan Keuangan EARR Tahun Anggaran 2024.

b. Total Pagu Belanja PHLN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp524.448.611.000. dengan total realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp519.324.544.038,- (99,02%) dengan rincian Pagu PHLN Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Kepelabuhan Pusat sebesar Rp250.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp249.975.000.000,- (99,99%) dan Pagu PHLN Satuan Kerja Direktorat Bandar Udara sebesar Rp274.448.611.000,- dengan realisasi sebesar Rp269.349.544.038,- (98,14%).

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp183.641.020.840 berupa Advance Payment (Uang Muka) Tahap II dan Termin 1-6 pada Works-Reconstruction of Terminal And Other Buildings Emergency Assistance for Rehabilitation and Reconstruction Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri. Nilai tersebut telah tercatat sebagai Pengembangan KDP di Kartu KDP Direktorat Bandar Udara sebagai Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan NUP 5.

d. Belanja Modal JIJ sebesar Rp335.683.523.198.- berupa:

1) Jasa Konsultansi Supervisi: Rehabilitation and Reconstruction Pelabuhan Pantoloan, Wani, dan Donggala sebesar Rp14.475.990.000,-. Nilai tersebut merupakan pembayaran atas Termin 10-12 yang telah tercatat sebagai Pengembangan KDP di Kartu KDP Satker Kepelabuhanan sebagai Jalan dan Jembatan dalam Pengerjaan NUP 7.

2) Civil Works (CW) Seaport 1: Works for Reconstruction of Donggala Port sebesar Rp139.262.310.160,-. Nilai tersebut merupakan pembayaran uang muka dan Temin 8-17 yang telah tercatat sebagai Perolehan dan Pengembangan KDP di Kartu KDP

Satker Kepelabuhanan sebagai Jalan dan Jembatan dalam Pengerjaan NUP 9. Terdapat Koreksi Audited BPK RI atas koreksi perubahan nilai KDP bertambah sebesar Rp5.503.097.333,00- pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Berdasarkan Surat Keterangan Direktur Kepelabuhanan Nomor: 009/PFKP/SK/2023 tanggal 12 April 2023, menyatakan bahwa dilakukan koreksi perubahan nilai tambah terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Pelabuhan Donggala dari hasil inventarisasi yang telah dilakukan KSOP Teluk Palu yang kemudian telah diserahterimakan kepada supplier pekerjaan KDP Pelabuhan Donggala berupa 108 unit Tiang Pancang Nomor PL.202/1/07/KSOP Tlk.Palu-2022, PL.202/1/08/KSOP Tlk.Palu-2022, dan PL.202/1/09/KSOP Tlk.Palu-2022.

3) Civil Works (CW) Seaport 2: Works for Reconstruction of Wani Port sebesar Rp86.441.537.082,-. Nilai tersebut merupakan pembayaran uang muka dan Termin 4-13 yang telah tercatat sebagai Perolehan dan Pengembangan KDP di Kartu KDP Satker Kepelabuhanan sebagai Jalan dan Jembatan dalam Pengerjaan NUP 10.
4) Civil Works (CW) Seaport 3: Works for Reconstruction of Pantoloan Port sebesar Rp9.795.162.758,-. Nilai tersebut merupakan pembayaran atas Termin 10 yang telah tercatat sebagai Pengembangan KDP di Kartu KDP Satker Kepelabuhanan sebagai Jalan dan Jembatan dalam Pengerjaan NUP 8.
5) Jasa Konsultansi Supervisi: Rehabilitation and reconstruction Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri sebesar Rp2.938.418.001,-. Nilai tersebut merupakan pembayaran atas Termin 12-16 yang telah tercatat sebagai Pengembangan KDP di Kartu KDP Direktorat Bandar Udara sebagai Jalan dan Jembatan dalam Pengerjaan NUP 17.
6) Civil Works (CW) Airport 1: Works-Reconstruction Of Runway Emergency Assistance For Rehabilitation And Reconstruction Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri sebesar Rp82.770.105.197,-. Nilai tersebut merupakan pembayaran Termin 6-9 dan Retensi yang telah tercatat sebagai Pengembangan KDP di Kartu KDP Direktorat Bandar Udara sebagai Jalan dan Jembatan dalam Pengerjaan NUP 18.

e. Keterangan Project Timeline pelaksanaan EARR sub Komponen Pelabuhan adalah sebagai berikut:
   1) Paket Consulting Services (CS) 2 Seaport: Design and Construction Supervision dimulai pada tanggal 30 September 2020 terdiri dari jasa konsultasi desain dan supervisi, pekerjaan desain telah selesai 100% pada bulan Desember 2021. Sedangkan pekerjaan supervisi berjalan seiringan dengan pekerjaan konstruksi dan telah dimulai sejak Oktober 2021 serta direncanakan selesai pada Juni 2023.

2) Paket Civil Works (CW) Seaport 1: Works for Reconstruction for Donggala Port telah selesai proses perencanaan sejak bulan November 2021 dan saat ini masih dalam proses konstruksi. Pelaksanaan konstruksi paket CW Seaport 1 dimulai pada bulan Februari 2022 dan direncakanan selesai pada Juni 2023.
3) Paket Civil Works (CW) Seaport 2: Works for Reconstruction for Wani Port telah selesai proses perencanaan sejak bulan Desember 2021 dan saat ini sedang proses konstruksi. Pelaksanaan konstruksi paket CW Seaport 2 dimulai mulai pada bulan April 2022 dan direncanakan selesai pada April 2023.
4) Paket Civil Works (CW) Seaport 3: Works for Reconstruction for Pantoloan Port telah selesai 100% pada tanggal 22 November 2022. Penyelesaian pekerjaan konstruksi mengalami keterlambatan, dari semula rencana penyelesaian di 12 November 2022.
5) Berdasarkan acuan Project Administration Manual (PAM) Loan 3792 – INO pelaksanaan konstruksi agar dapat diselesaikan pada akhir Maret 2023 dan Loan Agreement Closing Date akan jatuh pada tanggal 30 September 2023. Namun terdapat indikasi penyesuaian PAM dan perpanjangan Loan Closing Date sehubungan dengan kondisi proyek di lapangan

f. Keterangan Project Timeline pelaksanaan EARR sub Komponen Bandar Udara adalah sebagai berikut:
1) Paket Consulting Services (CS) 1 Airport: Design & Construction Supervision dimulai pada tgl 31 Agustus 2021 terdiri dari jasa konsultasi desain dan supervisi. Pekerjaan desain telah selesai 100% pada bulan Mei 2022 dan saat ini masuk pekerjaan supervisi. Telah dilakukan addendum untuk menyesuaikan waktu supervisi terhadap waktu konstruksi sehingga waktu kontrak DSC berakhir pada 31 Maret 2023.
2) Paket Civil Works (CW) Airport 1: Works - Reconstruction of Runway untuk proses tender pekerjaan CW 1 selama 4 bulan dari Juni 2022 s.d. September 2022. Pelaksanaan konstruksi paket CW 1 dilaksanakan selama 540 hari dimulai 30 September 2022 s.d. 24 Maret 2023.
3) Paket Civil Works (CW) Airport 2: Reconstruction of Terminal and Other Buildings untuk proses tender paket pekerjaan CW 2 dilakukan selama 4 bulan dari Agustus 2022 s.d. November 2022. Pelaksanaan Konstruksi Paket CW 2 dilaksanakan selama 480 hari terhitung dari tanggal 30 September 2021 s.d. 12 November 2022.

4) Berdasarkan acuan Project Administration Manual (PAM) Loan 3792 – INO pelaksanaan konstruksi agar dapat diselesaikan pada akhir Maret 2023 dan Loan Agreement Closing Date akan jatuh pada tanggal 30 September 2023.

g. Nilai aset tetap T.A. 2024 senilai Rp 1.318.872.924.019,- lebih besar dari total realisasi penyerapan sampai dengan T.A. 2024 senilai Rp1.296.910.799.081,- terdapat selisih senilai IRp21.962.124.938,- (selisih pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut senilai Rp17.326.410.999,- dan selisih Direktorat Jenderal Perhubungan Udara senilai Rp4.635.713.939,-) dengan rincian sebagai berikut:

1) Koreksi nilai tambah senilai Rp5.503.097.333,- pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berdasarkan Surat Keterangan Direktur Kepelabuhanan Nomor:009/PFKP/SK/2023 tanggal 12 April 2023, menyatakan bahwa dilakukan koreksi perubahan nilai tambah terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Pelabuhan Donggala dari hasil inventarisasi yang telah dilakukan KSOP Teluk Palu yang kemudian telah diserahterimakan kepada supplier pekerjaan KDP Pelabuhan Donggala berupa 108 unit Tiang Pancang Nomor PL.202/1/07/KSOP Tlk.Palu-2022, PL.202/1/08/KSOP Tlk.Palu-2022, dan PL.202/1/09/KSOP Tlk.Palu-2022;
2) Koreksi nilai tambah senilai Rp9.286.736.400 pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang merupakan nilai kontrak konsultan PMU (Project Management Unit EARR Pelabuhan Teluk Palu) yang bersumber dari Rupiah Murni berdasarkan kontrak No.1/KONTRAK/PMU/VII/2021 tanggal 29 Juli Amandemen No. 2/ADD-1/PMU/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023;
3) Koreksi nilai tambah senilai Rp4.083.764.530 pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang merupakan denda keterlambatan atas Civil Works 1: Reconstruction of Donggala Port;
4) Koreksi nilai tambah senilai Rp484.254.208 pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang merupakan denda keterlambatan atas Civil Works 3: Reconstruction of Pantoloan Port;
5) Koreksi nilai kurang senilai Rp755.954.300 pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang merupakan pengembalian atas temuan BPK pada Civil Works 1: Reconstruction of Donggala Port berdasarkan LHP BPK RI No. 23.a/LHP/XIV/06/2024 tanggal 14 Juni 2024;
6) Koreksi nilai kurang senilai Rp661.487.173 pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang merupakan pengembalian atas temuan BPK pada Civil Works 1: Reconstruction of Wani Port berdasarkan LHP BPK RI No. 23.a/LHP/XIV/06/2024 tanggal 14 Juni 2024;

7) Koreksi nilai kurang senilai Rp614.000.000 pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang merupakan pengembalian atas temuan BPK pada Civil Works 1: Reconstruction of Pantoloan Port berdasarkan LHP BPK RI No. 23.a/LHP/XIV/06/2024 tanggal 14 Juni 2024.
8) Koreksi nilai tambah senilai Rp5.099.064.675 pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang merupakan denda atas keterlambatan atas Civil Works 1: Reconstruction of Runway;
9) Koreksi nilai kurang senilai Rp66.119.280 pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berdasarkan LHP BPK RI No. 23.a/LHP/XIV/06/2024 tanggal 14 Juni 2024;
10) Koreksi nilai kurang senilai Rp397.231.456 pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berdasarkan LHP BPK RI No. 23.a/LHP/XIV/06/2024 tanggal 14 Juni 2024.

h. Realisasi Belanja Modal atas Kegiatan Pembangunan Emergency Assistance for Rehabilitation and Reconstruction (EARR) Teluk Palu pada T.A. 2024 senilai Rp203.573.707.479,-. Realisasi Belanja Modal tersebut telah menambah Nilai KDP pada Satker Kepelabuhanan yang kemudian akan ditransfer ke Satker Penerima dalam Wilayah Kerja setempat, yaitu KSOP Teluk Palu.
i. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset Hasil Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pelabuhan Pantoloan Pada Satker Peningkatan Fungsi Kepelabuhanan Pusat Kepada Kantor KSOP Kelas II Teluk Palu Nomor 001/PFKP/BASTA/2024 tanggal 21 Mei 2024, bahwa telah dilakukan transfer aset dengan total nilai Rp55.066.153.027,-
j. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset Hasil Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pelabuhan Wani Pada Satker Peningkatan Fungsi Kepelabuhanan Pusat Kepada Kantor KSOP Kelas II Teluk Palu Nomor 002/PFKP/BASTA/2024 tanggal 21 Mei 2024, bahwa telah dilakukan transfer aset dengan total nilai Rp203.736.855.284,-.
k. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset Hasil Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pelabuhan Donggala Pada Satker Peningkatan Fungsi Kepelabuhanan Pusat Kepada Kantor KSOP Kelas II Teluk Palu Nomor 003/PFKP/BASTA/2024 tanggal 21 Mei 2024, bahwa telah dilakukan transfer aset dengan total nilai Rp495.072.773.001,-.
l. Berdasarkan Surat Direktur Kepelabuhanan Nomor AL.316/5/11/OP-24 kepada Kepala KSOP Teluk Palu tanggal 05 Desember 2024 Hal Penyampaian Rekomendasi Kapitalisasi Aset bahwa atas KDP yang telah ditransfer harus dilakukan kapitalisasi ke Aset Dermaga Pelabuhan Wani dan Aset Dermaga Pelabuhan Donggala.
m. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Klaim Dalam Amandemen Kontrak Consulting Service (CS) 2: Design and Construction Supervision Consultant pada Satuan Kerja

Peningkatan Fungsi Kepelabuhan Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor PE.04.03/LHP-25/D503/2/2024 tanggal 11 Oktober 2024 bahwa terdapat koreksi audit sebesar Rp573.499.828,- atas *Remunerasi International Expert* tidak didukung bukti, koreksi audit atas *Reimbursable Expenses* (biaya yang dapat diganti) karena biaya *Duty Travel* dan Biaya *Supporting Staff* tidak didukung bukti dan biaya *Office Rent* yang tidak sesuai dengan ketentuan kontrak, serta koreksi audit atas *Provisional Sums* karena biaya *Reporting* Pengurusan Amdal tidak didukung dengan bukti.

R. Gambaran Umum Salvage dan Pekerjaan Bawah Air T.A. 2024, serta Pengadaan Kapal RHAB, Senjata, dan Amunisi

1. Jasa Salvage dan Pekerjaan Bawah Air

Pipa dan Kabel Bawah Laut merupakan insfrastruktur penting sebagai penunjang perekonomian nasional yang harus dijaga keberadaannya. hal ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk membentuk tim nasional penataan alur pipa dan/atau kabel bawah laut. Dengan telah tergambarnya pipa/kabel bawah laut di peta laut indonesia akan meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran dalam menunjang kebutuhan listrik dan gas bumi serta kecukupan provider akan menjangkau seluruh wilayah nusantara. Salvage adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan berbahaya di perairan termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintangan bawah air atau benda lainnya, Objek Salvage antara lain:

a. Kapal yang mengalami kecelakaan (diketahui pemiliknya);
b. Kerangka kapal (tidak diketahui atau ditinggalkan pemiliknya);
c. Benda yang tidak secara permanen dipasang di perairan
d. Benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam

Metode pelaksanaan salvage:

a. Survey
b. Pemindahan Muatan dan/atau bahan bakar (cargo and fuel transferring)
c. Penarikan (Towing)
d. Pengapungan (Refloating); dan/atau
e. Pemotongan, penutuhan (Scrapping) atau penghancuran

Pengertian Pekerjaan Bawah Air (PBA) adalah pekerjaan yg berhubungan dg instalasi, konstruksi, atau kapal yg dilakukan dibawah air dan/atau pekerjaan dibawah air yg bersifat khusus, yaitu penggunaan peralatan bawah air yg dioperasikan dari permukaan air, Objek PBA antara lain:

a. Pipa bawah laut;
b. Kabel bawah laut;
c. Bangunan atau instalasi di perairan;
d. Jembatan atau kabel udara yg melintasi perairan yg digunakan sebagai alur pelayaran;
e. Fasilitas migas yg bukan termasuk Tersus/TUKS.

Upaya-upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam melaksanakan pengamanan terhadap bangunan dan/atau instalasi di perairan antara lain dengan memberikan ketentuan teknis penempatan, pemendaman dan penandaan terhadap bangunan dan instalasi di perairan yang akan dibangun dan telah dicantumkan pada surat izin membangun bangunan dan/atau instalasi di perairan yang diberikan kepada pemilik bangunan dan/atau instalasi di perairan meliputi teknis penempatan pipa/kabel bawah laut, pemendaman dan perlindungan pipa/kabel bawah laut, penandaan dengan pemasangan sarana bantu navigasi, penetapan batas-batas zona keamanan dan keselamatan berlayar, pemberitaan melalui maklumat pelayaran dan berita pelaut indonesia dan disiarkan melalui stasiun radio pantai serta kajian analisa resiko serta mitigasi teknis pengamanan dan proteksi bawah air dan hal yang sangat penting adalah pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar.

Seksi Pekerjaan Bawah Air mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, pemindahan dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi di perairan, kegiatan penyelaman, penanganan kerangka kapal dan salvage serta penetapan kualifikasi teknis petugas penyelam, salvage dan pekerjaan bawah air. Pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Bawah Air diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berisiko, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013, PM 33 tahun 2016 dan PM 38 Tahun 2018 tentang salvage dan/atau pekerjaan bawah air dan peraturan Menteri Perhubungan PM 129 Tahun 2016 tentang alur pelayaran di laut dan bangunan dan/atau instalasi diperairan dengan tujuan memberikan legalitas kepada badan usaha ataupun pelaku usaha dalam menjalankan usaha dalam menjalankan usaha dan kegiatannya dibidang salvage dan pekerjaan bawah air, menciptakan dan meningkatkan pengamanan terhadap pelaku usaha bidang salvage dan pekerjaan bawah air, meningkatkan peranan Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

Dalam rangka percepatan perizinan bidang salvage dan/atau pekerjaan bawah air

melalui aplikasi online system yang terintegrasi dengan aplikasi OSS, dan hingga saat ini perizinan masih dilaksanakan semi online, untuk percepatan hal tersebut diatas maka akan proses perizinan akan dimasukan ke dalam aplikasi Sistem Elektronik Hubla Terintegrasi (SEHATI) yang sudah terintegrasi dengan OSS-BR yang telah memiliki hak akses dengan BKPM dan PUSTIKOM sehingga pelayanan diharapkan lebih transparan dan akuntabel, untuk itu sehingga perlu dilaksanakan konsinyering integrasi pelayanan perizinan bidang salvage dan pekerjaan bawah air pada aplikasi SEHATI dan pembahasan Proses Bisnis untuk pelayanan salvage dan pekerjaan bawah air dengan tujuan, yaitu:

a. Meningkatkan pelayanan yang saat ini belum optimal melalui layanan berbasis teknologi informasi aplikasi SEHATI sehingga dapat memberikan perijinan yang efektif, efisien, transparan dan akuntable, dengan pengembangan SEHATI untuk perizinan kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air berbasis online system yang akan bersinergi dengan layanan SIMKPLP.
b. Dengan pelayanan perijinan melalui aplikasi SEHATI diharapkan akan terwujudnya pelayanan berbasis online untuk kegiatan perizinan salvage dan pekerjaan bawah air, sehingga para pengguna akan mempermudah permohonan dari pihak ketiga lebih cepat diproses.

Rekapitulasi perusahaan salvage dan/atau pekerjaan bawah air tahun 1990 s.d 2019 jumlah perusahaan salvage dan/atau perusahaan pekerjaan bawah air kurang lebih 250 perusahaan dan pertumbuhan siup pba setelah KM 23 tahun 1990 dan sesudah PM 71 tahun 2013 serta siup salvage dan pekerjaan bawah air sesuai dengan PM 71 tahun 2013 melalui proses di bkpm dan oss sesuai dengan PM 33 tahun 2016 dan PM 89 tahun 2018 tidak terlalu signifikan,dan dari hasil penilaian perusahaan salvage dan/atau pekerjaan bawah air yang dilakukan oleh direktorat kesatua penjagaan laut dan pantai dengan aspek penilaian terhadap perusahaan antara lain meliputi aspek administrasi, teknis, sarana dan prasarana, operasional maupun pelaporan hasil pekerajaan, perusahaan savage dan/atau pekerjaan bawah air hanya 58 perusahaan yang aktif dari kurang lebih 250 perusahaan yang memiliki SIUP Salvage dan Pekerjaan Bawah Air.

Pendataan perizinan perusahaan Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air yang belum pernah dilaksanakan sejak tahun 1990 s.d. 2019, dan sesuai dengan data yang ada bahwa Izin yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Maupun BKPM bahwa jumlah perusahaan Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air kurang lebih 250 perusahaan dan pertumbuhan SIUP PBA setelah KM 23 tahun 1990 dan sesudah PM 71 tahun 2013 serta SIUP Salvage dan Pekerjaan Bawah Air sesuai dengan PM 71 tahun 2013 melalui proses di BKPM dan OSS sesuai dengan PM 33 tahun 2016 dan PM 89 tahun 2018 tidak

terlalu signifikan,sehingga Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai membuat satu penilaian terhadap perusahaan salvage dan/atau pekerjaan bawah air dengan aspek penilaian antara lain meliputi aspek administrasi, teknis, sarana dan prasarana, operasional maupun pelaporan hasil pekerjaan.

Sesuai dengan sifat pekerjaan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air yang cukup cepat dibutuhkan Percepatan Penerbitan Izin Kegiatan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, terutama pada kegiatan-kegiatan yang masa kontraknya pendek khususnya dibidang penyelaman, inspection ataupun perbaikan Pipa atau Sistim Komunikasi Kabel Bawah Laut (SKKL) sangat dibutuhkan penerbitan Izin Kegiatan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air yang lebih cepat sesuai dengan peruntukannya. Penerbitan Surat Izin Usaha Perusahaan Salvage dan/atauPekerjaan Bawah Air, Penerbitan Surat Izin Kegiatan Salvage dan/atauPekerjaan Bawah Air dan Penerbitan Surat Izin membangun /memindahkan, membongkar dan jangka waktu pemanfaatan bangunan atau instalasi bawah air maka dianggap perlu memberikan pelayanan optimal kepada para pengguna jasa yang sehingga menghasilkan perizinan berjalan dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan salah satunya adalah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen KPLP (SIMKPLP).

Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai memperhatikan kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air dalam aspek keselamatan, pelayaran dan perlindungan maritim sehingga perlu adanya pengawasan terhadap kegiatan tersebut, dengan perihal diatas maka Dorektorat Penjagaan Laut dan Pantai melaksanakan kegiatan peningkatan Keterampilan Penyelam KPLP Bidang Salvage dan Pekerjaan Bawah Air Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sesuai dengan HK.103/2/14/DJPL-14 dimana manfaat dari kegiatan tersebut adalah:

1) Meningkatkan kompetensi personil Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sehingga memperoleh pengetahuan penyelaman bidang salvage dan pekerjaan bawah air dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air di tempat tugas masing-masing;
2) Meningkatkan jiwa korsa antar personil Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut karena dalam pelaksanaan kegiatan penyelaman diperlukan kerja sama yang baik;
3) Meningkatkan kapabilitas keberadaan institusi Direktorat KPLP pada instansi lainnya melalui aksi nyata personil Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam pengawasan bidang salvage dan pekerjaan bawah air;
4) Mengetahui standar operasional prosedur (SOP) keselamatan penyelaman;

5) Mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bidang salvage dan pekerjaan bawah air.

Aturan tarif untuk perizinan salvage dan pekerjaan bawah air diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran pasal 202-204, Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2010 tentang kenavigasian pasal 119-130 dan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan Perizinan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air diatur oleh akun Jasa Transportasi Laut MAK 425514 yang terletak pada Jasa Navigasi Pelayaran. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KU.102/5/19/DJPL/2023 tanggal 05 Oktober 2023, terdapat pemutakhiran Akun PNBP pada Kementerian Perhubungan salah satunya pada Pendapatan Jasa Salvage dan Pekerjaan Bawah Air yang sebelumnya dikategorikan sebagai Akun 425514 (Pendapatan Jasa Navigasi Pelayaran) menjadi akun 425519 (Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya).

Seksi Pekerjaan Bawah Air mempunyai kegiatan terkait pelayanan perizinan dari bulan Januari hingga Juni 2024 adalah:

1) Surat Izin Usaha Perusahaan Salvage dan Pekerjaaan Bawah Air yang modal seluruhnya dalam negeri sebanyak 8 (Delapan) surat izin;
2) Surat Izin kegiatan membangun, memindahkan dan membongkar bangunan dan atau instalasi sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) surat izin;
3) Surat Persetujuan Kegiatan Salvage dan PBA sebanyak 506 (Lima Ratus Enam) surat persetujuan.

Rekapitulasi perizinan bidang salvage dan/ atau pekerjaan bawah air Tahun Anggaran 2024 adalah:

NO.	JENIS PERIZINAN	JANUARI		FEBRUARI		MARET		APRIL		MEI		JUNI	
		JML	RUPIAH	JML	RUPIAH	JML	RUPIAH	JML	RUPIAH	JML	RUPIAH	JML	RUPIAH
1.	IZIN USAHA	2	6.000.000	1	3.000.000	2	6.000.000	-	-	-	-	1	3.000.000
2.	IZIN BANGUN	4	6.000.000	-	-	-	-	1	1.500.000	3	4.500.000	1	1.500.000
3.	SPK. SALVAGE DAN PBA	27	27.000.000	26	26.000.000	21	21.000.000	18	18.000.000	33	33.000.000	27	27.000.000
	JUMLAH TOTAL	**33**	**39.000.000**	**27**	**29.000.000**	**23**	**27.000.000**	**19**	**19.500.000**	**36**	**37.500.000**	**29**	**31.500.000**

NO.	JENIS PERIZINAN	JULI		AGUSTUS		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DESEMBER	
		JML	RUPIAH	JML	RUPIAH	JML	RUPIAH	JML	RUPIAH	JML	RUPIAH	JML	RUPIAH
1.	IZIN USAHA	1	3.000.000	-	-	-	-	1	3.000.000	-	-	-	-
2.	IZIN BANGUN	3	4.500.000	1	1.500.000	2	3.000.000	3	4.500.000	5	7.500.000	1	1.500.000
3.	SPK. SALVAGE DAN PBA	51	51.000.000	53	53.000.000	51	51.000.000	72	72.000.000	63	63.000.000	64	64.000.000
	JUMLAH TOTAL	**55**	**58.500.000**	**54**	**54.500.000**	**53**	**54.000.000**	**76**	**79.500.000**	**68**	**70.500.000**	**65**	**65.500.000**

1) Surat Izin Usaha Perusahaan Salvage dan Pekerjaaan Bawah Air seluruhnya sebanyak

8 dan senilai Rp24.000.000,-;

2) Surat Izin kegiatan membangun, memindahkan dan membongkar bangunan dan/ atau instalasi sebanyak 24 dan sebesar Rp36.000.000,-;

3) Surat Izin Kegiatan Salvage dan PBA sebanyak 506 dan senilai Rp506.000.000,-;

Total Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Jasa Salvage dan Pekerjaan Bawah Air Tahun Anggaran 2024 adalah Rp566.000.000,-.

2. Pengadaan Kapal RHAB

Transformasi laut memiliki peran strategis bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diakui dunia sebagai negara kepulauan melalui UNCLOS 1982. Sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan umum dari UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa Angkutan Laut yang mempunyai karakteristik pengangkutan secara nasional dan menjangkau seluruh wilayah melalui perairan perlu dikembangkan potensi dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung antar wilayah, baik nasional maupun internasional termasuk lintas batas karena digunakan sebagai sarana untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menjadi perekat NKRI.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), terdapat skala prioritas yang berkaitan dengan sektor transportasi, antara lain terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya Kerjasama pemerintah dan dunia usaha, dan ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi. Dalam mewujudkan rencana tersebut, Direktorat KPLP melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai peran dalam membangun Transportasi Laut melalui pengembangan dengan Sarana Prasarana memadai bagi Direktorat KPLP dan melalui Pengawasan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran mewujudkan Zero Accident.

Kapal patrol merupakan Sarana dan Prasarana Utama dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut. RHAB dapat menjadi alternatif yang mudah dalam sisi penganggaran dan teknis, namun tetap dapat menjalankan tugas Kapal Patroli dengan kapasitas Deployment yang sama. Tujuan dan manfaat pengadaan Unit Rigid Hull Alumunium Boat, antara lain:

1) Peningkatan kemampuan
2) Mempertahankan
3) Membangun dan menciptakan

Pelaksanaan pengadaan Kapal RHAB pada T.A. 2024 dilakukan oleh Direktorat KPLP dan telah dilakukan penyerahan kepada 20 Satker di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut, yang terdiri dari:

1) UPP Kelas III Agats
2) UPP Kelas III Baa
3) UPP Kelas III Barus
4) UPP Kelas III Bula
5) UPP Kelas III Karimun Jawa
6) UPP Kelas III Kota Agung
7) UPP Kelas III Sinabang
8) UPP Kelas III Singkil
9) UPP Kelas III Sofifi
10) UPP Kelas III Kwandang
11) UPP Kelas III Labuhan Lombok
12) UPP Kelas III Labuhan Maringgai
13) UPP Kelas III Malakoni Enggano
14) UPP Kelas III Sadai
15) UPP Kelas III Sapudi
16) UPP Kelas III Sungai Nyamuk
17) UPP Kelas II Palopo
18) KSOP Kelas IV Ende
19) KSOP Kelas III Satui
20) KSOP Kelas IV Pulang Pisau

3. Pengadaan Senjata Api dan Amunisi

Sesuai DIPA Pengeluaran Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Tahun Anggaran 2024 Nomor SP-DIPA-022.04.1.439180/2024 tanggal 24 November 2024 telah dilaksanakan Pengadaan, Perijinan dan Distribusi Senjata Api *Heavy Machine Gun* T.A. 2024 pada bulan September-Desember 2024. Pengadaan tersebut sesuai dengan kontrak nomor HH.01/SENJATA/PFKPLP/IX2024 tanggal 27 September 2024 dan addendum Kontrak Nomor HH.01-ADD/SENJATA/PFKPLP/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 dan Nomor BAST BA/20/P/BD/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp3.120.543.000,- serta Pengadaan Perizinan dan Distribusi Amunisi Senjata Api HMG T.A. 2024 sesuai nomor SPK9/SPK/PPK/PFKPLP/9/2024 tanggal 27 September 2024 dan nomor BAST 10/BAST/PPK/PFKPLP/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 senilai Rp155.844.000,- dan Pengadaan dan Distribusi Amunisi P3A dan SB2-V2 T.A. 2024 sesuai nomor SPK 3/SPK/PPK/PFKPLP/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 dan Nomor BAST 6/BAST/PPK/PFKPLP/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 senilai Rp37.129.500,- dilaksanakan oleh PT. PINDAD yang didistribusikan ke 3 Kapal Patroli Kelas I di Pangkalan PLP sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Lokasi	Satuan	Jumlah
1	Pengadaan, Perizinan, dan Distribusi Senjata Api Heavy Machine Gun Tahun Anggaran 2024	KN. Trisula P.111 KN. Sarotama P.112 KN. Alugara P.114	Unit Unit Unit	1 1 1
2	Pengadaan Perizinan dan Distribusi Amunisi Senjata Api HMG T.A. 2024	Pangkalan PLP Kelas I Tg. Priok	Butir	1.440
3	Pengadaan dan Distribusi Amunisi P3A dan SB2-V2 T.A. 2024	Pangkalan PLP Kelas I Tg. Priok	Butir	2.700 (SB2V2) 300 (P3A)

Sehubungan dengan hal di atas, tujuan Pengadaan, Perizinan dan Distribusi Senjata Api dan Amunisi T.A. 2024, untuk:

1) Peningkatan kemampuan operasional Bidang KPLP dari faktor khususnya perairan Pelabuhan semakin aman dan nyaman dengan peningkatan kemampuan operasional di maksud sebagai berikut:
   a) Senjata jenis ini memiliki kapasitas tembakan yang besar dan daya hancur yang tinggi, mampu menangani ancaman yang lebih besar seperti perlawanan dari Kapal Besar maupun kecil dengan tingkat keberhasilan dalam operasi tinggi;
   b) *Heavy Machine Gun* memiliki jarak tembak yang jauh, memungkinkan petugas untuk menanggapi ancaman dari jarak yang relatif aman, memperpanjang cakupan perlindungan kapal dalam pelaksanaan operasi dan patrol pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran;
   c) Sebagai *deterrent* (pencegah), senjata api dengan *Heavy Machine Gun* memungkinkan patrol dilakukan dengan baik dan menghindari pelaku pelanggar untuk melaksanakan aksinya dikarenakan adanya pengawasan yang dilakukan dengan kapal patrol yang bersenjata kuat.
2) Mempertahankan dan meningkatkan pelayanan keselamatan dan keamanan pelayaran di Nusantara. Selain itu, untuk membangun dan menciptakan keselamatan, keamanan, keamanan, dan kenyamanan jasa transportasi yang efektif dan efisien dalam mewujudkan "*Zero Accident*".

S. Aset Tetap Renovasi

Terdapat Aset Tetap Renovasi (ATR) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut T.A. 2024 sebagai Aset Aktif yang disajikan di Neraca sebesar Rp9.363.581.620,- pada 4 satker, antara lain:

NO	Kode Satker	Nama Satker	Nilai	Tahun Pengadaan	Keterangan
1	413670	KSOP BANTEN	2.404.044.000	2014	Rehabilitasi Gedung Kantor di KSOP Banten milik PT. Pelindo cabang Banten. Belum dilakukan serah terima karena PT. Pelindo belum membentuk Tim.
2	559470	UPP BULI	5.027.100.000	2017	Renovasi Pelabuhan Rakyat (Pelra) di atas Tanah milik Pemerintah Daerah
3	287370	KSOP Teluk Palu	1.932.437.620	2024	Renovasi Aset milik Pemkab Donggala berupa Drainage Depan Pelabuhan Donggala senilai Rp713.542.079,- dan Saluran Drainase Wani senilai Rp1.218.895.541,-
4	287541	KSOP TERNATE	238.432.203	2024	Rehab Terminal Ruang Tunggu Pelra Hiri milik Pemda
TOTAL			**9.363.581.620**		

Sedangkan ATR yang disajikan sebagai Aset yang Dihentikan Penggunaannya sebesar Rp1.477.925.521,- pada 2 satker T.A. 2024, yaitu:

NO	Kode Satker	Nama Satker	Nilai	Tahun Pengadaan	Keterangan
1	652542	KSOP Bandanaire	569.500.000	2008	Pekerjaan Fender di Dermaga Pelindo dalam proses pelelangan dan sudah mendapat persetujuan penghapusan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan c.q. KPKNL Ambon Nomor S-7/MK.6/KNL.1701/2022 tanggal 15 Maret 2022 hal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara (BMN) Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Banda Naira
2	412772	Kantor Pusat Ditjen hubla	908.425.521	2014	Tindak Lanjut Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan T.A. 2024 dengan melakukan usulan penghapusan yang diajukan ke KPKNL berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut Nomor PL.402/2/1/DJPL/2024 tanggal 25 November 2024 Hal Permohonan Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi dan Aset Tak Berwujud (ATB) pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tanpa Pemindahtanganan
TOTAL			**1.477.925.521**		

T. Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp7.993.981.354.706,- pada 57 satker di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut T.A. 2024 dengan rincian sebagai berikut:

a. Dilanjutkan sebesar Rp7.428.425.056.787,-
b. Dihentikan Sementara sebesar Rp532.171.560.533,-
c. Dihentikan Permanen sebesar Rp33.384.737.386,-

2. KDP Signifikan

Nilai KDP terbesar di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut T.A. 2024 yaitu pada KSOP Patimban senilai Rp6.419.607.812.921,- berupa pembangunan Fasilitas Pelabuhan Patimban di Jawa Barat. Nilai tersebut sudah berkurang atau telah dilakukan Pendefinitifan KDP menjadi Aset Tetap pada Periode Semester I T.A. 2023 dari Saldo KDP per Tahun 2022 (Audited) sebesar Rp9.631.272.131.977,-.

Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Patimban dimulai pada tahun 2018, dengan lingkup pekerjaan Fase I-1 terbagi atas Paket 1, 2 dan 3. Pada bulan Desember 2020, Pelabuhan

Patimban melalui kerjasama dengan operator terpilih PT. Pelabuhan Patimban International (PT. PPI) telah mulai mengoperasikan Terminal Kendaraan, yang kemudian telah beroperasi penuh pada Juni 2021 untuk seluruh area Terminal Kendaraan yang telah dibangun di Fase I-1 (Paket 1). Dengan selesainya pekerjaan pembangunan Seawall, Breakwater (Paket 2) dan Connecting Bridge (Paket 3) di Pelabuhan Patimban, maka berakhir juga pekerjaan konstruksi di Fase I-1.

Pekerjaan konstruksi kemudian dilanjutkan dengan Proyek Pembangunan Pelabuhan Patimban Fase I-2 yang masih merupakan bagian dari rencana pengembangan Patimban Port Development Project (I) JICA Loan IP-577. Proyek Pekerjaan Pelabuhan Patimban Fase I-2 juga didanai dengan Patimban Port Development Project (II) JICA Loan IP-583, dan telah dimulai sejak diterbitkannya perintah mulai kerja (SPMK) untuk Paket 6: Konstruksi Terminal Peti Kemas No. 2 pada tanggal 5 Januari 2023 dan Paket 5: Konstruksi Terminal Kendaraan pada tanggal 31 Maret 2023, serta Paket 7A dan Paket 7B yang saat ini sedang menunggu arahan pelaksanaan tender Pekerjaan Konstruksi Paket 7a dan Paket 7b Proyek Pembangunan Pelabuhan Patimban Fase I-2 dari Bapak Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Pengawasan supervisi untuk kegiatan Pembangunan Pelabuhan Patimban Fase I-2 serta konsultansi desain atas review DED Fase I-2 dan penyiapan draf dokumen bidding Paket 7A dan 7B dilaksanakan oleh Paket 8: Jasa Konsultasi Desain dan Supervisi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan.

Adapun rincian pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Patimban Fase I-2 adalah sebagai berikut:

No.	Paket Pekerjaan	Fase	Status
A	***Patimban Port Development Project (I) JICA Loan IP 577***		
1	Paket 1: Konstruksi Terminal	Fase I-1	Sudah FHO (21 Juli 2023)
2	Paket 2: *Breakwater, Seawall, dan Channel Dredging*	Fase I-1	Sudah FHO (27 November 2023)
3	Paket 3: Jembatan Penghubung	Fase I-1	Sudah FHO (26 Juli 2024)
4	Paket 5: *Car Terminal Construction*	Fase I-2	Masih proses konstruksi
5	Paket 6: *Container Terminal No. 2 Construction*	Fase I-2	Masih proses konstruksi
6	Paket 8: Jasa Konsultansi Desain dan Supervisi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan	Fase I-1	Masih berjalan
B	***Patimban Port Development Project (II) JICA Loan IP 583***		
1	Paket 5: *Car Terminal Construction*	Fase I-2	Masih proses konstruksi
2	Paket 6: *Container Terminal No. 2 Construction*	Fase I-2	Masih proses konstruksi
3	Paket 7a: *Container Terminal No.1 (South Part) Construction*	Fase I-2	Belum dimulai (Rencana dimulai pada tahun 2025)

No.	Paket Pekerjaan	Fase	Status
4	Paket 7b: *Container Terminal No.1 (North Part) Construction*	Fase I-2	Belum dimulai (Rencana dimulai pada tahun 2025)
C	***Patimban Port Development Project (III) JICA Loan IP 589***		
1	Paket 7a: *Container Terminal No.1 (South Part) Construction*	Fase I-2	Belum dimulai (Rencana dimulai pada tahun 2025)
2	Paket 7b: *Container Terminal No.1 (North Part) Construction*	Fase I-2	Belum dimulai (Rencana dimulai pada tahun 2025)
3	Paket 8: Jasa Konsultansi Desain dan Supervisi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan	Fase I-1	Masih berjalan (sumber dana IP-577 dan IP-589)

Progres fisik dan keuangan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Patimban sumber dana PHLN per-tanggal 10 Februari 2025 ialah sebagai berikut:

1) Pekerjaan fisik Paket 1 telah selesai 100% pada 24 Juni 2021 dengan progres keuangan saat ini sebesar 100% dimana telah dilaksanakan Final Hand Over (FHO) dan final payment;
2) Pekerjaan fisik Paket 2 telah selesai 100% pada tanggal 27 November 2021 dengan progres keuangan sebesar 100% dimana telah dilaksanakan Final Hand Over (FHO) dan final payment;
3) Pekerjaan fisik Paket 3 telah selesai 100% pada tanggal 13 Juli 2022 dengan progres keuangan sebesar 100% dimana telah dilaksanakan Final Hand Over (FHO) dan final payment;
4) Pekerjaan Paket 5 saat ini sedang berjalan dengan progres pekerjaan fisik sebesar 72,551% dengan deviasi sebesar +0,867% dari target rencana 71,684% dan progres keuangan sebesar 61,50% dengan deviasi sebesar +0,00% dari target rencana 61,50%;
5) Pekerjaan Paket 6 saat ini sedang berjalan dengan progres pekerjaan fisik sebesar 71,80% dengan deviasi sebesar -2,3% dari target rencana 74,00% dan progres keuangan sebesar 65,59% dengan deviasi sebesar +0,00% dari target rencana 65,59%;
6) Pekerjaan Paket 8 saat ini sedang berjalan dengan progres pekerjaan fisik sebesar 80,89% dengan deviasi sebesar +0,18% dari target rencana 80,71% dan progres keuangan sebesar 79,77% dengan deviasi sebesar -1,02% dari target rencana 80,79%;
7) Sesuai surat Direktur Kepelabuhanan Nomor AL.316/4/9/DP-24 tanggal 4 November 2024 perihal Rekomendasi Teknis Dokumen Studi Reviu Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Pelabuhan Patimban Fase I-2 dan Draf Bidding Documents

Paket 7a dan 7b, bahwa Laporan Reviu DED Proyek Pembangunan Pelabuhan Patimban Fase I-2 dan Bidding Documents Paket 7a dan Paket 7b telah diselesaikan dan telah mendapatkan rekomendasi teknis dari Direktorat Kepelabuhanan dan saat ini masih menunggu arahan pelaksanaan tender Pekerjaan Konstruksi Paket 7a dan Paket 7b Proyek Pembangunan Pelabuhan Patimban Fase I-2 dari Pak Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

3. KDP Dihentikan Sementara

Rincian KDP yang Dihentikan Sementara di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut T.A. 2024 adalah sebagai berikut:

No	Nama Satker	Nilai (Rp)	Uraian Pekerjaan
1	KSOP Tanjung Pakis	19.905.186.000	KDP merupakan pekerjaan pembangunan pelabuhan pacitan yang tidak dilanjutkan. Pekerjaan yang telah dilakukan berupa pematangan lahan.
2	KSOP Sibolga	568.400.000	Reviu Studi
3	UPP Muara Siberut	3.850.011.356	Transfer dari Disnav Teluk Bayur, rencana dihibahkan namun Pemda setempat tidak bersedia untuk menerima Hibah
4	UPP Panipahan	7.490.625.000	Pekerjaan Faspel dimulai tahun anggaran 2005 s.d. tahun 2007, pekerjaan di sisi Laut sudah selesai menggunakan APBN yang tercatat di aset kantor UPP Panipahan, namun pekerjaan di sisi Darat menggunakan APBD belum selesai, sampai sekarang. Sehingga tercatat sebagai KDP karena aset tidak bisa dimanfaatkan.
5	UPP Nipah Panjang	214.167.221.733	Status lahan masih dalam pembahasan antara UPP Nipah Panjang, Direktorat Kepelabuhanan dan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi berupa Fasilitas Pelabuhan Ujung Jabung
6	Distrik Navigasi Palembang	447.575.236	Belum tersedia Anggaran untuk melanjutkan Pembangunan Rambu Suar 20 Meter Laut di Pelabuhan Tg. Api-api dan Tg. Baginda. Sedangkan Pekerjaan Survey Investasi Design (SID) Pembangunan SBNP 6 Unit Ramsu dan 1 Unit Peningkatan Mensu Tg. Jabung akan dikapitalisasi menjadi Aset Tetap, setelah Pekerjaan Fisik Rambu Suar dilaksanakan.
	Distrik Navigasi Palembang	460.576.574	
	Distrik Navigasi Palembang	1.801.157.300	
7	KSOP Kotabaru-Batulicin	40.042.192.000	KDP dari Satker inaktif yang merupakan pembangunan Faspel Tanjung Batu yang sudah tidak di lanjutkan pekerjaannya karena permasalahan tanah sengketa. NUP 7 dan 9 merupakan Belanja Modal Perjalan Dinas Faspel Marabatuan dan Matasiri dan NUP 8 Merupakan Belanja Modal Dokumen Kegiatan Faspel Marabatuan dan Matasiri
	KSOP Kotabaru-Batulicin	50.846.900	
	KSOP Kotabaru-Batulicin	20.000.000	
	KSOP Kotabaru-Batulicin	13.468.200	
8	KSOP Samarinda	24.578.970.000	KDP Transfer dari pusat dan masih menunggu pembebasan lahan dari Pemerintah Daerah
	KSOP Samarinda	24.275.034.457	
	KSOP Samarinda	475.150.000	
9	UPP Sangkulirang	22.650.213.000	KDP dari Satker inaktif

No	Nama Satker	Nilai (Rp)	Uraian Pekerjaan
10	UPP Selayar	18.000.000	KDP Belum Selesai Pembangunan
	UPP Selayar	21.600.000	
	UPP Selayar	3.900.000	
	UPP Selayar	3.900.000	
	UPP Selayar	25.200.000	
	UPP Selayar	25.200.000	
	UPP Selayar	10.800.000	
	UPP Selayar	2.600.000	
	UPP Selayar	2.600.000	
	UPP Selayar	12.600.000	
	UPP Selayar	10.800.000	
	UPP Selayar	2.600.000	
	UPP Selayar	2.600.000	
	UPP Selayar	18.600.000	
11	UPP Amahai	3.328.517.961	Sengketa Tanah Milik Pemda, sehingga pekerjaan tidak bisa dilakukan dan menunggu tanah dikuasai oleh UPP Amahai
12	UPP Tulehu	22.904.300.000	Menunggu Kelengkapan Data Dukung dari Direktorat Teknis dan Satker
	UPP Tulehu	91.417.646.000	
	UPP Tulehu	15.638.250.000	
13	UPP Hatu Piru	167.000.000	Dokumen Studi Lingkungan Hidup pada Pelabuhan Kairatu
14	KSOP Biak	6.917.745.000	Konstruksi Dalam pekerjaan Pulau OWI yang akan dilanjutkan pekerjaan pada Tahun 2023 Tidak dapat di lanjutkan Pada tahun 2024 karena pekerjaan KDP Tersebut Harus di survei ulang dan kajian-kajian Teknis pelabuhan baru dan memiliki Data-data dukung yang harus di penuhi dan revisi ulang antara lain: FGD, SID, DED, Amdal, Surat pelepasan tanah adat / Hak Ulayat, Belum memiliki sertifikat kemenhub (KSOP BIAK), Belum memiki RIP
15	UPP Tarempa	8.313.920.800	Satker Inaktif terkait Pembangunan Faspel Pulau Seluan
16	KSOP Tarakan	8.349.400.000	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Tana Tidung TA 2015 pada dermaga seisayap, ditransfer pusat melalui UPP Tj. Selor kepada Ksop Tarakan. ditabraknya faspel sesayap oleh Tugboat, telah diproses oleh Pengadilan Tinggi
	KSOP Tarakan	49.775.000	
	KSOP Tarakan	154.660.000	
17	UPP Sungai Guntung	13.424.882.239	KDP posisi 31 Desember masih sesuai dengan Termin III dan menunggu luncuran pagu di 2025 untuk termin IV dan Retensi
	UPP Sungai Guntung	547.835.777	
	TOTAL	**532.171.560.533**	

4. KDP Dihentikan Permanen

Rincian KDP yang Dihentikan Permanen di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut T.A. 2024 adalah sebagai berikut:

No	Nama Satker	Nilai (Rp)	Uraian Pekerjaan
1	Satker KPLP	1.954.709.765	Masih Dalam Proses Hukum (Bareskrim) terkait Pembangunan Kapal Patroli
	Satker KPLP	1.935.075.012	
	Satker KPLP	3.039.304.600	
2	Disnav Bitung	1.205.293.100	Dalam Pemeriksaan dan Proses APH terkait Kontrak Fisik Replacement Rambu Suar 30 M Darat Rangka Baja di Galvanis Lokasi Mahoro
3	UPP Kolaka	11.682.929.000	Pekerjaan Pembangunan Faspel Laut Watunohu TA.2016 - KDP Kolaka Dihentikan Permanen karena terjadi pergerakan horisontal dan vertikal terhadap struktur dermaga yang disebabkan oleh sedimentasi. material sedimentasi menjadi beban tambahan pada struktur dermaga dan trestle yang dapat mengurangi daya dukung tanah, sudah ada kajian oleh tim teknis yang menyatakan tidak layak dilanjutkan pembangunan
	UPP Kolaka	194.600.000	
	UPP Kolaka	9.262.644.000	
	UPP Kolaka	217.750.000	
	UPP Kolaka	190.000.000	
	UPP Kolaka	90.000.000	
	UPP Kolaka	80.000.000	
4	UPP Hatu Piru	2.442.859.000	Addendum I, Pekerjaan dihentikan karena adanya Sengketa Lahan
5	Disnav Pontianak	1.089.572.909	KDP tidak bisa dilanjutkan pembangunan karena kondisi alam. Saat ini, telah terbit BA monitoring dan evaluasi dari Direktorat Teknis pada tanggal 22 Agustus 2024 serta CHR Itjen tanggal 23 Oktober 2024. Dalam Proses Usulan Penghapusan Terhadap Tiang Pancang Pembangunan Faspel Tanjung Tiram
	TOTAL	**33.384.737.386**	

U. Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Berdasarkan PMK 109 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran. Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) digunakan untuk menampung pendanaan atas pekerjaan yang belum diserahterimakan pada akhir tahun anggaran Pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang direncanakan untuk diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada KPPN sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan penyelesaiannya dilanjutkan melewati batas akhir tahun anggaran. Ruang lingkup pembayaran atas penyelesaian pekerjaan dengan mekanisme RPATA, antara lain:

1. Pekerjaan terselesaikan 100% s.d. akhir tahun anggaran
2. Pekerjaan tidak selesai sampai dengan akhir tahun dan diberikan kesempatan penyelesaiannya ke tahun anggaran berikutnya
3. Pekerjaan tidak selesai sampai dengan akhir tahun dan tidak diberikan kesempatan penyelesaiannya ke tahun anggaran berikutnya

Proses Bisnis Pelaksanaan Pembayaran APBN dengan Mekanisme RPATA, antara lain:

1. Pengisian Dana pada RPATA
2. Pembayaran atas penyelesaian pekerjaan kepada pihak ketiga
3. Penihilan RPATA atas pekerjaan yang tidak terselesaikan
4. Apabila dilakukan Pembayaran pada Tahun Berjalan (T.A. 2025), maka nilai atau saldo RPATA ISI akan disesuaikan secara otomatis

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyajikan Dana yang Dibatasi Penggunaannya berupa Dana Lainnya, Dana di Rekening Penampungan – BLU, dan Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga sebesar Rp573.381.006.355,-. Dana Lainnya (163119) sebesar Rp3.698.410.287,- disajikan pada KSOP Patimban yang merupakan Pencatatan Dana atas Ganti Rugi Tanah sesuai dengan Surat Kepala KSOP Patimban Nomor UM.006/9/111/KSOP-PMB/2021 tanggal 04 Maret 2021 Perihal Laporan Pembukaan Rekening Pemerintah Lainnya Atas Nama RPL 021 PS KSOP PATIMBAN UNTUK GANTI RUGI. Dana di Rekening Penampungan – BLU sebesar Rp2.537.070.480,- terdapat pada Distrik Navigasi Tanjung Priok berupa RPATA BLU atas Pekerjaan Docking Kapal Negara Kenavigasian KN. Karakata dengan kontrak Nomor 100/KONTRAK/00/SATKER-DNG.TPK/X/2024 dan Pekerjaan Perbaikan Transceiver Radar 18 Feet (VTS Cirebon, VTS Merak dan VTS Panjang) dengan kontrak Nomor 103/KONTRAK/00/SATKER-DNG.TPK/X/2024. Selain itu, Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga (163139) sebesar Rp567.145.525.588,- terdapat pada 78 Satker yang merupakan RPATA ISI dengan rincian sebagai berikut:

RPATA ISI						RPATA Pembayaran (SPM 2025)		
No	**Kode Satker**	**Nama Satker**	**Provinsi**	**Kode Akun**	**Nilai**	**No**	**Kode Akun**	**Nilai**
1	412879	DISNAV TANJUNG EMAS	Jawa Tengah	163139	48.423.287	1	212191	(48.423.287)
2	412823	KSOP TANJUNG EMAS	Jawa Tengah	163139	20.500.000	2	212191	(20.500.000)
3	412832	KSOP TEGAL	Jawa Tengah	163139	1.896.115.369			
4	287143	KSOP PULANG PISAU	Kalimantan Tengah	163139	1.218.122.863	3	212191	(1.218.122.863)
5	287541	KSOP TERNATE	Maluku Utara	163139	2.585.061.913	4	212191	(1.605.544.291)
6	413658	UPP BABANG	Maluku Utara	163139	1.501.478.136	5	212191	(1.501.478.136)
7	559438	UPP DARUBA	Maluku Utara	163139	1.167.659.782	6	212191	(1.167.659.782)
8	559421	UPP JAILOLO	Maluku Utara	163139	2.665.664.200	7	212191	(2.665.664.200)
9	690778	UPP SAKETA	Maluku Utara	163139	7.449.743.564	8	212191	(7.449.743.564)
10	413664	UPP SANANA	Maluku Utara	163139	1.643.649.034	9	212191	(1.643.649.034)
11	690779	UPP SOFIFI	Maluku Utara	163139	15.989.642.065	10	212191	(13.375.846.500)
12	413642	UPP TOBELO	Maluku Utara	163139	853.227.531	11	212191	(799.489.179)
13	412973	KSOP KUALA LANGSA	NAD	163139	1.434.475.349	12	212191	(180.000.000)
14	521417	UPP CALANG	NAD	163139	2.191.386.974	13	212191	(2.191.386.974)
15	287804	KSOP SORONG	Papua Barat	163139	5.839.218.569	14	212191	(5.839.218.569)
16	559374	UPP BELANG-BELANG	Sulawesi Barat	163139	1.344.457.235	15	212191	(68.328.270)
17	413463	UPP MAMUJU	Sulawesi Barat	163139	3.602.483.607	16	212191	(744.373.100)

RPATA ISI						RPATA Pembayaran (SPM 2025)		
No	Kode Satker	Nama Satker	Provinsi	Kode Akun	Nilai	No	Kode Akun	Nilai
18	413783	KSOP BITUNG	Sulawesi Utara	163139	901.681.404	17	212191	(886.426.000)
19	521747	UPP KOTABUNAN	Sulawesi Utara	163139	1.774.876.375	18	212191	(98.075.000)
20	413582	UPP MELONGUANE	Sulawesi Utara	163139	3.630.182.510			
21	413070	KSOP TELUK BAYUR	Sumatera Barat	163139	724.786.180	19	212191	(724.786.180)
22	412772	KANPUS HUBLA	DKI Jakarta-Pusat	163139	3.599.382.221	20	212191	(3.599.382.221)
23	439200	SATKER KEPELABUHANAN	DKI Jakarta-Pusat	163139	2.761.422.463	21	212191	(2.761.422.463)
24	439180	SATKER KPLP	DKI Jakarta-Pusat	163139	3.120.543.000	22	212191	(3.120.543.000)
25	439454	SATKER LALA	DKI Jakarta-Pusat	163139	316.133.361.081	23	212191	(312.577.763.158)
26	021140	KSOP PATIMBAN	Jawa Barat	163139	13.486.991.372	24	212191	(8.803.100.378)
27	287171	KSOP BANJARMASIN	Kalimantan Selatan	163139	62.693.750	25	212191	(62.693.750)
28	287185	KSOP KOTABARU-BATULICIN	Kalimantan Selatan	163139	979.685.891	26	212191	(979.685.891)
29	559292	KSOP SATUI	Kalimantan Selatan	163139	1.237.503.058			
30	287232	KSOP TARAKAN	Kalimantan Utara	163139	542.420.804	27	212191	(535.113.135)
31	287558	DISNAV A M B O N	Maluku	163139	2.916.413.725	28	212191	(305.668.200)
32	652570	DISNAV TUAL	Maluku	163139	6.482.665.370	29	212191	(347.305.680)
33	287537	KSOP AMBON	Maluku	163139	22.032.461.773	30	212191	(19.204.752.730)
34	413633	UPP DOBO	Maluku	163139	4.241.739.500	31	212191	(4.241.739.500)
35	559459	UPP NAMROLE	Maluku	163139	1.086.761.400	32	212191	(1.086.761.400)
36	289911	UPP SAUMLAKI	Maluku	163139	5.875.675.340	33	212191	(5.875.675.340)
37	413520	UPP TUAL	Maluku	163139	3.820.280.094	34	212191	(3.820.280.094)
38	559463	UPP WONRELI	Maluku	163139	10.639.743.686	35	212191	(4.083.840.944)
39	413439	KSOP UTAMA MAKASAR	Sulawesi Selatan	163139	1.060.202.654	36	212191	(1.060.202.654)
40	289885	UPP BULU KUMBA	Sulawesi Selatan	163139	542.428.750	37	212191	(542.428.750)
41	413472	UPP PALOPO	Sulawesi Selatan	163139	688.450.000			
42	413441	UPP S E L A Y A R	Sulawesi Selatan	163139	3.295.531.660			
43	413055	DISNAV BELAWAN	Sumatera Utara	163139	2.044.931.000	38	212191	(2.044.931.000)
44	413061	DISNAV SIBOLGA	Sumatera Utara	163139	4.115.421.178	39	212191	(469.981.098)
45	288021	KSOP PULAU BAAI	Bengkulu	163139	1.029.000.000	40	212191	(912.035.754)
46	412951	DISNAV TANJUNG PERAK	Jawa Timur	163139	119.412.000	41	212191	(119.412.000)
47	412942	KSOP KALIANGET	Jawa Timur	163139	1.132.986.238	42	212191	(1.132.986.238)
48	287260	DISNAV SAMARINDA	Kalimantan Timur	163139	158.250.000	43	212191	(158.250.000)
49	289850	UPP TANA PASER	Kalimantan Timur	163139	13.076.910	44	212191	(13.076.910)
50	287647	KSOP BIMA	NTB	163139	4.237.799.821	45	212191	(4.237.799.821)
51	559510	UPP PEMENANG	NTB	163139	306.110.520	46	212191	(306.110.520)
52	522582	KSOP KUPANG	NTT	163139	3.223.076.149	47	212191	(1.001.630.417)
53	287701	KSOP LAURENTIUS SAY	NTT	163139	1.336.207.632	48	212191	(1.336.207.632)
54	287715	KSOP WAINGAPU	NTT	163139	3.240.814.858	49	212191	(2.998.657.808)

RPATA ISI						RPATA Pembayaran (SPM 2025)		
No	**Kode Satker**	**Nama Satker**	**Provinsi**	**Kode Akun**	**Nilai**	**No**	**Kode Akun**	**Nilai**
55	289960	UPP REO	NTT	163139	701.999.529	50	212191	(701.999.529)
56	287370	KSOP TELUK PALU	Sulawesi Tengah	163139	1.629.848.692	51	212191	(1.629.848.692)
57	413602	UPP AMPANA	Sulawesi Tengah	163139	6.701.907.419	52	212191	(2.372.340.759)
58	413591	UPP KOLONEDALE	Sulawesi Tengah	163139	3.771.578.845	53	212191	(982.113.795)
59	287406	UPP PARIGI	Sulawesi Tengah	163139	1.735.908.711	54	212191	(1.735.908.711)
60	287384	UPP POSO	Sulawesi Tengah	163139	1.171.128.940	55	212191	(395.437.000)
61	521789	UPP PAGIMANA	Sulawesi Tengah	163139	233.639.999	56	212191	(233.639.999)
62	413422	KSOP UTAMA TANJUNG PRIOK	DKI Jakarta-Daerah	163139	129.936.600	57	212191	(129.936.600)
63	520454	PPLP TANJUNG PRIOK	DKI Jakarta-Daerah	163139	4.170.843.038	58	212191	(1.127.452.245)
64	606301	SATKER BKKP	DKI Jakarta-Daerah	163139	549.163.550	59	212191	(549.163.550)
65	287321	KSOP GORONTALO	Gorontalo	163139	3.215.986.686	60	212191	(3.215.986.686)
66	521768	UPP TILAMUTA	Gorontalo	163139	1.367.226.952	61	212191	(681.467.576)
67	413313	KSOP PONTIANAK	Kalimantan Barat	163139	669.309.692	62	212191	(668.204.315)
68	413322	KSOP SINTETE	Kalimantan Barat	163139	656.183.506	63	212191	(513.406.571)
69	521690	UPP TELUK BATANG	Kalimantan Barat	163139	1.271.623.563	64	212191	(1.271.623.563)
70	413231	DISNAV TANJUNG PINANG	Kepulauan Riau	163139	37.957.251.853	65	212191	(11.860.284.800)
71	521594	KSOP KIJANG	Kepulauan Riau	163139	1.167.034.805	66	212191	(963.007.727)
72	413307	KSOP PANJANG	Lampung	163139	43.506.000	67	212191	(43.506.000)
73	287782	KSOP BIAK	Papua	163139	1.520.647.378	68	212191	(396.151.853)
74	287778	KSOP JAYAPURA	Papua	163139	2.264.636.000	69	212191	(1.955.474.000)
75	287825	KSOP MERAUKE	Papua	163139	7.990.086.886	70	212191	(4.205.594.963)
76	517950	UPP BADE	Papua	163139	1.389.294.637			
77	413494	KSOP BAU-BAU	Sulawesi Tenggara	163139	380.000.000	71	212191	(380.000.000)
78	287502	KSOP KENDARI	Sulawesi Tenggara	163139	2.410.502.462	72	212191	(2.410.502.462)
	TOTAL				**567.145.525.588**			**(468.391.204.811)**

Atas RPATA ISI yang telah diinput oleh 78 satuan kerja telah selesai dikerjakan dan telah dibayar dengan SPM Pembayaran T.A. 2025 oleh 72 satuan kerja dengan total nilai sebesar Rp468.391.204.811,- dan sebanyak 22 satuan kerja telah melakukan tindak lanjut menggunakan SPM Penihilan T.A. 2025 sebesar Rp54.690.668.667,-. Selain itu, terdapat RPATA ISI yang telah diinput oleh 4 satuan kerja yang telah selesai dikerjakan dan telah dibayar dengan SPM Pembayaran T.A. 2024 atas 8 kegiatan dengan total nilai sebesar Rp2.175.068.437,-.

V. Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah

Terdapat Nilai Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah (YTDDOP)

dan ATB YTDDOP pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut T.A. 2024 sebesar Rp454.851.391.891,- dengan rincian sebagai berikut:

Aset Tetap YDOP	Nilai (Rp)	Keterangan
Tanah	1.662.199.713	Dalam proses penghapusan
Peralatan dan Mesin	247.192.980.735	Rusak Berat dan dalam proses penghapusan
Gedung dan Bangunan	77.496.399.831	Rusak Berat dan dalam proses penghapusan
Jalan dan Jembatan, Irigasi, dan Jaringan	112.882.898.393	Rusak Berat dan dalam proses penghapusan
Aset Lainnya	1.530.323.271	Rusak Berat dan dalam proses penghapusan
ATB YTDOP	14.086.589.948	Rusak Berat dan dalam proses penghapusan
TOTAL	**454.851.391.891**	

Rincian Aset Tetap YTDOP berupa Tanah terdapat pada beberapa satker, antara lain:

No	Nama Satker	Jenis Aset	Nilai Aset
1	Disnav Palembang	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	63.455.713
2	Disnav Belawan	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Lainnya	10.800.000
3	Disnav Pontianak	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	41.012.000
4	UPP Bau-Bau	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	450.100.000
5	UPP Siuban	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Listrik	2.400.000
6	UPP Siuban	Tanah Lapangan Penimbunan Barang Jadi	969.825.000
7	UPP Siuban	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	12.215.000
8	KSOP Manokwari	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	109.892.000
9	UPP Kairatu	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.500.000
TOTAL			**1.662.199.713**

1. Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III pada Distrik Navigasi Palembang sudah dilakukan sewa jual kepada pegawai dan saat ini dalam proses penghapusan. Berdasarkan surat Kepala Distrik Navigasi Palembang nomor UM.209/1/5/DNG.PLG-2024 tanggal 10 Januari 2024 hal Permintaan Salinan Bukti Lunas Rumah Negara Golongan III kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan yang bertujuan untuk digunakan sebagai dasar Penghapusan Tanah dan Bangunan Rumah Negara tersebut.
2. Tanah Untuk Bangunan Instalasi Lainnya pada Distrik Navigasi Belawan berdasarkan Catatan Hasil Reviu merupakan Barang Tidak Ditemukan (BTD) dengan kategori K10 (Tidak Ditemukan Fisiknya). Pencatatan Tanah yang direklasifikasi menjadi Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahaan sesuai dengan Surat Distrik Navigasi Belawan kepada Kepala KPKNL Medan dengan Nomor KP.002/1/17/DNG.BLW.2021 tanggal 08 September 2021 perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan BMN Tidak Ditemukan Fisiknya (K10).

3. Tanah untuk Jalan Kotamadya pada UPP Bau-Bau merupakan Barang Tidak Ditemukan (BTD). Satker akan berkoordinasi dengan KPKNL terkait status aset tanah tersebut, karena untuk aset tanah yang berlokasi di Baubau sudah bersertifikat semua.

Rincian ATB YTDOP berupa Software Komputer dan Aset Tak Berwujud Lainnya T.A. 2024 senilai Rp14.086.589.948,- terdapat pada beberapa satker, antara lain:

No	Nama Satker	Jenis Aset	Nilai Aset	Keterangan
1	Kantor Pusat Ditjen Hubla	Aset Tak Berwujud Lainnya	7.260.888.250	Dalam Proses Penghapusan
2	KSOP Utama Belawan	Aset Tak Berwujud Lainnya	337.450.000	Dalam Proses Penghapusan
	KSOP Utama Belawan	Software Komputer	1.430.000	Dalam Proses Penghapusan
3	Satker Perkapalan dan Kepelautan	Aset Tak Berwujud Lainnya	6.422.070.198	Dalam Proses Penghapusan
4	PPLP Tanjung Priok	Aset Tak Berwujud Lainnya	64.751.500	Dalam Proses Penghapusan
TOTAL			**14.086.589.948**	

W. Kewajiban di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut

1. Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar

Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 senilai Rp445.066.490,- pada 5 Satker di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut, antara lain:

No	Kode Satker	Nama Satker	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Nilai	Penjelasan
1	412772	KANPUS HUBLA	14 Januari 2025	00022A	410.000	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Uang Makan Bulan Desember 2024
			14 Januari 2025	00021A	3.713.000	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Uang Makan Bulan Desember 2024
			14 Januari 2025	00020A	339.885.000	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Uang Makan Bulan Desember 2024
			14 Januari 2025	00019A	280.000	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Uang Makan Bulan Desember 2024
			14 Januari 2025	00018A	11.135.000	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Uang Makan Bulan Desember 2028
2	412817	KSOP CIREBON	02 Januari 2025	00005A	38.946.000	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Uang Makan PNS Bulan Desember 2024 untuk 58 Pegawai.
			14 Januari 2025	00010A	3.342.840	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji Bulan Oktober 2024 s.d Desember 2024 untuk 2 Pegawai.
			02 Januari 2025	00006A	1.120.000	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Uang Makan PPPK Bulan Desember 2024 untuk 2 Pegawa
3	287338	UPP TAHUNA	20 Januari 2025	250831302000058	20.669.150	Pembayaran Uang Makan PNS Bulan Desember 2024 untuk 31 Pegawai

No	Kode Satker	Nama Satker	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Nilai	Penjelasan
4	413582	UPP MELONGUANE	24 dan 30 Januari 2025	251791301000153 dan 251791305000035	19.297.000	Pembayaran Uang Makan PNS Bulan Desember 2024 untuk 23 Pegawai
5	521751	UPP LABUHAN UKI/ INEBONTO	24 dan 30 Januari 2025	SPM No 00012T/521751/2025, SP2D 251581302000081	3.134.250	Pembayaran Tunkin Ke 13 PPPK Tahun 2024 untuk 1 Pegawai
			24 dan 30 Januari 2025	SPM NO 00011T/521751/2025, SP2D No 251581302000080	3.134.250	Pembayaran THR Tunkin PPPK Tahun 2024 untuk 1 Pegawai
Jumlah Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar					**445.066.490**	

2. Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar

Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 senilai Rp889.437.829,- pada 7 Satker di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut, antara lain:

No	Kode Satker	Nama Satker	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Nilai	Penjelasan
1	439454	SATKER LALA	06-02-25	SPM No.906	480.852.000	Penyesuaian RPATA sesuai kontrak nomorKTRK.01/PPK/DOCK.KN12/ X/2024 (RPATA 90 hari)
			06-02-25	SPM No.907	237.498.984	Penyesuaian RPATA sesuai kontrak nomor KTRK.01/PPK/DOCK.KN_10/ VII/ 2024 (RPATA 90 hari)
2	521285	UPP PANGANDARAN	14-01-25	00010T/521285/2025	1.824.951	Pembayaran Tagihan telepon
			14-01-25	0009T/521285/2025	5.567.907	Pembayaran Tagihan telepon
			05-02-25	00018A	122.500	Pembayaran Tagihan listrik
3	521307	UPP INDRAMAYU	09-01-25	SPM No 00006A	105.450	Pembayaran Tagihan Listrik, Telepon
				SPM No 00006A	3.816.180	
				SPM No. 00007A	9.553.229	
				SPM No. 000015A	668.500	
				SPM No. 000015A	1.102.101	
4	412817	KSOP CIREBON	07-01-25	SPM No 00007A	15.777.269	Pembayaran Tagihan Listrik
			07-01-25	SPM No 00009A	4.156.950	Pembayaran Tagihan Telepon
			07-01-25	SPM No 00019A	522.400	Pembayaran Tagihan Telepon dan air
			07-01-25		3.756.590	Pembayaran Tagihan Telepon dan air
5	412911	KSOP PANARUKAN	30-01-24	No. SPM 00012T/412911/2025 dan No. SP2D 250351302000045	15.766.500	Pembayaran Tagihan Listrik
			30-01-24	No. SPM 00012T/412911/2025 dan No. SP2D 250351302000045	8.334.700	Pembayaran Tagihan Telepon
			30-01-24	No. SPM 00012T/412911/2025 dan No. SP2 D 250351302000045	1.931.500	Pembayaran Tagihan Air
6	413658	UPP BABANG	20-10-24	FT24294HRWR3	3.340.027	Tagihan Listrik Bulan Oktober s.d. Desember T.A 2024

No	Kode Satker	Nama Satker	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Nilai	Penjelasan
			06-12-24	FT24341MT4JX	3.616.710	Tagihan Listrik Bulan Oktober s.d. Desember T.A 2024
			18-11-24	FT24323KCLNM	3.762.531	Tagihan Listrik Bulan Oktober s.d. Desember T.A 2024
			20-10-24	FT24294PTTV1	20.887.647	Tagihan Listrik Bulan Oktober s.d. Desember T.A 2024
			18-11-24	FT24352W96GQ	23.424.535	Tagihan Listrik Bulan Oktober s.d. Desember T.A 2024
			17-12-24	FT24294HRWR3	23.830.213	Tagihan Listrik Bulan Oktober s.d. Desember T.A 2024
7	288021	KSOP PULAU BAAI	17-01-25	38216A-08/2025/800908	532.260	Pembayaran Tagihan Listrik
			17-01-25	38216A-08/2025/800909	15.881.672	Pembayaran Tagihan Listrik
			17-01-25	38216A-08/2025/800910	852.141	Pembayaran Tagihan Listrik
			17-01-25	38216A-08/2025/800923	1.952.382	Pembayaran Tagihan Telepon
Jumlah Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar					**889.437.829**	

3. Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar

Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 senilai Rp29.816.103.254,- pada 18 satker di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut, antara lain:

No	Kode Satker	Nama Satker	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Nilai	Dokumen Sumber	Penjelasan
1	520454	PPLP TANJUNG PRIOK	30-12-24	Nomor: 24/XII/BAPP/REHAB/PPK/PLP.TPK- 2024	2.631.519.062	BAPP Lanjutan Rehabilitasi Gedung Kantor	Pekerjaan Fisik sebesar 96% per 31 Desember 2024 berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Lanjutan Rehabilitasi Gedung Kantor
2	412832	KSOP TEGAL	23-12-24	PL.108/2/6/KSOP.TGL- 2024	1.662.730.661	BAPP	RPATA atas Pekerjaan belum selesai 100%, sehingga adanya Perpanjangan 90 hari kerja di T.A. 2025
3	412973	KSOP KUALA LANGSA	31-12-24	PL.108/1/6/KSOP.Klgs- 2024 dan PL.108/1/7/KSOP.Klgs-2024	435.501.589	BAPP	RPATA atas Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Bangunan belum selesai 100%, sehingga adanya Perpanjangan 90 hari kerja di T.A. 2025
			31-12-24		326.940.000	BAPP	RPATA atas Pekerjaan Pembangunan Pagar Kantor belum selesai 100%, sehingga adanya Perpanjangan 90 hari kerja di T.A. 2025
4	413463	UPP MAMUJU	31-12-24	BAPP.02/413463/XII/ 2024	29.700.000	BAPP	RPATA atas Pekerjaan Supervisi Pembangunan Gedung Kantor
5	413582	UPP MELONGUANE	31-12-24	BAPP/BAST Nomor PL.103/20/19/UPP. MLG-25	1.577.682.510	BAPP	RPATA Skema 90 hari atas pekerjaan Rehab Faspel laut Marampit
6	521747	UPP KOTABUNAN	31-12-24	050/CV-MG/XII/2024	1.440.825.239	Surat Pernyataan Pihak Ketiga	Perpanjangan atas Penyelesaian Pekerjaan dengan No. Kontrak PL.107/04/06/UPP.Ktbn-2024 selama 31 Hari dari semula 31 Desember 2024 menjadi 31 Januari 2025
7	413472	UPP PALOPO	31-12-24	PL.108/35/16/UPP.plp-2024	590.100.000	BAPP	Pembayaran RPATA Kontrak Nomor PL.107/16/1/UPP.Plp/2024 Keg. Pengadaan Dan Pemasangan Suku Cadang Crane Pelabuhan Palopo

No	Kode Satker	Nama Satker	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Nilai	Dokumen Sumber	Penjelasan
8	413602	UPP AMPANA	31-12-24	007/PPK-AMP/KONS/XII/UPP.AMP-2024	1.160.371.608	BAST	Perpanjangan atas PekerjaanPengisian RPATA atas Kontrak Nomor 004/PPK-AMP/VI/UPP.Amp-2024 untuk Pekerjaan Lanjutan Pelebaran Dermaga Pelabuhan Ampana dan Pengembangan Fasilitas Darat Pelabuhan Ampana(Skema 90 hari)
9	413591	UPP KOLONEDALE	29-12-24	20/BA-TMU/OPNAME/KDL/2024	1.200.362.596	BAPP	Penyesuaian atas utang yang belum diterima tagihannya terkait SPM Pembayaran RPATA T.A.2025
10	521899	UPP WEDA	31-12-24	PL.107/2/23/UPP.WED/2024	1.320.000	Kontrak	Termin terakhir atas Belanja Modal atas Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultasi-supervisi Pekerjaan Rehab Fender dan APJ Pelabuhan Gebe TA 2024 yang telah selesai namun dibayarkan di TA 2025
11	690779	UPP SOFIFI	31-12-24	PL.108/14/16/UPP.SFI/ 2024	2.041.505.499	BAPP	Penyelesaian Pekerjaan RPATA
12	287558	DISNAV AMBON	23-12-24	SPM NO 00438A	2.037.864.225	SPM PENAMPUNGAN	Blm terbit spm dan BaST nya baru 90% di Des 2024 karena Blm selesai atas pekerjaan 003.073.0A.000154-Docking Kapal KN. Bacan
13	559463	UPP WONRELI	18-12-24	No SP2D: 241040301000071 No. SPM 00262A dan No SP2D: 241040301000072 SPM No. 00263A	1.596.043.626	SP2D	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor PL.107/3/01/UPP.WRL/2024 untuk Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Laut Eray
14	559292	KSOP SATUI	20-12-24	SPM NO.00244A, 00245T,00246T	309.890.135	SPM PENAMPUNGAN	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Negara Tipe 70 Kantor KSOP Kelas III Satui (Retensi) sesuai BAST Nomor: PL.108/1/3/KSOP.Satui-2025 Tgl. 22 Januari 2025 dan Jaminan Pemeliharaan Nomor: 1130011040125012223 Tanggal 22 Januari 2025
15	287715	KSOP WAINGAPU	31-12-24	No. BA-KSOP.WPU 138 Tahun 2024, No. BA-KSOP.WPU 139 Tahun 2024	188.340.750	BAST	Belum ada Pembayaran atas pekerjaan Rehab gedung kantor fisik dan supervisi
16	413231	DISNAV TANJUNG PINANG	23-12-24	PL.108/39/9/DNG.TPI- 2024	2.183.995.600	BAPP	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor PL.107/7/1/DNG.TPI-2024 untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Yaitu: Docking KN.Adhara Tahun Anggaran 2024 (PNBP)
			23-12-24	00890A	273.117.271	SPM	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor PL.107/7/4/DNG.TPI-2024 untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Yaitu: Supervisi Docking KN.Adhara Tahun Anggaran 2024 (PNBP)
17	517950	UPP BADE	31-12-24	PL. 108/5/3/UPP.Bde/2024	911.724.605	BAPP	Pekerjaan atas Pembangunan gedung kantor
18	022140	KSOP PATIMBAN			448.494.877		RPATA Skema 90 Hari
Jumlah Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar					**21.048.029.853**		

4. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya

Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya (212191) Tahun 2024 senilai Rp473.988.099.110,- pada 73 Satker di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut atas SPM Pembayaran RPATA yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2025 dan 1 satker berupa pembayaran ulang Belanja Pegawai terkait uang lembur dikarenakan terdapat retur dan sudah disetor ke Kas Negara. Penyajian akun tersebut dilakukan dengan membuat Jurnal Penyesuaian per 31 Desember 2024 dengan mengeliminisai akun Utang Yang Belum Diterima Tagihannya (218111). Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya adalah sebagai berikut:

No	Kode Satker	Nama Satker	Nilai	Keterangan
1	412879	DISNAV TANJUNG EMAS	48.423.287	SPM RPATA Realisasi 2025
2	412823	KSOP TANJUNG EMAS	20.500.000	SPM RPATA Realisasi 2025
3	287143	KSOP PULANG PISAU	1.218.122.863	SPM RPATA Realisasi 2025
4	287541	KSOP TERNATE	1.605.544.291	SPM RPATA Realisasi 2025
5	413658	UPP BABANG	1.501.478.136	SPM RPATA Realisasi 2025
6	559438	UPP DARUBA	1.167.659.782	SPM RPATA Realisasi 2025
7	559421	UPP JAILOLO	2.665.664.200	SPM RPATA Realisasi 2025
8	690778	UPP SAKETA	7.449.743.564	SPM RPATA Realisasi 2025
9	413664	UPP SANANA	1.643.649.034	SPM RPATA Realisasi 2025
10	690779	UPP SOFIFI	13.375.846.500	SPM RPATA Realisasi 2025
11	413642	UPP T O B E L O	799.489.179	SPM RPATA Realisasi 2025
12	412973	KSOP KUALA LANGSA	180.000.000	SPM RPATA Realisasi 2025
13	521417	UPP C A L A N G	2.191.386.974	SPM RPATA Realisasi 2025
14	287804	KSOP SORONG	5.839.218.569	SPM RPATA Realisasi 2025
15	559374	UPP BELANG-BELANG	68.328.270	SPM RPATA Realisasi 2025
16	413463	UPP M A M U J U	744.373.100	SPM RPATA Realisasi 2025
17	413783	KSOP BITUNG	886.426.000	SPM RPATA Realisasi 2025
18	521747	UPP KOTABUNAN	98.075.000	SPM RPATA Realisasi 2025
19	413070	KSOP TELUK BAYUR	724.786.180	SPM RPATA Realisasi 2025
20	412772	KANPUS HUBLA	3.599.382.221	SPM RPATA Realisasi 2025
21	439200	SATKER KEPELABUHANAN	2.761.422.463	SPM RPATA Realisasi 2025
22	439180	SATKER KPLP	3.120.543.000	SPM RPATA Realisasi 2025
23	439454	SATKER LALA	312.577.763.158	SPM RPATA Realisasi 2025
24	021140	KSOP PATIMBAN	8.803.100.378	SPM RPATA Realisasi 2025
25	287171	KSOP BANJARMASIN	62.693.750	SPM RPATA Realisasi 2025
26	287185	KSOP KOTABARU-BATULICIN	979.685.891	SPM RPATA Realisasi 2025
27	287232	KSOP TARAKAN	535.113.135	SPM RPATA Realisasi 2025
28	287558	DISNAV A M B O N	305.668.200	SPM RPATA Realisasi 2025
29	652570	DISNAV TUAL	347.305.680	SPM RPATA Realisasi 2025
30	287537	KSOP AMBON	19.204.752.730	SPM RPATA Realisasi 2025
31	413633	UPP D O B O	4.241.739.500	SPM RPATA Realisasi 2025
32	559459	UPP NAMROLE	1.086.761.400	SPM RPATA Realisasi 2025
33	289911	UPP SAUMLAKI	5.875.675.340	SPM RPATA Realisasi 2025
34	413520	UPP T U A L	3.820.280.094	SPM RPATA Realisasi 2025
35	559463	UPP WONRELI	4.083.840.944	SPM RPATA Realisasi 2025

No	Kode Satker	Nama Satker	Nilai	Keterangan
36	413439	KSOP UTAMA MAKASAR	1.061.481.354	SPM RPATA Realisasi 2025 dan Kas Lainnya di Bendpel sebesar Rp1.278.700,-
37	289885	UPP BULU KUMBA	542.428.750	SPM RPATA Realisasi 2025
38	413055	DISNAV BELAWAN	2.044.931.000	SPM RPATA Realisasi 2025
39	413061	DISNAV SIBOLGA	469.981.098	SPM RPATA Realisasi 2025
40	288021	KSOP PULAU BAAI	912.035.754	SPM RPATA Realisasi 2025
41	412951	DISNAV TANJUNG PERAK	119.412.000	SPM RPATA Realisasi 2025
42	412942	KSOP KALIANGET	1.132.986.238	SPM RPATA Realisasi 2025
43	287260	DISNAV SAMARINDA	158.250.000	SPM RPATA Realisasi 2025
44	289850	UPP TANA PASER	13.076.910	SPM RPATA Realisasi 2025
45	287647	KSOP BIMA	4.237.799.821	SPM RPATA Realisasi 2025
46	559510	UPP PEMENANG	306.110.520	SPM RPATA Realisasi 2025
47	522582	KSOP KUPANG	1.001.630.417	SPM RPATA Realisasi 2025
48	287701	KSOP LAURENTIUS SAY	1.336.207.632	SPM RPATA Realisasi 2025
49	287715	KSOP WAINGAPU	2.998.657.808	SPM RPATA Realisasi 2025
50	289960	UPP REO	701.999.529	SPM RPATA Realisasi 2025
51	287370	KSOP TELUK PALU	1.629.848.692	SPM RPATA Realisasi 2025
52	413602	UPP A M P A N A	2.372.340.759	SPM RPATA Realisasi 2025
53	413591	UPP KOLONEDALE	982.113.795	SPM RPATA Realisasi 2025
54	287406	UPP P A R I G I	1.735.908.711	SPM RPATA Realisasi 2025
55	287384	UPP P O S O	395.437.000	SPM RPATA Realisasi 2025
56	521789	UPP PAGIMANA	233.639.999	SPM RPATA Realisasi 2025
57	413422	KSOP UTAMA TANJUNG PRIOK	129.936.600	SPM RPATA Realisasi 2025
58	520454	PPLP TANJUNG PRIOK	1.127.452.245	SPM RPATA Realisasi 2025
59	606301	SATKER BKKP	549.163.550	SPM RPATA Realisasi 2025
60	287321	KSOP GORONTALO	3.215.986.686	SPM RPATA Realisasi 2025
61	521768	UPP TILAMUTA	681.467.576	SPM RPATA Realisasi 2025
62	413313	KSOP PONTIANAK	668.204.315	SPM RPATA Realisasi 2025
63	413322	KSOP SINTETE	513.406.571	SPM RPATA Realisasi 2025
64	521690	UPP TELUK BATANG	1.271.623.563	SPM RPATA Realisasi 2025
65	413231	DISNAV TANJUNG PINANG	11.860.284.800	SPM RPATA Realisasi 2025
66	521594	KSOP KIJANG	963.007.727	SPM RPATA Realisasi 2025
67	413307	KSOP PANJANG	43.506.000	SPM RPATA Realisasi 2025
68	287782	KSOP B I A K	396.151.853	SPM RPATA Realisasi 2025
69	287778	KSOP JAYAPURA	1.955.474.000	SPM RPATA Realisasi 2025
70	287825	KSOP MERAUKE	4.205.594.963	SPM RPATA Realisasi 2025
71	413494	KSOP BAU - BAU	380.000.000	SPM RPATA Realisasi 2025
72	287502	KSOP KENDARI	2.410.502.462	SPM RPATA Realisasi 2025
TOTAL			**468.392.483.511**	

5. Dana Pihak Ketiga

Rekening Penampungan Dana Ganti Kerugian Tanah (KSOP Patimban) berdasarkan Surat KSOP Patimban Nomor UM.006/9/111/KSOP-PMB/2021 perihal Laporan Pembukaan Rekening Pemerintah Lainnya Atas Nama RPL 021 PS KSOP PATIMBAN UNTUK GANTI

RUGI tanggal 04 Maret 2021. Rekening tersebut telah dibuka pada tanggal 19 Februari 2021 pada Bank Rakyat Indonesia KC BRI Pamanukan. Saldo rekening tersebut disajikan sebagai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya – Dana Lainnya (163119) T.A. 2024 sebesar Rp3.698.410.287,-.

6. Dana Pihak Ketiga BLU

Dana Pihak Ketiga BLU yang tercatat pada Distrik Navigasi Tanjung Priok merupakan Kas Lainnya di BLU yang terdapat pada Rekening pada tanggal 31 Desember 2024. Penyajian akun tersebut dilakukan pada periode Koreksi Audited T.A. 2024 atas Tagihan yang diterima oleh Distrik Navigasi Tanjung Priok sesuai Invoice Nomor 007/Des/I/2025 tanggal 03 Januari 2025 sebesar Rp33.734.800,- dan Koreksi atas Bunga yang belum dicatat pada Laporan Keuangan Distrik Navigasi Tanjung Priok per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.295,-.

7. Pendapatan Sewa Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut T.A. 2024 senilai Rp2.036.171.657,- pada 3 satker, diantaranya:

a. KSOP Cirebon

Terdapat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada KSOP Cirebon senilai Rp568.400.000,- berupa sewa tanah reklamasi seluas 21.585m2 selama 5 tahun sesuai dengan HK.201/1/3/KSOP.Cbn-2023 oleh PT. Gamtara Trans Ocean Shipyard. Pendapatan tersebut sudah diakui per 31 Desember 2024 dari total pembayaran Rp710.500.000,-. Periode sewa dimulai pada 01 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2028. Pendapatan Sewa Diterima Dimuka Tahun 2024 dibayarkan pada 25 Oktober 2023 dengan Kode Billing 820231024975826 dan NTPN 4630F3CIFBCJ87UI. Selain itu, Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada KSOP Cirebon senilai Rp1.454.143.500,- berupa sewa tanah reklamasi seluas 48.900m2 selama 5 tahun sesuai dengan HK.201/1/8/KSOP.Cbn-2024 oleh PT. Gamtara Trans Ocean Shipyard. Pendapatan tersebut sudah diakui per 31 Desember 2024 dari total pembayaran Rp1.615.715.000,- Periode sewa dimulai pada 01 Juli 2024 s.d. 30 Juni 2029. Pendapatan Sewa Diterima Dimuka Tahun 2024 dibayarkan pada 7 Oktober 2024 dengan Kode Billing 820241007161393 dan NTPN A487B0NA04UTPC1H.

b. Disnav Pontianak

Terdapat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada Distrik Navigasi Pontianak T.A. 2024 senilai Rp5.294.813,- berupa transaksi Sewa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah. Pendapatan tersebut sudah diakui per 31 Desember 2024 dari total pembayaran Rp27.230.500. Pelaksanaan sewa tersebut sesuai dengan Surat Menteri

Keuangan Nomor S-69/MK.6/KNL.1101/2022 tanggal 15 Agustus 2022 perihal Persetujuan Sewa Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak.

c. Disnav Tanjung Priok

Terdapat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada Distrik Navigasi Tanjung Priok T.A. 2024 senilai Rp8.333.344,- berupa transaksi Sewa Menara Suar Listrik Diesel. Pendapatan tersebut sudah diakui per 31 Desember 2024 dari total pembayaran Rp75.000.000. Pelaksanaan sewa tersebut sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-27/MK.6/WKN.07/KNL.01/2022 tanggal 14 Februari 2022 perihal Persetujuan Sewa atas Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Perhubungan.

8. Pendapatan Diterima di Muka BLU

Pendapatan Diterima di Muka BLU pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut T.A. 2024 senilai Rp84.000.006,- pada 2 satker, diantaranya:

a. Disnav Tanjung Priok

Terdapat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka BLU pada Distrik Navigasi Tanjung Priok T.A. 2024 senilai Rp60.000.006,- berupa transaksi sewa sebagian tanah dan/atau bangunan pada Menara Suar Jaga Utara. Pendapatan tersebut sudah diakui per 31 Desember 2024 dari total pembayaran Rp120.000.000,-. Pelaksanaan sewa tersebut sesuai dengan perjanjian sewa Nomor HK.201/1/19/DNG.TPK/2023 tertanggal 21 Juli 2023 antara Distrik Navigasi Tanjung Priok dengan PT. XL Axiata Tbk.

b. Satker Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP)

Terdapat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka BLU pada BKKP T.A. 2024 senilai Rp24.000.000,- berupa transaksi Perjanjian Kerja Sama Sewa Lahan ATM.

9. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN senilai Rp343.335.765,- berupa Kas Bendahara Pengeluaran TUP yang telah disetorkan ke Kas Negara T.A. 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Satker	Nama Satker	NTPN	Tanggal Setor	Saldo Kas Bendahara	Keterangan
1	559421	UPP JAILOLO	C3B4D45KSPFL5LAB	16-01-2025	12.866.000	Sudah Disetor Ke Kas Negara
2	559400	UPP SOA-SIU	4DF171GCDLQ3	07-01-2025	20.831.000	Sudah Disetor Ke Kas Negara
3	521899	UPP WEDA	5E9B76QTC944HBSU	07-01-2025	1	Sudah Disetor Ke Kas Negara

No	Kode Satker	Nama Satker	NTPN	Tanggal Setor	Saldo Kas Bendahara	Keterangan
4	517911	UPP BINTUNI	A89837NAS3MQFLU8	08-01-2025	46.685.800	Sudah Disetor Ke Kas Negara
5	559594	UPP RAJA AMPAT	9312D6QTC94NJV87 dan 803412CPT48PIV83	10-01-2025	257.562.940	Sudah Disetor Ke Kas Negara
6	652474	KSOP KEP. SERIBU	F9EAE7NAS3L184F4 dan DC8476QTC96GREJ6	02-01-2025 dan 15-01-2025	5.390.024	Sudah Disetor Ke Kas Negara
TOTAL					**343.335.765**	

10. Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor yang juga tersaji sebagai Kas Lainnya Bendahara Pengeluaran sebesar Rp34.368.910,- dan telah disetorkan ke Kas Negara T.A. 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Satker	Nama Satker	NTPN	Tanggal Setor	Saldo Kas Bendahara	Keterangan
1	559459	UPP NAMROLE	9AC8167P9G5HQGAK, 169751PLQB9JF49N, 7DE4167P9G5GSGCP, 28A221PLQB9IJNCF, 81F7E1PLQB9HONV0, B34111PLQB9M1D19, 79FC81PLQBAEB5N0, 1B3955BBPLJTRAR7, A07B900QQM5KKHN3, 91B234EU9R1I9A42, DB021PLQBABE18Q, 2E7860011M5HEM04, 261890T8AGNPCRMM, 188FA3IGQ0F28A53, 9131767P9G65QLMA, AF93367P9G65GQ8R, 3F850746PAOHHILN, A86315BBPLJOC5AM, 28V702M3A5SICQ1O, 261890T8AGNPCRMM, 3779B00QQM596KM5, CC6941PLQBA1RTAQ, 450DC3IGQEQ64GL, F082267P9G5V3NLV, 7508E2M3A5SD40O4, A6EB667P9G5UJI4F, BD0954EU9R13KH7L, 5CAF267P9G5RS3A8, B311B0T8AGN94BEG,	02 Januari 2025, 20 Januari 2025, dan 12 Februari 2025	34.368.910	Sudah Disetor Ke Kas Negara berupa Setoran Pajak T.A. 2024

No	Kode Satker	Nama Satker	NTPN	Tanggal Setor	Saldo Kas Bendahara	Keterangan
			CD9EA4EU9R1K8BKV, 8993D00QQM5LM007, 7654667P9G6BA5TB, 032E20T8AFO26R5H, 02A342M3A5SP94Q3, CADF21PMO819TBOB, 8E07D746V7FLD3UH, E45872M3G2JMQU3V, D33F34EUFNOFA2ED, FAADC4EUFNOFG8L1			
TOTAL					**34.368.910**	

11. Kewajiban Konsesi Jasa Skema Pemberian Hak Usaha Kepada Mitra

Kewajiban Konsesi Jasa Skema Pemberian Hak Usaha Kepada Mitra T.A. 2024 senilai Rp38.185.064.749.841,- merupakan akun yang tersaji sebagai penyesuaian atas pencatatan Aset Konsesi Jasa dan Pendapatan Penyesuaian Konsesi Jasa (491315) setiap periode pelaporan berdasarkan Kertas Kerja Restropektif masing-masing Perjanjian pada masing-masing satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

X. Transfer Keluar – Transfer Masuk

Transfer Keluar-Transfer Masuk secara internal pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut T.A. 2024 telah sesuai dengan Berita Acara Serah Terima masing-masing satuan kerja dengan Total Nilai Rp1.074.705.095.246,-. Sedangkan berdasarkan Neraca Percobaan Akrual, terdapat selisih nilai Transfer Keluar-Transfer Masuk pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut T.A. 2024 sebesar Rp79.091.268.504,- yang disebabkan oleh selisih Nilai Transfer Masuk **dari BA Non-022.04** maupun Nilai Transfer Keluar **ke BA Non-022.04**. Terdapat 8 satker yang melakukan transaksi transfer masuk dan transfer keluar dengan Eselon I lain dan/atau Kementerian/Lembaga lainnya. Transfer Keluar dari 3 satker DJPL ke satker dengan BA Non-022.04 secara netto sebesar Rp126.821.997.865,- dan Transfer Masuk pada 6 satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berasal dari BA Non-022.04 secara netto sebesar Rp47.730.729.361,-. Rincian Transfer Keluar-Transfer Masuk BA Non-022.04 adalah sebagai berikut:

TRANSFER KELUAR-MASUK NERACA		
	Transfer Keluar	1.201.527.093.111
	Transfer Masuk	1.122.435.824.607
SELISIH		**79.091.268.504**
	TRANSFER KELUAR KE BA NON 022.04	
1	Perwakilan Kementerian Perhubungan di Kuala Lumpur	28.527.000

2	Perwakilan Kementerian Perhubungan Di Singapura	28.527.000
3	Kantor Pusat Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan	-
4	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam	126.764.943.865
	JUMLAH	**126.821.997.865**
	TRANSFER MASUK DARI BA NON 022.04	
1	Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bc Morowali	301.833.681
2	Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bc Samarinda	611.241.706
3	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	46.064.975.000
4	Kantor Pusat Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan	-
5	Stasiun Meteorologi Maritim Paotere - BMKG	698.580.798
6	Sekretariat Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	54.098.176
	JUMLAH	**47.730.729.361**
JUMLAH TK-TM NON 022.04		**79.091.268.504**
SELISIH AKHIR		**-**

1. Kantor Pusat (Transfer Keluar)

   Terdapat Transfer Keluar ke Satker Perwakilan Kementerian Perhubungan di Kuala Lumpur (022.01.412678) sebesar Rp28.527.000,- berupa Persediaan Barang Konsumsi (Buku Pelaut). Transfer tersebut berdasarkan Berita Acara Penerimaan Buku Pelaut Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Nomor UM.003/8/12/DK/2024 tanggal 25 April 2024. Selain itu, Transfer Keluar ke Satker Perwakilan Kementerian Perhubungan di Singapura (022.01.412684) sebesar Rp28.527.000,- berupa Persediaan Barang Konsumsi (Buku Pelaut). Transfer tersebut berdasarkan Berita Acara Penerimaan Buku Pelaut Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Nomor UM.003/17/16/DK/2024 tanggal 13 September 2024.

2. KSOP Tanjung Pinang (Transfer Keluar)

   Terdapat Transfer Keluar ke Satker BP Kawasan PBPB Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang (999.08.3200.984423.001) sebesar Rp126.764.943.865,- berupa Tanah dan Dermaga Faspel Tanjung Mocoh. Transfer tersebut berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-PHB 88 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Berupa Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara tanggal 22 Februari 2024 dengan Aset Tanah senilai Rp23.004.399.000,- dengan luas 35.776m2 dan Dermaga senilai Rp125.012.704.660,- dengan luas 5.760m2 dan akumulasi penyusutan dermaga senilai Rp(21.252.159.795,-). Selain itu, serah terima aset tersebut telah didukung dengan Surat Pernyataan Siap Menerima Hibah dan Mengelola Barang Milik Negara Nomor 06.089/BP-TPI/IV/2023 tanggal 10 April 2023 dan Surat Gubernur Kepulauan Riau kepada Menteri Perhubungan Nomor B/552.3/528/DISHUB/2023 tanggal 10 Maret 2023 Hal Dukungan Pengembangan Pelabuhan Tanjung Mocoh dan Penyerahan Aset Pelabuhan Tanjung Mocoh.

3. KSOP Cirebon (Transfer Keluar dan Transfer Masuk)

   Terdapat Transfer Keluar ke Kantor Pusat Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan (022.01.412631) berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp41.281.000,- dan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp(41.281.000,-). Selain itu, terdapat transaksi transfer masuk aset dari Luar Ditjen Perhubungan Laut (022.04) yaitu Kantor Pusat Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan (022.01.412631) berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp390.754.000,- dan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp(64.301.294,-). Transfer tersebut merupakan Minibus atas Kendaraan Dinas berdasarkan Berita Acara Nomor BA-STJ 3441 Tahun 2024 dan BA-KSOP.Cbn 389 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024.

4. UPP Poso (Transfer Masuk)

   Terdapat transaksi transfer masuk aset dari Luar Ditjen Perhubungan Laut (022.04) yaitu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Morowali (015.05.180641) berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen senilai Rp856.341.000,- dengan luas 362m2, Bangunan Gudang Tertutup Permanen senilai Rp124.963.000,- dengan luas 116m2, dan Jaringan Listrik Lainnya senilai Rp37.946.700,-, serta akumulasi penyusutannya senilai Rp(717.417.019,-). Transaksi Transfer Masuk tersebut sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Keuangan Kepada Kementerian Perhubungan Nomor BA-6/MK.1/SJ.7/2024 tanggal 22 Januari 2024.

5. UPP Tanjung Santan (Transfer Masuk)

   Terdapat transaksi transfer masuk aset dari Luar Ditjen Perhubungan Laut (022.04) yaitu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda-Kementerian Keuangan (015.05.411265) berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 946m2, Tanah Bangunan Rumah Negara seluas 1.350m2, Bangunan Gedung Kantor Permanen seluas 150m2, dan 5 unit Rumah Negara Golongan II Tipe D Semi Permanen dengan total nilai Rp675.543.000,-, serta akumulasi penyusutannya senilai Rp(64.301.294,-). Transaksi Transfer Masuk tersebut sesuai dengan BAST Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Keuangan c.q. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda Kepada Kementerian Perhubungan c.q. Kantor UPP Kelas III Tanjung Santan Nomor BA-11/MK.1/SJ.7/2024 tanggal 25 Maret 2024 dan Berita Acara Serah Terima Aset Hasil Pengalihan Status Penggunaan BMN Pada Kementerian Keuangan c.q. KPP Bea dan Cukai TMP B Samarinda Kepada Kementerian Perhubungan Untuk Dipergunakan Dalam Tugas-Tugas Operasional Nomor BA-STJ 2167 Tahun 2024 dan BA-DJPL 465 Tahun 2024

tanggal 04 Juni 2024.

6. KSOP Patimban (Transfer Masuk)

   Terdapat transaksi transfer masuk aset dari Luar Ditjen Perhubungan Laut (022.04) yaitu Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi-Kementerian Pertanian (018.09.237238) berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 42.675m2 senilai Rp36.807.187.500,- dan Tanah Sawah Irigasi seluas 12.385m2 senilai Rp9.257.787.500,-. Transaksi Transfer Masuk tersebut sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Tentang Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia Kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor B-1571/PL.020/H.2.1/11/2024 dan BA-KSOP.Pmb 681 Tahun 2024 tanggal 11 November 2024.

7. Distrik Navigasi Makassar (Transfer Masuk)

   Terdapat transaksi transfer masuk aset dari Luar Ditjen Perhubungan Laut (022.04) yaitu Stasiun Meteorologi Maritim Paotere-BMKG (075.01.437803) berupa Peralatan dan Mesin senilai Rp134.404.774,-, Gedung dan Bangunan senilai Rp824.111.250,-, Irigasi senilai Rp34.363.000,-, dan Jaringan senilai Rp28.225.000,-, serta Akumulasi Penyusutannya dengan total nilai Rp(322.523.226),-. Transaksi Transfer Masuk tersebut sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Aset Stasiun Meteorologi Maritim Paotere Makassar Kepada Kantor Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Makassar Nomor PL.02.01/7/KPTR/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024.

8. Distrik Navigasi Tanjung Intan (Transfer Masuk)

   Terdapat transaksi transfer masuk aset dari Luar Ditjen Perhubungan Laut (022.04) yaitu Sekretariat Utama – Badan Riset dan Inovasi Nasional (124.01.690487) berupa Tanah Kering Lainnya seluas 400m2 senilai Rp54.098.176,-. Transaksi Transfer Masuk tersebut sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Kepada Kementerian Perhubungan Nomor B-5104/II.2/PL.02.00/8/2024 dan BA-SKJ 78 Tahun 2024 tanggal 16 Agustus 2024.

Y. Hibah Barang dan Jasa

Pengesahan Hibah Langsung dan Pengesahan Hibah Langsung TAYL di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut T.A. 2024 masing-masing sebesar Rp37.685.122.078,- Rp3.210.754.850,-. Rincian atas Pengesahan Hibah Langsung adalah sebagai berikut:

No	No Register	Nama Project	Kode Satker	Tanggal Pengesahan	Jenis Aset	Nilai (Rp)	No. SPHL/ MPHLBJS	No. BAST
1	25GNLGDA	**UPP Tanjung Redeb** Hibah Barang Berupa Speed Boat sebagai Bantuan Program CSR Dari License & Corporate Communication General Manager PT. Berau Coal	289843	28 Maret 2024	Peralatan dan Mesin	172.629.000	815903101 905211000	PL.103/1/3/UPP.Trb/2023 dan 067/BC/LCC-YNP/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023

No	No Register	Nama Project	Kode Satker	Tanggal Pengesahan	Jenis Aset	Nilai (Rp)	No. SPHL/ MPHLBJS	No. BAST
2	2T2TH1NA	**KSOP Selat Panjang** Hibah Barang Berupa Tanah Dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti	413137	26 Februari 2024	Tanah	5.500.018.180	815364769 891808000	HK.201/7/17/DJPL/202 dan 340/BAST/BPKAD-ASET/05 tanggal 02 Januari 2024
3	2GYXFJBA	**UPP Weda** Hibah Barang Berupa Kendaraan Roda Empat dari Donor PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park untuk Menunjang Operasional Kegiatan Kantor	521899	17 Oktober 2024	Peralatan dan Mesin	407.700.000	00247T	Perjanjian Hibah Nomor HK201/3/20/DJPL/2024 dan Berita acara Nomor PL.301/1/5/UPP.WEDA/2024 dan 0267/DTWIP.YC/LO/05/24 tanggal 22 Mei 2024
4	2WSXKB7A	**UPP Mamuju** Hibah Barang Berupa Tanah dan Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Daerah Mamuju Dalam Rangka Menunjang Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut	413463	24 Desember 2024	Tanah dan Gedung dan Bangunan	5.733.315.100	00644T	Perjanjian Hibah Nomor 028/407.a/VII/2024/BPKAD dan HK.201/11/6/DJPL/2024 tanggal 25 November 2024 Tanah senilai Rp2.400.000.000,- Gedung dan Bangunan senilai Rp3.333.315.100,-.
5	70878801	**Satker Kenavigasian Pusat** Hibah Langsung Berupa Uang untuk Pembayaran Belanja Barang dan Barang, Register 70878801 AID TO NAVIGATION FUND (ANF)	439460	10 Desember 2024	Uang	16.901.010.929	00164T/ 439460/ 2024	Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (SPTMHL) Nomor 01/SPTMHL/PKP/24 dan SPTJM Nomor 01/SPTJM/PKP/24 tanggal 10 Desember 2024
6	2JPHVUGA	**UPP Luwuk** Hibah Langsung Berupa Tanah untuk digunakan sebagai lokasi Pembangunan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Salakan Desa Bongganan Kecamatan Tinangkung Kab. Banggai, Prov. Sulawesi Tengah	287391	14 November 2024	Tanah	2.338.859.000	00266T	BAST Nomor BA-UPP.LWK 29 Tahun 2024 tanggal 06 Agustus 2024
7	2ZNJD6YA	**KSOP Tanjung Balai Karimun** Hibah Langsung Barang T.A. 2024 berupa Bangunan dan Peralatan Mesin dari Pemerintah Kabupaten Karimun	413180	31 Desember 2024	Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Jembatan	6.204.914.869	00441T	BAST Hibah Nomor 010/BPKAD-05/X/BASTH/2024 tanggal 07 Oktober 2024
8	2FSH6UMA	**KSOP Tanjung Balai Karimun** Hibah Langsung Barang T.A. 2024 berupa Bangunan sebanyak 2 unit dari Perorangan	413180	07 November 2024	Gedung dan Bangunan	190.000.000	00368T	BAST Nomor BA-KSOP.TBK 284 Tahun 2024 tanggal 09 September 2024
9	25MWK9WA	**KSOP Panjang** Hibah Barang Koperasi Gedung dan Bangunan milik Koperasi Pegawai Betik Hati	413307	23 Desember 2024	Gedung dan Bangunan	236.675.000	00593T	NPHD Nomor 16/KOP/BH/PJG/NPH/ 2024 dan PL.304/1/1/KSOP.PJG-2024 Tanggal 10 Mei 2024
TOTAL						**37.685.122.078**		

Sedangkan rincian Pengesahan Hibah Langsung TAYL di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut T.A. 2024 senilai Rp3.210.754.850,- adalah sebagai berikut:

No	No Register	Nama Project	Kode Satker	Tanggal Pengesahan	Jenis Aset	Nilai (Rp)	NO SPHL / MPHLBJS	No. BAST
1	26X2MQPA	**UPP Kolaka** Hibah Langsung Barang Berupa Aset Tanah Dari Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara	413508	20 Februari 2024	Tanah	2.231.754.850	815276833905 273248	Perjanjian Hibah Nomor 001/01/2023 dan HK.201/15/16/UPP.KLK/2023 tanggal 27 Desember 2023

No	No Register	Nama Project	Kode Satker	Tanggal Pengesahan	Jenis Aset	Nilai (Rp)	NO SPHL / MPHLBJS	No. BAST
2	2QQPR2FA	**UPP Kolaka** Hibah Langsung Barang Dari Saudara Zainuddin, S.Sos Dalam Rangka Tertib Administrasi Barang Milik Negara	413508	21 Oktober 2024	Gedung dan Bangunan	144.000.000	00293T	Perjanjian Hibah Nomor 001/01/2023 dan Berita acara serah terima nomor HK.201/16/16/UPP.KLK/2023 tanggal 27 Desember 2023
3	2VSCC8AA	**UPP Kolonedale** Hibah Tanah Bangunan Terminal Laut Dari Pemerintah Kabupaten Morowali	413591	05 November 2021	Tanah	515.000.000	818128274928958877	Perjanjian Hibah Nomor 419/1128/DISHUB/XI tanggal 05 November 2021
4	2BG6X2QA	**UPP Tanjung Uban** Hibah Langsung Barang Berupa Tanah Kepada Dari Pemerintah Kabupaten Bintan	413199	04 Desember 2024	Tanah	320.000.000	00370T	BAST Hibah Nomor 002/BAST-HBH/2017 tanggal 12 Desember 2017

Jakarta, 19 Mei 2025

Direktur Jenderal Perhubungan Laut,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Muhammad Masyhud

NIP 19700622 199803 1 001

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

LAMPIRAN I
LK MONSAKTI

BA
22
04

Laporan Keuangan 2024
AUDITED

151
Jl. Medan Merdeka Barat
www.dephub.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022

ESELON I : DITJEN PERHUBUNGAN LAUT 04

Tgl Data : 07/05/25 2:22 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 9:11 PM

lap_lra_face_es1_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Pendapatan Perpajakan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	**5,341,168,720,000**	**6,135,548,964,289**	**794,380,244,289**	**114.87**	**4,553,517,188,000**	**4,965,294,740,352**	**411,777,552,352**	**109.04**
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	83,921,377,000	113,490,547,274	29,569,170,274	135.23	70,490,823,000	80,022,063,214	9,531,240,214	113.52
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	5,257,247,343,000	6,022,058,417,015	764,811,074,015	114.55	4,483,026,365,000	4,885,272,677,138	402,246,312,138	108.97
III. Pendapatan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	**5,341,168,720,000**	**6,135,548,964,289**	**794,380,244,289**	**114.87**	**4,553,517,188,000**	**4,965,294,740,352**	**411,777,552,352**	**109.04**
B. Belanja Negara	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belanja Pemerintah Pusat	14,638,480,234,000	14,025,760,546,412	(612,719,687,588)	95.81	10,626,954,299,000	10,414,978,962,128	(211,975,336,872)	98.01
1. Belanja Pegawai	1,963,838,533,000	1,916,280,438,810	(47,558,094,190)	97.58	1,752,190,066,000	1,747,851,998,408	(4,338,067,592)	99.75
2. Belanja Barang	5,528,150,745,000	5,199,338,252,423	(328,812,492,577)	94.05	4,850,122,926,000	4,808,797,080,718	(41,325,845,282)	99.15
3. Belanja Modal	7,146,490,956,000	6,910,141,855,179	(236,349,100,821)	96.69	4,024,641,307,000	3,858,329,883,002	(166,311,423,998)	95.87
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022

ESELON I : DITJEN PERHUBUNGAN LAUT 04

Tgl Data : 07/05/25 2:22 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 9:11 PM

lap_lra_face_es1_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	**14,638,480,234,000**	**14,025,760,546,412**	**(612,719,687,588)**	**95.81**	**10,626,954,299,000**	**10,414,978,962,128**	**(211,975,336,872)**	**98.01**
C. PEMBIAYAAN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Keterangan :

BELUM FINAL

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON I : 04 DITJEN PERHUBUNGAN LAUT

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 07/05/25 9:19 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum					
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	7,527,874,000	2,644,701,758	0	2,644,701,758	35.13
424115	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan dan Kenavigasian	66,091,708,000	94,788,108,999	0	94,788,108,999	143.42
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	0	155	0	155	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4241	73,619,582,000	97,432,810,912	0	97,432,810,912	132.35
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU					
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	9,976,675,000	11,448,065,983	0	11,448,065,983	114.75
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4243	9,976,675,000	11,448,065,983	0	11,448,065,983	114.75
4244	Pendapatan Dari Alokasi APBN					
424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah	0	1,149,700,000	0	1,149,700,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4244	0	1,149,700,000	0	1,149,700,000	
4249	Pendapatan BLU Lainnya					
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	315,120,000	2,626,104,879	0	2,626,104,879	833.37
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	250,486,500	0	250,486,500	0
424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	37,140,000	0	37,140,000	0
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	10,000,000	28,291,000	0	28,291,000	282.91
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	517,948,000	0	517,948,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4249	325,120,000	3,459,970,379	0	3,459,970,379	1,064.21
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	744,312,200	0	744,312,200	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	8,170,778,278	0	8,170,778,278	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	2,075,763,664	0	2,075,763,664	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	14,302,915,000	25,834,288,065	0	25,834,288,065	180.62

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : **022** **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
ESELON I : **04** **DITJEN PERHUBUNGAN LAUT**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 07/05/25 9:19 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_pen_akun_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	2,119,310,000	2,253,503,600	0	2,253,503,600	106.33
425133	Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	279,132,000	0	279,132,000	0
425134	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	10,785,128,000	10,785,127,425	0	10,785,127,425	100
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	20,142,000	0	20,142,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	27,207,353,000	50,163,047,232	0	50,163,047,232	184.37
4255	Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika					
425513	Pendapatan Jasa Kepelabuhanan	3,203,119,532,000	3,557,445,914,275	70,999,368	3,557,374,914,907	111.06
425514	Pendapatan Jasa Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	659,819,386,000	803,038,356,303	78,531,104,512	724,507,251,791	109.8
425515	Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	273,040,491,000	287,338,983,258	0	287,338,983,258	105.24
425517	Pendapatan Jasa Navigasi Penerbangan dan Telekomunikasi Pelayaran	102,376,504,000	133,816,588,480	16,182,814,608	117,633,773,872	114.9
425518	Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi	817,736,245,000	885,950,297,542	0	885,950,297,542	108.34
425519	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	173,905,832,000	200,174,588,759	0	200,174,588,759	115.11
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4255	5,229,997,990,000	5,867,764,728,617	94,784,918,488	5,772,979,810,129	110.38
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	29,540,000	0	29,540,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	0	29,540,000	0	29,540,000	
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	39,421,310	0	39,421,310	0
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	42,000,000	30,000,000	0	30,000,000	71.43
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak	0	9,983,229,000	0	9,983,229,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	42,000,000	10,052,650,310	0	10,052,650,310	23,934.88
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	8,831,928,460	0	8,831,928,460	0
425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	15,790,604	0	15,790,604	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON I : 04 DITJEN PERHUBUNGAN LAUT

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 07/05/25 9:19 PM

Prg ID : lap_lra_pen_akun_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	8,847,719,064	0	8,847,719,064	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	148,385,500	0	148,385,500	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	161,596,369,022	0	161,596,369,022	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	18,227,054,511	0	18,227,054,511	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	13,841,247	0	13,841,247	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	179,985,650,280	0	179,985,650,280	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	5,341,168,720,000	6,230,333,882,777	94,784,918,488	6,135,548,964,289	114.87
	JUMLAH PENDAPATAN	5,341,168,720,000	6,230,333,882,777	94,784,918,488	6,135,548,964,289	114.87

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON I : 04 DITJEN PERHUBUNGAN LAUT

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 9:18 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1_poc

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	629,073,375,000	680,747,952,000	673,712,292,374	86,271,601	673,626,020,773	98.95	7,121,931,227
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15,274,000	19,220,000	14,983,189	291,525	14,691,664	76.44	4,528,336
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	51,612,274,000	52,564,757,000	51,150,458,277	15,950,030	51,134,508,247	97.28	1,430,248,753
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	16,618,697,000	16,977,561,000	16,211,889,322	2,003,672	16,209,885,650	95.48	767,675,350
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	9,148,938,000	8,973,851,000	8,547,975,089	8,570,350	8,539,404,739	95.16	434,446,261
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	500,895,000	884,659,000	823,157,000	0	823,157,000	93.05	61,502,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	2,068,158,000	5,064,222,000	4,397,730,996	197,051	4,397,533,945	86.84	666,688,055
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	41,441,133,000	41,247,538,000	40,003,896,730	2,969,220	40,000,927,510	96.98	1,246,610,490
511129	Belanja Uang Makan PNS	119,762,537,000	111,723,776,000	107,239,715,400	741,000	107,238,974,400	95.99	4,484,801,600
511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	15,119,233,000	11,494,817,000	9,227,682,891	301,842	9,227,381,049	80.27	2,267,435,951
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	627,326,000	507,571,000	465,625,000	250,000	465,375,000	91.69	42,196,000
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	4,040,935,000	4,065,550,000	3,976,950,000	1,325,000	3,975,625,000	97.79	89,925,000
511147	Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan	10,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	33,456,419,000	33,601,031,000	32,411,052,500	4,255,250	32,406,797,250	96.45	1,194,233,750
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	923,495,194,000	967,873,505,000	948,183,408,768	123,126,541	948,060,282,227	97.95	19,813,222,773
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	795,507,000	12,197,231,000	11,601,639,800	0	11,601,639,800	95.12	595,591,200
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	252,000	2,012,000	208,232	550	207,682	10.32	1,804,318
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	40,944,000	711,679,000	556,228,570	0	556,228,570	78.16	155,450,430
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	12,753,000	194,293,000	99,018,322	0	99,018,322	50.96	95,274,678
511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK	0	7,020,000	3,510,400	0	3,510,400	50.01	3,509,600
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	27,972,000	223,979,000	140,983,000	0	140,983,000	62.94	82,996,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	29,585,000	696,633,000	566,646,280	0	566,646,280	81.34	129,986,720
511627	Belanja Tunjangan Lauk Pauk PPPK	1,740,000	0	0	0	0	0	0
511628	Belanja Uang Makan PPPK	240,590,000	2,679,910,000	2,295,616,400	560,000	2,295,056,400	85.64	384,853,600
511629	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PPPK	0	175,412,000	126,571,289	0	126,571,289	72.16	48,840,711
511631	Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	100	0
511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	0	46,600,000	45,300,000	0	45,300,000	97.21	1,300,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	12,040,000	60,077,000	730,000	0	730,000	1.22	59,347,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	1,161,383,000	16,995,846,000	15,437,452,293	560,550	15,436,891,743	90.83	1,558,954,257
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	95,732,877,000	100,472,995,000	96,950,736,800	0	96,950,736,800	96.49	3,522,258,200
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	114,748,000	1,320,151,000	1,054,012,950	0	1,054,012,950	79.84	266,138,050
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	95,847,625,000	101,793,146,000	98,004,749,750	0	98,004,749,750	96.28	3,788,396,250
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON I : 04 DITJEN PERHUBUNGAN LAUT

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 9:18 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1_poc

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	779,762,022,000	863,110,453,000	841,853,512,427	119,915,594	841,733,596,833	97.52	21,376,856,167
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1,396,034,000	14,065,583,000	13,046,540,457	1,622,200	13,044,918,257	92.74	1,020,664,743
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	781,158,056,000	877,176,036,000	854,900,052,884	121,537,794	854,778,515,090	97.45	22,397,520,910
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	1,801,662,258,000	1,963,838,533,000	1,916,525,663,695	245,224,885	1,916,280,438,810	97.58	47558094190
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	176,672,306,000	319,481,183,000	310,294,379,669	138,517,107	310,155,862,562	97.08	9,325,320,438
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	69,526,548,000	56,673,408,000	55,312,009,086	666,000	55,311,343,086	97.6	1,362,064,914
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1,340,450,000	1,440,381,000	1,404,901,214	0	1,404,901,214	97.54	35,479,786
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,206,929,000	3,474,364,000	3,148,997,283	0	3,148,997,283	90.64	325,366,717
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	69,107,269,000	62,185,536,000	37,035,353,768	14,283,100	37,021,070,668	59.53	25,164,465,332
521116	Belanja Keperluan Perkantoran Atase Pertahanan Luar Negeri	40,000,000	0	0	0	0	0	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	99,129,030,000	27,983,634,000	26,677,043,938	32,178,200	26,644,865,738	95.22	1,338,768,262
521121	Belanja Barang Operasional kepada BLU dalam Satu	10,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	421,032,532,000	471,238,506,000	433,872,684,958	185,644,407	433,687,040,551	92.03	37,551,465,449
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	53,022,279,000	57,089,150,000	52,690,048,933	19,150,208	52,670,898,725	92.26	4,418,251,275
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,935,770,000	1,813,065,000	1,616,680,934	0	1,616,680,934	89.17	196,384,066
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,998,684,201,000	2,464,000,685,000	2,345,483,421,918	66,854,080	2,345,416,567,838	95.19	118,584,117,162
521221	Belanja Barang Non Operasional kepada BLU dalam Satu	2,411,320,000	7,172,196,000	7,144,944,000	0	7,144,944,000	99.62	27,252,000
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	146,020,000	145,349,325	0	145,349,325	99.54	670,675
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	2,056,053,570,000	2,530,221,116,000	2,407,080,445,110	86,004,288	2,406,994,440,822	95.13	123,226,675,178
5217	Belanja Kontribusi dan Kompensasi							
521711	Belanja Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust	650,000,000	538,000,000	537,903,933	0	537,903,933	99.98	96,067
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5217	650,000,000	538,000,000	537,903,933	0	537,903,933	99.98	96,067
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	79,151,935,000	76,244,763,000	69,985,042,666	0	69,985,042,666	91.79	6,259,720,334
521812	Belanja Barang Persediaan Amunisi	1,396,000,000	192,979,000	192,973,500	0	192,973,500	100	5,500
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	195,281,000	181,653,000	172,260,000	0	172,260,000	94.83	9,393,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	80,743,216,000	76,619,395,000	70,350,276,166	0	70,350,276,166	91.82	6,269,118,834
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	116,732,179,000	68,088,909,000	65,545,668,238	4,517,695	65,541,150,543	96.26	2,547,758,457
522112	Belanja Langganan Telepon	14,206,897,000	5,109,465,000	4,550,554,557	4,515,147	4,546,039,410	88.97	563,425,590
522113	Belanja Langganan Air	20,439,851,000	7,933,856,000	7,190,269,747	0	7,190,269,747	90.63	743,586,253
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	59,188,889,000	49,213,817,000	47,157,636,515	53,391	47,157,583,124	95.82	2,056,233,876
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	2,795,463,000	1,470,410,000	1,186,771,783	0	1,186,771,783	80.71	283,638,217

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON I : 04 DITJEN PERHUBUNGAN LAUT

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 9:18 PM

Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1_poc

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
522131	Belanja Jasa Konsultan	110,880,681,000	100,468,029,000	77,208,831,181	0	77,208,831,181	76.85	23,259,197,819
522141	Belanja Sewa	8,841,935,000	17,224,649,000	16,974,766,829	0	16,974,766,829	98.55	249,882,171
522151	Belanja Jasa Profesi	9,189,345,000	5,595,399,000	4,193,058,070	0	4,193,058,070	74.94	1,402,340,930
522191	Belanja Jasa Lainnya	626,267,586,000	369,965,096,000	352,109,056,722	14,627,634	352,094,429,088	95.17	17,870,666,912
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	968,542,826,000	625,069,630,000	576,116,613,642	23,713,867	576,092,899,775	92.16	48,976,730,225
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	147,388,533,000	186,288,982,000	184,488,313,979	0	184,488,313,979	99.03	1,800,668,021
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	10,000,000	98,800,000	98,766,700	0	98,766,700	99.97	33,300
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	206,551,000	106,551,000	106,549,000	0	106,549,000	100	2,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	440,773,872,000	674,468,873,000	664,454,714,253	256,919,500	664,197,794,753	98.48	10,271,078,247
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	92,568,952,000	132,997,791,000	131,963,055,654	0	131,963,055,654	99.22	1,034,735,346
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11,976,800,000	18,102,432,000	18,100,447,570	0	18,100,447,570	99.99	1,984,430
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	104,654,612,000	84,927,406,000	83,999,283,306	0	83,999,283,306	98.91	928,122,694
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	4,968,502,000	6,297,860,000	6,084,164,847	0	6,084,164,847	96.61	213,695,153
523134	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	96,000,000	96,000,000	95,975,000	0	95,975,000	99.97	25,000
523136	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	871,925,000	0	0	0	0	0	0
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	1,200,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	804,715,747,000	1,103,384,695,000	1,089,391,270,309	256,919,500	1,089,134,350,809	98.71	14,250,344,191
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	314,232,492,000	485,328,531,000	421,443,946,682	23,630,717	421,420,315,965	86.83	63,908,215,035
524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0	39,168,000	0	0	0	0	39,168,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	70,457,304,000	116,879,483,000	100,709,102,359	2,380,000	100,706,722,359	86.16	16,172,760,641
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18,446,464,000	41,202,846,000	35,730,544,559	0	35,730,544,559	86.72	5,472,301,441
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	33,663,251,000	39,510,098,000	30,728,355,343	1,061,399	30,727,293,944	77.77	8,782,804,056
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	436,799,511,000	682,960,126,000	588,611,948,943	27,072,116	588,584,876,827	86.18	94,375,249,173
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	12,167,025,000	20,976,180,000	17,347,452,146	10,516,000	17,336,936,146	82.65	3,639,243,854
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	12,167,025,000	20,976,180,000	17,347,452,146	10,516,000	17,336,936,146	82.65	3,639,243,854
5251	Belanja Barang BLU							
525112	Belanja Barang	570,253,000	1,652,173,000	1,531,043,928	0	1,531,043,928	92.67	121,129,072
525113	Belanja Jasa	3,227,320,000	4,059,633,000	3,728,294,086	0	3,728,294,086	91.84	331,338,914
525114	Belanja Pemeliharaan	0	2,716,108,000	2,712,600,948	0	2,712,600,948	99.87	3,507,052
525115	Belanja Perjalanan	1,447,472,000	1,431,924,000	1,396,191,983	0	1,396,191,983	97.5	35,732,017
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	5,894,359,000	7,278,462,000	7,251,396,449	0	7,251,396,449	99.63	27,065,551
525162	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	0	4,797,000	0	0	0	0	4,797,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251	11,139,404,000	17,143,097,000	16,619,527,394	0	16,619,527,394	96.95	523,569,606

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON I : 04 DITJEN PERHUBUNGAN LAUT

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 9:18 PM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1_poc

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	4,791,843,831,000	5,528,150,745,000	5,199,928,122,601	589,870,178	5,199,338,252,423	94.05	328812492577
53	BELANJA MODAL							
5311	Belanja Modal Tanah							
531111	Belanja Modal Tanah	14,513,200,000	30,693,981,000	25,509,540,280	0	25,509,540,280	83.11	5,184,440,720
531114	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	560,000,000	265,500,000	208,646,000	0	208,646,000	78.59	56,854,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5311	15,073,200,000	30,959,481,000	25,718,186,280	0	25,718,186,280	83.07	5,241,294,720
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	421,639,136,000	781,854,250,000	767,620,826,563	90,000	767,620,736,563	98.18	14,233,513,437
532113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	36,900,000	69,182,000	37,282,000	0	37,282,000	53.89	31,900,000
532115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan	2,033,979,000	798,707,000	789,965,500	0	789,965,500	98.91	8,741,500
532118	Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	0	376,750,000	371,437,650	0	371,437,650	98.59	5,312,350
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	5,576,208,000	60,868,042,000	60,804,937,150	0	60,804,937,150	99.9	63,104,850
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	429,286,223,000	843,966,931,000	829,624,448,863	90,000	829,624,358,863	98.3	14,342,572,137
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	476,904,900,000	588,892,840,000	553,099,762,860	219,338,330	552,880,424,530	93.88	36,012,415,470
533112	Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	0	41,735,184,000	41,735,184,000	0	41,735,184,000	100	0
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan	536,100,000	788,059,000	786,786,870	0	786,786,870	99.84	1,272,130
533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	55,750,000	215,000,000	196,216,100	0	196,216,100	91.26	18,783,900
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	2,606,290,000	5,553,129,000	5,362,162,329	0	5,362,162,329	96.56	190,966,671
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	480,103,040,000	637,184,212,000	601,180,112,159	219,338,330	600,960,773,829	94.32	36,223,438,171
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan							
534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	1,837,332,251,000	5,420,309,171,000	5,251,985,591,051	117,334,085	5,251,868,256,966	96.89	168,440,914,034
534131	Belanja Modal Jaringan	0	1,000	0	0	0	0	1,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341	1,837,332,251,000	5,420,309,172,000	5,251,985,591,051	117,334,085	5,251,868,256,966	96.89	168,440,915,034
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	192,440,765,000	186,268,984,000	174,252,405,383	0	174,252,405,383	93.55	12,016,578,617
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	192,440,765,000	186,268,984,000	174,252,405,383	0	174,252,405,383	93.55	12,016,578,617
5371	Belanja Modal BLU							
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	1,284,876,000	26,636,419,000	26,561,227,170	0	26,561,227,170	99.72	75,191,830
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	1,000,000,000	866,700,000	862,193,888	0	862,193,888	99.48	4,506,112
537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	0	299,057,000	294,452,800	0	294,452,800	98.46	4,604,200
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5371	2,284,876,000	27,802,176,000	27,717,873,858	0	27,717,873,858	99.7	84,302,142
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	2,956,520,355,000	7,146,490,956,000	6,910,478,617,594	336,762,415	6,910,141,855,179	96.69	236349100821
	JUMLAH BELANJA	9,550,026,444,000	14,638,480,234,00	14,026,932,403,89	1,171,857,478	14,025,760,546,41	95.81	612,719,687,588

NERACA

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PERHUBUNGAN LAUT

Tgl Data : 07/05/25 7:34 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 9:12 PM

lap_neraca_es1_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	343,335,765	10,435,154	332,900,611	3,190.18
Kas Lainnya dan Setara Kas	3,833,028,968	2,955,684,302	877,344,666	29.68
Kas pada Badan Layanan Umum	87,735,768,529	22,407,069,426	65,328,699,103	291.55
Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum	10,155,656,455	6,331,209,536	3,824,446,919	60.41
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	115,500,000	(115,500,000)	(100.00)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	139,202,493,060	89,947,100,660	49,255,392,400	54.76
Piutang Bukan Pajak	29,918,846,663	49,214,873,797	(19,296,027,134)	(39.21)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(27,341,686,425)	(25,820,490,782)	(1,521,195,643)	5.89
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	2,577,160,238	23,394,383,015	(20,817,222,777)	(88.98)
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	171,555,000	4,940,000	166,615,000	3,372.77
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(857,775)	(24,700)	(833,075)	3,372.77
PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU (NETTO)	170,697,225	4,915,300	165,781,925	3,372.77
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	0	24,000,000	(24,000,000)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	0	(120,000)	120,000	(100.00)
PIUTANG DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL BLU (NETTO)	0	23,880,000	(23,880,000)	(100.00)
Persediaan	139,678,502,530	123,412,178,462	16,266,324,068	13.18
JUMLAH ASET LANCAR	**383,696,642,770**	**268,602,355,855**	**115,094,286,915**	**42.85**
ASET TETAP				
Tanah	16,093,082,085,423	15,755,955,881,676	337,126,203,747	2.14
Peralatan dan Mesin	21,772,891,096,986	21,124,399,247,879	648,491,849,107	3.07
Gedung dan Bangunan	9,575,503,884,509	8,926,744,878,447	648,759,006,062	7.27
Jalan, Irigasi dan Jaringan	32,747,431,446,936	31,318,003,442,402	1,429,428,004,534	4.56
Aset Tetap Lainnya	39,226,232,009	36,469,633,954	2,756,598,055	7.56
Konstruksi Dalam Pengerjaan	7,993,981,354,706	4,310,457,963,524	3,683,523,391,182	85.46
AKUMULASI PENYUSUTAN	(25,740,472,275,581)	(22,917,950,649,871)	(2,822,521,625,710)	12.32
Aset Konsesi Jasa	42,619,859,818,278	38,494,595,371,765	4,125,264,446,513	10.72
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	(3,303,421,671,115)	(2,522,369,026,826)	(781,052,644,289)	30.97
JUMLAH ASET TETAP	**101,798,081,972,151**	**94,526,306,742,950**	**7,271,775,229,201**	**7.69**
Properti Investasi				
Properti Investasi	116,515,789,056	116,515,789,056	0	0.00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(6,373,704,495)	(5,564,176,173)	(809,528,322)	14.55
JUMLAH Properti Investasi	**110,142,084,561**	**110,951,612,883**	**(809,528,322)**	**(0.73)**
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	1,147,076,137	1,170,216,137	(23,140,000)	(1.98)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(5,735,381)	(5,851,081)	115,700	(1.98)
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN	1,141,340,756	1,164,365,056	(23,024,300)	(1.98)

NERACA

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PERHUBUNGAN LAUT

Tgl Data : 07/05/25 7:34 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 9:12 PM

lap_neraca_es1_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
GANTI RUGI (NETTO)				
Piutang Jangka Panjang lainnya	7,160,475,295	16,739,075,295	(9,578,600,000)	(57.22)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	(35,802,376)	(83,695,376)	47,893,000	(57.22)
PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA(NETTO)	7,124,672,919	16,655,379,919	(9,530,707,000)	(57.22)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	**8,266,013,675**	**17,819,744,975**	**(9,553,731,300)**	**(53.61)**
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	910,030,295,941	796,591,502,167	113,438,793,774	14.24
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	573,381,006,355	585,934,449,348	(12,553,442,993)	(2.14)
Aset Lain-lain	454,851,391,891	495,161,147,759	(40,309,755,868)	(8.14)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(470,052,616,690)	(518,257,789,114)	48,205,172,424	(9.30)
JUMLAH ASET LAINNYA	**1,468,210,077,497**	**1,359,429,310,160**	**108,780,767,337**	**8.00**
JUMLAH ASET	**103,768,396,790,654**	**96,283,109,766,823**	**7,485,287,023,831**	**7.77**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	494,507,162,770	524,376,794,596	(29,869,631,826)	(5.70)
Pendapatan Diterima Dimuka	2,120,171,663	873,204,991	1,246,966,672	142.80
Uang Muka dari KPPN	343,335,765	10,435,154	332,900,611	3,190.18
Utang Jangka Pendek Lainnya	34,368,910	2,747,700	31,621,210	1,150.82
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**497,005,039,108**	**525,263,182,441**	**(28,258,143,333)**	**(5.38)**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Kewajiban Konsesi Jasa	38,185,064,749,841	34,650,090,033,814	3,534,974,716,027	10.20
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**38,185,064,749,841**	**34,650,090,033,814**	**3,534,974,716,027**	**10.20**
JUMLAH KEWAJIBAN	**38,682,069,788,949**	**35,175,353,216,255**	**3,506,716,572,694**	**9.97**
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	65,086,327,001,705	61,107,756,550,568	3,978,570,451,137	6.51
JUMLAH EKUITAS	**65,086,327,001,705**	**61,107,756,550,568**	**3,978,570,451,137**	**6.51**
JUMLAH EKUITAS	**65,086,327,001,705**	**61,107,756,550,568**	**3,978,570,451,137**	**6.51**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**103,768,396,790,654**	**96,283,109,766,823**	**7,485,287,023,831**	**7.77**

Keterangan :

BELUM FINAL

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA **: (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

ESELON I **: (04) DITJEN PERHUBUNGAN LAUT**

Tgl Data : 07/05/25 7:34 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 9:10 PM
Halaman : 1
lap_lo_es1_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	-
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	5,870,041,704,990	4,926,183,075,468	943,858,629,522	-
Pendapatan Badan Layanan Umum	113,664,179,565	0	113,664,179,565	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	5,983,705,884,555	4,926,183,075,468	1,057,522,809,087	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	5,983,705,884,555	4,926,183,075,468	1,057,522,809,087	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	1,916,226,131,582	1,746,799,638,749	169,426,492,833	-
Beban Persediaan	153,205,814,547	169,580,940,433	(16,375,125,886)	-
Beban Barang dan Jasa	3,407,498,194,573	3,182,584,237,747	224,913,956,826	-
Beban Pemeliharaan	1,029,087,750,974	878,031,617,388	151,056,133,586	-
Beban Perjalanan Dinas	607,258,804,956	561,089,535,990	46,169,268,966	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	78,900,402,303	(78,900,402,303)	-

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA **: (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

ESELON I **: (04) DITJEN PERHUBUNGAN LAUT**

Tgl Data : 07/05/25 7:34 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 9:10 PM
Halaman : 2
lap_lo_es1_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	-
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3,871,521,020,159	3,555,966,902,717	315,554,117,442	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	1,551,554,992	560,422,395	991,132,597	-
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	10,986,349,271,783	10,173,513,697,722	812,835,574,061	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(5,002,643,387,228)	(5,247,330,622,254)	244,687,235,026	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(238,616,223,457)	(175,915,098,038)	(62,701,125,419)	-
Pendapatan Pelepasan Aset	10,990,854,142	9,748,857,688	1,241,996,454	-
Beban Pelepasan Aset	249,607,077,599	185,663,955,726	63,943,121,873	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,180,095,655,567	716,554,131,273	463,541,524,294	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,181,386,760,274	731,998,776,041	449,387,984,233	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,291,104,707	15,444,644,768	(14,153,540,061)	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	941,479,432,110	540,639,033,235	400,840,398,875	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(4,061,163,955,118)	(4,706,691,589,019)	645,527,633,901	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(4,061,163,955,118)	(4,706,691,589,019)	645,527,633,901	-

Keterangan :

BELUM FINAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PERHUBUNGAN LAUT

Tgl Data : 07/05/25 7:34 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 9:11 PM
Halaman : 1
lap_lpe_es1_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	61,107,756,550,568	60,366,472,401,255	741,284,149,313	1.23
SURPLUS/DEFISIT-LO	(4,061,163,955,118)	(4,706,691,589,019)	645,527,633,901	(13.72)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	134,354,900,223	(211,707,435,754)	346,062,335,977	(163.46)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	4,682,594,395	2,574,916,930	2,107,677,465	81.85
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	7,731,394,095	8,144,660,395	(413,266,300)	(5.07)
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	234,546,916,768	(451,570,684,780)	686,117,601,548	(151.94)
LAIN-LAIN	(112,606,005,035)	229,143,671,701	(341,749,676,736)	(149.14)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	7,905,379,506,032	5,659,683,174,086	2,245,696,331,946	39.68
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	3,978,570,451,137	741,284,149,313	3,237,286,301,824	436.71
EKUITAS AKHIR	65,086,327,001,705	61,107,756,550,568	3,978,570,451,137	6.51

Keterangan :

BELUM FINAL

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2024

Tgl.Data : 07/05/25 7:34 PM
Tgl.Cetak : 07/05/25 9:23 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_es1_poc

UAPB : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UAPPB-E1 : 04 DITJEN PERHUBUNGAN LAUT

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	61,929,060,243
117112	Amunisi	490,777,348
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1,872,342,650
117114	Suku Cadang	31,377,589,946
117131	Bahan Baku	680,339,581
117191	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	73,774,800
117199	Persediaan Lainnya	43,254,617,962
131111	Tanah	16,093,082,085,423
132111	Peralatan dan Mesin	21,772,891,096,986
133111	Gedung dan Bangunan	9,575,503,884,509
134111	Jalan dan Jembatan	26,866,063,794,512
134112	Irigasi	5,659,755,671,097
134113	Jaringan	221,611,981,327
135111	Aset Tetap Renovasi	9,602,013,823
135121	Aset Tetap Lainnya	29,624,218,186
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	7,993,981,354,706
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(15,901,306,992,810)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2,156,157,776,380)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(4,369,914,329,535)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(3,264,246,517,036)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(48,749,783,695)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(96,876,125)
138111	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	1,227,886,393,951
138121	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	40,599,113,611,445
138131	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra Dalam Pengerjaan	792,859,812,882
138211	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	(150,744,656,630)
138221	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	(3,152,677,014,485)
138311	Properti Investasi	116,515,789,056
138411	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(6,373,704,495)
162151	Software	152,241,784,392
162171	Hasil Kajian/Penelitian	561,054,495,650
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	196,734,015,899
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	440,764,801,943
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	14,086,589,948
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(324,072,403,079)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(145,978,783,611)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	(1,430,000)
J U M L A H		**102,942,731,630,384**

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

LAMPIRAN II
NKF

BA
22
04

Laporan Keuangan 2024

AUDITED

151

Jl. Medan Merdeka Barat

www.dephub.go.id

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

LAMPIRAN III
BAR PNBP

BA
22
04

Laporan Keuangan 2024
AUDITED

151
Jl. Medan Merdeka Barat
www.dephub.go.id

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

LAMPIRAN IV
BAR BMN

BA
22
04

Laporan Keuangan 2024
AUDITED

151
Jl. Medan Merdeka Barat
www.dephub.go.id

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

LAMPIRAN V
BAR INTERNAL

BA
22
04

Laporan Keuangan 2024
AUDITED

151

Jl. Medan Merdeka Barat

www.dephub.go.id

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

LAMPIRAN VI
ASET KONSESI JASA

BA
22
04

Laporan Keuangan 2024

AUDITED

151

Jl. Medan Merdeka Barat

www.dephub.go.id

TABEL REKAPITULASI PENCATATAN ASET KONSESI JASA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
POSISI PER 31 DESEMBER 2024

No	Kode Satker	Nama Satker	Nama Mitra	Nama Perjanjian	Jenis Perjanjian	Tanggal Mulai Perjanjian	Tanggal Akhir Perjanjian	Jangka Waktu Konsesi (Tahun)	Saldo Per 30 September 2024	Lap Realisasi Investasi 31 Desember 2024		BA Rekonsiliasi Per 31 Desember 2024		Penambahan/ Pengurangan Realisasi	Rincian Aset Konsesi Jasa Sesuai BA Rekonsilasi Per 31 Desember 2024			
										(Ada/ Belum)	Nilai	(Ada/ Belum)	Nilai		Tanah	Non Tanah	Dalam Pengerjaan	Total
1	287171	KSOP Kelas I Banjarmasin	PT. Indonesia Multi Purpose Terminal (IMPT)	Pengusahaan Pelabuhan Pada Area Alih Muat Kapal di Terminal Terapung PT Indonesia Multi Purpose Terminal di Perairan Tabaneo Pelabuhan Bajarmasin Kalsel	Konsesi Non Eksisting	15/09/2018	15/09/2067	49	24.542.000.000	Ada	24.542.000.000	Ada	24.542.000.000	-		24.542.000.000		24.542.000.000
2	287171	KSOP Kelas I Banjarmasin	PT. Ambang Barito Nusapersada (Ambapers)	Pengusahaan dan Pengelolalan Alur-Pelayaran Ambang Sungai Barito Kalsel	Konsesi Non Eksisting	20/09/2022	20/09/2042	20	2.342.500.000	Ada	7.362.583.235	Ada	7.362.583.235	5.020.083.235	135.000.000	6.918.157.960	309.425.275	7.362.583.235
3	287185	KSOP Kelas II Kotabaru-Batulicin	PT. Pelabuhan Swangi Indah (SI)	Pengusahaan Jasa Kepelabuhan Pada Terminal Umum PT Pelabuhan Swangi Indah di Pelabuhan Kotabaru - Batulicin	Konsesi Non Eksisting	04/10/2019	04/10/2040	21	43.125.765.270	Belum	-	Ada	43.433.726.770	307.961.500	518.370.000	42.915.356.770		43.433.726.770
4	287185	KSOP Kelas II Kotabaru-Batulicin	PT. Dua Samudera Perkasa (DSP)	Pengusahaan Pada Wilayah Tertentu di Perairan yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan di Perairan Tanjung Pemancingan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan	Konsesi Non Eksisting	26/07/2024	26/07/2050	26	-	Belum	-	Ada	-	-				-
5	287211	KSOP Kelas I Samarinda	PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara (PTB)	Pengusahaan Jasa Kepelabuhan Pada Terminal Alih Muat Barang Muara Berau di Pelabuhan Samarinda	Konsesi Non Eksisting	04/12/2020	04/12/2045	25	6.800.854.208	Ada	9.995.854.208	Ada	9.995.854.208	3.195.000.000	200.000.000	9.795.854.208		9.995.854.208
6	287211	KSOP Kelas I Samarinda	PT. Sarana Abadi Lestari (SAL)	Pengusahaan Jasa Kepelabuhan Pada Terminal Umum PT Sarana Abadi Lestari di Pelabuhan Samarinda	Konsesi Non Eksisting	17/06/2020	17/06/2057	37	150.529.543.667	Ada	155.342.459.667	Ada	150.529.543.667	-	97.897.260.000	52.632.283.668		150.529.543.668
7	287228	KSOP Kelas I Balikpapan	PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka (PBT)	Penyediaan dan/atau Layanan Jasa Kepelabuhan Pada Terminal PT Pelabuhan Penajam Banua Taka di Pelabuhan Balikpapan	Konsesi Non Eksisting	13/07/2022	13/07/2057	35	187.906.334.674	Ada	187.906.334.674	Ada	187.906.334.674	-	35.327.615.439	152.578.719.235	-	187.906.334.674
8	287228	KSOP Kelas I Balikpapan	PT. Lestari Samudra SAKTI (LSS)	Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhan di Terminal Lestari Samudra Sakti	Konsesi Non Eksisting	30/08/2022	30/08/2076	54	214.227.424.919	Ada	214.227.424.919	Ada	214.227.424.919	-	168.264.000.000	45.963.424.919	-	214.227.424.919
9	287228	KSOP Kelas I Balikpapan	PT. Indika Logistic & Support Services (ILSS)	Penyediaan Dan/ Atau Pelayanan Jasa Kepalabuhanan Pada Terminal Indika Logistic & Support Services di Pelabuhan Balikpapan	Konsesi Non Eksisting	27/03/2023	27/03/2054	31	722.969.875.711	Ada	804.842.268.012	Ada	804.842.268.012	81.872.392.301	5.575.388.935	799.266.879.077	-	804.842.268.012
10	287502	KSOP Kelas II Kendari	PT. Pelindo - Kendari Newport	Pengusahaan Terminal Petikemas Kendari New Port di Pelabuhan Kendari/ Bungkutoko	Konsesi Non Eksisting	25/11/2022	25/11/2089	67	821.213.850.082	Ada	834.319.122.182	Ada	821.213.850.082	-	64.638.320.953	756.575.529.129	-	821.213.850.082
11	287647	KSOP Kelas IV Bima	PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)	Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Pada Kantor KSOP Kelas IV Bima	KSP	07/09/2022	07/09/2052	30	700.000.000	Ada	700.000.000	Ada	700.000.000	-	-	700.000.000	-	700.000.000
12	287651	KSOP Kelas IV Badas	PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)	Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Pada Kantor KSOP Kelas IV Badas	KSP	07/04/2022	07/04/2052	30	796.525.380	Ada	796.525.380	Sudah	796.525.380	-		796.525.380		796.525.380
13	287715	KSOP Kelas IV Waingapu	PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)	Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Pada KSOP Kelas IV Waingapu	KSP	07/04/2022	07/04/2052	30	-	Belum	-	Ada	3.165.405.000	3.165.405.000		3.165.405.000		3.165.405.000

No	Kode Satker	Nama Satker	Nama Mitra	Nama Perjanjian	Jenis Perjanjian	Tanggal Mulai Perjanjian	Tanggal Akhir Perjanjian	Jangka Waktu Konsesi (Tahun)	Saldo Per 30 September 2024	Lap Realisasi Investasi 31 Desember 2024		BA Rekonsiliasi Per 31 Desember 2024		Penambahan/ Pengurangan Realisasi	Rincian Aset Konsesi Jasa Sesuai BA Rekonsilasi Per 31 Desember 2024			
										(Ada/ Belum)	Nilai	(Ada/ Belum)	Nilai		Tanah	Non Tanah	Dalam Pengerjaan	Total
14	289843	UPP Kelas II Tanjung Redep	PT. Mitra Samudera Kreasi (SMK)	Pengusahaan Pada Wilayah Tertentu di Perairan yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan di Perairan Muara Pantai Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur	Konsesi Non Eksisting	29/08/2024	29/08/2060	36	-	Belum	-	Belum	-	-				-
15	412905	KSOP Kelas II Gresik	PT. Siam Maspion (SM)	Pengusahaan Jasa Kepelabuhan Pada Terminal Siam Maspion di Pelabuhan Gresik	Konsesi Non Eksisting	08/08/2020	08/08/2063	43	455.984.600.000	Ada	455.984.600.000	Ada	455.984.600.000	-	31.836.000.000	424.148.600.000		455.984.600.000
16	412905	KSOP Kelas II Gresik	PT. Berlian Manyar Sejahtera (BMS)	Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Terminal Manyar di Pelabuhan Gresik	Konsesi Non Eksisting	15/12/2017	15/12/2093	76	1.866.195.392.407	Ada	1.866.195.392.407	Ada	1.881.903.436.407	15.708.044.000	405.801.114.305	1.476.102.322.102		1.881.903.436.407
17	412920	KSOP Kelas IV Probo	PT. Delta Artha Bahari Nusantara (DABN)	Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Umum PT Delta Artha Bahari Nusantara di Pelabuhan Probolinggo	Konsesi Non Eksisting	21/02/2017	21/02/2081	64	268.073.283.000	Ada	268.073.283.000	Ada	268.073.283.000	-	200.025.400.000	68.047.883.000	-	268.073.283.000
18	412920	KSOP Kelas IV Probo	PT. Delta Artha Bahari Nusantara (DABN)	Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa Tanah Hasil Reklamasi dan Bangunan Dermaga Pada KSOP Kelas IV Probolinggo	KSP	20/08/2017	20/08/2047	30	3.026.818.182	Ada	3.026.818.182	Ada	3.026.818.182	-	-	3.026.818.182	-	3.026.818.182
19	413080	KSOP Kelas III Kuala T	PT. Pelindo I - Terminal Curah Cair Kuala Tanjung	Pengusahaan Dermaga Pada Terminal Curah Cair di Pelabuhan Kuala Tanjung	Konsesi Non Eksisting	23/01/2015	23/01/2084	69	3.527.583.259.475	Ada	3.527.583.259.475	Ada	3.527.583.259.475	-	-	3.527.583.259.475	-	3.527.583.259.475
20	413092	KSOP Kelas I Dumai	PT. Pelabuhan Mundam Sejahtera (PMS)	Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Pelabuhan Mundam Sejahtera Pada Pelabuhan Dumai	Konsesi Non Eksisting	27/09/2024	27/09/2059	35	-	Ada	64.228.858.644	Ada	64.228.858.644	64.228.858.644	64.228.858.644	-	-	64.228.858.644
21	413180	KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun	PT. Asinusa Putra Sekawan (APS)	Penyediaan dan Atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dan Alih Muat Barang Wil. Perairan Pulau Nipa	Konsesi Non Eksisting	06/07/2022	06/07/2046	24	3.905.812.611	Ada	4.366.021.165	Ada	4.366.021.165	460.208.554	-	4.366.021.165	-	4.366.021.165
22	413240	KSOP Kelas III Talang Dukuh	PT. Wahyusamudera Indah (WI)	Kegiatan Pengusahaan Kepelabuhanan Pada Terminal Peti Kemas Muaro Jambi di Pelabuhan Talang Duku	Konsesi Non Eksisting	05/09/2024	05/09/2090	66	-	Ada	70.140.000.000	Ada	70.140.000.000	70.140.000.000	70.140.000.000	-	-	70.140.000.000
23	413313	KSOP Kelas I Pontianak	PT. Indo Container Sarana (ICS)	Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhan Pada Terminal Multipurpose PT Indo Kontainer Sarana di Pelabuhan Pontianak	Konsesi Non Eksisting	14/03/2018	14/03/2079	61	218.864.778.167	Belum	-	Ada	220.150.584.663	1.285.806.496	68.067.700.000	152.082.884.663	-	220.150.584.663
24	413313	KSOP Kelas I Pontianak	PT. Pelindo II - Terminal Kijing	Pembangunan dan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak Provinsi Kalimantan Barat	Konsesi Non Eksisting	12/07/2018	12/07/2087	69	3.279.818.813.226	Ada	3.279.818.813.226	Ada	3.279.818.813.226	-	-	3.279.818.813.226	-	3.279.818.813.226
25	413322	KSOP Kelas IV Sintete	PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)	Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa Bangunan Dermaga Pada Kantor KSOP Kelas V Sintete	KSP	20/08/2017	20/08/2032	15	1.121.229.857	Ada	1.121.229.857	Ada	1.121.229.857	-	-	1.121.229.857	-	1.121.229.857
26	413417	KSOP Utama Belawan	PT. Pelindo I - Terminal Petikemas Belawan Fase II	Pengusahaan jasa kepelabuhan di pelabuhan yang diusahakan oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Terminal Peti Kemas Belawan Fase II	Konsesi Non Eksisting	08/05/2015	08/05/2085	70	3.023.864.090.340	Ada	3.041.739.078.034	Ada	3.041.739.078.035	17.874.987.695	613.157.129.577	2.428.581.948.457		3.041.739.078.034
27	413422	KSOP Utama Tanjung	PT. Pelindo II - Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok	Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan yang diusahakan oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok	Konsesi Non Eksisting	31/08/2012	31/08/2082	70	8.763.847.980.397	Ada	9.184.876.162.924	Belum	-	-	1.614.186.026.341	7.149.661.954.056	-	8.763.847.980.397

No	Kode Satker	Nama Satker	Nama Mitra	Nama Perjanjian	Jenis Perjanjian	Tanggal Mulai Perjanjian	Tanggal Akhir Perjanjian	Jangka Waktu Konsesi (Tahun)	Saldo Per 30 September 2024	Lap Realisasi Investasi 31 Desember 2024		BA Rekonsiliasi Per 31 Desember 2024		Penambahan/ Pengurangan Realisasi	Rincian Aset Konsesi Jasa Sesuai BA Rekonsilasi Per 31 Desember 2024			
										(Ada/ Belum)	Nilai	(Ada/ Belum)	Nilai		Tanah	Non Tanah	Dalam Pengerjaan	Total
28	413428	KSOP Utama Tanjung	PT. Pelindo III - Terminal Multi Purpose Teluk Lamong	Pengusahaan Terminal Multipurpose Teluk Lamong di Surabaya	Konsesi Non Eksisting	19/05/2015	11/11/2086	72	4.924.264.339.681	Ada	4.924.264.339.681	Ada	4.924.264.339.681	-	182.961.972.044	4.741.302.367.637	-	4.924.264.339.681
29	413428	KSOP Utama Tanjung	PT. Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS)	Penyediaan dan Pelayanan Jasa Penggunaan APBS	Konsesi Non Eksisting	08/05/2014	08/05/2039	25	961.504.383.377	Ada	961.504.383.377	Ada	961.504.383.377	-	-	961.504.383.377	-	961.504.383.377
30	413439	KSOP Utama Makassa	PT. Pelindo IV - Terminal Makassar New Port	Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan yang diusahakan oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Konsesi Non Eksisting	19/05/2015	19/05/2085	70	5.033.955.543.094	Ada	5.884.476.715.728	Ada	5.033.955.543.094	-	760.416.879.585	4.273.538.663.509	-	5.033.955.543.094
31	413670	KSOP Kelas I Banten	PT. Bandar Bakau Jaya (BBJ)	Pengusahaan jasa kepelabuhan pada terminal Bandar Bakau Jaya di Pelabuhan Banten	Konsesi Non Eksisting	23/07/2020	23/07/2093	73	35.806.470.364.492	Ada	358.064.703.645	Ada	358.064.703.645	-	57.314.590.233	300.750.113.412	-	358.064.703.645
32	413670	KSOP Kelas I Banten	PT. Krakatau Bandar Samudera (KBS)	Kegiatan Pengusahaan di Bidang Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhan di Terminal Cigading	Konsesi Non Eksisting	14/11/2016	14/11/2091	75	1.252.094.705.000	Ada	1.468.316.715.000	Ada	1.252.094.705.000	-	249.287.461.000	1.002.807.244.000	-	1.252.094.705.000
33	413670	KSOP Kelas I Banten	PT. Batu Alam Makmur (BAM)	Pengusahaan jasa kepelabuhan pada terminal Batu Alam Makmur	Konsesi Non Eksisting	21/04/2022	21/04/2038	16	88.777.210.287	Ada	88.777.210.287	Ada	88.777.210.287	-	53.003.107.500	35.774.102.787	-	88.777.210.287
34	521395	KSOP Kelas III Tanjung Pakis	PT. Lamongan Intergrated Shorebase (LIS)	Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Umum Tanjung Pakis di Pelabuhan Brondong	Konsesi Non Eksisting	25/07/2020	25/07/2092	72	366.677.221.574	Ada	1.394.625.091.489	Ada	1.394.625.091.489	1.027.947.869.915	11.944.372.875	594.616.214.057	788.064.504.557	1.394.625.091.489
35	521836	KSOP Kelas IV Garongkong	PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)	Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Bersifat Khusus Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Pada UPP Garongkong	KSP	14/06/2022	14/06/2072	50	1.225.938.150	Ada	1.134.609.764	Ada	14.972.238.764	13.746.300.614	-	14.972.238.764	-	14.972.238.764
36	521899	UPP Kelas II Weda	PT. Pelabuhan Samudera Nusantara (PSN)	Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Pelabuhan Samudera Nusantara di Pelabuhan Weda	Konsesi Non Eksisting	14/10/2024	14/10/2062	38	-	Belum	-	Sudah	198.323.450.000	198.323.450.000	6.732.080.000	191.591.370.000		198.323.450.000
37	521899	UPP Kelas II Weda	PT. Weda Bay Port (WBP)	Kegiatan Pengusahaan Kepelabuhanan di Pelabuhan Lelilef	Konsesi Non Eksisting	06/08/2024	06/08/2064	40	-	Ada	341.635.928.165	Sudah	571.100.928.165	571.100.928.165				-
38	559285	KSOP Kelas III Rangga Ilung	PT. Bangun Nusantara Jaya Makmur Perkasa (BNJMP)	Penyediaan dan atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Bangun Nusantara Jaya Makmur Perkasa	Konsesi Non Eksisting	13/07/2022	13/07/2037	15	74.681.412.917	Ada	75.253.624.917	Ada	75.253.624.917	572.212.000	17.244.990.000	58.008.634.917	-	75.253.624.917
39	559292	KSOP Kelas III Satui	PT. Bina Indo Raya (BIR)	Penyediaan dan/atau Pelayanan jasa Kepelabuhanan di Terminal Bina Indo Raya	Konsesi Non Eksisting	12/04/2022	04/12/2047	25	238.736.812.973	Belum	-	Ada	252.133.041.577	13.396.228.604	1.894.414.000	245.752.744.527	4.485.883.050	252.133.041.577
40	559552	KSOP Kelas III Labuhan Bajo	PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)	Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Pada KSOP Kelas III Labuan Bajo	KSP	08/11/2021	08/11/2071	50	179.105.445.274	Ada	185.189.616.274	Ada	185.189.616.274	6.084.171.000	79.905.948.750	105.283.667.524	-	185.189.616.274
41	652517	KSOP Kelas II Marunda	PT. Karya Citra Nusantara (KCN)	Pengusahaan Jasa Kepelabuhan Pada Terminal Umum PT Karya Citra Nusantara di Pelabuhan Marunda	Konsesi Non Eksisting	29/11/2016	29/11/2086	70	1.924.982.134.652	Belum	-	Belum	-	-	1.487.320.000.000	437.662.134.652	-	1.924.982.134.652
42	652517	KSOP Kelas II Marunda	PT. Pelabuhan Tegar Indonesia (PTI)	Kegiatan Pengusahaan di Bidang Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhan Pada Terminal Umum di Terminal Marunda Center Pelabuhan Marunda	Konsesi Non Eksisting	24/05/2017	24/05/2082	65	859.560.212.572	Belum	-	Ada	859.560.212.572	-	79.527.630.000	780.032.582.572	-	859.560.212.572

No	Kode Satker	Nama Satker	Nama Mitra	Nama Perjanjian	Jenis Perjanjian	Tanggal Mulai Perjanjian	Tanggal Akhir Perjanjian	Jangka Waktu Konsesi (Tahun)	Saldo Per 30 September 2024	Lap Realisasi Investasi 31 Desember 2024		BA Rekonsiliasi Per 31 Desember 2024		Penambahan/ Pengurangan Realisasi	Rincian Aset Konsesi Jasa Sesuai BA Rekonsilasi Per 31 Desember 2024			
										(Ada/ Belum)	Nilai	(Ada/ Belum)	Nilai		Tanah	Non Tanah	Dalam Pengerjaan	Total
43	652563	KSOP Kelas IV Anggrek	PT. Anggrek Gorontalo Internasional Terminal (AGIT)	Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan Anggrek Provinsi Gorontalo	KPBU	30/07/2021	30/07/2051	30	8.973.650.000	Ada	17.573.650.000	Ada	17.573.650.000	8.600.000.000	-	17.573.650.000	-	17.573.650.000
				TOTAL						-			31.274.244.237.443	2.103.029.907.723	6.427.551.630.181	34.171.561.981.264	792.859.812.882	41.391.973.424.327

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

LAMPIRAN VII
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

BA 22 04

Laporan Keuangan 2024

AUDITED

151

Jl. Medan Merdeka Barat

www.dephub.go.id

No	Kode Satker SAKTI	NAMA SATKER	URAIAN PEKERJAAN	NO KDP	NOMOR KONTRAK	NAMA KONTRAKTOR	TANGGAL MULAI KONTRAK	TANGGAL AKHIR KONTRAK	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI REALISASI (Rp)	NILAI KDP (Rp) SAKTI	KLASIFIKASI			KETERANGAN (Akan Didefinitifkan/Belum Tersedia Anggaran/Dsb.)
												DILANJUTKAN	DIHENTIKAN SEMENTARA	DIHENTIKAN PERMANEN	
(1)		(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	13		(18)	(19)	(20)	(21)
1	412772	Kanpus Hubla		6							231.487.980.055	1.247.833.221	-	-	
2	412772	Kanpus Hubla		51							-	230.240.146.834	-	-	
3	412801	Disnav Kelas I Tanjung Priok	Pengembangan Menara Suar Pulau Tunda	3	-	-	08/08/2024	-	336.020.355	336.020.355	6.878.180.408	336.020.355	-	-	Dianggarkan kembali 2025
4	412801	Disnav Kelas I Tanjung Priok	Pengembangan Menara Suar Pulau Payung	4	-	-	08/08/2024	-	327.467.250	327.467.250	-	327.467.250	-	-	Dianggarkan kembali 2025
5	412801	Disnav Kelas I Tanjung Priok	Pengembangan Menara Suar Pulau Edam	5	029/SPK/00/SATKER-DNG.TPK/IV/2024	CV.Prisma Karya Nusantara	09/10/2024	-	99.173.283	99.173.283	-	99.173.283	-	-	Dianggarkan kembali 2025
6	412801	Disnav Kelas I Tanjung Priok	Pengembangan Gedung Kala Jivam Asti	6	031/SPK/00/SATKER-DNG.TPK/2024	PT. Wisanggeni Jasa Teknik	09/10/2024	-	99.533.000	99.533.000	-	99.533.000	-	-	Dianggarkan kembali 2025
7	412801	Disnav Kelas I Tanjung Priok	PLTS Panjang dan VTS Merak	1	-	-	22-10-2024	-	2.196.000.000	658.800.000	-	658.800.000	-	-	Dianggarkan kembali 2025
8	412801	Disnav Kelas I Tanjung Priok	Docking KN. Karakata	2	-	-	07/11/2024	-	6.728.757.000	6.728.757.000	-	5.357.186.520	-	-	Dianggarkan kembali 2025
9	439180	Satker KPLP	Pembangunan Kapal Patroli Paket A	7	HH.01/KPL-IV/PFKPLP/VII/2013	PT. Susanto Soekardi Boatyard	03-07-2013	31-12-2013	3.117.527.000	3.117.527.000	6.929.089.377	-	-	1.954.709.765	Masih Dalam Proses Hukum (Bareskrim)
10	439180	Satker KPLP	Pembangunan Kapal Patroli Paket B	10	HH.01/KPL-IV-B/PFKPLP/VII/2013	PT. Susanto Soekardi Boatyard	03-07-2013	31-12-2013	3.093.327.000	3.093.327.000	-	-	-	1.935.075.012	Masih Dalam Proses Hukum (Bareskrim)
11	439180	Satker KPLP	Pembangunan Kapal Partoli	11	HH.01/KPL-IV-B/PFKPLP/VII/2014	PT. Makmur Berkat Bahari	04-07-2014	31-12-2014	3.334.587.200	3.334.586.200	-	-	-	3.039.304.600	Masih Dalam Proses Hukum (Bareskrim)
12	439460	Satker Kenavigasian	Jasa Konsultan Pengembangan dan Peningkatan SBNP	1	02/PP/PKP/I-22 ADDENDUM KETIGA TGL 8 FEBRUARI 2024	Anse Technologies Co Ltd-Consortium	21 Januari 2022 Adendum III 8 Februari 2024	Februari 2027	127.826.690.388	56.562.758.791	56.562.758.791	56.562.758.791	-	-	
13	21140	KSOP Kelas II Patimban		1							6.419.607.812.921	7.415.443.890	-	-	Berupa Kegiatan Rapat" pada Ksop Patimban Dari tahun 2018, posisi saat ini sedang dalam proses pengumpulan data dukung untuk dijadikan aset definitif
14	21140	KSOP Kelas II Patimban	Package 6:Container Terminal No.2 Construction	3	PL.107/01/X/PKG6-PTB/2022	Penta Ocean-Toyo-Rinkai-Pp-Wika-Jakon Consortium	24/10/2022	31 Desember 2023	222.290.707.882	222.290.707.882	-	3.610.634.479.843	-	-	Akan Didefinitifkan
15	21140	KSOP Kelas II Patimban	Jasa Konsultasi Desain dan Supervisi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Untuk Proyek Pembangunan Pelabuhan Patimban (I)	4	PL.102/02/XI/KSLPLN-PTB/2018	Oriental Consultant Global., Ltd. (Patimone Consult)	12/11/2018	31 Desember 2023	53.312.039.434	53.312.039.434	-	285.882.109.451	-	-	Akan Didefinitifkan
16	21140	KSOP Kelas II Patimban	PACKAGE 5: CAR TERMINAL CONTRUCTION PEMBANGUNAN TERMINAL KENDARAAN	5	PL.107/01/XII/PKG5-PTB/2022	Toa-Waskita-Wakachiku-Hutama-Abipraya Jo	30/12/2022	31 Desember 2023	349.586.537.426	349.586.537.425	-	2.223.992.529.162	-	-	Akan Didefinitifkan
17	21140	KSOP Kelas II Patimban	PACKAGE 3:CONNECTING BRIDGE	6	PL.107/2/II/KSOP-PMB/2020	Wika - Pp Joint Operation	13/02/2020	31 Desember 2023	87.867.279.626	87.867.279.626	-	57.905.404.230	-	-	Akan Didefinitifkan
18	21140	KSOP Kelas II Patimban	Terminal Construction for Patimban Port Development Project (I)	7	PL.102/01/VII/KTRPLN-PTB/2018	Penta Ocean-Toa-Rinkai Pp-Wika-Consortium	27/07/2018	31 Desember 2023	94.573.217.157	94.573.217.157	-	233.777.846.345	-	-	Akan Didefinitifkan
19	412832	KSOP Kelas IV Tegal	Pembangunan Gedung Operasional dan Pelayanan KSOP Tegal	1	PL.107/1/24/KSOP.TGL.2024 Adendum PL.107/2/6/KSOP.TGL.2024	CV. Semangat Muda	19 November 2024 Adendum 02 Desember 2024	31 Desember 2024	7.264.969.675	7.107.449.374	7.107.449.374	7.107.449.374	-	-	
20	412951	Disnav Kelas I Tanjung Perak	Jasa Konsultan Pemagaran	64	PL.107/01/05/DNG.SBY-2021	CV. Hijau Daun	07 Januari 2021	14 Januari 2021	79.200.000	79.200.000	158.180.000	79.200.000	-	-	Refocusing Anggaran
21	412951	Disnav Kelas I Tanjung Perak	Jasa Konsultan Pemagaran	65	PL.107/01/04/DNG.SBY-2021	CV.Adzra Anugrah	07 Januari 2021	14 Januari 2021	78.980.000	78.980.000	-	78.980.000	-	-	Refocusing Anggaran
22	521360	UPP Kelas III Masalembo	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Laut Keramaian	1	PL.107/1/1/UPP.Mslb/2023	PT. Pilar Atmoko Kosntruksi	20 Januari 2023 adendum 29 desember 2023	31 Desember 2023	37.369.195.000	37.369.195.000	38.091.295.000	38.091.295.000	-	-	Akan Didefinitifkan
23	521360	UPP Kelas III Masalembo	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Laut Keramaian	2	PL.107/1/3/UPP.Mslb/2023	CV. Sadhya Grahacara	31 Maret 2023 adendum 29 November 2023	31 Desember 2023	722.100.000	722.100.000	-	-	-	-	Akan Didefinitifkan
24	521395	KSOP Kelas III Tanjung Pakis	Pembangunan	4	HK.107/1/7/UPP.Brg-2015	PT.CiPTa Arya Persada	30 Oktober 2015	30 Desember 2015	19.905.186.000	19.905.186.000	19.905.186.000	-	19.905.186.000	-	KDP merupakan pekerjaan pembangunan pelabuhan pacitan yang tidak dilanjutkan. Pekerjaan yang telah dilakukan berupa pematangan lahan.
25	412973	KSOP Kelas IV Kuala Langsa	Pembangunan Gedung Kantor dan Fasilitas Pendukung Kantor	1	SP-PL.107/1/16/KSOP.Klgs-2024 Adendum SP.ADD-PL.107/1/16/KSOP.Klgs-2024	CV. Nuansa Timur Raya	24 September 2024 Adendum 09 Desember 2024	31 Des 2024 Adendum 19 Feb 2025			3.136.100.240	2.018.320.240	-	-	REVIU STUDI
26	412973	KSOP Kelas IV Kuala Langsa		2							-	6.350.000	-	-	REVIU STUDI dan termasuk RPATA 2024 yang akan didefinitifkan Tahun 2025
27	412973	KSOP Kelas IV Kuala Langsa		3							-	5.100.000	-	-	REVIU STUDI dan termasuk RPATA 2024 yang akan didefinitifkan Tahun 2025
28	412973	KSOP Kelas IV Kuala Langsa		4							-	926.330.000	-	-	REVIU STUDI dan termasuk RPATA 2024 yang akan didefinitifkan Tahun 2025
29	412973	KSOP Kelas IV Kuala Langsa		5							-	90.000.000	-	-	REVIU STUDI dan termasuk RPATA 2024 yang akan didefinitifkan Tahun 2025

No	Kode Satker SAKTI	NAMA SATKER	URAIAN PEKERJAAN	NO KDP	NOMOR KONTRAK	NAMA KONTRAKTOR	TANGGAL MULAI KONTRAK	TANGGAL AKHIR KONTRAK	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI REALISASI (Rp)	NILAI KDP (Rp) SAKTI	KLASIFIKASI			KETERANGAN (Akan Didefinitifkan/Belum Tersedia Anggaran/Dsb.)
												DILANJUTKAN	DIHENTIKAN SEMENTARA	DIHENTIKAN PERMANEN	
30	412973	KSOP Kelas IV Kuala Langsa		6							-	90.000.000	-	-	REVIU STUDI dan termasuk RPATA 2024 yang akan didefinitifkan Tahun 2025
31	413024	KSOP Kelas IV Sibolga		1							568.400.000	-	568.400.000	-	REVIU STUDI
32	413061	Disnav Kelas III Sibolga	Menara Suar Listrik Non Diesel	3	PL.107/1/2/BEM/DNG.Sbg-2024	Rahajeng Lestari Teknik	20 Mei 2024	30 Desember 2024	11.156.933.000	8.067.926.490	8.067.926.490	8.067.926.490	-	-	Akan Didefinitifkan Tahun 2025
33	413061	Disnav Kelas III Sibolga	Menara Suar Listrik Non Diesel	3	PL.107/1/03/CRC.PNN-2023 Kontrak Supervisi	PT. Manggalakarya Bangun Sarana	18/12/2023	06 September 2024			-	-	-	-	
34	413061	Disnav Kelas III Sibolga	Menara Suar Listrik Non Diesel	3	PL. 107/1/23/KSOP.TBS-2024 ADDENDUM KONTRAK-01	PT. Sulawesi Makmur Pratama	10 Juni 2024	20 November 2024			-	-	-	-	
35	559239	UPP Kelas III Muara Siberut	Transfer dari Disnav Teluk Bayur, rencana di hibahkan namun pemda setempat tidak bersedia untuk dihibahkan	7	BM.PPK.53/1/11/DNG.TBS2027	Leora Inti Semesta	23/11/2023	23 September 2024	6.288.100.003	4.401.670.003	3.850.011.356	-	3.850.011.356	-	Transfer dari Disnav Teluk Bayur, rencana di hibahkan namun pemda setempat tidak bersedia untuk dihibahkan
36	521573	UPP Kelas III Panipahan		1	Tidak diketahui	Tidak Diketahui	27/06/1905	-	-	-	7.490.625.000	-	7.490.625.000	-	Kontrak tdk ditemukan (terbakar) akan berkordinasi bagian keuangan untuk diusahakan dilakukan penghapusan pencatatan.
37	521616	UPP Kelas III Nipah Panjang	Pembangunan Faspel Ujung Jabung	30	HK.107/1/1/KUPP.NPG/2014	PT. Putri Salju Sejahtera	31-Okt-14	Tahun 2020	214.167.221.733	214.167.221.733	214.167.221.733	-	214.167.221.733	-	Status lahan masih dalam pembahasan antara UPP Nipah Panjang, Direktorat Kepelabuhanan dan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi
38	413293	Disnav Kelas I Palembang	Pembangunan Rambu Suar 20 Meter Laut di Pelabuhan Tg. Api-api dan Tg. Baginda	61	PL.118/1/16/SBNP.MYC/BNG.PLG-2018	PT. Revan Aditya Cemerlang	29/11/2018	07 Mei 2019	2.797.631.500	444.575.236	2.709.309.110	-	447.575.236	-	Belum tersedia Anggaran untuk melanjutkan pembangunannya
39	413293	Disnav Kelas I Palembang	Pembangunan Rambu Suar 20 Meter Laut di Pelabuhan Tg. Api-api dan Tg. Baginda	62	PL.118/1/16/SBNP.MYC/BNG.PLG-2018	PT. Revan Aditya Cemerlang	29/11/2018	07 Mei 2019	2.797.631.500	460.576.574	-	-	460.576.574	-	Belum tersedia Anggaran untuk melanjutkan pembangunannya
40	413293	Disnav Kelas I Palembang	Pekerjaan Survey Investasi Design (SID) Pembangunan SBNP 6 Unit Ramsu dan 1 Unit Peningkatan Mensu Tg. Jabung	3	PL.107/2/6/DNG.PLG-2021	PT. Delta Maratama Globalindo	14/06/2021	11 Oktober 2021	1.716.489.000	1.807.157.300	-	-	1.801.157.300	-	Akan di Definitif menjadi Aset Tetap, Setelah Pekerjaan Fisik Rambu Suar dilaksanakan
41	287185	KSOP Kelas II Kotabaru-Batulicin	Pekerjaan Fasilitas Pelabuhan Tanjung Batu	2	KP.06/TB/KTR-K/IV/PHB-2011	PT. Safa Batu Mulia	04/04/2011	01 Oktober 2011	40.042.192.000	40.042.192.000	40.126.507.100	-	40.042.192.000	-	KDP Satker inaktif. Merupakan Faspel yang sudah tidak di lanjutkan pekerjaan nya karena permasalahan tanah sengketa
42	287185	KSOP Kelas II Kotabaru-Batulicin	Honor, Perjadin, dan biaya lainnya.	7	-				50.846.900	50.846.900	-	-	50.846.900	-	Kesalahan pencatatan. Merupakan Honor, Perjadin, dan biaya lainnya atas pekerjaan faspel yang telah menjadi aset.
43	287185	KSOP Kelas II Kotabaru-Batulicin	Honor, Perjadin, dan biaya lainnya.	8	-				20.000.000	20.000.000	-	-	20.000.000	-	Kesalahan pencatatan. Merupakan Honor, Perjadin, dan biaya lainnya atas pekerjaan faspel yang telah menjadi aset.
44	287185	KSOP Kelas II Kotabaru-Batulicin	Honor, Perjadin, dan biaya lainnya.	9	-				13.468.200	13.468.200	-	-	13.468.200	-	Kesalahan pencatatan. Merupakan Honor, Perjadin, dan biaya lainnya atas pekerjaan faspel yang telah menjadi aset.
45	287192	Disnav Kelas II Banjarmasin	Perencanaan Rehabilitasi Rumah Jaga Mensu Tg.Pandaran	143	PL.106/1/11/DNG.BJM-20	CV.Gambar Konsultan	17 Maret 2020	15 April 2020	48.588.100	38.870.480	792.429.480	38.870.480	-	-	
46	287192	Disnav Kelas II Banjarmasin	DED Peningkatan Sarana dan Prasarana Pangkalan Kenavigasian	152	PL.106/4/14/DNG.BJM-20	CV.Sketsa Nirindo Aditama	07/09/2020	05 Desember 2020	261.264.000	268.036.000	-	268.036.000	-	-	
47	287192	Disnav Kelas II Banjarmasin	DED Replacement Rumah Operasional SROP Pemancar	153	PL.106/4/5/DNG.BJM-20	CV.Gambar Konsultan	07 Juli 2020	21 September 2020	73.210.500	18.302.625	-	18.302.625	-	-	
48	287192	Disnav Kelas II Banjarmasin	DED Replacement Rumah Operasional SROP Pemancar	154	PL.106/4/5/DNG.BJM-20	CV.Gambar Konsultan	07 Juli 2020	21 September 2020		18.302.625	-	18.302.625	-	-	
49	287192	Disnav Kelas II Banjarmasin	DED Replacement Rumah Operasional SROP Pemancar	155	PL.106/4/5/DNG.BJM-20	CV.Gambar Konsultan	07 Juli 2020	21 September 2020		18.302.625	-	18.302.625	-	-	
50	287192	Disnav Kelas II Banjarmasin	DED Replacement Rumah Operasional SROP Pemancar	156	PL.106/4/5/DNG.BJM-20	CV.Gambar Konsultan	07 Juli 2020	21 September 2020		18.302.625	-	18.302.625	-	-	
51	287192	Disnav Kelas II Banjarmasin	DED Replacment Rumah Jaga Ms.Tg.Padadatua	157	PL.106/4/3/DNG.BJM-20	CV.Sukmareka Yasapranata	09 Juli 2020	06 Oktober 2020	98.560.000	98.560.000	-	98.560.000	-	-	
52	287192	Disnav Kelas II Banjarmasin	DED Realokasi Pembangunan Ms Tg.Puting	158	PL.106/5/10/DNG.BJM-20	CV. Antang Sakti	29/09/2020	27 November 2020	209.490.000	215.418.000	-	215.418.000	-	-	
53	287192	Disnav Kelas II Banjarmasin	DED Replacement Rumah Jaga Ms. Gn.Belingkar	159	PL.106/5/10/DNG.BJM-20	CV.Afapasta Consultant	04/09/2020	02 Desember 2020	98.334.500	98.334.500	-	98.334.500	-	-	
54	559292	KSOP Kelas III Satui	Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Mess Operasinal Pegawai KSOP Satui 2(dua)Lt	3	PL.107/1/15/Ksop-Satui-2024	CV.Surya Agung	04/09/2024	31 Desember 2024	2.476.000.000	1.520.000	2.539.581.567	1.520.000	-	-	akan terbit PHO di akhir Februari 2025, untuk selanjutnya akan didefinitifkan menjadi aset Mess

No	Kode Satker SAKTI	NAMA SATKER	URAIAN PEKERJAAN	NO KDP	NOMOR KONTRAK	NAMA KONTRAKTOR	TANGGAL MULAI KONTRAK	TANGGAL AKHIR KONTRAK	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI REALISASI (Rp)	NILAI KDP (Rp) SAKTI	KLASIFIKASI			KETERANGAN (Akan Didefinitifkan/Belum Tersedia Anggaran/Dsb.)
												DILANJUTKAN	DIHENTIKAN SEMENTARA	DIHENTIKAN PERMANEN	
55	559292	KSOP Kelas III Satui	Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Rumah negara	4	PL.107/1/23/Ksop-Satui-2024	CV.Cakratama Abadi Sentosa	04/09/2024	31 Desember 2024	473.772.263	1.020.000	-	1.020.000	-	-	sudah terbit PHO akan dijadikan aset definitif menjadi Rumah Negara
56	559292	KSOP Kelas III Satui	Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Mess Operasinal Pegawai KSOP Satui 2(dua)Lt	5	PL.107/1/15/Ksop-Satui-2024	CV.Surya Agung	04/09/2024	31 Desember 2024	2.476.000.000	742.800.000	-	729.972.944	-	-	akan terbit PHO di akhir Februari 2025, untuk selanjutnya akan didefinitifkan menjadi aset Mess
57	559292	KSOP Kelas III Satui	Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Rumah negara	6	PL.107/1/23/Ksop-Satui-2024	CV.Cakratama Abadi Sentosa	04/09/2024	31 Desember 2024	473.772.263	236.886.132	-	236.886.132	-	-	sudah terbit PHO akan dijadikan aset definitif menjadi Rumah Negara
58	559292	KSOP Kelas III Satui	Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Mess Operasinal Pegawai KSOP Satui 2(dua)Lt	7	PL.107/1/15/Ksop-Satui-2024	CV.Surya Agung	04/09/2024	31 Desember 2024	2.701.505.000	1.148.253.500	-	1.148.253.500	-	-	akan terbit PHO di akhir Februari 2025, untuk selanjutnya akan didefinitifkan menjadi aset Mess
59	559292	KSOP Kelas III Satui	Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Rumah negara	8	Adendum PL.107/2/11/KSOP.Satui-2024	CV.Cakratama Abadi Sentosa	02/12/2024	31 Desember 2024	520.045.000	138.066.313	-	138.066.313	-	-	sudah terbit PHO akan dijadikan aset definitif menjadi Rumah Negara
60	559292	KSOP Kelas III Satui	Pengawasan/Supervisi Pembangunan Rumah Negara type 70 Kantor KSOP Satui	9	PL.107/1/25/KSOP.Satui-2024	CV. Ideal Sejati Consulindo	29/07/2024	25 Desember 2024	44.834.170	37.835.556	-	37.835.556	-	-	supervisi Rumah Negara
61	559292	KSOP Kelas III Satui	Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Mess Operasinal Pegawai KSOP Satui 2(dua)Lt	10	Adendum PL107/2/15/KSOP.Satui-2024	CV.Surya Agung	09/12/2024	31 Desember 2024	2.701.505.000	59.703.260	-	59.703.260	-	-	akan terbit PHO di akhir Februari 2025, untuk selanjutnya akan didefinitifkan menjadi aset Mess
62	559292	KSOP Kelas III Satui	Pengawasan/Supervisi Pembangunan mess	11	Adendum PL.107/2/16/KSOP.Satui-2024	CV.Ozone Dimensi Teknik	29/07/2024	31 Desember 2024	99.058.520	87.112.062	-	87.112.062	-	-	supervisi Mess
63	559292	KSOP Kelas III Satui	Konsultansi DED Pembagunan Rumah Negara Type 70	1	PL.107/1/12/UPP.Satui-2023	CV.Sukmareka Jasa Pratama	23/09/2023	27 Oktober 2023	79.603.600	79.603.600	-	79.603.600	-	-	Ded Rumah Negara
64	559292	KSOP Kelas III Satui	Konsultansi DED MESS OPERASIONAL PEGAWAI	2	PL.107/1/12/UPP.Satui-2023	CV.Sukmareka Jasa Pratama	23/09/2023	27 Oktober 2023	19.608.200	19.608.200	-	19.608.200	-	-	DED Mess
65	287211	KSOP Kelas I Samarinda	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Palaran	1	119/33/KJS-KS/XI/2016, Nomor: 107/1/1/KSOP.SMD-2016 dan Nomor: I/HK.301/9/DUT-2016	PT. Pelindo	18/11/2016	-	24.578.970.000	-	49.329.154.457	-	24.578.970.000	-	Akan dilakukan kontrak ulang
66	287211	KSOP Kelas I Samarinda	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Palaran	2	119/33/KJS-KS/XI/2016, Nomor: 107/1/1/KSOP.SMD-2016 dan Nomor: I/HK.301/9/DUT-2016	PT. Pelindo	18/11/2016	-	24.275.034.457	-	-	-	24.275.034.457	-	Akan dilakukan kontrak ulang
67	287211	KSOP Kelas I Samarinda	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Palaran	3	119/33/KJS-KS/XI/2016, Nomor: 107/1/1/KSOP.SMD-2016 dan Nomor: I/HK.301/9/DUT-2016	PT. Pelindo	18/11/2016	-	475.150.000	-	-	-	475.150.000	-	Akan dilakukan kontrak ulang
68	289822	UPP Kelas I Sangkulirang	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	11	-	-	-	-	22.650.213.000	22.650.213.000	22.650.213.000	-	22.650.213.000	-	Transfer dari pusat
69	287342	Disnav Kelas I Manado/Bitung	Kontrak Fisik Pembangunan Rambu Suar Kr. Luar Anggrek dan Kr. Siladen	43	PL.107/37/14/DNG.BTG-2020 Adendum PL.107/62/11/DNG.BTG-2020	PT. Citra Jaya Sejati	24 Juli 2020 Adendum 23 November 2020	31 Desember 2020	2.465.010.000	2.465.010.000	3.862.759.190	2.657.466.090	-	-	Akan Didefinitifkan setelah pembayaran denda diselesaikan
70	287342	Disnav Kelas I Manado/Bitung	Kontrak Supervisi Pembangunan Rambu Suar Kr. Luar Anggrek dan Kr. Siladen	43	PL.107/37/14/DNG.BTG-2020 Adendum PL.107/62/11/DNG.BTG-2020	CV. Kelby Konsultan	25 Juli 2020 Adendum 23 November 2020	32 Desember 2020	90.530.000	90.530.000	-	-	-	-	Akan Didefinitifkan setelah pembayaran denda diselesaikan
71	287342	Disnav Kelas I Manado/Bitung	Kontrak DED Pembangunan Rambu Suar Kr. Luar Anggrek dan Kr. Siladen	43	PL.107/37/14/DNG.BTG-2020 Adendum PL.107/62/11/DNG.BTG-2020	CV. Wana Hijau	26 Juli 2020 Adendum 23 November 2020	33 Desember 2020	93.692.000	92.400.000	-	-	-	-	Akan Didefinitifkan setelah pembayaran denda diselesaikan
72	287342	Disnav Kelas I Manado/Bitung	Honor	43	PL.107/37/14/DNG.BTG-2020 Adendum PL.107/62/11/DNG.BTG-2020	PT. Citra Jaya Sejati	27 Juli 2020 Adendum 23 November 2020	34 Desember 2020		4.560.000	-	-	-	-	Akan Didefinitifkan setelah pembayaran denda diselesaikan
73	287342	Disnav Kelas I Manado/Bitung	ATK	43	PL.107/37/14/DNG.BTG-2020 Adendum PL.107/62/11/DNG.BTG-2020	PT. Citra Jaya Sejati	28 Juli 2020 Adendum 23 November 2020	34 Desember 2020		4.966.090	-	-	-	-	Akan Didefinitifkan setelah pembayaran denda diselesaikan
74	287342	Disnav Kelas I Manado/Bitung	Kontrak Fisik Replaceman Rambu Suar 30 M Darat Rangka Baja di Galvanis Lokasi Mahoro	44	HK.107/2/16/DNG.BTG-2018	CV. Surya Prima	25 Agustus 2019	22 November 2019	1.161.932.000	1.161.932.000	-	-	-	1.205.293.100	Dalam Pemeriksaan dan Proses APH
75	287342	Disnav Kelas I Manado/Bitung	Kontrak Supervisi Replaceman Rambu Suar 30 M Darat Rangka Baja di Galvanis Lokasi Mahoro	44	HK.107/2/16/DNG.BTG-2018	CV. Encona Consultant	26 Agustus 2019	22 November 2019	32.725.000	32.725.000	-	-	-	-	Dalam Pemeriksaan dan Proses APH
76	287342	Disnav Kelas I Manado/Bitung	Honor	44	HK.107/2/16/DNG.BTG-2018		27 Agustus 2019	22 November 2019		10.636.100	-	-	-	-	Dalam Pemeriksaan dan Proses APH
77	413582	UPP Kelas III Melonguane	Kontrak Fisik Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Laut Marampit	1	PL.109/1/6/UPP.MLG-24 adendum terakhir nomor ADD.2/PL.109/1/6/UPP.MLG-24	PT. Realita Timur Perkasa	5 Januari 2024	29 November 2024	41.051.000.000	38.998.500.000	40.147.211.250	40.147.211.250	-	-	Akan didefinitfkan di Semester I Thn 2025

No	Kode Satker SAKTI	NAMA SATKER	URAIAN PEKERJAAN	NO KDP	NOMOR KONTRAK	NAMA KONTRAKTOR	TANGGAL MULAI KONTRAK	TANGGAL AKHIR KONTRAK	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI REALISASI (Rp)	NILAI KDP (Rp) SAKTI	KLASIFIKASI			KETERANGAN (Akan Didefinitifkan/Belum Tersedia Anggaran/Dsb.)
												DILANJUTKAN	DIHENTIKAN SEMENTARA	DIHENTIKAN PERMANEN	
78	413582	UPP Kelas III Melonguane	Kontrak Supervisi Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Konstruksi Supervisi Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Laut Marampit	1	PL.109/1/4/UPP.MLG-24 adendum terakhir nomor ADD.02/PL.109/1/4/UPP.MLG-2024	PT. Mitra Reka Nusa	21 Februari 2024	Desember 2024	1.148.711.250	1.148.711.250	-	-	-	-	Akan didefinitfkan di Semester I Thn 2025
79	521747	UPP Kelas III Kotabunan	Paket Pekerjaan Konstruksi Replacement Fasilitas Pelabuhan Laut Kotabunan	1	PL.107/04/06/UPP.Ktbn-2024	CV. Manna Gratia	29/4/2024	31 Desember 2024	4.895.770.439	4.895.770.439	4.757.869.303	4.757.869.303	-	-	
80	521747	UPP Kelas III Kotabunan	Supervisi Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kotabunan	1	PL.107/04/09/UPP.Ktbn-2024	PT. Pitagoras Pradipa Konsultan	29/4/2024	31 Desember 2024	98.075.000	98.075.000	-	-	-	-	
81	413591	UPP Kelas III Kolonedale	Kontrak Fisik Lanjutan Pengembangan Faspel Kolonedale	3	PL.107/32/02/UPP.KDL-2024 adendum terakhir PL.107/32/02/UPP.KDL-2024 tgl 15 November 2024	PT. Tirai Megah Utama	22 Maret 2024	Desember 2024	18.523.166.500	18.523.166.500	17.710.897.546	17.710.897.546	-	-	Pekerjaan Masih dilanjutkan karena perpanjangan waktu
82	413591	UPP Kelas III Kolonedale	Kontrak Supervisi Lanjutan Pengembangan Faspel Kolonedale	3	PL.107/51/03/UPP.KDL.2024 adendum terakhir PL.107/285/9/UPP.KDL-2024 tgl 8 November 2024	PT. Total Prakasa Utama	05/04/2024	Desember 2024	776.833.500	776.833.500	-	-	-	-	Pekerjaan Masih dilanjutkan karena perpanjangan waktu
83	413602	UPP Kelas III A M P A N A	Paket Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Lebiti	2	003/PPK-LBT/V/UPP.AMP-2024	CV. Rahajeng Lestari Teknik	05/06/2024	10 Februari 2024	3.632.131.200	3.632.131.200	11.905.499.493	3.826.262.080	-	-	AKAN DI ASETKAN DI TAHUN 2025
84	413602	UPP Kelas III A M P A N A	Paket pekerjaan Supervisi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Lebiti	2	002/PPJ-AMP/KONS/V/UPP.Amp-2024	CV. Geometric Konsultan Teknik	28/05/2024	10 Februari 2024	417.595.875	417.595.875	-	-	-	-	
85	413602	UPP Kelas III A M P A N A	Honor	2						1.370.000	-	-	-	-	
86	413602	UPP Kelas III A M P A N A	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Ampana	3	004/PPK-AMP/VI/ UPP.Amp-2024	CV. Sinar Saronde Lestari	27/06/2024	31/12/2024	9.915.339.473	9.915.339.473	-	8.079.237.413	-	-	AKAN DI ASETKAN DI TAHUN 2025
87	413602	UPP Kelas III A M P A N A	Paket Pekerjaan Supervisi Lanjutan Pelebaran Dermaga Pelabuhan Ampana dan Pengembangan Fasilitas Darat Pelabuhan Ampana	3	002/PPK-AMP1/KONS/VI/UPP.Amp-2024	PT. Total Prakasa Utama	27/06/2024	31/12/2024	757.147.650	757.148.688	-	-	-	-	
88	413602	UPP Kelas III A M P A N A	Pekerjaan Soil Investigation (Boring) Pelabuhan Ampana	3	001/PPK_AMP?SOIL1/UPP.Amp-2024	CV. Putra Celebes Papua Engineering	19/12/2024	31/12/2024	124.800.000	124.800.000	-	-	-	-	
89	413602	UPP Kelas III A M P A N A	Pekerjaan Soil Investigation (Boring) Pelabuhan Ampana	3	001/PPK_AMP?SOIL2/UPP.Amp-2024	CV. Putra Celebes Papua Engineering	19/12/2024	31/12/2024	124.800.000	124.800.000	-	-	-	-	
90	413602	UPP Kelas III A M P A N A	Honor	3						101.509.309	-	-	-	-	
91	413441	UPP Kelas III S E L A Y A R	Replacment dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Benteng	1	PL.107/1/5/UPP.Sly/2024	PT.Tirai Megah Utama	15 Februari 2024	31 Desember 2024	31.600.070.000	6.320.014.000	29.651.355.300	6.320.014.000	-	-	dilanjutkan
92	413441	UPP Kelas III S E L A Y A R	Supervisi Pekerjaan Replacment dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Benteng	2	PL.107/3/6/UPP.Sly/2024	CV.Aliah Consolindi	30 Maret 2024	24 November 2024	924.336.960	126.780.870	-	126.780.870	-	-	dilanjutkan
93	413441	UPP Kelas III S E L A Y A R	Replacment dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Benteng	3	PL.107/1/5/UPP.Sly/2024	PT.Tirai Megah Utama	15 Februari 2024	31 Desember 2024	31.600.070.000	4.740.010.500	-	4.740.010.500	-	-	dilanjutkan
94	413441	UPP Kelas III S E L A Y A R	Replacment dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Benteng	4	PL.107/1/5/UPP.Sly/2024	PT.Tirai Megah Utama	15 Februari 2024	31 Desember 2024	31.600.070.000	3.792.008.400	-	3.792.008.400	-	-	dilanjutkan
95	413441	UPP Kelas III S E L A Y A R	Replacment dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Benteng	5	PL.107/1/5/UPP.Sly/2024	PT.Tirai Megah Utama	15 Februari 2024	31 Desember 2024	31.600.070.000	3.792.008.400	-	3.792.008.400	-	-	dilanjutkan
96	413441	UPP Kelas III S E L A Y A R	Supervisi Pekerjaan Replacment dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Benteng	6	PL.107/3/6/UPP.Sly/2024	CV.Aliah Consolindi	30 Maret 2024	24 November 2024	924.336.960	111.240.870	-	111.240.870	-	-	dilanjutkan
97	413441	UPP Kelas III S E L A Y A R	Supervisi Pekerjaan Replacment dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Benteng	7	PL.107/3/6/UPP.Sly/2024	CV.Aliah Consolindi	30 Maret 2024	24 November 2024	924.336.960	111.240.870	-	111.240.870	-	-	dilanjutkan
98	413441	UPP Kelas III S E L A Y A R	Supervisi Pekerjaan Replacment dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Benteng	8	PL.107/3/6/UPP.Sly/2024	CV.Aliah Consolindi	30 Maret 2024	24 November 2024	924.336.960	111.240.870	-	111.240.870	-	-	dilanjutkan
99	413441	UPP Kelas III S E L A Y A R	Replacment dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Benteng	9	PL.107/1/5/UPP.Sly/2024	PT.Tirai Megah Utama	15 Februari 2024	31 Desember 2024	31.600.070.000	3.792.008.400	-	3.792.008.400	-	-	dilanjutkan

No	Kode Satker SAKTI	NAMA SATKER	URAIAN PEKERJAAN	NO KDP	NOMOR KONTRAK	NAMA KONTRAKTOR	TANGGAL MULAI KONTRAK	TANGGAL AKHIR KONTRAK	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI REALISASI (Rp)	NILAI KDP (Rp) SAKTI	KLASIFIKASI			KETERANGAN (Akan Didefinitifkan/Belum Tersedia Anggaran/Dsb.)
												DILANJUTKAN	DIHENTIKAN SEMENTARA	DIHENTIKAN PERMANEN	
100	413441	UPP Kelas III S E L A Y A R	Replacment dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Benteng	10	PL.107/1/5/UPP.Sly/2024	PT.Tirai Megah Utama	15 Februari 2024	31 Desember 2024	31.600.070.000	2.043.322.880	-	2.043.322.880	-	-	dilanjutkan
101	413441	UPP Kelas III S E L A Y A R	Supervisi Pekerjaan Replacment dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Benteng	11	PL.107/3/6/UPP.Sly/2024	CV.Aliah Consolindi	30 Maret 2024	24 November 2024	924.336.960	111.240.870	-	111.240.870	-	-	dilanjutkan
102	413441	UPP Kelas III S E L A Y A R	Replacment dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Benteng	12	PL.107/1/5/UPP.Sly/2024	PT.Tirai Megah Utama	15 Februari 2024	31 Desember 2024	31.600.070.000	2.043.322.880	-	2.043.322.880	-	-	dilanjutkan
103	413441	UPP Kelas III S E L A Y A R	Supervisi Pekerjaan Replacment dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Benteng	13	PL.107/3/6/UPP.Sly/2024	CV.Aliah Consolindi	30 Maret 2024	24 November 2024	924.336.960	111.240.870	-	111.240.870	-	-	dilanjutkan
104	413441	UPP Kelas III S E L A Y A R		14	Adminstrasi					18.000.000	-	-	18.000.000	-	
105	413441	UPP Kelas III S E L A Y A R		15	Honor Tim Pendapingan Hukum					21.600.000	-	-	21.600.000	-	
106	413441	UPP Kelas III S E L A Y A R		16	Honor Tim Admistrasi					3.900.000	-	-	3.900.000	-	
107	413441	UPP Kelas III S E L A Y A R		17	Honor Tim Keuangan					3.900.000	-	-	3.900.000	-	
108	413441	UPP Kelas III S E L A Y A R		18	Honor Tim Pendapingan Hukum					25.200.000	-	-	25.200.000	-	
109	413441	UPP Kelas III S E L A Y A R		19	Honor Tim Pendapingan Hukum					25.200.000	-	-	25.200.000	-	
110	413441	UPP Kelas III S E L A Y A R		20	Honor Tim Teknis					10.800.000	-	-	10.800.000	-	
111	413441	UPP Kelas III S E L A Y A R		21	Honor Tim Admistrasi					2.600.000	-	-	2.600.000	-	
112	413441	UPP Kelas III S E L A Y A R		22	Honor Tim Keuangan					2.600.000	-	-	2.600.000	-	
113	413441	UPP Kelas III S E L A Y A R	Supervisi Pekerjaan Replacment dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Benteng	23	PL.107/3/6/UPP.Sly/2024	CV.Aliah Consolindi	30 Maret 2024	24 November 2024	924.336.960	111.240.870	-	111.240.870	-	-	dilanjutkan
114	413441	UPP Kelas III S E L A Y A R	Replacment dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Benteng	24	PL.107/1/5/UPP.Sly/2024	PT.Tirai Megah Utama	15 Februari 2024	31 Desember 2024	31.600.070.000	2.043.322.880	-	2.043.322.880	-	-	dilanjutkan
115	413441	UPP Kelas III S E L A Y A R	Supervisi Pekerjaan Replacment dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Benteng	25	PL.107/3/6/UPP.Sly/2024	CV.Aliah Consolindi	30 Maret 2024	24 November 2024	924.336.960	130.110.870	-	130.110.870	-	-	dilanjutkan
116	413441	UPP Kelas III S E L A Y A R		26	Honor Tim Pendapingan Hukum					12.600.000	-	-	12.600.000	-	
117	413441	UPP Kelas III S E L A Y A R		27	Honor Tim Teknis					10.800.000	-	-	10.800.000	-	
118	413441	UPP Kelas III S E L A Y A R		28	Honor Tim Admistrasi					2.600.000	-	-	2.600.000	-	
119	413441	UPP Kelas III S E L A Y A R		29	Honor Tim Keuangan					2.600.000	-	-	2.600.000	-	
120	413441	UPP Kelas III S E L A Y A R		30	Adminstrasi					18.600.000	-	-	18.600.000	-	
121	413472	UPP Kelas II P A L O P O	Pengadaan dan Pemasangan Suku Cadang Crane Pelabuhan Palopo	1	PL.107/16/1/UPP.PLP/2024 Adendum PL.107/34/6/UPP.PLP/2024	CV.Sahabat Mitra Sejati	9 Oktober 2024 Adendum 18 Desember 2024	8 Februari 2024	983.500.000	885.150.000	885.150.000	885.150.000	-	-	Pekerjaan Akan selesai dan didefinitifkan Pada Tahun 2025
122	413472	UPP Kelas II P A L O P O									-	-	-	-	
123	413472	UPP Kelas II P A L O P O									-	-	-	-	
124	413472	UPP Kelas II P A L O P O									-	-	-	-	
125	413508	UPP Kelas III Kolaka	Pekerjaan pembangunan Faspel Laut Watunohu TA.2016	20	KU.005/50/06/UPP.KLK.2015	PT.Intisigma Pratama CiPTa	18/09/2015		11.573.900.000	11.573.900.000	21.717.923.000	-	-	11.682.929.000	dihentikan permanen, sudah ada studi nya
126	413508	UPP Kelas III Kolaka	Pekerjaan pembangunan Faspel Laut Watunohu TA.2016	21	PL.106/37/11/UPP.KLK.2015	CV.Bolard Mitra Konsultan	18/09/2015		194.600.000	194.600.000	-	-	-	194.600.000	dihentikan permanen, sudah ada studi nya
127	413508	UPP Kelas III Kolaka	Pekerjaan pembangunan Faspel Laut Watunohu TA.2016	22	PL.106/02/05/PPK/UPP.KLK-16	PT.Sinar Lima Putra	05/04/2016		9.210.975.000	9.210.975.000	-	-	-	9.262.644.000	dihentikan permanen, sudah ada studi nya
128	413508	UPP Kelas III Kolaka	Pekerjaan pembangunan Faspel Laut Watunohu TA.2016	23	PL.106/02/02/UPP.KLK-2016	CV.Medale Konsultan	28 MARET 2016		217.750.000	217.750.000	-	-	-	217.750.000	dihentikan permanen, sudah ada studi nya
129	413508	UPP Kelas III Kolaka	Pekerjaan pembangunan Faspel Laut Watunohu TA.2016	24					190.000.000	190.000.000	-	-	-	190.000.000	dihentikan permanen, sudah ada studi nya
130	413508	UPP Kelas III Kolaka	Pekerjaan pembangunan Faspel Laut Watunohu TA.2016	25					90.000.000	90.000.000	-	-	-	90.000.000	dihentikan permanen, sudah ada studi nya
131	413508	UPP Kelas III Kolaka	Pekerjaan pembangunan Faspel Laut Watunohu TA.2016	26					80.000.000	80.000.000	-	-	-	80.000.000	dihentikan permanen, sudah ada studi nya
132	287537	KSOP Kelas I Ambon		11							2.525.442.945	-	-	-	

No	Kode Satker SAKTI	NAMA SATKER	URAIAN PEKERJAAN	NO KDP	NOMOR KONTRAK	NAMA KONTRAKTOR	TANGGAL MULAI KONTRAK	TANGGAL AKHIR KONTRAK	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI REALISASI (Rp)	NILAI KDP (Rp) SAKTI	KLASIFIKASI			KETERANGAN (Akan Didefinitifkan/Belum Tersedia Anggaran/Dsb.)
												DILANJUTKAN	DIHENTIKAN SEMENTARA	DIHENTIKAN PERMANEN	
133	287537	KSOP Kelas I Ambon	Docking Kapal Patroli KNP. 338 TA. 2024	1	PL.107/2/8/BM/KSOP.ABN-2024	CV. Alvaro Technical Marine	27/06/2024	25 Agustus 2024	1.311.465.000	1.311.465.000		1.379.137.980	-	-	Akan Didefinitifkan
134	287537	KSOP Kelas I Ambon	Rehabilitasi Gedung Kantor KPLP - KSOP Ambon TA 2024	2	PL.107/2/4/BM/KSOP.ABN-2024	CV. Andika Karya	10/06/2024	09 Desember 2024	1.507.124.000	1.507.124.000		1.146.304.965	-	-	Akan Didefinitifkan
135	287558	Disnav Kelas I A M B O N	Docking KN. Bacan	2	PL.107/ 3 / 1/DNG.ABN-2024	PT Industri Kapal Indonesia	1 Oktober 2024	29 Desember 2024	11.633.626.000	9.022.880.475	11.318.559.900	11.318.559.900	-	-	Pekerjaan Masih Berjalan Docking Kapal Negara KN. Bacan
136	413520	UPP Kelas II T U A L	Pekerjaan Supervisi Rehabilitasi Pelabuhan Tayando Tahun 2020	29	HK.107/3/19/K.UPP.TL-20 Tgl. 14-05-2020	CV Angel Consultant	20/06/2020	44063	19.500.000	19.500.000	-	-	-	-	Menjadi Aset Solar Cell, Melalui Koreksi Pencatatn
137	413520	UPP Kelas II T U A L	Pekerjaan Supervisi Rehabilitasi Pelabuhan Kur Tahun 2020	30	HK.107/3/19/K.UPP.TL-20 Tgl. 14-05-2020	CV Angel Consultant	20/06/2020	20 Agustus 2020	19.300.000	19.300.000		-	-	-	Menjadi Aset Solar Cell, Melalui Koreksi Pencatatn
138	413520	UPP Kelas II T U A L	Pekerjaan Rehab Pelabuhan Tayando TA 2020	27	HK.107/1/17/K.UPP.TL-20 Tgl 13-05-2020	PT. Surya Indah Pratama	13/05/2020	11 Agustus 2020	702.740.990	702.740.990		-	-	-	Menjadi Aset Solar Cell, Melalui Koreksi Pencatatn
139	413627	UPP Kelas III Amahai	Pembangunan Faspel Amahai	15	No.HK.107/2/2/UPP.AMH-2015	PT.Mitra Citra Bersama	25/04/2015	21 September 2015	7.690.000.000	4.361.482.039	3.328.517.961	-	3.328.517.961	-	Sengketa Lahan yang belum terselesaikan
140	521878	UPP Kelas II T U L E H U	TKTM KDP SATKER PUSAT	10	-	-	-	-	22.904.300.000	-	129.960.196.000	-	22.904.300.000	-	UPP TULEHU TIDAK DAPAT MENUNJUKAN PEKERJAAN KDP DIMAKSUD
141	521878	UPP Kelas II T U L E H U	TKTM KDP SATKER PUSAT	22	-	-	-	-	91.417.646.000	-	-	-	91.417.646.000	-	UPP TULEHU TIDAK DAPAT MENUNJUKAN PEKERJAAN KDP DIMAKSUD
142	521878	UPP Kelas II T U L E H U	TKTM KDP SATKER PUSAT	23	-	-	-	-	15.638.250.000	-	-	-	15.638.250.000	-	UPP TULEHU TIDAK DAPAT MENUNJUKAN PEKERJAAN KDP DIMAKSUD
143	521882	UPP Kelas III Hatu Piru	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Piru di Ariate	3	PC.087/8/26/UPP.WS-11 , tgl, 20 april 2011 Addendum No. UK.289/2/6/UPP. WS-11, tgl, 9 November 2011	PT. Witada Bangun Gemilang	20/04/2011	15/11/2011	2.442.859.000	2.442.859.000	4.880.789.977	-	-	2.442.859.000	Addendum I, Pekerjaan dihentikan karena adanya Sengketa Lahan
144	521882	UPP Kelas III Hatu Piru	DOKUMEN UPL pada Pelabuhan Kairatu	19	PR.809/3/8/UPP.WS-2016	PT. Andal Persada Utama Raya	05/09/2016	19/12/2016	167.000.000	167.000.000	-	-	167.000.000	-	Dokumen Studi Lingkungan Hidup pada Pelabuhan Kairatu
145	521882	UPP Kelas III Hatu Piru	Supervisi Pekerjaan Rehabilitasi Fasilitas Penunjang Operasional Pelabuhan Piru	20	PL.107/1/1/UPP.HUU-24, tgl, 29-02-24	CV. Caroliv	03/05/2024	31-08-24	94.000.000	94.000.000	-	56.400.000	-	-	Akan Didefinitifkan
146	521882	UPP Kelas III Hatu Piru	Dokumen Lelang	21	PL.107/1/1/UPP.HUU-24, tgl, 29-02-24	CV. Caroliv	03/05/2024	31-08-24		7.500.000	-	7.500.000	-	-	Akan Didefinitifkan
147	521882	UPP Kelas III Hatu Piru	Pekerjaan Rehabilitasi Fasilitas Penunjang Operasional Pelabuhan Piru	22	PL.107/1/2/UPP.HUU-24, tgl, 23-02-24	CV. Orantata	29-02-2024	26-08-2024	2.169.430.977	2.169.430.977	-	2.207.030.977	-	-	Akan Didefinitifkan
148	559417	UPP Kelas III Geser	Konsultan Pembangunan Faspel darat Pelabuhan Gorom Wilker Namrole T.A 2024	13	PL.107/1/2/UPP.GSR-2024	CV.Jargaria Engineering	01/06/2024	09/05/2024	94.572.000	18.914.000	3.877.042.000	94.572.000	-	-	Dilanjutkan 2024-2025, saat ini belum tersedia anggaran
149	559417	UPP Kelas III Geser		16							-	2.187.670.000	-	-	RPATA 2024 yang akan didefinitifkan Tahun 2025
150	559417	UPP Kelas III Geser		1							-	853.950.000	-	-	RPATA 2024 yang akan didefinitifkan Tahun 2025
151	559417	UPP Kelas III Geser		2							-	666.000.000	-	-	RPATA 2024 yang akan didefinitifkan Tahun 2025
152	559417	UPP Kelas III Geser		3							-	74.850.000	-	-	RPATA 2024 yang akan didefinitifkan Tahun 2025
153	559463	UPP Kelas III Wonreli	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	11	PL.107/1/6/UPP.WRL/2024	PT. Citra Arya Persada	19 Januari 2024	28 Desember 2024	40.342.603.433	40.342.603.433	56.744.674.884	40.342.603.432	-	-	Pemberian Kesempatan 50 Hari Kerja (Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut Lerokis)
154	559463	UPP Kelas III Wonreli	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	4	PL.107/3/01/UPP.WRL/2024	PT. Citra Arya Persada	22 Maret 2024	30 Desember 2024	12.316.208.212	12.316.208.212	-	11.824.383.928	-	-	Pemberian Kesempatan 50 Hari Kerja (Rehabilitasi Fasilitas Eray)
155	559463	UPP Kelas III Wonreli	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	5	PL.107/3/01/UPP.WRL/2025	PT. Citra Arya Persada	22 Maret 2024	30 Desember 2024	4.447.062.725	4.447.062.725	-	4.447.062.724	-	-	Pemberian Kesempatan 50 Hari Kerja (Rehabilitasi Fasilitas Eray)
156	559463	UPP Kelas III Wonreli	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	8	PL.107/3/01/UPP.WRL/2026	PT. Citra Arya Persada	22 Maret 2024	30 Desember 2024	130.624.801	130.624.801	-	130.624.800	-	-	Pemberian Kesempatan 50 Hari Kerja (Rehabilitasi Fasilitas Eray)

No	Kode Satker SAKTI	NAMA SATKER	URAIAN PEKERJAAN	NO KDP	NOMOR KONTRAK	NAMA KONTRAKTOR	TANGGAL MULAI KONTRAK	TANGGAL AKHIR KONTRAK	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI REALISASI (Rp)	NILAI KDP (Rp) SAKTI	KLASIFIKASI			KETERANGAN (Akan Didefinitifkan/Belum Tersedia Anggaran/Dsb.)
												DILANJUTKAN	DIHENTIKAN SEMENTARA	DIHENTIKAN PERMANEN	
157	559484	UPP Kelas III Bula	Pembangunan Faspel Laut Wahai TA 2017	1	PL.102/01/05/UPP.Whi-17	PT. Pacifik Multindo Permai	01/03/2017	30 Desember 2017	4.191.015.000	4.191.015.000	98.012.750.000	4.295.615.000	-	-	Akan Didefinitifkan
158	559484	UPP Kelas III Bula	Supervisi Pembangunan Faspel Laut Wahai	2	PL.102/01/05/UPP.Whi-17	PT. Pacifik Multindo Permai	01/03/2017	30 Desember 2017	89.015.757.000	89.015.757.000	-	89.015.757.000	-	-	Akan Didefinitifkan
159	559484	UPP Kelas III Bula	Pembangunan Faspel Laut Bula TA 2018	5	PL.106/03/01/UPP.WHI-18	PT.Bangun Jaya Raya	02/11/2018	31 Desember 2018	2.826.900.000	2.826.900.000	-	2.826.900.000	-	-	Akan Didefinitifkan
160	559484	UPP Kelas III Bula	Pembangunan Faspel Laut Bula TA 2019 MYC	6	PL.107/4/18/UPP.Bla - 2019	CV. Azry Makmur	01/04/2019	31 Oktober 2019	1.835.000.000	1.835.000.000	-	1.835.000.000	-	-	Akan Didefinitifkan
161	559484	UPP Kelas III Bula	Supervisi Pembangunan Faspel Laut Bula TA 2019 MYC	7	PL.107/4/18/UPP.Bla - 2019	CV. Rili Jaya	01/10/2019	31 Desember 2019	39.478.000	39.478.000	-	39.478.000	-	-	Akan Didefinitifkan
162	652542	KSOP Kelas IV Banda Naira	Pembangunan Bangunan Operasional Wilker Kumber	10	PL.107/1/7/KSOP.BND-2024	CV. Jiko Majang	07/06/2024	07 Juli 2024	544.075.668	544.075.668	581.262.888	544.075.668	-	-	Akan Didefinitifkan
163	652542	KSOP Kelas IV Banda Naira	Supervisi Pembangunan Bangunan Operasional Wilker Kumber	11	PL.107/1/8/KSOP.BND-2024	CV. Alputmi Consultan	07/06/2024	07 Juli 2024	37.187.220	37.187.220	-	37.187.220	-	-	Akan Didefinitifkan
164	652570	Disnav Kelas III Tual	Pembangunan Rambu Suar 10 M. Laut Merah_Hijau Sistim Single Pipe 4 Kaki Alur Masuk Pelabuhan Tual-Kota Tual	128	PL.107/02/14/DNG-TL/2019	PT. Karsa Citra Widyatama	05/10/2019	11 Mei 2019	2,150,000,000	671.040.000	18.910.136.260	2.189.460.000	-	-	Dilanjutkan pada Tahun 2025, Menunggu anggaran
165	652570	Disnav Kelas III Tual	Pembangunan Rambu Suar 10 M. Laut Merah_Hijau Single Pipe 4 Kaki Alur Masuk Pelabuhan Kobroor Kab. Kepulauan Aru	129	PL.107/02/13/DNG-TL/2019	PT. Karya Paramatha Abadi	05/10/2019	11 Mei 2019	2,215,000,000	683.400.040	-	2.247.800.080	-	-	Dilanjutkan pada Tahun 2025, Menunggu anggaran
166	652570	Disnav Kelas III Tual	Pembangunan Rambu Suar 10 M Laut single pipe 4 kaki Alur Masuk Pelabuhan Kesui Kab. SBT	140	PL. 107/04/11/DNG-TL/2020	CV.Rehma Gemilang	04/16/2020	10 Desember 2020	1,104,064,117	8.804.880	-	8.804.880	-	-	Dilanjutkan pada Tahun 2025, Menunggu anggaran
167	652570	Disnav Kelas III Tual	Replacement Rambu Suar Lampu Pelabuhan 20M Darat Konstruksi Beton DSI 5853 Lokasi Pelabuhan Adodo Molo Kab. Kepulauan Tanimbar	121	PL.107/01/19/DNG-TL/2024, Add.I :PL.107/01/19.Add/DNG-TL/2024, Add.I :PL.107/01/19.Add.2/DNG-TL/2024	PT. Iman Karunia Karya	29 Februari 2024, 4 September 2024, 6 Desember 2024	31 Desember 2024	4.172.033.500	3.644.022.569	-	3.644.022.569	-	-	Dilanjutkan di Tahun 2025, menunggu anggaran
168	652570	Disnav Kelas III Tual	Supervisi Pengawasan Replacement Rambu Suar Lampu Pelabuhan 20M Darat Konstruksi Beton DSI 5853 Lokasi Pelabuhan Adodo Molo Kab. Kepulauan Tanimbar	122	PL.107/02/07/DNG-TL/2024, PL.107/02/07.Add/DNG-TL/2024, PL.107/02/07.Add2/DNG-TL/2024,	CV. Prisma Karya Nusantara	29 Februari 2024, 6 September 2024, 9 Desember 2024	31 Desember 2024	230.862.795	184.690.236	-	184.690.236	-	-	Akan Didefinitifkan

No	Kode Satker SAKTI	NAMA SATKER	URAIAN PEKERJAAN	NO KDP	NOMOR KONTRAK	NAMA KONTRAKTOR	TANGGAL MULAI KONTRAK	TANGGAL AKHIR KONTRAK	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI REALISASI (Rp)	NILAI KDP (Rp) SAKTI	KLASIFIKASI			KETERANGAN (Akan Didefinitifkan/Belum Tersedia Anggaran/Dsb.)
												DILANJUTKAN	DIHENTIKAN SEMENTARA	DIHENTIKAN PERMANEN	
169	652570	Disnav Kelas III Tual	Supervisi Pengawasan Pembangunan Rambu Suar Lampu Pelabuhan 20M Darat Konstruksi Beton Lokasi Pelabuhan Tutukembun Kab. Kepulauan Tanimbar	123	PL.107/02/05/DNG-TL/2024, PL.107/02/05.Add/DNG-TL/2024, PL.107/02/05.Add2/DNG-TL/2024,	CV. Prisma Karya Nusantara	30 Februari 2024, 6 September 2024, 12 Desember 2024	31 Desember 2024	231.839.595	185.471.676	-	185.471.676	-	-	Akan Didefinitifkan
170	652570	Disnav Kelas III Tual	Replacement Menara Suar 40 M Darat Konstruksi Beton dan Fasilitas Penunjangnya Lokasi Pulau Larat Lamdesar No DSI 5852.1 (Pulau - pulau terluar NKRI) – Kab. Kepulauan Tanimbar	124	PL.107/02/03/DNG-TL/2024, Add.I : PL.107/02/03.Add/DNG-TL/2024, Add.II : PL.107/02/03.CCO/DNG-TL/2024	PT. Iman Karunia Karya	29 Februari 2024, 3 Oktober 2024, 12 Desember 2024	31 Desember 2024	11.060.288.000	6.244.785.900	-	6.244.785.900	-	-	diusulkan dianggarkan kembali Tahun 2025
171	652570	Disnav Kelas III Tual	Supervisi Pengawasan Replacement Menara Suar 40 M Darat Konstruksi Beton dan Fasilitas Penunjangnya Lokasi Pulau Larat Lamdesar No DSI 5852.1 (Pulau -pulau terluar NKRI) – Kab. Kepulauan Tanimbar	125	PL.107/02/09/DNG-TL/2024, PL.107/02/09.Add/DNG-TL/2024, PL.107/02/09.Add.2/DNG-TL/2024	PT. Prisma Karya Utama	29 Februari 2024, 3 Oktober 2024, 9 Desember 2024	31 Desember 2024	723.553.500	578.842.800	-	578.842.800	-	-	Akan Didefinitifkan
172	652570	Disnav Kelas III Tual	Pembangunan Rambu Suar Lampu Pelabuhan 20M Darat Konstruksi Beton Lokasi Pelabuhan Tutukembun Kab. Kepulauan Tanimbar	126	PL.107/02/01/DNG-TL/2024, Add. I : PL.107/02/01.Add/DNG-TL/2024, PL.107/02/01.Add.2/DNG-TL/2024,	PT. Anugerah Sekawan Indokarya	29 Februari 2024, 4 September 2024, 6 Desember 2024	31 Desember 2024	4.151.150.000	3.626.258.119	-	3.626.258.119	-	-	diusulkan dianggarkan kembali Tahun 2025
173	287147	UPP Kelas III Lewoleba	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Lewoleba TA 2023	1	PL.102/18/15/SATKER-LLAJ/2013 Adendum PL.102/18/16/SATKER-LLAJ/2013	PT. Wins	29-01-2024	24-10-2024	2.314.806.000	2.314.806.000	2.314.806.000	2.314.806.000	-	-	Akan Didefinitifkan
174	287715	KSOP Kelas IV Waingapu	Pembangunan Rehab Gedung kantor	1	PL.107/03/16/KSOP.WPU-2024 Adendum PL.107/01/01/KSOP.WPU-2025	PT. Alpha Bangkit	08 November 2024 Adendum 01 Januari 2025	31 Desember 2024	1.076.326.000	887.968.950	1.076.309.700	1.076.309.700	-	-	Akan Didefinitifkan
175	559527	UPP Kelas III Baranusa	UKL/UPL	4	KU.106/01/27/kupp.bra.16	PT. Artayu Rali Perdana	26-02-2016	21-12-2016	746.900.000	232.980.000	620.792.500	232.980.000	-	-	Akan Didefinitifkan
176	559527	UPP Kelas III Baranusa	UKL/UPL	5	KU.106/01/27/kupp.bra.16	PT. Artayu Rali Perdana	26-02-2016	21-12-2016		271.810.000	-	271.810.000	-	-	Akan Didefinitifkan
177	559527	UPP Kelas III Baranusa	UKL/UPL	6	KU.106/01/27/kupp.bra.16	PT. Artayu Rali Perdana	26-02-2016	21-12-2016		111.402.500	-	111.402.500	-	-	Akan Didefinitifkan
178	559527	UPP Kelas III Baranusa	UKL/UPL	7	KU.106/01/27/kupp.bra.16	PT. Artayu Rali Perdana	26-02-2016	21-12-2016		4.600.000	-	4.600.000	-	-	Akan Didefinitifkan
179	287782	KSOP Kelas III B I A K	Pembangunan Dermaga Pulau Owi	9	PC.087/050/PPK/KONTRAK/ADP.BIK/VIII/2010	PT. Manunggal Pratama Mandiri	12/08/2010	12/10/2010	6.917.745.000	6.917.745.000	6.917.745.000	-	6.917.745.000	-	Konstruksi Dalam pekerjaan pulau owi yang akan dilanjutkan pekerjaan pada Tahun 2023 Tidak dapat di lanjutkan Pada tahun 2024 karena pekerjaan KDP Tersebut Harus di survei ulang dan kajian-kajian Teknis pelabuhan baru dan memiliki Data-data dukung yang harus di penuhi dan revisi ulang antara lain : FGD, S I D, D I D, Hamdal, Surat pelepasan tanah adat / Hak Ulayat, Belum memiliki sertifikat kemenhub (KSOP BIAK), Blm memiki R I P
180	517950	UPP Kelas III B A D E	Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor TA. 2024	5	PL.107/1/2/UPP.Bde.KONST/2024, Adendum NO. PL.107/1/4/UPP.Bde.KONST.CCO/2024	CV. Animha Mandiri	19 September 2024 Adendum TGL 14 November 2024	18 Desember 2024	4.341.545.739	4.341.545.739	4.156.319.499	4.156.319.499	-	-	RPATA sampai dengan tanggal 26 Februari 2025
181	517950	UPP Kelas III B A D E	Supervisi Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor TA. 2024	5	PL.107/1/2/UPP.Bde.SPV/2024	PT. Fatek Engineering Consultant	19/09/2024	18 Desember 2024	252.343.792	252.343.792	-	-	-	-	
182	517950	UPP Kelas III B A D E	Administrasi Lelang	5		PT. Fatek Engineering Consultant	19/09/2024	18 Desember 2024	40.000.000	40.000.000	-	-	-	-	
183	559421	UPP Kelas III Jailolo		2							199.881.247.998	80.000.000	-	-	Akan didefenitifkan
184	559421	UPP Kelas III Jailolo		1							-	5.635.744.500	-	-	Akan didefenitifkan
185	559421	UPP Kelas III Jailolo		2							-	97.556.000	-	-	Akan didefenitifkan
186	559421	UPP Kelas III Jailolo	Pekerjaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Matui Ta.2023	1	PL.107/1/4/UPP.JLL-2023	PT.Karya Pembangunan Rezki	22 Februari 2023	31 Desember 2023	64.064.958.000	64.064.958.000	-	59.655.057.520	-	-	Akan didefenitifkan
187	559421	UPP Kelas III Jailolo	Supervisi Pekerjaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Matui Ta.2023	2	PL.107/1/5/UPP.JLL-2023	PT. Mutiara Rejeki Nusantara	22 Februari 2023	31 Desember 2023	2.463.867.000	2.463.867.000	-	65.008.226.450	-	-	Akan didefenitifkan
188	559421	UPP Kelas III Jailolo	Pekerjaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Jailolo Ta.2023	3	PL.107/1/2/UPP.JLL-2023	PT.Karya Pembangunan Rezki	17 Februari 2023 Addendum 10 Juli 2023	31 Desember 2023	58.744.889.000	58.744.889.000	-	322.487.480	-	-	Akan didefenitifkan
189	559421	UPP Kelas III Jailolo	Supervisi Pekerjaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Jailolo Ta.2023	4	PL.107/1/3/UPP.JLL-2023	PT. Citra Pamungkas Mandiri	17 Februari 2023	31 Desember 2023	1.151.741.000	1.151.741.000	-	1.601.513.550	-	-	Akan didefenitifkan
190	559421	UPP Kelas III Jailolo	Pekerjaan Penimbunan Fasilitas Pelabuhan Laut Jailolo Ta.2023	5	PL.107/4/1/UPP.JLL-2023	PT. Permata Karya	31 Oktober 2023	31 Desember 2023	2.706.520.000	2.706.520.000	-	2.746.520.000	-	-	Akan didefenitifkan

No	Kode Satker SAKTI	NAMA SATKER	URAIAN PEKERJAAN	NO KDP	NOMOR KONTRAK	NAMA KONTRAKTOR	TANGGAL MULAI KONTRAK	TANGGAL AKHIR KONTRAK	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI REALISASI (Rp)	NILAI KDP (Rp) SAKTI	KLASIFIKASI			KETERANGAN (Akan Didefinitifkan/Belum Tersedia Anggaran/Dsb.)
												DILANJUTKAN	DIHENTIKAN SEMENTARA	DIHENTIKAN PERMANEN	
191	559421	UPP Kelas III Jailolo	Supervisi Pekerjaan Penimbunan Fasilitas Pelabuhan Laut Jailolo Ta.2023	6	PL.107/4/2/UPP.JLL-2023	PT. Tibercon Engineering	31 Oktober 2023	31 Desember 2023	40.000.000	40.000.000	-	197.255.000	-	-	Akan didefenitifkan
192	559421	UPP Kelas III Jailolo	Pekerjaan Tangga Darutat 2	9	PL.107/4/19/UPP.JLL-2023	CV.Surya Indah Pratama	14/11/2023	14 Desember 2023	173.352.000	173.352.000	-	73.297.000	-	-	Akan didefenitifkan
193	559421	UPP Kelas III Jailolo	Sumur Bor dan Instalasi	10	PL.107/4/11/UPP.JLL-2023	CV.Cahaya Nusantara Permai	06/11/2023	30 November 2023	73.297.000	73.297.000	-	91.297.000	-	-	Akan didefenitifkan
194	559421	UPP Kelas III Jailolo	Rumah Pompa Air	11	PL.107/4/9/UPP.JLL-2023	CV.Cahaya Nusantara Permai	09/11/2023	8 DESEMBER 2023	91.297.000	91.297.000	-	36.297.000	-	-	Akan didefenitifkan
195	559421	UPP Kelas III Jailolo	Persiapan Lahan Sumur Bor	12	PL.107/4/07/UPP.JLL-2023	CV.Azqa Alde Baran	30/11/2023	30 DESEMBER 2023	36.297.000	36.297.000	-	36.297.000	-	-	Akan didefenitifkan
196	559421	UPP Kelas III Jailolo		13							-	58.998.341.400	-	-	Akan didefenitifkan
197	559421	UPP Kelas III Jailolo		14							-	179.960.000	-	-	Akan didefenitifkan
198	559421	UPP Kelas III Jailolo		15							-	89.967.598	-	-	Akan didefenitifkan
199	559421	UPP Kelas III Jailolo		16							-	5.031.430.500	-	-	Akan didefenitifkan
200	690779	UPP Kelas III Sofifi		1						86.543.575.300	12.433.474.834	-	-	-	RPATA 2024 dan akan Definitif 2025
201	690779	UPP Kelas III Sofifi		2						32.721.608.700	-	2.530.000.000	-	-	RPATA 2024 dan akan Definitif 2025
202	690779	UPP Kelas III Sofifi	Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Sofifi	1	PL.107/6/7/UPP.SFI/2024	PT. Wijaya Inti Nusa Sentosa	20/09/2024	31 Desember 2024		9.903.474.834	-	9.903.474.834	-	-	
203	413180	KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun	Jasa Konsultan Perencana Renovasi Gedung dan Bangunan Wilker Moro (Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan)	1	PL.107/2/7/KSOP.TBK-2020 tanggal 18 Mei 2020	CV. Aska Perkasa Konsultan	18-Mei-2020	05 Agustus 2020	14.960.000	14.960.000	29.920.000	14.960.000	-	-	Belum tersedia anggaran dan akan diusulkan kembali TA 2025
204	413180	KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun	Jasa Konsultan Perencana Renovasi Gedung dan Bangunan Wilker Penyalai (Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan)	2	PL.107/2/7/KSOP.TBK-2020 tanggal 18 Mei 2020	CV. Aska Perkasa Konsultan	18-Mei-2020	05 Agustus 2020	14.960.000	14.960.000	-	14.960.000	-	-	Belum tersedia anggaran dan akan diusulkan kembali TA 2025
205	413200	UPP Kelas II Tarempa		13							8.313.920.800	-	8.313.920.800	-	Satker Inaktif terkait Pembangunan Faspel Pulau Seluan
206	413231	Disnav Kelas I Tanjung Pinang	Docking KN. Adhara	1	PL.107 / 7 / 1 / DNG.TPI-2024	PT. Bayu Bahari Santoso	23 Juli 2024	19 November 2024	13.031.000.000	12.379.450.000	60.893.801.460	11.199.613.555	-	-	
207	413231	Disnav Kelas I Tanjung Pinang	Supervisi		PL.107 / 7 / 4 / DNG.TPI-2024	Biro Klasifikasi Indonesia	23 Juli 2024	20 Oktober 2024	307.703.100	307.703.100		-	-	-	
208	413231	Disnav Kelas I Tanjung Pinang	ATK dan Dokumen							2.576.400		-	-	-	
209	413231	Disnav Kelas I Tanjung Pinang	Peninjauan Lokasi							9.154.284		-	-	-	
210	413231	Disnav Kelas I Tanjung Pinang	Pembangunan Menara Suar Karang Singa	1	PL.107/3/2/DNG.TPI-2023 Adendum I PL.107/5/16/DNG.TPI-2023 Adendum II PL.107/11/2/DNG.TPI-2023 adendum III PL.107/9/1/DNG.TPI-2024 Adendum IV PL.107/12/20/DNG.TPI-2024 Adendum V PL107/13/1/DNG.TPI-2024	PT. Pacific Multindo Permai	06 April 2023 Adendum 31 Desember 2023	31 Desember 2023	69.785.919.000	48.326.855.547	-	49.694.187.905	-	-	Membutuhkan tambahan waktu untuk penyelesaian pekerjaan dan menjadi MYC
211	413231	Disnav Kelas I Tanjung Pinang	Supervisi Pembangunan Menara Suar Karang Singa		PL.107/3/4/DNG.TPI-2023 Aendum I PL.107/4/17/DNG.TPI-2023 Adendum II PL.107/6/3/DNG.TPI-2023 Adendum III	PT. Mahakarya Abadi Konsultan	06 April 2023 Adendum 31 Desember 2023	31 Desember 2023	2.223.108.000	1.316.158.706		-	-	-	
212	413231	Disnav Kelas I Tanjung Pinang	ATK Dokumen Lelang		Kuitansi No. 04 / VI / 2023	Kpri Mercu Segara				4.838.700		-	-	-	
213	413231	Disnav Kelas I Tanjung Pinang	Honor Pokja Pembangunan Menara Suar Karang Singa		SK No. KP.004/0106/UKPBJPBJ-2023 Tanggal 31 Januari 2023					8.370.000		-	-	-	
214	413231	Disnav Kelas I Tanjung Pinang	Honor Pokja Supervisi Pembangunan Menara Suar Karang Singa		SK No. KP.004/0106/UKPBJPBJ-2023 Tanggal 31 Januari 2023					3.270.000		-	-	-	
215	413231	Disnav Kelas I Tanjung Pinang	Pendampingan Probity Audit							25.754.000		-	-	-	
216	413231	Disnav Kelas I Tanjung Pinang	Perjalanan Dinas							8.940.952		-	-	-	
217	289981	UPP Kelas III K A I M A N A	Replacemen Fasilitas Pokok Pelabuhan Kaimana	16	PL.107/1/01/UPP.KMN-SBSN 2024	PT. Hikmah Hidup Gemilang	19 MARET 2024	20 DESEMBER 2024	48.799.364.000	49.976.663.300	49.976.663.300	49.976.663.300	-	-	Dianggarkan kembali pada Tahun 2025
218	517925	UPP Kelas III Oransbari	Doking Kapal Patroli	1	PL.101/1/1/UPP.ORB-2024 CV.WIJAYA KARYA ANUGRAH	CV.Wijaya Karya Anugrah	24/06/2024	14/08/2024	1.199.900.000	959.920.000	959.920.000	959.920.000	-	-	Akan didefinitifkan di periode berikutnya
219	413463	UPP Kelas III M A M U J U	Pembangunan Gedung Kantor TA. 2024	21	PL.107/2/1/UPP MU/2024	CV. Celebes Plan	28 Agustus 2024 Adendum 22 Desember 2024	10 Februari 2025	3.891.211.000	1.534.524.767	1.613.724.767	1.613.724.767	-	-	Akan Dilanjutkan Tahun 2025
220	413463	UPP Kelas III M A M U J U	Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor	21	PL.107/2/2/UPP MU/2024	CV. Antera	28 Agustus 2024 Adendum 18 Desember 2024	10 Februari 2025	99.000.000	99.000.000	-	-	-	-	Akan Dilanjutkan Tahun 2025
221	559374	UPP Kelas III Belang-Belang	Pekerjaan Rehab Fasilitas Gedung Wilker Budong-Budong T.A 2024	17	PL.107/PPK.BD/06/X/UPP.BLGs.2024	CV Rajawali Sakti	9 Oktober 2024	31 Desember 2024	1.053.300.000	1.000.635.000	6.408.374.329	1.112.289.441	-	-	Akan Didefinitifkan
222	559374	UPP Kelas III Belang-Belang	Pekerjaan Rehab Enam Unit Rumah Dinas Kantor UPP II Belang-Belang T.A 2024	18	PL.107/PPK.BD/06/X/UPP.BLGs.2024	CV. Mega Uleng	2 Oktober 2024	30 Desember 2024	1.194.039.292	1.134.337.327	-	1.245.973.897	-	-	Akan Didefinitifkan

No	Kode Satker SAKTI	NAMA SATKER	URAIAN PEKERJAAN	NO KDP	NOMOR KONTRAK	NAMA KONTRAKTOR	TANGGAL MULAI KONTRAK	TANGGAL AKHIR KONTRAK	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI REALISASI (Rp)	NILAI KDP (Rp) SAKTI	KLASIFIKASI			KETERANGAN (Akan Didefinitifkan/Belum Tersedia Anggaran/Dsb.)
												DILANJUTKAN	DIHENTIKAN SEMENTARA	DIHENTIKAN PERMANEN	
223	559374	UPP Kelas III Belang-Belang	Pekerjaan Rehab Kantor T.A 2024	19	PL.107/PPK.GK/09/VIII/BLGs-2024	CV. Pagala Nusantara	20 Agustus 2024 Tanggal Adendum 12 Desember 2024	31 Desember 2024	3.723.360.000	2.978.688.000	-	3.126.711.321	-	-	Akan Didefinitifkan
224	559374	UPP Kelas III Belang-Belang	Pekerjaan Pemasangan Aksesoris Dermaga PSKU	2	PL.107/PPK.PKY/04/IX/UPP.BLGs.2024	CV. Ardi Group	27 September 2024 Tanggal Adendum 25 November 2024	25 Desember 2024	1.197.400.000	778.310.000	-	923.399.670	-	-	Akan Didefinitifkan
225	287232	KSOP Kelas II Tarakan	Pekerjaan Faspel Tana Tidung Dermaga Seisayap T.A 2015	1	PPK/012A/II/XI/TS-15	PT. Tobe Indah	16/11/2015	31/12/2015	8.349.400.000		8.553.835.000	-	8.349.400.000	-	Faspel tana tidung dermaga seisayap, ditransfer pusat melalui UPP Tj. Selor kepada Ksop Tarakan
226	287232	KSOP Kelas II Tarakan	Pekerjaan Faspel Tana Tidung Dermaga Seisayap T.A 2016	2	PPK/012A/II/XI/TS-16	PT. Tobe Indah	16/11/2015	31/12/2015	49.775.000		-	-	49.775.000	-	Dihentikan sementara, ditabraknya faspel seisayap oleh Tugboat, telah diproses oleh Pengadilan Tinggi
227	287232	KSOP Kelas II Tarakan	SUPERVISI Faspel Tana Tidung Dermaga Seisayap T.A 2015	3	PPK/016/III/XII/TS-15	PT. Bina Sarana Ekatama	16/11/2015	31/12/2015	154.660.000		-	-	154.660.000	-	Dihentikan sementara, ditabraknya faspel seisayap oleh Tugboat, telah diproses oleh Pengadilan Tinggi
228	559250	UPP Kelas III Sungai Guntung		1							13.972.718.016	-	13.424.882.239	-	KDP posisi 31 Desember masih sesuai dengan Termin III dan menunggu luncuran pagu di 2025 untuk termin IV dan Retensi
229	559250	UPP Kelas III Sungai Guntung		2								-	547.835.777	-	
230	287101	Disnav Kelas III Pontianak	Pembangunan Trestel Menara Suar Tanjung Datok	4	PR.802/1/14/DNG.PTK-13	PT. Tunas Baru	12/07/2013	8 Noveber 2013	1.439.000.000	1.089.572.909	1.089.572.909	-	-	1.089.572.909	KDP tidak bisa dilanjutkan pembangunan karena kondisi alam. telah terbit BA monitoring dan evaluasi dari Direktorat Teknis pada tanggal 22 Agustus 2024 serta CHR Itjen tanggal 23 Oktober. Saat ini satker sedang proses usulan penghapusan KDP tsb.
231	520454	PPLP Kelas I Tanjung Priok									11.834.759.238	11.834.759.238			
											7.993.981.354.706	**7.428.425.056.787**	**532.171.560.533**	**33.384.737.386**	

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

LAMPIRAN VIII
ASET TAK BERWUJUD

BA 22 04

Laporan Keuangan 2024

AUDITED

151

Jl. Medan Merdeka Barat

www.dephub.go.id

Perincian Kebermanfaatan Aset Tak Berwujud Tahun 2024 pada Ditjen Perhubungan Laut

NO	KODE SATKER	NAMA UPT/SATKER	URAIAN BMN				TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (RP)	MANFAAT ASET TAK BERWUJUD				WAKTU DIRASAKANNYA MANFAAT	DURASI KEMANFAATAN ASET TAK BERWUJUD	RELEVANSI SAAT INI (BERMANFAAT/TIDAK)	UNIT KERJA YANG MEMANFAATKAN	KETERANGAN
			KODE BARANG	JENIS ATB	NUP	NAMA BARANG			NILAI EKONOMI	MANFAAT KEILMUAN	MANFAAT SOSIAL	MANFAAT LAINNYA					
1	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	1	study kelayakan retrofit 9 KN kelas 2	2013	348.500.000	-	-	✓	-	2013	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
2	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	1	Microsoft Office 2010	2012	4.015.000	-	-	-	✓	2012	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
3	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	2	Microsoft Office 2010	2012	4.015.000	-	-	-	✓	2012	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
4	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	3	Microsoft Office 2010	2012	4.015.000	-	-	-	✓	2012	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
5	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	4	Microsoft Office 2010	2012	4.015.000	-	-	-	✓	2012	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
6	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	5	Microsoft Office 2010	2012	4.015.000	-	-	-	✓	2012	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
7	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	6	Microsoft Office 2010	2012	4.015.000	-	-	-	✓	2012	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
8	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	7	Microsoft Office 2010	2012	4.015.000	-	-	-	✓	2012	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
9	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	8	Microsoft Office 2010	2012	4.015.000	-	-	-	✓	2012	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
10	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	9	Microsoft Office 2010	2012	4.015.000	-	-	-	✓	2012	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
11	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	10	Microsoft Office 2010	2012	4.015.000	-	-	-	✓	2012	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
12	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	11	Microsoft Office 2010	2012	4.015.000	-	-	-	✓	2012	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
13	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	12	Microsoft Office 2010	2012	4.015.000	-	-	-	✓	2012	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
14	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	13	Microsoft Office 2010	2012	4.015.000	-	-	-	✓	2012	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
15	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	1		2009	444.620.000	-	-	-	✓	2009	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
16	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	2	Pengembangan Sistem Database Kapal Ditjen Hubla	2011	7.920.000	-	-	-	✓	2011	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
17	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	3	Pengembangan Sistem Database Kapal Ditjen Hubla	2011	15.950.000	-	-	-	✓	2011	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
18	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	4	Pengembangan Sistem Database Kapal Ditjen Hubla	2011	6.050.000	-	-	-	✓	2011	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
19	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	5	Pengembangan Sistem Database Kapal Ditjen Hubla	2011	220.000	-	-	-	✓	2011	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
20	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	1	Pengembangan Sistem Database Kapal Ditjen Hubla	2011	480.700.000	-	-	-	✓	2011	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
21	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	2	Pengembangan Sistem Database Kapal Ditjen Hubla	2011	57.970.000	-	-	-	✓	2011	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
22	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	1	Master Plan Pelab. Selat Panjang	2011	493.405.000	-	-	-	✓	2011	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
23	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	2	Master Plan Pelab. Nipah Panjang	2011	510.345.000	-	-	-	✓	2011	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
24	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	3	Master Plan Pelab. Cilacap	2011	529.000.000	-	-	-	✓	2011	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
25	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	4	Master Plan Pelab. Larantuka	2011	594.715.000	-	-	-	✓	2011	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
26	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	5	Master Plan Pelab. Waingapu	2011	616.330.000	-	-	-	✓	2011	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
27	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	6	Master Plan Pelab. Garongkong	2011	542.212.000	-	-	-	✓	2011	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
28	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	7	Master Plan Pelab. Nunukan	2011	520.025.000	-	-	-	✓	2011	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
29	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	8	Linau	2013	561.550.000	-	-	-	✓	2013	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
30	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	9	Panipahan	2013	593.208.000	-	-	-	✓	2013	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
31	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	10	Pasuruan	2013	532.702.000	-	-	-	✓	2013	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
32	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	11	Pulau Banyak	2013	633.083.000	-	-	-	✓	2013	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
33	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	12	Ranai Natuna	2013	595.760.000	-	-	-	✓	2013	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
34	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	13	SEI DANAU	2013	601.381.000	-	-	-	✓	2013	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
35	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	14	Sintete	2013	559.713.000	-	-	-	✓	2013	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
36	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	15	Tambelan	2013	581.748.000	-	-	-	✓	2013	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
37	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	16	Teluk Dalam Nias	2013	589.627.000	-	-	-	✓	2013	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	

NO	KODE SATKER	NAMA UPT/SATKER	URAIAN BMN				TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (RP)	MANFAAT ASET TAK BERWUJUD				WAKTU DIRASAKANNYA MANFAAT	DURASI KEMANFAATAN ASET TAK BERWUJUD	RELEVANSI SAAT INI (BERMANFAAT/TIDAK)	UNIT KERJA YANG MEMANFAATKAN	KETERANGAN
			KODE BARANG	JENIS ATB	NUP	NAMA BARANG			NILAI EKONOMI	MANFAAT KEILMUAN	MANFAAT SOSIAL	MANFAAT LAINNYA					
38	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	17	Tg.Balai Karimun	2013	587.048.000	-	-	-	✓	2013	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
39	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	1	KOMPUTER SERVER	2008	70.624.500	-	-	-	-	2008	5 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
40	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	2		2008	3.135.000	-	-	-	-	2008	5 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
41	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	3		2008	3.135.000	-	-	-	-	2008	5 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
42	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	4	Developer kit mon aset	2012	35.200.000	-	-	-	✓	2012	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
43	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	5	database engine mon aset ke	2012	24.200.000	-	-	-	✓	2012	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
44	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	6	Anti virus sis mon aset	2012	550.000	-	-	-	-	2012	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
45	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	7	Anti virus sis mon aset	2012	550.000	-	-	-	-	2012	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
46	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	8	Anti virus sis mon aset	2012	550.000	-	-	-	-	2012	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
47	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	9	Anti virus sis mon aset	2012	550.000	-	-	-	-	2012	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
48	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	10	Anti virus sis mon aset	2012	550.000	-	-	-	-	2012	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
49	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	11	office home n bus 2010	2013	1.595.000	-	-	-	-	2013	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
50	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	12	office home n bus 2010	2013	1.595.000	-	-	-	-	2013	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
51	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	13	windows 7	2013	2.200.000	-	-	-	-	2013	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
52	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	14	windows 7	2013	2.200.000	-	-	-	-	2012	8 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
53	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	15	windows 7	2013	2.200.000	-	-	-	-	2012	8 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
54	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	16	windows 7	2013	2.200.000	-	-	-	-	2012	8 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
55	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	17	windows 7	2013	2.200.000	-	-	-	-	2012	8 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
56	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	18	windows 7	2013	2.200.000	-	-	-	-	2012	8 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
57	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	19	Aplikasi E-doc Bag. Keuanga	2013	41.800.000	-	-	-	✓	2013	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
58	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	20	database engine) (Aplikasi	2013	38.500.000	-	-	-	✓	2013	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
59	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	21	Aplikasi E-office Bag. Pere	2013	45.839.640	-	-	-	✓	2013	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
60	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	22	Microsoft Office 2010 profe	2013	8.800.000	-	-	-	✓	2013	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
61	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	23	(Dynamic Twain) Aplikasi E	2013	13.189.000	-	-	-	✓	2013	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
62	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	24	Windows Server 2008 (OS)) A	2013	9.054.870	-	-	-	✓	2013	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
63	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	25	develped kit) Aplikasi sis	2013	42.900.000	-	-	-	✓	2013	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
64	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	26	Database engine - Aplikasi	2013	52.800.000	-	-	-	✓	2013	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
65	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	27	anti virus (upd datbase inf	2013	1.320.000	-	-	-	-	2013	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
66	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	28	OS (upd datbase infrastr h	2013	1.980.000	-	-	-	✓	2013	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
67	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	29	MS office 2010 (upd datbase	2013	8.910.000	-	-	-	-	2013	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
68	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	30	apl server (upd datbase inf	2013	16.500.000	-	-	-	✓	2013	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
69	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	31		2014	110.000.000	-	-	-	✓	2014	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
70	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	32	Software development kit e-doc bag keuangan	2014	33.000.000	-	-	-	✓	2014	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
71	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	33	Database engine e-doc bag keuangan	2014	42.900.000	-	-	-	✓	2014	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
72	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	34	Software development kit e-doc Bag Perencanaan	2014	37.400.000	-	-	-	✓	2014	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
73	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	35	Database engine e-doc Bag Perencanaan	2014	52.800.000	-	-	-	✓	2014	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
74	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	36		2014	362.458.784	-	-	-	✓	2014	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
75	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	37	Lisensi akses client untuk aplikasi server std	2014	2.340.961	-	-	-	-	2014	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	

NO	KODE SATKER	NAMA UPT/SATKER	URAIAN BMN				TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (RP)	MANFAAT ASET TAK BERWUJUD				WAKTU DIRASAKANNYA MANFAAT	DURASI KEMANFAATAN ASET TAK BERWUJUD	RELEVANSI SAAT INI (BERMANFAAT/TIDAK)	UNIT KERJA YANG MEMANFAATKAN	KETERANGAN
			KODE BARANG	JENIS ATB	NUP	NAMA BARANG			NILAI EKONOMI	MANFAAT KEILMUAN	MANFAAT SOSIAL	MANFAAT LAINNYA					
76	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	38	Lisensi akses client untuk aplikasi server std	2014	2.340.961	-	-	-	-	2014	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
77	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	39	Lisensi akses client untuk aplikasi server std	2014	2.340.961	-	-	-	-	2014	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
78	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	40	Lisensi akses client untuk aplikasi server std	2014	2.340.961	-	-	-	-	2014	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
79	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	41	Lisensi akses client untuk aplikasi server std	2014	2.340.961	-	-	-	-	2014	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
80	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	42	Lisensi akses client untuk aplikasi server std	2014	2.340.961	-	-	-	-	2014	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
81	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	43	Lisensi akses client untuk aplikasi server std	2014	2.340.961	-	-	-	-	2014	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
82	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	44	Lisensi akses client untuk aplikasi server std	2014	2.340.961	-	-	-	-	2014	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
83	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	45	Lisensi akses client untuk aplikasi server std	2014	2.340.961	-	-	-	-	2014	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
84	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	46	Lisensi akses client untuk aplikasi server std	2014	2.340.961	-	-	-	-	2014	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
85	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	47	Lisensi akses client untuk aplikasi server std	2014	2.340.961	-	-	-	-	2014	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
86	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	48	Lisensi akses client untuk aplikasi server std	2014	2.340.961	-	-	-	-	2014	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
87	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	49	Lisensi akses client untuk aplikasi server std	2014	2.340.961	-	-	-	-	2014	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
88	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	50	Lisensi akses client untuk aplikasi server std	2014	2.340.961	-	-	-	-	2014	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
89	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	51	Lisensi akses client untuk aplikasi server std	2014	2.340.961	-	-	-	-	2014	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
90	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	52	Lisensi akses client untuk aplikasi server enterpr	2014	2.062.276	-	-	-	-	2014	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
91	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	53	Lisensi akses client untuk aplikasi server enterpr	2014	2.062.276	-	-	-	-	2014	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
92	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	54	Lisensi akses client untuk aplikasi server enterpr	2014	2.062.276	-	-	-	-	2014	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
93	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	55	Lisensi akses client untuk aplikasi server enterpr	2014	2.062.276	-	-	-	-	2014	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
94	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	56	Lisensi akses client untuk aplikasi server enterpr	2014	2.062.276	-	-	-	-	2014	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
95	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	57	Lisensi akses client untuk aplikasi server enterpr	2014	2.062.276	-	-	-	-	2014	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
96	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	58	Lisensi akses client untuk aplikasi server enterpr	2014	2.062.276	-	-	-	-	2014	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
97	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	59	Lisensi akses client untuk aplikasi server enterpr	2014	2.062.276	-	-	-	-	2014	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
98	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	60	Lisensi akses client untuk aplikasi server enterpr	2014	2.062.276	-	-	-	-	2014	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
99	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	61	Lisensi akses client untuk aplikasi server enterpr	2014	2.062.276	-	-	-	-	2014	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
100	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	62	Lisensi akses client untuk aplikasi server enterpr	2014	2.062.276	-	-	-	-	2014	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
101	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	63	Lisensi akses client untuk aplikasi server enterpr	2014	2.062.276	-	-	-	-	2014	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
102	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	64	Lisensi akses client untuk aplikasi server enterpr	2014	2.062.276	-	-	-	-	2014	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
103	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	65	Lisensi akses client untuk aplikasi server enterpr	2014	2.062.276	-	-	-	-	2014	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
104	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	66	Lisensi akses client untuk aplikasi server enterpr	2014	2.062.276	-	-	-	-	2014	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
105	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	67	software database	2014	404.202.610	-	-	-	✓	2014	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
106	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	68	software database	2014	404.202.610	-	-	-	✓	2014	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
107	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	69	Software os server berbasis GUI	2014	240.631.276	-	-	-	✓	2014	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
108	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	70	Software os server berbasis GUI	2014	240.631.276	-	-	-	✓	2014	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
109	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	71	Lisensi akses client untuk software OS server berb	2014	3.413.902	-	-	-	-	2014	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
110	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	72	Lisensi akses client untuk software OS server berb	2014	3.413.902	-	-	-	-	2014	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
111	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	73	Lisensi akses client untuk software OS server berb	2014	3.413.902	-	-	-	-	2014	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
112	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	74	Lisensi akses client untuk software OS server berb	2014	3.413.902	-	-	-	-	2014	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
113	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	75	Lisensi akses client untuk software OS server berb	2014	3.413.902	-	-	-	-	2014	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	

NO	KODE SATKER	NAMA UPT/SATKER	URAIAN BMN				TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (RP)	MANFAAT ASET TAK BERWUJUD				WAKTU DIRASAKANNYA MANFAAT	DURASI KEMANFAATAN ASET TAK BERWUJUD	RELEVANSI SAAT INI (BERMANFAAT/TIDAK)	UNIT KERJA YANG MEMANFAATKAN	KETERANGAN
			KODE BARANG	JENIS ATB	NUP	NAMA BARANG			NILAI EKONOMI	MANFAAT KEILMUAN	MANFAAT SOSIAL	MANFAAT LAINNYA					
114	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	76	Lisensi akses client untuk software OS server berb	2014	3.413.902	-	-	-	-	2014	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
115	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	77	Lisensi akses client untuk software OS server berb	2014	3.413.902	-	-	-	-	2014	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
116	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	78	Lisensi akses client untuk software OS server berb	2014	3.413.902	-	-	-	-	2014	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
117	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	79	Lisensi akses client untuk software OS server berb	2014	3.413.902	-	-	-	-	2014	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
118	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	80	Lisensi akses client untuk software OS server berb	2014	3.413.902	-	-	-	-	2014	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
119	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	81	Lisensi akses client untuk software OS server berb	2014	3.413.902	-	-	-	-	2014	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
120	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	82	Lisensi akses client untuk software OS server berb	2014	3.413.902	-	-	-	-	2014	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
121	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	83	Lisensi akses client untuk software OS server berb	2014	3.413.902	-	-	-	-	2014	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
122	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	84	Lisensi akses client untuk software OS server berb	2014	3.413.902	-	-	-	-	2014	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
123	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	85	Lisensi akses client untuk software OS server berb	2014	3.413.902	-	-	-	-	2014	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
124	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	86	Lisensi akses Client publik untuk software OS serv	2014	43.502.857	-	-	-	-	2014	10 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
125	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	87	Software management dan monitoring server	2014	159.812.387	-	-	-	✓	2014	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
126	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	88	Software management dan monitoring server	2014	159.812.387	-	-	-	✓	2014	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
127	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	89	sms gateway	2014	18.810.000	-	-	-	✓	2014	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
128	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101001	Software Komputer	90	Aplikasi SEHATI	2023	5.798.212.650	-	-	-	✓	2023	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
129	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	1	INTRANET	2008	408.650.000	-	-	-	✓	2008	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
130	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	2	OPERATION ROOM	2008	3.813.072.120	-	-	-	✓	2008	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
131	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	3	Software Nav, data logg, pr	2009	85.200.000	-	-	-	✓	2009	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
132	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	4	Software Nav, data logg, pr	2009	85.200.000	-	-	-	✓	2009	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
133	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	5	Software Nav, data logg, pr	2009	85.200.000	-	-	-	✓	2009	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
134	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	6	Software Nav, data logg, pr	2009	85.200.000	-	-	-	✓	2009	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
135	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	7	gab LRIT	2009	7.080.212.480	-	-	-	✓	2009	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
136	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	8	biaya training LRIT	2009	522.500.000	-	-	-	✓	2009	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
137	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	9	SID	2007	18.725.395.000	-	-	-	✓	2007	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
138	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	10	BUKU LAPORAN	2009	630.000.000	-	-	-	✓	2006	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
139	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	11	DATABASE KEPEGAWAIAN	2006	944.275.000	-	-	-	✓	2006	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
140	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	12	PENGEMB. BASIS DATA TERPADU PD BAG. PERENCANAAN	2006	444.455.000	-	-	-	✓	2006	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
141	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	13	APLIKASI GAJI	2006	48.785.000	-	-	-	✓	2006	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
142	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	14	SID di Cikoneng Banten	2010	551.961.300	-	-	-	✓	2010	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
143	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	15	Buku Lpaoran Penelitian SID	2010	694.732.500	-	-	-	✓	2010	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
144	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	16	Buku Laporan Penlitian SID	2010	593.252.000	-	-	-	✓	2010	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
145	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	17	Buku Laporan Penelitian SID	2010	640.502.000	-	-	-	✓	2010	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
146	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	18	Buku Laporan Penelitian SID	2010	691.992.000	-	-	-	✓	2010	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
147	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	19	Buku Laporan Penelitian SID	2010	650.000.000	-	-	-	✓	2010	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
148	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	20	Buku Laporan Penelitian SID	2010	640.706.000	-	-	-	✓	2010	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
149	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	21	Buku Laporan Penelitian SID	2010	595.254.000	-	-	-	✓	2010	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
150	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	22	Buku Laporan Penelitian SID	2010	597.067.000	-	-	-	✓	2010	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
151	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	23	Buku Laporan Penelitian SID	2010	688.950.000	-	-	-	✓	2010	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	

NO	KODE SATKER	NAMA UPT/SATKER	URAIAN BMN				TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (RP)	MANFAAT ASET TAK BERWUJUD				WAKTU DIRASAKANNYA MANFAAT	DURASI KEMANFAATAN ASET TAK BERWUJUD	RELEVANSI SAAT INI (BERMANFAAT/TIDAK)	UNIT KERJA YANG MEMANFAATKAN	KETERANGAN
			KODE BARANG	JENIS ATB	NUP	NAMA BARANG			NILAI EKONOMI	MANFAAT KEILMUAN	MANFAAT SOSIAL	MANFAAT LAINNYA					
152	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	24	Aplikasi Pelaporan PNBP	2010	452.292.500	-	-	-	✓	2010	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
153	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	25	SID Lok. Batu Atas - Sul-Te	2011	660.700.000	-	-	-	✓	2011	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
154	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	26	SID Lok Temajo-Kalbar	2011	652.400.000	-	-	-	✓	2011	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
155	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	27	SID Lok Jinato-Sulsel	2011	674.880.000	-	-	-	✓	2011	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
156	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	28	SID Lok Lakara-Sultenggara	2011	682.803.000	-	-	-	✓	2011	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
157	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	29	SID Lok P.Dama-Malut	2011	703.469.000	-	-	-	✓	2011	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
158	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	30	SID Lok P.Debril-Sulsel	2011	653.724.500	-	-	-	✓	2011	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
159	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	31	SID Lok Balabalakang-sulbar	2011	672.500.000	-	-	-	✓	2011	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
160	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	32	SID Lok P.Batek-NTT	2011	694.578.000	-	-	-	✓	2011	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
161	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	33	SID Lok P.Matasiri-Kalsel	2011	664.834.500	-	-	-	✓	2011	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
162	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	34	SID Lok Erlan-Maluku	2011	708.080.000	-	-	-	✓	2011	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
163	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	35	UPL P.Sebuku Kal-sel	2012	363.440.000	-	-	-	✓	2012	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
164	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	36	UPL Lokasi Matasiri	2012	364.875.000	-	-	-	✓	2012	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
165	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	37	UPL Lokasi Bian Papua	2012	455.400.000	-	-	-	✓	2012	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
166	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	38	UPL Marabatuan kal-sel	2012	350.500.000	-	-	-	✓	2012	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
167	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	39	UPL Tanjung Lalak Kal-Sel	2012	330.660.000	-	-	-	✓	2012	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
168	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	40	UPL Tanjung Prawan KalTeng	2012	298.925.000	-	-	-	✓	2012	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
169	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	41	UPL Torosik Sul-Ut	2012	400.491.000	-	-	-	✓	2012	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
170	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	42	SID Lokasi Ippi NTT	2012	644.430.000	-	-	-	✓	2012	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
171	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	43	SIDLokasitelukampimoipapua	2012	745.661.000	-	-	-	✓	2012	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
172	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	44	SID Lokasi Waralau maluku	2012	655.567.000	-	-	-	✓	2012	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
173	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	45	SID Lok Rangga Ilung KalTen	2012	619.063.000	-	-	-	✓	2012	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
174	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	46	SID Lok Bian Papua	2012	750.194.000	-	-	-	✓	2012	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
175	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	47	SID lok Mansinam Papua Brt	2012	701.258.000	-	-	-	✓	2012	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
176	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	48	SID Fos -Papua	2012	718.700.000	-	-	-	✓	2012	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
177	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	49	SID P. Liki Papua	2012	686.000.000	-	-	-	✓	2012	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
178	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	50	SID Tg. Perawan Kalteng	2012	605.011.000	-	-	-	✓	2012	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
179	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	51	SID TG Lalak-KalSeltn	2012	596.541.000	-	-	-	✓	2012	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
180	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	52	biaya lgsp personil (sis mo	2012	526.350.000	-	-	-	✓	2012	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
181	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	53	biaya non personil (sis mon	2012	123.194.500	-	-	-	✓	2012	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
182	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	54	asuransi minibus inova v lu	2013	10.020.775	-	-	-	-	2013	1 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
183	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	55	Aplikasi E-doc Bag. Keuanga	2013	301.125.000	-	-	-	✓	2013	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
184	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	56		2013	77.137.500	-	-	-	✓	2013	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
185	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	57	Aplikasi E-office Bag. Pere	2013	520.235.100	-	-	-	✓	2013	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
186	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	58	NLP(Aplikasi E-office Bag.	2013	43.521.500	-	-	-	✓	2013	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
187	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	59	LP (Aplikasi sis mon aset-b	2013	584.100.000	-	-	-	✓	2013	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
188	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	60	NLP(Aplikasi sis mon aset-b	2013	104.170.000	-	-	-	✓	2013	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
189	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	61	LP (upd datbase infrastr hu	2013	305.800.000	-	-	-	✓	2013	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	

NO	KODE SATKER	NAMA UPT/SATKER	URAIAN BMN				TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (RP)	MANFAAT ASET TAK BERWUJUD				WAKTU DIRASAKANNYA MANFAAT	DURASI KEMANFAATAN ASET TAK BERWUJUD	RELEVANSI SAAT INI (BERMANFAAT/TIDAK)	UNIT KERJA YANG MEMANFAATKAN	KETERANGAN
			KODE BARANG	JENIS ATB	NUP	NAMA BARANG			NILAI EKONOMI	MANFAAT KEILMUAN	MANFAAT SOSIAL	MANFAAT LAINNYA					
190	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	62	NLP(upd datbase infrastr hu	2013	125.581.500	-	-	-	✓	2013	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
191	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	63	UkL-UPL Lok. P.Rajuni Prv.	2013	88.257.500	-	-	-	✓	2013	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
192	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	64	UkL-UPL Lok. P.Rajuni Prv.	2013	314.668.500	-	-	-	✓	2013	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
193	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	65	UkL-UPL Lok. Kilo Prv. NTB	2013	86.572.000	-	-	-	✓	2013	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
194	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	66	UkL-UPL Lok. Kilo Prv. NTB	2013	310.206.000	-	-	-	✓	2013	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
195	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	67	UkL-UPL Lok. P. Berhala Prv	2013	91.729.000	-	-	-	✓	2013	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
196	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	68	UkL-UPL Lok. P. Berhala Prv	2013	275.187.000	-	-	-	✓	2013	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
197	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	69	UkL-UPL Lok. Salura Prv. NT	2013	88.325.750	-	-	-	✓	2013	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
198	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	70	UkL-UPL Lok. Salura Prv. NT	2013	304.577.250	-	-	-	✓	2013	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
199	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	71	UkL-UPL Lok. Desa Kabalutan	2013	86.559.000	-	-	-	✓	2013	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
200	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	72	UkL-UPL Lok. Desa Kabalutan	2013	301.257.000	-	-	-	✓	2013	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
201	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	73	UkL-UPL Lok. Luang P. Kelap	2013	98.767.500	-	-	-	✓	2013	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
202	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	74	UkL-UPL Lok. Luang P. Kelap	2013	296.302.500	-	-	-	✓	2013	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
203	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	75	UkL-UPL Lok. P. Adi Prv. Pa	2013	107.477.500	-	-	-	✓	2013	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
204	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	76	UkL-UPL Lok. P. Adi Prv. Pa	2013	378.862.500	-	-	-	✓	2013	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
205	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	77	UkL-UPL Lok. T. Ampimoi Prv	2013	100.596.250	-	-	-	✓	2013	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
206	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	78	UkL-UPL Lok. T. Ampimoi Prv	2013	370.098.750	-	-	-	✓	2013	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
207	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	79	UkL-UPL Lok. P. Likisarmi	2013	106.605.000	-	-	-	✓	2013	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
208	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	80	UkL-UPL Lok. P. Likisarmi P	2013	373.275.000	-	-	-	✓	2013	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
209	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	81	UkL-UPL Lok. P. Topang Prv.	2013	95.132.000	-	-	-	✓	2013	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
210	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	82	UkL-UPL Lok. P. Topang Prv.	2013	285.396.000	-	-	-	✓	2013	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
211	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	83	SID Lok. Mappi Prov. Papua	2013	710.325.000	-	-	-	✓	2013	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
212	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	84	SID Lok. Posi-posi P. Rao P	2013	684.765.000	-	-	-	✓	2013	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
213	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	85	SID Lok. Lasalimu Prov Sul	2013	639.610.000	-	-	-	✓	2013	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
214	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	86	SID Lok. P. Topang Prov. Ri	2013	612.825.000	-	-	-	✓	2013	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
215	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	87	SID Lok. Ujung Jabung Prov.	2013	594.130.000	-	-	-	✓	2013	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
216	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	88	SID Lok. Sanur Kaja Prov Ba	2013	591.055.000	-	-	-	✓	2013	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
217	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	89	SID Lok. P. Salemo Prov Sul	2013	618.254.000	-	-	-	✓	2013	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
218	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	90	SID Lok. Samalantakan Prov	2013	579.445.000	-	-	-	✓	2013	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
219	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	91	SID Lok. P.Misool Prov Papu	2013	722.465.000	-	-	-	✓	2013	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
220	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	92	SID Lok. Waiwadan Prov NTT	2013	693.334.000	-	-	-	✓	2013	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
221	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	93	ATB Tenaga Ahli E-DOC Bag Keuangan	2014	356.400.000	-	-	-	✓	2014	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
222	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	94	ATB Non Personil E-DOC Bag Keuangan	2014	101.200.000	-	-	-	✓	2014	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
223	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	95	ATB Tenaga Ahli E-DOC Bag Perencanaan	2014	492.800.000	-	-	-	✓	2014	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
224	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	96	ATB Non Personil E-DOC Bag Perencanaan	2014	124.102.000	-	-	-	✓	2014	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
225	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	97	homor	2014	5.460.000	-	-	-	-	2014	1 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
226	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	98	honor	2014	5.160.000	-	-	-	-	2014	1 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
227	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	99	honor edoc keu	2014	4.999.000	-	-	-	-	2014	1 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	

NO	KODE SATKER	NAMA UPT/SATKER	URAIAN BMN				TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (RP)	MANFAAT ASET TAK BERWUJUD				WAKTU DIRASAKANNYA MANFAAT	DURASI KEMANFAATAN ASET TAK BERWUJUD	RELEVANSI SAAT INI (BERMANFAAT/TIDAK)	UNIT KERJA YANG MEMANFAATKAN	KETERANGAN
			KODE BARANG	JENIS ATB	NUP	NAMA BARANG			NILAI EKONOMI	MANFAAT KEILMUAN	MANFAAT SOSIAL	MANFAAT LAINNYA					
228	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	100	honor edoc ren	2014	5.000.000	-	-	-	-	2014	1 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
229	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	101	honor sist inf ditjen hubla	2014	11.886.600	-	-	-	-	2014	1 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
230	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	102	atb PERSONIL revitalisasi sik	2015	325.050.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
231	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	103	atb non personil revitalisasi sik	2015	198.715.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
232	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	104	atb personil keu	2015	92.125.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
233	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	105	atb non personil keu	2015	56.100.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
234	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	106	Dok Kontrak SID Kapal Patroli Bag Perencanaan	2016	4.303.200	-	-	-	-	2016	5 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
235	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	107	Dok Kontrak SID Kapal Patroli Bag Perencanaan	2016	4.303.200	-	-	-	-	2016	5 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
236	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	108	Dok Kontrak SID Kapal Patroli Bag Perencanaan	2016	4.303.200	-	-	-	-	2016	5 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
237	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	109	Dok Kontrak SID Kapal Patroli Bag Perencanaan	2016	4.303.200	-	-	-	-	2016	5 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
238	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	110	Dok Kontrak SID Kapal Patroli Bag Perencanaan	2016	4.303.200	-	-	-	-	2016	5 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
239	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	111	Dok Kontrak SID Kapal Patroli Bag Perencanaan	2016	4.303.200	-	-	-	-	2016	5 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
240	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	112	Dok Kontrak SID Kapal Patroli Bag Perencanaan	2016	4.303.200	-	-	-	-	2016	5 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
241	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	113	Dok Kontrak SID Kapal Patroli Bag Perencanaan	2016	4.303.200	-	-	-	-	2016	5 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
242	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	114	Dok Kontrak SID Kapal Patroli Bag Perencanaan	2016	4.303.200	-	-	-	-	2016	5 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
243	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	115	Dok Kontrak SID Kapal Patroli Bag Perencanaan	2016	4.303.200	-	-	-	-	2016	5 Tahun	Tidak	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
244	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	125	Monitoring Simak (MONA)	2018	1.625.678.575	-	-	-	✓	2018	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
245	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	126	MONITORING LK (CALK)	2018	1.837.871.475	-	-	-	✓	2018	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
246	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	127	MONITORING DATA REALISASI	2018	2.699.056.250	-	-	-	✓	2019	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
247	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	128	Sistem Informasi Pengelola Anggaran	2019	192.610.000	-	-	-	✓	2019	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
248	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	129	DATA CENTER PNBP DITJEN HUBLA	2019	192.940.000	-	-	-	✓	2019	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
249	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	130	SISTEM E-SURAT BAG KEUANGAN	2020	98.450.000	-	-	-	✓	2020	10 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
250	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	141	Penyusunan DED Pembangunan Rumah Dinas Ditjen Hubla	2023	99.234.000	-	-	-	✓	2023	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	
251	412801	DISTRIK NAVIGASI TANJUNG PRIOK	8010101001	Software Komputer	7	APLIKASI ASSET MANAGEMENT & INVENTORY	2019	144.870.000	-	-	-	✓	6 Tahun	6 Tahun	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI TANJUNG PRIOK	
252	412801	DISTRIK NAVIGASI TANJUNG PRIOK	8010101001	Software Komputer	8	SISTEM FORKESPEL	2021	198.825.000	-	-	-	✓	4 Tahun	4 Tahun	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI TANJUNG PRIOK	
253	412801	DISTRIK NAVIGASI TANJUNG PRIOK	8010101001	Software Komputer	11	REMOTE SEA TRAFFIC MONITORING	2021	199.210.000	-	-	-	✓	4 Tahun	4 Tahun	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI TANJUNG PRIOK	
254	412801	DISTRIK NAVIGASI TANJUNG PRIOK	8010101001	Software Komputer	12	SISTEM PERTUKARAN DATA KENAVIGASIAN	2021	199.485.000	-	-	-	✓	4 Tahun	4 Tahun	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI TANJUNG PRIOK	
255	412801	DISTRIK NAVIGASI TANJUNG PRIOK	8010101001	Software Komputer	13	-	2013	61.485.191	✓	-	-	✓	2013	-	Tidak	DISTRIK NAVIGASI TANJUNG PRIOK	
257	412801	DISTRIK NAVIGASI TANJUNG PRIOK	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	4	Studi Analisa Struktur Gedung Kala Jivam Asti	2024	97.302.600	-	-	-	✓	1 Tahun	1 Tahun	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI TANJUNG PRIOK	
258	412801	DISTRIK NAVIGASI TANJUNG PRIOK	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	5	Studi Sistem Hidran Terpadu dan Sisitem Detektor Asap	2024	98.690.100	-	-	-	✓	1 Tahun	1 Tahun	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI TANJUNG PRIOK	
259	412801	DISTRIK NAVIGASI TANJUNG PRIOK	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	6	Studi Hanggar RIB	2024	98.460.100	-	-	-	✓	1 Tahun	1 Tahun	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI TANJUNG PRIOK	
260	413422	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	Hasil Kajian/Penelitian (T.A 2024)	2024	596.790.000	-	-	-	-	Tak Terbatas	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK	
261	413422	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	2	Hasil Kajian/Penelitian (Studi Evaluasi Sarana Prasarana Pelabuhan Kalibaru Eksisting)	2024	879.146.250	-	-	-	-	Tak Terbatas	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK	
262	413422	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	3	Studi Update DLKr dan DLKp	2024	650.403.000	-	-	-	-	Tak Terbatas	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK	
263	413422	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	1	E-Office Apps	2022	176.000.000	-	-	-	✓	Tak Terbatas	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK	
264	413422	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	2	Digitalisasi	2022	199.689.000	-	-	-	✓	Tak Terbatas	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK	
265	413422	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	3	WEBSITE PORTAL OP	2018	94.600.000	-	-	-	-	Tak Terbatas	5 Tahun	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK	
266	413721	BALAI TEKNOLOGI KESELAMATAN PELAYARAN	8010101001	Software Komputer	31	APLIKASI SIMAKKESPEL	2018	195.250.000	✓	-	✓	✓	6 Tahun	6 Tahun	Bermanfaat	Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran	Software

NO	KODE SATKER	NAMA UPT/SATKER	URAIAN BMN				TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (RP)	MANFAAT ASET TAK BERWUJUD				WAKTU DIRASAKANNYA MANFAAT	DURASI KEMANFAATAN ASET TAK BERWUJUD	RELEVANSI SAAT INI (BERMANFAAT/TIDAK)	UNIT KERJA YANG MEMANFAATKAN	KETERANGAN
			KODE BARANG	JENIS ATB	NUP	NAMA BARANG			NILAI EKONOMI	MANFAAT KEILMUAN	MANFAAT SOSIAL	MANFAAT LAINNYA					
267	439180	PENINGKATAN FUNGSI KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI	8010101001	Software Komputer	1	SIM KPLP	2019	6.180.948.400	✓	-	-	✓	2019	5 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI	
268	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	2	OS : Operating System	2015	40.700.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
269	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	3	OS : Operating System	2015	40.700.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
270	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	4	OS : Operating System	2015	40.700.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
271	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	5	OS : Operating System	2015	40.700.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
272	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	6	Database	2015	364.100.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
273	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	22	Software Buku Pelaut	2015	2.689.486.800	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
274	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	23	Windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
275	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	24	Windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
276	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	25	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
277	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	26	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
278	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	27	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
279	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	28	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
280	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	29	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
281	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	30	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
282	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	31	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
283	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	32	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
284	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	33	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
285	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	34	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
286	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	35	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
287	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	36	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
288	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	37	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
289	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	38	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
290	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	39	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
291	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	40	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
292	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	41	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
293	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	42	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
294	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	43	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
295	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	44	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
296	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	45	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
297	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	46	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
298	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	47	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
299	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	48	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
300	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	49	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
301	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	50	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
302	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	51	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
303	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	52	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
304	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	53	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	

NO	KODE SATKER	NAMA UPT/SATKER	URAIAN BMN				TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (RP)	MANFAAT ASET TAK BERWUJUD				WAKTU DIRASAKANNYA MANFAAT	DURASI KEMANFAATAN ASET TAK BERWUJUD	RELEVANSI SAAT INI (BERMANFAAT/TIDAK)	UNIT KERJA YANG MEMANFAATKAN	KETERANGAN
			KODE BARANG	JENIS ATB	NUP	NAMA BARANG			NILAI EKONOMI	MANFAAT KEILMUAN	MANFAAT SOSIAL	MANFAAT LAINNYA					
305	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	54	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
306	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	55	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
307	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	56	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
308	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	57	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
309	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	58	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
310	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	59	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
311	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	60	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
312	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	61	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
313	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	62	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
314	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	63	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
315	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	64	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
316	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	65	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
317	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	66	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
318	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	67	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
319	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	68	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
320	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	69	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
321	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	70	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
322	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	71	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
323	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	72	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
324	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	73	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
325	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	74	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
326	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	75	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
327	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	76	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
328	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	77	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
329	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	78	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
330	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	79	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
331	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	80	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
332	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	81	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
333	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	82	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
334	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	83	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
335	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	84	Trainee Console Display	2015	132.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
336	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	85	3d Visualisasi Modul	2015	330.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
337	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	86	3d Visualisasi Modul	2015	330.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
338	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	87	3d Visualisasi Modul	2015	330.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
339	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	88	3d Visualisasi Modul	2015	330.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
340	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	89	3d Visualisasi Modul	2015	330.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
341	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	90	3d Visualisasi Modul	2015	330.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
342	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	91	3d Visualisasi Modul	2015	330.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	

NO	KODE SATKER	NAMA UPT/SATKER	URAIAN BMN				TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (RP)	MANFAAT ASET TAK BERWUJUD				WAKTU DIRASAKANNYA MANFAAT	DURASI KEMANFAATAN ASET TAK BERWUJUD	RELEVANSI SAAT INI (BERMANFAAT/TIDAK)	UNIT KERJA YANG MEMANFAATKAN	KETERANGAN
			KODE BARANG	JENIS ATB	NUP	NAMA BARANG			NILAI EKONOMI	MANFAAT KEILMUAN	MANFAAT SOSIAL	MANFAAT LAINNYA					
343	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	92	3d Visualisasi Modul	2015	330.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
344	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	93	3d Visualisasi Modul	2015	330.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
345	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	94	3d Visualisasi Modul	2015	330.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
346	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	95	3d Visualisasi Modul	2015	330.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
347	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	96	3d Visualisasi Modul	2015	330.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
348	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	97	3d Visualisasi Modul	2015	330.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
349	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	98	3d Visualisasi Modul	2015	330.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
350	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	99	3d Visualisasi Modul	2015	330.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
351	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	100	3d Visualisasi Modul	2015	330.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
352	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	101	3d Visualisasi Modul	2015	330.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
353	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	102	3d Visualisasi Modul	2015	330.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
354	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	103	3d Visualisasi Modul	2015	330.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
355	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	104	3d Visualisasi Modul	2015	330.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
356	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	105	Diesel Engine LCC Ship Model	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
357	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	106	Diesel Engine LCC Ship Model	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
358	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	107	Diesel Engine LCC Ship Model	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
359	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	108	Diesel Engine LCC Ship Model	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
360	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	109	Diesel Engine LCC Ship Model	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
361	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	110	Diesel Engine LCC Ship Model	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
362	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	111	Diesel Engine LCC Ship Model	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
363	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	112	Diesel Engine LCC Ship Model	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
364	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	113	Diesel Engine LCC Ship Model	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
365	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	114	Diesel Engine LCC Ship Model	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
366	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	115	Diesel Engine LCC Ship Model	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
367	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	116	Diesel Engine LCC Ship Model	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
368	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	117	Diesel Engine LCC Ship Model	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
369	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	118	Diesel Engine LCC Ship Model	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
370	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	119	Diesel Engine LCC Ship Model	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
371	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	120	Diesel Engine LCC Ship Model	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
372	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	121	Diesel Engine LCC Ship Model	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
373	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	122	Diesel Engine LCC Ship Model	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
374	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	123	Diesel Engine LCC Ship Model	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
375	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	124	Diesel Engine LCC Ship Model	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
376	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	125	Diesel Electric Shi Model Engine	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
377	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	126	Diesel Electric Shi Model Engine	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
378	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	127	Diesel Electric Shi Model Engine	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
379	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	128	Diesel Electric Shi Model Engine	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
380	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	129	Diesel Electric Shi Model Engine	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	

NO	KODE SATKER	NAMA UPT/SATKER	URAIAN BMN				TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (RP)	MANFAAT ASET TAK BERWUJUD				WAKTU DIRASAKANNYA MANFAAT	DURASI KEMANFAATAN ASET TAK BERWUJUD	RELEVANSI SAAT INI (BERMANFAAT/TIDAK)	UNIT KERJA YANG MEMANFAATKAN	KETERANGAN
			KODE BARANG	JENIS ATB	NUP	NAMA BARANG			NILAI EKONOMI	MANFAAT KEILMUAN	MANFAAT SOSIAL	MANFAAT LAINNYA					
381	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	130	Diesel Electric Shi Model Engine	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
382	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	131	Diesel Electric Shi Model Engine	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
383	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	132	Diesel Electric Shi Model Engine	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
384	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	133	Diesel Electric Shi Model Engine	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
385	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	134	Diesel Electric Shi Model Engine	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
386	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	135	Diesel Electric Shi Model Engine	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
387	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	136	Diesel Electric Shi Model Engine	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
388	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	137	Diesel Electric Shi Model Engine	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
389	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	138	Diesel Electric Shi Model Engine	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
390	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	139	Diesel Electric Shi Model Engine	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
391	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	140	Diesel Electric Shi Model Engine	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
392	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	141	Diesel Electric Shi Model Engine	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
393	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	142	Diesel Electric Shi Model Engine	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
394	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	143	Diesel Electric Shi Model Engine	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
395	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	144	Diesel Electric Shi Model Engine	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
396	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	145	Medium Speed Engine Model	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
397	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	146	Medium Speed Engine Model	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
398	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	147	Medium Speed Engine Model	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
399	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	148	Medium Speed Engine Model	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
400	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	149	Medium Speed Engine Model	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
401	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	150	Medium Speed Engine Model	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
402	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	151	Medium Speed Engine Model	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
403	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	152	Medium Speed Engine Model	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
404	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	153	Medium Speed Engine Model	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
405	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	154	Medium Speed Engine Model	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
406	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	155	Medium Speed Engine Model	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
407	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	156	Medium Speed Engine Model	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
408	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	157	Medium Speed Engine Model	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
409	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	158	Medium Speed Engine Model	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
410	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	159	Medium Speed Engine Model	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
411	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	160	Medium Speed Engine Model	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
412	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	161	Medium Speed Engine Model	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
413	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	162	Medium Speed Engine Model	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
414	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	163	Medium Speed Engine Model	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
415	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	164	Medium Speed Engine Model	2015	247.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
416	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	165	Windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
417	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	166	Windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
418	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	167	Windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	

NO	KODE SATKER	NAMA UPT/SATKER	URAIAN BMN				TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (RP)	MANFAAT ASET TAK BERWUJUD				WAKTU DIRASAKANNYA MANFAAT	DURASI KEMANFAATAN ASET TAK BERWUJUD	RELEVANSI SAAT INI (BERMANFAAT/TIDAK)	UNIT KERJA YANG MEMANFAATKAN	KETERANGAN
			KODE BARANG	JENIS ATB	NUP	NAMA BARANG			NILAI EKONOMI	MANFAAT KEILMUAN	MANFAAT SOSIAL	MANFAAT LAINNYA					
419	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	168	Windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
420	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	169	Windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
421	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	170	Windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
422	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	171	Windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
423	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	172	Windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
424	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	173	Windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
425	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	174	Windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
426	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	175	Windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
427	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	176	Windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
428	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	177	Windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
429	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	178	Windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
430	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	179	Windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
431	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	180	Windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
432	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	181	Windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
433	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	182	Windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
434	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	183	Windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
435	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	184	Windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
436	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	185	Windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
437	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	186	Windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
438	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	187	Windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
439	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	188	Windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
440	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	189	Windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
441	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	190	Windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
442	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	191	Windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
443	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	192	Windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
444	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	193	Windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
445	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	194	Windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
446	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	195	Windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
447	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	196	Windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
448	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	197	Windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
449	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	198	Windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
450	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	199	Windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
451	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	200	Windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
452	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	201	Windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
453	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	202	Windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
454	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	203	Windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
455	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	204	Windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
456	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	205	Intructor Workplace Soft module	2015	385.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	

NO	KODE SATKER	NAMA UPT/SATKER	URAIAN BMN				TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (RP)	MANFAAT ASET TAK BERWUJUD				WAKTU DIRASAKANNYA MANFAAT	DURASI KEMANFAATAN ASET TAK BERWUJUD	RELEVANSI SAAT INI (BERMANFAAT/TIDAK)	UNIT KERJA YANG MEMANFAATKAN	KETERANGAN
			KODE BARANG	JENIS ATB	NUP	NAMA BARANG			NILAI EKONOMI	MANFAAT KEILMUAN	MANFAAT SOSIAL	MANFAAT LAINNYA					
457	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	206	Database Cargo Model	2015	797.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
458	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	207	Database Cargo Model	2015	797.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
459	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	208	Database Cargo Model	2015	797.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
460	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	209	Database Cargo Model	2015	797.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
461	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	210	Database Cargo Model	2015	797.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
462	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	211	Database Cargo Model	2015	797.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
463	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	212	Trainee Workplace	2015	770.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
464	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	213	Trainee Workplace	2015	770.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
465	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	214	Trainee Workplace	2015	770.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
466	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	215	Trainee Workplace	2015	770.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
467	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	216	Trainee Workplace	2015	770.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
468	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	217	Trainee Workplace	2015	770.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
469	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	218	Trainee Workplace	2015	770.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
470	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	219	Trainee Workplace	2015	770.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
471	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	220	Trainee Workplace	2015	770.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
472	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	221	Trainee Workplace	2015	770.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
473	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	222	Trainee Workplace	2015	770.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
474	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	223	Trainee Workplace	2015	770.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
475	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	224	Trainee Workplace	2015	770.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
476	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	225	Trainee Workplace	2015	770.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
477	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	226	Trainee Workplace	2015	770.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
478	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	227	windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
479	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	228	windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
480	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	229	windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
481	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	230	windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
482	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	231	windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
483	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	232	windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
484	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	233	windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
485	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	234	windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
486	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	235	windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
487	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	236	windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
488	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	237	windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
489	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	238	windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
490	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	239	windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
491	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	240	windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
492	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	241	windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
493	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	242	windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
494	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	243	windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	

NO	KODE SATKER	NAMA UPT/SATKER	URAIAN BMN				TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (RP)	MANFAAT ASET TAK BERWUJUD				WAKTU DIRASAKANNYA MANFAAT	DURASI KEMANFAATAN ASET TAK BERWUJUD	RELEVANSI SAAT INI (BERMANFAAT/TIDAK)	UNIT KERJA YANG MEMANFAATKAN	KETERANGAN
			KODE BARANG	JENIS ATB	NUP	NAMA BARANG			NILAI EKONOMI	MANFAAT KEILMUAN	MANFAAT SOSIAL	MANFAAT LAINNYA					
495	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	244	windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
496	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	245	windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
497	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	246	windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
498	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	247	windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
499	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	248	windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
500	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	249	windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
501	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	250	windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
502	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	251	windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
503	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	252	windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
504	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	253	windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
505	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	254	windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
506	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	255	windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
507	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	256	windows 7/8	2015	1.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
508	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	257	OS Server	2015	22.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
509	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	258	OS Server	2015	22.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
510	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	259	OS Server	2015	22.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
511	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	260	Database Software	2015	228.800.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
512	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	261	Internet Secrity	2015	2.750.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
513	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	262	Internet Secrity	2015	2.750.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
514	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	263	Internet Secrity	2015	2.750.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
515	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	264	Internet Secrity	2015	2.750.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
516	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	265	Internet Secrity	2015	2.750.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
517	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	266	Internet Secrity	2015	2.750.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
518	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	267	Sistem Informasi Sertifikat	2015	1.867.569.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
519	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	268	Web Sertifikat Pelaut	2015	390.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
520	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	269	Infratructure as a service	2015	389.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
521	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	270	Infratructure as a service	2015	389.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
522	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	271	Infratructure as a service	2015	389.430.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
523	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	272	perangkat lunak	2015	4.456.100.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
524	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	273	database	2015	770.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
525	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	274	Aplikasi Tambahan Perangkat Lunak	2015	422.400.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
526	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	275	Replenishment sea, Helicopter on deck with helo pa	2015	77.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
527	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	276	Replenishment sea, Helicopter on deck with helo pa	2015	77.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
528	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	277	visual view control	2015	23.100.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
529	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	278	visual view control	2015	23.100.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
530	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	279	visual view control	2015	23.100.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
531	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	280	visual view control	2015	23.100.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
532	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	281	visual view control	2015	23.100.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	

NO	KODE SATKER	NAMA UPT/SATKER	URAIAN BMN				TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (RP)	MANFAAT ASET TAK BERWUJUD				WAKTU DIRASAKANNYA MANFAAT	DURASI KEMANFAATAN ASET TAK BERWUJUD	RELEVANSI SAAT INI (BERMANFAAT/TIDAK)	UNIT KERJA YANG MEMANFAATKAN	KETERANGAN
			KODE BARANG	JENIS ATB	NUP	NAMA BARANG			NILAI EKONOMI	MANFAAT KEILMUAN	MANFAAT SOSIAL	MANFAAT LAINNYA					
533	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	282	visual view control	2015	23.100.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
534	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	283	visual view control	2015	23.100.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
535	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	284	visual view control	2015	23.100.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
536	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	285	visual view control	2015	23.100.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
537	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	286	visual view control	2015	23.100.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
538	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	287	At least 12 database	2015	495.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
539	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	288	target tugging	2015	37.950.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
540	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	289	ownship tugging	2015	77.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
541	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	290	anchoriing module	2015	110.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
542	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	335	OS Server	2016	23.000.000	-	-	-	✓	2016	9 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
543	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	336	OS Server	2016	23.000.000	-	-	-	✓	2016	9 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
544	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	337	OS Server	2016	23.000.000	-	-	-	✓	2016	9 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
545	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	338	Software Buku Pelaut	2016	350.000.000	-	-	-	✓	2016	9 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
546	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	339	SIS. INF. MON. KAPAL BERBENDERA INDONESIA	2021	193.600.000	-	-	-	✓	2021	4 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
547	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	340	PEMBELIAN LISENSI SID	2021	94.050.000	-	-	-	✓	2021	4 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
548	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	341	IMO VEGA DATABASE ON THE WEB	2022	161.975.000	-	-	-	✓	2022	3 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
549	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	342	APLIKASI KAPAL ONLINE	2022	143.511.900	-	-	-	✓	2022	3 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
550	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	359	IMO VEGA DATABASE ON THE WEB	2023	198.690.000	-	-	-	-	2023	2 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
551	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	59		2013	1.374.313.980	-	-	-	✓	2013	12 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
552	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	60		2013	803.565.600	-	-	-	✓	2013	12 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
553	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	61		2013	8.619.870.025	-	-	-	✓	2013	12 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
554	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	63	Project management, Warranty incl LTSSP for 5 year	2015	12.071.400.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
555	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	64	Intructor (briefing/debriefing)	2015	82.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
556	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	65	Intructor (briefing/debriefing)	2015	82.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
557	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	66	ENC Profesional woldwide licence	2015	60.500.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
558	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	67	student assesment module	2015	77.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
559	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	68	project administration, project meeting,warranty	2015	11.671.000.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
560	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	69	-	2015	1.436.050.000	-	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
561	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	70		2016	231.670.000	-	-	-	✓	2016	9 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
562	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	71	central prosesing	2007	319.440.659	-	-	-	-	2007	18 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
563	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	72	Pemeliharaan	2007	400.344.055	-	-	-	-	2007	18 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
564	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	73	BUKU PELAUT 2021	2021	242.122.100	-	-	-	-	2021	4 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
565	439196	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	74	E-SID	2022	1.472.759.933	-	-	-	-	2022	3 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN PUSAT	
566	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	1	Firewall & Proxy	2014	7.920.000	-	-	-	-	2014	4 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
567	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	2	Firewall & Proxy	2014	7.920.000	-	-	-	-	2014	4 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
568	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	3	Operating Sistem & Software	2014	79.310.000	-	-	-	-	2014	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
569	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	4	Software RDBMS	2014	69.300.000	-	-	-	-	2014	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
570	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	5	Linux Redhat Enterprise	2014	7.700.000	-	-	-	-	2014	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	

NO	KODE SATKER	NAMA UPT/SATKER	URAIAN BMN				TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (RP)	MANFAAT ASET TAK BERWUJUD				WAKTU DIRASAKANNYA MANFAAT	DURASI KEMANFAATAN ASET TAK BERWUJUD	RELEVANSI SAAT INI (BERMANFAAT/TIDAK)	UNIT KERJA YANG MEMANFAATKAN	KETERANGAN
			KODE BARANG	JENIS ATB	NUP	NAMA BARANG			NILAI EKONOMI	MANFAAT KEILMUAN	MANFAAT SOSIAL	MANFAAT LAINNYA					
571	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	16	GRLWEAP	2019	198.297.000	-	-	-	-	2019	5 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
572	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	17	APLIKASI SIPANDU	2018	934.965.000	-	-	✓	-	2018	5 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
573	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	18	SISTEM APLIKASI PEMBANGUNAN/REHABILITASI FASILITAS PELABUHAN (SIFASPEL)	2019	176.935.000	-	-	✓	-	2019	5 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
574	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	20	Pengembangan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Pelabuhan (SIMFONI FASPEL)	2022	99.900.000	-	-	-	-	2022	5 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
575	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	21	APLIKASI SISTEM INFORMASI PELABUHAN (SIMPEL)	2024	98.512.000	-	-	-	-	2024	5 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
576	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	18	SID LEBITI	2018	976.755.800	✓	-	-	-	2018	5 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
577	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	19	SID MESUJI	2018	917.900.000	✓	-	-	-	2018	5 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
578	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	20	STD-PRN-SAWAERMA	2018	1.757.658.600	✓	-	-	-	2018	5 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
579	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	24	STD-PRN WANAM	2018	1.781.366.000	✓	-	-	-	2018	5 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
580	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	30	KPBU WANCI BANGGAI	2018	2.258.575.000	✓	-	-	-	2018	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
581	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	31	KPBU SAUMLAKI LABUAN BAJO	2018	1.856.821.400	✓	-	-	-	2018	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
582	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	32	KPBU NAMLEA,TAHUNA,TOBELO	2018	2.249.720.000	✓	-	-	-	2018	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
583	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	34	KPBU DOBO POMAKO	2018	1.857.295.000	✓	-	-	-	2018	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
584	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	35	KPBU KAIMANA SERUI	2018	1.896.965.400	✓	-	-	-	2018	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
585	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	37	DED SOASIO	2018	941.897.000	✓	-	-	-	2018	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
586	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	39	DED REMBANG	2018	752.548.000	✓	-	-	-	2018	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
587	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	44	STUDI KPBU ANGGREK	2019	1.435.695.000	✓	-	-	-	2019	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
588	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	51	STUDI DED DOMPAK	2019	945.439.000	✓	-	-	-	2019	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
589	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	53	STUDI DED SELAYAR	2019	888.552.500	✓	-	-	-	2019	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
590	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	57	STUDI DED BOEPINANG	2019	924.720.500	✓	-	-	-	2019	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
591	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	58	STUDI DED BRANTA	2019	936.736.500	✓	-	-	-	2019	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
592	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	62	STUDI DED PULAUSAILUS	2019	953.370.000	✓	-	-	-	2019	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
593	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	63	STUDI DED MALARKO	2019	977.209.200	✓	-	-	-	2019	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
594	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	69	STUDI DED TELAGA BIRU	2019	985.325.000	✓	-	-	-	2019	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
595	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	75		2020	2.777.445.000	✓	-	-	-	2020	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
596	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	76		2020	2.805.773.850	✓	-	-	-	2020	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
597	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	78		2020	1.260.110.000	✓	-	-	-	2020	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
598	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	80		2020	2.468.826.500	✓	-	-	-	2020	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
599	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	81		2020	1.098.999.000	✓	-	-	-	2020	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
600	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	84		2020	1.022.505.000	✓	-	-	-	2020	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
601	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	99		2020	1.007.655.000	✓	-	-	-	2020	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
602	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	100		2020	1.123.160.000	✓	-	-	-	2020	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
603	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	101		2020	1.049.735.000	✓	-	-	-	2020	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
604	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	102		2020	1.147.410.000	✓	-	-	-	2020	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
605	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	104		2020	1.125.107.000	✓	-	-	-	2020	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
606	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	105		2020	1.152.772.000	✓	-	-	-	2020	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
607	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	107		2020	866.408.000	✓	-	-	-	2020	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
608	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	109		2020	728.117.000	✓	-	-	-	2020	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	

NO	KODE SATKER	NAMA UPT/SATKER	URAIAN BMN				TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (RP)	MANFAAT ASET TAK BERWUJUD				WAKTU DIRASAKANNYA MANFAAT	DURASI KEMANFAATAN ASET TAK BERWUJUD	RELEVANSI SAAT INI (BERMANFAAT/TIDAK)	UNIT KERJA YANG MEMANFAATKAN	KETERANGAN
			KODE BARANG	JENIS ATB	NUP	NAMA BARANG			NILAI EKONOMI	MANFAAT KEILMUAN	MANFAAT SOSIAL	MANFAAT LAINNYA					
609	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	110		2020	1.132.335.000	✓	-	-	-	2020	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
610	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	111	Rencana Induk Pelabuhan Barus	2015	634.480.000	✓	-	-	-	2015	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
611	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	112	Rencana Induk Pelabuhan Midai	2015	650.892.000	✓	-	-	-	2015	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
612	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	113	Rencana Induk Pelabuhan Pulau Laut	2015	650.540.000	✓	-	-	-	2015	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
613	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	114	Rencana Induk Pelabuhan Subi dan Serasan	2015	359.359.000	✓	-	-	-	2015	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
614	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	115	Rencana Induk Pelabuhan Kuala Mendahara	2015	634.122.500	✓	-	-	-	2015	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
615	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	116	Rencana Induk Pelabuhan Sapudi	2015	640.530.000	✓	-	-	-	2015	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
616	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	117	Rencana Induk Pelabuhan Labuhan Lombok	2015	639.342.000	✓	-	-	-	2015	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
617	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	118	Rencana Induk Pelabuhan Reo dan Pota	2015	729.245.000	✓	-	-	-	2015	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
618	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	119	Rencana Induk Pelabuhan Sebuku	2015	646.965.000	✓	-	-	-	2015	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
619	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	120	Rencana Induk Pelabuhan Parigi dan Moutong	2015	665.294.300	✓	-	-	-	2015	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
620	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	121	Rencana Induk Pelabuhan Banggai	2015	653.257.000	✓	-	-	-	2015	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
621	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	122	Rencana Induk Pelabuhan Soa Sio dan Sofifi	2015	706.717.000	✓	-	-	-	2015	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
622	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	123	Rencana Induk Pelabuhan Serui	2015	708.349.400	✓	-	-	-	2015	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
623	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	124	Rencana Induk Pelabuhan Korido	2015	682.522.500	✓	-	-	-	2015	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
624	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	125	Rencana Induk Pelabuhan Letung	2015	638.110.000	✓	-	-	-	2015	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
625	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	126	Rencana Induk Pelabuhan Singkil dan Pulau Banyak	2015	720.830.000	✓	-	-	-	2015	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
626	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	127	Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Uban dan Tanjung B	2015	679.855.000	✓	-	-	-	2015	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
627	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	128	Rencana Induk Pelabuhan Jepara	2015	611.380.000	✓	-	-	-	2015	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
628	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	129	Rencana Induk Pelabuhan Telaga Biru dan Sapulu	2015	701.008.000	✓	-	-	-	2015	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
629	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	130	Rencana Induk Pelabuhan Ba'a, Batutua dan Papela	2015	786.940.000	✓	-	-	-	2015	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
630	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	131	Rencana Induk Pelabuhan Raha dan Maligano	2015	722.304.000	✓	-	-	-	2015	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
631	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	132	Rencana Induk Pelabuhan Kolaka	2015	649.880.000	✓	-	-	-	2015	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
632	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	133	Rencana Induk Pelabuhan Watunohu	2015	642.565.000	✓	-	-	-	2015	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
633	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	134	Rencana Induk Pelabuhan Wonreli	2015	689.051.000	✓	-	-	-	2015	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
634	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	135	Rencana Induk Pelabuhan Geser dan Gorom	2015	727.754.500	✓	-	-	-	2015	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
635	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	136	Rencana Induk Pelabuhan Teor	2015	680.482.000	✓	-	-	-	2015	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
636	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	137	Rencana Induk Pelabuhan Ereke	2015	608.294.500	✓	-	-	-	2015	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
637	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	138	Rencana Induk Pelabuhan Sinabang dan Sibigo	2015	707.817.000	✓	-	-	-	2015	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
638	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	139	Rencana Induk Pelabuhan Dawelor dan Mahaleta	2015	726.071.500	✓	-	-	-	2015	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
639	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	187	BASIC DESIGN NEW AMBON	2021	99.000.000	✓	-	-	-	2021	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
640	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	188	BASIC DESIGN NEW PALEMBANG	2021	99.110.000	✓	-	-	-	2021	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
641	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	197	Kajian Pendampingan PHLN	2021	1.408.370.000	✓	-	-	-	2021	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
642	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	198	DED Sirombu	2021	1.600.181.000	✓	-	-	-	2021	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
643	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	200	DED Bungku	2021	1.100.000.000	✓	-	-	-	2021	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
644	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	201	DED Sungai Nyamuk	2021	1.256.948.000	✓	-	-	-	2021	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
645	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	202	DED Keramaian	2021	1.111.000.000	✓	-	-	-	2021	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
646	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	204	DED Lewoleba	2021	1.264.610.490	✓	-	-	-	2021	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	

NO	KODE SATKER	NAMA UPT/SATKER	URAIAN BMN				TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (RP)	MANFAAT ASET TAK BERWUJUD				WAKTU DIRASAKANNYA MANFAAT	DURASI KEMANFAATAN ASET TAK BERWUJUD	RELEVANSI SAAT INI (BERMANFAAT/TIDAK)	UNIT KERJA YANG MEMANFAATKAN	KETERANGAN
			KODE BARANG	JENIS ATB	NUP	NAMA BARANG			NILAI EKONOMI	MANFAAT KEILMUAN	MANFAAT SOSIAL	MANFAAT LAINNYA					
647	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	206	DED Lerokis	2021	1.088.972.060	✓	-	-	-	2021	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
648	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	208	DED Daruba	2021	1.311.261.600	✓	-	-	-	2021	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
649	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	211	DED Ulu Siau	2021	1.161.022.500	✓	-	-	-	2021	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
650	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	214	DED Sapudi	2021	1.182.376.800	✓	-	-	-	2021	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
651	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	215	DED Kaledupa	2021	1.112.573.000	✓	-	-	-	2021	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
652	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	216	DED Awerange	2021	1.110.202.500	✓	-	-	-	2021	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
653	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	217	DED Kolonedale	2021	1.193.093.000	✓	-	-	-	2021	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
654	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	218	SID Kilo	2021	1.278.868.800	✓	-	-	-	2021	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
655	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	221	DED Lampia	2021	1.020.329.750	✓	-	-	-	2021	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
656	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	222	DED Arar	2021	1.237.050.000	✓	-	-	-	2021	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
657	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	223	DED Namrole	2021	1.160.559.800	✓	-	-	-	2021	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
658	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	224	DED Matui-Jailolo	2021	1.253.241.000	✓	-	-	-	2021	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
659	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	225	DED Raha	2021	1.106.044.500	✓	-	-	-	2021	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
660	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	226	DED Pulau Fani	2021	1.251.956.200	✓	-	-	-	2021	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
661	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	230	DED Kendawangan	2021	1.174.541.800	✓	-	-	-	2021	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
662	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	233	AMDAL Anggrek	2021	1.167.030.000	✓	-	-	-	2021	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
663	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	240	UKL UPL Ulu Siau	2021	726.110.000	✓	-	-	-	2021	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
664	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	241	UKL UPL Bahaur	2021	617.842.500	✓	-	-	-	2021	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
665	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	287	DED PELABUHAN BOEPINANG PROV. SULTRA	2014	346.159.000	✓	-	-	-	2014	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
666	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	339	STUDI KLASTERISASI TERSUS TUKS PAKET 3 PROV. MALUKU UTARA	2022	516.150.000	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
667	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	340	STUDI KLASTERISASI TERSUS TUKS PAKET 2 PROV. KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN SELATAN	2022	527.860.500	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
668	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	341	STUDI KLASTERISASI TERSUS TUKS PAKET 1 PROV. SULAWESI TENGAH DAN SULAWESI TENGGARA	2022	526.060.000	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
669	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	345	DED PELABUHAN POTA PROV. NTT	2015	350.845.000	✓	-	-	-	2015	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
670	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	353	Jasa Konsultansi Tim Expert Pendamping Evaluasi Dokumen Penawaran Patimban Port Development Project Phase 1-2 Paket 6	2022	91.519.500	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
671	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	354	Jasa Konsultansi Tim Expert Pendamping Evaluasi Dokumen Penawaran Patimban Port Development Project Phase 1-2 Paket 5 (Car	2022	91.519.500	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
672	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	355	Penyusunan Dokumen Rancangan Awal (Basic Design) pada Pekerjaan Rancang dan Bangun (design and Build) Pembangunan Pelabuhan	2022	97.569.000	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
673	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	356	Penyusunan Dokumen Rancangan Awal (Basic Design) untuk Pekerjaan Rancang dan Bangun (design and Build) Pembangunan Fasilitas	2022	97.680.000	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
674	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	357	Penyusunan Dokumen Review Detail Engineering Design (DED) Fasilitas Pelabuhan Laut Kajang di Provinsi Sulawesi Selatan	2022	98.512.500	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
675	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	358	Penyusunan Review Kelayakan 11 (sebelas) Titik Tiang Pancang Dermaga Pelabuhan Laut IPPI Provinsi Nusa Tenggara Timur	2022	96.570.000	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
676	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	359	STUDI RIP-Larat Sofyanin	2022	1.547.221.785	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
677	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	360	DED-LAPUKO	2022	1.313.712.750	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
678	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	361	Studi SID PELABUHAN RATU	2022	1.084.392.300	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
679	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	362	Studi SID SANGKULIRANG	2022	1.232.133.300	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
680	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	363	Studi SID BAJOE	2022	1.237.317.000	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
681	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	364	Studi UKP-UPL Luwuk	2022	750.548.700	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
682	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	365	Studi DPLH Wayabula	2022	746.280.750	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
683	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	366	Studi UKL UPL Lewoleba	2022	813.663.300	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
684	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	367	Studi DED Sikeli	2022	1.345.320.000	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	

NO	KODE SATKER	NAMA UPT/SATKER	URAIAN BMN				TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (RP)	MANFAAT ASET TAK BERWUJUD				WAKTU DIRASAKANNYA MANFAAT	DURASI KEMANFAATAN ASET TAK BERWUJUD	RELEVANSI SAAT INI (BERMANFAAT/TIDAK)	UNIT KERJA YANG MEMANFAATKAN	KETERANGAN
			KODE BARANG	JENIS ATB	NUP	NAMA BARANG			NILAI EKONOMI	MANFAAT KEILMUAN	MANFAAT SOSIAL	MANFAAT LAINNYA					
685	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	368	Studi DPLH IPPI	2022	711.314.236	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
686	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	369	Studi DOKLING ANDALRKL-RPL Kolonedale	2022	1.535.204.148	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
687	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	370	Studi DPLH dan UKLUPL Balauring	2022	785.475.360	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
688	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	371	Studi DED Simailepet	2022	1.265.626.440	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
689	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	372	Studi DED Panurakan	2022	1.355.907.180	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
690	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	373	Studi DED Kaimana	2022	1.457.072.300	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
691	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	374	Studi DELH Waikelo	2022	880.882.000	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
692	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	375	Studi DOKLING AMDAL Sungai Nyamuk	2022	1.489.925.250	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
693	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	376	Studi DELH Namrole	2022	911.474.891	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
694	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	377	Studi DED Midai	2022	1.354.349.850	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
695	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	378	Studi DED Rembang	2022	1.280.440.000	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
696	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	379	Studi DED Belang-Belang	2022	1.550.170.500	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
697	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	380	Studi DOKLING UKL-UPL Calabai & Kilo	2022	900.543.000	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
698	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	381	Studi DED Sape	2022	1.342.350.750	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
699	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	382	Studi SID Bungin	2022	1.412.295.000	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
700	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	383	Studi DED Ba'a - Ndao	2022	1.414.184.400	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
701	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	384	Studi DED Tanah Ampo	2022	1.150.087.650	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
702	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	385	RIP Biaro dan Buhias	2022	1.421.497.635	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
703	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	386	ded pasipalele	2022	1.533.112.500	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
704	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	387	RIP Tangkiang	2022	1.297.201.500	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
705	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	388	ded mahaleta	2022	1.377.709.800	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
706	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	389	RIP Wakai & Una-una	2022	1.490.397.000	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
707	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	390	Studi DLKR-DLKP Laiwui	2022	443.766.000	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
708	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	391	DED Depapre	2022	1.256.759.000	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
709	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	392	DED Kalatoa	2022	1.409.383.095	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
710	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	393	KPBU Bidang Kepelabuhanan	2022	1.866.786.900	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
711	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	395	integrasi IKN	2022	1.571.982.000	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
712	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	396	Studi DLKR-DLKP Kaledupa	2022	433.122.000	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
713	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	397	Studi RIP Bobong, Loseng, Tikong	2022	1.732.987.500	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
714	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	398	Studi RIP Sanana & Malbufa	2022	1.588.687.000	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
715	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	399	Studi RIP DLKR-P Tanjung Buton	2022	1.343.544.000	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
716	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	400	Studi RIP-DLKRP Dabo Singkep	2022	1.355.133.500	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
717	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	401	Studi RIP DLKR-P Lakor & Serwaru	2022	1.576.517.460	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
718	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	402	Studi RIP DLKR-P Dofa, Pasipa, Falabisahaya	2022	1.737.283.200	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
719	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	403	Studi RIP Kilo	2022	1.352.923.500	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
720	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	404	Studi RIP DLKRP GITA	2022	1.350.886.095	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
721	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	405	Studi RIP DLKRP Marapokot & Maumbawa	2022	1.462.406.130	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
722	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	406	Studi RIP DLKR-P Bungin	2022	1.415.638.500	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	

NO	KODE SATKER	NAMA UPT/SATKER	URAIAN BMN				TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (RP)	MANFAAT ASET TAK BERWUJUD				WAKTU DIRASAKANNYA MANFAAT	DURASI KEMANFAATAN ASET TAK BERWUJUD	RELEVANSI SAAT INI (BERMANFAAT/TIDAK)	UNIT KERJA YANG MEMANFAATKAN	KETERANGAN
			KODE BARANG	JENIS ATB	NUP	NAMA BARANG			NILAI EKONOMI	MANFAAT KEILMUAN	MANFAAT SOSIAL	MANFAAT LAINNYA					
723	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	407	Studi DLKR-DLKP Amurang	2022	464.057.700	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
724	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	408	Studi DLKR-DLKP Selayar	2022	428.593.200	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
725	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	409	Studi SID FAK-FAK	2022	1.252.834.800	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
726	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	410	Studi SID SOASIO	2022	1.275.634.200	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
727	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	411	STUDI UKL UPL PARIGI	2022	860.583.000	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
728	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	412	Studi DPLH Daruba Morotai	2022	754.311.600	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
729	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	413	Studi DOKLING AMDAL Batu Goyang	2022	1.458.068.250	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
730	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	414	Studi DOKLING AMDAL Tilamuta	2022	1.528.741.950	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
731	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	415	Studi DPLH Molu	2022	893.527.800	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
732	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	416	Studi DED Carocok	2022	1.320.342.780	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
733	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	417	Studi DED Eray	2022	1.288.787.700	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
734	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	418	RIP Wasior dan Windesi	2022	1.482.532.650	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
735	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	419	RIP Ende Namrole	2022	1.318.979.700	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
736	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	420	SID Palembang	2022	944.404.650	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
737	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	421	Studi DLKR-DLKP Selat Panjang	2022	408.845.190	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
738	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	422	Studi RIP Padang Tikar & Telok Air	2022	1.436.814.273	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
739	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	423	DED Luwuk	2022	1.470.725.080	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
740	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	424	DED Benete	2022	1.328.115.000	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
741	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	425	DED Sinjai Larea-rea	2022	1.472.859.000	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
742	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	426	Studi SID TANJUNG CARAT	2022	1.194.582.000	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
743	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	427	Studi SID PENGERUKAN RAHA	2022	1.250.276.250	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
744	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	428	Studi SID PENGERUKAN KALIANGET	2022	1.228.520.250	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
745	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	429	Studi RIP DLKR-P Sigolo-golo & Saeru	2022	1.469.584.500	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
746	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	430	Studi SID PATIMBAN	2022	1.126.172.700	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
747	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	431	Studi SID PENGERUKAN TANA PASER	2022	1.258.373.700	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
748	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	432	Studi DLKR-DLKP Pangandaran	2022	380.503.700	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
749	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	433	KPBU Bau-Bau	2022	1.524.030.000	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
750	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	434	REVIU SID PEGERUKAN SAMPIT	2022	967.131.900	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
751	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	435	REVIU SID PENGERUKAN SAMARINDA	2022	986.737.830	✓	-	-	-	2022	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
752	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	436	Rencana Induk Pelabuhan Subi	2015	359.359.000	-	-	-	-	2015	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
753	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	437	DED SARMI	2023	1.286.315.712	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
754	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	438	DED BAING	2023	1.436.322.000	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
755	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	439	DED SALURA	2023	1.434.546.000	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
756	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	440	DED MAMUJU	2023	1.419.754.140	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
757	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	441	DED MAUMBAWA	2023	1.442.171.700	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
758	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	442	DED LABUHAN BAJAU	2023	1.695.507.000	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
759	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	443	DED PELABUHAN RATU	2023	1.411.624.500	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
760	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	444	DED TANIWEL	2023	1.422.201.690	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	

NO	KODE SATKER	NAMA UPT/SATKER	URAIAN BMN				TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (RP)	MANFAAT ASET TAK BERWUJUD				WAKTU DIRASAKANNYA MANFAAT	DURASI KEMANFAATAN ASET TAK BERWUJUD	RELEVANSI SAAT INI (BERMANFAAT/TIDAK)	UNIT KERJA YANG MEMANFAATKAN	KETERANGAN
			KODE BARANG	JENIS ATB	NUP	NAMA BARANG			NILAI EKONOMI	MANFAAT KEILMUAN	MANFAAT SOSIAL	MANFAAT LAINNYA					
761	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	445	DED SOFIFI	2023	1.559.142.000	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
762	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	446	DED BONERATE	2023	1.454.077.000	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
763	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	447	DED TANJUNG BATU	2023	1.344.374.000	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
764	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	448	DED JINATO	2023	1.451.746.000	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
765	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	449	DED WEDA	2023	1.477.092.100	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
766	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	450	DED SAUSAPOR	2023	1.407.650.000	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
767	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	451	DED CARIK	2023	1.438.958.000	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
768	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	452	DED TEPA	2023	1.448.088.000	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
769	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	453	DED SUNGAI GUNTUNG	2023	1.416.964.000	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
770	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	454	DED MATUTUANG	2023	1.408.560.000	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
771	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	455	DED TUAPEJAT	2023	1.284.307.000	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
772	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	456	DED KALIANGET	2023	1.299.964.050	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
773	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	457	DED MARAPOKOT	2023	1.574.478.000	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
774	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	458	PENDAMPINGAN PELAKSANAAN KPBU BIDANG KEPELABUHANAN	2023	1.521.803.100	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
775	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	459	RIP TELUK SIGINTUNG	2023	1.296.073.500	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
776	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	460	RIP DLKRP SIUBAN	2023	1.353.849.000	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
777	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	461	RIP DLKRP KORIDO	2023	1.580.543.190	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
778	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	462	STUDI UKL-UPL SOFYANIN	2023	818.957.000	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
779	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	463	RIP DLKR DLKP GEBE SAGEA PATANI	2023	1.906.740.000	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
780	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	464	RIP BABANG-SAKETA	2023	1.491.322.500	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
781	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	465	RIP DLKR DLKP GALELA	2023	1.503.310.500	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
782	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	466	RIP DLKR DLKP DAWAI	2023	1.594.963.200	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
783	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	467	RIP POMAKO	2023	1.466.292.000	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
784	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	468	RIP DLKR DLKP MATUTUANG DAN LIPAENG	2023	1.739.823.750	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
785	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	469	RIP DLKR DLKP TELUK PATIPI	2023	1.599.553.050	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
786	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	470	RIP DLKR DLKP SOFIFI	2023	1.481.887.500	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
787	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	471	STUDI UKL UPL MAHALETA	2023	902.761.334	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
788	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	472	STUDI UKL-UPL ERAY	2023	902.761.334	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
789	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	473	RIP DLKR DLKP KOBISADAR	2023	1.519.627.500	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
790	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	474	STUDI UKL-UPL GITA	2023	879.452.000	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
791	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	475	RIP ATAPUPU	2023	1.371.364.800	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
792	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	476	SID PENGERUKAN MEULABOH	2023	1.331.983.960	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
793	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	477	SID PENGERUKAN CELUKAN BAWANG	2023	1.249.082.500	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
794	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	478	REVIU RIP BAU BAU	2023	1.329.230.970	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
795	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	479	RIP DLKR DLKP MOLAWE	2023	1.454.659.200	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
796	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	480	SID PENGERUKAN NUSA PENIDA	2023	1.256.253.100	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
797	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	481	SID PENGERUKAN KOKAS	2023	1.373.252.650	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
798	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	482	SID PENGERUKAN TANJUNG BERINGIN	2023	1.209.506.560	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	

NO	KODE SATKER	NAMA UPT/SATKER	URAIAN BMN				TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (RP)	MANFAAT ASET TAK BERWUJUD				WAKTU DIRASAKANNYA MANFAAT	DURASI KEMANFAATAN ASET TAK BERWUJUD	RELEVANSI SAAT INI (BERMANFAAT/TIDAK)	UNIT KERJA YANG MEMANFAATKAN	KETERANGAN
			KODE BARANG	JENIS ATB	NUP	NAMA BARANG			NILAI EKONOMI	MANFAAT KEILMUAN	MANFAAT SOSIAL	MANFAAT LAINNYA					
799	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	483	SID PENGERUKAN SINGKIL	2023	1.282.237.368	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
800	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	484	REVIU SID PENGERUKAN CILACAP	2023	1.008.705.245	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
801	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	485	REVIU SID PENGERUKAN PANGKAL BALAM	2023	1.063.910.318	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
802	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	486	AMDAL BOEPINANG	2023	1.618.595.100	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
803	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	487	SID PENGERUKAN POMAKO	2023	1.379.951.500	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
804	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	488	SID PENGERUKAN TELUK BAYUR	2023	1.256.447.350	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
805	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	489	AMDAL DARUBA	2023	1.693.742.100	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
806	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	490	AMDAL NAMROLE	2023	1.721.794.020	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
807	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	491	DOKLING-NAMLEA	2023	1.723.792.020	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
808	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	492	DELH MARAPOKOT	2023	1.068.232.680	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
809	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	493	SID PENGERUKAN UNAUNA	2023	1.259.072.500	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
810	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	494	SID PENGERUKAN WAINGAPU	2023	1.254.583.660	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
811	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	495	DED IKN	2023	1.513.290.000	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
812	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	496	RIP-IKN	2023	1.442.193.900	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
813	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	497	PENDAMPINGAN TRANSAKSI PROYEK KPBU BAU BAU	2023	753.638.700	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
814	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	498	REVIU DED SOASIO	2023	103.457.000	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
815	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	499	STUDI DESAIN MEP IKN	2023	104.372.000	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
816	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	500	REVIU DED SAUMLAKI	2023	103.457.000	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
817	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	501	REVIU DED SEBA	2023	104.456.000	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
818	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	502	REVIU DED BIU	2023	104.399.000	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
819	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	503	REVIU DED BUNGKU	2023	104.886.700	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
820	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	504	BASIC DESIGN BACKUP AREA PELABUHAN PATIMBAN	2023	99.178.500	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
821	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	505	BASIC ARSITEKTURAL DESIGN FASILITAS UMUM PELABUHAN PATIMBAN	2023	99.012.000	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
822	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	506	BASIC ARSITEKTURAL DESIGN BANGUNAN AKOMODASI PELABUHAN PATIMBAN	2023	99.012.000	-	-	-	-	2023	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
823	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	507	SID PENGERUKAN IKN	2024	1.274.487.540	-	-	-	-	2024	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
824	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	508	SID PENGERUKAN SANUR	2024	1.228.374.810	-	-	-	-	2024	20 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
825	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	509	SID PENGERUKAN MAMUJU	2024	1.234.783.950	-	-	-	-	2024	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
826	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	510	SID PENGERUKAN AGATS	2024	1.368.215.940	-	-	-	-	2024	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
827	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	511	SID PENGERUKAN WEDA	2024	979.545.000	-	-	-	-	2024	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
828	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	512	SID PENGERUKAN ENDE	2024	1.223.689.500	-	-	-	-	2024	20 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
829	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	513	SID PENGERUKAN BARANUSA	2024	1.224.966.000	-	-	-	-	2024	20 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
830	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	514	SID PENGERUKAN BINTUNI	2024	1.355.267.124	-	-	-	-	2024	20 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
831	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	515	DED MAMBORO	2024	1.436.878.100	-	-	-	-	2024	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
832	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	516	DOKLING SAPE	2024	926.798.000	-	-	-	-	2024	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
833	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	517	DOKLING MAUMBAWA	2024	1.119.750.600	-	-	-	-	2024	20 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
834	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	518	RIP DLKR DLKP PULAU BANGKA	2024	1.556.702.100	-	-	-	-	2024	20 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
835	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	519	DOKLING BUNGIN	2024	958.488.500	-	-	-	-	2024	20 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
836	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	520	RIP DLKR DLKP MARADAPAN	2024	1.429.540.500	-	-	-	-	2024	20 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	

NO	KODE SATKER	NAMA UPT/SATKER	URAIAN BMN				TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (RP)	MANFAAT ASET TAK BERWUJUD				WAKTU DIRASAKANNYA MANFAAT	DURASI KEMANFAATAN ASET TAK BERWUJUD	RELEVANSI SAAT INI (BERMANFAAT/TIDAK)	UNIT KERJA YANG MEMANFAATKAN	KETERANGAN
			KODE BARANG	JENIS ATB	NUP	NAMA BARANG			NILAI EKONOMI	MANFAAT KEILMUAN	MANFAAT SOSIAL	MANFAAT LAINNYA					
837	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	521	DED SAILUS	2024	1.430.123.750	-	-	-	-	2024	20 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
838	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	522	DOKLING AGATS	2024	1.760.875.500	-	-	-	-	2024	20 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
839	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	523	DED KOBISADAR	2024	1.479.424.400	-	-	-	-	2024	20 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
840	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	524	DED SERWARU	2024	1.474.496.000	-	-	-	-	2024	20 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
841	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	525	DED KOLAKA	2024	1.609.314.250	-	-	-	-	2024	20 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
842	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	526	DED SAKETA	2024	1.405.809.200	-	-	-	-	2024	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
843	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	527	DOKLING MANGGADUA	2024	967.424.000	-	-	-	-	2024	20 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
844	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	528	DOKLING SIKELI	2024	1.259.874.114	-	-	-	-	2024	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
845	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	529	DOKLING WEDA	2024	885.305.480	-	-	-	-	2024	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
846	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	530	SID PENGERUKAN SUSOH	2024	1.267.329.140	-	-	-	-	2024	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
847	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	531	SID PENGERUKAN JENEPONTO	2024	1.267.261.140	-	-	-	-	2024	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
848	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	532	SID PENGERUKAN JAILOLO	2024	1.238.583.600	-	-	-	-	2024	20 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
849	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	533	SID PENGERUKAN TOBELO	2024	1.246.264.900	-	-	-	-	2024	20 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
850	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	534	SID PENGERUKAN SINJAI	2024	1.258.725.750	-	-	-	-	2024	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
851	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	535	STUDI RIP DLKR DLKP PELABUHAN TAPALEO	2024	1.907.639.500	-	-	-	-	2024	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
852	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	536	STUDI RIP DLKR DLKP SAILUS	2024	1.587.221.550	-	-	-	-	2024	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
853	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	537	STUDI RIP DLKR DLKP ROMANG	2024	1.520.282.800	-	-	-	-	2024	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
854	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	538	DED NUNBAUN SABU	2024	1.387.194.500	-	-	-	-	2024	20 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
855	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	539	SID PULAU BANGKA	2024	1.487.090.060	-	-	-	-	2024	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
856	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	540	DED TANAH AMPO	2024	1.302.859.475	-	-	-	-	2024	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
857	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	541	STUDI RIP DLKR DLKP DAMA DAN DARUME	2024	1.610.583.720	-	-	-	-	2024	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
858	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	542	STUDI RIP DLKR DLKP PELABUHAN LAGUNDI DAN MARINGGAI	2024	1.495.534.440	-	-	-	-	2024	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
859	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	543	STUDI RIP DLKR DLKP SAPUDI DAN RAAS	2024	1.583.536.350	-	-	-	-	2024	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
860	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	544	STUDI RIP DLKR DLKP BONTANG DAN TANJUNG LAUT	2024	1.539.985.500	-	-	-	-	2024	12 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
861	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	545	STUDI RIP DLKR DLKP BULI, SUBAIM DAN BICOLI	2024	1.636.666.500	-	-	-	-	2024	12 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
862	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	546	STUDI RIP DLKR DLKP TERONG	2024	1.495.152.600	-	-	-	-	2024	12 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
863	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	547	RIP DLKR DLKP TANJUNG SATAI DAN SUKADANA	2024	1.532.792.700	-	-	-	-	2024	12 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
864	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	548	RIP DLKR DLKP WANCI	2024	1.348.216.350	-	-	-	-	2024	12 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
865	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	549	STUDI RIP NUSA PENIDA	2024	1.372.887.210	-	-	-	-	2024	12 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
866	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	550	DOKLING PELABUHAN TANJUNG BATU	2024	1.677.847.500	-	-	-	-	2024	12 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
867	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	551	DOKLING LARAT	2024	971.564.300	-	-	-	-	2024	11 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
868	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	552	DOKLING PULAU BANGKA	2024	897.593.900	-	-	-	-	2024	11 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
869	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	553	STUDI DLKR DLKP SATUI (TANAH BUMBU)	2024	417.963.330	-	-	-	-	2024	11 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
870	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	554	STUDI DLKR DLKP TANJUNG SANTAN	2024	446.043.000	-	-	-	-	2024	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
871	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	555	STUDI DLKR DLKP PONTIANAK	2024	374.947.500	-	-	-	-	2024	3 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
872	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	556	STUDI DLKR DLKP WEDA	2024	406.937.700	-	-	-	✓	2024	-	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
873	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	557	STUDI DLKR DLKP BALIKPAPAN	2024	442.423.290	-	-	-	✓	2024	-	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
874	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	558	PENGEMBANGAN APLIKASI SIPANDU	2024	648.516.000	-	-	-	✓	2024	-	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	

NO	KODE SATKER	NAMA UPT/SATKER	URAIAN BMN				TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (RP)	MANFAAT ASET TAK BERWUJUD				WAKTU DIRASAKANNYA MANFAAT	DURASI KEMANFAATAN ASET TAK BERWUJUD	RELEVANSI SAAT INI (BERMANFAAT/TIDAK)	UNIT KERJA YANG MEMANFAATKAN	KETERANGAN
			KODE BARANG	JENIS ATB	NUP	NAMA BARANG			NILAI EKONOMI	MANFAAT KEILMUAN	MANFAAT SOSIAL	MANFAAT LAINNYA					
875	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	559	DOKLING LAMPIA	2024	1.519.839.000	-	-	-	✓	2024	-	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
876	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	560	DED LIRUNG	2024	1.517.112.857	-	-	-	-	2024	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
877	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	561	STUDI RIP DLKR DLKP BANDA NEIRA	2024	1.676.318.120	-	-	-	-	2024	20 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
878	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	562	DED NUSA PENIDA	2024	1.508.545.250	-	-	-	-	2024	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
879	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	563	SID SOFYANIN	2024	1.465.728.665	-	-	-	-	2024	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
880	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	564	DED MOOR FAKFAK	2024	1.597.905.800	-	-	-	-	2024	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
881	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	565	DED BUNTA	2024	1.534.568.000	-	-	-	-	2024	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
882	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	566	DED BABO	2024	1.568.944.790	-	-	-	-	2024	20 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
883	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	567	DED SELATLAMPA	2024	1.526.555.000	-	-	-	-	2024	20 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
884	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	568	STUDI RIP DLKR DLKP KENDAWANGAN	2024	1.471.708.290	-	-	-	-	2024	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
885	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	569	STUDI RIP DLKR DLKP SAUSAPOR	2024	1.562.761.590	-	-	-	-	2024	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
886	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	570	DED UJUNG JABUNG	2024	1.454.474.375	-	-	-	-	2024	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
887	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	571	DED TAHUNA	2024	1.206.666.320	-	-	-	-	2024	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
888	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	572	DED DOMPAK	2024	1.361.631.200	-	-	-	-	2024	20 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
889	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	573	REVIU SID LEBITI	2024	1.337.500.000	-	-	-	-	2024	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
890	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	574	DED SAUMLAKI	2024	1.518.192.200	-	-	-	-	2024	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
891	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	575	RIP SINJAI	2024	1.362.524.250	-	-	-	-	2024	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
892	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	576	DED TANGKIANG	2024	1.319.799.661	-	-	-	-	2024	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
893	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	577	DED CALANG	2024	1.499.446.025	-	-	-	-	2024	5 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
894	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	578	REVIEW DESIGN KERUSAKAN DERMAGA KAIMANA	2024	99.012.000	-	-	-	-	2024	12 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
895	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	115	DED Donggala	2016	615.183.000	-	-	✓	-	2016	12 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
896	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	123	DED Sofifi	2016	813.120.000	-	-	✓	-	2016	12 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
897	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	126	FS, RIP & SID Gane Dalam	2016	1.726.400.000	-	-	✓	-	2016	12 Tahun	Tidak	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
898	439200	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	133	STUDI RIP DLKR DLKP BANDA NEIRA	2024	910.000	✓	-	-	✓	2024	12 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN PUSAT	
899	439454	PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	8010101001	Software Komputer	25	IBM WEBSPHERE PORTAL SOFTWARE	2010	1.287.000.000	✓	-	-	-	2010	12 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	
900	439454	PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	8010101001	Software Komputer	30	MONITORING TOOL	2010	308.500.000	-	-	-	-	2010	12 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	
901	439454	PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	8010101001	Software Komputer	56	SOFTWARE LISENSI NETWORK	2010	3.000.000	-	-	-	-	2010	11 Tahun	Tidak	PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	
902	439454	PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	8010101001	Software Komputer	79	SOFTWARE LISENSI DASHBORD	2010	108.000.000	-	-	-	-	2010	11 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	
903	439454	PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	8010101001	Software Komputer	80	SOFTWARE LISENSI DASHBORD	2010	108.000.000	-	-	-	-	2010	11 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	
904	439454	PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	8010101001	Software Komputer	81	APLIKASI	2010	2.800.000.000	-	-	-	-	2010	5 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	
905	439454	PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	8010101001	Software Komputer	82		2010	11.460.679.960	-	-	-	-	2010	3 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	
906	439454	PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	8010101001	Software Komputer	83		2011	525.950.000	-	-	-	-	2011	11 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	
907	439454	PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	8010101001	Software Komputer	84		2011	844.623.000	-	-	-	-	2011	11 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	
908	439454	PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	8010101001	Software Komputer	85		2011	3.095.007.500	-	-	-	-	2011	11 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	
909	439454	PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	8010101001	Software Komputer	86	PEM APLK ANGLA PERINTIS	2017	667.653.500	-	-	-	-	2017	5 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	
910	439454	PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	8010101001	Software Komputer	87	logistic communication system	2019	3.408.977.000	-	-	-	-	2019	3 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	
911	439454	PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	8010101001	Software Komputer	88	APLIKASI SIPERKAPAL	2022	947.107.500	-	-	-	✓	2022	5 Tahun	Bermanfaat	PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	
912	439460	PENGEMBANGAN KENAVIGASIAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	1		2014	1.575.750.000	✓	-	-	✓	2014	10 Tahun	Bermanfaat	PENGEMBANGAN KENAVIGASIAN PUSAT	

NO	KODE SATKER	NAMA UPT/SATKER	URAIAN BMN				TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (RP)	MANFAAT ASET TAK BERWUJUD				WAKTU DIRASAKANNYA MANFAAT	DURASI KEMANFAATAN ASET TAK BERWUJUD	RELEVANSI SAAT INI (BERMANFAAT/TIDAK)	UNIT KERJA YANG MEMANFAATKAN	KETERANGAN
			KODE BARANG	JENIS ATB	NUP	NAMA BARANG			NILAI EKONOMI	MANFAAT KEILMUAN	MANFAAT SOSIAL	MANFAAT LAINNYA					
913	439460	PENGEMBANGAN KENAVIGASIAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	2		2015	55.000.000	✓	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENGEMBANGAN KENAVIGASIAN PUSAT	
914	439460	PENGEMBANGAN KENAVIGASIAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	3		2015	529.375.000	✓	-	-	✓	2015	10 Tahun	Bermanfaat	PENGEMBANGAN KENAVIGASIAN PUSAT	
915	439460	PENGEMBANGAN KENAVIGASIAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	4	Perambuan	2018	53.900.000	✓	-	-	✓	2018	10 Tahun	Bermanfaat	PENGEMBANGAN KENAVIGASIAN PUSAT	
916	439460	PENGEMBANGAN KENAVIGASIAN PUSAT	8010101001	Software Komputer	5	Risk Assesment	2019	190.382.500	✓	-	-	✓	2019	10 Tahun	Bermanfaat	PENGEMBANGAN KENAVIGASIAN PUSAT	
917	439460	PENGEMBANGAN KENAVIGASIAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	7	SID Jetty	2015	2.904.415.000	✓	✓	-	-	2015	5 Tahun	Bermanfaat	PENGEMBANGAN KENAVIGASIAN PUSAT	
918	439460	PENGEMBANGAN KENAVIGASIAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	8	DED Dermaga	2016	1.582.812.000	✓	✓	-	-	2016	5 Tahun	Bermanfaat	PENGEMBANGAN KENAVIGASIAN PUSAT	
919	439460	PENGEMBANGAN KENAVIGASIAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	9	SID P Jemur	2016	1.690.381.000	✓	✓	-	-	2016	5 Tahun	Bermanfaat	PENGEMBANGAN KENAVIGASIAN PUSAT	
920	439460	PENGEMBANGAN KENAVIGASIAN PUSAT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	10	SID P Lawin	2016	1.700.930.000	✓	✓	-	-	2016	5 Tahun	Bermanfaat	PENGEMBANGAN KENAVIGASIAN PUSAT	
921	606301	BALAI KESEHATAN KERJA PELAYARAN	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	1	Website BKKP + Aplikasi	2013	230.964.500	✓	-	-	-	2013	Tidak terbatas	Bermanfaat	BALAI KESEHATAN KERJA PELAYARAN	
922	606301	BALAI KESEHATAN KERJA PELAYARAN	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	3	I-Clinic	2015	100.100.000	✓	-	-	-	2015	Tidak terbatas	Bermanfaat	BALAI KESEHATAN KERJA PELAYARAN	
923	606301	BALAI KESEHATAN KERJA PELAYARAN	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	4	Lokal	2021	47.520.000	✓	-	✓	-	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	BALAI KESEHATAN KERJA PELAYARAN	
924	606301	BALAI KESEHATAN KERJA PELAYARAN	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	5	System Akutansi Keuangan	2022	99.012.000	✓	-	-	-	2022	Tidak terbatas	Bermanfaat	BALAI KESEHATAN KERJA PELAYARAN	
925	606301	BALAI KESEHATAN KERJA PELAYARAN	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	6	Lims_005	2023	159.840.000	✓	-	-	-	2023	Tidak terbatas	Bermanfaat	BALAI KESEHATAN KERJA PELAYARAN	
926	652495	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN MUARA ANGKE	8010101001	Software Komputer	1	Aplication, Dekstop, Mobile Aplication	2019	8.800.000	-	✓	✓	-	2019	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN MUARA ANGKE	
927	652495	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN MUARA ANGKE	8010101001	Software Komputer	2	Aplication, Dekstop, Mobile Aplication	2019	8.800.000	-	-	✓	-	6 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN MUARA ANGKE	
928	652495	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN MUARA ANGKE	8010101001	Software Komputer	3	Aplication, Dekstop, Mobile Aplication	2019	8.800.000	-	-	✓	-	6 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN MUARA ANGKE	
929	652495	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN MUARA ANGKE	8010101001	Software Komputer	4	Mobile App Verification	2019	7.700.000	-	-	✓	-	6 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN MUARA ANGKE	
930	652495	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN MUARA ANGKE	8010101001	Software Komputer	5	Web Monitoring E-Pas	2019	6.600.000	-	-	✓	-	6 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN MUARA ANGKE	
931	21140	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PATIMBAN	8010101001	Software Komputer	1	APLIKASI PELAYANAN KAPAL DAN BARANG TERPADU	2020	995.522.000	✓	-	-	-	2020	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PATIMBAN	
932	21140	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PATIMBAN	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	STUDI PENGADAAN TANAH THP 2	2020	532.510.000	✓	-	-	-	2020	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PATIMBAN	
933	21140	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PATIMBAN	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	2	JASA APRAISAL TANAH PENGGAN	2020	189.000.000	✓	-	-	-	2020	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PATIMBAN	
934	21140	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PATIMBAN	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	3	SERTIFIKASI ISPS CODE	2020	152.851.050	✓	-	-	-	2020	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PATIMBAN	
935	21140	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PATIMBAN	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	4	PERENC MIX USE BACKUP AREA	2020	99.962.500	✓	-	-	-	2020	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PATIMBAN	
936	21140	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PATIMBAN	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	5	-	2021	99.467.000	✓	-	-	-	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PATIMBAN	
937	21140	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PATIMBAN	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	6	KPBU Patimban	2021	2.144.691.500	-	-	✓	-	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PATIMBAN	
938	21140	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PATIMBAN	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	7	DED Fase 1-2 (DED Paket 5&6)	2022	47.207.712.832	-	-	✓	-	2022	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PATIMBAN	
939	21140	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PATIMBAN	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	1	Laporan	2019	1.719.739.000	-	✓	-	-	2019	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PATIMBAN	
940	21140	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PATIMBAN	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	2	Laporan	2019	875.500.000	-	✓	-	-	2019	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PATIMBAN	
941	21140	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PATIMBAN	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	3	VIDEO 3D BACKUP AREA	2020	88.316.000	-	-	-	-	2020	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PATIMBAN	
942	21140	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PATIMBAN	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	5	Studi	2022	97.914.500	-	-	✓	-	2022	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PATIMBAN	
943	21140	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PATIMBAN	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	6	Studi Kelayakan Pengadaan Tanah Tahap II Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban	2022	1.290.097.500	-	-	✓	-	2022	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PATIMBAN	
944	21140	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PATIMBAN	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	7	Studi Review Rencana Induk Pelabuhan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban	2022	1.379.952.000	-	-	✓	-	2022	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PATIMBAN	
945	21140	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PATIMBAN	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	8	Studi Projek Managemen Unit (PMU) Pelaksanaan Proyek Pembangunan dan Kerjasama Pemanfaatan Aset Pelabuhan	2022	810.078.000	-	-	✓	-	2022	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PATIMBAN	
946	21140	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PATIMBAN	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	9	Studi DED Crosing Jalan Lingkungan pada Backup Area Pelabuhan Patimban	2022	568.930.500	-	-	✓	-	2022	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PATIMBAN	
947	412817	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN CIREBON	8010101001	Software Komputer	2	Software Komputer	2015	2.885.740.000	✓	-	-	-	2015	Tidak terbatas	Tidak	KANTOR KSOP KELAS II CIREBON	
948	412817	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN CIREBON	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	2	DED	2024	183.463.500	✓	-	-	-	2024	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KSOP KELAS II CIREBON	
949	521292	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN PELABUHAN RATU	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	Reviu SID Pelabuhan Laut Pelabuhan Ratu, Prov. Jawa Barat	2015	691.064.000	✓	-	-	-	2015	Tidak terbatas	Bermanfaat	UPP PELABUHANRATU	
950	412823	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TANJUNG EMAS	8010101001	Software Komputer	1	Internet Security Antivirus	2015	715.000	✓	✓	✓	-	2015	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TANJUNG EMAS	

NO	KODE SATKER	NAMA UPT/SATKER	URAIAN BMN				TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (RP)	MANFAAT ASET TAK BERWUJUD				WAKTU DIRASAKANNYA MANFAAT	DURASI KEMANFAATAN ASET TAK BERWUJUD	RELEVANSI SAAT INI (BERMANFAAT/TIDAK)	UNIT KERJA YANG MEMANFAATKAN	KETERANGAN
			KODE BARANG	JENIS ATB	NUP	NAMA BARANG			NILAI EKONOMI	MANFAAT KEILMUAN	MANFAAT SOSIAL	MANFAAT LAINNYA					
951	412823	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TANJUNG EMAS	8010101001	Software Komputer	2	Internet Security Antivirus	2015	715.000	✓	✓	✓	-	2015	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TANJUNG EMAS	
952	412823	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TANJUNG EMAS	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	1	Sistem informasi	2014	927.100.000	✓	✓	✓	-	2014	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TANJUNG EMAS	
953	412832	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TEGAL	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	Reviu SID Pelabuhan Laut Tegal, Prov. Jawa Tengah	2015	678.150.000	-	✓	-	-	10 Tahun	Tidak terbatas	Tidak	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TEGAL	
954	412832	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TEGAL	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	2	DED Gedung Kantor	2023	298.306.000	✓	-	-	-	5 (lima) Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TEGAL	
955	412879	DISTRIK NAVIGASI KELAS II TANJUNG EMAS	8010101001	Software Komputer	7	Auto Processed Software- di Pengamatan Laut	2020	605.000.000	-	-	-	✓	2020	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS II TANJUNG EMAS	
956	412879	DISTRIK NAVIGASI KELAS II TANJUNG EMAS	8010101001	Software Komputer	8	Acquisition Software- di Pengamatan Laut	2020	418.000.000	-	-	-	✓	2020	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS II TANJUNG EMAS	
957	412879	DISTRIK NAVIGASI KELAS II TANJUNG EMAS	8010101001	Software Komputer	9	Tide Processing Software-di Pengamatan Laut	2020	143.000.000	-	-	-	✓	2020	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS II TANJUNG EMAS	
958	412879	DISTRIK NAVIGASI KELAS II TANJUNG EMAS	8010101001	Software Komputer	10	Master Software for Monitoring-di VTS	2016	630.000.000	-	-	-	✓	2016	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS II TANJUNG EMAS	
959	412879	DISTRIK NAVIGASI KELAS II TANJUNG EMAS	8010101001	Software Komputer	11	Network Monitoring System-di VTS	2016	75.000.000	-	-	-	✓	2016	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS II TANJUNG EMAS	
960	412879	DISTRIK NAVIGASI KELAS II TANJUNG EMAS	8010101001	Software Komputer	12	AIS Sensor Software Moduls-di VTS	2016	178.000.000	-	-	-	✓	2016	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS II TANJUNG EMAS	
961	412879	DISTRIK NAVIGASI KELAS II TANJUNG EMAS	8010101001	Software Komputer	13	CCTV Software-di VTS	2016	412.000.000	-	-	-	✓	2016	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS II TANJUNG EMAS	
962	412879	DISTRIK NAVIGASI KELAS II TANJUNG EMAS	8010101001	Software Komputer	14	AIS Sensor Software-di VTS	2016	186.000.000	-	-	-	✓	2016	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS II TANJUNG EMAS	
963	412879	DISTRIK NAVIGASI KELAS II TANJUNG EMAS	8010101001	Software Komputer	15	System Server with Software-di VTS	2016	973.000.000	-	-	-	✓	2016	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS II TANJUNG EMAS	
964	412879	DISTRIK NAVIGASI KELAS II TANJUNG EMAS	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	DED Mensu Pulau Nyamuk	2021	89.540.000	-	-	-	✓	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Tanjung Emas	
965	412879	DISTRIK NAVIGASI KELAS II TANJUNG EMAS	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	4	DED VTS 4 LANTAI SEMARANG	2021	275.306.750	-	-	-	✓	2019	Tidak terbatas	Bermanfaat	Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Tanjung Emas	
966	412879	DISTRIK NAVIGASI KELAS II TANJUNG EMAS	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	8	DED Tempat Ibadah dan Gudang Logistik	2021	24.585.000	-	-	-	✓	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS II TANJUNG EMAS	
967	521332	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KARIMUN JAWA	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	5	Hasil Kajian	2020	39.479.000	-	-	-	-	2020	Tidak terbatas	Tidak	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KARIMUN JAWA	
968	412911	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PANARUKAN	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	-	2016	587.691.888	-	✓	-	-	2018	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PANARUKAN	
969	412920	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PROBOLINGGO	8010101001	Software Komputer	1	TKTM PM Buku Pelaut kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Probolinggo	2021	376.761.000	✓	✓	✓	✓	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PROBOLINGGO	
970	412951	DISTRIK NAVIGASI KELAS I TANJUNG PERAK	8010101001	Software Komputer	2		2016	157.300.000	-	-	-	✓	1 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS I TANJUNG PERAK	
971	412951	DISTRIK NAVIGASI KELAS I TANJUNG PERAK	8010101001	Software Komputer	4	DATA ACQUISITION AND PROCESSING	2016	109.233.300	-	-	-	✓	1 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS I TANJUNG PERAK	
972	412951	DISTRIK NAVIGASI KELAS I TANJUNG PERAK	8010101001	Software Komputer	5	-	2017	75.900.000	-	-	-	✓	1 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS I TANJUNG PERAK	
973	412951	DISTRIK NAVIGASI KELAS I TANJUNG PERAK	8010101001	Software Komputer	6	-	2017	75.900.000	-	-	-	✓	1 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS I TANJUNG PERAK	
974	412951	DISTRIK NAVIGASI KELAS I TANJUNG PERAK	8010101001	Software Komputer	7	GMDSS SOFTWARE	2018	90.516.250	-	-	-	✓	1 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS I TANJUNG PERAK	
975	412951	DISTRIK NAVIGASI KELAS I TANJUNG PERAK	8010101001	Software Komputer	8	-	2019	98.450.000	-	-	-	✓	1 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS I TANJUNG PERAK	
976	412951	DISTRIK NAVIGASI KELAS I TANJUNG PERAK	8010101001	Software Komputer	9	APLIKASI PNBP	2020	127.380.000	-	-	-	✓	5 Tahun	Tidak terbatas	Tidak	DISTRIK NAVIGASI KELAS I TANJUNG PERAK	
977	412951	DISTRIK NAVIGASI KELAS I TANJUNG PERAK	8010101001	Software Komputer	10		2013	61.485.191	-	-	-	✓	3 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS I TANJUNG PERAK	
978	412951	DISTRIK NAVIGASI KELAS I TANJUNG PERAK	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	DED Mensu Bawean T.20 M Beton	2023	63.670.000	-	-	-	✓	1 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS I TANJUNG PERAK	
979	412951	DISTRIK NAVIGASI KELAS I TANJUNG PERAK	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	2	DED Mensu Beton 40 M Pulau Mamburit	2023	84.020.000	-	-	-	✓	5 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS I TANJUNG PERAK	
980	412951	DISTRIK NAVIGASI KELAS I TANJUNG PERAK	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	3	DED Pembangunan Ramsu	2022	98.875.000	-	-	-	✓	3 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS I TANJUNG PERAK	
981	412951	DISTRIK NAVIGASI KELAS I TANJUNG PERAK	8010101049	Electric Navigation Chart (ENC)	1	ENC KN BSU	2020	37.675.000	-	-	-	✓	3 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS I TANJUNG PERAK	
982	412951	DISTRIK NAVIGASI KELAS I TANJUNG PERAK	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	1		2019	54.230.000	-	-	-	✓	3 Tahun	Tidak terbatas	Tidak	DISTRIK NAVIGASI KELAS I TANJUNG PERAK	
983	412951	DISTRIK NAVIGASI KELAS I TANJUNG PERAK	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	2		2019	54.395.000	-	-	-	✓	3 Tahun	Tidak terbatas	Tidak	DISTRIK NAVIGASI KELAS I TANJUNG PERAK	
984	412951	DISTRIK NAVIGASI KELAS I TANJUNG PERAK	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	3		2019	69.300.000	-	-	-	✓	3 Tahun	Tidak terbatas	Tidak	DISTRIK NAVIGASI KELAS I TANJUNG PERAK	
985	412951	DISTRIK NAVIGASI KELAS I TANJUNG PERAK	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	4		2019	39.270.000	-	-	-	-	5 Tahun	Tidak terbatas	Tidak	DISTRIK NAVIGASI KELAS I TANJUNG PERAK	
986	412951	DISTRIK NAVIGASI KELAS I TANJUNG PERAK	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	5		2019	39.490.000	-	-	-	-	5 Tahun	Tidak terbatas	Tidak	DISTRIK NAVIGASI KELAS I TANJUNG PERAK	
987	412951	DISTRIK NAVIGASI KELAS I TANJUNG PERAK	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	6	-	2019	99.555.500	-	-	-	✓	5 Tahun	Tidak terbatas	Tidak	DISTRIK NAVIGASI KELAS I TANJUNG PERAK	
988	412951	DISTRIK NAVIGASI KELAS I TANJUNG PERAK	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	7	DED KN.MASALEMBO	2024	92.685.000	-	-	-	✓	5 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS I TANJUNG PERAK	

NO	KODE SATKER	NAMA UPT/SATKER	URAIAN BMN				TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (RP)	MANFAAT ASET TAK BERWUJUD				WAKTU DIRASAKANNYA MANFAAT	DURASI KEMANFAATAN ASET TAK BERWUJUD	RELEVANSI SAAT INI (BERMANFAAT/TIDAK)	UNIT KERJA YANG MEMANFAATKAN	KETERANGAN
			KODE BARANG	JENIS ATB	NUP	NAMA BARANG			NILAI EKONOMI	MANFAAT KEILMUAN	MANFAAT SOSIAL	MANFAAT LAINNYA					
989	412951	DISTRIK NAVIGASI KELAS I TANJUNG PERAK	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	8	DED KN. BIMA SAKTI UTAMA	2024	92.685.000	-	-	-	✓	5 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS I TANJUNG PERAK	
990	412951	DISTRIK NAVIGASI KELAS I TANJUNG PERAK	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	9	DED HYDRANT DERMAGA	2024	92.685.000	-	-	-	✓	5 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS I TANJUNG PERAK	
991	413428	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PERAK	8010101001	Software Komputer	4	MICROSOFT OFFICE APPLE	2017	1.980.000	-	-	-	✓	2017	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PERAK	
992	413428	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PERAK	8010101001	Software Komputer	5	MICROSOFT OFFICE APPLE	2017	1.980.000	-	-	-	✓	2017	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PERAK	
993	413428	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PERAK	8010101001	Software Komputer	6	COSTUM	2020	242.235.930	✓	-	-	-	2020	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PERAK	
994	413428	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PERAK	8010101001	Software Komputer	7	Sistem Pengarsipan	2016	217.805.500	-	-	-	-	2016	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PERAK	
995	413428	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PERAK	8010101001	Software Komputer	9	TKTM SID 2022 kepada Kantor Kesyahbandaran Utama Tg Perak Surabaya	2022	156.015.933	-	-	-	-	2022	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PERAK	
996	413428	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PERAK	8010101001	Software Komputer	10	PROGRAM INFORMASI PUBLIK	2012	7.700.000	-	-	-	✓	2012	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PERAK	
997	413428	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PERAK	8010101001	Software Komputer	11	software komputer	2021	195.832.000	-	-	-	✓	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PERAK	
998	413428	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PERAK	8010101001	Software Komputer	12		2015	90.601.000	-	-	-	✓	2015	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PERAK	
999	413428	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PERAK	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	STUDI PERENC PEMB GEDUNG	2015	694.800.000	-	-	-	✓	2015	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PERAK	
1000	413428	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PERAK	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	2	Studi Penyusunan Rencana dan Rencana Teknis Pelabuhan Tanjung Perak	2023	583.134.948	-	-	-	✓	2023	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PERAK	
1001	413428	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PERAK	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	3	Detail Engineering Design Docking Kapal Negara	2024	99.900.000	-	-	-	-	2024	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PERAK	
1002	413428	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PERAK	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	4	RIP Tanah Ampo	2024	987.347.830	-	-	-	✓	2024	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PERAK	
1003	413428	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PERAK	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	5	RIP Labuhan Haji	2024	965.469.730	-	-	-	✓	2024	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PERAK	
1004	413428	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PERAK	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	6	DED Gedung Perkantoran KSOPU Tg Perak	2024	595.861.320	-	-	-	✓	2024	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PERAK	
1005	413730	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TANJUNG WANGI	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	DED Pembangunan Gedung Kantor	2023	482.263.585	✓	✓	✓	✓	s.d. Pembangunan Fisik Selesai	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TANJUNG WANGI	
1006	521353	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SAPEKEN	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	RIP Kangean	2021	1.273.235.000	✓	-	-	-	10 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SAPEKEN	
1007	521360	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III MASALEMBU	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	DED Pelabuhan Laut Masalembo, Prov. Jawa Timur	2015	358.070.900	✓	-	-	-	2015	Tidak terbatas	Tidak	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III MASALEMBU	
1008	521395	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS III TANJUNG PAKIS	8010101001	Software Komputer	2	-	2015	3.105.740.000	✓	✓	✓	✓	7 Thn	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS III TANJUNG PAKIS	
1009	521395	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS III TANJUNG PAKIS	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	-	2016	594.034.087	✓	✓	✓	✓	5 Thn	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS III TANJUNG PAKIS	
1010	521395	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS III TANJUNG PAKIS	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	2	SID Pelabuhan Laut Pacitan	2014	719.840.000	✓	✓	✓	✓	5 Thn	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS III TANJUNG PAKIS	
1011	521395	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS III TANJUNG PAKIS	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	3	DED	2024	473.600.000	-	✓	-	✓	5 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS III TANJUNG PAKIS	
1012	535841	PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI SURABAYA	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	3	DED Master Plan Bangunan Fasilitas Kantor PLP	2024	1.342.810.629	-	-	-	✓	2024	Tidak terbatas	Bermanfaat	PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI SURABAYA	
1013	535841	PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI SURABAYA	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	1	DED Mess Punggahan	2023	500.761.600	-	-	-	✓	2023	Tidak terbatas	Bermanfaat	PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI SURABAYA	
1014	535841	PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI SURABAYA	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	2	DED Rumah Dinas Negara	2023	302.814.528	-	-	-	✓	2023	Tidak terbatas	Bermanfaat	PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI SURABAYA	
1015	412967	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN SABANG	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	perencanaan docking	2024	99.800.000	✓	-	-	-	1 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN SABANG	
1016	412973	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KUALA LANGSA	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	DED	2021	99.825.000	✓	-	-	-	4	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KUALA LANGSA	
1017	413002	DISTRIK NAVIGASI SABANG	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	2	DED / KAJIAN	2020	375.522.600	✓	-	-	-	4 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI SABANG	
1018	413002	DISTRIK NAVIGASI SABANG	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	4	DED / KAJIAN	2020	195.800.000	✓	-	-	-	4 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI SABANG	
1019	413002	DISTRIK NAVIGASI SABANG	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	5	DED / KAJIAN	2020	194.900.000	✓	-	-	-	4 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI SABANG	
1020	413002	DISTRIK NAVIGASI SABANG	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	6	DED / KAJIAN	2020	471.024.000	✓	-	-	-	4 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI SABANG	
1021	289470	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PANGKALAN SUSU	8010101001	Software Komputer	1	Software	2019	361.900.000	✓	-	-	-	2019-Sekarang	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PANGKALAN SUSU	
1022	413024	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN SIBOLGA	8010101001	Software Komputer	1	Software	2019	361.900.000	-	✓	-	-	2019-Sekarang	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN SIBOLGA	
1023	413055	DISTRIK NAVIGASI BELAWAN	8010101001	Software Komputer	5	RF Field Strenght Analyzer	2013	61.485.191	-	-	-	-	2013	Tidak terbatas	Tidak	DISTRIK NAVIGASI BELAWAN	
1024	413055	DISTRIK NAVIGASI BELAWAN	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	DED REPLACE MENSU NIPAH LARANGAN DSI-315 KONSTRUKSI BETON BESERTA SARANA PENDUKUNG	2024	512.887.980	✓	✓	-	-	2024	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI BELAWAN	
1025	413055	DISTRIK NAVIGASI BELAWAN	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	2	SID Pembangunan Break Water dan Jetty Mensu Pulau Pondang DSI-500	2024	711.577.980	✓	✓	-	-	2024	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI BELAWAN	
1026	413055	DISTRIK NAVIGASI BELAWAN	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	3	DED Replacement Rambu Suar Tuntun Belakang Langsa DSI 190	2024	165.096.585	✓	✓	-	-	2024	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI BELAWAN	

NO	KODE SATKER	NAMA UPT/SATKER	URAIAN BMN				TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (RP)	MANFAAT ASET TAK BERWUJUD				WAKTU DIRASAKANNYA MANFAAT	DURASI KEMANFAATAN ASET TAK BERWUJUD	RELEVANSI SAAT INI (BERMANFAAT/TIDAK)	UNIT KERJA YANG MEMANFAATKAN	KETERANGAN
			KODE BARANG	JENIS ATB	NUP	NAMA BARANG			NILAI EKONOMI	MANFAAT KEILMUAN	MANFAAT SOSIAL	MANFAAT LAINNYA					
1027	413061	DISTRIK NAVIGASI SIBOLGA	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	1	Rambu Suar Gosong Ular	2024	99.080.000	✓	✓	-	-	2024	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI SIBOLGA	
1028	413061	DISTRIK NAVIGASI SIBOLGA	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	2	Rambu Suar Karang Gori-gori	2024	96.900.000	✓	✓	-	-	2024	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI SIBOLGA	
1029	413061	DISTRIK NAVIGASI SIBOLGA	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	3	Rambu Suar Gosong Lawandra	2024	97.950.000	✓	✓	-	-	2024	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI SIBOLGA	
1030	413080	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KUALA TANJUNG	8010101001	Software Komputer	1	TKTM PM Buku Pelaut kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kuala Tanjung	2021	378.764.375	✓	✓	✓	✓	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KUALA TANJUNG	
1031	413417	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA BELAWAN	8010101001	Software Komputer	5	TKTM PM Buku Pelaut kepada Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan	2021	40.700.000	-	-	-	✓	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA BELAWAN	
1032	413417	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA BELAWAN	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	2	-	2008	223.693.996	-	-	-	✓	2008	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA BELAWAN	
1033	413070	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TELUK BAYUR	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	DED FASPEL sisi Darat Pelabuhan Carocok Painan	2021	99.649.000	-	-	-	✓	4 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TELUK BAYUR	
1034	413070	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TELUK BAYUR	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	2	STUDI RIP TELUK TAPANG	2019	1.060.070.000	-	-	-	✓	6 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TELUK BAYUR	
1035	413086	DISTRIK NAVIGASI TELUK BAYUR	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	DED Talud Pangkal	2024	115.624.912	-	-	-	✓	4 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI TELUK BAYUR	
1036	413086	DISTRIK NAVIGASI TELUK BAYUR	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	2	DED BANGUNAN TALUD KARSIK	2024	261.649.370	-	-	-	✓	6 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI TELUK BAYUR	
1037	559243	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SIKAKAP	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	14		2017	426.317.500	-	✓	-	-	7 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SIKAKAP	
1038	559243	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SIKAKAP	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	15		2017	452.745.000	-	✓	-	-	7 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SIKAKAP	
1039	559243	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SIKAKAP	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	16		2017	494.500.000	-	✓	-	-	7 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SIKAKAP	
1040	413092	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN DUMAI	8010101001	Software Komputer	2		2015	2.885.740.000	-	-	✓	-	2016	Tidak terbatas	Bermanfaat	KSOP DUMAI	
1041	413092	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN DUMAI	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	1	STUDI DED	2016	609.994.000	-	✓	-	-	2016	Tidak terbatas	Tidak	KUPP KUALA GAUNG (Prop Riau)	
1042	413092	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN DUMAI	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	2	STUDI DED	2016	662.804.000	-	✓	-	-	2016	Tidak terbatas	Tidak	KUPP SIROMBU (Prop. Sumatera Utara)	
1043	413092	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN DUMAI	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	3	STUDI DED	2016	793.469.000	-	✓	-	-	2016	Tidak terbatas	Tidak	KUPP SIBIGO (Prop. Sumatera Utara)	
1044	413092	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN DUMAI	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	4	STUDI DED	2016	685.489.000	-	✓	-	-	2016	Tidak terbatas	Tidak	KUPP PULAU TELLO ((Prop. Sumatera Utara)	
1045	413106	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II PEKANBARU	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	Perencanaan pembangunan gedung kantor	2020	256.482.000	✓	✓	✓	✓	2020	Tidak terbatas	Tidak	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II PEKANBARU	ASET TIDAK BERWUJUD BERUPA, DETAIL ENGINEERING
1046	413137	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN SELAT PANJANG	8010101001	Software Komputer	1	Software	2019	361.900.000	-	✓	-	-	2019	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN SELAT PANJANG	
1047	413137	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN SELAT PANJANG	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	STUDI RIP MERANTI	2019	1.171.005.000	-	-	-	✓	2022	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN SELAT PANJANG	
1048	413225	DISTRIK NAVIGASI DUMAI	8010101001	Software Komputer	2	Aplikas Mistic dan Marcom Series	2019	149.862.900	-	-	✓	✓	2020	Tidak terbatas	Tidak	DISTRIK NAVIGASI DUMAI	Mistic dan Marcomseries
1049	413225	DISTRIK NAVIGASI DUMAI	8010101001	Software Komputer	3	-	2013	61.485.191	-	-	✓	✓	2014	Tidak terbatas	Tidak	DISTRIK NAVIGASI DUMAI	SIMASNAV
1050	413225	DISTRIK NAVIGASI DUMAI	8010101001	Software Komputer	4	GNSS Processing Software	2024	316.136.250	-	-	✓	-	2019	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI DUMAI	GNSS Processing Software
1051	413240	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TALANG DUKUH	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	DED	2024	74.286.750	-	-	-	✓	2 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	Kantor KSOP Kelas III Talang Duku	DED Pembangunan Mess TA 2025
1052	413256	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I PALEMBANG	8010101001	Software Komputer	2	SOFTWARE	2015	2.885.740.000	-	-	✓	-	5 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I PALEMBANG	
1053	413256	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I PALEMBANG	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	KPBU New Palembang Tg Carat	2021	99.990.000	-	✓	-	-	5 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I PALEMBANG	
1054	413256	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I PALEMBANG	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	2	DED Pembangunan Gedung Kantor KSOP Palembang yang akan dibangun di Mess Perwira Jalan Perintis Kemerdekaan Boom Baru	2024	438.924.750	-	✓	-	-	5 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I PALEMBANG	
1055	413322	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN SINTETE	8010101001	Software Komputer	1	Software	2019	361.900.000	-	-	✓	-	2019	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN SINTETE	
1056	413390	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN PADANG TIKAR	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	STUDI DED PADANG TIKAR	2018	654.901.000	-	-	✓	-	2018	Tidak terbatas	Tidak	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN PADANG TIKAR	
1057	413545	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KETAPANG	8010101006	Hak Lainnya	1	DED Gedung dan Bangunan Kantor, Desa Kalinilam	2024	96.736.500	-	-	-	-	2024	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KETAPANG	
1058	287139	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN SAMPIT	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	Survey Investigasi Design (SID) dan Detail Engineering Design (DED) Replacement Dermaga Kanal Patroli Bagendengan	2019	295.000.000	-	-	-	-	2019	Tidak terbatas	Tidak	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN SAMPIT	
1059	287143	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PULANG PISAU	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	RIP Bahaur	2021	1.344.900.000	✓	✓	✓	✓	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PULANG PISAU	
1060	287143	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PULANG PISAU	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	2	DED Bahaur	2021	1.154.483.000	✓	✓	✓	✓	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PULANG PISAU	
1061	287143	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PULANG PISAU	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	3	DED Batanjung	2024	322.000.000	✓	✓	✓	✓	2024	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PULANG PISAU	
1062	287171	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANJARMASIN	8010101001	Software Komputer	2	-	2019	41.250.000	-	✓	-	-	2019	Tidak terbatas	Tidak	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANJARMASIN	
1063	287171	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANJARMASIN	8010101001	Software Komputer	3	APLIKASI BANJARPORTNET	2020	65.000.000	-	✓	-	-	2020	Tidak terbatas	Tidak	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANJARMASIN	
1064	287171	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANJARMASIN	8010101001	Software Komputer	4	APLIKASI PERIJINAN TERMINAL	2020	30.000.000	-	✓	-	-	2020	Tidak terbatas	Tidak	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANJARMASIN	

NO	KODE SATKER	NAMA UPT/SATKER	URAIAN BMN				TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (RP)	MANFAAT ASET TAK BERWUJUD				WAKTU DIRASAKANNYA MANFAAT	DURASI KEMANFAATAN ASET TAK BERWUJUD	RELEVANSI SAAT INI (BERMANFAAT/TIDAK)	UNIT KERJA YANG MEMANFAATKAN	KETERANGAN
			KODE BARANG	JENIS ATB	NUP	NAMA BARANG			NILAI EKONOMI	MANFAAT KEILMUAN	MANFAAT SOSIAL	MANFAAT LAINNYA					
1065	287171	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANJARMASIN	8010101001	Software Komputer	5	APLIKASI VOKASOP	2020	30.000.000	-	✓	-	-	2020	Tidak terbatas	Tidak	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANJARMASIN	
1066	287171	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANJARMASIN	8010101001	Software Komputer	6	PERALATAN VTS	2015	2.885.740.000	-	✓	-	-	2015	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANJARMASIN	
1067	287171	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANJARMASIN	8010101001	Software Komputer	7	APLIKASI SISKA	2022	177.600.000	-	-	✓	-	2022	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANJARMASIN	
1068	287171	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANJARMASIN	8010101001	Software Komputer	8	Aplikasi Sistem Operasional Pelabuhan, BUP, TUKS, dan Tersus	2023	1.118.191.500	-	✓	-	-	2023	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANJARMASIN	
1069	287171	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANJARMASIN	8010101001	Software Komputer	9	SOFTWARE SISTEM CAKRAWALA	2024	350.000.000	-	✓	-	-	2024	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANJARMASIN	
1070	287185	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II KOTABARU - BATULICIN	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	STUDI DED MARABATUAN	2018	99.506.000	✓	✓	✓	-	2018	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II KOTABARU - BATULICIN	
1071	413410	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KINTAP	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	DED Pelaihari, Prov. Kalimantan Selatan	2016	729.462.000	✓	✓	✓	-	2016	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KINTAP	
1072	287211	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I SAMARINDA	8010101001	Software Komputer	2	Software	2015	2.885.740.000	✓	✓	-	✓	2015	Tidak terbatas	Bermanfaat	KSOP SAMARINDA	
1073	287228	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BALIKPAPAN	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	DED	2022	138.398.000	-	-	-	-	2024	Tidak terbatas	Tidak	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BALIKPAPAN	
1074	287228	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BALIKPAPAN	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	2	DED	2022	67.450.000	-	-	-	-	2024	Tidak terbatas	Tidak	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BALIKPAPAN	
1075	287228	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BALIKPAPAN	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	3	DED	2024	44.400.000	✓	-	-	-	2024	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BALIKPAPAN	
1076	287228	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BALIKPAPAN	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	4	DED	2024	49.950.000	✓	-	-	-	2024	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BALIKPAPAN	
1077	287260	DISTRIK NAVIGASI SAMARINDA	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	2	DED Pagar Tanah Jln. Telkom	2018	49.830.000	✓	-	-	-	Tidak terbatas	Tidak terbatas	Bermanfaat	Disnav Samarinda	
1078	287260	DISTRIK NAVIGASI SAMARINDA	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	3	DED Sarpras	2020	72.677.000	✓	-	-	-	Tidak terbatas	Tidak terbatas	Bermanfaat	Disnav Samarinda	
1079	289822	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS I SANGKULIRANG	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	2	Studi RIP Maloy Sangkulirang	2019	1.281.775.000	-	-	-	-	2019	Tidak terbatas	Tidak	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS I SANGKULIRANG	
1080	289843	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TANJUNG REDEP	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	STUDI RIP MATARITIP	2019	1.150.259.000	✓	✓	✓	✓	2019	Tidak terbatas	Bermanfaat	KUPP Kelas III Sangkulirang	
1081	413426	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KUALA SEMBOJA	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	DED/RIP	2019	866.789.000	-	-	-	✓	2019-2023	Tidak terbatas	Bermanfaat	KUPP Kuala Samboja	
1082	413426	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KUALA SEMBOJA	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	2	DED/RIP	2020	1.083.665.000	-	-	-	✓	2020-2023	Tidak terbatas	Bermanfaat	KUPP Kuala Samboja	
1083	517882	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BONTANG	8010101001	Software Komputer	2	SOFTWARE SIPOLTAD	2019	54.065.000	-	-	✓	-	2019	Tidak terbatas	Tidak	KSOP Kelas II Bontang	
1084	517882	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BONTANG	8010101001	Software Komputer	3	-	2015	3.105.740.000	-	-	✓	-	2015	Tidak terbatas	Bermanfaat	KSOP Kelas II Bontang	
1085	517882	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BONTANG	8010101001	Software Komputer	4	TKTM PM Buku Pelaut kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Bontang	2021	379.192.000	-	-	✓	-	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	KSOP Kelas II Bontang	
1086	287338	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TAHUNA	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	DED TAHUNA	2018	1.069.651.000	✓	✓	-	✓	2024	Tidak terbatas	Bermanfaat	UPP Kls II Tahuna	
1087	287338	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TAHUNA	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	2	STUDI RIP MARORE	2019	1.151.144.500	✓	✓	-	✓	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	UPP Kls II Tahuna	
1088	287338	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TAHUNA	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	3	STUDI DED MARORE	2018	99.715.000	✓	✓	-	✓	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	UPP Kls II Tahuna	
1089	287338	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TAHUNA	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	4	DED MARORE	2014	606.012.000	✓	✓	-	✓	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	UPP Kls II Tahuna	
1090	287342	DISTRIK NAVIGASI MANADO/BITUNG	8010101001	Software Komputer	2	Software data untuk RF Analyzer	2013	61.485.191	-	-	-	✓	2013	Tidak terbatas	Bermanfaat	Distrik Navigasi Type A Kelas I Bitung	
1091	287342	DISTRIK NAVIGASI MANADO/BITUNG	8010101001	Software Komputer	3	Software data untuk RF Analyzer	2013	61.485.191	-	-	-	✓	2013	Tidak terbatas	Bermanfaat	Distrik Navigasi Type A Kelas I Bitung	Doubel Catat karena proses migrasi
1092	413576	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN ULUSIAU	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	STUDI RIP TAGULANDANG	2019	1.099.505.000	✓	✓	✓	✓	2024	Tidak terbatas	Bermanfaat	UPP Kelas III Ulu Siau	
1093	413582	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN MELONGUANE	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	RIP Beo-Dapalan	2021	1.360.480.000	✓	✓	✓	✓	2026	Tidak terbatas	Bermanfaat	UPP Kelas III Melonguane	
1094	413582	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN MELONGUANE	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	2	STUDI RIP-DLKRP MIANGAS	2018	1.247.620.000	✓	✓	✓	✓	2023	Tidak terbatas	Bermanfaat	UPP Kelas III Melonguane	
1095	413582	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN MELONGUANE	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	3	RIP Marampit	2020	1.389.740.000	✓	✓	✓	✓	2025	Tidak terbatas	Bermanfaat	UPP Kelas III Melonguane	
1096	413582	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN MELONGUANE	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	4	RIP Melonguane	2020	1.075.085.000	✓	✓	✓	✓	2025	Tidak terbatas	Bermanfaat	UPP Kelas III Melonguane	
1097	413783	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I BITUNG	8010101001	Software Komputer	4	Software (Antivirus)	2015	715.000	-	✓	-	-	2016	Tidak terbatas	Tidak	KSOP Bitung	
1098	413783	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I BITUNG	8010101001	Software Komputer	5	Software (Antivirus)	2015	715.000	-	✓	-	-	2016	Tidak terbatas	Tidak	KSOP Bitung	
1099	413783	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I BITUNG	8010101001	Software Komputer	6	Software Pemanduan	2015	2.885.740.000	-	✓	-	-	2016	Tidak terbatas	Bermanfaat	KSOP Bitung	
1100	413783	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I BITUNG	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	1	Studi DED Pembangunn Gedung Kantor	2021	281.140.000	✓	-	-	-	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	KSOP Bitung	
1101	413783	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I BITUNG	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	2	Pekerjaan DED Pengembangan dan Rehabilitasi Pelabuhan Bunta Provinsi Sulteng	2021	754.150.000	✓	-	-	-	9 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	Pelabuhan Bunta	
1102	413783	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I BITUNG	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	3	Pekerjaan DED Pengembangan dan Rehabilitasi Pelabuhan Pagimana Provinsi Sulteng	2021	757.650.000	✓	-	-	-	9 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	Pelabuhan Pagimana	

NO	KODE SATKER	NAMA UPT/SATKER	URAIAN BMN				TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (RP)	MANFAAT ASET TAK BERWUJUD				WAKTU DIRASAKANNYA MANFAAT	DURASI KEMANFAATAN ASET TAK BERWUJUD	RELEVANSI SAAT INI (BERMANFAAT/TIDAK)	UNIT KERJA YANG MEMANFAATKAN	KETERANGAN
			KODE BARANG	JENIS ATB	NUP	NAMA BARANG			NILAI EKONOMI	MANFAAT KEILMUAN	MANFAAT SOSIAL	MANFAAT LAINNYA					
1103	413783	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I BITUNG	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	4	Pekerjaan DED Pengembangan dan Rehabilitasi Pelabuhan Poso Provinsi Sulteng	2021	750.050.000	✓	-	-	-	9 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	Pelabuhan Poso	
1104	413783	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I BITUNG	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	5	Pekerjaan DED Pengembangan dan Rehabilitasi Pelabuhan Maligano Provinsi Sulteng	2021	760.150.000	✓	-	-	-	9 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	Pelabuhan Maligano	
1105	413783	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I BITUNG	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	6	Pekerjaan DED Pengembangan dan Rehabilitasi Pelabuhan Raha Provinsi Sulteng	2021	746.650.000	✓	-	-	-	9 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	Pelabuhan Raha	
1106	413783	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I BITUNG	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	7	Pekerjaan DED Pengembangan dan Rehabilitasi Pelabuhan Palopo Provinsi Sulteng	2021	739.550.000	✓	-	-	-	9 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	Pelabuhan Palopo	
1107	413783	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I BITUNG	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	8	Pekerjaan DED Pengembangan dan Rehabilitasi Pelabuhan Kotabunan Provinsi Sulut	2021	739.550.000	✓	-	-	-	9 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	Pelabuhan Kotabunan	
1108	521730	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN AMURANG	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	RIP Pelabuhan Amurang	2021	1.084.008.600	-	✓	-	-	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	UPP Amurang	
1109	521751	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN LABUHAN UKI/ INEBONTO	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	STUDI RIP LABUAN UKI	2019	1.159.180.000	-	✓	-	-	2019	Tidak terbatas	Bermanfaat	Kantor UPP Kelas III Labuan Uki	
1110	535457	PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI BITUNG	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	Jasa Konsultan DED Pembangunan Rumah Dinas dan Mess	2024	88.800.000	-	-	-	✓	2025	Tidak terbatas	Bermanfaat	Pangkalan PLP Kelas II Bitung	
1111	559328	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN LIKUPANG	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	Review Studi DED Fasilitas Pelabuhan Likupang Provinsi Sulawesi Utara	2020	1.182.695.000	✓	✓	✓	✓	2020	Tidak terbatas	Bermanfaat	Kantor UPP Kelas III Likupang	
1112	287384	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN POSO	8010101001	Software Komputer	1	Software	2019	361.900.000	✓	✓	✓	-	2019	Tidak terbatas	Bermanfaat	KUPP Poso	
1113	413591	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KOLONEDALE	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	RIP Kolonedale	2021	1.355.570.000	✓	✓	-	✓	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	UPP Kolonedale	
1114	413591	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KOLONEDALE	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	2	Pelabuhan Kolonedale	2015	682.600.000	✓	✓	-	✓	2015	Tidak terbatas	Bermanfaat	UPP Kolonedale	
1115	413591	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KOLONEDALE	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	4	Pelabuhan Laut Kolonedale	2015	432.894.000	✓	✓	-	✓	2015	Tidak terbatas	Bermanfaat	UPP Kolonedale	
1116	413602	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN AMPANA	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	1	Dokumen Study RIP Pelabuhan Laut Katupat	2015	673.500.000	-	✓	-	-	2015	Tidak terbatas	Bermanfaat	UPP Ampana	
1117	413602	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN AMPANA	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	2	Dokumen Study RIP Pelabuhan Laut Kabalutan	2015	684.300.000	-	✓	-	-	2015	Tidak terbatas	Bermanfaat	UPP Ampana	
1118	413602	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN AMPANA	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	3	Dokumen Study RIP Pelabuhan Laut Lebiti	2015	683.600.000	-	✓	-	-	2015	Tidak terbatas	Bermanfaat	UPP Ampana	
1119	413602	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN AMPANA	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	4	Dokumen Study Lingkungan Pelabuhan Laut Lebiti	2015	332.200.000	-	✓	-	-	2015	Tidak terbatas	Bermanfaat	UPP Ampana	
1120	413602	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN AMPANA	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	5	Dokumen Study Lingkungan Pelabuhan Laut Kabalutan	2015	338.470.000	-	✓	-	-	2015	Tidak terbatas	Bermanfaat	UPP Ampana	
1121	413602	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN AMPANA	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	6	Dokumen Study Lingkungan Pelabuhan Laut Katupat	2015	341.220.000	-	✓	-	-	2015	Tidak terbatas	Bermanfaat	UPP Ampana	
1122	559332	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN OGOAMAS	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	AMDAL Ogoamas	2021	1.161.380.000	✓	✓	✓	✓	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Ogoamas	
1123	690780	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III BUNGKU	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	DELH Pelabuhan Bungku	2021	752.510.000	✓	✓	-	-	2015	Tidak terbatas	Bermanfaat	Kantor UPP Kelas III Bungku	-
1124	690780	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III BUNGKU	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	2	RIP Pelabuhan Laut Bungku	2020	1.260.765.000	✓	✓	-	-	2015	Tidak terbatas	Bermanfaat	Kantor UPP Kelas III Bungku	
1125	690780	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III BUNGKU	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	1	RIP Pelabuhan Laut Bungku	2015	432.894.000	✓	✓	-	-	2020	Tidak terbatas	Bermanfaat	Kantor UPP Kelas III Bungku	
1126	690780	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III BUNGKU	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	2	DELH Pelabuhan Bungku	2015	734.200.000	✓	✓	-	-	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	Kantor UPP Kelas III Bungku	
1127	287473	DISTRIK NAVIGASI KELAS I MAKASSAR	8010101001	Software Komputer	2	Software Data untuk RF Analyzer	2013	61.485.191	-	-	-	✓	2013	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS I MAKASSAR	
1128	287473	DISTRIK NAVIGASI KELAS I MAKASSAR	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	Konsultasi DED Replacement MS. Kape William	2020	98.237.150	-	✓	-	-	2020	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS I MAKASSAR	
1129	287473	DISTRIK NAVIGASI KELAS I MAKASSAR	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	2	Konsultasi SID Replacement RS.Sane-sane dan Selaya	2020	96.422.150	-	✓	-	-	2020	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS I MAKASSAR	
1130	287473	DISTRIK NAVIGASI KELAS I MAKASSAR	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	3	Konsultasi DED Replacement MS. Pasangkayu	2020	99.467.500	-	✓	-	-	2020	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS I MAKASSAR	
1131	287473	DISTRIK NAVIGASI KELAS I MAKASSAR	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	4	Konsultasi DED Replacement MS. Kodingareng	2020	98.840.500	-	✓	-	-	2020	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS I MAKASSAR	
1132	287473	DISTRIK NAVIGASI KELAS I MAKASSAR	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	5	Konsultasi DED Replacement MS. Jeneponto	2020	98.195.900	-	✓	-	-	2020	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS I MAKASSAR	
1133	287473	DISTRIK NAVIGASI KELAS I MAKASSAR	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	6	DED Rehabilitasi dan Pengembangan Dermaga Kenavigasian Distrik Navigasi Kelas I Makassar	2023	92.900.000	-	✓	-	-	2023	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS I MAKASSAR	
1134	287473	DISTRIK NAVIGASI KELAS I MAKASSAR	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	7	DED REHABILITASI MENARA SUAR DEWAKANG	2023	91.225.000	-	✓	-	-	2023	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS I MAKASSAR	
1135	287473	DISTRIK NAVIGASI KELAS I MAKASSAR	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	8	DED REHABILITASI RAMBU SUAR TANAKEKE ISLAND	2023	91.690.000	-	✓	-	-	2023	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS I MAKASSAR	
1136	287473	DISTRIK NAVIGASI KELAS I MAKASSAR	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	9	DED STUDI TEKNIS DOCKING KN AKELAMO	2024	99.900.000	-	✓	-	-	2024	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS I MAKASSAR	
1137	287473	DISTRIK NAVIGASI KELAS I MAKASSAR	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	10	Review DED Penguatan Struktur Gedung VTS	2024	99.990.000	-	✓	-	-	2024	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS I MAKASSAR	
1138	289864	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PARE-PARE	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	1	Studi Rencana Induk Pelabuhan Marabombang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulsel	2023	1.005.802.816	✓	✓	✓	-	2025	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PARE-PARE	
1139	289885	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BULU KUMBA	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	STUDI RIP BULUKUMBA	2019	1.068.512.500	-	✓	-	-	2019	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR UPP BULUKUMBA	
1140	289885	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BULU KUMBA	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	2	SID KAJANG PROV. SULAWESI SELATAN	2014	681.208.000	-	✓	-	-	2014	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR UPP BULUKUMBA	

NO	KODE SATKER	NAMA UPT/SATKER	URAIAN BMN				TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (RP)	MANFAAT ASET TAK BERWUJUD				WAKTU DIRASAKANNYA MANFAAT	DURASI KEMANFAATAN ASET TAK BERWUJUD	RELEVANSI SAAT INI (BERMANFAAT/TIDAK)	UNIT KERJA YANG MEMANFAATKAN	KETERANGAN
			KODE BARANG	JENIS ATB	NUP	NAMA BARANG			NILAI EKONOMI	MANFAAT KEILMUAN	MANFAAT SOSIAL	MANFAAT LAINNYA					
1141	413439	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASAR	8010101001	Software Komputer	5	TKTM PM Buku Pelaut kepada Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar	2021	40.700.000	✓	-	-	✓	2023	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASAR	
1142	413439	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASAR	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	1	Software	2020	62.425.000	✓	-	-	✓	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASAR	
1143	413439	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASAR	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	2	DED Rehabilitasi Breakwater Pulau Lae-Lae dan Gusung	2022	98.766.510	-	✓	-	-	2022	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASAR	
1144	413439	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASAR	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	3	DED Rehabilitasi Jalan Akses Terminal Paotere	2022	98.920.170	-	✓	-	-	2022	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASAR	
1145	413439	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASAR	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	4	Software Pendukung Layanan Inaportnet	2022	185.238.720	-	-	-	✓	2022	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASAR	
1146	413439	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASAR	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	5	Penyusunan Kajian Manajemen Lalu Lintas Pelabuhan Makassar	2022	322.485.610	-	✓	-	-	2022	Tidak terbatas	Bermanfaat	KSOP MAKASSAR	
1147	413439	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASAR	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	6	Studi Penyusunan Dokumen Persyaratan Teknis Amdal Kawasan Pelabuhan Makassar	2022	513.399.730	-	✓	-	-	2022	Tidak terbatas	Bermanfaat	KSOP MAKASSAR	
1148	413439	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASAR	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	7	Penyusunan Roadmap Pelabuhan Utama Makassar Menuju World Class Port	2022	496.388.386	-	✓	-	-	2022	Tidak terbatas	Bermanfaat	KSOP MAKASSAR	
1149	413439	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASAR	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	11	Studi Reviu Rencana Induk Pelabuhan Makassar	2023	462.764.133	-	✓	-	-	2023	Tidak terbatas	Bermanfaat	KSOP MAKASSAR	
1150	413439	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASAR	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	13	Studi Lingkungan Pelabuhan Jinato	2024	844.443.681	✓	-	-	-	2024	Tidak terbatas	Bermanfaat	KSOP MAKASSAR	
1151	413439	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASAR	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	14	Studi Lingkungan Pelabuhan Leksula	2024	941.766.240	✓	-	-	-	2024	Tidak terbatas	Bermanfaat	KSOP MAKASSAR	
1152	413439	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASAR	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	15	Studi Lingkungan Pelabuhan Bonerate	2024	848.332.332	✓	-	-	-	2024	Tidak terbatas	Bermanfaat	KSOP MAKASSAR	
1153	413439	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASAR	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	16	Studi Rencana Induk DLKr dan DLKp Pelabuhan Pagimana	2024	1.514.964.470	✓	-	-	-	2024	Tidak terbatas	Bermanfaat	KSOP MAKASSAR	
1154	413439	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASAR	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	17	Studi DED Pelabuhan Leksula	2024	1.247.842.009	✓	-	-	-	2024	Tidak terbatas	Bermanfaat	KSOP MAKASSAR	
1155	413439	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASAR	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	18	Studi SID Pelabuhan Teluk Patipi	2024	1.214.742.674	✓	-	-	-	2024	Tidak terbatas	Bermanfaat	UPP JAMPEA	
1156	413439	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASAR	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	19	Studi DED Pelabuhan Pomako	2024	1.276.865.180	✓	-	-	-	2024	Tidak terbatas	Bermanfaat	UPP LEKSULA	
1157	413439	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASAR	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	20	Studi Lingkungan Pelabuhan Larea Rea	2024	1.431.474.715	✓	-	-	-	2024	Tidak terbatas	Bermanfaat	UPP SELAYAR	
1158	413441	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SELAYAR	8010101001	Software Komputer	1	TKTM PM Buku Pelaut kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Selayar	2021	378.240.500	-	✓	-	-	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	Kantor UPP Selayar	
1159	413441	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SELAYAR	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	2	RIP Plb.Selayar, Prov Sulawesi Selatan	2020	1.192.840.000	-	✓	-	-	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	Kantor UPP Selayar	
1160	413441	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SELAYAR	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	3	DED GUDANG DAN MESS PEGAWAI	2024	99.460.000	-	✓	-	-	2022	Tidak terbatas	Bermanfaat	Kantor UPP Selayar	
1161	413441	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SELAYAR	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	1	Studi Penyusunan Dokumen Persyaratan Teknis Amdal Pelabuhan Pamatata Kabupaten Selayar	2022	521.981.373	-	✓	-	-	2024	Tidak terbatas	Bermanfaat	Kantor UPP Selayar	
1162	413472	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN PALOPO	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	1	Studi DED Pelabuhan Palopo Provinsi Sulsel	2023	539.446.514	-	✓	-	-	2024	Tidak terbatas	Bermanfaat	**KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II PALOPO**	
1163	413488	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN MALILI	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	RIP DLKRP LAMPIA MUNTE	2018	1.454.508.000	✓	-	-	-	2023	Tidak terbatas	Bermanfaat	Kantor UPP Kelas III Malili	
1164	413709	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN MACCINI BAJI	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	FASPEL MACHINI BAJI	2016	328.000.000	-	-	-	-	31/12/2016	Tidak terbatas	Tidak	UPP Maccini Baji	
1165	413709	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN MACCINI BAJI	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	2	FASPEL PULAU SABUTUNG	2016	877.754.000	-	-	-	-	31/12/2016	Tidak terbatas	Tidak	UPP Maccini Baji	
1166	413709	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN MACCINI BAJI	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	3	FASPEL PULAU SAPUKA	2016	1.006.445.000	-	-	-	-	31/12/2016	Tidak terbatas	Tidak	UPP Maccini Baji	
1167	413709	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN MACCINI BAJI	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	4	FASPEL PULAU BALOANG	2016	569.357.000	-	-	-	-	31/12/2016	Tidak terbatas	Tidak	UPP Maccini Baji	
1168	413709	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN MACCINI BAJI	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	5	FASPEL PULAU SAILUS	2016	953.450.000	-	-	-	-	31/12/2016	Tidak terbatas	Tidak	UPP Maccini Baji	
1169	413709	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN MACCINI BAJI	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	6	FASPEL PULAU BALANGLOMPO	2016	888.494.000	-	-	-	-	31/12/2016	Tidak terbatas	Tidak	UPP Maccini Baji	
1170	413709	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN MACCINI BAJI	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	7	FASPEL PULAU KALUKALUKUANG	2016	987.985.000	-	-	-	-	31/12/2016	Tidak terbatas	Tidak	UPP Maccini Baji	
1171	413709	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN MACCINI BAJI	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	8	CV. FIRMA KONSULTAN KERUKUN	2020	304.183.600	-	-	-	-	08/09/2020	Tidak terbatas	Tidak	UPP Maccini Baji	
1172	413709	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN MACCINI BAJI	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	9	Reviu SID Pelabuhan Laut Sabutung, Prov. Sulawesi Selatan	2015	687.164.000	-	-	-	-	21/12/2015	Tidak terbatas	Tidak	UPP Maccini Baji	
1173	521815	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN JAMPEA	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	2	DED Pulo Madu	2024	99.955.500	✓	✓	✓	-	2024	Tidak terbatas	Bermanfaat	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN JAMPEA	
1174	521815	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN JAMPEA	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	3	DED Sisi Darat Pelabuhan Jampea	2024	89.569.400	✓	✓	✓	-	2024	Tidak terbatas	Bermanfaat	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN JAMPEA	
1175	521815	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN JAMPEA	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	4	DED Sisi Darat Pulau Rajuni	2024	89.369.400	✓	✓	✓	-	2024	Tidak terbatas	Bermanfaat	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN JAMPEA	
1176	521815	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN JAMPEA	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	1	Studi Penyusunan Detail Engineering Design Pelabuhan Bonerate Kabupaten Selayar	2022	312.971.650	✓	✓	✓	-	2022	Tidak terbatas	Bermanfaat	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN JAMPEA	
1177	521836	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN GARONGKONG	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	4	STUDI RIP GARONGKONG	2019	1.098.185.000	✓	✓	✓	-	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	KSOP Kelas IV Garongkong	
1178	559381	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SIWA	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	Amdal	2016	347.600.000	-	✓	✓	-	2016	Tidak terbatas	Tidak	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SIWA	PENYERAHAN P3D

NO	KODE SATKER	NAMA UPT/SATKER	URAIAN BMN				TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (RP)	MANFAAT ASET TAK BERWUJUD				WAKTU DIRASAKANNYA MANFAAT	DURASI KEMANFAATAN ASET TAK BERWUJUD	RELEVANSI SAAT INI (BERMANFAAT/TIDAK)	UNIT KERJA YANG MEMANFAATKAN	KETERANGAN
			KODE BARANG	JENIS ATB	NUP	NAMA BARANG			NILAI EKONOMI	MANFAAT KEILMUAN	MANFAAT SOSIAL	MANFAAT LAINNYA					
1179	287502	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KENDARI	8010101001	Software Komputer	1	TKTM PM Buku Pelaut kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Bontang	2021	40.700.000	-	✓	✓	-	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KENDARI	
1180	413494	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II BAU-BAU	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	RIP Lawele	2021	1.559.895.000	✓	✓	✓	✓	2016	Tidak terbatas	Bermanfaat	KSOP Kelas II Baubau	
1181	413494	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II BAU-BAU	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	2	Kajian KPBU Bau-Bau	2021	1.286.120.000	✓	✓	✓	✓	2016	Tidak terbatas	Bermanfaat	UPP Kelas III Pomalaa	
1182	413494	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II BAU-BAU	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	3	RIP DLKRP SIKELI	2018	1.183.847.500	✓	✓	✓	✓	2016	Tidak terbatas	Bermanfaat	KSOP Kelas II Baubau	
1183	413494	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II BAU-BAU	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	4	DED BAUBAU PROV. SULTRA	2014	530.557.500	✓	✓	✓	✓	2016	Tidak terbatas	Bermanfaat	UPP Kelas III Wanci	
1184	413494	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II BAU-BAU	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	5	Studi DED Baubau Prov. Sulawesi Tenggara	2019	588.337.500	✓	✓	✓	✓	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	KSOP Kelas II Baubau	
1185	413494	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II BAU-BAU	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	1	RIP/UK/UPL BATU ATAS	2016	1.465.350.000	✓	✓	✓	✓	2016	Tidak terbatas	Bermanfaat	KSOP Kelas II Baubau	
1186	413494	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II BAU-BAU	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	2	RIP. UK/UPL BOEPINANG	2016	1.460.550.000	✓	✓	✓	✓	2016	Tidak terbatas	Bermanfaat	KSOP Kelas II Baubau	
1187	413494	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II BAU-BAU	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	3	RIP. UK/UPL WAMENGKOLI	2016	1.379.150.000	✓	✓	✓	✓	2016	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II BAU-BAU	
1188	413494	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II BAU-BAU	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	4	RIP, UK/UPL WILKER WANCI	2016	1.458.450.000	✓	✓	✓	✓	2016	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II BAU-BAU	
1189	413494	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II BAU-BAU	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	5	DED dermaga kapal patroli	2021	1.000.000.000	✓	✓	✓	✓	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II BAU-BAU	
1190	413508	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KOLAKA	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	DED PELABUHAN WOTUNOHU PROV. SULTRA	2014	346.159.000	✓	-	-	-	2014-2015	Tidak terbatas	Tidak	UPP Kolaka	
1191	287537	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN AMBON	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	DED KALABAHI	2016	726.060.000	-	-	-	✓	2016	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN AMBON	
1192	287537	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN AMBON	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	3	DED SAPE	2016	609.800.000	-	-	-	✓	2016	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN AMBON	
1193	287537	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN AMBON	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	4	DED LEWOLEBA	2016	613.881.000	-	-	-	✓	2016	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN AMBON	
1194	287537	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN AMBON	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	6	DED JAILOLO	2016	746.800.000	-	-	-	✓	2016	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN AMBON	
1195	287537	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN AMBON	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	7	DED PATANI	2016	743.600.000	-	-	-	✓	2016	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN AMBON	
1196	287537	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN AMBON	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	8	DED TUAL	2016	747.600.000	-	-	-	✓	2016	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN AMBON	
1197	287537	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN AMBON	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	9	DED RAIJUNA	2016	624.350.000	-	-	-	✓	2016	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN AMBON	
1198	287537	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN AMBON	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	10	KPBU New Ambon	2021	99.825.000	-	-	-	✓	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN AMBON	
1199	287537	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN AMBON	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	2		2021	770.955.510	-	-	-	✓	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN AMBON	
1200	287558	DISTRIK NAVIGASI AMBON	8010101001	Software Komputer	2		2013	61.485.191	-	-	-	-	2013	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS I AMBON	
1201	287558	DISTRIK NAVIGASI AMBON	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	SUPERVISI PERENCANAAN	2016	109.410.000	-	-	-	✓	2016	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS I AMBON	
1202	287558	DISTRIK NAVIGASI AMBON	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	2	SUPERVISI PERENCANAAN	2016	115.550.000	-	-	-	✓	2016	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS I AMBON	
1203	287558	DISTRIK NAVIGASI AMBON	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	1	DETAIIL ENGINER DESIGN	2020	170.346.427	-	-	-	✓	2020	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS I AMBON	
1204	287558	DISTRIK NAVIGASI AMBON	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	2	DETAIIL ENGINER DESIGN	2020	170.346.427	-	-	-	✓	2020	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS I AMBON	
1205	287558	DISTRIK NAVIGASI AMBON	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	3	DETAIIL ENGINER DESIGN	2020	170.346.427	-	-	-	✓	2020	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS I AMBON	
1206	287558	DISTRIK NAVIGASI AMBON	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	4	DETAIIL ENGINER DESIGN	2020	170.346.428	-	-	-	✓	2020	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS I AMBON	
1207	287558	DISTRIK NAVIGASI AMBON	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	5	DETAIIL ENGINER DESIGN	2020	170.346.429	-	-	-	✓	2020	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS I AMBON	
1208	287558	DISTRIK NAVIGASI AMBON	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	6	DETAIIL ENGINER DESIGN	2020	170.346.431	-	-	-	✓	2020	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS I AMBON	
1209	287558	DISTRIK NAVIGASI AMBON	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	7	DETAIIL ENGINER DESIGN	2020	170.346.431	-	-	-	✓	2020	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS I AMBON	
1210	287558	DISTRIK NAVIGASI AMBON	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	9	DETAIIL ENGINER DESIGN	2020	283.084.500	-	-	-	✓	2020	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS I AMBON	
1211	287558	DISTRIK NAVIGASI AMBON	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	10	DETAIIL ENGINER DESIGN	2020	283.084.500	-	-	-	✓	2020	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS I AMBON	
1212	287558	DISTRIK NAVIGASI AMBON	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	11	DETAIIL ENGINER DESIGN	2020	283.084.500	-	-	-	✓	2020	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS I AMBON	
1213	287558	DISTRIK NAVIGASI AMBON	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	12	DETAIIL ENGINER DESIGN	2020	283.084.500	-	-	-	✓	2020	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS I AMBON	
1214	287558	DISTRIK NAVIGASI AMBON	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	13	DETAIIL ENGINER DESIGN	2020	283.084.500	-	-	-	✓	2020	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS I AMBON	
1215	287558	DISTRIK NAVIGASI AMBON	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	14	DETAIIL ENGINER DESIGN	2020	283.084.500	-	-	-	✓	2020	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS I AMBON	
1216	287558	DISTRIK NAVIGASI AMBON	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	15	DETAIIL ENGINER DESIGN	2020	283.084.500	-	-	-	✓	2020	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS I AMBON	

NO	KODE SATKER	NAMA UPT/SATKER	URAIAN BMN				TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (RP)	MANFAAT ASET TAK BERWUJUD				WAKTU DIRASAKANNYA MANFAAT	DURASI KEMANFAATAN ASET TAK BERWUJUD	RELEVANSI SAAT INI (BERMANFAAT/TIDAK)	UNIT KERJA YANG MEMANFAATKAN	KETERANGAN
			KODE BARANG	JENIS ATB	NUP	NAMA BARANG			NILAI EKONOMI	MANFAAT KEILMUAN	MANFAAT SOSIAL	MANFAAT LAINNYA					
1217	287558	DISTRIK NAVIGASI AMBON	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	16	DETAIIL ENGINER DESIGN	2020	283.084.500	-	-	-	✓	2020	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS I AMBON	
1218	287558	DISTRIK NAVIGASI AMBON	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	17	DETAIIL ENGINER DESIGN	2020	283.084.500	-	-	-	✓	2020	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI KELAS I AMBON	
1219	289911	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SAUMLAKI	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	DPLH Tepa	2021	630.441.020	-	-	-	✓	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SAUMLAKI	
1220	289911	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SAUMLAKI	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	2	DED SAUMLAKI MOLU MALU	2018	1.184.425.000	-	-	-	✓	2018	Tidak terbatas	Bermanfaat	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SAUMLAKI	
1221	289911	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SAUMLAKI	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	3		2020	1.051.600.000	-	-	-	✓	2020	Tidak terbatas	Bermanfaat	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SAUMLAKI	
1222	289911	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SAUMLAKI	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	4		2020	1.297.505.000	-	-	-	✓	2020	Tidak terbatas	Bermanfaat	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SAUMLAKI	
1223	289911	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SAUMLAKI	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	1	Studi Penyusunan DED Pelabuhan Dawelor Provinsi Maluku	2022	139.626.860	-	-	-	✓	2022	Tidak terbatas	Bermanfaat	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SAUMLAKI	
1224	413520	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TUAL	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	STUDI DED TUAL	2019	1.051.705.500	✓	✓	✓	-	2019 - 2069	50 Tahun	Bermanfaat	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TUAL	
1225	413633	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DOBO	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	DED PELABUHAN DOBO DAN LARAT PROV. MALUKU	2014	697.485.000	✓	✓	-	-	2019	8 Tahun	Bermanfaat	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DOBO	2019-2026
1226	413633	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DOBO	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	2	DPLH Dobo	2021	1.394.069.600	✓	✓	✓	-	2023	15 Tahun	Bermanfaat	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DOBO	2023-2037
1227	521878	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TULEHU	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	Penelitian dampak Lingkungan Hidup	2015	75.000.000	✓	✓	-	-	2015	Tidak terbatas	Tidak	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TULEHU	
1228	521878	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TULEHU	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	1	Studi Penyusunan DED Pelabuhan Tulehu Provinsi Maluku	2022	134.057.478	✓	✓	-	✓	2022	Tidak terbatas	Bermanfaat	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TULEHU	
1229	559463	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN WONRELI	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	3	STUDI RIP DLKRP KAIWATU MOA	2018	1.226.538.500	-	-	-	✓	2018	Tidak terbatas	Bermanfaat	UNIT PENYELENGGARA PELABBUHAN WONRELI	
1230	559463	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN WONRELI	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	1	Studi Penyusunan Dokumen Persyaratan Teknis UKL-UPL Pelabuhan Ilwaki Kabupaten Maluku Barat Daya	2022	494.180.024	-	-	-	✓	2022	Tidak terbatas	Bermanfaat	UNIT PENYELENGGARA PELABBUHAN WONRELI	
1231	559484	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BULA	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1		2020	1.124.053.700	-	✓	-	✓	2020	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BULA	
1232	652570	DISTRIK NAVIGASI TUAL	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	DED	2021	14.808.750	-	-	-	✓	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI TUAL	
1233	652570	DISTRIK NAVIGASI TUAL	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	2	DED	2021	383.800.000	-	-	-	✓	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI TUAL	
1234	652570	DISTRIK NAVIGASI TUAL	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	3	DED	2021	89.774.300	-	-	-	✓	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI TUAL	
1235	652570	DISTRIK NAVIGASI TUAL	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	4	DED	2021	99.200.200	-	-	-	✓	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI TUAL	
1236	652570	DISTRIK NAVIGASI TUAL	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	5	DED	2021	99.228.800	-	-	-	✓	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI TUAL	
1237	652570	DISTRIK NAVIGASI TUAL	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	6	DED	2021	61.845.300	-	-	-	✓	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI TUAL	
1238	652570	DISTRIK NAVIGASI TUAL	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	7	DED	2021	79.022.955	-	-	-	✓	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI TUAL	
1239	652570	DISTRIK NAVIGASI TUAL	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	8	DED	2021	79.535.362	-	-	-	✓	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI TUAL	
1240	652570	DISTRIK NAVIGASI TUAL	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	9	DED	2021	79.535.362	-	-	-	✓	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI TUAL	
1241	652570	DISTRIK NAVIGASI TUAL	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	10	DED	2021	49.500.000	-	-	-	✓	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI TUAL	
1242	652570	DISTRIK NAVIGASI TUAL	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	1	DED Pembangunan Pekerjaan Lanjutan Rambu Suar 10 M. Laut Merah/Hijau Konstruksi Single Pipe 4 Kaki	2024	98.368.200	-	-	-	✓	2024	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI TUAL	
1243	652570	DISTRIK NAVIGASI TUAL	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	2	DED Pembangunan Pekerjaan Lanjutan Rambu Suar 10 M. Laut Merah/Hijau Konstruksi Single Pipe 4 Kaki	2024	98.867.700	-	-	-	✓	2024	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI TUAL	
1244	652570	DISTRIK NAVIGASI TUAL	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	3	DED Replacement Menara Suar Dan Fasilitas Pendukung 40 M Darat Konstruksi Beton	2024	99.267.300	-	-	-	✓	2024	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI TUAL	
1245	652570	DISTRIK NAVIGASI TUAL	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	4	DED Replacement Menara Suar Dan Fasilitas Pendukung 40 M Darat Konstruksi Beton	2024	99.056.400	-	-	-	✓	2024	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI TUAL	
1246	652584	PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI DANAR / TUAL	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	-	2020	14.135.000	-	-	-	✓	2020	-	Tidak	PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI DANAR / TUAL	
1247	652584	PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI DANAR / TUAL	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	2		2020	45.292.500	-	-	-	✓	2020	-	Tidak	PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI DANAR / TUAL	
1248	652584	PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI DANAR / TUAL	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	3		2020	7.300.150	-	-	-	✓	2020	-	Tidak	PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI DANAR / TUAL	
1249	287579	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BENOA	8010101001	Software Komputer	9	TKTM SID 2022 kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa	2022	156.015.933	✓	✓	✓	✓	2022	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BENOA	
1250	521904	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN NUSA PENIDA	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	STUDI DED NUSAPENIDA	2019	894.085.500	✓	-	-	-	5 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN NUSA PENIDA	
1251	521904	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN NUSA PENIDA	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	2	Hasil Kajian Mess	2024	43.211.412	✓	-	-	-	1 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN NUSA PENIDA	
1252	521946	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SAPE	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	RIP DLKRP SAPE	2018	1.177.000.000	✓	✓	✓	-	2018	Tidak terbatas	Bermanfaat	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SAPE	
1253	559510	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN PEMENANG	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	3	RIP DLKRP PEMENANG PROV. NTB	2022	1.141.745.000	-	-	-	-	2022	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN PEMENANG	
1254	652559	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BENETE	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1		2020	1.090.595.000	-	-	-	-	2020	Tidak terbatas	Bermanfaat	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BENETE	

NO	KODE SATKER	NAMA UPT/SATKER	URAIAN BMN				TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (RP)	MANFAAT ASET TAK BERWUJUD				WAKTU DIRASAKANNYA MANFAAT	DURASI KEMANFAATAN ASET TAK BERWUJUD	RELEVANSI SAAT INI (BERMANFAAT/TIDAK)	UNIT KERJA YANG MEMANFAATKAN	KETERANGAN
			KODE BARANG	JENIS ATB	NUP	NAMA BARANG			NILAI EKONOMI	MANFAAT KEILMUAN	MANFAAT SOSIAL	MANFAAT LAINNYA					
1255	287715	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN WAINGAPU	8010101001	Software Komputer	1	Software	2019	361.900.000	✓	-	-	-	2019	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV WAINGAPU	
1256	287715	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN WAINGAPU	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	DED Pelabuhan Laut Pulau Salura, Prov. NTT	2015	354.530.000	✓	-	-	✓	2015	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV WAINGAPU	
1257	287715	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN WAINGAPU	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	2	DED PELABUHAN BAING PROV. NTT	2015	354.530.000	✓	-	-	✓	2015	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV WAINGAPU	
1258	287736	DISTRIK NAVIGASI KUPANG	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	Detail Enginering Desain	2021	99.500.000	✓	-	-	-	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI TIPE A KELAS II KUPANG	
1259	287736	DISTRIK NAVIGASI KUPANG	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	2	Detail Engginering Desain	2021	99.500.000	✓	-	-	-	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI TIPE A KELAS II KUPANG	
1260	287736	DISTRIK NAVIGASI KUPANG	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	3	Detail Engginering Desain	2021	99.500.000	✓	-	-	-	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI TIPE A KELAS II KUPANG	
1261	287736	DISTRIK NAVIGASI KUPANG	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	4	Detail Engginering Desain	2021	99.500.000	✓	-	-	-	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI TIPE A KELAS II KUPANG	
1262	287736	DISTRIK NAVIGASI KUPANG	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	5	Detail Engginering Desain	2021	99.500.000	✓	-	-	-	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI TIPE A KELAS II KUPANG	
1263	287736	DISTRIK NAVIGASI KUPANG	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	6	Detail Engginering Desain	2022	438.476.300	✓	-	-	-	2022	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI TIPE A KELAS II KUPANG	
1264	287736	DISTRIK NAVIGASI KUPANG	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	7	Detail Engginering Desain	2022	435.421.050	✓	-	-	-	2022	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI TIPE A KELAS II KUPANG	
1265	287736	DISTRIK NAVIGASI KUPANG	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	8	DED	2022	99.500.000	✓	-	-	-	2022	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI TIPE A KELAS II KUPANG	
1266	287736	DISTRIK NAVIGASI KUPANG	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	9	DED	2022	99.500.000	✓	-	-	-	2022	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI TIPE A KELAS II KUPANG	
1267	287736	DISTRIK NAVIGASI KUPANG	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	10	DED	2022	99.500.000	✓	-	-	-	2022	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI TIPE A KELAS II KUPANG	
1268	289949	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN LARANTUKA	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	5	RIP Plb Larantuka Prop NTT	2022	1.012.770.000	✓	-	-	-	2022	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN LARANTUKA	
1269	289949	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN LARANTUKA	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	6	RIP DLKRP TOBILOTA PROV NTT	2022	1.201.750.000	✓	-	-	-	2022	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN LARANTUKA	
1270	289953	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III ATAPUPU	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	DED Atapupu, Prov. NTT	2016	699.052.000	-	-	-	✓	2016	Tidak terbatas	Bermanfaat	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN ATAPUPU	
1271	289960	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN REO	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	DED Pelabuhan Laut Reo, Prov. NTT	2015	350.845.000	-	-	-	✓	2015	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR UPP REO	
1272	517904	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN WAIKELO	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1		2020	863.428.000	-	-	-	✓	2020	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR UPP KELAS III WAIKELO	
1273	517904	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN WAIKELO	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	2	DED Waikelo, Prov. NTT	2016	839.000.000	-	-	-	✓	2016	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR UPP KELAS III WAIKELO	
1274	517904	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN WAIKELO	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	3	RIP Waikelo	2021	1.381.792.350	-	-	-	✓	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR UPP KELAS III WAIKELO	
1275	521950	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BA'A	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	DED Pelabuhan Ndao Prov. NTT	2014	541.345.200	✓	-	-	✓	2018	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III BA'A	
1276	521950	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BA'A	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	2	STUDI DED PLBHN BAA	2018	974.028.000	✓	-	-	✓	2014	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III BA'A	
1277	522578	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KALABAHI	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	STUDI RIP DLKRP MORU	2018	1.159.983.000	✓	-	-	-	2018	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KALABAHI	
1278	522578	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KALABAHI	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	2	DED Moru, Prov. NTT	2016	598.372.000	✓	-	-	-	2016	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KALABAHI	
1279	522582	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KUPANG	8010101001	Software Komputer	1	Website	2020	190.000.000	✓	✓	✓	✓	± 2 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	KSO Kelas III Kupang	
1280	559531	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SEBA	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	DED Pelabuhan Laut Seba, Prov. NTT	2015	335.857.500	-	-	-	✓	2015	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SEBA	
1281	559531	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SEBA	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	2	DED PELABUHAN BIU PROV. NTT	2015	335.857.500	-	-	-	✓	2015	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SEBA	
1282	559531	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SEBA	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	3		2020	1.147.250.000	-	-	-	✓	2020	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SEBA	
1283	559531	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SEBA	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	4	DED RAIJUA	2018	957.316.000	-	-	-	✓	2018	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SEBA	
1284	559531	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SEBA	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	1		2016	750.222.000	-	-	-	✓	2016	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SEBA	
1285	559531	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SEBA	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	2		2016	759.385.000	-	-	-	✓	2016	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SEBA	
1286	559531	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SEBA	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	3		2016	657.635.000	-	-	-	✓	2016	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SEBA	
1287	559531	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SEBA	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	4		2016	757.212.500	-	-	-	✓	2016	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SEBA	
1288	559531	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SEBA	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	5		2016	598.675.000	-	-	-	✓	2016	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SEBA	
1289	559552	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS III LABUHAN BAJO	8010101001	Software Komputer	1	TKTM PM Buku Pelaut kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Labuhan Bajo	2021	379.192.000	✓	-	✓	✓	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	KSOP Kelas III Labuan Bajo	Digunakan sendiri untuk operasional
1290	288841	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN NABIRE	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	HASIL KAJIAN/ PENELITIAN (STUDI PENATAAN, PELAYANAN PENUMPANG NABIRE, PROVINSI PAPUA)	2016	705.100.000	-	-	✓	-	2016	Tidak terbatas	Bermanfaat	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN NABIRE	
1291	517950	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN B A D E	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	4	DED GEDUNG PELAYANAN UPP BADE	2024	198.942.000	-	-	-	-	2024	Tidak terbatas	Bermanfaat	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN B A D E	
1292	521967	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN POMAKO I/POMAKO II	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	DED PEMBANGUNAN DAN FASILITIAS PELABUHAN	2022	77.490.000	-	-	✓	-	2022	Tidak terbatas	Bermanfaat	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN POMAKO I/POMAKO II	

NO	KODE SATKER	NAMA UPT/SATKER	URAIAN BMN				TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (RP)	MANFAAT ASET TAK BERWUJUD				WAKTU DIRASAKANNYA MANFAAT	DURASI KEMANFAATAN ASET TAK BERWUJUD	RELEVANSI SAAT INI (BERMANFAAT/TIDAK)	UNIT KERJA YANG MEMANFAATKAN	KETERANGAN
			KODE BARANG	JENIS ATB	NUP	NAMA BARANG			NILAI EKONOMI	MANFAAT KEILMUAN	MANFAAT SOSIAL	MANFAAT LAINNYA					
1293	521967	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN POMAKO I/POMAKO II	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	1	DOKUMEN PERENCANAAN GEDUNG KANTOR UPP POMAKO	2020	188.630.000	✓	-	-	-	2020	Tidak terbatas	Bermanfaat	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN POMAKO I/POMAKO II	
1294	521967	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN POMAKO I/POMAKO II	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	2	DOKUMEN PERENCANAAN JALAN, MEDIAN, DAN DRAINASE	2020	133.164.000	✓	-	-	-	2020	Tidak terbatas	Bermanfaat	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN POMAKO I/POMAKO II	
1295	690777	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III WINI	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	DED WINI	2018	965.217.000	✓	✓	✓	✓	2021 PEKERJAAN PELEBARAN DERMAGA	Tidak terbatas	BERMANFAAT	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III WINI	
1296	690777	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III WINI	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	2	STUDI RIP DLKRP WINI	2018	1.179.126.300	✓	✓	✓	✓	2024 PEKERJAAN LAPANGAN PENUMPUKAN	Tidak terbatas	BERMANFAAT	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III WINI	
1297	288021	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PULAU BAAI	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	DED GEDUNG BANGUNAN KSOP PULAU BAAI BKL	2024	93.240.000	-	✓	-	✓	Hingga terwujudnya gedung kantor KSOP Pulau Baai Yang Baru	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PULAU BAAI	Dengan adanya DED gedung kantor beru KSOP meminimalisir adanya resiko tambahan dan kesalahan maupun biaya tak terduga untuk suatu fisik konstruksi jadi DED sangat membantu dalam merencanakan suatu konstruksi
1298	287541	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TERNATE	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	1	Studi DED Pelabuhan Semut Mangga Dua Ternate Provinsi Maluku Utara	2023	1.197.870.844	✓	✓	✓	✓	2023	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TERNATE	TKTM dari KSOP Makassar
1299	413642	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TOBELO	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	DED TOBELO MALUKU UTARA	2015	541.448.188	✓	✓	✓	-	2016	Tidak terbatas	Bermanfaat	Kantor UPP Kelas I Tobelo	
1300	413642	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TOBELO	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	2	SID KAO PROV. MALUT	2014	758.285.000	✓	✓	✓	-	2016	Tidak terbatas	Bermanfaat	Kantor UPP Kelas I Tobelo	
1301	413658	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BABANG	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	DED Pelabuhan Yaba Prov. Maluku Utara	2014	356.620.000	✓	✓	✓	-	2016	Tidak terbatas	Bermanfaat	UPP Babang	
1302	413658	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BABANG	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	3	Studi Penataan Pelayanan Penumpang Babang, Prov. Maluku Utara	2016	678.400.000	✓	✓	✓	-	2015	Tidak terbatas	Bermanfaat	UPP Babang	
1303	413658	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BABANG	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	4	RIP Pasipalele-Pigaraja	2021	1.331.817.800	✓	✓	✓	-	2022	Tidak terbatas	Bermanfaat	UPP Babang	
1304	413658	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BABANG	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	5	DED BABANG MALUKU UTARA	2015	539.547.800	✓	✓	✓	-	2015	Tidak terbatas	Bermanfaat	UPP Babang	
1305	413664	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II SANANA	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	1	RIP Bobong	2015	781.300.000	✓	✓	-	✓	2015	Tidak terbatas	Bermanfaat	UPP SANANA	
1306	413664	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II SANANA	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	2	RIP Lede TA. 2015	2015	770.800.000	✓	✓	-	✓	2015	Tidak terbatas	Bermanfaat	UPP SANANA	
1307	521899	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II WEDA	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	2	STUDI RIP WEDA MAFA	2019	1.305.887.000	-	-	✓	-	2019	Tidak terbatas	Tidak	UPP Kelas II Weda	
1308	559400	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II SOA-SIU	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	2	RIP Soasio	2021	1.068.507.000	✓	✓	✓	-	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	Kantor UPP Soasio	
1309	559421	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN JAILOLO	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1		2020	1.121.395.000	✓	✓	✓	-	2020	Tidak terbatas	Bermanfaat	UPP JAILOLO	
1310	559421	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN JAILOLO	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	2	UKL UPL Matui Jailolo	2021	843.062.000	✓	✓	✓	-	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	UPP JAILOLO	
1311	559421	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN JAILOLO	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	1	Instalasi	2023	21.297.000	-	✓	✓	-	2023	Tidak terbatas	Bermanfaat	UPP JAILOLO	
1312	559421	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN JAILOLO	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	2	Penerangan dan Instalasi Pelabuhan Jailolo	2023	47.000.000	-	-	-	-	2023	Tidak terbatas	Tidak	UPP JAILOLO	Kesalahan pencatatan akan dilakukan koreksi
1313	559421	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN JAILOLO	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	3	Dokumen	2024	41.664.000	✓	✓	✓	-	1 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	UPP JAILOLO	
1314	559438	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DARUBA	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	RIP Daruba	2021	1.332.250.000	✓	-	✓	✓	**15/11/2021**	Tidak terbatas	Bermanfaat	Satker	
1315	559442	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN LAIWUI	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	1	Hasil Penyusunan Dokumen RIP Pelabuhan Laiwui	2021	904.800.000	✓	✓	✓	✓	2015	Tidak terbatas	Bermanfaat	UPP Laiwui	
1316	559470	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BULI	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	**SID BICOLI**	2014	733.800.000	✓	✓	✓	-	11 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	UPP BULI	
1317	559470	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BULI	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	1	STUDI PENYUSUNAN UPLUKL BICOLI	2015	130.320.000	✓	✓	✓	-	10 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	UPP BULI	
1318	559470	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BULI	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	2	RIP PATLEAN	2015	568.430.000	✓	✓	✓	-	10 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	UPP BULI	
1319	690778	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III SAKETA	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	Reviu SID Pelabuhan Laut Koititi, Prov. Maluku Utara	2015	734.415.000	✓	✓	✓	✓	2015	Tidak terbatas	Bermanfaat	UPP Kelas III Saketa	
1320	413670	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	8010101001	Software Komputer	1	SISTEM INFORMASI	2012	36.300.000	✓	✓	-	-	2012	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	
1321	413670	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	8010101001	Software Komputer	2	SISTEM INFORMASI	2012	41.800.000	✓	✓	-	-	2012	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	
1322	413670	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	8010101001	Software Komputer	9	XINIX	2013	11.550.000	✓	✓	-	-	2013	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	
1323	413670	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	8010101001	Software Komputer	10	XINIX	2013	11.550.000	✓	✓	-	-	2013	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	
1324	413670	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	8010101001	Software Komputer	11	XINIX	2013	11.550.000	✓	✓	-	-	2013	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	
1325	413670	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	8010101001	Software Komputer	12	XINIX	2013	11.550.000	✓	✓	-	-	2013	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	

NO	KODE SATKER	NAMA UPT/SATKER	URAIAN BMN				TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (RP)	MANFAAT ASET TAK BERWUJUD				WAKTU DIRASAKANNYA MANFAAT	DURASI KEMANFAATAN ASET TAK BERWUJUD	RELEVANSI SAAT INI (BERMANFAAT/TIDAK)	UNIT KERJA YANG MEMANFAATKAN	KETERANGAN
			KODE BARANG	JENIS ATB	NUP	NAMA BARANG			NILAI EKONOMI	MANFAAT KEILMUAN	MANFAAT SOSIAL	MANFAAT LAINNYA					
1326	413670	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	8010101001	Software Komputer	13	XINIX	2013	11.550.000	✓	✓	-	-	2013	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	
1327	413670	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	8010101001	Software Komputer	14	XINIX	2013	11.550.000	✓	✓	-	-	2013	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	
1328	413670	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	8010101001	Software Komputer	15	XINIX	2013	11.550.000	✓	✓	-	-	2013	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	
1329	413670	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	8010101001	Software Komputer	16	XINIX	2013	11.550.000	✓	✓	-	-	2013	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	
1330	413670	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	8010101001	Software Komputer	17	XINIX	2013	11.550.000	✓	✓	-	-	2013	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	
1331	413670	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	8010101001	Software Komputer	18	XINIX	2013	11.550.000	✓	✓	-	-	2013	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	
1332	413670	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	8010101001	Software Komputer	19	XINIX	2013	11.550.000	✓	✓	-	-	2013	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	
1333	413670	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	8010101001	Software Komputer	20	XINIX	2013	11.550.000	✓	✓	-	-	2013	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	
1334	413670	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	8010101001	Software Komputer	21	XINIX	2013	11.550.000	✓	✓	-	-	2013	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	
1335	413670	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	8010101001	Software Komputer	22	XINIX	2013	11.550.000	✓	✓	-	-	2013	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	
1336	413670	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	8010101001	Software Komputer	23	XINIX	2013	11.550.000	✓	✓	-	-	2013	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	
1337	413670	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	8010101001	Software Komputer	24	XINIX	2013	11.550.000	✓	✓	-	-	2013	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	
1338	413670	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	8010101001	Software Komputer	25	-	2013	34.100.000	✓	✓	-	-	2013	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	
1339	413670	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	8010101001	Software Komputer	26	XINIX	2014	12.760.000	✓	✓	-	-	2014	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	
1340	413670	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	8010101001	Software Komputer	27	XINIX	2014	12.760.000	✓	✓	-	-	2014	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	
1341	413670	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	8010101001	Software Komputer	28	XINIX	2014	12.760.000	✓	✓	-	-	2014	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	
1342	413670	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	8010101001	Software Komputer	29	XINIX	2014	12.760.000	✓	✓	-	-	2014	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	
1343	413670	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	8010101001	Software Komputer	30	XINIX	2014	12.760.000	✓	✓	-	-	2014	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	
1344	413670	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	8010101001	Software Komputer	31	XINIX	2014	12.760.000	✓	✓	-	-	2014	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	
1345	413670	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	8010101001	Software Komputer	32	XINIX	2014	12.760.000	✓	✓	-	-	2014	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	
1346	413670	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	8010101001	Software Komputer	33	XINIX	2014	12.760.000	✓	✓	-	-	2014	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	
1347	413670	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	8010101001	Software Komputer	34	XINIX	2014	12.760.000	✓	✓	-	-	2014	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	
1348	413670	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	8010101001	Software Komputer	35	XINIX	2014	12.760.000	✓	✓	-	-	2014	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	
1349	413670	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	8010101001	Software Komputer	36		2014	44.000.000	✓	✓	-	-	2014	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	
1350	413670	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	8010101001	Software Komputer	38	Perangkat Sistem Pemanduan Kapal	2015	2.885.740.000	✓	✓	✓	✓	2015	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	
1351	413670	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	8010101001	Software Komputer	39	Aplikasi The IMO Vega Database	2023	23.665.200	✓	✓	✓	✓	2023	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	
1352	413670	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	SI KSOP BANTEN	2012	757.325.000	✓	✓	✓	✓	2012	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	
1353	413670	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	2	SI KSOP BANTEN	2012	1.381.825.000	✓	✓	✓	✓	2012	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	
1354	413670	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	3	SI KSOP BANTEN	2012	771.784.000	✓	✓	✓	✓	2012	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	
1355	413670	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	4	SI KSOP BANTEN	2012	351.174.800	✓	✓	✓	✓	2012	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	
1356	413670	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	5	DED GEDUNG KANTOR	2023	432.605.850	✓	✓	✓	✓	2023	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANTEN	
1357	413262	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PANGKAL BALAM	8010101001	Software Komputer	1	Software	2019	361.900.000	✓	✓	✓	✓	2019	Tidak terbatas	Tidak	KSOP Kelas IV Pangkal Balam	
1358	413271	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN MUNTOK	8010101001	Software Komputer	1	02/P.I/DKP/PFPK/I-21	2021	375.331.110	✓	✓	✓	✓	2022	Tidak terbatas	Bermanfaat	KSOP Kelas IV Munttok	
1359	413752	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN K W A N D A N G	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	STUDI RIP KWANDANG	2019	1.117.820.000	-	-	✓	-	2019	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III KWANDANG	
1360	652563	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV ANGGREK	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	KAJIAN KPBU ANGGREK	2021	3.512.374.850	-	-	✓	-	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV ANGGREK	
1361	413180	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TANJUNG BALAI KARIMUN	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	2	Dokumen Spesifikasi Teknis	2024	49.950.000	✓	✓	✓	✓	1 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TANJUNG BALAI KARIMUN	
1362	413180	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TANJUNG BALAI KARIMUN	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	3	DED Bangunan kantor	2024	397.863.960	✓	✓	✓	✓	1 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TANJUNG BALAI KARIMUN	
1363	413231	DISTRIK NAVIGASI TANJUNG PINANG	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	2	DED Talud Menara Suar Z.Bruder	2022	99.075.500	-	-	-	-	2022	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI TANJUNG PINANG	

NO	KODE SATKER	NAMA UPT/SATKER	URAIAN BMN				TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (RP)	MANFAAT ASET TAK BERWUJUD				WAKTU DIRASAKANNYA MANFAAT	DURASI KEMANFAATAN ASET TAK BERWUJUD	RELEVANSI SAAT INI (BERMANFAAT/TIDAK)	UNIT KERJA YANG MEMANFAATKAN	KETERANGAN
			KODE BARANG	JENIS ATB	NUP	NAMA BARANG			NILAI EKONOMI	MANFAAT KEILMUAN	MANFAAT SOSIAL	MANFAAT LAINNYA					
1364	413231	DISTRIK NAVIGASI TANJUNG PINANG	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	3	Biaya konsultan Perencana P.Nipah	2015	120.958.750	-	-	-	-	2015	Tidak terbatas	Tidak	DISTRIK NAVIGASI TANJUNG PINANG	
1365	413231	DISTRIK NAVIGASI TANJUNG PINANG	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	4	SID Karang Singa	2017	500.704.023	-	-	-	-	2017	Tidak terbatas	Tidak	DISTRIK NAVIGASI TANJUNG PINANG	
1366	413231	DISTRIK NAVIGASI TANJUNG PINANG	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	5	DED VTS Batam	2019	97.346.500	-	-	-	-	2019	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI TANJUNG PINANG	
1367	413231	DISTRIK NAVIGASI TANJUNG PINANG	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	6	DED Mensu Berhala	2019	74.604.000	-	-	-	-	2019	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI TANJUNG PINANG	
1368	413231	DISTRIK NAVIGASI TANJUNG PINANG	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	7	DED Talud Mensu Tunjuk	2019	62.614.000	-	-	-	-	2019	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI TANJUNG PINANG	
1369	413231	DISTRIK NAVIGASI TANJUNG PINANG	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	8	DED Karang Singa	2021	3.941.225.900	-	-	-	-	2021/2022	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI TANJUNG PINANG	
1370	413231	DISTRIK NAVIGASI TANJUNG PINANG	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	9	Kajian Teknis KN. Jadayat	2024	90.446.850	-	-	-	-	2024	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI TANJUNG PINANG	
1371	521527	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KHUSUS BATAM	8010101001	Software Komputer	4	Software	2015	715.000	-	✓	-	-	2015/2012	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KHUSUS BATAM	
1372	521527	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KHUSUS BATAM	8010101001	Software Komputer	5	Software	2015	715.000	-	✓	-	-	2015/2012	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KHUSUS BATAM	
1373	521527	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KHUSUS BATAM	8010101001	Software Komputer	6	Software	2015	2.885.740.000	-	✓	-	-	2015/2012	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KHUSUS BATAM	
1374	521602	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SENAYANG	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	RIP Senayang	2021	1.269.330.000	✓	-	-	-	4 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SENAYANG	
1375	528895	PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI TANJUNG UBAN	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	DED Pembangunan Pos Pengawas	2023	19.991.000	-	-	-	-	2023/2022	Tidak terbatas	Bermanfaat	PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI TANJUNG UBAN	
1376	528895	PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI TANJUNG UBAN	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	2	DED Pembangunan Pos Pengawas	2023	19.930.000	-	-	-	-	2023/2022	Tidak terbatas	Bermanfaat	PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI TANJUNG UBAN	
1377	528895	PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI TANJUNG UBAN	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	3	DED Pembangunan Pos Pengawas	2023	19.930.000	-	-	-	-	2023/2022	Tidak terbatas	Bermanfaat	PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI TANJUNG UBAN	
1378	287935	DISTRIK NAVIGASI SORONG	8010101001	Software Komputer	2	Hasil Kajian	2013	61.485.191	-	✓	-	-	2013	Tidak terbatas	Tidak	DISTRIK NAVIGASI SORONG	
1379	287935	DISTRIK NAVIGASI SORONG	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	1	SID TALUD MENSU	2018	432.685.600	✓	-	-	-	2018	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI SORONG	
1380	287935	DISTRIK NAVIGASI SORONG	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	2	PERENCANAAN PENIMBUNAN	2018	91.305.000	✓	-	-	-	2018	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI SORONG	
1381	287935	DISTRIK NAVIGASI SORONG	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	5	C-SCOPE Software VTS System	2023	126.040.500	✓	-	-	-	2023	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI SORONG	
1382	287935	DISTRIK NAVIGASI SORONG	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	6	C-SCOPE Software VTS System	2023	126.040.500	✓	-	-	-	2023	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI SORONG	
1383	289981	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN K A I M A N A	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	DED Pelabuhan Laut Kaimana, Prov. Papua Barat	2015	662.695.000	-	✓	-	-	2015	Tidak terbatas	Bermanfaat	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN K A I M A N A	
1384	517911	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN B I N T U N I	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	DED PELABUHAN BABO	2021	89.900.000	-	✓	-	-	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN B I N T U N I	
1385	413463	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III MAMUJU	8010101001	Software Komputer	1	Software	2019	361.900.000	-	-	✓	-	2019	Tidak terbatas	Bermanfaat	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Mamuju	
1386	559374	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BELANG-BELANG	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	STUDI DED P. KAYU	2019	953.892.500	✓	✓	✓	-	2019	Tidak terbatas	Bermanfaat	Kantor UPP Kelas III Belang-Belang	
1387	559374	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BELANG-BELANG	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	2	RIP Belang-Belang	2021	1.346.550.000	✓	✓	✓	-	2021	Tidak terbatas	Bermanfaat	Kantor UPP Kelas III Belang-Belang	
1388	417707	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN PULAU BUNYU	8010101001	Software Komputer	1	Sudah Dihapus	2022	30.355.000	✓	-	-	-	2022/2022	Tidak terbatas	Tidak	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN PULAU BUNYU	
1389	417707	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN PULAU BUNYU	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	STUDI RIP DLKRP P.BUNYU	2018	1.183.435.000	✓	-	-	-	2018	Tidak terbatas	Bermanfaat	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN PULAU BUNYU	
1390	417707	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN PULAU BUNYU	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	2	STUDI SID P. BUNYU	2018	968.324.000	✓	-	-	-	2018	Tidak terbatas	Bermanfaat	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN PULAU BUNYU	
1391	559311	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SUNGAI NYAMUK	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	DED Sungai Nyamuk, Kalimantan Utara	2016	426.916.000	-	-	-	-	2016/2012	Tidak terbatas	Tidak	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SUNGAI NYAMUK	
1392	559311	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SUNGAI NYAMUK	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	2	DED	2020	1.333.200.000	✓	✓	-	-	2016	Tidak terbatas	Bermanfaat	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SUNGAI NYAMUK	
1393	561712	DISTRIK NAVIGASI TARAKAN	8010101001	Software Komputer	1	Pengadaan PC Software perangkat GMDSS	2020	259.000.000	✓	✓	-	-	2020	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI TARAKAN	
1394	561712	DISTRIK NAVIGASI TARAKAN	8010101001	Software Komputer	2		2020	268.000.000	✓	✓	✓	✓	2020/2022	Tidak terbatas	Bermanfaat	DISTRIK NAVIGASI TARAKAN	
1395	412860	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN CILACAP	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	Perencanaan dokumen rehab rumah dinas 2025	2024	33.096.500	✓	-	-	-	1 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN CILACAP	
1396	412860	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN CILACAP	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	2	Perencanaan Rehab Rumah Dinas Jalan gayam	2024	33.096.500	✓	-	-	-	1 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN CILACAP	
1397	412860	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN CILACAP	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	3	Perencaan rehab rumah dinas jalan gayam 27B	2024	33.096.500	✓	-	-	-	1 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN CILACAP	
1398	559360	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN JENEPONTO	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	1	Detail Engineering Design (DED) Jeneponto	2024	99.980.000	✓	✓	-	-	1 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN JENEPONTO	
1399	559360	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN JENEPONTO	8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	2	Detail Engineering Design (DED) Wilker Bantaeng	2024	99.970.000	-	✓	-	-	1 Tahun	Tidak terbatas	Bermanfaat	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN JENEPONTO	
1400	559395	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN LAPUKO	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	1	Studi Lingkungan Pelabuhan Laut Lapuko Kabupaten Konawe Selatan	2024	1.193.852.896	✓	✓	✓	✓	2023	Tidak terbatas	Bermanfaat	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN LAPUKO	
					1398			**910.030.295.941**									